PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBAK

LEBAK RUHAY!

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

## KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 - 2029

**Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 4 Tahun 2025**

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
18. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
19. Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi Bupati dan program pembangunan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada

a. RPJPD;
b. RTRW;
c. RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi; dan
d. RPJMN.

BAB II

RPJMD

Pasal 3

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:

| | |
|---|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB IV | PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH |
| BAB V | PENUTUP |

(3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB III

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
a. bencana;
b. guncangan politik;
c. krisis ekonomi;
d. konflik sosial;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB IV
## PENGENDALIAN DAN EVALUASI
### Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

(4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V
## KETENTUAN LAIN-LAIN
### Pasal 8

Dalam hal RPJMD Tahun 2025-2029 telah habis masa periodenya, dan RPJMD Tahun 2030-2034 belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 AGUSTUS 2025

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : ( 4, 24/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan tata pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja.

Sebagai landasan dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan kerangka dasar sebagai acuan berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi Daerah dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan di Daerah dengan memperhatikan kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat secara komprehensif serta berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arah yang tepat dan jelas kepada segenap penyelenggara pemerintah, masyarakat, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lebak, membentuk komitmen bersama

antara pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi Kabupaten Lebak serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin aplikasi kebijakan pembangunan jangka panjang secara konsisten, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pembangunan Daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan warga masyarakat, memuat kegiatan pembangunan yang tanpa henti dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar, sehingga sangat fleksibel dan memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunannya.

Kurun waktu Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Lebak I Tahun 2025, RKPD Kabupaten Lebak II Tahun 2026, RKPD Kabupaten Lebak III Tahun 2027, RKPD Kabupaten Lebak IV Tahun 2028, RKPD Kabupaten Lebak V Tahun 2029.

RPJMD Kabupaten Lebak digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Lebak. Pertahapan rencana pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD Kabupaten Lebak sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJMD Kabupaten Lebak memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program setiap PD, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal Daerah dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Upaya pencapaian visi dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dilakukan melalui beberapa pendekatan penting, yaitu pengendalian, evaluasi, manajemen risiko, serta tindakan

lainnya seperti penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, kolaborasi lintas sektor serta inovasi kebijakan.

Perencanaan jangka menengah lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan pada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategi, individu-individu pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengedepankan kepentingan warga masyarakat sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

a. bencana terdiri dari bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya termasuk gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
b. guncangan politik mengacu pada situasi di mana terjadi perubahan besar dan signifikan dalam struktur, sistem, atau stabilitas politik suatu negara atau wilayah. Ini bisa berupa pergantian pemerintahan yang tiba-tiba, kudeta, revolusi, perang saudara, atau krisis politik lainnya yang mengguncang tatanan yang ada.
c. krisis ekonomi adalah situasi di mana ekonomi suatu negara mengalami penurunan kekuatannya secara tiba-tiba, penurunan yang biasanya disebabkan oleh krisis keuangan
d. konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya.
e. gangguan keamanan adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas nasional.

f. pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru.

g. perubahan kebijakan nasional adalah proses perubahan atau modifikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tingkat nasional.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 2025

# Kata Pengantar

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Kabupaten Lebak melakukan Penyusunan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah) Kabupaten Lebak Tahun 2025 – 2029 sebagai implementasi visi dan misi Bupati Lebak ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah. RPJMD yang disusun memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Dokumen ini menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, serta memuat rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah dilantik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam rangkaian kegiatan ini.

Tim Penyusun

# Daftar Isi


KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR TABEL xi

**BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang I 1

1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan I 2

1.1.2. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I 4

1.2. Maksud dan Tujuan I 8

1.2.1. Maksud I 8

1.2.2. Tujuan I 8

1.3. Sistematika Penulisan I 9

**BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II 1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II 1

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah II 1

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam II 17

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II 28

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan II 36

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas II 52

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II 58

2.1.1.7. Demografi II 63

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II 69

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II 69

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua II 74

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata II 112

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif II 119

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II 130

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II 136

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah II 147

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia II 147

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II 150
2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II 165
2.1.3.4. Transformasi Digital II 168
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II 169
2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II 173
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro II 177
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum II 181
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II 181
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II 186
2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II 193
2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah II 194
2.1.5. Standar Pelayanan Minimal II 258
2.1.5.1. Urusan Pendidikan II 259
2.1.5.2. Urusan Kesehatan II 260
2.1.5.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II 262
2.1.5.4. Urusan Perumahan Rakyat II 263
2.1.5.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II 264
2.1.6. Kerjasama Daerah II 266
2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota II 270
2.1.8. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda II 273
2.1.8.1. Perkembangan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebak II 274
2.1.8.2. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak II 278
2.2. Gambaran Keuangan Daerah II 282
2.2.1. Realisasi APBD Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 283
2.2.2. Proyeksi APBD Kabupaten Lebak Tahun 2026-2030 II 301
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis II 306
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II 306
2.3.1.1. Pemetaan Permasalahan Pembangunan II 316
2.3.2. Isu Strategis Daerah II 368
2.3.2.1. Pemetaan Isu Strategis Daerah II 368
2.3.2.2. Identifikasi Isu Global, Nasional, dan Regional II 377

## BAB 3 VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III 1
3.1.1. Visi RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 III 1
3.1.2. Visi RPJMD III 3
3.1.3. Misi RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 III 5
3.1.4. Misi RPJMD III 6
3.1.5. Tujuan dan Sasaran III 11
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III 19
3.2.1. Strategi III 19
3.2.1.1. Tahapan Pembangunan RPJMD III 20
3.2.1.2. Fokus Kewilayahan III 20

3.2.1.3. Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD III 229
3.2.2. Arah Kebijakan III 262

BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 IV 1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV 233
4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) IV 233
4.2.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) IV 265

BAB 5 PENUTUP

# Daftar Gambar


Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I 5

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lebak II 2
Gambar 2. 2 Peta Ketinggian Lahan di Kabupaten Lebak II 5
Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Lebak II 7
Gambar 2. 4 Peta Curah Hujan di Kabupaten Lebak II 9
Gambar 2. 5 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lebak II 11
Gambar 2. 6 Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Lebak II 11
Gambar 2. 7 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Lebak II 13
Gambar 2. 8 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak II 14
Gambar 2. 9 Konstelasi Wilayah Kabupaten Lebak II 15
Gambar 2. 10 Peta Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Lebak II 30
Gambar 2. 11 Peta Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Lebak II 32
Gambar 2. 12 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Lebak Tahun 2021 II 43
Gambar 2. 13 Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan (FSVA) Kabupaten Lebak II 44
Gambar 2. 14 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Lebak Tahun 2023 II 46
Gambar 2. 15 Peta Ketahanan Pangan (FSVA) Kabupaten Lebak Tahun 2024 II 48
Gambar 2. 16 Tampak Atas IPLT Dengung II 56
Gambar 2. 17 Pemetaan Arah Pembangunan Nasional di Kabupaten Lebak II 271
Gambar 2. 18 Komposisi Kepemilikan Saham di PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda) Tahun 2024 II 278
Gambar 2. 20 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II 379

Gambar 3. 1 Tahapan dan Tema RJPMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 III 6
Gambar 3. 2 Peta Jaringan Jalan Poros Desa di Kabupaten Lebak III 37
Gambar 3. 3 Peta Kawasan Geopark Bayah Dome III 41

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 3. 4 | Rencana Pengembangan Zonasi Areal Cikapek | III 57 |
| Gambar 3. 5 | Peta Cakupan Layanan Eksisting Persampahan di Kabupaten Lebak | III 64 |
| Gambar 3. 6 | Road Map Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak 2017 – 2036 | III 70 |
| Gambar 3. 7 | Sebaran Lokasi Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Kabupaten Lebak | III 70 |
| Gambar 3. 8 | Sebaran Lokasi Kawasan Industri Hijau | III 71 |
| Gambar 3. 9 | Delineasi Lokasi Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Lebak | III 72 |
| Gambar 3. 10 | Usulan Delineasi Kawasan Industri Blok 1 | III 73 |
| Gambar 3. 11 | Usulan Delineasi Kawasan Industri Blok 2 | III 74 |
| Gambar 3. 12 | Usulan Delineasi Kawasan Industri Blok 3 dan 4 | III 75 |
| Gambar 3. 13 | Peta Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lebak | III 86 |
| Gambar 3. 14 | Peta Kawasan Kumuh Penyangga Cagar Budaya | III 87 |
| Gambar 3. 15 | Peta Sebaran Kawasan Perkotaan di Kabupaten Lebak | III 152 |
| Gambar 3. 16 | Strategi Percepatan Penurunan Stunting | III 196 |
| Gambar 3. 17 | Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting | III 202 |

# Daftar Grafik


Grafik 2. 1 Luas Lahan Kering dan Penggunaannya (Ha) II 17
Grafik 2. 2 Lahan Sawah dan Penggunaannya II 18
Grafik 2. 3 Perkembangan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Lebak II 19
Grafik 2. 4 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 21
Grafik 2. 5 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Lebak 2020-2024 II 21
Grafik 2. 6 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Lebak 2020-2024 II 22
Grafik 2. 7 Pertumbuhan Produksi Perikanan Kabupaten Lebak 2020-2024 II 23
Grafik 2. 8 Produktivitas Perikanan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 24
Grafik 2. 9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 II 38
Grafik 2. 10 Persentase Cakupan Air Minum yang Layak di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 39
Grafik 2. 11 Data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 41
Grafik 2. 12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 53
Grafik 2. 13 Persentase Cakupan Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang Layak di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 55
Grafik 2. 14 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 II 59
Grafik 2. 15 Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 60
Grafik 2. 16 Capaian Indeks Kualitas Air dan Kualitas Udara di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 61
Grafik 2. 17 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak II 64
Grafik 2. 18 Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2024 II 69
Grafik 2. 19 Grafik Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 70
Grafik 2. 20 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 71
Grafik 2. 21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 72
Grafik 2. 22 Perkembangan TPT, TPAK, dan TKK Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 74
Grafik 2. 23 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 78

| | | |
|---|---|---|
| Grafik 2. 24 | Capaian Pelayanan Cakupan Nipas Tahun 2020-2024 | II 80 |
| Grafik 2. 25 | Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lebak | II 82 |
| Grafik 2. 26 | Perkembangan AKB dari Tahun 2020-2024 | II 84 |
| Grafik 2. 27 | Perkembangan AKABa dari Tahun 2020-2024 di Kabupaten Lebak | II 86 |
| Grafik 2. 28 | Perkembangan Cakupan Imunisasi Dasar Tahun 2020-2024 | II 89 |
| Grafik 2. 29 | Perkembangan Jumlah Posyandu di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 | II 92 |
| Grafik 2. 30 | Peningkatan Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) di Kabupaten Lebak 2020-2024 | II 93 |
| Grafik 2. 31 | Cakupan Layanan Kesehatan Lansia (>60 Tahun) di Kabupaten Lebak | II 96 |
| Grafik 2. 32 | Capaian SPM Bidang Kesehatan Masyarakat | II 98 |
| Grafik 2. 33 | Capaian SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | II 98 |
| Grafik 2. 34 | Perkembangan Kepesertaan JKN dan Capaian Kepesertaan | II 103 |
| Grafik 2. 35 | Indeks Keluarga Sehat 2020-2024 di Kabupaten Lebak | II 105 |
| Grafik 2. 36 | Perkembangan Jumlah Keluarga Sehat Tahun 2020-2024 | II 107 |
| Grafik 2. 37 | Grafik Prevalensi Stunting Berdasarkan SSGI dan ePPBGM Tahun 2020-2024 | II 109 |
| Grafik 2. 38 | Persentase Prevalensi Gizi Kurang Tahun 2020-2024 | II 110 |
| Grafik 2. 39 | Perkembangan Jumlah Total Balita Terhadap Jumlah Balita Penderita Stunting Tahun 2020-2024 | II 111 |
| Grafik 2. 40 | Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 | II 112 |
| Grafik 2. 41 | Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 | II 113 |
| Grafik 2. 42 | Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Lebak 2019-2024 | II 115 |
| Grafik 2. 43 | Grafik Angka Literasi/ Numerasi  Kabupaten Lebak Tahun 2020-2025 | II 115 |
| Grafik 2. 44 | Angka Numerasi  Kabupaten Lebak Tahun 2020-2025 | II 116 |
| Grafik 2. 45 | Capaian IPLM Kabupaten Lebak 2020-2024 | II 118 |
| Grafik 2. 46 | Grafik Tren Jaminan Kesehatan Nasional | II 120 |
| Grafik 2. 47 | Grafik Tren Bantuan Sosial PKH | II 121 |
| Grafik 2. 48 | Grafik Tren Bantuan Sosial BPNT | II 122 |
| Grafik 2. 49 | Grafik Tren Jumlah PPKS | II 123 |
| Grafik 2. 50 | Grafik Tren PSKS | II 126 |
| Grafik 2. 51 | Grafik Perkembangan Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024 | II 129 |
| Grafik 2. 52 | Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Lebak Tahun 2020-2023 | II 138 |

Grafik 2. 53 Perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Lebak Tahun 2023-2024 II 140
Grafik 2. 54 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lebak Tahun 2020–2024 II 142
Grafik 2. 55 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 144
Grafik 2. 56 Industri Pengolahan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 156
Grafik 2. 57 Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Lebak Tahun 2020 - 2024 II 157
Grafik 2. 58 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 159
Grafik 2. 59 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lebak Tahun 2020 - 2024 II 160
Grafik 2. 60 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 162
Grafik 2. 61 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 163
Grafik 2. 62 Sektor Realisasi Investasi Tertinggi di Kabupaten Lebak Tahun 2024 II 164
Grafik 2. 63 Negara Realisasi Investasi PMA di Kabupaten Lebak Tahun 2024 II 164
Grafik 2. 64 Capaian Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lebak Tahun 2022-2024 II 175
Grafik 2. 65 Status Desa di Kabupaten Lebak Berdasarkan Indeks Desa Membangun II 176
Grafik 2. 66 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB II 178
Grafik 2. 67 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kabupaten Lebak II 181
Grafik 2. 68 Realisasi Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lebak Tahun 2022 – 2024 II 182
Grafik 2. 69 Realisasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 184
Grafik 2. 70 Realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 II 185
Grafik 2. 71 Realisasi Persentase Penegakan Perda Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2024 II 188
Grafik 2. 72 Realisasi Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 II 189
Grafik 2. 73 Persentase Waktu Tanggap (Respon Time) Pengaduan Kebakaran di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 193
Grafik 2. 74 Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 II 194
Grafik 2. 75 Grafik Angka Melek Huruf (AHM) Kabupaten Lebak II 198
Grafik 2. 76 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 II 252
Grafik 2. 77 Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah dan Deviden Yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Lebak 2019-2023 II 276

**Grafik 2. 78 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 294**

**Grafik 2. 79 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 295**

**Grafik 3. 1 Data Kunjungan Wisata di 3 Destinasi (Sawarna, Baduy, Citorek) III79**

**Grafik 3. 2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 –2024 III160**

**Grafik 3. 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lebak III161**

**Grafik 3. 4 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2024 III162**

**Grafik 3. 5 Garis Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 III163**

**Grafik 3. 6 Jumlah KK berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Desil 1-4 Kabupaten Lebak Tahun 2024 III166**

**Grafik 3. 7 Jumlah KK berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Desil 1 (Persentil 1-2) III167**

# Daftar Tabel


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2. 1 | Kondisi Geografis di Kabupaten Lebak | II 2 |
| Tabel 2. 2 | Ketinggian Wilayah di Kabupaten Lebak | II 4 |
| Tabel 2. 3 | Kemiringan Lahan di Kabupaten Lebak | II 5 |
| Tabel 2. 4 | Curah Hujan di Kabupaten Lebak | II 7 |
| Tabel 2. 5 | Hidrologi dan Hidrogeologi di Kabupaten Lebak | II 10 |
| Tabel 2. 6 | Destinasi Wisata di Kabupaten Lebak | II 25 |
| Tabel 2. 7 | Industri Unggulan Kabupaten Lebak | II 26 |
| Tabel 2. 8 | Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak | II 35 |
| Tabel 2. 9 | Perbandingan Sebaran Komposit Jumlah Desa /Kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2020-2024 | II 42 |
| Tabel 2. 10 | Spesifikasi TPA di Kabupaten Lebak | II 57 |
| Tabel 2. 11 | Data Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 | II 58 |
| Tabel 2. 12 | Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024 | II 65 |
| Tabel 2. 13 | Kepadatan Penduduk Tahun 2024 | II 68 |
| Tabel 2. 14 | Perkembangan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2020-2024 | II 100 |
| Tabel 2. 15 | Perkembangan Kepesertaan JKN dan Capaian Kepesertaan | II 103 |
| Tabel 2. 16 | Tabel Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 | II 124 |
| Tabel 2. 17 | Tabel Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 | II 126 |
| Tabel 2. 18 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024 | II 127 |
| Tabel 2. 19 | Tabel  Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2024 | II 130 |
| Tabel 2. 20 | Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi di Indonesia Tahun 2023 | II 135 |
| Tabel 2. 21 | Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 | II 150 |
| Tabel 2. 22 | Tabel PDRB atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lebak (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 | II 153 |

Tabel 2. 23 Tabel Distribusi Persentase PDRB atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lebak (Persen) Tahun 2020-2024 II 154
Tabel 2. 24 Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Lebak II 168
Tabel 2. 25 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 171
Tabel 2. 26 Tabel Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 172
Tabel 2. 27 Perkembangan Harga Berbagai Komoditas Pada Desember 2024 II 179
Tabel 2. 28 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year II 180
Tabel 2. 29 Capaian Jumlah Penegakan Perda di Kabupaten Lebak II 188
Tabel 2. 30 Capaian Urusan Pendidikan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 199
Tabel 2. 31 Capaian Urusan Kesehatan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 204
Tabel 2. 32 Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 206
Tabel 2. 33 Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 208
Tabel 2. 34 Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 210
Tabel 2. 35 Capaian Urusan Sosial di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 211
Tabel 2. 36 Capaian Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 214
Tabel 2. 37 Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 215
Tabel 2. 38 Indikator dan Realisasi Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 II 217
Tabel 2. 39 Capaian Urusan Pertanahan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 218
Tabel 2. 40 Capaian Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 219
Tabel 2. 41 Capaian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lebak 2020-2024 II 220
Tabel 2. 42 Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II 223
Tabel 2. 43 Capaian Urusan Perhubungan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 II 224
Tabel 2. 44 Indikator dan Realisasi Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 II 225
Tabel 2. 45 Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020-2024 II 228
Tabel 2. 46 Indikator dan Realisasi Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 II 229
Tabel 2. 47 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga II 231

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2. 48 | Indikator dan Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 | II 233 |
| Tabel 2. 49 | Indikator dan Realisasi Capaian Ururan Statistik 2020-2024 | II 234 |
| Tabel 2. 50 | Indikator dan Realisasi Capaian Urusan Persandian 2020-2024 | II 235 |
| Tabel 2. 51 | Indikator dan Realisasi Capaian Urusan Kebudayaan 2020-2024 | II 236 |
| Tabel 2. 52 | Indikator dan realisasi Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 | II 238 |
| Tabel 2. 53 | Indikator dan Realisasi Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 | II 239 |
| Tabel 2. 54 | Indikator dan Realisasi Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 | II 240 |
| Tabel 2. 55 | Indikator dan Realisasi Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 | II 241 |
| Tabel 2. 56 | Indikator dan Realisasi Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 | II 242 |
| Tabel 2. 57 | Indikator dan Realisasi Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 | II 244 |
| Tabel 2. 58 | Indikator dan Realisasi Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 | II 245 |
| Tabel 2. 59 | Indikator dan Realisasi Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 | II 246 |
| Tabel 2. 60 | Indikator dan Realisasi Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024 | II 247 |
| Tabel 2. 61 | Indikator dan Realisasi Urusan Keuangan Tahun 2020-2024 | II 248 |
| Tabel 2. 62 | Indikator dan Realisasi Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 | II 250 |
| Tabel 2. 63 | Realisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 | II 254 |
| Tabel 2. 64 | Sumber: Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan DPMD Kabupaten Lebak, 2025 | II 255 |
| Tabel 2. 65 | Realisasi Indikator Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 | II 257 |
| Tabel 2. 66 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan | II 260 |
| Tabel 2. 67 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan | II 261 |
| Tabel 2. 68 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | II 262 |
| Tabel 2. 69 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat | II 263 |
| Tabel 2. 70 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | II 264 |
| Tabel 2. 71 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial | II 265 |
| Tabel 2. 72 | Daftar Barang Milik Daerah yang Menghasilkan Pendapatan / Pemanfaatan Tahun 2025 | II 268 |
| Tabel 2. 73 | Cakupan Layanan Pelanggan Perumdam Tirta Kalimaya Tahun 2019-2022 | II 280 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2. 74 | Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 | II 284 |
| Tabel 2. 75 | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024 | II 286 |
| Tabel 2. 76 | Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 | II 289 |
| Tabel 2. 77 | Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024 | II 289 |
| Tabel 2. 78 | Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024 | II 293 |
| Tabel 2. 79 | Neraca Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 | II 299 |
| Tabel 2. 80 | Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026-2030 | II 302 |
| Tabel 2. 81 | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | II 317 |
| Tabel 2. 82 | Akar Masalah terkait Indeks Pendidikan | II 322 |
| Tabel 2. 83 | Akar Masalah Terkait Indeks Kesehatan | II 323 |
| Tabel 2. 84 | Akar Masalah terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | II 328 |
| Tabel 2. 85 | Akar Masalah Terkait Kepemudaan dan Olahraga | II 330 |
| Tabel 2. 86 | Akar Masalah Terkait Kesejahteraan Sosial | II 331 |
| Tabel 2. 87 | Akar Masalah Terkait Komunitas Adat | II 332 |
| Tabel 2. 88 | Akar Masalah terkait Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | II 334 |
| Tabel 2. 89 | Akar Masalah Terkait Risiko Bencana Gempa Bumi, Banjir dan Tanah Longsor | II 338 |
| Tabel 2. 90 | Akar Masalah terkait Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Pemukiman | II 345 |
| Tabel 2. 91 | Akar Masalah Terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | II 348 |
| Tabel 2. 92 | Akar Masalah Terkait Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | II 350 |
| Tabel 2. 93 | Akar Masalah Terkait Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah | II 352 |
| Tabel 2. 94 | Akar Masalah Terkait Pengarsipan Dokumen Pemerintahan | II 353 |
| Tabel 2. 95 | Akar Masalah Terkait Kapasitas Aparatur Negara | II 353 |
| Tabel 2. 96 | Akar Masalah Terkait Kapasitas Fiskal Daerah | II 354 |
| Tabel 2. 97 | Akar Masalah Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Pada Tingkat Desa | II 355 |
| Tabel 2. 98 | Akar Masalah Terkait Daya Saing UMKM dan Koperasi | II 357 |
| Tabel 2. 99 | Akar Masalah Terkait Ketahanan Pangan Daerah | II 359 |
| Tabel 2. 100 | Akar Masalah Terkait Produktivitas Pertanian | II 360 |
| Tabel 2. 101 | Akar Masalah Terkait Iklim Penanaman Modal | II 361 |

Tabel 2. 102 Akar Masalah Terkait Produktivitas Peternakan II 362
Tabel 2. 103 Akar Masalah Terkait Produktivitas Perikanan II 363
Tabel 2. 104 Akar Masalah Terkait Kontribusi Pariwisata II 364
Tabel 2. 105 Akar Masalah Terkait Tingkat Pengangguran II 366
Tabel 2. 106 Akar Masalah Terkait Belum Optimalnya Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi II 366
Tabel 2. 107 Penentuan Isu Strategis Daerah II 368

Tabel 3. 1 Tujuan Sasaran Indikator Target dalam Pencapaian RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 III 12
Tabel 3. 2 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 III 20
Tabel 3. 3 Rencana Aksi Ketahanan Pangan III 33
Tabel 3. 4 Rencana Aksi Pencapaian Strategi Pembangunan Jalan Desa Produktif III 39
Tabel 3. 5 Daftar Sebaran Warisan Geologi (Geosite) di Kawasan Geopark Bayah Dome III 42
Tabel 3. 6 Tabel Daya Tarik Wisata Kabupaten Lebak III 44
Tabel 3. 7 Rencana Aksi Pengembangan Geopark Bayah Dome Melalui Atraksi Pariwisata III 46
Tabel 3. 8 Pembangunan Kawasan Agrowisata Cikapek Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Dengan Konsep Kearifan Lokal III 59
Tabel 3. 9 Rencana Aksi Pencapaian Strategi Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir III 66
Tabel 3. 10 Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Hijau Lebak III 72
Tabel 3. 11 Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri Hijau Cileles III 77
Tabel 3. 12 Kondisi Exsisting 3 Destinasi Wisata (Baduy, Sawarna, Citorek) III 80
Tabel 3. 13 Rencana Penanganan Destinasi Wisata III 81
Tabel 3. 15 Rencana Aksi Pencapaian Strategi Pengentasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Secara Terpadu III 89
Tabel 3. 16 Rencana Aksi Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik III 95
Tabel 3. 17 Rencana Aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) III 112
Tabel 3. 18 Rencana Aksi Pencapaian Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Penggerak Ekonomi Kawasan Sekitarnya III 154
Tabel 3. 19 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 – 2024 III 160

Tabel 3. 20 Proyek Strategi Daerah Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2029 III 170
Tabel 3. 21 Capaian Indikator Intervensi Gizi Spesifik Tahun 2024 III 197
Tabel 3. 22 Capaian Indikator Intervensi Gizi Sensitif Tahun 2024 III 199
Tabel 3. 23 Rencana Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025-2029 III 203
Tabel 3. 24 Rencana Aksi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan III 219
Tabel 3. 25 Matriks Program Pendukung Antisipasi Pemekaran Kabupaten Cilangkahan III 228
Tabel 3. 26 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 III 230
Tabel 3. 27 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 III 262

Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan IV 2
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. IV 234
Tabel 4. 3 Definisi Operasional Indeks Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2025-2029. IV 237
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. IV 266

# Bab1 Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana juga telah diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam suatu massa kepemimpinan kepala daerah direncanakan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2004 dan Pasal 262 UU No. 23 Tahun 2014. RPJMD memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sebagai suatu bentuk rencana pembangunan daerah, RPJMD perlu disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, maka selanjutnya diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 -2029. Mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Lebak setelah melakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dilanjutkan pada tahapan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 yang merupakan tahapan dalam penyusunan RPJMD. Rancangan awal RPJMD adalah rancangan awal dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas dengan terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah periode Tahun 2025-2029.

Selain itu, seperti yang diamanatkan Permendagri No 7 Tahun 2018, proses penyusunan Rencana Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah dilaksanakan bersamaan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar persiapan lebih matang terkait pembangunan berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan RPJMD. Hasil penyusunan dokumen KLHS dapat menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan RPJMD untuk lima tahun ke depan. Integrasi antara dokumen perencanaan RPJMD dan rekomendasi KLHS diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Lebak dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lebak.

### 1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Kajian Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini adalah sebagai berikut :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3) Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6) Undang - undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7) Undang - undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);

11) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20248).

### 1.1.2. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004, maka integralitas seluruh dokumen perencanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah adalah bersifat absolut sehingga terjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; serta terjamin pula sinkronisasinya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Karenanya penyelarasan mutlak dilakukan sejak tahap perencanaan yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan berjenjang dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, serta *top-down* maupun *bottom-up* sehingga dapat diperoleh produk perencanaan yang selain SMART (*specific, measurable, achievable, relevance, time-bound*), juga tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Terkait dengan hal ini, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 ini, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029;

2. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029;
4. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
5. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
6. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029;
7. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini :

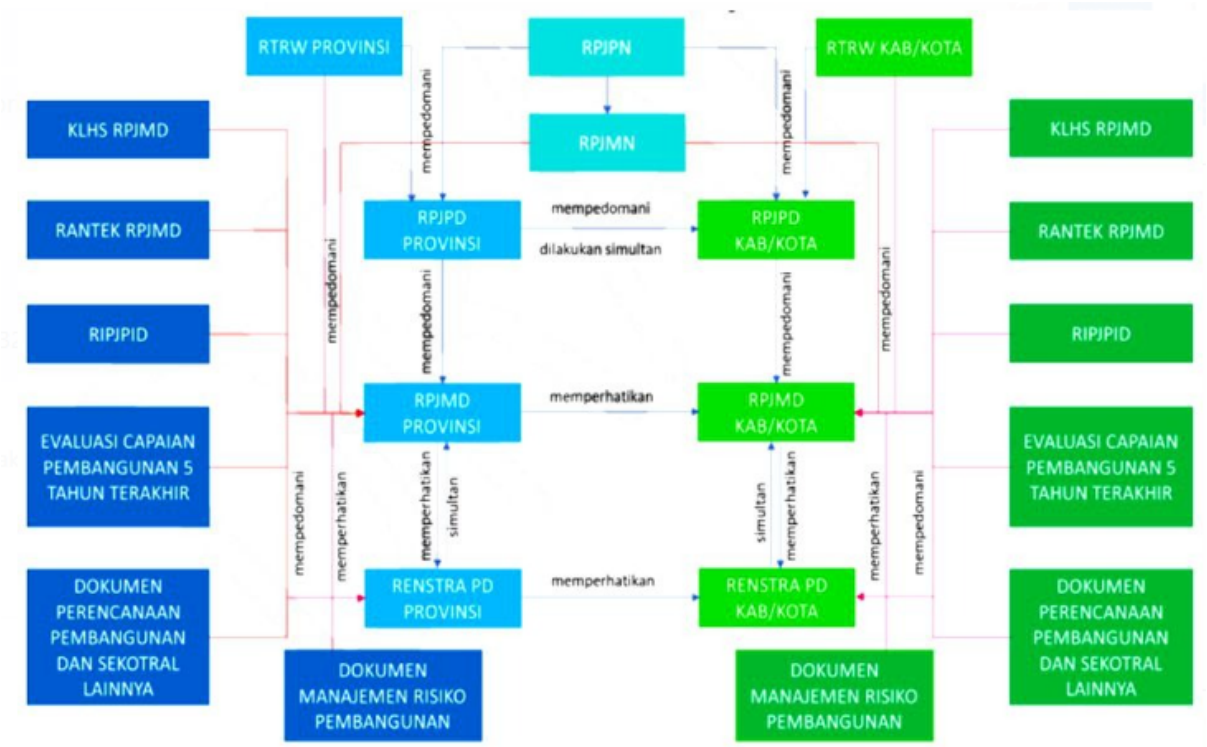


**Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan nasional maupun daerah menghasilkan 3 (tiga) rencana, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Dalam tingkat daerah, rencana tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) dokumen, yaitu :

1) **RPJP Daerah** yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
2) **RPJM Daerah** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3) **RKPD** merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam periode 5 tahun yang sama dengan RPJMD. Kemudian, Renstra SKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilakukan setiap tahun. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD tidak hanya berkaitan dengan RPJPD, namun berpedoman pula pada RTRW. RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Penyelarasan antara RPJMD dengan RTRW dilakukan dengan penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar Daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan Tata Perencanaan Pembangunan Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, disebutkan perencanaan pembangunan

daerah disusun dengan berorientasi pada proses. Penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun dengan tujuh macam pendekatan yaitu:

1) Pendekatan teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2) Pendekatan partisipatif: penyusunan dengan pelaksanaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3) Pendekatan politis: dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD;
4) Pendekatan Atas-Bawah/Bawah-Atas: merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.
5) Pendekatan holistik-tematik : menyiapkan pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan suatu masalah atau isu. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan
6) Pendekatan integratif : merupakan pendekatan perencanaan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan aspek untuk mencapai tujuan yang komprehensif. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan solusi yang terpadu dan berkelanjutan
7) Pendekatan spasial : merupakan pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan aspek geografis dan spasial dalam pengembangan suatu wilayah atau kota. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan solusi yang mempertimbangkan keunikan dan karakteristik suatu wilayah atau kota.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### 1.2.1. Maksud

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun. RPJMD disusun dengan maksud menjaga keberlanjutan proses perencanaan pembangunan daerah, untuk mengintegrasikan program-program pembangunan daerah dalam satu kerangka yang utuh.

### 1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara sinergis;
2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran perangkat daerah di Kabupaten Lebak dalam menjabarkan prioritas program dan kegiatan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Menetapkan target dan indikator kinerja yang digunakan sebagai standar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan dari waktu ke waktu;
5. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah serta pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lebak pada periode tahun 2025-2029 sehingga terbangun efektifitas koordinasi, integrasi, dan sinergi antarpemangku kepentingan pembangunan daerah.

## 1.3. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika atau urutan sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan**

Berisi penjabaran mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**Bab 2 Gambaran Umum Daerah**

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah, Gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029, dan Permasalahan dan isu strategi daerah.

**Bab 3 Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

**Bab 4 Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Berisi tentang daftar Program Perangkat Daerah, Indikator Program, Target dan pagu indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2025-2029, dan Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Tahun 2025-2029.

**Bab 5 Penutup**

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

# Bab 2 Gambaran Umum Kondis

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

**A. Kondisi Fisik Wilayah**

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten tepatnya berada di wilayah selatan yang secara geografis terletak pada koordinat $105^0$25' - $106^0$30' Bujur Timur dan antara $6^0$18' – $7^0$00' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lebak mencapai 331.264 Ha atau kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten sehingga menjadikannya sebagai kabupaten terluas di Provinsi Banten dan kelima di Pulau Jawa. Luasan tersebut telah mempertimbangkan batas Kabupaten Lebak dengan beberapa kabupaten yang berbatasan langsung meliputi Kabupaten Pandeglang sebagai batas barat, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi yang masuk dalam Provinsi Jawa Barat sebagai batas timur, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang sebagai batas utara, dan bagian selatannya terkoneksi langsung dengan Samudera Hindia sehingga Kabupaten Lebak memiliki wilayah laut sekitar 73,3 $km^2$ dengan panjang pantai mencapai 91,42 km.

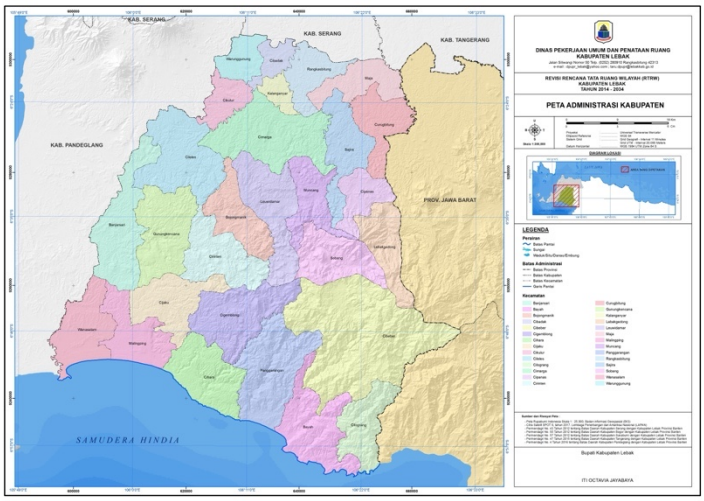


**Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lebak**

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

Secara administratif bahwa Kabupaten Lebak dibagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kelima kelurahan yang ada hanya terdapat di Kecamatan Rangkasbitung sebagai kawasan perkotaan di Kabupaten Lebak. Di samping itu, terdapat pula sekitar 5.995 Rukun Tetangga (RT) dan 1.680 Rukun Warga (RW) yang merupakan perangkat masyarakat guna membantu memfasilitasi sebagian fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat RT maupun RW sehingga mampu mereduksi problem aksesibilitas secara geografis. Kecamatan Cibeber menjadi kecamatan terluas yaitu 11,97% luas Kabupaten Lebak atau 39.651 Ha dengan desa terbanyak yaitu 22 desa, sedangkan Kecamatan Kalanganyar menjadi kecamatan dengan luas terkecil hanya 0,83% luas Kabupaten Lebak atau 2.766 Ha dengan total 7 desa.

**Tabel 2. 1 Kondisi Geografis di Kabupaten Lebak**

| No. | Kecamatan | Lokasi Kantor Kecamatan | Jumlah | | Luas Wilayah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desa | Kelurahan | Ha | % |
| 1 | Banjarsari | Cidahu | 20 | | 15.252 | 4,60 |
| 2 | Bayah | Bayah Barat | 11 | | 13.554 | 4,09 |
| 3 | Bojongmanik | Bojongmanik | 9 | | 8.877 | 2,68 |
| 4 | Cibadak | Pasarkeong | 15 | | 3.548 | 1,07 |

| No. | Kecamatan | Lokasi Kantor Kecamatan | Jumlah | | Luas Wilayah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desa | Kelurahan | Ha | % |
| 5 | Cibeber | Warungbanten | **22** | | 39.651 | 11,97 |
| 6 | Cigemblong | Cigemblong | 9 | | 14.592 | 4,41 |
| 7 | Cihara | Cihara | 9 | | 13.306 | 4,02 |
| 8 | Cijaku | Cijaku | 10 | | 11.492 | 3,47 |
| 9 | Cikulur | Curugpanjang | 13 | | 6.192 | 1,87 |
| 10 | Cileles | Cikareo | 12 | | 16.044 | 4,84 |
| 11 | Cilograng | Gunungbatu | 10 | | 10.241 | 3,09 |
| 12 | Cimarga | Margajaya | 17 | | 18.454 | 5,57 |
| 13 | Cipanas | Sipayung | 14 | | 6.648 | 2,01 |
| 14 | Cirinten | Cirinten | 10 | | 11.364 | 3,43 |
| 15 | Curugbitung | Curugbitung | 10 | | 8.761 | 2,64 |
| 16 | Gunungkencana | Gunungkencana | 12 | | 15.304 | 4,62 |
| 17 | Kalanganyar | Pasirkupa | **7** | | 2.766 | 0,83 |
| 18 | Lebakgedong | Banjarsari | 6 | | 8.980 | 2,71 |
| 19 | Leuwidamar | Lebak Parahiang | 12 | | 15.174 | 4,58 |
| 20 | Maja | Maja | 14 | | 7.734 | 2,33 |
| 21 | Malingping | Malingping Selatan | 14 | | 11.103 | 3,35 |
| 22 | Muncang | Muncang | 12 | | 8.650 | 2,61 |
| 23 | Panggarangan | Situregen | 11 | | 18.107 | 5,47 |
| 24 | Rangkasbitung | Muara Ciujung Timur | 11 | 5 | 7.425 | 2,24 |
| 25 | Sajira | Sajira | 10 | | 11.229 | 3,39 |
| 26 | Sobang | Sinarjaya | 15 | | 10.737 | 3,24 |
| 27 | Wanasalam | Bejod | 13 | | 11.467 | 3,46 |
| 28 | Warunggunung | Selaraja | 12 | | 4.609 | 1,39 |
| **Jumlah** | | | **340** | **5** | **331.264** | **100** |

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

Topografi wilayah Kabupaten Lebak terbilang cukup bervariasi. Variasi ketinggian wilayah Kabupaten Lebak berada diantara 0 sampai dengan di atas 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan. Secara umum ketinggian wilayah di Kabupaten Lebak dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu ketinggian antara 0 sampai 500 mdpl meliputi sekitar 80%, ketinggian 500 sampai 1.000 mdpl sekitar 16%, dan kawasan dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl dikisaran 4% dari luas keseluruhan Kabupaten Lebak.

**Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah di Kabupaten Lebak**

| No. | Kecamatan | Ketinggian (mdpl) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 – 100 | 100 – 200 | 200 – 500 | 500 – 1.000 | >1.000 |
| 1 | Banjarsari | 13.561,76 | 1.624,21 | | | |
| 2 | Bayah | 5.121,63 | 3.527,36 | 5.416,59 | 339,53 | |
| 3 | Bojongmanik | 553,03 | 5.196,17 | 3.721,48 | 124,85 | |
| 4 | Cibadak | 3.651,64 | | | | |
| 5 | Cibeber | 14,04 | 228,93 | 4.930,22 | 26.034,78 | 8.884,16 |
| 6 | Cigemblong | | 87,58 | 9.977,54 | 5.245,71 | |
| 7 | Cihara | 4.301,17 | 3.942,88 | 4.210,62 | | |
| 8 | Cijaku | 49,29 | 2.413,18 | 8.112,00 | 106,54 | |
| 9 | Cikulur | 5.442,48 | 608,49 | | | |
| 10 | Cileles | 11.493,00 | 4.902,12 | 69,01 | 0,32 | |
| 11 | Cilograng | 694,63 | 1.499,59 | 5.156,41 | 2.245,76 | |
| 12 | Cimarga | 15.752,03 | 2.787,11 | 172,08 | | |
| 13 | Cipanas | 41,19 | 3.779,98 | 1.704,98 | 909,22 | 55,65 |
| 14 | Cirinten | | 403,22 | 10.517,24 | 1.339,47 | |
| 15 | Curugbitung | 7.028,95 | 2.096,01 | 8,30 | | |
| 16 | Gunungkencana | 1.866,99 | 5.230,79 | 7.048,94 | 1,85 | |
| 17 | Kalanganyar | 2.890,26 | | | | |
| 18 | Lebakgedong | | 126,48 | 2.777,53 | 3.532,87 | 2.706,87 |
| 19 | Leuwidamar | 2.199,92 | 6.387,24 | 4.167,25 | 1.555,62 | |
| 20 | Maja | 7.858,13 | | | | |
| 21 | Malingping | 8.806,98 | 2.001,92 | 187,83 | | |
| 22 | Muncang | 384,66 | 3.664,09 | 3.583,41 | 503,19 | 58,03 |
| 23 | Panggarangan | 2.912,46 | 1.781,42 | 9.837,32 | 3.167,62 | |
| 24 | Rangkasbitung | 7.376,22 | 0,04 | | | |
| 25 | Sajira | 5.428,08 | 4.131,14 | 1.028,80 | 16,56 | |
| 26 | Sobang | | 13,86 | 4.227,24 | 6.740,24 | 687,80 |
| 27 | Wanasalam | 11.623,59 | 11,19 | | | |
| 28 | Warunggunung | 2.963,07 | 1.646,38 | | | |
| **Jumlah** | | **122.015,20** | **58.091,39** | **86.854,77** | **51.864,13** | **12.392,51** |

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

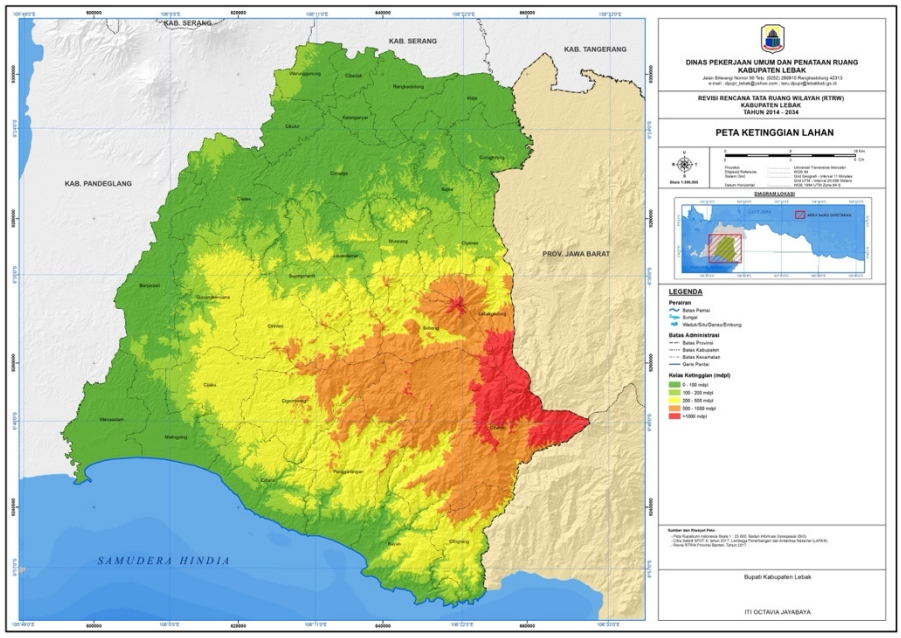


**Gambar 2. 2 Peta Ketinggian Lahan di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

Selain dilihat dari ketinggian wilayah, topografi Kabupaten Lebak juga dilihat dari tingkat kelerengan. Data menunjukkan bahwa kelerengan atau kemiringan lahan relatif datar dan landai serta sedikit agak curam atau mayoritas kurang dari 25% untuk luas wilayah Kabupaten Lebak. Sedangkan kelerengan curam atau kemiringan lahan di atas 40% yang ada di Kabupaten Lebak hanya berkisar 12.169,95 Ha atau hanya 3,68% dari luas wilayah. Dengan demikian, maka sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Lebak, secara umum mudah dikembangkan untuk berbagai kegiatan.

**Tabel 2. 3 Kemiringan Lahan di Kabupaten Lebak**

| No. | Kecamatan | Kelerengan / Kemiringan Lahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 - 2% | 2 - 15% | 15 - 25% | 25 - 40% | >40% |
| 1. | Banjarsari | 4.767,22 | | 10.418,75 | | |
| 2. | Bayah | 997,20 | 6.438,64 | 5.454,77 | 1.514,50 | |
| 3. | Bojongmanik | | 2.128,18 | 7.467,36 | | |
| 4. | Cibadak | 3.152,94 | | 498,70 | | |
| 5. | Cibeber | | 6.216,49 | 2.673,03 | 23.900,02 | 7.302,60 |
| 6. | Cigemblong | | 5.513,63 | 7.419,32 | 2.377,87 | |

| No. | Kecamatan | Kelerengan / Kemiringan Lahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 - 2% | 2 - 15% | 15 - 25% | 25 - 40% | >40% |
| 7. | Cihara | 669,63 | 2.524,73 | 9.260,31 | | |
| 8. | Cijaku | | 1.085,94 | 9.595,07 | | |
| 9. | Cikulur | 2.310,44 | | 3.740,52 | | |
| 10. | Cileles | 2.264,81 | | 14.199,65 | | |
| 11. | Cilograng | 167,01 | 6.039,27 | 2.694,47 | 695,64 | |
| 12. | Cimarga | 1.656,47 | 403,26 | 16.651,49 | | |
| 13. | Cipanas | | 1.066,36 | 4.668,45 | 510,07 | 246,14 |
| 14. | Cirinten | | 2.908,18 | 9.240,88 | 110,87 | |
| 15. | Curugbitung | 1.820,45 | | 7.312,82 | | |
| 16. | Gunungkencana | 145,00 | | 14.003,57 | | |
| 17. | Kalanganyar | 1.830,28 | | 1.059,98 | | |
| 18. | Lebakgedong | | 3.502,18 | 56,70 | 3.597,00 | 1.987,87 |
| 19. | Leuwidamar | | 3.379,61 | 9.992,54 | 922,28 | 15,59 |
| 20. | Maja | 5.254,62 | | 2.603,51 | | |
| 21. | Malingping | 3.500,92 | | 7.495,80 | | |
| 22. | Muncang | | 2.569,22 | 3.722,65 | 1.163,65 | 737,86 |
| 23. | Panggarangan | 581,70 | 8.323,34 | 7.679,69 | 1.075,40 | 38,68 |
| 24. | Rangkasbitung | 4.638,96 | | 2.737,30 | | |
| 25. | Sajira | 660,99 | 599,76 | 9.343,83 | | |
| 26. | Sobang | | 2.080,34 | | 7.744,85 | 1.843,94 |
| 27. | Wanasalam | 7.943,49 | | 3.691,29 | | |
| 28. | Warunggunung | 2.870,02 | | 1.739,44 | | |
| **Jumlah** | | **45.232,15** | **54.779,14** | **175.421,88** | **43.612,14** | **12.172,68** |

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

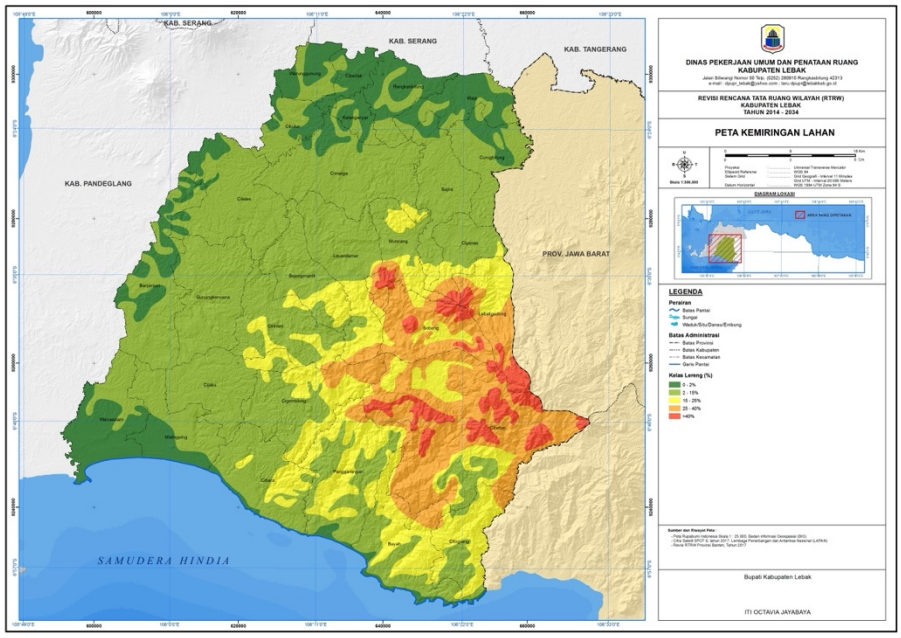


**Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

Kabupaten Lebak terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa sehingga termasuk dalam wilayah beriklim tropis. Suhu udara di Kabupaten Lebak berkisar antara 22,1° celcius sampai dengan 33,1° celcius. Sedangkan suhu udara rata-rata di daratan rendah 23,8° celcius dan suhu rata-rata dataran tinggi adalah 27,0 ° celcius. Curah hujan di Kabupaten Lebak masuk dalam kategori signifikan, dengan presipitasi bahkan selama bulan terkering. Iklim ini dianggap menjadi Af atau iklim tropis basah menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger.

**Tabel 2. 4 Curah Hujan di Kabupaten Lebak**

| No. | Kecamatan | Kelerengan / Kemiringan Lahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | <3000 mm/thn | 3000 - 3500 mm/thn | 3500 - 4000 mm/thn | 4000 - 4500 mm/thn | >4500 mm/thn |
| 1. | Banjarsari | 8.116,04 | | 7.069,93 | | |
| 2. | Bayah | 800,85 | | 12.237,02 | 1.356,92 | 10,32 |
| 3. | Bojongmanik | 1.846,07 | | 5.295,26 | 2.454,21 | |
| 4. | Cibadak | 3.651,64 | | | | |
| 5. | Cibeber | | 22.412,93 | 783,02 | 5.207,04 | 11.689,12 |

| No. | Kecamatan | Kelerengan / Kemiringan Lahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | <3000 mm/thn | 3000 - 3500 mm/thn | 3500 - 4000 mm/thn | 4000 - 4500 mm/thn | >4500 mm/thn |
| 6. | Cigemblong | | | 5.052,44 | 6.646,94 | 3.611,45 |
| 7. | Cihara | 3.587,85 | | 8.862,84 | 3,99 | |
| 8. | Cijaku | | | 9.585,31 | 1.095,70 | |
| 9. | Cikulur | 6.050,97 | | | | |
| 10. | Cileles | 13.996,83 | | 2.467,63 | | |
| 11. | Cilograng | | | 4.818,31 | 3.374,50 | 1.403,58 |
| 12. | Cimarga | 15.301,69 | | 2.539,81 | 869,71 | |
| 13. | Cipanas | | | 366,82 | 5.329,99 | 794,21 |
| 14. | Cirinten | | | 6.148,29 | 5.833,03 | 278,61 |
| 15. | Curugbitung | 7.606,20 | | 1.527,07 | | |
| 16. | Gunungkencana | 771,16 | | 13.377,41 | | |
| 17. | Kalanganyar | 2.890,26 | | | | |
| 18. | Lebakgedong | | 3.428,85 | | 2.988,94 | 2.725,97 |
| 19. | Leuwidamar | 3.376,36 | | 5456,10 | 4.425,51 | 1.052,06 |
| 20. | Maja | 7.858,13 | | | | |
| 21. | Malingping | 3.440,38 | | 7.556,35 | | |
| 22. | Muncang | 23,34 | | 1.147,51 | 6.624,52 | 398,01 |
| 23. | Panggarangan | 1.212,47 | | 6.455,19 | 8.797,66 | 1.233,49 |
| 24. | Rangkasbitung | 7.376,26 | | | | |
| 25. | Sajira | 2.143,11 | | 4.882,46 | 3.579,00 | |
| 26. | Sobang | | 1.588,89 | | 2.886,00 | 7.194,25 |
| 27. | Wanasalam | 7.903,21 | | 3.731,58 | | |
| 28. | Warunggunung | 4.609,45 | | | | |
| **Jumlah** | | **102.562,27** | **27.430,67** | **109.360,33** | **61.473,67** | **30.391,06** |

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

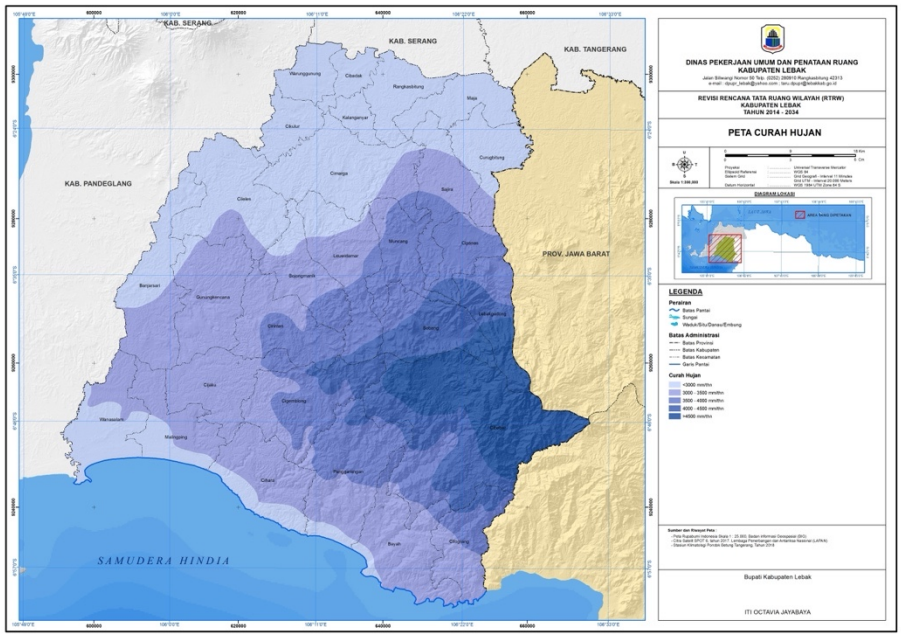


**Gambar 2. 4 Peta Curah Hujan di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

Aspek hidrologi dan hidrogeologi suatu wilayah sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air di wilayah tersebut. Berdasarkan aspek hidrologi air permukaan, aliran-aliran sungai besar di Kabupaten Lebak bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang digolongkan menjadi 2 (dua) DAS yaitu: (1) DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; dan (2) DAS Ciliman dan Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung. Dari sungai-sungai tersebut, terdapat 11 sungai yang bermuara baik di Laut Jawa maupun Samudera Hindia. Sumber daya air lainnya berupa embung, situ, bendungan. Bendungan Karian adalah salah satu waduk terbesar di Indonesia yang akan di manfaatkan sebagai suplai air baku untuk wilayah Banten dan DKI Jakarta. Dari aspek hidrogeologi, terdapat pula sumber air bawah permukaan seperti Air tanah yang terbagi kedalam dua sumber Cekungan Air Tanah yaitu Cekungan Air Tanah Malingping dan Serang-Tangerang.

**Tabel 2. 5 Hidrologi dan Hidrogeologi di Kabupaten Lebak**

| No. | Kecamatan | Sungai | | Rencana DAM Karian | Cekungan Air Tanah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Permanen | Periodik | | Malingping | Serang-Tangerang |
| 1. | Banjarsari | 75,67 | | | | 677,18 |
| 2. | Bayah | 124,79 | 10,46 | | | |
| 3. | Bojongmanik | 67,65 | | | | |
| 4. | Cibadak | 60,42 | | | | 3.458,58 |
| 5. | Cibeber | 131,64 | 8,11 | | | |
| 6. | Cigemblong | 20,16 | 1,44 | | 1.833,00 | |
| 7. | Cihara | 64,48 | 2,07 | | | |
| 8. | Cijaku | 12,09 | | | 10.681,00 | |
| 9. | Cikulur | 31,16 | | | | 5.000,74 |
| 10. | Cileles | 33,89 | | | | 10.251,29 |
| 11. | Cilograng | 64,42 | 1,75 | | | |
| 12. | Cimarga | 200,33 | | 549,20 | | 703,70 |
| 13. | Cipanas | 18,71 | | | 90,55 | |
| 14. | Cirinten | 41,00 | | | | 40,74 |
| 15. | Curugbitung | 40,63 | | | | 251,41 |
| 16. | Gunungkencana | 59,15 | | | | 1.768,25 |
| 17. | Kalanganyar | 58,93 | | | | |
| 18. | Lebakgedong | 24,54 | | | | |
| 19. | Leuwidamar | 104,88 | | | | |
| 20. | Maja | 44,49 | | 142,94 | | 3.006,63 |
| 21. | Malingping | 74,00 | | | 10.996,72 | |
| 22. | Muncang | 45,97 | | | | |
| 23. | Panggarangan | 150,56 | 8,09 | | | |
| 24. | Rangkasbitung | 86,24 | | 152,40 | | 6.031,57 |
| 25. | Sajira | 106,13 | | 1.307,02 | | |
| 26. | Sobang | 63,78 | | | | |
| 27. | Wanasalam | 83,31 | | | 11.634,79 | |
| 28. | Warunggunung | | | | | 4.609,45 |
| **Jumlah** | | **1.889,03** | **31,93** | **2.151,56** | **35.236,06** | **35.799,54** |

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

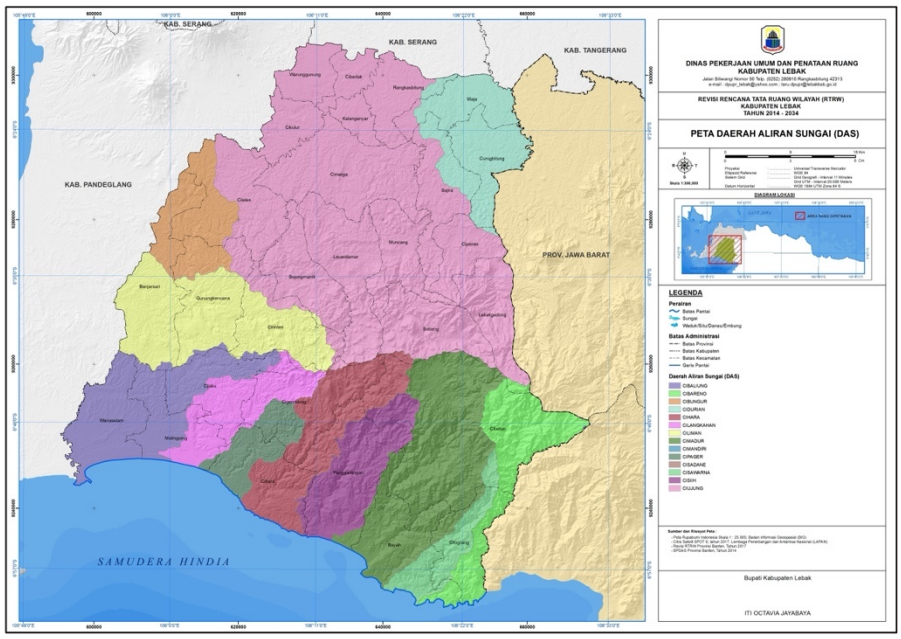


**Gambar 2. 5 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

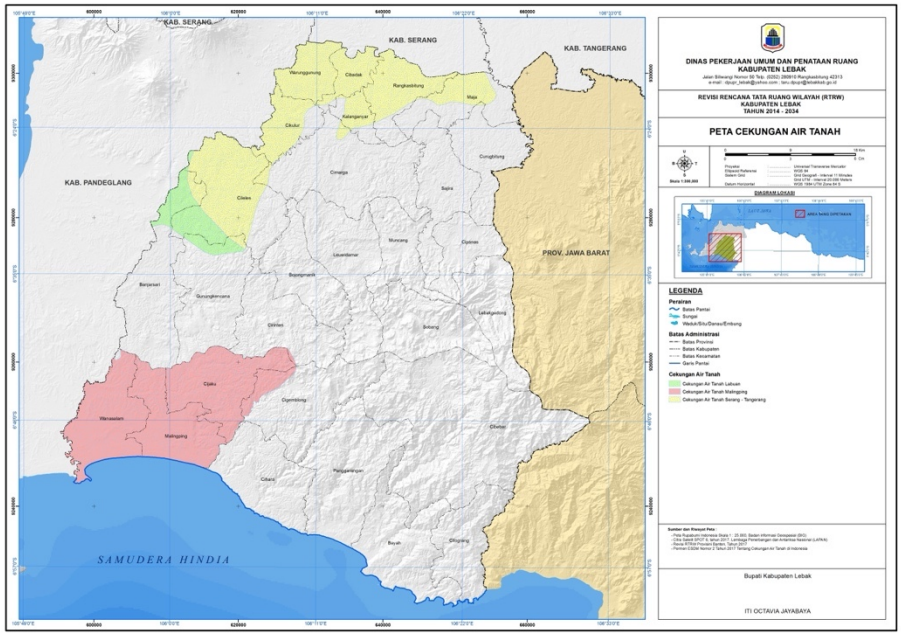


**Gambar 2. 6 Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

Morfologi Kabupaten Lebak didominasi jenis tanah latosol, podsolik, dan beberapa jenis tanah lainnya yang tersebar disebagian kecil kecamatan. Secara umum jenis tanah di Kabupaten Lebak yang dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor pembentuk tanah meliputi batuan induk, topografi, umur, iklim, dan vegetasi adalah sebagai berikut:

1. Jenis tanah latosol mendominasi wilayah Kabupaten Lebak yang mencapai 166.730 Ha. Jenis tanah ini umumnya tersebar di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 mm/tahun, dan ketinggian tempat berkisar 300 –1.000 meter. Tanah ini terbentuk dari batuan gunung api kemudian mengalami proses pelapukan lanjut, serta agak peka terhadap erosi. Jenis tanah latosol ini terdapat di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak kecuali Kecamatan Curugbitung, Gunungkencana, dan Maja.
2. Jenis tanah podsolik berasal dari batuan pasir kuarsa, tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih 2.500 mm/tahun yang kurang lebih mencapai 132.654 Ha. Tekstur lempung hingga berpasir, kesuburan rendah hingga sedang, warna merah, dan kering. Serta mempunyai tingkat kepekaan terhadap erosi yang peka dengan sebaran meliputi hampir kecamatan kecuali Bayah, Cibeber, Cigemblong, Cilograng, Lebakgedong, Panggarangan dan Sobang.
3. Jenis tanah Alluvial, Andosol, Regosol dna Rensina, tersebar di sebagian kecil di beberapa kecamatan.

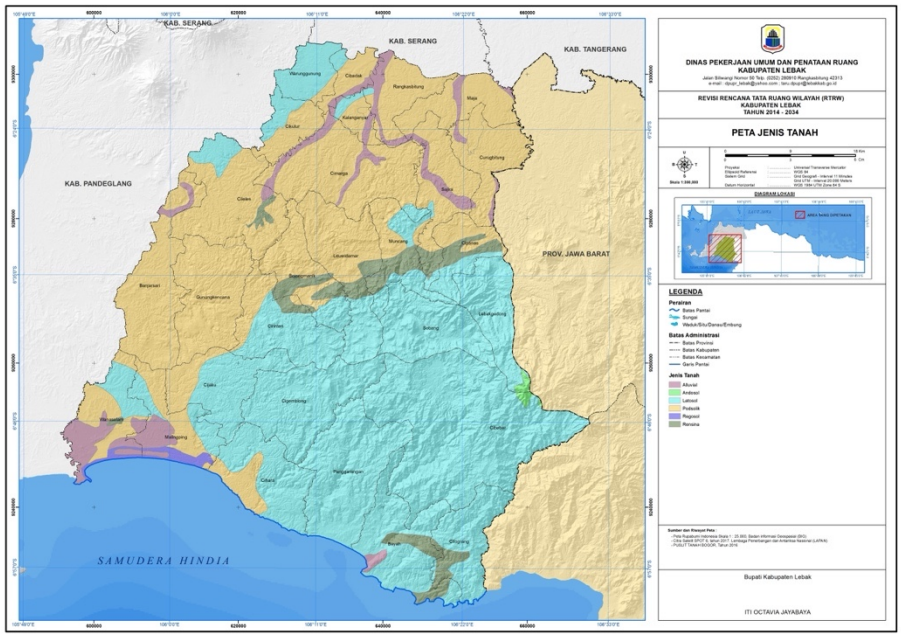


**Gambar 2. 7 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

Penggunaan lahan di Kabupaten Lebak secara umum masih didominasi oleh kebun campuran, perkebunan rakyat dan swasta, sawah irigasi dan tadah hujan, dan kawasan hutan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lebak bukan merupakan pusat kegiatan Provinsi Banten, sehingga penggunaan lahan terbangun atau permukiman belum menjadi penggunaan lahan utama, justru penggunaan lahan non terbangun yang masih mendominasi. Meskipun demikian, bila melihat perkembangan yang ada bahwa aktivitas penggunaan lahan mengalami peningkatan 1,35% berdasarkan hasil analisis tapak terbangun pada rentang 2012 hingga 2017. Kecamatan Rangkasbitung menjadi kecamatan dengan luas penggunaan lahan terbangun paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya karena tidak terlepas dari posisinya sebagai ibukota Kabupaten Lebak dan menjadi gerbang utama melalui keberadaan akses tol, stasiun besar, dan terminal tipe A.

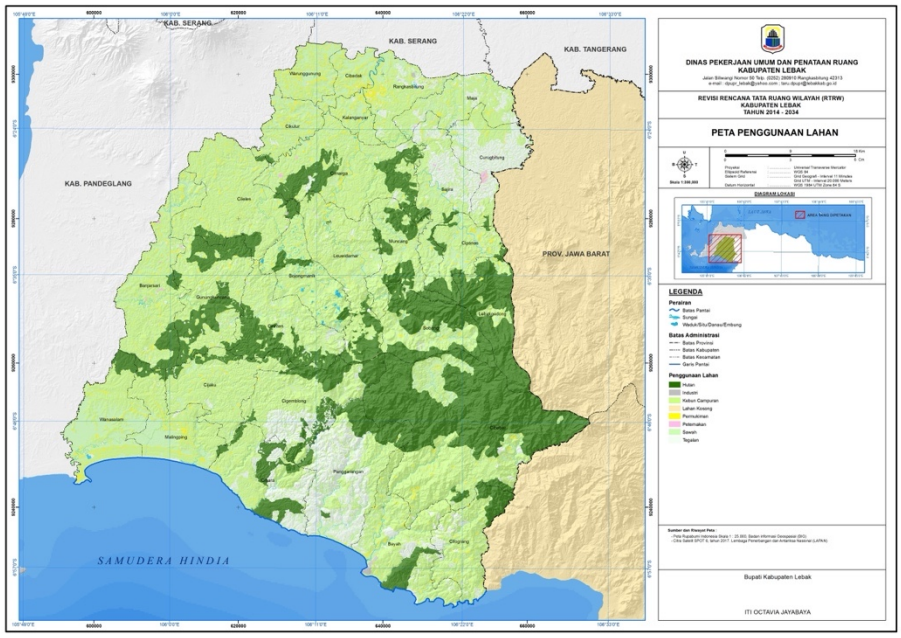


**Gambar 2. 8 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043*

## B. Peran Strategis Daerah

Kabupaten Lebak memiliki posisi dan peran strategis dalam konteks pembangunan regional maupun Nasional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan identitas dan peran strategisnya hingga saat ini. Sejak masa Kesultanan Banten, Kabupaten Lebak telah dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya hasil bumi. Sejalan dengan Undang - undang Nomor 115 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa salah satu karakteristik Kabupaten Lebak yaitu adanya potensi sumber daya alam berupa pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan serta potensi pariwisata.

**Gambar 2. 9 Konstelasi Wilayah Kabupaten Lebak**

*Sumber : Bapperida Kabupaten Lebak*

Pada masa penjajahan Belanda, Kabupaten Lebak menjadi perhatian khusus pemerintah kolonial, terutama dengan ditempatkannya Eduard Douwes Dekker (Multatuli) sebagai Asisten Residen di daerah ini. Pengalamannya yang kemudian dituangkan dalam novel Max Havelaar menjadikan Lebak sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan kolonial dan memperkuat citra Kabupaten Lebak dalam sejarah Nasional. Warisan ini kini terus dikenang melalui berbagai upaya pelestarian sejarah dan budaya, termasuk pendirian Museum Multatuli di Rangkasbitung. Setelah kemerdekaan, Kabupaten Lebak terus tumbuh sebagai bagian penting dalam struktur administratif Provinsi Banten. Berbagai pembangunan infrastruktur, seperti jalur kereta api dan konektivitas jalan Nasional, menjadikan daerah ini sebagai pintu gerbang ekonomi di wilayah selatan provinsi. Selain itu, kekayaan budaya lokal seperti tradisi adat Baduy dan warisan sejarah kolonial memberikan nilai tambah bagi potensi pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya.

Kini Kabupaten Lebak semakin memperkuat posisinya dalam konstelasi regional utamanya posisi strategis Rangkasbitung sebagai ibukota terus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur modern, seperti jalan tol dan jalur kereta rel listrik (KRL) yang menghubungkan langsung ke pusat kawasan Megapolitan Daerah Khusus Jakarta maupun Serang sebagai ibukota Provinsi Banten. Hal ini menjadikan Rangkasbitung sebagai simpul transportasi dan pusat pertumbuhan baru yang potensial. Kombinasi antara nilai historis, posisi geografis, dan pengembangan infrastruktur menjadikan Rangkasbitung sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang memperkuat peran strategis Kabupaten Lebak secara keseluruhan.

Disatu sisi lain tentu saja Kabupaten Lebak tetap memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan berkat adanya hutan lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Wilayah hulu ini berfungsi sebagai kawasan tangkapan air yang sangat vital untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan suplai air ke daerah hilir. Kemudian juga, dengan luas wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian dan sistem irigasi alami yang memadai, Kabupaten Lebak menjadi daerah penghasil utama komoditas pangan. Beberapa kecamatan di wilayah selatan dan tengah Kabupaten Lebak, seperti Malingping dan Wanasalam, dikenal sebagai sentra produksi pertanian yang menyuplai kebutuhan pangan baik untuk konsumsi lokal maupun regional. Hal ini memperkuat posisi Lebak sebagai penyangga ketahanan pangan, terutama di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat di wilayah perkotaan Banten dan Daerah Khusus Jakarta. Peran ganda sebagai lumbung pangan dan wilayah hulu sungai menjadikan Kabupaten Lebak tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sumber daya alam di Provinsi Banten. Maka secara tidak langsung, sebagian wilayah Kabupaten Lebak bisa dikatakan menjadi aglomerasi wilayah Daerah Khusus Jakarta dengan mempertimbangkan konektivitas, keterkaitan ekonomi, dan pendukung ekoregion hingga pangan.

### 2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

### A. Potensi Pertanian

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lebak, Sektor Pertanian menjadi sektor dominan dengan pemanfaatan lebih dari 50%. Selain dari pemanfaatan ruang, sektor pertanian pun memberikan kontribusi yang dominan juga pada struktur perekonomian Kabupaten Lebak, data menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian pada struktur ekonomi dari tahun ketahun menunjukkan kontribusi paling besar dibandingkan sektor lainnya.

Berdasarkan luas lahan kering dan penggunaannya Kabupaten Lebak. Pertanian tanaman pangan yang potensial bahkan tersebar di hampir seluruh kecamatan, menjadikan Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan dalam konteks regional di Provinsi Banten. Terkait dengan ini maka potensi pengembangan industri berbasis pemanfaatan hasil-hasil pertanian memiliki prospek yang sangat tinggi. Adapun luas lahan kering dan sawah beserta penggunaannya di Kabupaten Lebak dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

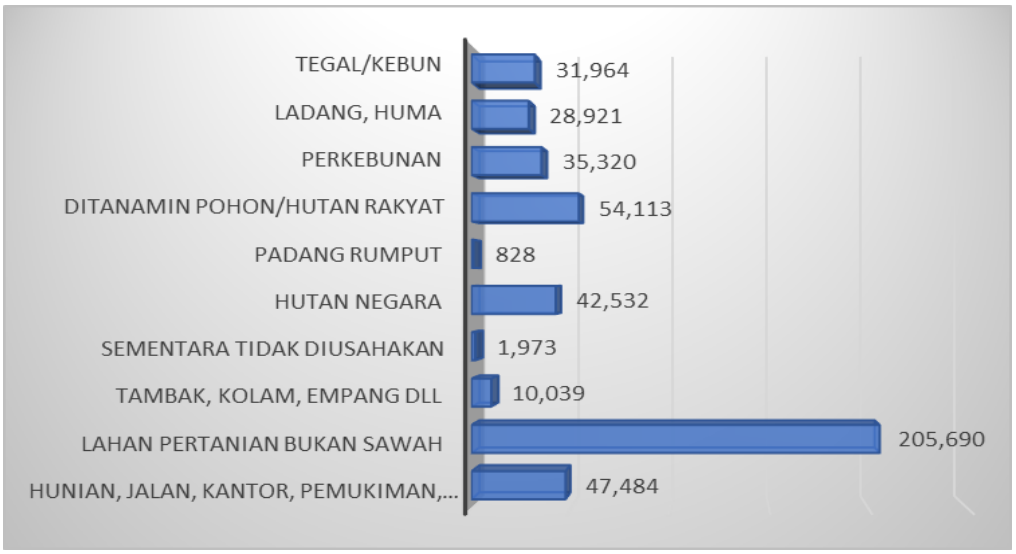


**Grafik 2. 1 Luas Lahan Kering dan Penggunaannya (Ha)**

*Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak Tahun 2024*

Pengunaan lahan Kabupaten Lebak dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan kering seluas 304.472 Ha dan lahan sawah seluas 51.298 Ha . Lahan kering terdiri dari lahan pertanian bukan sawah sebesar 205,624 Ha atau sekitar 43,79 %, lahan bukan pertanian jalan kantor dan pemukiman sebesar 47,484 Ha atau sekitar 12,40% dan sisanya berupa Hutan Rakyat, Huma, Hutan Negara, Tambak, Kebun dan Lainnya. Adapun Lahan Sawah terdiri dari sawah Irigasi dengan luas 24.147 Ha atau 46,76%, sawah Tadah Hujan dengan luas 27.144 Ha atau 53,23% dan sawah pasang surut dengan luas 7 Ha atau 0,01% hal inilah yang menjadi gambaran bahwa Kabupaten Lebak merupakan wilayah potensial yang memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan dalam konteks regional di Provinsi Banten terutama pada produktivitas padi.

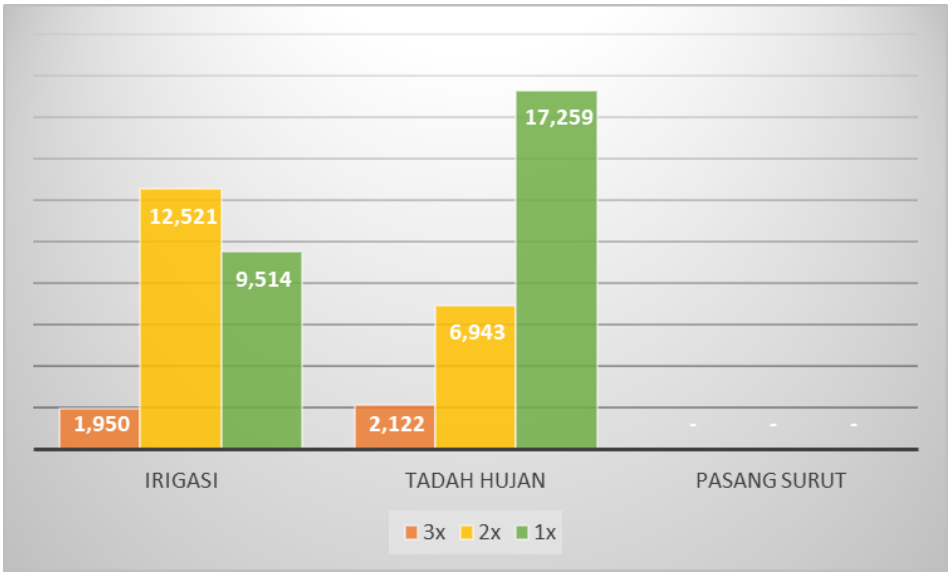


**Grafik 2. 2 Lahan Sawah dan Penggunaannya**

*Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak Tahun 2024*

Sebagai daerah penyangga pangan Provinsi Banten, produksi padi di Kabupaten Lebak merupakan komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Produksi padi cenderung meningkat setiap tahunnya yang

rata-rata mencapai 5% pada kurun waktu tahun 2020-2023, akan tetapi pada tahun 2024 ini produktivitas padi sawah mengalami penurunan .

Penurunan produktivitas padi pada tahun 2024 dikarenakan oleh kebutuhan air untuk tanaman padi yang kurang tercukupi karena seluruh wilayah di Kabupaten Lebak yang

hampir merata mengalami tingkat curah hujan yang cukup rendah selama tahun 2024. Sementara untuk produktivitas komoditas palawija lainnya mengalami fluktuasi yang beragam. Perkembangan produktivitas tanaman padi dan palawija selama kurun waktu 5 (enam) tahun terakhir tersaji pada tabel di bawah ini

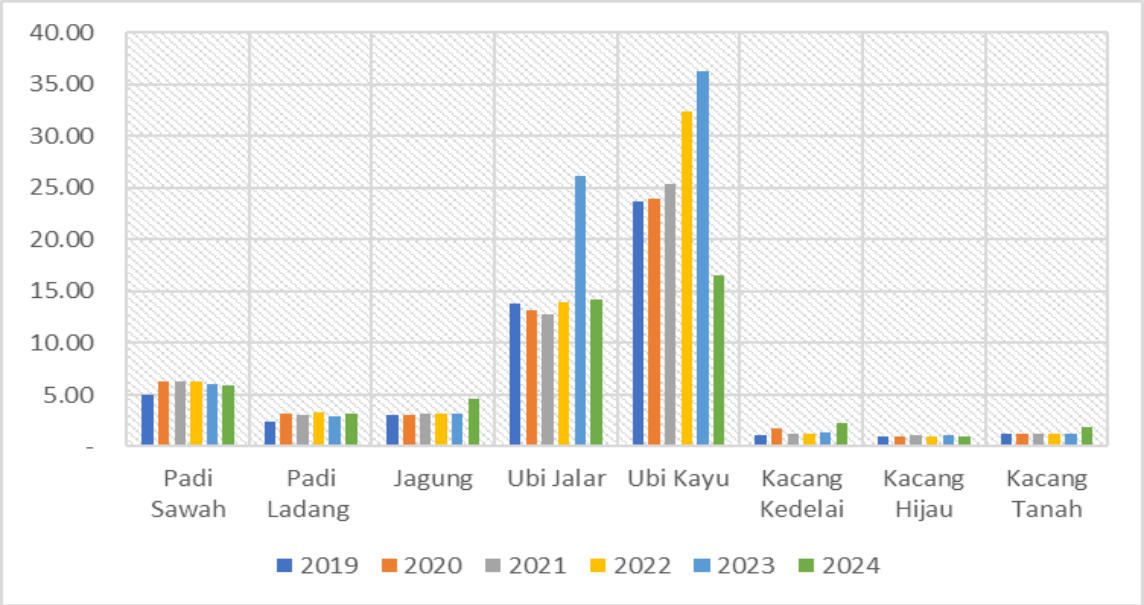


**Grafik 2. 3 Perkembangan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak Tahun 2024*

## B. Potensi Perikanan

Kabupaten Lebak mengalami peningkatan produksi perikanan, dengan jumlah produksi ikan kolam mendominasi produksi dengan volume rata-rata dari tahun 2020-2024 sebesar 3,2 juta kg, menunjukkan konsistensi produksi yang stabil dari budidaya. Sedangkan ikan tambak menempati posisi kedua dengan tren peningkatan signifikan dari 314.670 kg (2020) menjadi 791.210 kg (2024), ikan jaring apung mengalami penurunan drastis dari 53.220 kg (2020) menjadi 15.440 kg (2024), ikan keramba produksi rendah dan cenderung menurun dari 1.240 kg (2021) menjadi 970 kg (2024), serta ikan sawah volume minimal dan fluktuatif (2.860-5.080 kg), ikan kolam air deras tidak ada produksi tercatat selama periode 2020-2024.

Untuk penangkapan ikan laut menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 6,4 juta kg (2020) menjadi 6,8 juta kg (2024) dan mengalami sedikit penurunan di 2021, kemudian pemulihan kembali sehingga pertumbuhan stabil kembali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik-grafik berikut.

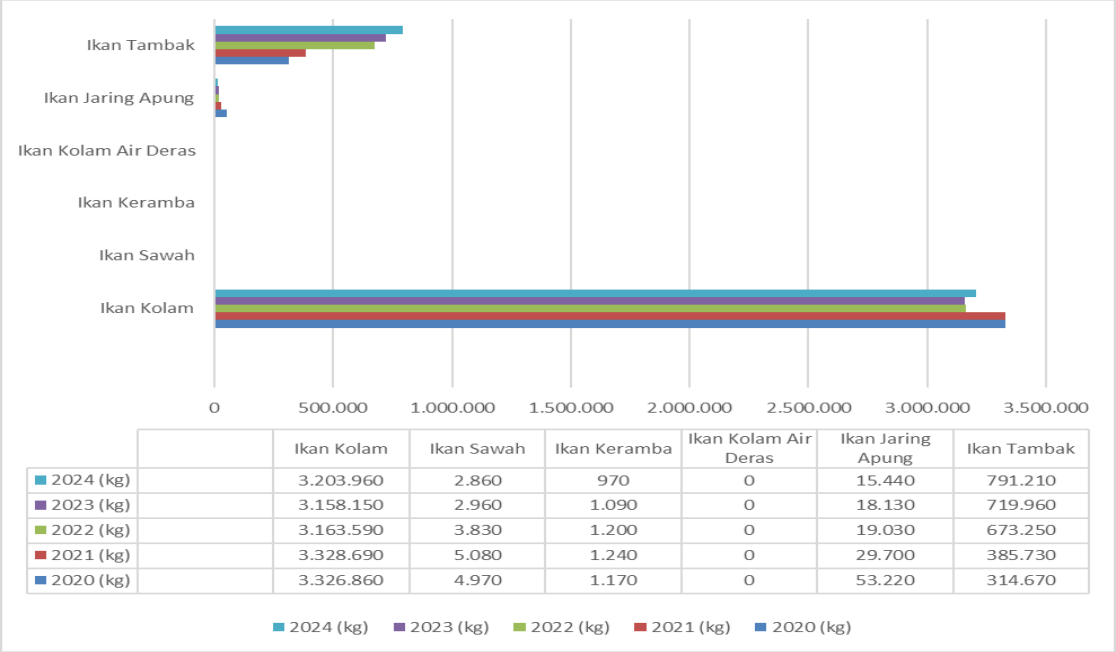


| | | Ikan Kolam | Ikan Sawah | Ikan Keramba | Ikan Kolam Air Deras | Ikan Jaring Apung | Ikan Tambak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (kg) | | 3.203.960 | 2.860 | 970 | 0 | 15.440 | 791.210 |
| 2023 (kg) | | 3.158.150 | 2.960 | 1.090 | 0 | 18.130 | 719.960 |
| 2022 (kg) | | 3.163.590 | 3.830 | 1.200 | 0 | 19.030 | 673.250 |
| 2021 (kg) | | 3.328.690 | 5.080 | 1.240 | 0 | 29.700 | 385.730 |
| 2020 (kg) | | 3.326.860 | 4.970 | 1.170 | 0 | 53.220 | 314.670 |

**Grafik 2. 4 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, 2024.*

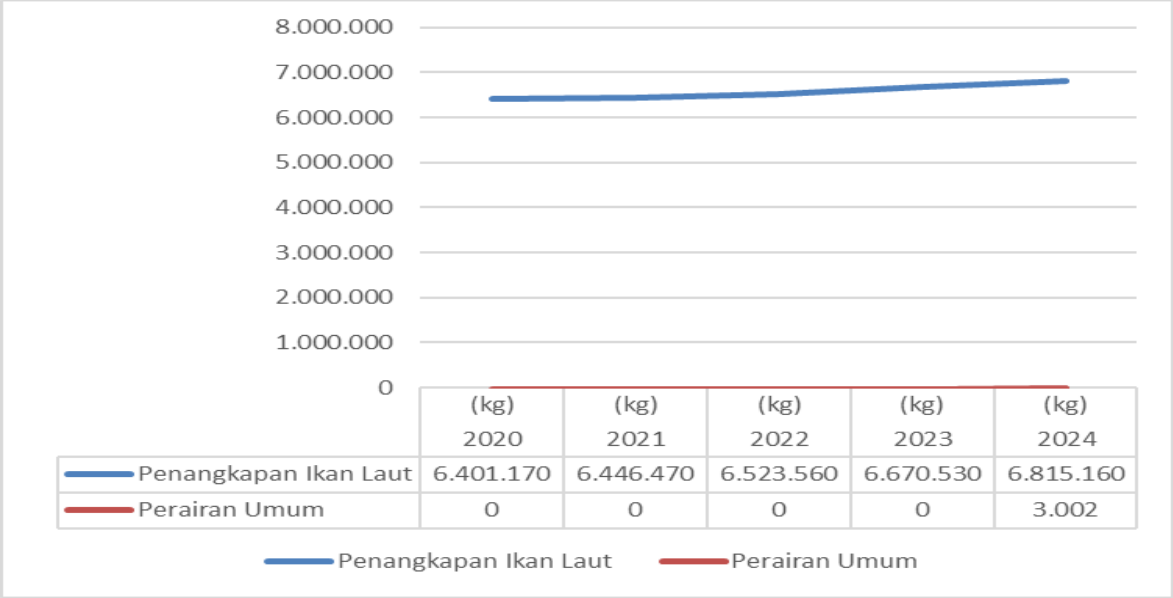


| | (kg) 2020 | (kg) 2021 | (kg) 2022 | (kg) 2023 | (kg) 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penangkapan Ikan Laut | 6.401.170 | 6.446.470 | 6.523.560 | 6.670.530 | 6.815.160 |
| Perairan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.002 |

**Grafik 2. 5 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Lebak 2020-2024**

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, 2024.*

Produksi perikanan budidaya mengalami pertumbuhan konsisten dari 3,7 juta kg (2020) menjadi 4,0 juta kg (2024), perikanan tangkap juga menunjukkan tren positif dari 6,4 juta kg (2020) menjadi 6,8 juta kg (2024) dan total produksi mengalami peningkatan dari 10,1 juta kg (2020) menjadi 10,8 juta kg (2024).

Untuk pertumbuhannya tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan negatif untuk semua kategori (sekitar -2,5% hingga -7,8%), pemulihan dimulai tahun 2021 dengan pertumbuhan positif dan tahun 2022 mencatat pertumbuhan tertinggi (sekitar 3% untuk budidaya dan 1,2% untuk tangkap) sedangkan tahun 2023-2024 pertumbuhan melambat namun tetap positif. Lebih jelasnya terdapat pada grafik-grafik di bawah ini.

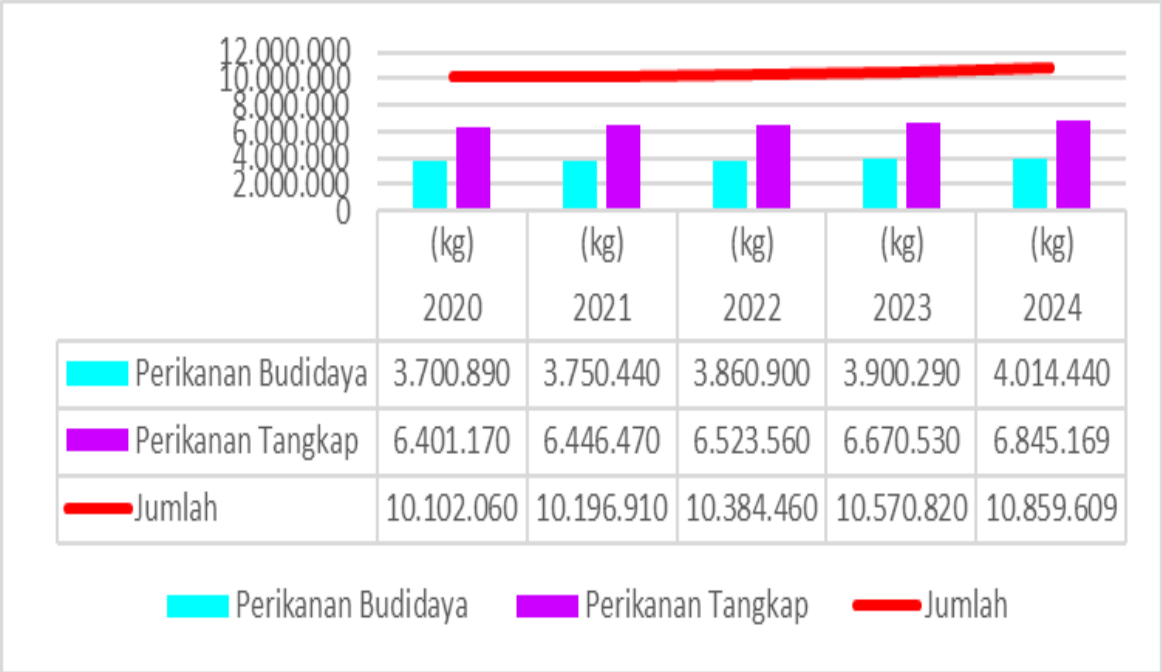


| | (kg) 2020 | (kg) 2021 | (kg) 2022 | (kg) 2023 | (kg) 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perikanan Budidaya | 3.700.890 | 3.750.440 | 3.860.900 | 3.900.290 | 4.014.440 |
| Perikanan Tangkap | 6.401.170 | 6.446.470 | 6.523.560 | 6.670.530 | 6.845.169 |
| Jumlah | 10.102.060 | 10.196.910 | 10.384.460 | 10.570.820 | 10.859.609 |

**Grafik 2. 6 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Lebak 2020-2024**

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, 2024.*

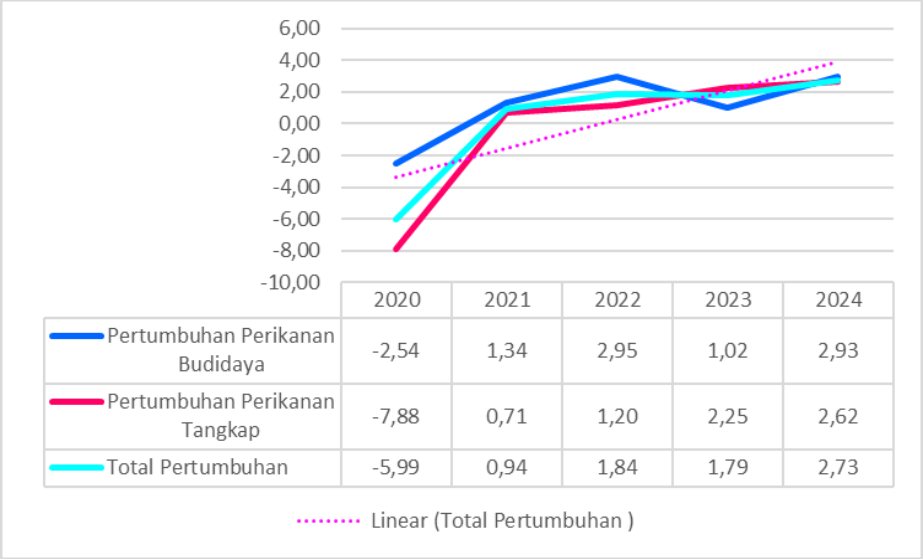


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Perikanan Budidaya | -2,54 | 1,34 | 2,95 | 1,02 | 2,93 |
| Pertumbuhan Perikanan Tangkap | -7,88 | 0,71 | 1,20 | 2,25 | 2,62 |
| Total Pertumbuhan | -5,99 | 0,94 | 1,84 | 1,79 | 2,73 |

**Grafik 2. 7 Pertumbuhan Produksi Perikanan Kabupaten Lebak 2020-2024**

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, 2024.*

Target produktivitas menunjukkan peningkatan konsisten dari Rp.23.047.700 (2020) menjadi Rp. 25.305.500 (2024) dan realisasi produktivitas tumbuh dari Rp. 19.264.758 (2020) menjadi Rp. 26.348.832 (2024). Hal ini menunjukkan tren positif dengan proyeksi peningkatan yang stabil dan mulai tahun 2022 realisasi berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

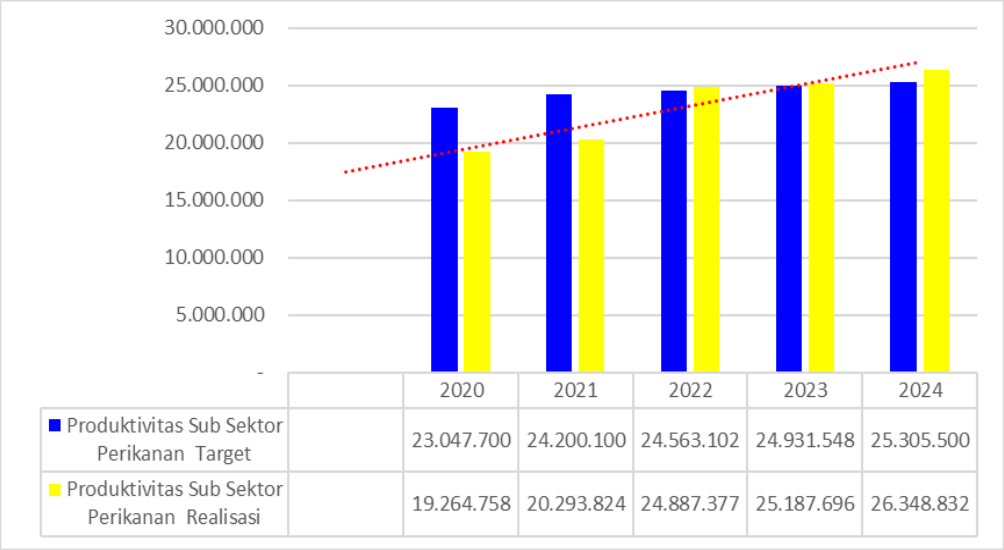


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitas Sub Sektor Perikanan Target | 23.047.700 | 24.200.100 | 24.563.102 | 24.931.548 | 25.305.500 |
| Produktivitas Sub Sektor Perikanan Realisasi | 19.264.758 | 20.293.824 | 24.887.377 | 25.187.696 | 26.348.832 |

**Grafik 2. 8 Produktivitas Perikanan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, 2024.*

Pertumbuhan produksi perikanan yang positif, meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi, namun sektor ini berhasil pulih dan tumbuh konsisten hingga 2024, perikanan tangkap masih mendominasi produksi dengan kontribusi sekitar 63% dari total produksi, sementara budidaya berkontribusi 37%. Potensi pengembangan budidaya masih terbuka lebar mengingat pertumbuhannya yang konsisten dan bisa menjadi solusi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

## C. Potensi Pariwisata

Destinasi pariwisata buatan yang berada di Kabupaten Lebak, adalah tempat tempat wisata tersebut meliputi 1) Wisata Buatan Kawasan Rangkasbitung, dan 2) Wisata Buatan. Berdasarkan potensi wisata yang telah teridentifikasi pada arah pembangunan Kabupaten Lebak, daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, budaya, religi dan buatan. Berikut Tabel Obyek Destinasi Tempat Wisata (ODTW)

sebagai berikut :

**Tabel 2. 6 Destinasi Wisata di Kabupaten Lebak**

| Jenis ODTW | | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Wisata Alam | | | 167 |
| | Wisata Alam Curug | 73 | |
| | Wisata Alam Pantai | 40 | |
| | Wisata Alam Goa | 32 | |
| | Wisata Alam Air Panas | 7 | |
| | Wisata Panorama Alam | 15 | |
| Wisata Budaya | | | 25 |
| Wisata Religi | | | 17 |
| Wisata Buatan | | | 37 |
| **Total** | | | **246** |

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, 2025*

Melihat data ini, seharusnya strategi pemasaran destinasi wisata di Kabupaten Lebak difokuskan pada wisatawan domestik, terdapat peluang untuk menarik wisatawan internasional dengan strategi khusus. Untuk mendorong pertumbuhan positif dalam sektor pariwisata pasca pandemi, disarankan untuk mengembangkan paket- paket wisata yang dapat meningkatkan pengeluaran rata-rata dan durasi tinggal wisatawan, serta mematuhi prinsip pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan tren wisata saat ini.

Kebijakan Pemerintah pada Tahun 2019 yaitu dengan perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan sektor Pariwisata dengan melakukan beberapa langkah strategis salah satunya melakukan MoU dengan beberapa Stakeholder yang dapat memberikan kontribusi langsung seperti MoU dengan Badan Ekonomi Kreatif, Perhutani, TNGHS, dan lembaga lainnya. Selain melakukan MoU Pemerintah Kabupaten Lebak juga dalam berbagai kesempatan mendorong masyarakat dan Pemerintah Desa untuk secara bersama – sama mendukung dan berperan aktif mewujudkan visi tersebut. Langkah ini cukup efektif sehingga banyak objek – objek Pariwisata yang bermunculan baik yang skala kecil maupun besar yang dikelola oleh

masyarakat secara mandiri atau oleh Desa melalui Badan Usaha Milik Desa tentunya objek – objek wisata ini diluar objek wisata yang menjadi unggulan Kabupaten Lebak yaitu Sawarna, Baduy, Kasepuhan Citorek, dan Agrowisata Cikapek.

## D. Potensi Industri

Kabupaten Lebak merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang melimpah, sehingga menjadi landasan kuat dalam pengembangan berbagai industri unggulan. Industri unggulan di Kabupaten Lebak berkembang dari kekuatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, budaya masyarakat adat, dan letak geografis yang strategis antara wilayah pesisir, dataran, dan perbukitan.

**Tabel 2. 7 Industri Unggulan Kabupaten Lebak**

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri |
|---|---|---|
| 1. | Industri pangan | 1. Industri Pengolahan Ikan<br>2. Industri Pengolahan Bahan Penyegar<br>3. Industri Makanan Ringan<br>4. Industri Tempe Tahu<br>5. Industri Pengolahan Tepung<br>6. Industri Gula berbasis Aren, dan Kelapa<br>7. Industri Pengolahan Buah dan Sayur<br>8. Industri Pengolahan Minyak Nabati<br>9. Industri Minuman |
| 2. | Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka | 1. Industri Pakaian Jadi<br>2. Industri Kulit dan Alas Kaki |
| 3. | Industri hulu agro | . Industri Oleokimia<br>2. Industri Barang dari Kayu dan Bambu |
| 4. | Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam | 1. Industri Bahan Galian Non Logam (Keramik, Semen, Gelas/Kaca Dekorasi)<br>2. Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik<br>3. Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes<br>4. Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang |
| 5. | Industri alat transportasi | 1. Industri Kendaraan Bermotor<br>2. Industri Perkapalan |

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri |
|---|---|---|
| 6. | Industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa Industri | 1. Industri Bahan Penolong<br>2. Jasa Industri |

*Sumber : Perda RPIK Kabupaten Lebak Tahun 2024 – 2044*

Salah satu industri andalan Kabupaten Lebak adalah industri gula aren, yang telah dikenal luas di pasar nasional dan internasional. Gula aren Lebak, baik dalam bentuk cetak maupun kristal (gula semut), diproduksi oleh ribuan UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan. Komoditas ini tidak hanya menjadi penopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi komoditas ekspor ke berbagai negara, seperti Australia, Jerman, dan Amerika Serikat.

Selain itu, industri batik Lebak juga menjadi simbol kekayaan budaya lokal. Dengan mengangkat motif-motif khas yang terinspirasi dari alam dan budaya Baduy, industri ini tidak hanya bernilai seni tinggi tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Produksi batik Lebak telah merambah pasar nasional dan internasional, didukung oleh pelatihan, pendampingan, serta strategi pemasaran digital dari pemerintah daerah.

Di sektor agroindustri, pengolahan hasil pertanian seperti pisang, emping, dan produk olahan ikan juga berkembang pesat. Wilayah seperti Bayah, Cibeber, dan Malingping menjadi sentra pengolahan keripik pisang, sale, abon ikan, dan kerupuk yang menyerap banyak tenaga kerja lokal dan menyumbang terhadap pertumbuhan UMKM. Tak kalah penting, industri kerajinan bambu dan kayu di Kabupaten Lebak terus berkembang, khususnya di wilayah Rangkasbitung, Sajira, dan Bojongmanik. Produk mebel dan kerajinan tangan berbahan bambu telah menembus pasar ekspor dengan kualitas yang bersaing, serta menjadi identitas kreativitas lokal yang berdaya saing global.

### 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Lebak akan dijabarkan terhadap beberapa hal. Mulai dari daya dukung terhadap air permukaan, lahan pertanian, lahan terbangun, lahan lindung, dan fungsi lindung serta daya tampung wilayah Kabupaten Lebak. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan ini mempertimbangkan kondisi saat ini dan memperkirakan posisi 5 (lima) tahun yang akan datang atau tahun 2030.

#### A. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Permukaan

Air merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup khususnya manusia baik untuk keperluan minum, kegiatan rumah tangga, industri, maupun pertanian. Kebutuhan air terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan air domestik merupakan kebutuhan air untuk kegiatan rumah tangga yang mencakup minum, memasak, sanitasi, dan mencuci pakaian. Kegiatan yang dihitung dalam kebutuhan air non domestik, terdiri atas peternakan, perikanan, pertanian, dan industri. Kebutuhan total air di Kabupaten Lebak untuk memenuhi kebutuhan penduduk, lahan pertanian, industri, dan peternakan berdasarkan perhitungan kebutuhan domestik, non domestik, dan air lahan pada tahun 2023 sebesar 1.608.516.287,57 $m^3$/tahun. Hasil tersebut memperhitungkan jumlah penduduk tahun 2023, luas penggunaan lahan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023, dan jumlah ternak dalam buku Kabupaten Lebak Dalam Angka 2024.

Perhitungan kebutuhan air pada tahun 2030 dilakukan dengan memproyeksikan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan, sedangkan kebutuhan ternak diasumsikan tetap. Data untuk kebutuhan air domestik menggunakan proyeksi jumlah penduduk tahun 2030 dan untuk kebutuhan air lahan menggunakan luas rencana pola ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Lebak

tahun 2023-2043. Total proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Lebak pada tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan penduduk, lahan pertanian, industri, dan peternakan sebesar 6.629.204.468 $m^3$/tahun.

Setelah melihat kondisi kebutuhan air saat ini dan proyeksi 5 (lima) tahun yang akan datang, perlu dilihat juga ketersediaan air di Kabupaten Lebak dengna menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode Nasional. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, Kabupaten Lebak mempunyai potensi limpasan air pada tahun 2023 yang dapat disimpan dalam tanah sebesar 948.783.946,01 $m^3$/tahun, di mana potensi ketersediaan air tanah tersebut termasuk besar. Bahkan bila diklasifikasikan, kondisi daya dukung penyediaan air di Kabupaten Lebak termasuk dalam klasifikasi sedang sehingga memerlukan ditingkatkan menjadi klasifikasi tinggi dan sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya luasan kelas jasa sedang sebesar 59,88% dan rendah sebesar 13,2% di Kabupaten Lebak. Kedua jasa tersebut memiliki luasan masing-masing sebesar 422.835,71 Ha (sedang) dan 93.212,73 Ha (rendah). Kelas jasa tinggi menempati urutan kedua luasan terbesar setelah kelas jasa sedang sebesar 19,12% atau 134.991 Ha, sedangkan kelas jasa tinggi seluas 43.078,03 Ha atau 6,1% menempati urutan keempat. Berdasarkan sebaran luasan kelas jasa penyedia air bersih masing-masing kecamatan di Kabupaten Lebak, kelas jasa sangat tinggi memiliki luasan terbesar di Kecamatan Cikulur dengan luasan sebesar 6.748,25 Ha sekaligus menjadi luas kelas jasa terbesar di kecamatan tersebut. Kelas jasa tinggi memiliki luasan terbesar di Kecamatan Muncang dengan luasan sebesar 12.415,26 Ha. Kelas jasa sedang memiliki luasan terbesar di Kecamatan Cigemblong dengan luasan sebesar 44.037,94 Ha. Kelas jasa rendah dan sangat rendah terluas berada di Kecamatan Cibeber dengan luasan secara berturut-turut sebesar 15.145,2 Ha dan 1.789,13 Ha. Persebaran kelas tinggi dan sangat tinggi cenderung tersebar di area barat daya, barat laut, dan tengah Kabupaten Lebak. Persebaran di bagian barat daya dan barat laut lebih mendominasi luas kelas jasa ekosistem sangat tinggi, sedangkan

kelas jasa tinggi cenderung berada di bagian tengah. Bagian tengah khususnya tenggara didominasi oleh kelas jasa ekosistem sedang dan rendah.

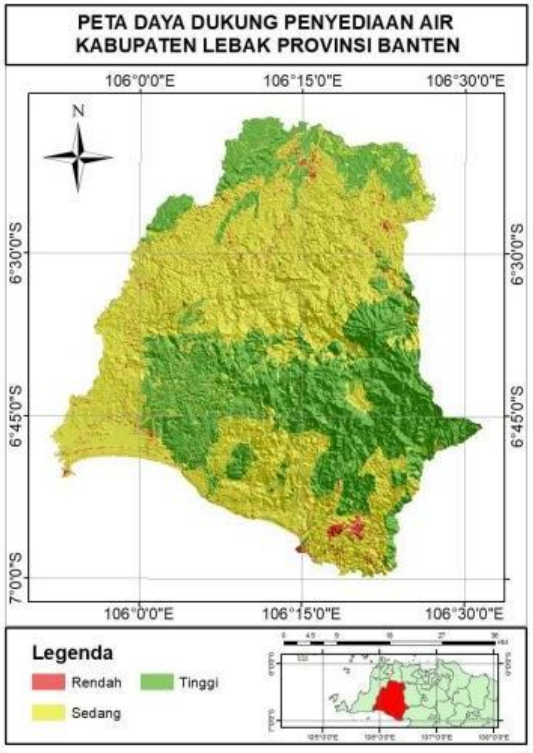


**Gambar 2. 10 Peta Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Lebak**

*Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029*

Setelah melihat data ketersediaan air kemudian dibandingkan total kebutuhan maka dapat disimpulkan bahwa status ketersediaan air di Kabupaten Lebak berdasarkan daya dukung air berbasis air limpasan memiliki status defisit sebesar 659.732.341,56 $m^3$/tahun sehingga status DDA tahun 2023 adalah Terlampaui (SA<DA) atau DEFISIT karena ketersediaan air (SA) lebih rendah daripada jumlah total kebutuhan (DA). Bahkan bila diproyeksikan lebih lanjut pada tahun 2030 yang kemudian dibandingkan dengan kebutuhan air di 2030 maka status DDA pada proyeksi tahun 2030 adalah DEFISIT atau terlampaui (SA<DA) dengan defisit sebesar 5.277.648.468,35 $m^3$/tahun, meskipun ketersediaan air meningkat namun tidak signifikan. Hal ini perlu disikapi

serius mengingat air merupakan sumber kehidupan. Salah satu strateginya ialah bagaimana memastikan pemanfaatan ruang yang bijak dan upaya pengendalian terhadap ancaman konversi lahan khususnya pada daerah tangkapan air. Selain itu, perlu adanya intervensi khusus guna memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan optimal memanfaatkan peluang kondisi klimatologi dan hidrogeologi Kabupaten Lebak.

## B. Daya Dukung Lahan Pertanian

Peran lahan pertanian sangat penting seiring dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga kebutuhan pangan juga mengalami kenaikan. Kemampuan wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya agar hidup dengan sejahtera merupakan daya dukung wilayah untuk lahan pertanian. Konsep daya dukung wilayah untuk lahan pertanian menerapkan ambang batas kritis daya dukung, yaitu jumlah populasi terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, daya dukung lahan pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak termasuk dalam kelas tinggi untuk daya dukung lahan pertanian dengan luas 19,56%, dan terutama terletak di daerah dataran dan pelembahan. Sementara itu, kelas rendah merupakan yang paling minor, dengan luasan yang sangat kecil, yaitu 0,87%. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah memiliki daya dukung pangan yang cukup baik, terdapat area dengan daya dukung yang lebih tinggi dan sangat terbatas pada kelas rendah. Berdasarkan sebaran luasan kelas jasa penyedia pangan masing-masing kecamatan di Kabupaten Lebak, kelas jasa sangat tinggi memiliki luasan terbesar di Kecamatan Wanasalam dengan luasan sebesar 7.028,41 Ha sekaligus menjadi luas kelas jasa terbesar di kecamatan tersebut. Kelas jasa tinggi, rendah, hingga sangat rendah memiliki luasan terbesar di Kecamatan Cibeber dengan luasan secara berturut-turut

sebesar 5.693,51 Ha, 19.377,06 Ha, dan 3.674,73 Ha. Kelas sedang memiliki luasan terbesar di Kecamatan Panggarangan dengan luasan sebesar 34.821,04 Ha.

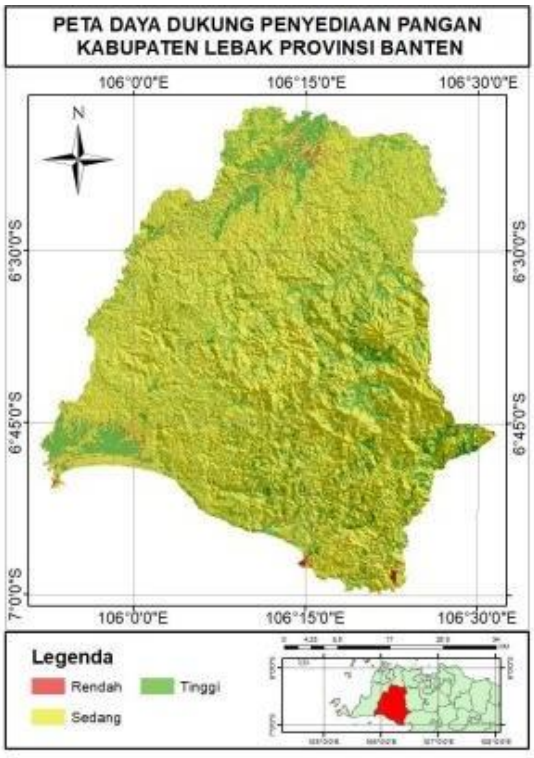


**Gambar 2. 11 Peta Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Lebak**

*Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029*

Hasil perhitungan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya karena nilai daya dukung lahan pertanian > 1 yang artinya belum terlampaui atau mampu melakukan swasembada pangan. $\tau > 1$ berarti suatu wilayah mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal dan secara keseluruhan terdapat 1 (satu) kecamatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri yaitu Kecamatan Rangkasbitung karena nilai daya dukung lahan pertanian sebesar 0,94 ($\tau < 1$).

Adapun untuk proyeksi tahun 2025 dan 2030 juga diperlukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk, sedangkan komponen lain diasumsikan bernilai tetap. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa kebutuhan akan lahan pertanian di Kabupaten Lebak lebih besar ketersediaan lahannya. Dengan demikian, Kabupaten Lebak mampu melakukan swasembada pangan pada tahun 2025. Bila diproyeksikan lebih jauh hingga 5 (lima) tahun yang akan datang, Kabupaten Lebak juga tetap mampu melakukan swasembada pangan di 2030 karena nilai daya dukung wilayah untuk lahan pertanian ($\tau$) lebih besar dari 1 ($\tau > 1$). Dengan begitu maka Pemerintah Kabupaten Lebak siap mendukung penuh kebijakan swasembada pangan dalam mewujudkan kemandirian Nasional, dengan catatan tetap melaksanakan 4 (empat) pilar ketahanan pangan sebagai bagian dari kebijakan daerah ke depan.

## C. Daya Dukung Lahan Terbangun

Kabupaten Lebak mempunyai karakteristik permukiman cenderung mendekati pusat kegiatan karena mempertimbangkan efisiensi jarak dan waktu. Pusat kabupaten mempunyai daya tarik lebih tinggi daripada wilayah lain karena sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas layanan perlu dikembangkan agar lebih merata. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, Kabupaten Lebak secara umum termasuk dalam kategori baik dengan nilai DDLB 17,85. Daya dukung lahan untuk bangunan yang paling tinggi berada di Kecamatan Cigemblong, sedangkan yang paling rendah berada di Kecamatan Cibadak. Dengan demikian, Kabupaten Lebak perlu melakukan upaya pemeliharaan dan pengembangan kualitas lingkungan lahan terbangun untuk menjaga kualitas lingkungan, sehingga kemampuan lahan dalam mendukung kegiatan di atasnya dapat berkelanjutan pada masa mendatang.

Proyeksi daya dukung lahan terbangun untuk 5 (lima) tahun ke depan sangat penting untuk memastikan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan.

Mengingat Kabupaten Lebak sebagian besarnya masuk sebagai daerah konservasi sehingga lahan terbangun tidak bisa masif dilakukan untuk seluruh wilayah. Nilai daya dukung lahan untuk bangunan pada tahun 2030 di Kabupaten Lebak diperoleh melalui pendekatan proyeksi. Luas kawasan untuk permukiman menggunakan data dalam RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 sebesar 331.264 Ha. Luas wilayah diasumsikan tetap sama dengan tahun 2023, sedangkan luas lahan infrastruktur diasumsikan sebesar 30% dari luas kawasan untuk permukiman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki daya dukung lahan untuk bangunan sebesar 5,79 pada tahun 2030 sehingga termasuk dalam kategori baik.

## D. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung memiliki nilai pada rentang 0 (minimal) sampai dengan 1 (maksimal). Ketika nilai mendekati angka 1, fungsi lindung dalam suatu wilayah semakin baik. Sebaliknya, fungsi lindung semakin buruk atau berfungsi sebagai kawasan budidaya jika nilai mendekati angka 0. Tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung dan koefisien lindung lahan berdasarkan jenis guna lahan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, nilai daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lebak sebesar 0,44 yang tergolong dalam kelas sedang. Dapat dikatakan bahwa fungsi lindung di Kabupaten Lebak daya dukung utamanya berkaitan dengan keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) secara rata-rata masih terjaga dengan baik, meskipun disekitarnya atau daerah penyangganya sudah mulai bermunculan fungsi budidaya. Maka dari itu, penting sekali memastikan kebijakan ke depan dalam menjaga daya dukung fungsi lindung melalui pembangunan yang meperhatikan kaidah lingkungan dan mengedepankan aspek konservasi.

## E. Daya Tampung Wilayah

Pendekatan daya tampung wilayah merupakan kebalikan dari kepadatan penduduk dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Lebak pada tahun-tahun selanjutnya dalam menyediakan lahan permukiman bagi penduduknya, proyeksi daya tampung wilayah dilakukan menggunakan data proyeksi jumlah penduduk dan mengasumsikan luas wilayah tetap sama dengan tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa daya tampung Kabupaten Lebak bernilai 0,218 pada tahun 2029, yang mana lebih besar dari konsumsi lahan (Ha/jiwa) menurut standar Yeates yaitu 0,061 (untuk penduduk sejumlah 1 juta jiwa). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lebak masih dapat menampung jumlah penduduk secara layak sampai akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2029.

**Tabel 2. 8 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak**

| No | Daya Dukung | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Lahan Pertanian | Kabupaten Lebak mampu melakukan swasembada pangan yang ditunjukkan dari nilai daya dukung lahan pertanian >1 pada tahun 2023 sampai dengan 2030, namun tren perkembangan daya dukung pangan menurun dari 2023 sampai 2030. |
| 2 | Fungsi Lindung | Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori sedang (0,44) sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lebih cenderung menjadi kawasan budidaya. |
| 3 | Air | Daya dukung air Kabupaten Lebak berstatus **defisit atau terlampaui** pada tahun 2023 dengan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air yaitu 659.732.341,56 $m^3$/tahun, begitu juga hasil proyeksi tahun 2030 dengan selisih defisit sebesar 5.277.648.288,58 $m^3$/tahun. Faktor yang meningkatkan kebutuhan air pada tahun 2023 dan 2030 adalah kenaikan jumlah penduduk, luas lahan pertanian, dan luas lahan industri. |
| 4 | Daya Dukung Lahan Permukiman | Daya dukung lahan untuk bangunan (DDLB) Kabupaten Lebak bernilai 17,85 pada tahun 2023 yang termasuk dalam kategori baik dan 5,79 pada tahun 2030 yang termasuk dalam kategori baik. |
| 5 | Daya Tampung Wilayah | Berdasarkan standar kriteria Yeates, daya tampung wilayah Kabupaten Lebak masih mampu menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2030. |

*Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029*

### 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

#### A. Ketahanan Energi

Perkembangan aktivitas penduduk, baik itu pembangunan, industri, transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lain berpotensi meningkatkan konsumsi energi. Kabupaten Lebak masih tergantung pada energi fosil, terutama batu bara dan minyak bumi yang rentan isu lingkungan. Bahan bakar fosil sebagai contoh bensin, solar dan batu bara masih menjadi sumber energi pembakar yang ada di Kabupaten Lebak. Energi fosil tersebut digunakan pada proses produksi listrik, produksi industri dan kendaraan bermotor.

Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber energi terbarukan yang cukup besar, terutama pada energi angin dan air (hidro). Selain itu, potensi energi biomassa juga cukup menjanjikan karena luasnya lahan pertanian dan perkebunan. Meskipun memiliki potensi yang besar pengembangan energi baru terbarukan (EBT) masih belum optimal.

PLTM Cisono merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) yang dikelola oleh PLN Unit Induk Distribusi Banten yang ada di Kabupaten Lebak telah beroperasi dengan kapasitas 3 MW. PLTM Cisono merupakan bagian dari empat PLTM yang menjadi pemasok energi hijau selain PLTM Lebak Tundun, PLTM Situmulya, dan PLTM Bojong Cisono. Selain itu telah teridentifikasi beberapa potensi listrik tenaga air atau mikrohidro di Kabupaten Lebak berdasarkan sumber data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yaitu di :

1) Desa Maraya, Kecamatan Sajira
2) Desa Hariang dan Desa Sobang, Kecamaran Muncang
3) Desa Cimanyangrai, Kecamatan Gunung Kencana
4) Desa Kramat Jaya, Kecamatan Gunung Kencana
5) Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga
6) Desa Bojongmanik, Kecamatan Bojongmanik

Terdapat juga potensi panas bumi yang tersedia di Provinsi Banten sebesar 800 megawatt yang tersebar di tujuh lokasi dan yang telah diidentifikasi oleh Kementerian ESDM khususnya Badan Geologi ada dua titik potensi yang berada di Kabupaten Lebak yaitu Gunung Endut dengan potensi spekulatif sebesar 225 megawatt dan Pamancalan dengan potensi spekulatif sebesar 225 megawatt.

Pemerintah Kabupaten Lebak juga mempunyai rencana dalam pemanfaatan sampah menjadi sumber energi melalui rencana pembangunan TPST di TPA Dengung Kecamatan Maja dan Pondok Panjang Kecamatan Cihara, TPST ini ditargetkan mampu menampung 500 ton sampah per hari dan akan dikelola dengan sistem RDF (Refuse Derived Fuel) untuk diolah menjadi sumber energi. Untuk mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhit (TPA), fasilitas Pusat Daur Ulang merupakan sarana pengelolaan sampah yang dikembangkan di Kabupaten Lebak, sehingga upaya peningkatan penanganan sampah serta pengurangan jumlah sampah di TPA dapat tertangani.

Untuk saat ini, dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan upaya dalam pengembangan energi surya, misalnya dengan melaksanakan kegiatan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Upaya lain juga dilakukan dalam pengelolaan persampahan, dengan megupayakan peran aktif desa dalam pengelolaan sampah salah satunya mengkonversi sampah menjadi produk briket dari sampah yang dikelola.

Meskipun potensi sumber energi di Kabupaten Lebak secara umum cukup besar, potensi ini masih perlu dimanfaatkan lebih lanjut. Dengan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan ketahanan energi di Kabupaten Lebak

## B. Kosumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Lebak hingga 2024 dapat dikatakan belum merata. Bahkan bila dibandingkan dengan kabupaten/kota

lain di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak memiliki akses air minum layak paling rendah yaitu 75,24%. Pencapaian ini masih menyisakan *gap* yang cukup besar dengan target Nasional yaitu 100% cakupan air minum layak sebagai realisasi atas komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Meskipun demikian, tren perkembangan cakupan air minum di Kabupaten Lebak terus meningkat tiap tahunnya. Tinggal bagaimana mengejar ketertinggalan dan upaya percepatan menuju akses layak 100% bahkan mengarah kepada akses air minum aman.

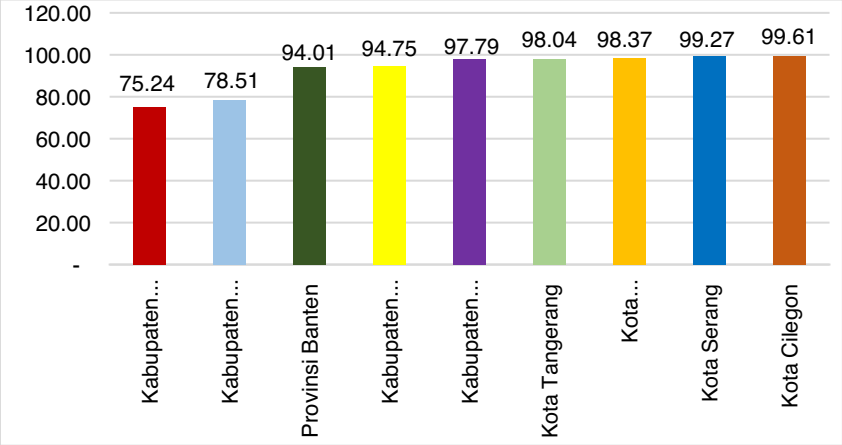


**Grafik 2. 9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024**

*Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025*

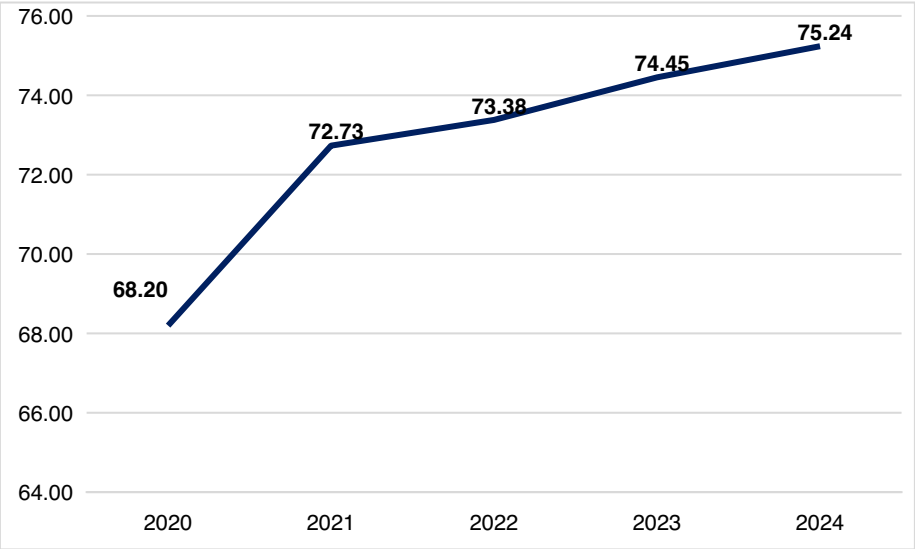


**Grafik 2. 10 Persentase Cakupan Air Minum yang Layak di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lebak, 2025*

Kabupaten Lebak tertinggal dalam akses air minum layak karena kombinasi beberapa faktor, yaitu:

a. Infrastruktur air minum yang belum optimal, terutama di daerah pedesaan sehingga terjadi ketimpangan antara kota dan desa, dengan akses lebih baik di perkotaan khususnya wilayah utara dibanding daerah lain;
b. Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Lebak yang cukup menjadi tantangan dalam penyediaan infrastruktur air minum;
c. Pertumbuhan penduduk yang cepat, menyebabkan permintaan air meningkat lebih cepat dari penyediaan infrastruktur;
d. Masalah kualitas air, seperti pencemaran dan intrusi air laut di beberapa daerah;
e. Investasi yang masih kurang sehingga layanan SPAM IKK Perumdam Tirta Kalimaya hanya mencapai 11 SPAM; dan
f. Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam penggunaan air minum layak.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Pemerintah Daerah dan BUMD Air Minum dalam hal ini Perumdam di Kabupaten Lebak perlu memperluas jaringan air bersih, meningkatkan pengolahan air, dan memastikan penduduk perdesaan mendapatkan akses yang lebih baik. Mengingat juga khususnya pada layanan Perumdam Tirta Kalimaya bahwa dari total kapasitas air baku sebanyak 685 liter/detik baru termanfaatkan 226 liter/detik atau hanya 33% sehingga masih cukup banyak *idle capacity*. Untuk itu, perlu adanya dorongan terhadap peningkatan layanan dan jangkauan tidak hanya ke masyarakat namun juga komersil. Selain itu, perlu juga mencari *innovative financing* untuk peningkatan konsumsi air minum masyarakat mengingat kapasitas fiskal Kabupaten Lebak yang terbatas.

## C. Kemandirian Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat Keamanan Pangan antara lain:

- **Indeks Ketahanan Pangan**

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Analisis Komposit menghasilkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang selanjutnya dibagi menjadi enam kelas status ketahanan pangan wilayah, yaitu : Prioritas 1 (sangat rentan); Prioritas 2 (rentan); Prioritas 3 (agak rentan); Prioritas 4 (agak tahan); Prioritas 5 (tahan); dan Prioritas 6 (sangat tahan).

Adapun Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak tertera pada tabel di bawah ini :

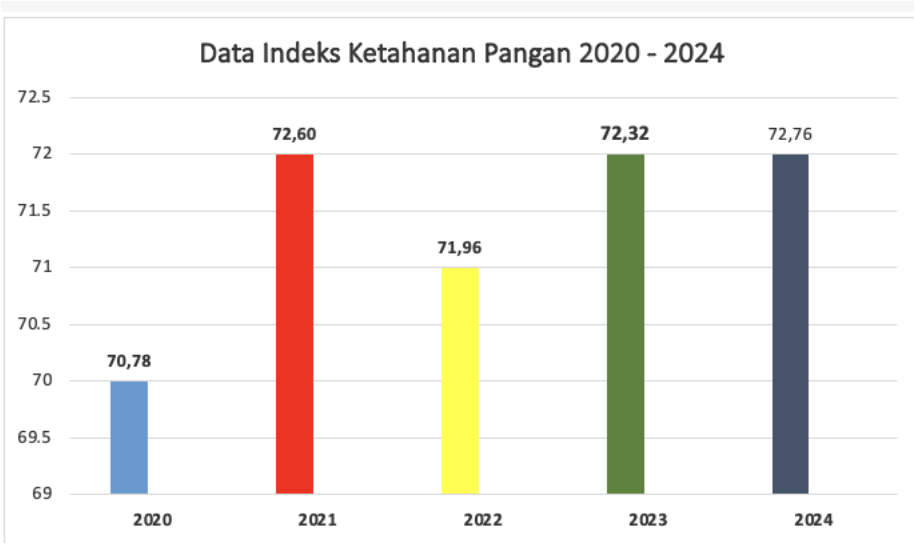


**Grafik 2. 11 Data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024*

Dari data yang terdapat pada tabel untuk tahun 2022 nilai IKP Kab. Lebak 71,96, tahun 2023 nilai IKP Kab. Lebak mengalami peningkatan menjadi 72,32 sedangkan pada tahun 2024 nilai IKP Lebak sebesar 72,76 dimana dari Indeks yang didapat kondisi ketahanan pangan Kabupaten Lebak dalam kategori tahan pangan dan tidak rentan

Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi.

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif

lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa/kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa/kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera.

Meskipun demikian, wilayah (desa/kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa/kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Untuk melihat perbandingan kondisi komposit FSVA hasil pengamatan FSVA dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 9 Perbandingan Sebaran Komposit Jumlah Desa /Kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2020-2024**

| Prioritas | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Desa/ Kel | % | Jumlah Desa/ Kel | % | Jumlah Desa/ Kel | % | Jumlah Desa/ Kel | % | Jumlah Desa/ Kel | % |
| 1 | Na | Na | 1 | 0,29% | 1 | 0,29% | 1 | 0,29% | 5 | 1,45% |
| 2 | Na | Na | 5 | 1,45% | 5 | 1,45% | 12 | 3,48% | 55 | 15,94% |
| 3 | Na | Na | 35 | 10,14% | 35 | 10,14% | 72 | 20,87% | 75 | 21,74% |
| 4 | Na | Na | 115 | 33,33% | 115 | 33,33% | 119 | 34,49% | 115 | 33,33% |
| 5 | Na | Na | 149 | 43,19% | 149 | 43,19% | 76 | 34,49% | 62 | 17,97% |
| 6 | Na | Na | 40 | 11,59% | 40 | 11,59% | 65 | 18,84% | 33 | 9,57% |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak 2021*

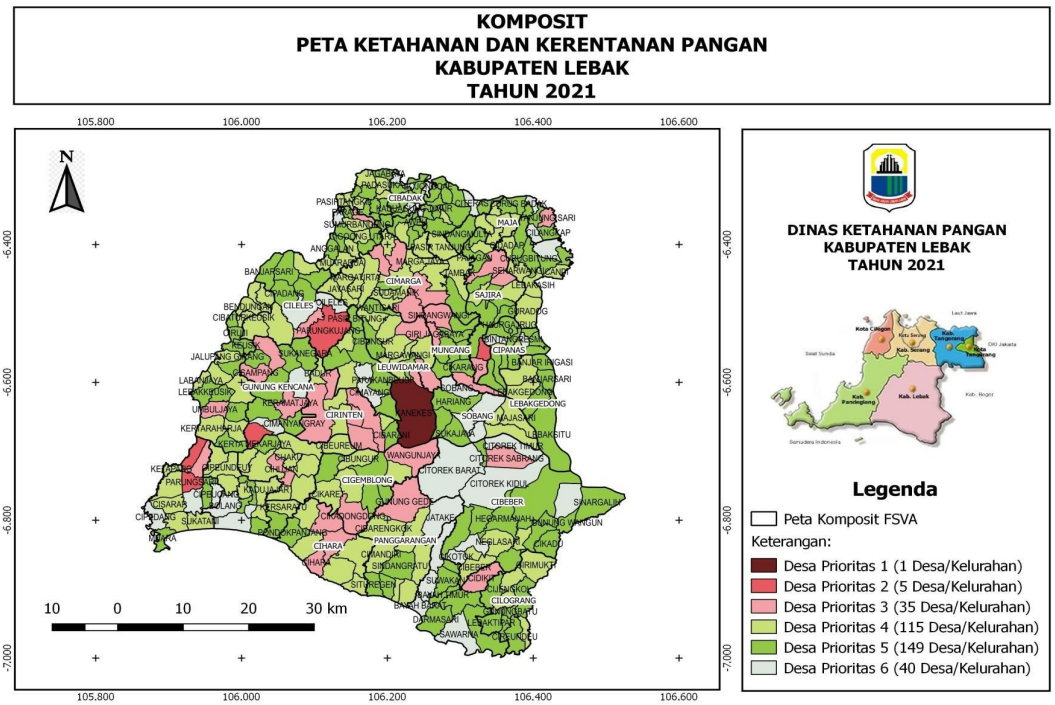


**Gambar 2. 12 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Lebak Tahun 2021**

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak 2021*

Berdasarkan hasil analisis komposit, terdapat 41 desa rentan rawan pangan di Kabupaten Lebak dengan sebaran prioritas pada prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Satu desa prioritas 1 berada di Kecamatan Leuwidamar (1 Desa : Kanekes), 5 (Lima) desa prioritas 2 berada di Kecamatan Wanasalam (2 desa : Parungsari dan Karang Pamindangan), Kecamatan Cileles (1 desa : Parungkujang), Kecamatan Gunung Kencana (1 desa : Tanjungsari Indah), dan Kecamatan Sajira (1 desa: Margaluyu). serta 35 (Tiga Puluh Lima) desa prioritas 3 berada di Kecamatan Wanasalam (1 desa : Cilangkap), Kecamatan Panggarangan (1 desa: Gunung Gede), Kecamatan Cihara (3 desa : Cihara, Lebak Peundeuy dan Barunai), Kecamatan Bayah (1 desa : Cidikit), Kecamatan Cibeber (1 desa : Citorek Sabrang), Kecamatan Cijaku (1 desa : Cihujan), Kecamatan Cigemblong (2 desa : Cikadongdong dan Wangunjaya), Kecamatan Banjarsari (1 desa : Umbul jaya), Kecamatan Cileles (1 desa : Kujang sari), Kecamatan Gunung Kencana (3 desa : Keramat jaya, Cisampang dan Ciginggang), Kecamatan

Cirinten (5 desa : Parakan lima, Datarcae, Nangerang, Cirinten dan Cempaka), Kecamatan Leuwidamar (2 desa : Nayagati dan Jalupang Mulya), Kecamatan Muncang (4 desa : Pasireurih, Sindangwangi, Jagaraksa dan Giri Jagabaya), Kecamatan Sajira (3 desa : Maraya, Paja dan Mekarsari), Kecamatan Cimarga (4 desa : Jayamanik, Margaluyu, Mekar Jaya dan Inten Jaya), Kecamatan Cikulur (1 desa : Sukadaya), dan Kecamatan Maja (1 desa : Tanjung Sari). Sedangkan 304 desa lainnya termasuk dalam kategori tahan pangan.

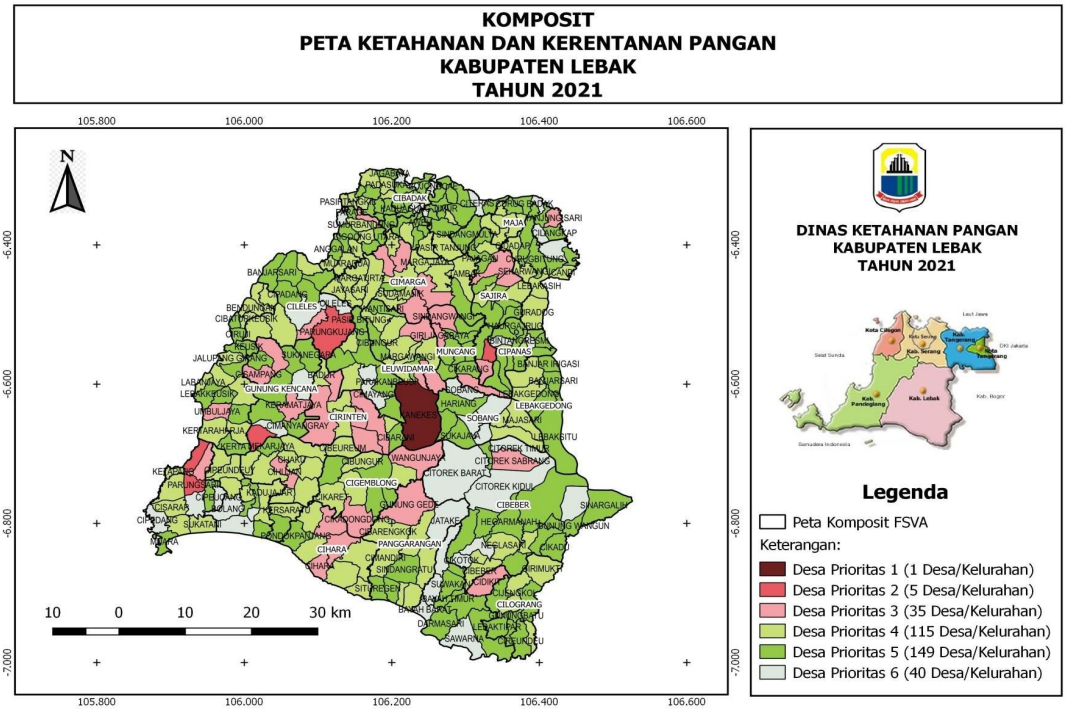


**Gambar 2. 13 Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan (FSVA) Kabupaten Lebak**

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak 2021*

Berdasarkan hasil analisis komposit, terdapat 41 desa rentan rawan pangan di Kabupaten Lebak dengan sebaran prioritas pada prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Satu desa prioritas 1 berada di Kecamatan Leuwidamar (1 Desa : Kanekes), 5 (Lima) desa prioritas 2 berada di Kecamatan Wanasalam (2 desa : Parungsari dan Karang Pamindangan), Kecamatan Cileles (1 desa : Parungkujang), Kecamatan Gunung Kencana

(1 desa : Tanjungsari Indah), dan Kecamatan Sajira (1 desa: Margaluyu). serta 35 (Tiga Puluh Lima) desa prioritas 3 berada di Kecamatan Wanasalam (1 desa : Cilangkap), Kecamatan Panggarangan (1 desa: Gunung Gede), Kecamatan Cihara (3 desa : Cihara, Lebak Peundeuy dan Barunai), Kecamatan Bayah (1 desa : Cidikit), Kecamatan Cibeber (1 desa : Citorek Sabrang), Kecamatan Cijaku (1 desa : Cihujan), Kecamatan Cigemblong (2 desa : Cikadongdong dan Wangunjaya), Kecamatan Banjarsari (1 desa : Umbul jaya), Kecamatan Cileles (1 desa : Kujang sari), Kecamatan Gunung Kencana (3 desa : Keramat jaya, Cisampang dan Ciginggang), Kecamatan Cirinten (5 desa : Parakan lima, Datarcae, Nangerang, Cirinten dan Cempaka), Kecamatan Leuwidamar (2 desa : Nayagati dan Jalupang Mulya), Kecamatan Muncang (4 desa : Pasireurih, Sindangwangi, Jagaraksa dan Giri Jagabaya), Kecamatan Sajira (3 desa : Maraya, Paja dan Mekarsari), Kecamatan Cimarga (4 desa : Jayamanik, Margaluyu, Mekar Jaya dan Inten Jaya), Kecamatan Cikulur (1 desa : Sukadaya), dan Kecamatan Maja (1 desa : Tanjung Sari). Sedangkan 304 desa lainnya termasuk dalam kategori tahan pangan.

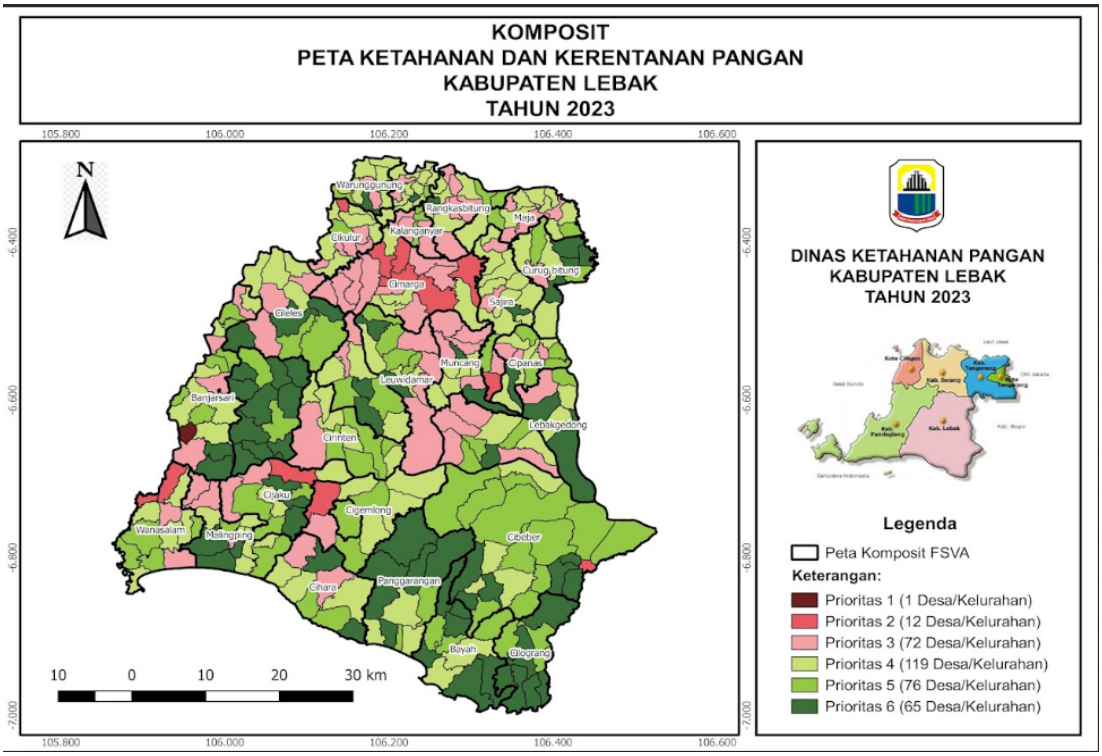


**Gambar 2. 14 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Lebak Tahun 2023**

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak 2023*

2), 72 desa/kelurahan (Prioritas 3), 119 desa/kelurahan (Prioritas 4), 76 desa/kelurahan (Prioritas 5) dan 65 desa/kelurahan (Prioritas 6). Sebaran wilayah desa yang termasuk prioritas 1- 3 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a) **Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1** terdapat di wilayah Kecamatan Banjarsari (1 desa : Umbuljaya).
b) **Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2** terdapat di wilayah Kecamatan Cibeber (1 desa : Gunungwangun), Kecamatan Cigemblong (1 desa : Peucangpari), Kecamatan Cijaku (1 desa : Cipalabuh), Kecamatan Cikulur (1 desa : Parage), Kecamatan Cimarga (5 desa : Cimarga, Intenjaya, Margaluyu, Mekarjaya, Tambak), Kecamatan Sajira (1 desa : Maraya) dan Kecamatan Wanasalam (2 desa : Karangpamindangan dan Katapang).

c) **Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3** terdapat di wilayah Kecamatan Banjarsari (4 desa : Ciruji, Cisampih, Kertaraharja, dan Kumpay), Kecamatan Bojongmanik (2 desa : Mekar Rahayu, dan Pasirbitung), Kecamatan Cibadak (2 desa : Asem Margaluyu dan Kaduagung Barat), Kecamatan Cigemlong (1 desa : Cikaret), Kecamatan Cihara (2 desa : Barunai dan Citeupuseun), Kecamatan Cijaku (2 desa : Kapunduhan dan Mekarjaya), Kecamatan Cikulur (5 desa : Cigoong Utara, Cikulur, Muncangkopong, Pasirgintung dan Tamanjaya), Laporan FSVA Kabupaten Lebak Tahun 2023 85 Kecamatan Cileles (3 desa: Cipadang, Daroyon, dan Pasindangan), Kecamatan Cimarga (8 desa : Girimukti, Gununganten, Jayamanik, Jayasari, Margajaya, Margatirta, Mekarmulya, dan Sarageni), Kecamatan Cipanas (3 desa : Harumsari, Malangsari, dan Sipayung), Kecamatan Cirinten (1 desa : Parakanlima), Kecamatan Curugbitung (1 desa : Sekarwangi), Kecamatan Kalanganyar (4 desa : Cilangkap, Pasirkupa, Sangiangtanjung, dan Sukamekarsari), Kecamatan Lebakgedong (1 desa : Lebaksangka), Kecamatan Leuwidamar (4 desa : Cisimeut, Jalupangmulya, Kanekes, dan Nayagati), Kecamatan Maja (4 desa : Buyut Mekar, Gubugan Cibeureu, Mekarsari, dan Sangiang), Kecamatan Malingping (3 desa : Cipeundeuy, Rahong, dan Senanghati), Kecamatan Muncang (5 desa : Cikarang, Girijagabaya, Mekarwangi, Sindangwangi, dan Sukanagara), Kecamatan Rangkasbitung (6 desa : Cimangeunteung, Jatimulya, Kolelet Wetan, Narimbang Mulia, Pasirtanjung, dan Sukamanah), Kecamatan Sajira (3 desa : Ciuyah, Margaluyu, dan Mekarsari), Kecamatan Sobang (4 desa : Hariang, Sinar Jaya, Sobang, dan Sukamaju), Kecamatan Wanasalam (2 desa: Parungsari dan Sukatani) dan Kecamatan Warunggunung (2 desa : Banjarsari dan Selaraja).

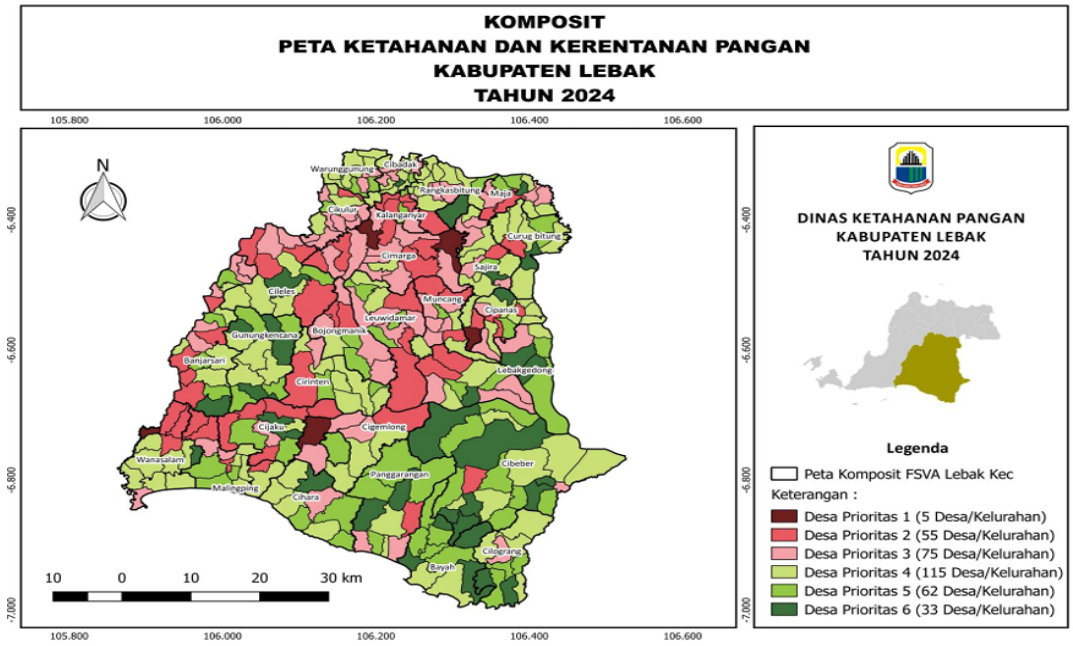


**Gambar 2. 15 Peta Ketahanan Pangan (FSVA) Kabupaten Lebak Tahun 2024**

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2024*

Berdasarkan hasil pemetaan Komposit FSVA tahun 2024, diperoleh 60,87% (210) desa/kelurahan di Kabupaten Lebak termasuk tahan pangan dan 39,14% (135) desa/kelurahan di Kabupaten Lebak termasuk pada situasi rentan terhadap kerawanan pangan.

Berdasarkan hasil analisis komposit FSVA tahun 2024 dari 345 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lebak, maka didapatkan 5 desa (Prioritas 1), 55 desa (Prioritas 2), 75 desa/kelurahan (Prioritas 3), 115 desa/kelurahan (Prioritas 4), 62 desa/kelurahan (Prioritas 5) dan 33 desa/kelurahan (Prioritas 6).

Sebaran wilayah desa yang termasuk prioritas 1-3 tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) **Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1** terdapat di wilayah Kecamatan Cigemblong (1 desa: Peucangpari), Kecamatan Cimarga (2 desa: Intenjaya, dan

Tambak), Kecamata Sajira (1 desa: Maraya), dan Kecamatan Wanasalam (1 desa: Katapang).

b) **Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2** terdapat di wilayah Kecamatan Banjarsari (5 desa: Ciruji, Cisampih, Kertaraharja, Lebakkeusik, dan Umbuljaya), Kecamatan Bojongmanik (2 desa: Harjawana dan Mekar Rahayu), Kecamatan Cibadak (1 desa: Cimenteng Jaya), Kecamatan Cibeber (1 desa: Cihambali), Kecamatan Cigemblong (1 desa: Wangunjaya), Kecamatan Cijaku (5 desa: Cimenga, Cipalabuh, Kapunduhan, Mekarjaya, dan Sukadaya), Kecamatan Cikulur (1 desa: Sukadaya), Kecamatan Cileles (4 desa: Banjarsari, Cipadang, Daroyon, dan Parungkujang), Kecamatan Cimarga (5 desa: Margaluyu, Margatirta, Mekarjaya, Mekarmulya, dan Sarageni), Kecamatan Cipanas (3 desa: Harumsari, Jayapura, dan Sipayung), Kecamatan Cirinten (1 desa: Parakanlima), Kecamatan Curugbitung (1 desa: Sekarwangi), Kecamatan Kalanganyar (4 desa: Aweh, Cilangkap, Pasirkupa, dan Sukamekarsari), Kecamatan Leuwidamar (3 desa: Jalupangmulya, Kanekes, dan Nayagati), Kecamatan Maja (2 desa: Buyut Mekar dan Mekarsari), Kecamatan Malingping (4 desa: Cipeundeuy, Kersaratu, Rahong, dan Senanghati), Kecamatan Panggarangan (1 desa: Mekarjaya), Kecamatan Rangkasbitung (1 desa: Pasirtanjung), Kecamatan Sajira (2 desa: Margaluyu dan Paja), Kecamatan Sobang (2 desa: Hariang dan Sobang), dan Kecamatan Wanasalam (3 desa: Cilangkap, Karangpamindangan, dan Parungsari).

c) **Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3** terdapat di wilayah Kecamatan Banjarsari (5 desa: Cilegongilir, Gunungsari, Jalupanggirang, Kaduhauk, dan Kumpay), Kecamatan Bojongmanik (4 desa: Kadurahayu, Keboncau, Parakanbeusi, Pasirbitung), Kecamatan Cibadak (4 desa: Asem Margaluyu, Bojongcae, Kaduagung Barat, dan Malabar), Kecamatan Cibeber (1 desa: Gunungwangun), Kecamatan Cigemblong (3 desa: Cibungur, Cigemblong, dan Cikaret), Kecamatan Cihara (1 desa: Barunai), Kecamatan Cijaku (1 desa: Cihujan), Kecamatan Cikulur (8 desa: Cigoong Selatan, Cigoong Utara, Cikulur, Muaradua, Muncangkopong, Pasirgintung,

Sukaharja, dan Tamanjaya), Kecamatan Cileles (2 desa: Gumuruh dan Prabugantungan), Kecamatan Cilograng (1 desa: Cijengkol), Kecamatan Cimarga (9 desa: Cimarga, Girimukti, Gununganten, Jayamanik, Jayasari, Karyajaya, Margajaya, Sangiangjaya, dan Sangkanmanik), Kecamatan Cipanas (2 desa: Malangsari, dan Pasirhaur), Kecamatan Cirinten (1 desa: Cempaka), Kecamatan Kalanganyar (1 desa: Sangiangtanjung), Kecamatan Lebakgedong (1 desa: Lebaksangka), Kecamatan Leuwidamar (4 desa: Cibungur, Cisimeut, Cisimeut Raya, dan Sangkanwangi), Kecamatan Maja (4 desa: Gubugan Cibeureum, Padasuka, Sangiang dan Tanjungsari), Kecamatan Malingping (2 desa: Sangiang, Sumberwaras), Kecamatan Muncang (5 desa: Girijagabaya, Leuwicoo, Pasirnangka, Sukanagara, dan Tanjungwangi), Kecamatan Situregen), Panggarangan Kecamatan Cimangeunteung, (2 Jatimulya, desa: Panggarangan Rangkasbitung Narimbang (4 Mulia, dan desa: dan Rangkasbitung Barat), Kecamatan Sajira (4 desa: Ciuyah, Mekarsari, Pajagan, dan Sajira Mekar), Kecamatan Sobang (3 desa: Majasari, Sinar Jaya, dan Sukamaju), Kecamatan Wanasalam (1 desa: Muara) dan Kecamatan Warunggunung (2 desa: Cempaka dan Selaraja).

Kabupaten Lebak dengan luas lahan potensial sekitar 331 ribu hektar tengah bergerak memperkuat basis pangan lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional , lahan itu mencakup persawahan tadah hujan dan regular , yang oleh Pemkab diarahkan untuk menanam padi, jagung, sayuran dan umbi-umbian. Upaya kemandirian pangan juga dilakukaan melalui pembangunan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi serta penguatan optimalisasi lahan

Ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak untuk menuju kemandirian pangan daerah diantaranya :

- Penyaluran 193 unit irpom dari kementan , sehingga Indeks Pertanaman( IP) bisa meningkat dari 2 kali tanam menjadi 4 kali tanam pertahun

- Pembangunan dan rehabilitasi Irigasi baik irigasi sekunder ataupun irigasi tersier sesui dengan INPRES Nomor 2 Tahun 2025 Tentang percepatan dan Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan nasional.

## D. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Meski memiliki kekayaan dan potensi produksi pangan , kabupaten lebak masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal ketidak cukupan pangan, yang berdampak terhadap berkurangnya ketidak cukupan gizi di kalangan anak dan keluarga berisiko.

Menurut FAO, ketidak cukupan konsumsi pangan (*undernourishment*)di definisikan sebagai *"condition of people consume,on regular basis,amount of food that do not provide the dietary energy need to be health and active".* Standar minimun yang digunakan untuk perhitungan angka PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktifitas yang dilakukan .

Berdasarkan perhitungan Bapanas pertumbuhan PoU di Kabupaten Lebak dari tahun 2020 – 2024 sekitar 1,13 % dengan jumlah penduduk 1.323.472 jiwa pada tahun 2024 dan yang mengalami ketidak cukupan konsumsi pangan sekitar 33.383 jiwa.

Ketidakcukupan pangan di Kabupaten Lebak tidak hanya soal jumlah makanan, tetapi juga kualitas gizi supaya tidak berdampak terhadap kekerdilan, gizi buruk, dan masa depan genarsi muda . Intervensi Pemerintah saat inu sudah mencakup distribusi pangan lokal ikan,telur ,ubi, sayur, untuk mencegah balita rawan stunting, edukasi pola hidup sehat, program "Gebyar KLASIK " yang melibatkan ratusan posyandu dan tim kesejahteraan untuk skrining gizi, suplemetasi Zat besi , vitamin , pematuan pertumbuhan .

### 2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

#### A. Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan harus dipastikan terselenggara berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Untuk meningkatkan konservasi sumber daya alam dan menjaga kualitas lingkungan hidup perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang dapat memberikan kesimpulan dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan parsial berdasarkan media yaitu air, udara dan tutupan lahan. Nilai IKLH Kabupaten Lebak tahun dalam rentang tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan di mana dari tahun 2020 sekitar 69,98 poin menurun menjadi 60,27 poin pada tahun 2024. Gambaran ini dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lebak yang mengalami penurunan dalam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2021-2024, sementara nilai Indeks Kualitas Udara yang meningkat pada tahun 2021 namun mengalami penurunan pada tahun 2022-2024. Adapun untuk nilai Indeks Kualitas Lahan mengalami nilai yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

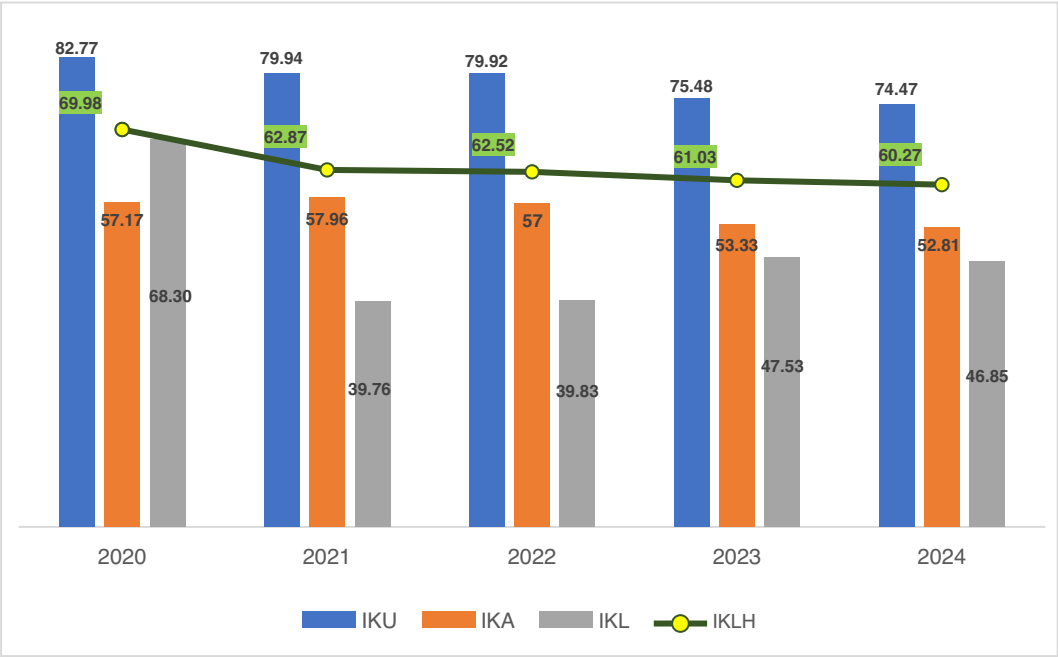


**Grafik 2. 12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2025*

Penyebab menurunnya Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Lebak berkaitan erat dengan permasalahan transportasi di mana ketersediaan layanan transportasi yang ada di Kabupaten Lebak masih belum mampu mencukupi tingginya kebutuhan masyarakat. Hal ini yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas dan meningkatnya jumlah polutan yang memicu pencemaran udara. Sementara penurunan Indeks Kualitas Air disebabkan masih tingginya pembuangan limbah padat dan limbah cair yang tidak diolah dengan baik. Terkait dengan Indeks Kualitas Lahan, penurunan tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi oleh luas kawasan hasil delineasi yang sudah diverifikasi terjadi banyak ketidaksesuaian atau data ganda sehingga hal ini menyebabkan penurunan nilai.

Sebagai tindaklanjut dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan hidup, Kabupaten Lebak akan berupaya melakukan peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholders*. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya melalui

program pengendalian pencemaran (air, udara dan pengendalian kerusakan lahan) dan memuat inovasi yang terkait program pengendalian pencemaran (air, udara dan pengendalian kerusakan lahan). Kemudian juga perlu adanya peningkatan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK serta meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah domestik dan USK. Dan tentu saja perlu adanya upaya mempertahankan dan meningkatkan tutupan belukar dalam kawasan melalui kolaborasi dengan instansi-instansi terkait, serta mempertahankan upaya pengelolaan RTH dan tutupan vegetasi lainnya yang telah ada.

## B. Akses Sanitasi

Akses sanitasi dalam hal ini air limbah domestik di Kabupaten Lebak hingga 2024 secara layanan belum berjalan maksimal. Pencapaian tahun 2024 untuk akses air limbah domestik yang layak hanya sebesar 73,69%. Meskipun secara tren tahunan terus meningkat, namun bila dibandingkan dengan target Nasional maka masih menyisakan *gap* yang cukup besar menuju 100% cakupan sanitasi layak. Kondisi yang terjadi cukup relevan dengan pencapaian desa stop buang air besar sembarangan (BABS) atau desa *open defecation free* (ODF) di Kabupaten Lebak masih 38,84% atau 134 desa yang ODF.

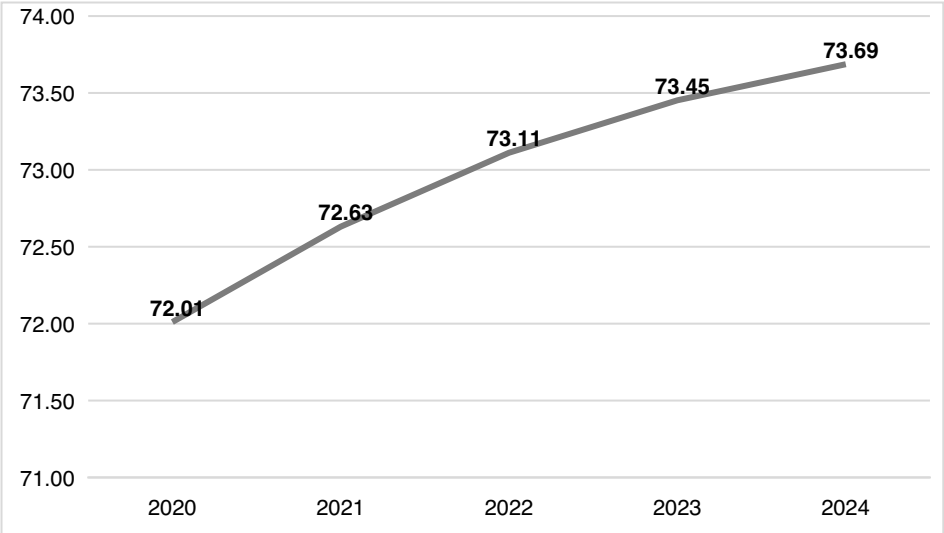


**Grafik 2. 13 Persentase Cakupan Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang Layak di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lebak, 2025*

Kendala yang masih dihadapi Kabupaten Lebak dalam meningkatkan akses sanitasi layak meliputi:

a. Banyak daerah perdesaan di Kabupaten Lebak yang masih menggunakan sistem sanitasi tradisional atau bahkan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak;
b. Masih ada pembuangan limbah rumah tangga ke sungai atau selokan, terutama di daerah yang belum memiliki sistem pengolahan air limbah yang memadai;
c. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih sulit mengakses sanitasi layak karena biaya pemasangan septik tank atau sambungan ke sistem sanitasi kota cukup tinggi;
d. Masih lemahnya regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
e. Kurangnya pengawasan terhadap pembangunan perumahan baru yang tidak selalu menyediakan sistem sanitasi yang sesuai standar.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak perlu melakukan percepatan terhadap pembangunan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik. Percepatan ini bisa difokuskan terhadap desa yang belum ODF dan

lokasi-lokasi tematik pembangunan seperti kelompok masyarakat miskin, stunting, dan kawasan kumuh. Tidak hanya itu, perlu juga ada pengawasan yang ketat mengenai prosedural para *developer* perumahan untuk bisa memastikan unit rumahnya wajib menggunakan sistem sanitasi sesuai standar.

Pekerjaan rumah berkaitan dengan sanitasi tidak hanya berbicara layak namun juga memastikan akses aman. Kabupaten Lebak sebetulnya cukup potensial dalam memastikan akses sanitasi aman berkat adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Dengung. Bangunan tersebut yang saat ini dioperasikan oleh Dinas PUPR telah mampu menghasilkan PAD dengan area layanan regional meskipun untuk internal Kabupaten Lebak masih terbatas pada lingkup wilayah utara karena keterbatasan armada dan SDM. Dorongan terhadap optimalisasi IPLT memiliki urgensi yang tinggi berkaitan dengan kondisi bangunan saat ini dan juga bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya septik tank yang disedot secara rutin demi memastikan sanitasi yang aman.

**Gambar 2. 16 Tampak Atas IPLT Dengung**

*Sumber Foto Udara Bapperida Kabupaten Lebak, 2024*

## C. Pengelolaan Sampah

Salah satu tantangan di dalam isu mengenai lingkungan hidup adalah masalah persampahan. Secara eksisting, Kabupaten Lebak memiliki 2 (dua) TPA yaitu TPA Dengung di Kecamatan Maja (untuk melayani Kabupaten Lebak bagian utara) dan TPA Pondokpanjang-Cihara di Kecamatan Cihara (untuk melayani Kabupaten Lebak bagian selatan). Sarana penampungan sampah di Kabupaten Lebak sangat bervariasi di setiap kecamatan antara lain menggunakan tong/bak sampah, gerobak sampah dan truk pengangkut sampah, Ada juga yang ditimbun atau langsung dibakar pada lokasi penghasil sampah.

**Tabel 2. 10 Spesifikasi TPA di Kabupaten Lebak**

| No | Nama TPA | Jenis TPA | Luas TPA (Ha) | Kapasitas ($m^3$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dengung | *Control Landfill* | 10,834 | 300.000 |
| 2 | Cihara | *Control Landfill* | 6 | 180.000 |

*Sumber : Dinas LH Kabupaten Lebak, 2025*

Pertambahan penduduk menyebabkan kebutuhan konsumsi meningkat yang berakibat pada penambahan produksi sampah dan limbah rumah tangga. Tercatat sekitar 187.706,21 ton/tahun timbulan sampah tahun 2020 meningkat menjadi 222.631.32 ton/tahun pada tahun 2024 jumlah produksi sampah yang dihasilkan Kabupaten Lebak. Angka peningkatan produksi sampah merupakan total dari seluruh aktivitas penduduk dari berbagai sektor dengan karakteristik sampah jenis organik, plastik, kayu, kertas, kain, karet, logam, kaca dan lainnya dengan sumber yang berasal dari limbah perumahan, komersial/perdagangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sumber lainnya.

**Tabel 2. 11 Data Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Timbulan Sampah | 187.706,21 | 190.897,19 | 215.885,24 | 218.266,50 | 222.631,32 |
| Pengurangan Sampah | 31.307,69 | 10.026,50 | 8.868,90 | 8.033,38 | 8.037,89 |
| Penanganan Sampah | 33.580,00 | 33.850,00 | 40,880,00 | 43.435,00 | 48.910,00 |

*Sumber : Dinas LH Kabupaten Lebak, 2025*

Dalam hal pengelolaan sampah, Kabupaten Lebak memiliki regulasi yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menjadi dasar dari berbagai program terkait pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Lebak. Kebijakan yang telah dilaksanakan berikut peraturan turunannya dalam pengelolaan sampah diantaranya:

a. Pengurangan dan Penggunaan Kantong Plastik tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
b. Pengelolaan Sampah Skala Desa sebagai amanat pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
c. Pusat Daur Ulang (PDU) sampah; dan
d. Program yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

### 2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

#### A. Kawasan Rawan Bencana

Kondisi geografis Kabupaten Lebak yang dikelilingi oleh pegunungan, perbukitan, dan aliran sungai membuat sebagian besar wilayahnya sangat rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan serta koordinasi intensif dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk menghadapi potensi bencana, terutama saat musim hujan dan cuaca ekstrem. Selain itu pula Kabupaten Lebak yang terletak di pesisir selatan Provinsi Banten, memiliki potensi tinggi terhadap bencana tsunami akibat posisinya

yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan berada di zona tumbukan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Wilayah pesisir selatan Lebak, termasuk Kecamatan Panggarangan, Bayah, Cilograng, Cibeber, Wanasalam, Malingping, dan Cihara, masuk dalam kawasan rawan tsunami yang harus selalu waspada terhadap ancaman gelombang tsunami.

Secara keseluruhan, kawasan rawan bencana di Kabupaten Lebak tersebar luas dan meliputi berbagai jenis bencana alam, yang menuntut kewaspadaan tinggi dari masyarakat dan pemerintah dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana demi menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

**Grafik 2. 14 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024**

*Sumber: BPBD Kabupaten Lebak, 2025*

Berdasarkan data Indeks Risiko bencana Kabupaten Lebak yang dirilis oleh BNPB terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebesar 185,64 poin bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan daerah dan edukasi masyarakat dalam proses mitigasi. Sementara disisi lain pada Indeks Ketahanan Daerah (IKD) turut mengalami penurunan menjadi 0,29 poin. Adapun Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan dalam menilai sejauh mana suatu wilayah mampu menghadapi, menanggulangi, dan pulih dari suatu ancaman bencana jika terjadi. Pengukuran ketahanan daerah menjadi

salah satu variabel yang akan berdampak pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) selain variabel kerentanan dan bahaya. Dengan capaian tersebut dapat dikategorikan ketahanan daerah di Kabupaten Lebak dalam menghadapi bencana terkategori rendah, sedangkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten rata-rata terkategori sedang.

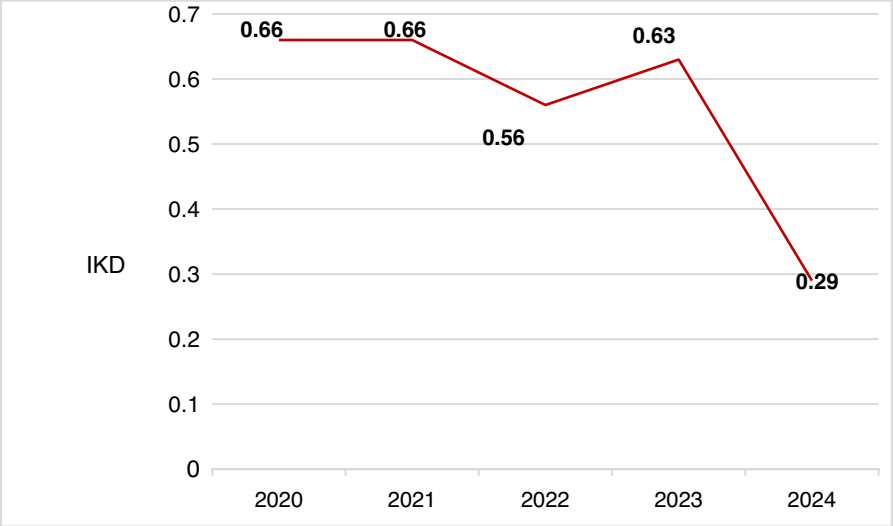


**Grafik 2. 15 Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber BPBD Kabupaten Lebak, 2025*

Kondisi tersebut perlu disikapi melalui langkah-langkah kedepan yang dapat meningkatkan indeks ketahanan daerah meliputi:

a. Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana, penguatan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta optimalisasi forum pengurangan risiko bencana menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana;
b. Penyusunan dan pembaruan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas secara berkala sesuai aturan sangat membantu daerah dalam memahami potensi risiko dan merencanakan mitigasi secara tepat sasaran;

c. Pendidikan kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, serta sosialisasi adaptasi perubahan iklim dan risiko bencana kepada masyarakat dan aparat setempat meningkatkan pemahaman dan respons cepat terhadap bencana; dan
e. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, swasta, dan media dalam forum pengurangan risiko bencana memperkuat koordinasi dan sumber daya untuk meningkatkan ketahanan daerah secara menyeluruh.

## B. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Pemantauan kualitas udara dan air di Kabupaten Lebak berperan penting dalam mendukung upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan secara umum. Dengan melakukan pemantauan berkala di kawasan padat penduduk dan industri, pemerintah dapat mengidentifikasi sumber polusi serta tingkat pencemaran yang terjadi secara *real time*, sehingga langkah pengendalian dapat segera diambil secara tepat sasaran. Berikut nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air dari tahun 2020-2024 di Kabupaten Lebak.

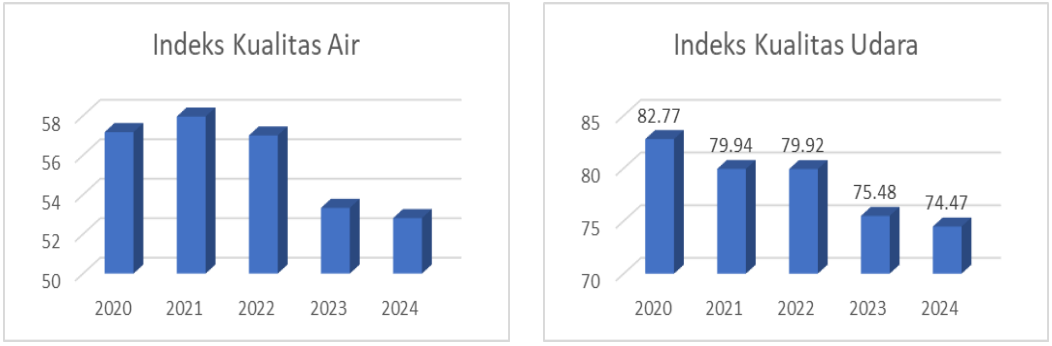


**Grafik 2. 16 Capaian Indeks Kualitas Air dan Kualitas Udara di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2025*

Menelaah data dan fakta bahwa nilai indeks kualitas udara terus menurun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan diantaranya:

a. Penambahan titik pantau kualitas udara dengan metode passive sampler dan manual aktif. Hal ini dirasa perlu dilakukan karena jumlah sampel yang selama ini didapatkan tidak sepenuhnya representatif dari Kabupaten Lebak;
b. Sebagai tindakan preventif, wilayah pembangunan Lebak Utara yang ditujukan sebagai wilayah perdagangan dan industri (hulu maupun hilir) yang meliputi Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Maja, Kecamatan Curugbitung, dan Kecamatan Kalanganyar berkaitan proses pengembangan maupun pembangunan kotanya perlu memerhatikan konsep *green city*. Karena pada tahun-tahun mendatang lokasi ini akan terus berkembang dan berpotensi menjadi sumber pencemar tidak bergerak;
c. Penghijauan di area yang menghasikan banyak pencemar udara dalam hal ini dilokasi peruntukkan transportasi;
d. Penerapan aturan mengenai sumber emisi bergerak dan tidak bergerak karena sesuai dengan hasil pemantauan, sumber pencemar yang paling berpengaruh di Kabupaten Lebak adalah peruntukkan transportasi dan peruntukkan industri;
e. Melakukan pengawasan ketaatan pada usaha/kegiatan;
f. Penetapan arah dalam menyediakan baku mutu emisi ( PBME) sebanyak 4 arah; dan
g. Pelaksanaan *Car Free Day*.

Sedangkan untuk indeks kualitas air di Kabupaten Lebak yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan diantaranya:

a. Tindakan pencegahan pencemaran melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
b. Melakukan inspeksi secara rutin untuk memantau pelaku usaha dan masyarakat yang berada di daerah sempadan sungai. Masyarakat dan pelaku usaha yang

melanggar peraturan pembuangan limbah industri dan domestik tidak sesuai baku mutu lingkungan harus ditindak secara tegas dan dibina;

c. Melakukan pengawasan kualitas air secara terus menerus dengan menganalisis kualitas air yang masuk ke badan sungai atau yang berada pada aliran sungai;
d. Memberikan pendidikan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan sosialisasi rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan;
e. Membuat program yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk saling bekerja sama dalam upaya pengendalian pencemaran air;
f. Mensosialisasikan kembali Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019, maka pusat perdagangan dan toko modern wajib menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan; dan
g. Mewajibkan desa melakukan pengelolaan sampah sesuai perda No. 4 tahun 2018.

Selain itu dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dibutuhkan strategi dan upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lahan dengan :

a. Reforestasi dan rehabilitasi lahan kritis;
b. Pencegahan alih fungsi lahan;
c. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
d. Pelibatan masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.

Keseluruhan langkah ini merupakan bagian dari mendukung program Nasional untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% secara mandiri pada tahun 2030, serta menuju target *net zero emission* di masa depan.

### 2.1.1.7. Demografi

#### A. Jumlah dan distribusi Penduduk

Penduduk suatu wilayah merupakan sumber daya manusia yang esensial dalam proses pembangunan, serta penerima manfaat dari perkembangan tersebut. Dalam

pengembangan wilayah, penduduk berfungsi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Penduduk berperan sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk dapat menjadi potensi sekaligus beban pembangunan. Jika penduduk memiliki kualitas yang baik atau tinggi, penduduk akan menjadi potensi pembangunan. Namun, jika kualitasnya rendah, penduduk akan menjadi beban dalam pembangunan.

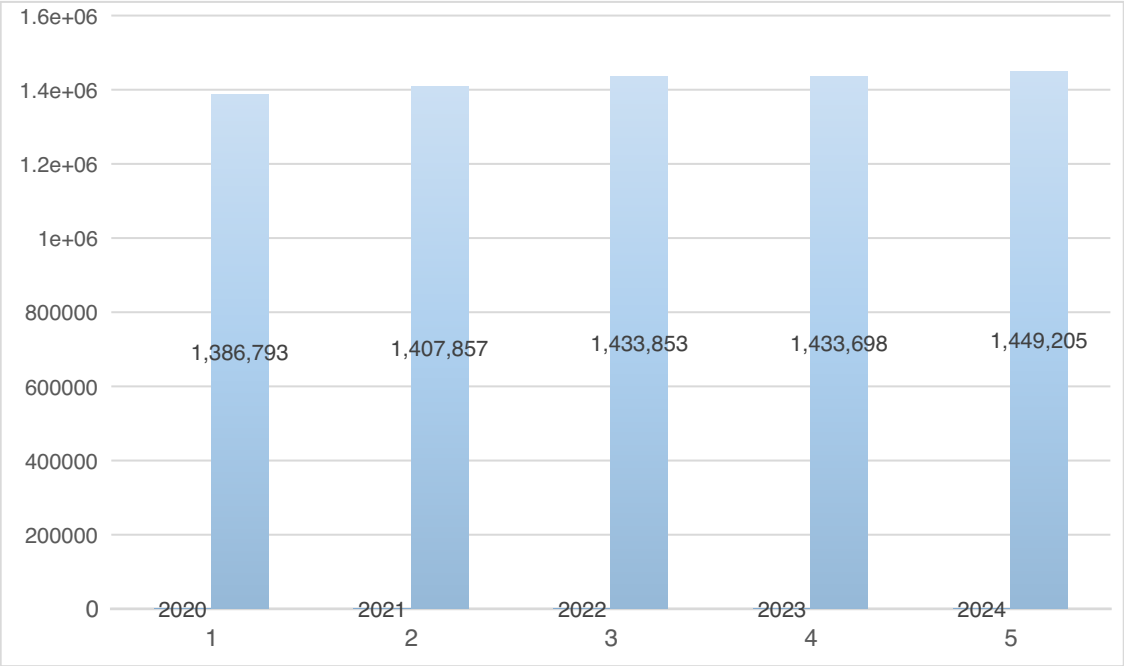


**Grafik 2. 17 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak**

*Sumber : Laporan Ranwal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2020 – 2024 ; Diolah Oleh Bapperida*

Dalam Kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Lebak menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2020 ke tahun 2021 jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1,49% dengan kenaikan sebesar 21.604 jiwa. Angka ini terus meningkat menjadi 25.996 jiwa dengan persentase kenaikan sebesar 1,81 % pada tahun 2021 ke tahun 2022. Berbeda dengan tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami tren penurunan sebesar 0,01 % dengan pengurangan 155 jiwa. Setelah mengalami penurunan jumlah penduduk ditahun 2022 ke tahun 2023,

pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 15.507 jiwa dengan kenaikan sebesar 1.07%.

## B. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2024 menurut sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dari hasil pembersihan Dirjen Dukcapil adalah sebanyak 1.531.564 jiwa atau bertambah 2,44% dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari laki-laki 786.683 jiwa (51,36%) dan perempuan 744.881 jiwa (48,64%). Penduduk Kabupaten Lebak tersebut tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan. Komposisi Penduduk Kabupaten Lebak menurut jenis kelamin di tiap kecamatan adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 12 Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | JENIS KELAMIN | | | | PENDUDUK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | | |
| | | n (Jiwa) | % | n (Jiwa) | % | n (Jiwa) | % |
| 1 | BANJARSARI | 36.998 | 2,42 | 34.703 | 2,27 | 71.701 | 4,68 |
| 2 | BAYAH | 25.061 | 1,64 | 24.405 | 1,59 | 49.466 | 3,23 |
| 3 | BOJONGMANIK | 13.462 | 0,88 | 12.839 | 0,84 | 26.301 | 1,72 |
| 4 | CIBADAK | 39.902 | 2,61 | 37.810 | 2.47 | 77.712 | 5,07 |
| 5 | CIBEBER | 31.526 | 2,06 | 30.222 | 1,97 | 61.748 | 4,03 |
| 6 | CIGEMBLONG | 11.215 | 0,73 | 10.226 | 0,67 | 21.441 | 1,40 |
| 7 | CIHARA | 18.771 | 1,23 | 17.923 | 1,17 | 36.694 | 2,40 |
| 8 | CIJAKU | 18.597 | 1,21 | 17.538 | 1,15 | 36,135 | 2,36 |
| 9 | CIKULUR | 33.953 | 2,22 | 31.499 | 2,06 | 65.452 | 4,27 |
| 10 | CILELES | 31.326 | 2,05 | 29.296 | 1,91 | 60.622 | 3,96 |
| 11 | CILOGRANG | 19.633 | 1,28 | 18.464 | 1,21 | 38.097 | 2,49 |
| 12 | CIMARGA | 40.679 | 2,66 | 38.133 | 2,49 | 78.812 | 5,15 |
| 13 | CIPANAS | 28.048 | 1,83 | 26.863 | 1,75 | 54.910 | 3,59 |
| 14 | CIRINTEN | 16.416 | 1,07 | 15.397 | 1,01 | 31.813 | 2,08 |
| 15 | CURUG BITUNG | 20.800 | 1,36 | 19.245 | 1,26 | 40.045 | 2,61 |
| 16 | GUNUNG KENCANA | 21.693 | 1,42 | 20.518 | 1,34 | 42.211 | 2,76 |
| 17 | KALANGANYAR | 22.081 | 1,44 | 20.584 | 1,34 | 42.665 | 2,79 |
| 18 | LEBAKGEDONG | 11.997 | 0,78 | 11.596 | 0,76 | 23.593 | 1,54 |

| NO | KECAMATAN | JENIS KELAMIN | | | | PENDUDUK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | | |
| | | n (Jiwa) | % | n (Jiwa) | % | n (Jiwa) | % |
| 19 | LEUWIDAMAR | 32.255 | 2,11 | 29.998 | 1,96 | 62.253 | 4,06 |
| 20 | MAJA | 35.502 | 2.32 | 33.285 | 2,17 | 68.787 | 4,49 |
| 21 | MALINGPING | 40.126 | 2,62 | 38.758 | 2,53 | 78.884 | 5,15 |
| 22 | MUNCANG | 21.304 | 1,39 | 19.778 | 1,29 | 41.082 | 2,68 |
| 23 | PANGGARANGAN | 21.880 | 1,43 | 21.163 | 1,38 | 43.043 | 2,81 |
| 24 | RANGKASBITUNG | 75.389 | 4,92 | 72.809 | 4,75 | 148.198 | 9,68 |
| 25 | SAJIRA | 31.620 | 2,06 | 30.326 | 1,98 | 61.946 | 4,04 |
| 26 | SOBANG | 17.364 | 1,13 | 16.493 | 1,08 | 33.857 | 2,21 |
| 27 | WANASALAM | 33.212 | 2,17 | 31.347 | 2,05 | 64.559 | 4,22 |
| 28 | WARUNGGUNUNG | 35.874 | 2,34 | 33.663 | 2,20 | 69.537 | 4,54 |
| **KAB LEBAK** | | **786.683** | **51,38** | **744.881** | **48,64** | **1.531.564** | **100,00** |

*Sumber : Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2024, Diolah*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lebak paling banyak berada di Kecamatan Rangkasbitung dengan jumlah yaitu 148.198 jiwa atau sekitar 9,68% dari total penduduk Kabupaten Lebak. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Rangkasbitung adalah wilayah perkotaan Kabupaten. Pembangunan perumahan baru, perkantoran, perdagangan dan transportasi berada di wilayah Kecamatan ini. Faktor tersebut menyebabkan penduduk Kabupaten Lebak terutama pendatang lebih memilih untuk bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rangkasbitung. Sebaliknya wilayah Kecamatan Cigemblong mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 21.441 jiwa atau 1,40% dari total penduduk Kabupaten Lebak.

## C. Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2024 sejumlah 1,4 juta jiwa (BPS, 2025) dengan pertumbuhan penduduk pada tahun terakhir (2020-2024) sebesar 1,8%. Data ini memberikan gambaran umum mengenai keadaan demografi di Kabupaten Lebak, serta menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk masih terus berlanjut. Hal ini dapat berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut,

serta memerlukan perencanaan yang matang untuk mengelola pertumbuhan penduduk agar tetap berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan memahami pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat dan merencanakan pembangunan wilayah secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Jumlah penduduk Kabupaten Lebak secara keseluruhan mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Dalam sepuluh tahun terakhir diketahui terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 185.872 jiwa.

Tren peningkatan jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Lebak tidak disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk di semua kecamatan. Pada Gambar 2-20, dapat diketahui dalam 10 tahun terakhir terdapat beberapa kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk sementara yang lainnya meningkat. Berdasarkan Pertumbuhan jumlah penduduk ekstrem terjadi di tahun 2020 setelah pada 2019 mengalami penurunan serentak. Pada tahun 2020, Kecamatan Cikulur dan Lebakgedong mengalami perubahan paling signifikan, paling timpang dibandingkan angka perubahan keseluruhan Kabupaten Lebak, 6,07%. Kecamatan Cikulur mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dengan angka positif sebesar 13,71%, sementara Kecamatan Lebakgedong mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dengan angka negatif sebesar (7,46%).

Kepadatan penduduk relatif tinggi berada pada kecamatan yang terdapat di bagian utara (Kecamatan Cibadak, Kecamatan Rangkasbitung) dan kecamatan sekitarnya. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di sebelah utara, pada Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak. Kecamatan Malingping di kawasan barat daya juga terdapat kepadatan yang relatif tinggi dibanding sekitarnya. Hal ini sejalan dengan Kecamatan Malingping sebagai PKL. PKL lainnya adalah Kecamatan Bayah, namun tidak terdapat peningkatan kepadatan penduduk pada kawasan di tenggara kabupaten ini. Pada tahun 2024, ditinjau lebih detail per kecamatan distribusi penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Rangkasbitung, dengan angka 9,74%. Diikuti oleh tiga kecamatan dengan angka distribusi penduduk yang berdekatan yaitu Kecamatan

Cimarga, Cibadak, dan Malingping, dengan masing-masing adalah 5,19%, 5,22%, dan 5,13%.

**Tabel 2. 13 Kepadatan Penduduk Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Luas ($km^2$) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan (jiwa/$km^2$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangkasbitung | 49.51 | 141,189 | 2851.73 |
| 2 | Cibadak | 41.34 | 75,675 | 1830.55 |
| 3 | Kalanganyar | 25.91 | 41,398 | 1597.76 |
| 4 | Warunggunung | 49.53 | 6,549 | 132.22 |
| 5 | Maja | 59.87 | 62,988 | 1052.08 |
| 6 | Cikulur | 66.06 | 62,848 | 951.38 |
| 7 | Malingping | 92.17 | 74,348 | 806.64 |
| 8 | Cipanas | 75.38 | 52,813 | 700.62 |
| 9 | Curugbitung | 72.55 | 3,898 | 53.73 |
| 10 | Sajira | 110.98 | 59,337 | 534.66 |
| 11 | Banjarsari | 145.31 | 68,101 | 468.66 |
| 12 | Muncang | 84.98 | 39,296 | 462.41 |
| 13 | Cileles | 124.98 | 57,132 | 457.13 |
| 14 | Wanasalam | 134.29 | 60,362 | 449.49 |
| 15 | Bojongmanik | 58.21 | 25,715 | 441.76 |
| 16 | Cijaku | 74.36 | 318 | 4.28 |
| 17 | Cimarga | 183.43 | 75,219 | 410.07 |
| 18 | Leuwidamar | 146.91 | 55,473 | 377.60 |
| 19 | Lebakgendong | 62.55 | 21,739 | 347.55 |
| 20 | Cilongrang | 107.2 | 36,278 | 338.41 |
| 21 | Cirinten | 91.12 | 30,713 | 337.06 |
| 22 | Bayah | 153.73 | 46,874 | 304.91 |
| 23 | Sobang | 107.2 | 32,099 | 299.43 |
| 24 | Cigembong | 75.29 | 22,195 | 294.79 |
| 25 | Gunungkencana | 145.77 | 40,325 | 276.63 |
| 26 | Panggarangan | 163.36 | 39,445 | 241.46 |
| 27 | Cihara | 159.57 | 34,314 | 215.04 |
| 28 | Cibeber | 383.15 | 57,059 | 148.92 |
| | **Jumlah** | **3044.71** | **1,323,700** | **434.75** |

*Sumber : Kabupaten Lebak dalam Angka, 2025.*

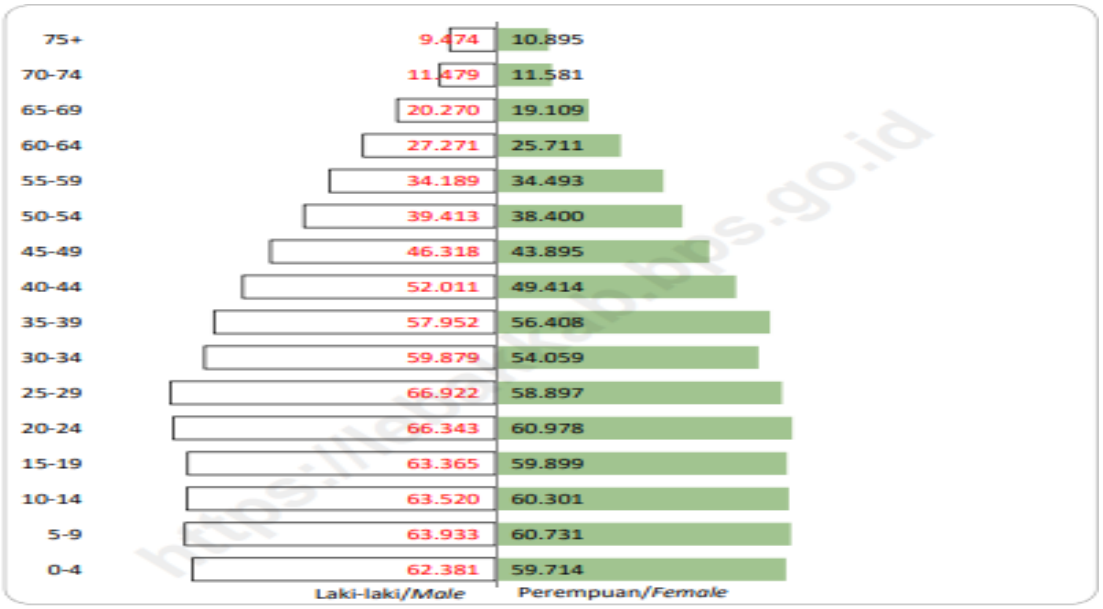


Sumber/*Source*: Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010—2035 (pertengahan tahun/Juni)/*The 2020 data was the result of 2020 Population Census (September)*

**Grafik 2. 18 Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2024**

*Sumber : Kabupaten Lebak dalam Angka, 2025.*

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan secara merata. Kesejahteraan masyarakat ekonomi secara formal diukur secara makro dari beberapa indikator, seperti: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kondisi masyarakat suatu daerah yang mengalami peningkatan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur dalam menilai gambaran keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang dilakukan di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dari periode ke periode. Jika persentasenya positif, artinya perekonomian suatu daerah tumbuh. Sebaliknya, bila persentasenya negatif, artinya perekonomian daerah menurun.

Berikut disajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak pada tahun 2020 -2024:

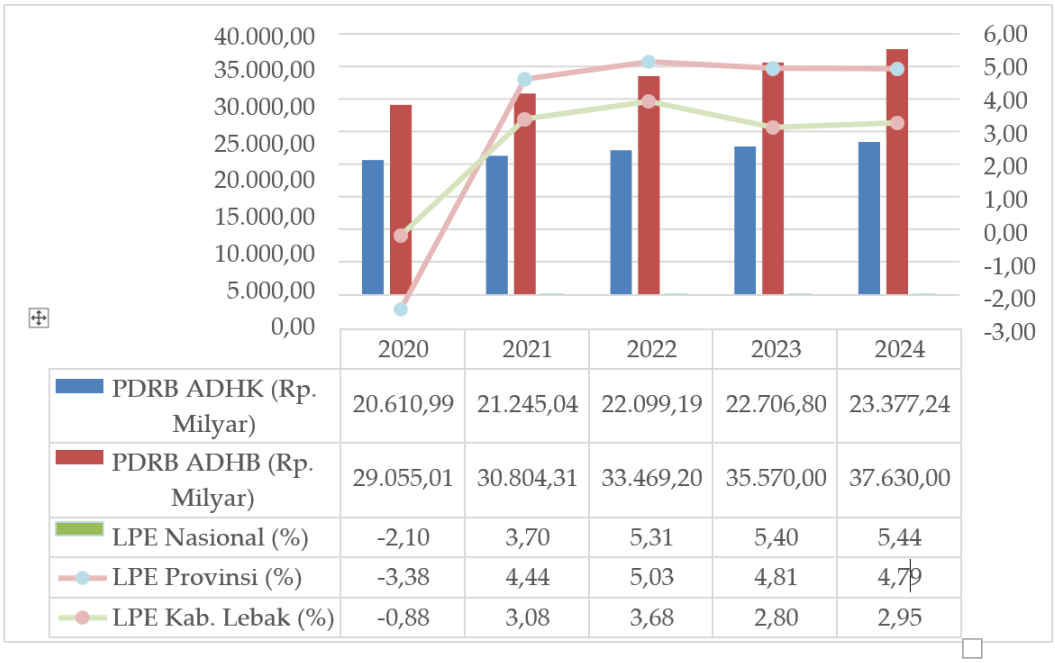


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDRB ADHK (Rp. Milyar) | 20.610,99 | 21.245,04 | 22.099,19 | 22.706,80 | 23.377,24 |
| PDRB ADHB (Rp. Milyar) | 29.055,01 | 30.804,31 | 33.469,20 | 35.570,00 | 37.630,00 |
| LPE Nasional (%) | -2,10 | 3,70 | 5,31 | 5,40 | 5,44 |
| LPE Provinsi (%) | -3,38 | 4,44 | 5,03 | 4,81 | 4,79 |
| LPE Kab. Lebak (%) | -0,88 | 3,08 | 3,68 | 2,80 | 2,95 |

**Grafik 2. 19 Grafik Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber: Data yang Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2025.*

Berdasarkan Grafik tersebut, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lebak dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -0,88 persen dari 5,55 persen pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Lebak pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi yang kurang

stabil disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak pada tahun 2021 mengalami kenaikan 3,96 persen dari tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemulihan perekonomian nasional paska terjadinya pandemi Covid-19. Pada 2023, LPE menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,88 persen menjadi 2,80 persen dan pada tahun 2024 LPE meningkat menjadi 2,95.

Selain Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), kesejahteraan ekonomi masyarakat erat kaitannya dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan Indeks Gini. Semakin tinggi nilai Indeks Gini atau mendekati satu menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi, sedangkan semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai Gini menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Indeks Gini Kabupaten Lebak ditunjukkan pada grafik berikut :

**Grafik 2. 20 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber: Data yang Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2025.*

Berdasarkan Grafik tersebut, Indeks Gini di Kabupaten Lebak dalam lima tahun terakhir berkisar pada nilai 0,3-0,2 mendekati nol menunjukkan rendahnya tingkat

ketimpangan pendapatan penduduk dan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Lebak semakin merata. Pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sangat penting karena akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan juga pengentasan kemiskinan.

Penanganan kemiskinan di Kabupaten Lebak menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Lebak dengan komitmen untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem nol persen sehingga tidak ada lagi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

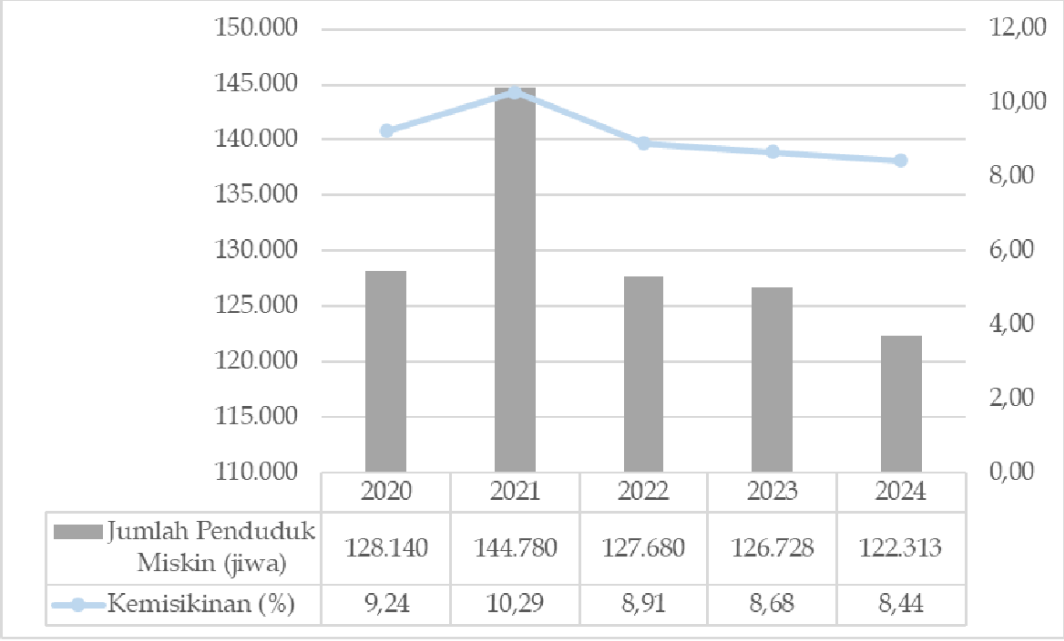


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | 128.140 | 144.780 | 127.680 | 126.728 | 122.313 |
| Kemisikinan (%) | 9,24 | 10,29 | 8,91 | 8,68 | 8,44 |

**Grafik 2. 21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber: Data yang Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2025*

Berdasarkan Grafik 2.21, angka kemiskinan di Kabupaten Lebak mengalami fluktuaktif dalam lima tahun terakhir. Angka kemiskinan meningkat pada tahun 2020 dan 2021 hingga mencapai 10,29 persen atau sebanyak 144.780 jiwa penduduk yang

tergolong miskin. Pada 2022, angka kemiskinan menurun sebesar 1,38 persen menjadi 8,91 persen atau jumlah penduduk miskin sebanyak 127.680 jiwa penduduk yang tergolong miskin, kemiskinan pada tahun 2023 dan 2024 menurun menjadi 8,68 persen atau sebanyak 126.728 jiwa dan 8,44 persen atau sebanyak 122.313 jiwa. Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang *multiplier effect*, dimana memiliki efek berganda dan berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan yang lain sehingga perlu pencegahan dan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan di masa depan.

Kesejahteraan ekonomi masyarakat juga dapat diukur dari tingkat pengangguran terbuka. TPT (tingkat pengangguran terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (2024), Kabupaten Lebak memiliki jumlah penduduk yang masuk dalam usia kerja (≥15 tahun) sebanyak 960.195 jiwa pada tahun 2022 dan 1.064.510 pada tahun 2023, dimana jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 668.109 jiwa dan sisanya 54.310 jiwa menganggur. Perkembangan TPT (tingkat pengangguran terbuka), TPAK, (tingkat partisipasi angkatan kerja), dan TKK (tingkat kesempatan kerja) di Kabupaten Lebak ditunjukkan pada grafik berikut :

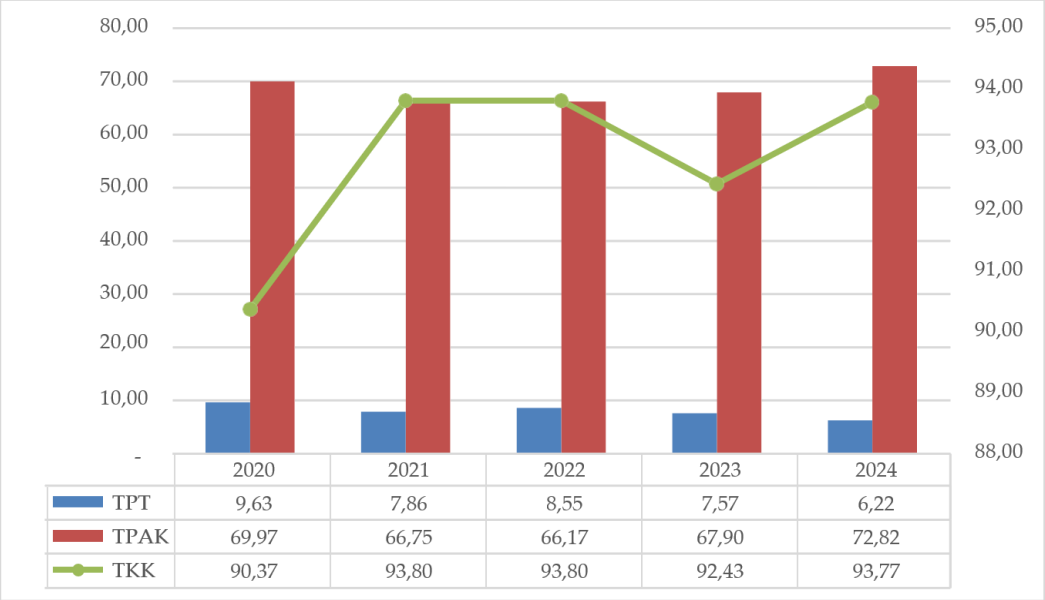


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPT | 9,63 | 7,86 | 8,55 | 7,57 | 6,22 |
| TPAK | 69,97 | 66,75 | 66,17 | 67,90 | 72,82 |
| TKK | 90,37 | 93,80 | 93,80 | 92,43 | 93,77 |

**Grafik 2. 22 Perkembangan TPT, TPAK, dan TKK Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak 2025.*

Berdasarkan Grafik 2.22, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan. TPT tahun 2024 sebesar 6,22 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 7,57 persen. Kemudian, dapat dilihat terdapat gap yang cukup lebar antara TPAK dan TKK Kabupaten Lebak dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 – 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Lebak banyak dimanfaatkan oleh tenaga kerja dari luar Kabupaten Lebak sehingga perlu dilakukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini agar daya serap tenaga kerja lokal dapat benar-benar optimal.

### 2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Kesehatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kabupaten Lebak, sebagai bagian dari Provinsi Banten, telah

menunjukkan berbagai kemajuan dalam bidang kesehatan, namun masih dihadapkan pada tantangan struktural dan fungsional yang perlu diatasi secara sistematis. Kondisi kesehatan di Kabupaten Lebak dikaji secara komprehensif mencakup semua penduduk, seluruh siklus hidup (dari bayi hingga lansia), di seluruh wilayah kecamatan, serta menjangkau semua kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap pembangunan kesehatan berlandaskan pada prinsip "Kesehatan untuk Semua", yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk tanpa diskriminasi. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti capaian indikator kesehatan semata, melainkan juga memastikan bahwa setiap individu—baik laki-laki maupun perempuan, dari bayi hingga lansia, dan di seluruh wilayah kabupaten—memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Lebak juga ditujukan untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan dan marjinal, seperti Perempuan dan anak dimana diperlukan integrasi pelayanan kesehatan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, mengoptimalkan layanan kesehatan reproduksi, perlindungan masyarakat miskin dan penyandang disabilitas dimana masih terdapat ketimpangan akses layanan karena hambatan fisik, sosial, dan ekonomi, Penguatan program home care, pelayanan kesehatan berbasis keluarga, dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas menjadi prioritas.

## A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan penduduk secara umum. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, UHH Kabupaten Lebak menunjukkan tren peningkatan dari 72,93 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,99 tahun pada tahun 2024. Meskipun masih berada di bawah capaian UHH

Provinsi Banten (74,97 tahun) dan UHH Nasional (74,15 tahun) pada tahun 2024, laju pertumbuhan UHH Kabupaten Lebak mengalami perbaikan secara bertahap.

Peningkatan UHH tersebut didukung oleh berbagai faktor strategis, antara lain:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar.

   Pemerintah Kabupaten Lebak secara konsisten memperluas jangkauan layanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas Puskesmas, Posyandu, dan pelayanan kesehatan keliling, termasuk penguatan program promotif dan preventif di tingkat komunitas.
2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

   Capaian ini merupakan hasil dari penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan cakupan kunjungan antenatal (ANC), serta dukungan tenaga kesehatan dalam proses persalinan yang aman dan berkualitas.
3. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Penurunan Prevalensi Stunting.

   Melalui berbagai program intervensi spesifik dan sensitif, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) serta edukasi gizi, kualitas kesehatan anak dan ibu mengalami perbaikan yang signifikan.
4. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi.

   Ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan jamban sehat yang semakin merata di kawasan perdesaan berkontribusi terhadap penurunan risiko penyakit menular berbasis lingkungan.
5. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.

   Upaya preventif dan kuratif terhadap penyakit seperti tuberkulosis, hipertensi, diabetes, dan HIV/AIDS menunjukkan hasil positif melalui program deteksi dini dan pengobatan berkelanjutan.
6. Pemulihan Sistem Kesehatan Pascapandemi COVID-19.

   Dampak pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 sempat memengaruhi indikator kesehatan secara umum. Namun demikian, respons cepat dalam pelaksanaan

vaksinasi dan adaptasi layanan kesehatan berperan penting dalam mengembalikan fungsi sistem kesehatan daerah.

Di sisi lain, apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan mencolok antara Usia Harapan Hidup laki-laki dan perempuan. Secara umum, UHH perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini sejalan dengan tren nasional maupun provinsi, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain perilaku hidup lebih sehat, tingkat keterpaparan risiko kerja yang lebih rendah, serta akses dan kepatuhan perempuan terhadap layanan kesehatan yang relatif lebih baik. Sementara itu, UHH laki-laki cenderung lebih rendah karena lebih besar terpapar risiko pekerjaan fisik, perilaku merokok dan konsumsi alkohol yang lebih tinggi, serta kecenderungan untuk mengakses layanan kesehatan dalam kondisi sudah lanjut atau berat. Disparitas ini menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan kesehatan ke depan, di mana intervensi perlu diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan akses laki-laki terhadap layanan kesehatan preventif dan promotif, termasuk gaya hidup sehat dan pengelolaan penyakit tidak menular secara dini. Upaya untuk memperkecil kesenjangan UHH antar jenis kelamin juga menjadi bagian dari strategi pembangunan kesehatan yang berperspektif gender, guna memastikan bahwa setiap kelompok penduduk memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan berkeadilan.

Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Lebak (2020–2025) disajikan dalam grafik berikut :

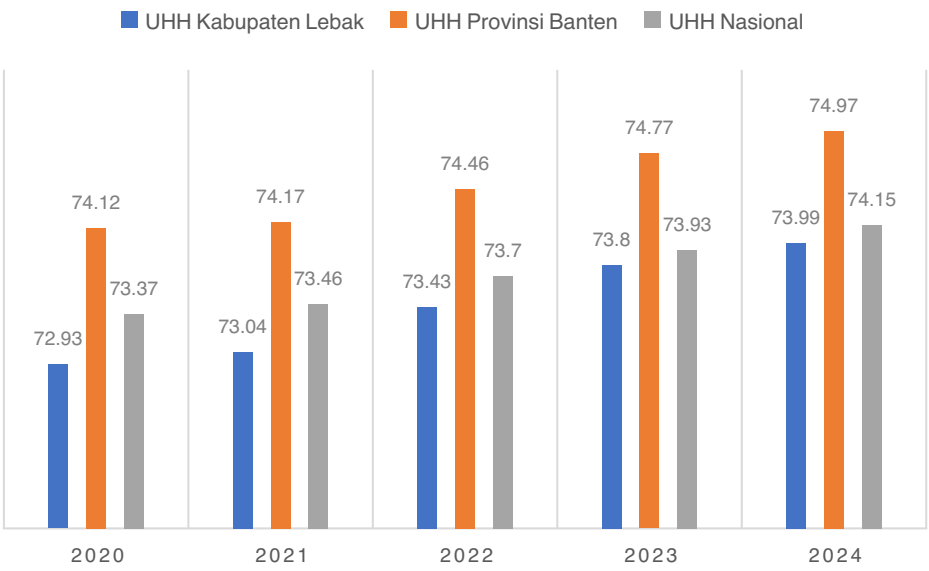


**Grafik 2. 23 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

Secara umum, UHH sendiri merupakan indikator kunci yang mencerminkan dimensi kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa indikator urusan Kesehatan yang membangun nilai Usia Harapan Hidup diantaranya :

**1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)**

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan indikator kunci pembangunan kesehatan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat dan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan dasar, meskipun telah terjadi berbagai kemajuan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak namun tantangan signifikan masih dihadapi. Selama periode 2020–2024, terjadi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meskipun belum sepenuhnya mencapai target nasional. Cakupan kunjungan kehamilan (K1 dan K4), persalinan oleh tenaga kesehatan, serta layanan nifas menunjukkan peningkatan namun masih terdapat disparitas antar wilayah.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam KIA di Kabupaten Lebak meliputi rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan berkualitas di wilayah terpencil, masih tingginya praktik persalinan di luar fasilitas kesehatan, serta kurang optimalnya deteksi dini dan pemantauan kehamilan risiko tinggi. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter spesialis kandungan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Masalah gizi ibu hamil juga menjadi perhatian, karena berkontribusi terhadap risiko komplikasi kehamilan dan kelahiran bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) termasuk cakupan imunisasi dasar lengkap yang mengalami fluktuasi.

Cakupan layanan nifas memiliki hubungan yang sangat erat dan signifikan terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Layanan nifas merupakan rangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam masa 42 hari setelah persalinan, masa yang sangat kritis karena sebagian besar kematian ibu terjadi dalam periode ini. Intervensi medis dan pemantauan yang tepat selama masa nifas dapat mendeteksi dan menangani secara dini komplikasi seperti infeksi, perdarahan, preeklamsia, dan gangguan laktasi, yang merupakan penyebab utama AKI. Ketika cakupan layanan nifas tinggi, artinya semakin banyak ibu yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan, edukasi gizi, konseling menyusui, serta penanganan cepat terhadap komplikasi pasca persalinan.

Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan ibu. Sebaliknya, cakupan layanan nifas yang rendah berisiko meningkatkan jumlah ibu yang tidak terpantau kesehatannya pasca persalinan, sehingga keterlambatan penanganan medis menjadi lebih mungkin terjadi dan berkontribusi pada tingginya AKI. Cakupan ini dapat menjadi indikator tidak langsung dari efektivitas sistem pelayanan kesehatan maternal. Data capaian pelayanan cakupan nipas selama tahun 2020-2024 tersaji dalam grafik di bawah :

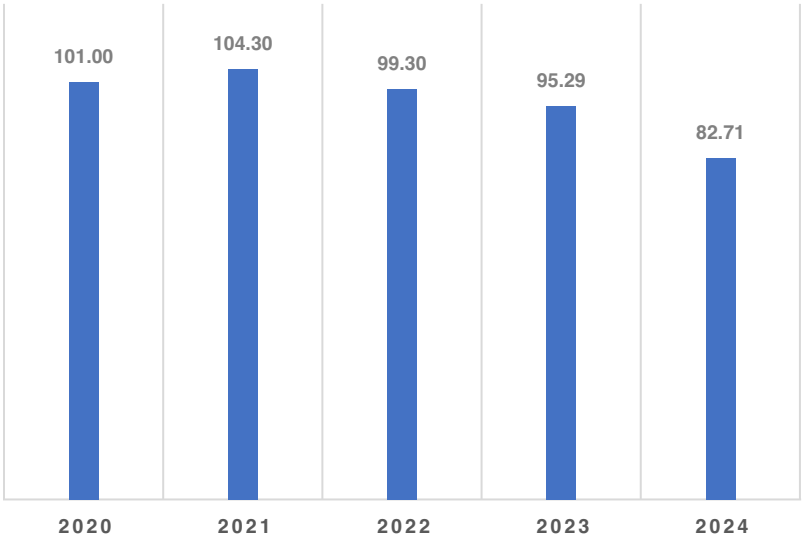


**Grafik 2. 24 Capaian Pelayanan Cakupan Nipas Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

Perkembangan cakupan layanan nifas di Kabupaten Lebak pada kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah kunjungan maupun persentase pencapaian terhadap target. Pada tahun 2020, layanan nifas mencapai 25.177 kunjungan atau setara dengan 101% dari target, yang menunjukkan capaian optimal meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Keberhasilan ini karena adanya penguatan sistem rujukan dan intervensi intensif terhadap ibu melahirkan yang menjadi kelompok prioritas dalam masa darurat kesehatan. Bahkan pada tahun 2021, capaian meningkat menjadi 24.443 kunjungan atau 104,3%, menandakan sistem pelayanan kesehatan ibu pasca persalinan masih terjaga dengan baik.

Namun, memasuki tahun 2022 dan seterusnya, capaian cakupan mulai mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2022, jumlah layanan nifas menurun menjadi 23.168 kunjungan (99,3%), masih mendekati target, namun menunjukkan penurunan minat atau kemampuan akses ibu terhadap layanan pasca persalinan. Penurunan berlanjut ke tahun 2023 dengan 22.079 kunjungan (95,29%) dan

menjadi semakin drastis pada tahun 2024 dengan hanya 21.062 kunjungan (82,71%). Penurunan berturut-turut ini menandakan adanya permasalahan sistemik dalam kesinambungan layanan kesehatan ibu, baik karena berkurangnya tenaga pendamping di lapangan, terbatasnya fasilitas, atau menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan nifas secara rutin.

Faktor-faktor penyebab penurunan ini disebabkan adanya penurunan intensitas kunjungan tenaga kesehatan ke rumah-rumah pasca pandemi, keterbatasan transportasi atau jarak ke fasilitas kesehatan yang sulit diakses hingga kurang optimalnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Selain itu, meningkatnya angka kelahiran yang tidak tercatat secara real-time dan belum maksimalnya integrasi data antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu juga menjadi hambatan dalam pencatatan dan pelaporan cakupan layanan nifas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kembali capaian ini, diperlukan penguatan sistem pemantauan kunjungan nifas berbasis digital, revitalisasi peran bidan desa dan kader, serta alokasi pembiayaan yang memadai untuk pelayanan ibu pasca persalinan.

**2. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka kematian ibu adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau penyebab insidental (WHO, 2014). Target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menargetkan penurunan AKI hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Grafik perkembangan Angka Kematian Ibu di kabupaten Lebak tersaji pada grafik sebagai berikut :

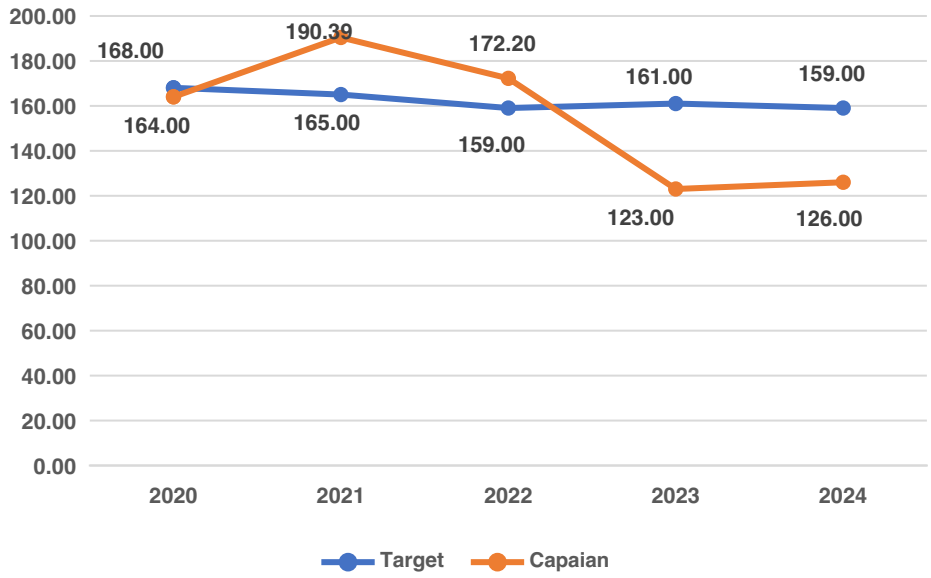


**Grafik 2. 25 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Tahun 2024*

Fluktuasi capaian AKI selama periode 2020–2024 mencerminkan dinamika dalam sistem pelayanan kesehatan ibu di Kabupaten Lebak lonjakan pada tahun 2021 menandakan adanya periode kritis yang perlu dievaluasi secara mendalam, termasuk kemungkinan dampak pandemi COVID-19, keterbatasan akses layanan kegawatdaruratan maternal, atau keterlambatan rujukan.

Sementara itu, penurunan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa strategi intervensi yang diterapkan—seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan jejaring rujukan, dan edukasi masyarakat—berpotensi efektif dan perlu dipertahankan serta diperluas. Peningkatan kembali di tahun 2024, meskipun relatif kecil, menjadi sinyal perlunya konsistensi dalam pemantauan kualitas layanan, kesinambungan program, dan penguatan sistem surveilans kematian ibu. Fokus juga perlu diarahkan pada pengurangan disparitas wilayah, peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas layanan, serta dukungan lintas sektor dalam mengatasi determinan sosial kesehatan ibu.

Beranjak dari hal tersebut, arah Strategis ke Depan dalam menurunkan angka kematian ibu adalah memperkuat sistem pemantauan kematian ibu berbasis data real-time melalui inovasi digital dan pelibatan kader serta masyarakat, penguatan layanan kesehatan ibu di seluruh siklus kehamilan—pra hamil, ANC terpadu, hingga pemantauan masa nifas—dengan pendekatan berbasis risiko, pengembangan jejaring rujukan maternal yang responsif waktu, termasuk pemanfaatan ambulans desa dan telemedisin. pendekatan promotif dan preventif berbasis komunitas, terutama di wilayah dengan capaian AKI yang masih tinggi serta Kolaborasi lintas sektor, seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk akses jalan, Dinas Sosial untuk intervensi gizi keluarga miskin, serta Kemenag dan tokoh agama untuk edukasi kesehatan reproduksi.

Dengan komitmen yang kuat melalui arah kebijakan yang berkesinambungan dan berbasis data, diharapkan tren AKI di Kabupaten Lebak terus menurun, mendekati bahkan melampaui target nasional dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) khususnya tujuan ke-3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

### 3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan. AKB didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi usia 0–11 bulan per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Tingginya AKB mencerminkan permasalahan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, status gizi, sanitasi, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Beberapa faktor yang memengaruhi tingginya AKB antara lain Kesehatan ibu saat kehamilan dan persalinan, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan tanpa tenaga kesehatan terlatih, kondisi bayi baru lahir, seperti berat badan lahir rendah (BBLR), prematuritas, infeksi, dan asfiksia, akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, termasuk imunisasi, kunjungan neonatal, dan fasilitas NICU, faktor sosial ekonomi dan lingkungan, seperti kemiskinan, sanitasi buruk, serta rendahnya pendidikan ibu serta rendahnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah

terpencil dan perdesaan, minimnya tenaga kesehatan terlatih dan fasilitas neonatal esensial, termasuk puskesmas yang belum mampu menangani komplikasi neonatal, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perawatan neonatal dini dan pentingnya kontrol kehamilan yang rutin merupakan beberapa permasalahan yang harus diperhatikan lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terus melakukan upaya untuk menekan angka kematian bayi dengan melakukan Penguatan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas SDM, fasilitas neonatal, serta intervensi berbasis komunitas (Posyandu aktif, kunjungan rumah oleh bidan), perluasan jangkauan dan pemanfaatan program kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk peningkatan edukasi melalui kader dan media lokal dan Integrasi lintas sektor, termasuk peningkatan sanitasi lingkungan, gizi keluarga, dan akses transportasi rujukan kesehatan. Perkembangan AKB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam grafik sebagai berikut :

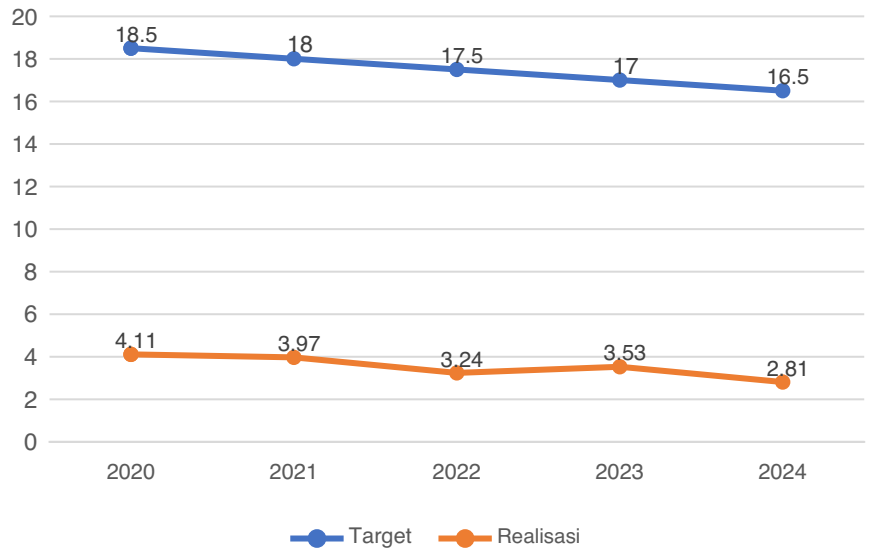


**Grafik 2. 26 Perkembangan AKB dari Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Tahun 2024*

Dari grafik diatas, Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Lebak menunjukkan tren penurunan baik untuk target maupun realisasi dari tahun 2020 hingga 2024. Target mengalami penurunan secara bertahap dari 18,5 pada tahun 2020 menjadi 16,5 pada tahun 2024. Sementara itu, angka realisasi juga menunjukkan penurunan yang signifikan, meskipun fluktuatif, dari 4,11 pada tahun 2020 menjadi 2,81 pada tahun 2024. Secara konsisten, angka realisasi selalu berada jauh di bawah angka target, menunjukkan bahwa upaya penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Lebak telah berjalan efektif dan melebihi ekspektasi yang ditetapkan, tren yang ada mengindikasikan kemungkinan besar angka kematian bayi akan terus menurun hingga tahun 2030 jika program dan intervensi yang sama terus dilanjutkan atau ditingkatkan.

**4. Angka Kematian Balita (AKABA)**

Angka kematian balita dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi faktor ibu, faktor anak, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor lingkungan serta sosial ekonomi. Berdasarkan studi dan sumber literatur, beberapa faktor determinan utama meliputi usia ibu saat melahirkan, tingkat pendidikan ibu, jarak antar kehamilan, dan status gizi ibu selama kehamilan. Dari sisi anak, berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu prediktor paling signifikan terhadap risiko kematian balita. Selain itu, status gizi balita, pemberian ASI eksklusif, kelengkapan imunisasi, serta ada tidaknya kelainan kongenital juga berperan penting. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care/ANC), pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan penanganan cepat saat balita sakit, sangat krusial. Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, serta kondisi sosial ekonomi keluarga seperti tingkat pendapatan dan kemiskinan juga berkontribusi signifikan terhadap risiko kematian balita.

Meskipun menunjukkan tren positif dalam menurunkan AKBa dan berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam periode 2020-2024, beberapa isu strategis

dan akar permasalahan kemungkinan masih perlu menjadi fokus perhatian untuk keberlanjutan penurunan angka tersebut. Isu strategis dapat mencakup upaya pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau. faktor seperti tingginya kasus BBLR, status gizi kurang pada balita, atau cakupan imunisasi yang belum optimal di beberapa area bisa menjadi akar permasalahan spesifik. Selain itu, tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai praktik kesehatan ibu dan anak yang baik, serta perbaikan kondisi sanitasi dan lingkungan, tetap menjadi isu strategis yang relevan. Perkembangan AKABa dari tahun 2020-2024 di Kabupaten Lebak tersaji dalam grafik dibawah ini :

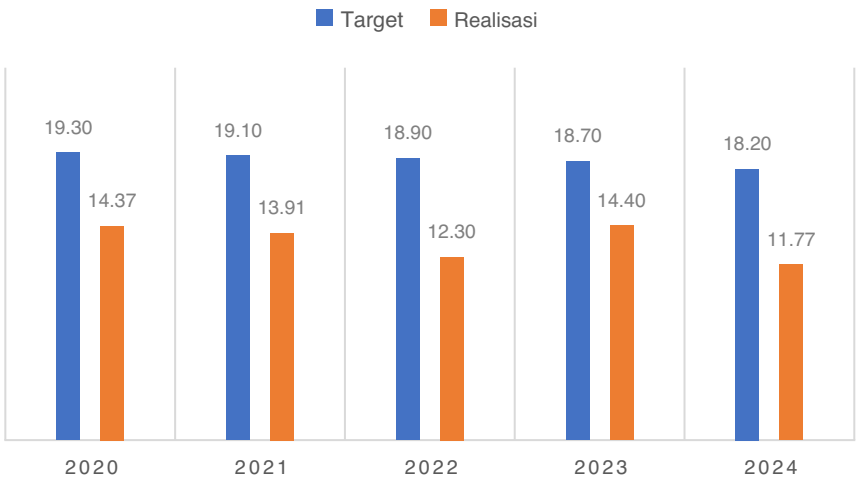


**Grafik 2. 27 Perkembangan AKABa dari Tahun 2020-2024 di Kabupaten Lebak**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Tahun 2024

Dari grafik diatas, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya menurunkan Angka Kematian Balita (AKBa) selama periode 2020-2024, terbukti dengan capaian realisasi yang konsisten di bawah target yang ditetapkan. Faktor-faktor risiko seperti BBLR, status gizi, akses pelayanan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi serta lingkungan masih menjadi tantangan guna memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Langkah-langkah

penanganan harus menyasar akar permasalahan yang telah diidentifikasi diantaranya peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan layanan Antenatal Care (ANC) terpadu, memastikan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan, serta peningkatan layanan neonatal esensial dan penanganan balita sakit melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Memastikan Program perbaikan gizi bagi ibu hamil dan balita, termasuk promosi ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan (PMT), dan suplementasi vitamin A serta tablet tambah darah.

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan penyuluhan edukasi kesehatan kepada masyarakat, terutama ibu dan keluarga, mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, perawatan kehamilan, tanda bahaya pada ibu hamil dan bayi baru lahir, serta praktik hidup bersih dan sehat (PHBS) harus terus digalakkan melalui berbagai media dan pendekatan, termasuk pemberdayaan kader kesehatan dan organisasi masyarakat. Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak juga merupakan intervensi penting dari sisi lingkungan. Sinergi antar sektor, penguatan sistem rujukan, serta pemanfaatan data untuk monitoring dan evaluasi program secara berkala menjadi kunci keberhasilan langkah-langkah penanganan di periode selanjutnya.

**5. Kesehatan Anak dan Remaja**

Kesehatan Anak dan Remaja merupakan pondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan. Di Kabupaten Lebak, berbagai indikator kesehatan anak dan remaja menunjukkan tantangan yang harus segera diatasi. Angka Prevalensi Stunting, Cakupan imunisasi dasar lengkap, meningkatnya kasus anemia pada remaja putri serta meningkatnya perilaku berisiko seperti pernikahan usia dini dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kondisi ini berdampak terhadap kualitas tumbuh kembang anak dan kesiapan generasi muda dalam menghadapi fase dewasa.

Keterbatasan akses informasi dan layanan kesehatan ramah anak dan remaja, kurangnya pemantauan status gizi anak usia sekolah, serta rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya intervensi dini tumbuh kembang dan edukasi kesehatan remaja merupakan beberapa hal yang menjadi kendala selain keterbatasan sarana sanitasi dan akses air bersih di beberapa wilayah yang mempengaruhi status kesehatan anak. Di kalangan remaja, belum optimalnya pelaksanaan program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan Posyandu Remaja menyebabkan rendahnya cakupan skrining kesehatan rutin, termasuk deteksi dini anemia, kesehatan mental, dan penyuluhan gizi serta kurangnya pelibatan lintas sektor seperti pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam menyasar kelompok anak dan remaja.

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan indikator kunci lainnya dalam upaya pencegahan penyakit menular dan perlindungan kesehatan anak usia dini. Di Kabupaten Lebak, tren cakupan IDL menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dampak pandemi COVID-19, hambatan distribusi vaksin, serta penurunan kunjungan ke fasilitas Kesehatan mempengaruhi angka pelaporan dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti campak dan difteri.

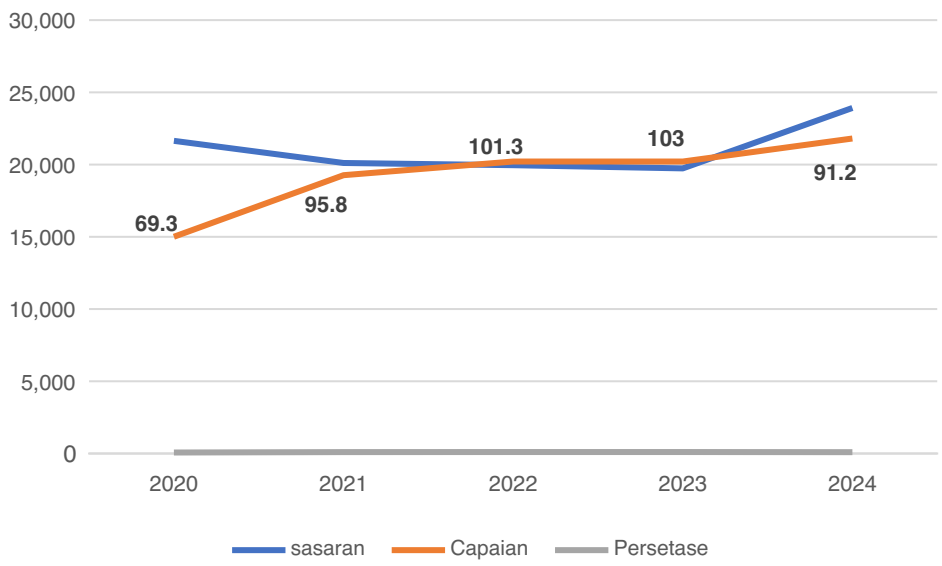


**Grafik 2. 28 Perkembangan Cakupan Imunisasi Dasar Tahun 2020-20**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Tahun 2024*

Capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) di Kabupaten Lebak dalam periode tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan tantangan sekaligus potensi penguatan sistem layanan imunisasi di masa mendatang. Pada tahun 2020, capaian IDL hanya mencapai 69,3% dari target sasaran. Kondisi ini erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu sistem pelayanan kesehatan primer, termasuk pelayanan imunisasi di fasilitas kesehatan dan kegiatan posyandu. Pembatasan aktivitas masyarakat, kekhawatiran terhadap penularan penyakit, serta alokasi sumber daya yang terfokus pada penanganan pandemi menyebabkan sebagian besar bayi tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu.

Memasuki tahun 2021, terdapat peningkatan capaian yang cukup signifikan menjadi 95,8%. Hal ini merupakan hasil dari upaya intensifikasi pelayanan imunisasi melalui kegiatan sweeping dan catch-up immunization yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan didukung oleh kader posyandu serta lintas sektor. Strategi jemput bola yang dilakukan di daerah dengan akses sulit juga turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian.

Kinerja Program IDL mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan 2023, dengan capaian masing-masing sebesar 101,3% dan 103%. Capaian yang melebihi 100% ini mengindikasikan bahwa jumlah bayi yang berhasil diimunisasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Penjangkauan terhadap bayi migran atau yang belum terdata sebelumnya;
2. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan;
3. Dukungan kegiatan nasional seperti Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang turut meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, pada tahun 2024, meskipun jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap meningkat secara absolut, persentase capaian mengalami penurunan menjadi 91,2%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan target sasaran yang cukup besar akibat perbaikan pendataan dan proyeksi demografi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem surveilans berbasis wilayah kerja serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan. Dalam implementasinya program Imunisasi Dasar Lengkap masih memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan sasaran, pendataan sasaran by name by address, dan kesinambungan strategi pelayanan aktif, khususnya pada wilayah dengan akses geografis terbatas. Selain itu, perlu didorong integrasi layanan imunisasi dengan layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat Puskesmas dan Posyandu, guna memastikan bahwa seluruh bayi yang lahir di Kabupaten Lebak mendapatkan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu sebagai bagian dari komitmen daerah dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Lebak.

Kejenuhan masyarakat terhadap kampanye imunisasi berulang tanpa pendekatan yang inovatif juga turut memengaruhi tingkat partisipasi. Di lain pihak terbatasnya jumlah tenaga vaksinator terlatih di beberapa wilayah kerja Puskesmas serta kurangnya kolaborasi lintas sektor, seperti pendidikan dan pemberdayaan

masyarakat, dalam mendukung program imunisasi, hambatan budaya dan kepercayaan lokal yang menyebabkan sebagian orang tua menolak atau menunda imunisasi bagi anak-anak mereka merupakan tantangan untuk meningkatkan cakupan IDL.

Dalam rangka menjangkau Balita untuk di timbang dan mendukung pelaksanaan cakupan imunisasi, maka peran posyandu menjadi sangat penting. Posyandu di Kabupaten Lebak merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Dengan jumlah 2.130 posyandu yang tersebar di 28 kecamatan, keberadaan posyandu tidak hanya sebagai sarana pemantauan tumbuh kembang balita, tetapi juga sebagai titik sentral pelayanan promotif dan preventif. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak telah berupaya mengembangkan posyandu menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Dalam konteks 6 layanan esensial SPM, posyandu di Kabupaten Lebak telah mulai diarahkan untuk tidak hanya memberikan layanan penimbangan dan imunisasi, tetapi juga mencakup: pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin, kesehatan bayi baru lahir dan balita, layanan usia sekolah dasar, serta pelayanan bagi usia produktif dan lanjut usia. Pada tahun 2023, sekitar 58% posyandu telah menyelenggarakan minimal 5 dari 6 layanan SPM, dan sekitar 37% telah menyelenggarakan layanan secara lengkap. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, namun masih menyisakan tantangan berupa disparitas kemampuan antar posyandu, keterbatasan kader terlatih, serta dukungan logistik dan sarana yang belum merata, khususnya di wilayah perdesaan dan terpencil.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendukung posyandu 6 layanan SPM, berbagai langkah strategis telah dan akan terus dilakukan dalam periode RPJMD 2025–2030. Dukungan tersebut meliputi penguatan kapasitas kader melalui pelatihan berkala, pengadaan alat bantu kesehatan dasar, serta integrasi posyandu ke dalam sistem layanan kesehatan primer melalui revitalisasi Posyandu

Prima. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan Dana Desa dan dukungan lintas sektor untuk pembangunan posyandu aktif dan berstandar, disisi lain, sistem pencatatan digital melalui e-Posyandu akan diperkuat agar memudahkan pemantauan cakupan layanan dan pelaporan berbasis data by name by address. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat, Kabupaten Lebak menargetkan pada tahun 2030 sebanyak 80% posyandu aktif telah melaksanakan 6 layanan SPM secara penuh, sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan yang adil dan merata.

Perkembangan jumlah posyandu di Kabupaten Lebak selama kurun waktu Tahun 2020 – 2024 tersaji dalam grafik dibawah ini :

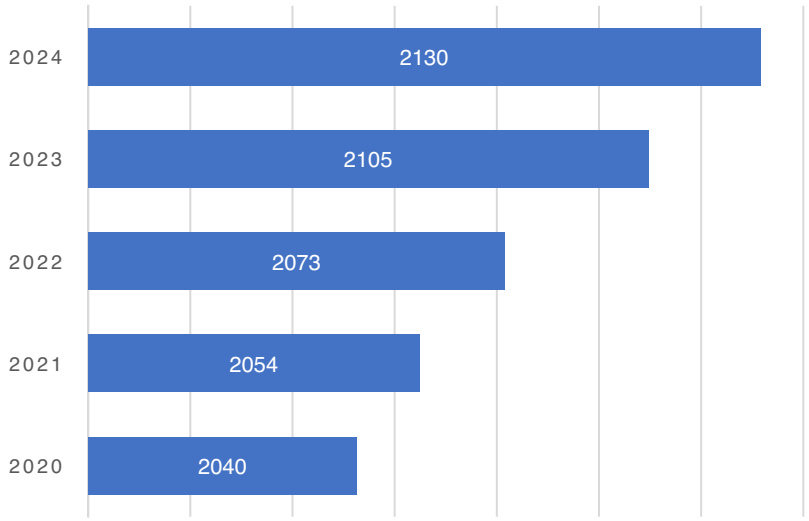


**Grafik 2. 29 Perkembangan Jumlah Posyandu di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

### 6. Kesehatan Usia Produktif

Penduduk usia produktif (15–59 tahun) merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah, berperan sebagai tenaga kerja, penggerak ekonomi, dan agen perubahan sosial Kesehatan, kelompok ini sangat menentukan keberhasilan

pembangunan lintas sektor sehingga pelayanan kesehatan usia produktif menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lebak.

Kelompok usia produktif menghadapi beban ganda penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung semakin meningkat seiring dengan perubahan pola hidup dan konsumsi. Di sisi lain, penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS, masalah kesehatan jiwa merupakan tantangan yang mendapatkan perhatian. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil proyeksi penduduk yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak, terdapat tren peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Lebak selama periode 2020 hingga 2024.

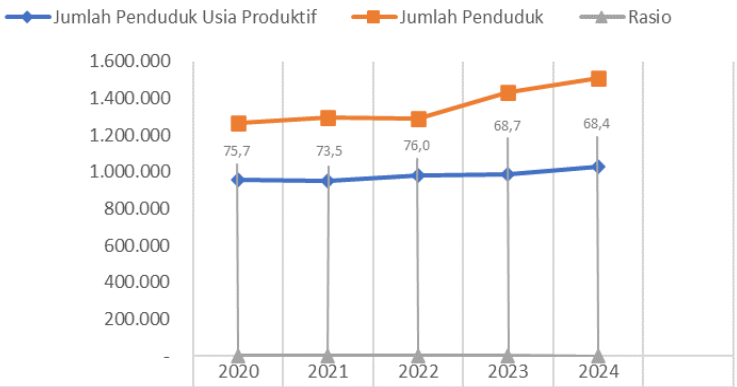


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk Usia Produktif | 958.558 | 949.558 | 980.731 | 984.787 | 1.030.890 |
| Jumlah Penduduk | 1.267.067 | 1.292.531 | 1.289.610 | 1.433.698 | 1.506.378 |
| Rasio | 75,7 | 73,5 | 76,0 | 68,7 | 68,4 |

**Grafik 2. 30 Peningkatan Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) di Kabupaten Lebak 2020-2024**

*Sumber : BPS kabupaten Lebak, 2024*

Grafik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada kedua kategori : jumlah penduduk total dan jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lebak dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah penduduk total menunjukkan peningkatan yang stabil

setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk adalah 1.267.067 jiwa dan meningkat menjadi 1.506.378 jiwa pada tahun 2024.

Peningkatan tertinggi terjadi antara tahun 2022 dan 2023 (dari 1.289.610 menjadi 1.433.698 jiwa), menunjukkan percepatan pertumbuhan penduduk di periode tersebut.

Serupa dengan penduduk total, jumlah penduduk usia produktif juga mengalami peningkatan dari 958.558 jiwa pada tahun 2020, angka ini naik menjadi 1.030.890 jiwa pada tahun 2024. Meskipun ada sedikit penurunan dari 2020 ke 2021 (958.558 menjadi 949.558), tren pertumbuhan secara keseluruhan menunjukkan tren positif. Peningkatan yang signifikan terjadi dari tahun 2023 ke 2024 (984.787 menjadi 1.030.890).

Berdasarkan hal tersebut diatas, jumlah penduduk usia produktif secara konsisten membentuk porsi yang besar dari total penduduk. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lebak memiliki "bonus demografi" atau setidaknya berada dalam periode di mana sebagian besar penduduknya berada dalam usia produktif.

Rasio penduduk usia produktif menunjukkan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi, sosial, Kesehatan dan bidang lainnya sangat terbuka dimana semakin tinggi rasio penduduk usia produktif, maka semakin besar potensi angkatan kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif merupakan aset berharga bagi Kabupaten Lebak dimana berarti ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan produktivitas jika didukung oleh pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Selain sebagai aset, peningkatan ini juga membawa tantangan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa ada cukup lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Selain itu, investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus terus ditingkatkan untuk memastikan kualitas sumber daya manusia

tetap tinggi dan mampu bersaing. Dengan kata lain bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi jika angkatan kerja tidak terserap dengan baik.

### 7. Kesehatan Lansia

Penduduk lanjut usia (≥60 tahun) di Kabupaten Lebak menunjukkan tren peningkatan seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup dan penurunan angka kelahiran. Fenomena ini menandai transisi demografi yang menuntut perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan lansia. Kesehatan lansia menjadi aspek penting dalam pembangunan daerah, mengingat kelompok ini rentan terhadap penyakit kronis dan gangguan fungsional yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, jumlah penduduk lansia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah penduduk lansia mencapai sekitar 8% dari total populasi Kabupaten Lebak. Peningkatan ini mencerminkan tren penuaan penduduk yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesehatan lansia, termasuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, Posyandu Lansia, dan kegiatan promotif serta preventif lainnya. Namun, cakupan pelayanan kesehatan lansia belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Cakupan Layanan Kesehatan Lansia (>60 tahun) disajikan dalam grafik dibawah ini :

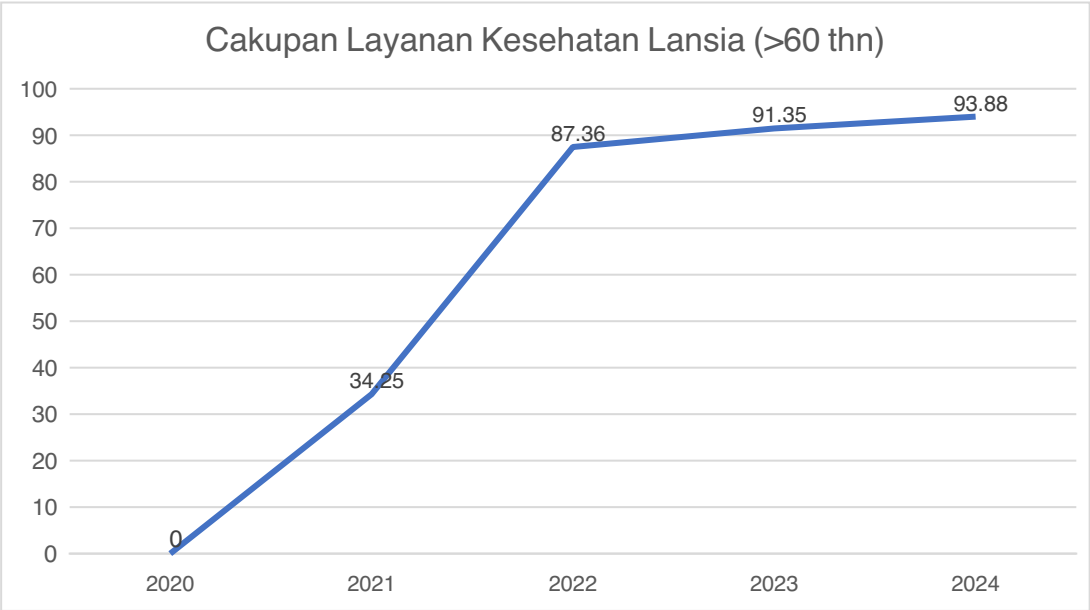


**Grafik 2. 31 Cakupan Layanan Kesehatan Lansia (>60 Tahun) di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

Cakupan layanan kesehatan lansia di Kabupaten Lebak periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan yang sangat pesat dan signifikan, terutama pada periode 2021-2022, hingga mencapai level mendekati universal pada tahun 2024 (94%). Keberhasilan ini didorong oleh komitmen strategis pemerintah daerah, implementasi kebijakan dan program kesehatan yang relevan termasuk SPM dan PIS-PK, serta dukungan infrastruktur kesehatan yang ada. Meskipun demikian, dampak pandemi COVID-19 sempat menjadi tantangan, dan keterbatasan sumber daya serta kondisi geografis tetap menjadi faktor penghambat. Secara keseluruhan, Kabupaten Lebak telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam memastikan lansia mendapatkan akses layanan kesehatan, meskipun upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengatasi tantangan yang inheren dalam upaya mencapai cakupan universal, yaitu menjangkau sisa populasi lansia yang mungkin lebih sulit diakses karena berbagai faktor, atau bisa juga karena program telah mendekati batas maksimal cakupannya.

**8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan. Di tingkat kabupaten. Standar pelayanan minimal menjadi kewajiban yang harus di penuhi oleh daerah sesuai dengan PP No. 2 tahun 2018 dan dijabarkan dalam Permendagri No. 100 tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut terdapat 12 indikator SPM kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk dipenuhi. Dari jumlah tersebut, 6 SPM masuk dalam kategori pelayanan kesehatan masyarakat, yang mencakup pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar (7–15 tahun), dan usia lanjut. Keenam indikator ini berfokus pada kelompok rentan dalam siklus kehidupan yang memerlukan intervensi promotif dan preventif secara berkelanjutan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sementara itu, 6 indikator SPM lainnya berada dalam lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit, seperti pelayanan pada penderita tuberkulosis, HIV, penyakit tidak menular, gangguan jiwa berat, serta deteksi dini faktor risiko kesehatan. Capaian terhadap seluruh indikator ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan dan sebaran tenaga kesehatan, aksesibilitas layanan (terutama di wilayah terpencil), sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor.

Peningkatan capaian SPM kesehatan tidak hanya mencerminkan kinerja teknis sektor kesehatan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan daerah dalam menjamin hak dasar warga dan mewujudkan pembangunan kesehatan yang merata dan berkeadilan sesuai Permenkes No. 4 tahun 2019 tentang Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024

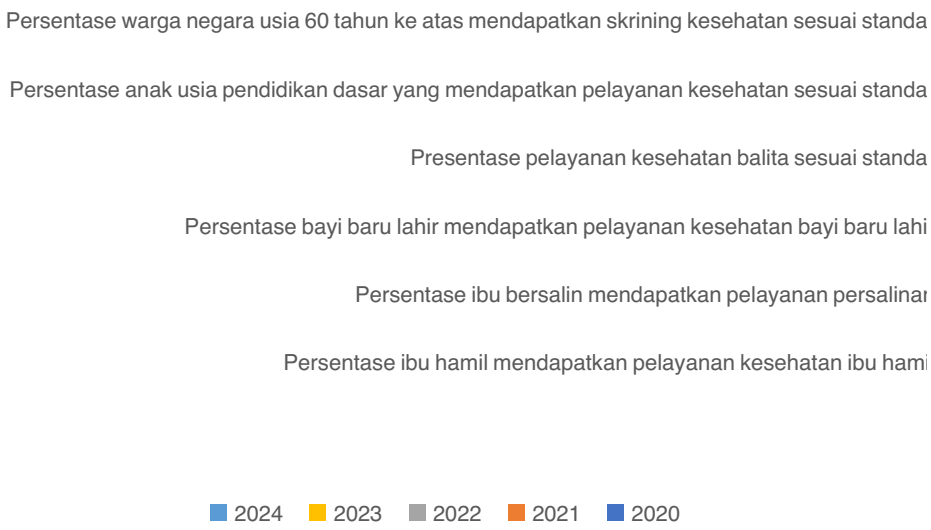


**Grafik 2. 32 Capaian SPM Bidang Kesehatan Masyarakat**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

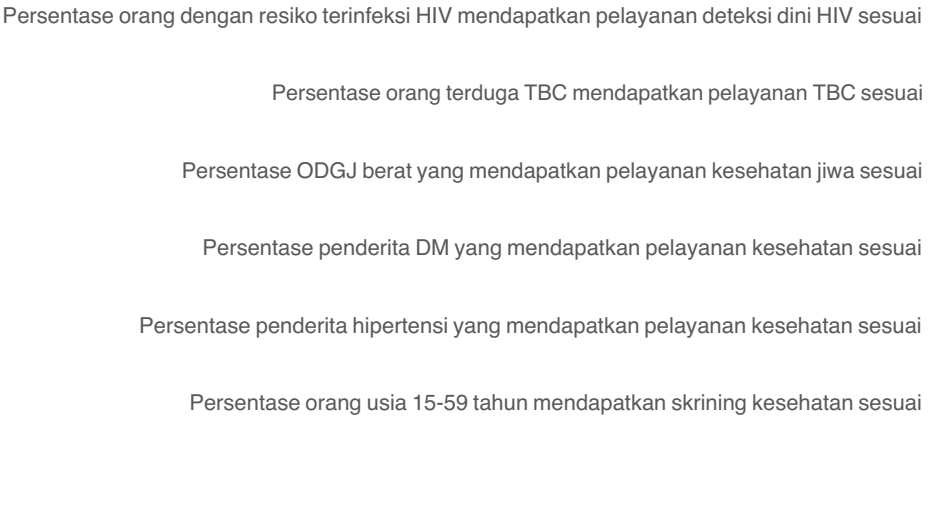


**Grafik 2. 33 Capaian SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Lebak menunjukkan dinamika yang cukup beragam antar jenis layanan. Secara umum, terjadi fluktuasi capaian dari tahun ke tahun yang mencerminkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan, terutama yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 dan proses pemulihan setelahnya. Berdasarkan grafik capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak di bidang kesehatan masyarakat dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam cakupan layanan di berbagai indikator. Pada awal periode, capaian untuk semua kategori seperti skrining kesehatan lansia, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar, balita, bayi baru lahir, ibu bersalin, dan ibu hamil menunjukkan tingkat yang lebih rendah. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, terjadi lonjakan substansial, menandakan upaya yang berhasil dalam memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi standar pelayanan minimal di tengah berbagai tantangan.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini meliputi penguatan program kesehatan masyarakat, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta alokasi sumber daya yang lebih baik untuk sektor kesehatan. Adaptasi strategi pelayanan, terutama setelah periode awal yang menantang, juga berperan penting dalam memastikan layanan esensial tetap dapat diakses meskipun beberapa indikator menunjukkan sedikit penurunan atau stabilisasi pada tahun terakhir setelah mencapai puncaknya, capaian secara keseluruhan tetap berada pada level yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan keberlanjutan upaya dan efektivitas intervensi kesehatan yang telah diterapkan.

**9. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan di Seluruh Wilayah**

Secara geografis, Kabupaten Lebak memiliki karakteristik geografis yang luas dan bervariasi, mulai dari daerah pesisir, perbukitan, hingga wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Tantangan utama dalam pemerataan layanan kesehatan adalah keterbatasan

infrastruktur, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dan jarak tempuh yang jauh ke fasilitas kesehatan. Salah satu komitmen Pemerintah Daerah adalah memastikan setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan Kesehatan.

Pemerintah daerah telah mengembangkan inovasi seperti Puskesmas Keliling, Telemedicine, dan kemitraan dengan bidan praktik swasta, namun masih perlu penguatan dari sisi regulasi, pendanaan, dan integrasi antar sektor.

Pemberian layanan Kesehatan yang prima tentunya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap, mudah dijangkau dan memadai. Perkembangan ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 14 Perkembangan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Puskesmas | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| 2 | Puskesmas DTP | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2 | Jumlah Poliklinik | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 |
| 3 | Jumlah Pustu | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
| 4 | Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Rasio Poliklinik per satuan penduduk | 0,044 | 0,042 | 0,041 | 0,041 | 0,042 |
| 6 | Rasio Pustu persatuan penduduk | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 7 | Cakupan Puskesmas | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Jumlah Posyandu | 2040 | 2054 | 2073 | 2105 | 2130 |
| 11 | Jumlah Dokter | 259 | 383 | 383 | 535 | 352 |
| 12 | Rasio Jumlah Dokter Per satuan Penduduk | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,41 | 0,27 |
| 13 | Jumlah Tenaga Medis | 1.676 | 1618 | 1618 | 3949 | 4019 |
| 14 | Rasio Jumlah Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk (per 1000 ) | 1,3 | 1,25 | 1,25 | 3,05 | 3,11 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

Fluktuasi data fasilitas layanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Lebak periode 2020–2024 dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal sistem kesehatan daerah maupun eksternal seperti kebijakan nasional dan kondisi sosial ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor utama penyebab fluktuasi tersebut:

a. Dampak Pandemi COVID-19 Tahun 2020–2021 merupakan periode krisis akibat pandemi COVID-19 yang memengaruhi seluruh sistem kesehatan, termasuk di Kabupaten Lebak. Pandemi menyebabkan pengalihan sumber daya kesehatan, baik tenaga maupun pembiayaan, untuk penanganan kasus COVID-19. Hal ini dapat menjelaskan penurunan jumlah poliklinik dari 88 menjadi 61 sejak tahun 2020 serta turunnya jumlah tenaga medis dari 2.746 (2019) menjadi 1.618 (2021–2022). Penyesuaian operasional serta penutupan sementara atau penurunan layanan fasilitas kesehatan non-esensial juga menjadi faktor yang signifikan.
b. Reformasi Data dan Penyesuaian Klasifikasi, Beberapa fluktuasi, seperti penurunan mendadak jumlah poliklinik dan pustu, bisa juga disebabkan oleh penyesuaian klasifikasi atau verifikasi data fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah atau pusat dapat menetapkan redefinisi atau pembaruan data sesuai standar baru, seperti penyesuaian pada Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), sehingga beberapa fasilitas yang sebelumnya tercatat mungkin tidak lagi memenuhi standar dan dikeluarkan dari daftar resmi.
c. Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan, Kenaikan jumlah dokter dari 259 (2020) menjadi 535 (2023), meskipun kembali turun menjadi 352 (2024), menunjukkan ketergantungan terhadap pola rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan. Peningkatan pada 2023 kemungkinan besar hasil dari program penugasan nasional (seperti Nusantara Sehat atau PTT), rekrutmen CPNS tenaga kesehatan, atau kebijakan afirmasi daerah terpencil. Namun, penurunan kembali di 2024 mengindikasikan tidak berkelanjutannya kontrak, rotasi, atau

keterbatasan anggaran daerah untuk mempertahankan jumlah tenaga medis tersebut.

d. Ketersediaan Anggaran dan Prioritas Pembangunan, Fluktuasi fasilitas dan SDM juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah dan prioritas kebijakan tahunan. Peningkatan jumlah tenaga medis dan Posyandu pada 2023–2024 dapat dikaitkan dengan ketersediaan dana DAK bidang kesehatan atau intervensi program nasional seperti percepatan penurunan stunting, sementara stagnasi pembangunan Puskesmas DTP menunjukkan keterbatasan dalam ekspansi layanan dasar akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
e. Pertumbuhan Penduduk dan Wilayah Administratif, Faktor demografis juga memainkan peran penting. Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk tanpa diimbangi pembangunan fasilitas, maka rasio layanan kesehatan per penduduk akan turun. Sebaliknya, peningkatan fasilitas seperti Posyandu (dari 2.007 menjadi 2.130) mencerminkan respons positif terhadap pertumbuhan jumlah balita dan ibu hamil di masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dan kader untuk menyelenggarakan layanan berbasis komunitas.

Selain memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana Kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan Kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan program perlindungan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas secara adil dan merata.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lebak telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mencapai Universal Health

Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduknya. Perkembangan kepesertaan JKN dan capaian kepesertaan disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

**Tabel 2. 15 Perkembangan Kepesertaan JKN dan Capaian Kepesertaan**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk | 1.314.863 | 1.402.324 | 1.459.108 | 1.494.976 | 1.506.378 |
| Peserta JKN | 1.153.365 | 1.215.823 | 1.106.831 | 1.412.354 | 1.476.115 |
| Cakupan | 87,72 | 86,70 | 75,86 | 94,47 | 97,99 |

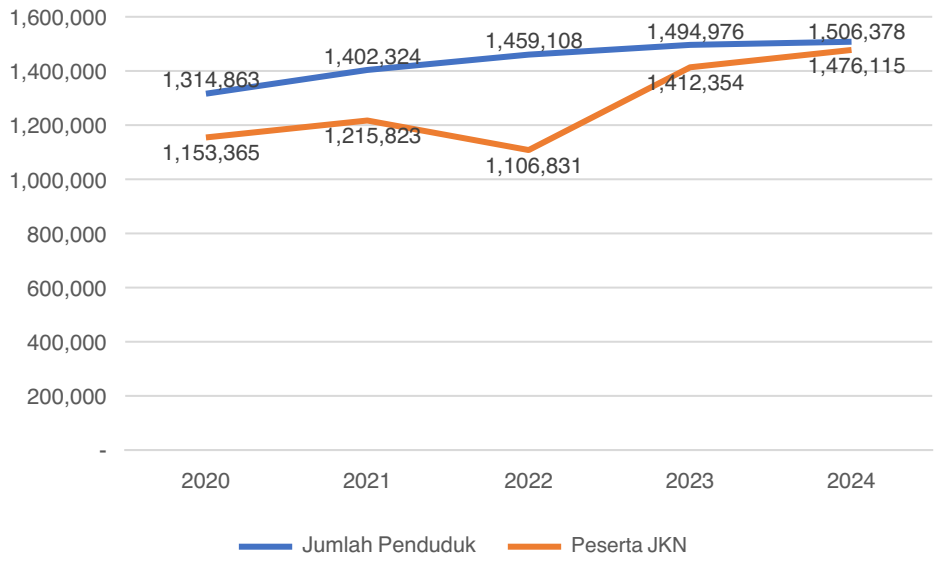


**Grafik 2. 34 Perkembangan Kepesertaan JKN dan Capaian Kepesertaan**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

Pada tahun 2020, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Lebak di targetkan mencapai sekitar 85% dari total penduduk, dengan jumlah peserta sekitar 1.153.365 jiwa. Pada tahun ini, sudah ada perhatian terhadap kepesertaan, termasuk bagi perangkat desa dan kepala desa yang iurannya dibayarkan sebagian oleh pemberi kerja.

Selain itu, kebijakan pendaftaran bayi baru lahir ke BPJS Kesehatan sesuai Perpres No 82 Tahun 2018 sudah mulai berlaku di Lebak, dengan denda bagi yang terlambat mendaftarkan.

Pada Tahun 2021 kepesertaan ditargetkan sebesar 85% dari total penduduk dengan jumlah peserta sebanyak 1.215.823 jiwa, Jumlah itu terus bertambah pada Tahun 2022 sebagai upaya untuk mencapai target UHC. Pada September 2023, BPJS Kesehatan melakukan penyerahan kartu JKN-KIS kepada masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, hal tersebut merupakan upaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pencapaian UHC, Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan kepesertaan JKN bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Tahun 2024 menjadi puncak capaian penting bagi Kabupaten Lebak dalam program JKN, sebanyak 1.412.354 jiwa penduduk warga Lebak telah terdaftar dalam program JKN dari total jumlah penduduk Kabupaten Lebak sebanyak 1.494.976 jiwa. Ini menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Lebak mencapai 97,99%.

## B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang merefleksikan tingkat kesehatan keluarga secara menyeluruh, mencakup berbagai dimensi seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, pengendalian penyakit, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta akses pelayanan kesehatan. Capaian IKS menjadi tolok ukur penting keberhasilan pembangunan kesehatan daerah dan sekaligus merepresentasikan jumlah keluarga sehat yang terus bertambah di wilayah tersebut. Analisis data capaian IKS terhadap target periode 2020-2024 ini akan memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan keluarga-keluarga yang lebih sehat.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang menggambarkan status kesehatan keluarga berdasarkan 12 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. IKS menjadi alat ukur penting dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui intervensi berbasis keluarga. Perkembangan Indeks Keluarga Sehat 2020-2024 di Kabupaten Lebak dapat dijelaskan pada grafik dibawah ini :

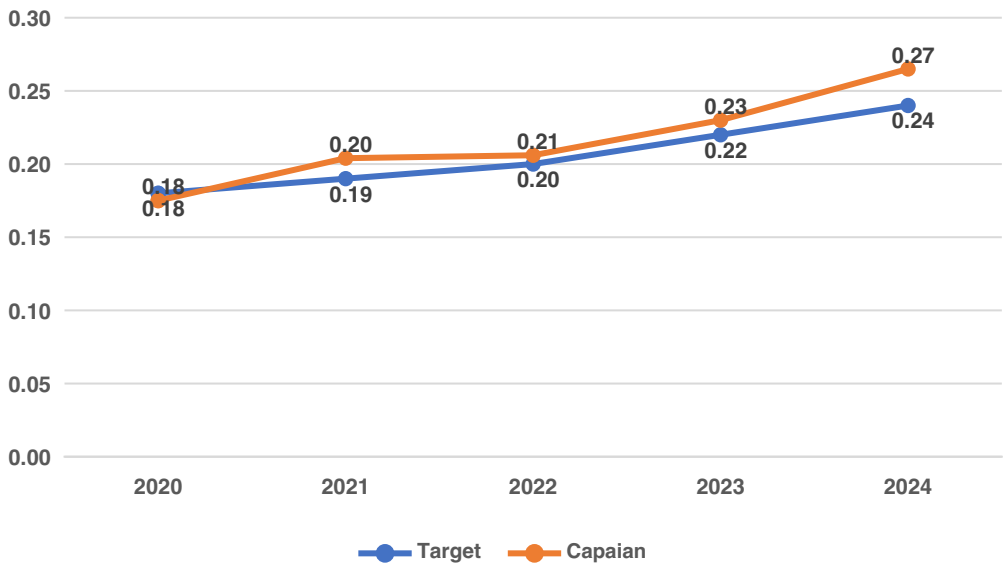


**Grafik 2. 35 Indeks Keluarga Sehat 2020-2024 di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Tahun 2024*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian IKS Kabupaten Lebak menunjukkan tren meningkat setiap tahun dalam periode 2020–2024, peningkatan tertinggi terjadi pada 2022–2023 sebesar 4,5 poin, mengindikasikan adanya intervensi

yang berdampak signifikan terhadap kesehatan keluarga di tingkat komunitas. Faktor kenaikan tren di pengaruhi oleh :

1. Ekspansi Program Keluarga Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dimana Sejak 2021, cakupan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan (khususnya bidan dan perawat puskesmas) meningkat, termasuk pendataan keluarga melalui aplikasi Keluarga Sehat 2.0.
2. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Primer, dimana terjadi peningkatan jumlah desa dengan jangkauan puskesmas dan posyandu aktif. Program revitalisasi Posyandu dan integrasi dengan PAUD turut mendukung pemantauan balita dan ibu hamil.
3. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kampanye PHBS di sekolah, rumah tangga, dan tempat kerja melalui program lintas sektor, termasuk dukungan dari PKK, berdampak pada peningkatan indikator seperti penggunaan air bersih dan sanitasi layak.
4. Penurunan Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk, Upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif (seperti pemberian PMT, edukasi gizi, dan sanitasi lingkungan) turut mendongkrak nilai IKS.

Perkembangan Jumlah keluarga sehat periode tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

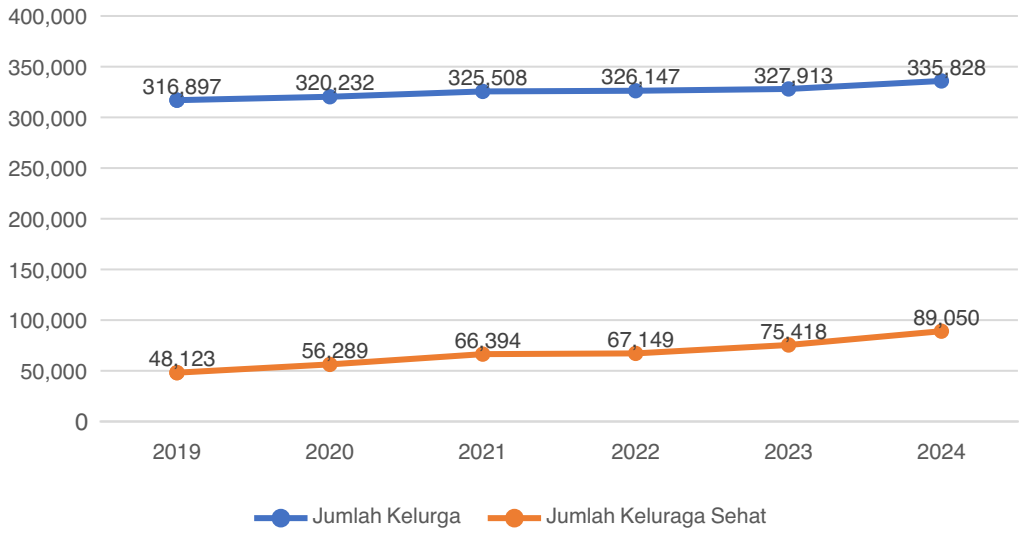


**Grafik 2. 36 Perkembangan Jumlah Keluarga Sehat Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

Jumlah keluarga total di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan, dari 320.232 pada tahun 2020 menjadi 335.828 pada tahun 2024. Peningkatan IKS yang terjadi berarti laju peningkatan jumlah keluarga sehat lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah keluarga total, sehingga proporsi keluarga sehat terus meningkat. Peningkatan IKS membutuhkan pendekatan intersektoral dan berbasis keluarga, dengan fokus pada edukasi, layanan primer, serta pemberdayaan masyarakat.

## C. Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun, stunting menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal.

Stunting didefinisikan sebagai keadaan dimana status gizi pada anak menurut TB/U dengan hasil nilai Z Score <-2 SD, hal ini menunjukkan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan. Stunting pada anak juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kematian, masalah perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan adanya ketidak seimbangan fungsional. Stunting menjadi masalah gagal tumbuh yang dialami oleh bayi di bawah lima tahun yang mengalami kurang gizi semenjak di dalam kandungan hingga awal bayi lahir, stunting sendiri akan mulai nampak ketika bayi berusia 2 tahun.

Pelaksanaan kegiatan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi sudah berjalan walaupun membutuhkan perhatian lebih terutama pada pelaksanaan koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan program, kegiatan dan data dukung dalam pelaksanaan aksi konvergensi terintegrasi. Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi, peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan gizi serta peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Status gizi kurang atau yang lebih sering disebut undernutrition merupakan keadaan gizi seseorang dimana jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari energi yang dikeluarkan. Hal ini dapat terjadi karena jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari anjuran kebutuhan individu. Balita dengan status gizi kurang apabila hasil pengukuran berat badan (BB) terhadap umur (U) miliki indeks Z Skor -3.0 s.d 2.0 Standar Devian (SD).
Grafik Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI dan ePPBGM Tahun 2020 – 2024 :

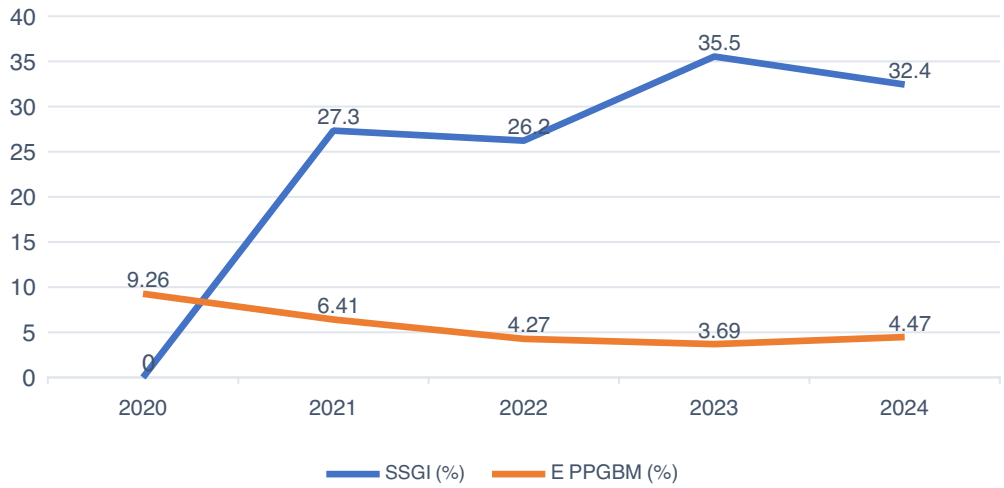


**Grafik 2. 37 Grafik Prevalensi Stunting Berdasarkan SSGI dan ePPBGM Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2024*

Berdasarkan grafik di atas, terdapat dua sumber data utama yang digunakan dalam mengukur prevalensi stunting, yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan sistem e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Perbedaan signifikan antara data yang dihasilkan oleh kedua sumber tersebut mencerminkan adanya perbedaan metodologi, cakupan sasaran, dan tujuan pengumpulan data. SSGI dilaksanakan oleh instansi pusat melalui pendekatan survei sampel rumah tangga yang bersifat representatif terhadap populasi, menggunakan alat ukur yang terstandarisasi dan tenaga pengukur yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Hasil SSGI umumnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pembangunan nasional dan daerah dalam sektor kesehatan, serta menjadi rujukan dalam pemantauan target-target pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, data e-PPGBM dihimpun secara rutin oleh tenaga kesehatan dan kader Posyandu, bersumber dari pencatatan kegiatan pelayanan di lapangan, dan sangat bergantung pada cakupan kehadiran balita di Posyandu, sehingga lebih bersifat administratif dan operasional.

Pemerintah Daerah menempatkan data SSGI sebagai acuan utama dalam penetapan arah kebijakan dan indikator makro pembangunan kesehatan, mengingat

validitas dan representativitasnya yang lebih tinggi dalam menggambarkan kondisi riil masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan sistem e-PPGBM tetap memiliki peranan penting sebagai alat pemantauan yang mendukung pelaksanaan program intervensi gizi di tingkat layanan dasar. Oleh karena itu, sinergi antara kedua sistem data akan terus diperkuat melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem pelaporan, serta harmonisasi indikator agar mampu memberikan gambaran yang utuh dan akurat tentang situasi dan kondisi stunting di daerah.

Perkembangan persentase prevlensi gizi kurang dan perkembangan jumlah total balita terhadap jumlah balita penderita stunting dari tahun 2020-2024 di Kabupaten Lebak berdasarkan ePPBGM digambarkan dalam grafik dibawah ini :

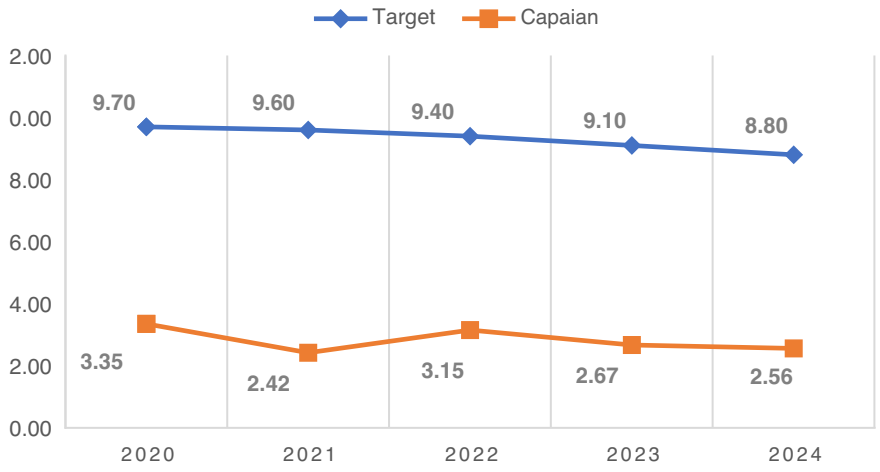


**Grafik 2. 38 Persentase Prevalensi Gizi Kurang Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Tahun 2024*

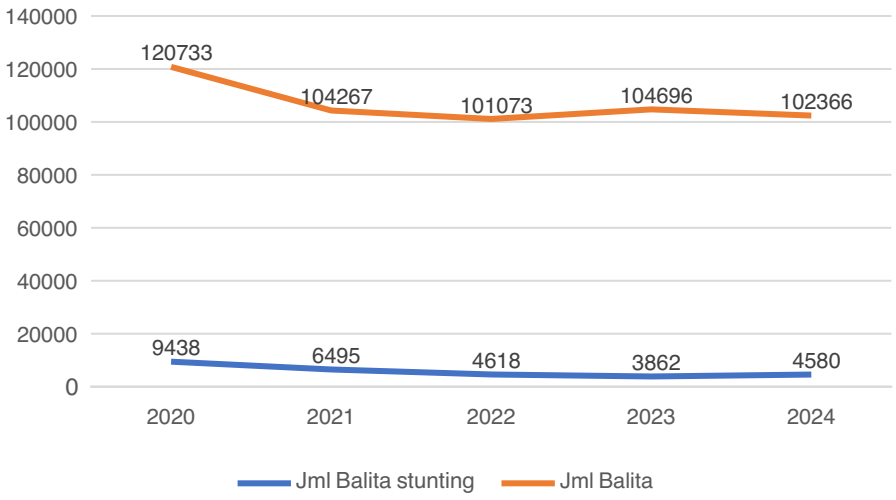


**Grafik 2. 39 Perkembangan Jumlah Total Balita Terhadap Jumlah Balita Penderita Stunting Tahun 2020-2024**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Tahun 2024*

Berdasarkan data jumlah balita dan balita stunting Kabupaten Lebak selama periode lima tahun terakhir, terlihat adanya tren penurunan jumlah balita stunting secara konsisten hingga tahun 2023, disertai dengan fluktuasi jumlah total balita yang relatif stabil setelah penurunan tajam pada awal periode. Penurunan jumlah balita stunting pada awalnya mencerminkan efektivitas berbagai program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk perluasan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas Posyandu, serta penguatan edukasi gizi kepada keluarga. Namun demikian, pada tahun terakhir terlihat adanya sedikit peningkatan jumlah kasus balita stunting, meskipun jumlah balita secara umum mengalami penurunan.

Peningkatan jumlah balita stunting pada tahun terakhir tersebut mengindikasikan bahwa tantangan penanganan stunting masih cukup kompleks, terutama terkait dengan faktor determinan sosial dan ekonomi, keterbatasan jangkauan layanan di wilayah tertentu, serta belum optimalnya integrasi lintas sektor dalam intervensi pencegahan. Di sisi lain, fluktuasi jumlah total balita juga turut memengaruhi rasio prevalensi, sehingga diperlukan strategi yang lebih adaptif dan

berbasis data dalam menetapkan prioritas wilayah dan kelompok sasaran. Pemerintah Kabupaten Lebak akan terus menguatkan mekanisme pemantauan berbasis sistem informasi gizi, memperkuat peran kader, serta meningkatkan koordinasi antar-perangkat daerah untuk memastikan penurunan stunting dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

### 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

#### A. Rata - Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lebak juga mengalami peningkatan dari 6,40 tahun di tahun 2020 menjadi 6,61 tahun di tahun 2024 atau setara dengan kelas 1 (satu) SMP. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lebak dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.40 berikut:

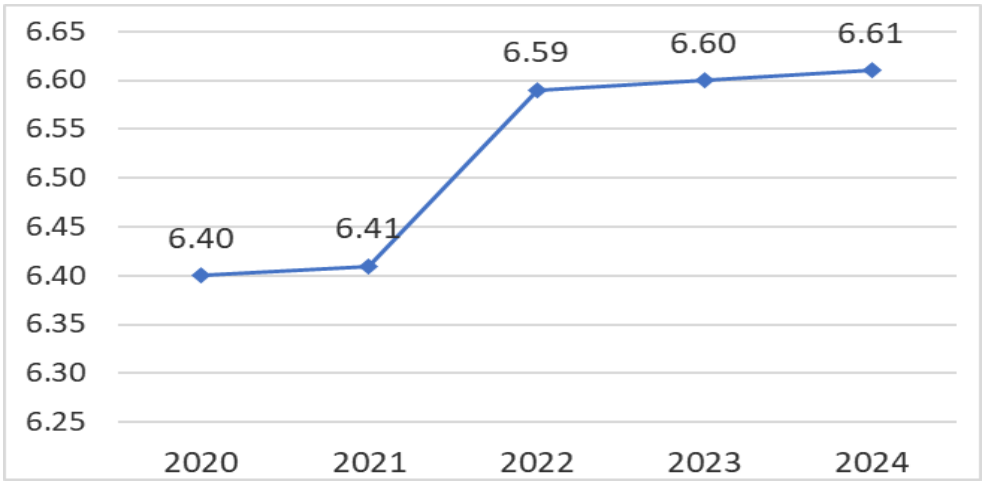


**Grafik 2. 40 Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024**

*Sumber: Bapperida Kabupaten Lebak, 2024*

Dari grafik tersebut terlihat bahwa Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan. Namun demikian angka tersebut masih menunjukkan posisi terendah di Provinsi Banten. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya

akses ke fasilitas Pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan faktor budaya dimana masih ada sebagian masyarakat yang tidak ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga masih banyak anak pada usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

## B. Harapan Lama Sekolah

Indikator Pendidikan yang tidak kalah penting adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan HLS di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada grafik berikut :

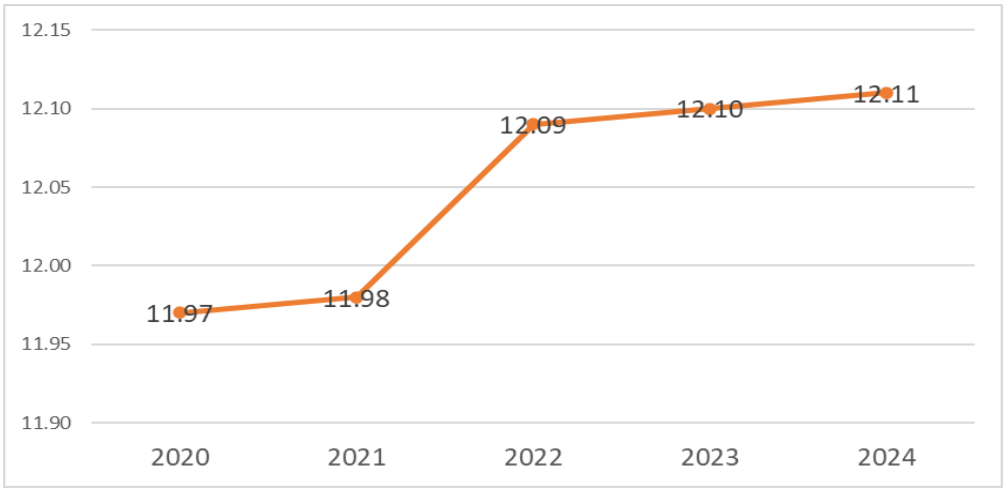


**Grafik 2. 41 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber rapor Pendidikan tahun 2025*

Dari grafik tersebut nampak bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan dari 11,97 tahun di tahun 2020 menjadi 12,11 tahun di tahun 2024 atau meningkat sebesar 0,14 tahun. Angka tersebut masih menempati posisi terendah di Provinsi Banten. Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah antara lain disebabkan oleh Peluang Pendidikan yang terbatas untuk mencapai Pendidikan yang

lebih tinggi, kondisi aksesibilitas sekolah yang masih sulit dijangkau, sarana dan prasana pendidikan yang kurang memadai, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang masih rendah, tingkat kemiskinan.

## C. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan di Kabupaten Lebak menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, bahkan menjadi yang terendah di Provinsi Banten. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas warga Lebak hanya memiliki pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak tercatat hanya mencapai 64,71, yang merupakan nilai terendah di Banten. Pertumbuhan IPM di daerah ini juga tergolong rendah, dengan angka hanya 1,06% pada tahun 2021.

Lebih lanjut, sekitar 45,93% dari populasi Lebak hanya lulusan SD, dan beberapa sumber bahkan menyebutkan angka ini mencapai 46,52%. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lebak hanya 6,59 tahun, yang setara dengan tingkat kelas satu SMP, menunjukkan bahwa banyak anak-anak di daerah ini tidak melanjutkan pendidikan mereka lebih jauh. Harapan lama sekolah (HLS) di Lebak juga rendah, yang berarti anak-anak di daerah ini diperkirakan hanya akan mengenyam pendidikan dalam waktu yang singkat.

Rendahnya indeks pendidikan ini diduga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya IPM di Kabupaten Lebak. Dengan kondisi ini, jelas bahwa pendidikan di Kabupaten Lebak masih menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat sangat penting untuk mengubah keadaan ini.

**Grafik 2. 42 Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Lebak 2019-2024**

*Sumber : Data Diolah Bapperida*

## D. Angka Literasi/Numerasi

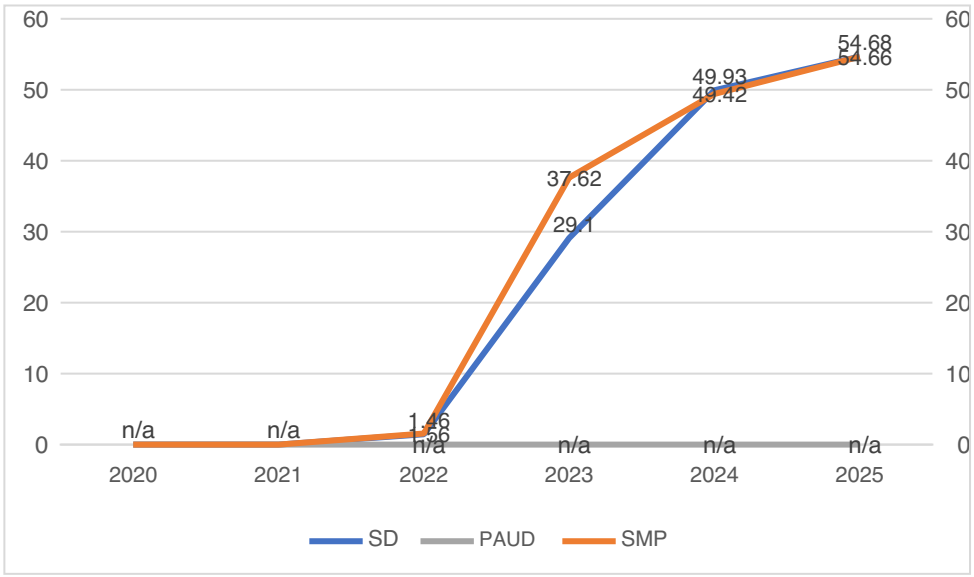


**Grafik 2. 43 Grafik Angka Literasi Kabupaten Lebak Tahun 2020-2025**

*Sumber : Rapor Pendidikan Tahun 2025*

Dari Grafik tersebut dapat dilihat tingkat Capaian Angka literasi Kabupaten Lebak pada tahun 2025 untuk jenjang SD untuk capaian tahun ini 54,68%, dari 2024 (49,93%) atau naik sebesar **4,75**. Capaian Angka Numerasi jenjang SMP pada tahun 2025 sebesar 54,96%, naik **5,54** dari 2024 (49,42%). Meningkatnya angka literasi di Kabupaten Lebak merupakan indikator positif yang mencerminkan keberhasilan program-program literasi yang telah dijalankan, serta peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, semakin memiliki kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi dengan lebih baik. Walaupun demikian peningkatan angka literasi Kabupaten Lebak masih menempati posisi paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Banten.

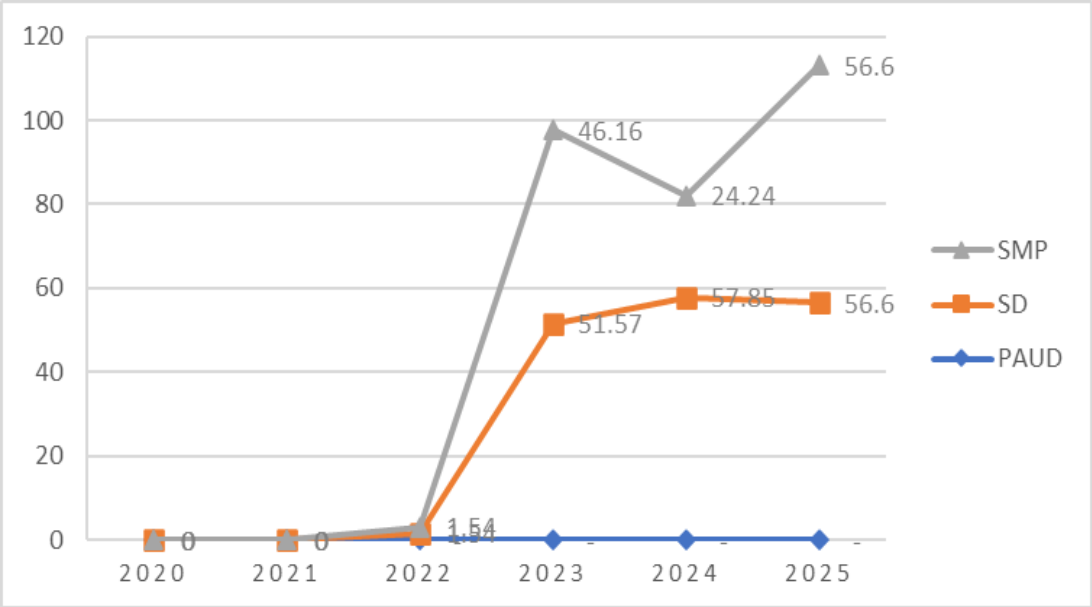


**Grafik 2. 44 Angka Numerasi Kabupaten Lebak Tahun 2020-2025**

*Sumber Rapor Pendidikan tahun 2025*

Dari Grafik tersebut dapat dilihat tingkat Capaian Angka Literasi Kabupaten Lebak pada tahun 2025 untuk jenjang SD sebesar 56,6% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 57,85% atau mengalami penurunan

sebesar 1,25. Capaian Angka Literasi jenjang SMP pada tahun 2025 sebesar 56,6% mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 54,24%, atau mengalami peningkatan sebesar 2,36 % .

Penurunan angka numerasi di Indonesia merupakan indikator yang mengkhawatirkan, yang mengisyaratkan adanya tantangan serius dalam sistem pendidikan dan kemampuan dasar masyarakat. Hal ini menandakan kesulitan siswa dalam memahami konsep bilangan dan keterampilan berhitung, yang mungkin disebabkan oleh metode pengajaran yang kurang efektif, kurangnya dukungan belajar, atau bahkan kualitas pendidikan yang secara keseluruhan menurun. Oleh karena itu, penurunan angka numerasi menuntut adanya perbaikan strategis dalam sistem pendidikan, termasuk peningkatan metode pengajaran, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan, guna memastikan bahwa generasi muda memiliki keterampilan dasar yang diperlukan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

## E. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, peningkatan minat baca menandakan langkah maju menuju masyarakat yang lebih berpengetahuan dan berdaya saing. Data Capaian Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) Kabupaten Lebak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.44 berikut ini:

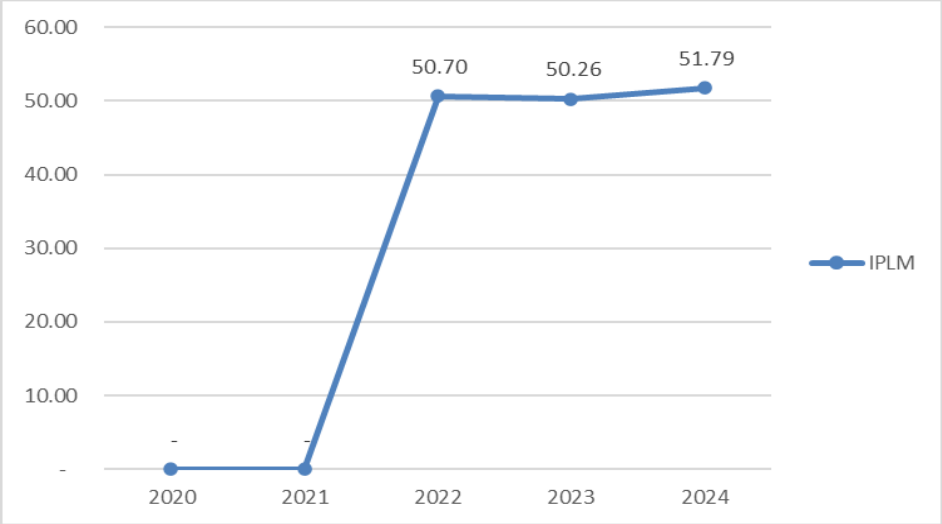


**Grafik 2. 45 Capaian IPLM Kabupaten Lebak 2020-2024**

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan kearsipan 2024*

Dari grafik di atas IPLM Kabupaten Lebak pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 51.79 % apabila dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 50.26 %. Tingkat capaian tersebut meningkat sebesar 1.53%. Peningkatan tingkat capaian Indeks Pembangunan literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Lebak menunjukkan kemajuan signifikan dalam kesadaran dan kemampuan literasi masyarakat. Capaian tersebut masuk ke dalam katagori sedang apabila dibandingkan dengan Kota Tangerang yang memiliki IPLM tertinggi di Provinsi Banten, yaitu 99.20 % sedangkan Kabupaten Serang Memiliki Nilai terendah, yaitu 47.13%. Meningkatkan IPLM menghadapi berbagai tantangan kompleks. Pertama, kesenjangan akses terhadap sumber daya literasi, seperti buku dan internet, masih signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda secara ekonomi dan sosial. Kedua, kualitas pendidikan literasi yang belum merata di berbagai jenjang pendidikan menjadi kendala utama. Ketiga, rendahnya minat baca dan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat luas, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, gaya hidup, dan ketersediaan waktu luang, juga menjadi tantangan besar. Keempat, kurangnya dukungan dan koordinasi yang efektif antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, juga menghambat upaya

peningkatan IPLM. Terakhir, evaluasi dan monitoring yang kurang optimal dalam mengukur dampak program literasi juga menjadi hambatan dalam mencapai target peningkatan IPLM.

**F. Indeks Literasi Digital**

Pada tahun 2025, indeks literasi digital di Kabupaten Lebak masih menunjukkan tantangan yang signifikan meskipun terdapat berbagai upaya peningkatan. Survei menunjukkan bahwa secara nasional, termasuk di Lebak, indeks literasi digital belum mencapai level yang memuaskan. Pemerintah daerah telah berupaya melalui program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak. Namun, tantangan utama tetap berupa keterbatasan akses internet yang merata dan cepat, terutama di daerah pedesaan, yang menghambat partisipasi digital masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman teknologi di kalangan penduduk juga menjadi faktor penghambat. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan indeks literasi digital terus dilakukan, dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan bijak di masa mendatang. Data spesifik mengenai angka indeks literasi digital Kabupaten Lebak pada tahun 2025 masih terbatas

**2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Kondisi perlindungan sosial di Kabupaten Lebak masih dihadapkan dengan belum akuratnya penerima manfaat dan belum menjangkau seluruh penduduk rentan. Hal ini disebabkan data belum mutakhir dan belum adanya sistem yang terintegrasi. Meskipun dari sisi cakupan telah memadai jika diakumulasikan baik yang bersumber dari APBN (Program Keluarga Harapan, BPNT , Kartu Indonesia Sehat) maupun APBD.

Ke depan, diharapkan cakupan perlindungan sosial diperluas agar dapat menjangkau seluruh lapisan penduduk rentan, serta mampu beradaptasi untuk memberikan bantuan kepada penduduk yang terdampak dalam situasi darurat.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Kabupaten Lebak pada tahun 2024 mencapai angka 97,17% atau sejumlah 1.142.582 peserta. Berdasarkan status kepesertaan, persentase peserta aktif sebesar 74,56% atau sejumlah 1.106.918 Peserta dan peserta non aktif sebesar 22,61% atau sejumlah 211.094 peserta. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Lebak pada tahun 2024 mencapai 97,17% dari total jumlah penduduk yang sifatnya inklusif, untuk semua segmen masyarakat termasuk kelompok disabilitas, kelompok rentan dan kelompok yang terabaikan, serta mencakup semua kebutuhan pelayanan dasar yang merata bagi semua individu di Kabupaten Lebak. Perkembangan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Lebak berfluktuatif dan cenderung meningkat.

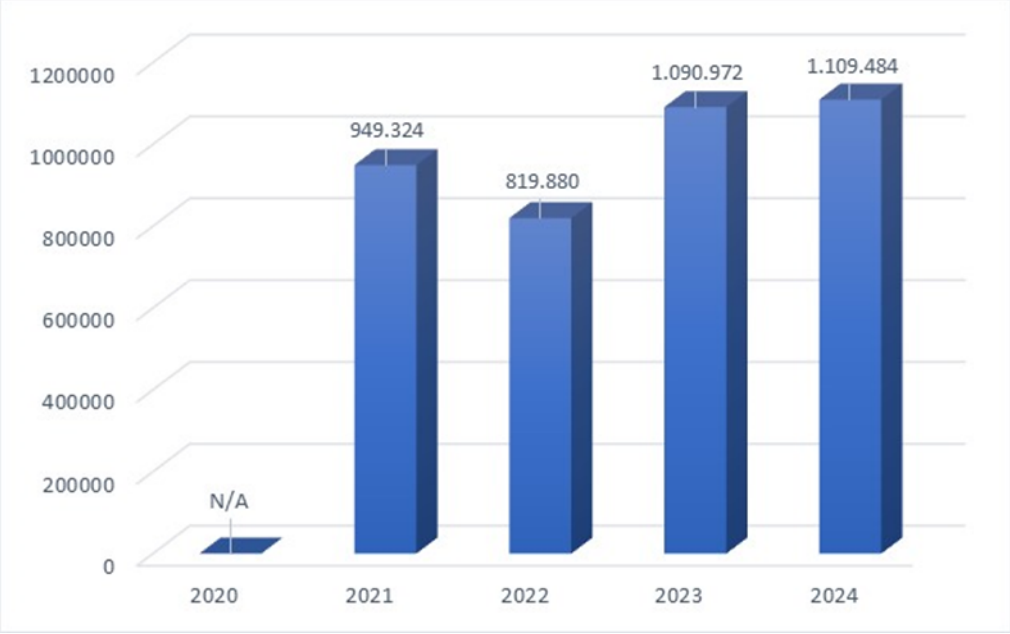


**Grafik 2. 46 Grafik Tren Jaminan Kesehatan Nasional**

*Sumber : Bidang Linjamsos, Dinas Sosial, 2021-2024*

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH dikenal juga dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau Bantuan Tunai Bersyarat. Ini berarti bahwa penerima bantuan (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, bantuan bisa ditunda atau bahkan dihentikan. Cakupan bantuan sosial PKH di Kabupaten Lebak 11,40% atau 64.221 jiwa.

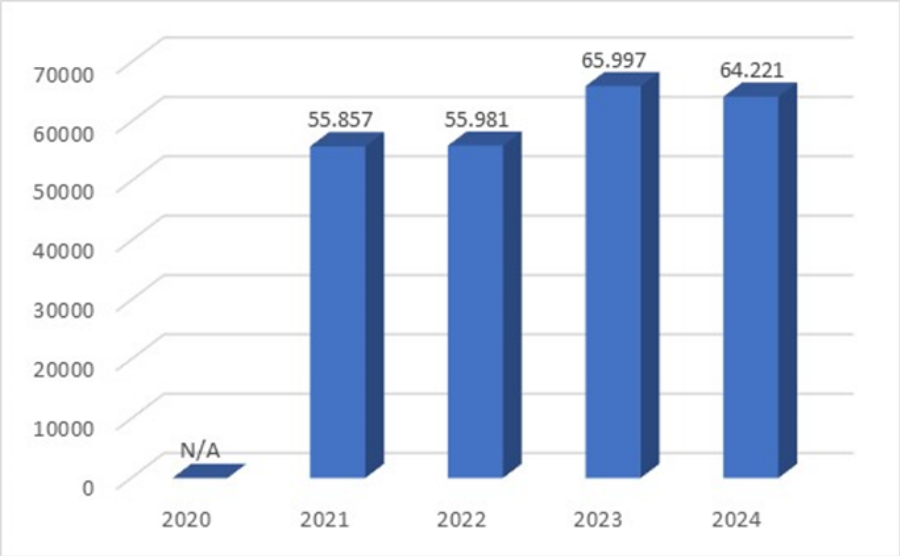


**Grafik 2. 47 Grafik Tren Bantuan Sosial PKH**

*Sumber : Bidang Linjamsos, Dinas Sosial, 2021-2024*

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dengan tujuan memastikan keluarga miskin dan rentan memiliki akses terhadap bahan makanan pokok yang layak dan bergizi

secara rutin**.** Cakupan bantuan sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Lebak pada tahun 2024 mencapai angka 98,69% atau sejumlah 64.221 keluarga.

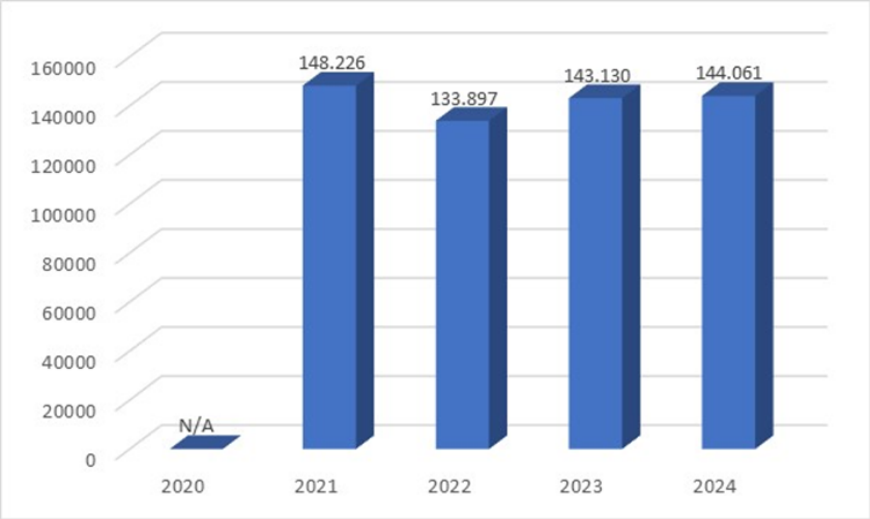


**Grafik 2. 48 Grafik Tren Bantuan Sosial BPNT**

*Sumber : Bidang Linjamsos, Dinas Sosial, 2021-2024*

Selain itu, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh tingkat pemerintahan. PPKS merupakan individu atau kelompok yang memerlukan bantuan dan dukungan dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang dan menghadapi berbagai jenis masalah yang menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kategori utama dari PPKS menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial antara lain, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAFZA, korban *trafficking*, korban tindak

kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.

Capaian persentase penurunan PPKS di Kabupaten Lebak pada tahun 2024 sudah cukup baik yaitu sebesar 87,38%. Rehabilitasi sosial merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa komponen penting dalam rehabilitasi sosial PPKS, yaitu asesmen kebutuhan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, layanan psikososial, pemulihan sosial, bimbingan dan konseling, penyuluhan dan edukasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah membantu PPKS mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

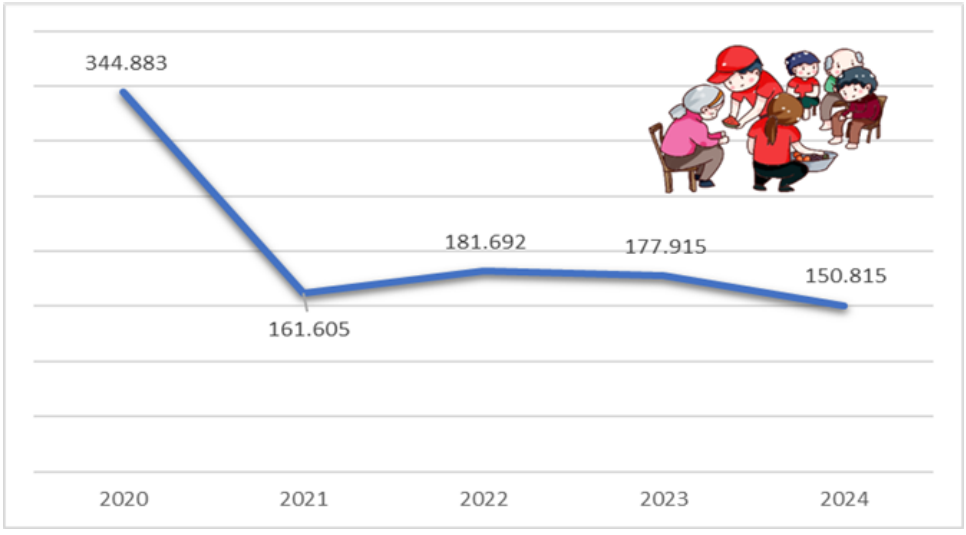


**Grafik 2. 49 Grafik Tren Jumlah PPKS**

*Sumber : Bidang Linjamsos, Dinas Sosial, 2020-2024*

Uraian kategori dan jumlah PPKS tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2. 16 Tabel Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| No. | Kategori PPKS | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Anak Balita Terlantar | 15 | 0 | 200 | 120 | 51 |
| 2. | Anak Terlantar | 87 | 1.376 | 548 | 446 | 5 |
| 3. | Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) | 4 | 3 | 5 | 19 | 15 |
| 4. | Anak Jalanan | 16 | 30 | 30 | 2 | 1 |
| 5. | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | 528 | 1.162 | 1.181 | 1.181 | 1.160 |
| 6. | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | 5 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| 7. | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) | 94 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 8. | Lanjut Usia Terlantar | 8.789 | 6.614 | 21.187 | 21.187 | 7.996 |
| 9. | Penyandang Disabilitas | 5.149 | 8.259 | 8.768 | 8.768 | 8.499 |
| 10. | Tuna Susila | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gelandangan | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12. | Pengemis | 5 | 17 | 1 | 8 | 4 |
| 13. | Pemulung | 29 | 0 | 2 | 29 | 38 |
| 14. | Kelompok minoritas | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15. | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) | 34 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| 16. | Orang dengan HIV/AIDS (ADHA) | 26 | 53 | 53 | 128 | 128 |
| 17. | Korban Penyalahgunaan NAFZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18. | Korban Trafficking | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Korban Tindak Kekerasan | 1 | 127 | 127 | 127 | 0 |

| No. | Kategori PPKS | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20. | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 21. | Korban Bencana Alam | 498 | 92 | 440 | 644 | 308 |
| 22. | Korban Bencana Sosial | 198.884 | 394 | 734 | 585 | 4 |
| 23. | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) | 3.438 | 3.132 | 24.135 | 24.135 | 14.881 |
| 24. | Fakir Miskin | 120.830 | 134.750 | 117.220 | 114.540 | 111.710 |
| 25. | Keluarga bermasalah sosial psikologis | 72 | 31 | 8 | 5 | 8 |
| 26. | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 6.368 | 5.554 | 7.046 | 5.965 | 5.965 |
| **Jumlah** | | **344.883** | **161.605** | **181.962** | **177.915** | **150.815** |

*Sumber : Bidang Linjamsos, Dinsos Kab. Lebak, 2020-2024*

Keberhasilan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tersedianya data dan informasi tentang PPKS dan PSKS yang akurat dan terkini, sehingga dalam merencanakan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dari implementasi program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat dilakukan dengan jelas dan terukur.

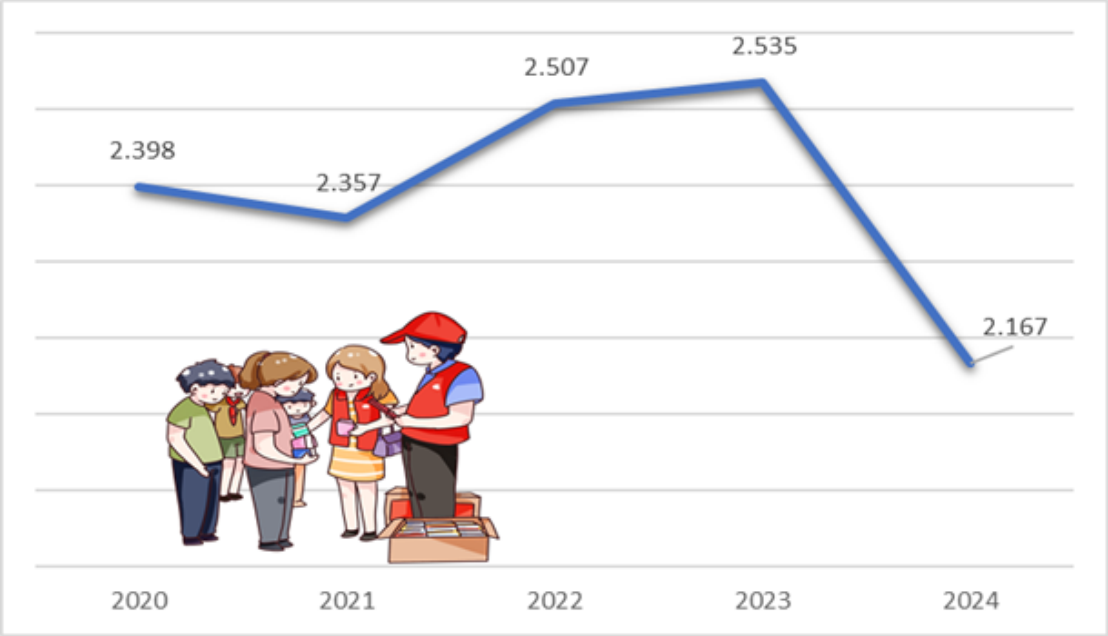


**Grafik 2. 50 Grafik Tren PSKS**

*Sumber : Bidang Dayasos, Dinas Sosial, 2021-2024*

Uraian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 17 Tabel Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| No. | Kategori PPKS | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pekerja Sosial Profesional (PSP) | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2. | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.526 |
| 3. | Karang Taruna | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 4. | WKSBM | 30 | - | 147 | 173 | - |
| 5. | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 6. | Tagana | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 7. | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 43 | 32 | 32 | 34 | 36 |
| 8. | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Penyuluh Sosial Fungsional | - | - | - | - | 3 |
| 10. | Penyuluh Sosial Masyarakat | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **2.398** | **2.357** | **2.507** | **2.535** | **2.167** |

*Sumber : Bidang Dayasos Dinsos Kab. Lebak, 2020-2024*

Belum optimalnya cakupan layanan pada urusan sosial, merupakan realitas yang dihadapi saat ini. Disparitas kapasitas layanan dibandingkan dengan peningkatan dan kompleksitas permasalahan sosial yang berkembang merupakan kondisi obyektif yang patut mendapat perhatian di masa depan. Disamping itu efektifitas koordinasi dan sinergi antar sektor, antar institusi, dan antar pemangku kepentingan juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri dalam pengentasan beragam permasalahan sosial yang ada. Sejalan dengan itu, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) mutlak dilakukan di tengah keterbatasan kapasitas maupun sarana dan prasarana sosial yang dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah, sehingga pengentasan beragam masalah sosial tersebut dapat lebih efektif. Secara rinci capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024**

| No. | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Penurunan PPKS | % | 64,11 | 68,51 | 87,41 | 71,64 | 87,38 |
| 2. | Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | % | N/A | 68,51 | 87,41 | 71,64 | 87,38 |
| 3. | Persentase Penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan | % | N/A | N/A | N/A | N/A | 55,56 |
| 5. | Persentase Terpenuhinya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PPKS | % | 72,32 | 97,68 | 85,00 | 91,67 | 83,57 |
| 6. | Persentase Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS | % | 91,28 | 75,77 | 99,05 | 97,22 | 99,90 |
| 7. | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Pengungsi/Penyintas Korban Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Lebak, 2020-2024*

**Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial**

Urusan Sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemenuhan tanggung jawab pemerintah mencakup upaya-upaya menyantuni, mengayomi dan memberikan perlakukan dan pelayanan yang adil dan manusiawi kepada rakyat yang memiliki hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial dasarnya yang disebabkan oleh kemiskinan, ketunaan, keterlantaran baik anak-anak maupun usia lanjut, kecacatan, bencana alam dan bencana sosial serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pelaksanaan kewajiban tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Kementerian Sosial telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penerapan SPM Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan tersebut di atas menjadi dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial, selanjutnya sebagai penanggungjawabnya selaku pengampu SPM Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Lebak berkewajiban menyampaikan laporan penerapan SPM yang telah dilaksanakan setiap tahun. Penerapan SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Keberhasilan capaian SPM bidang sosial adalah cerminan dari komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat yang paling rentan, sehingga mereka dapat hidup secara layak dan berpartisipasi dalam pembangunan. Berikut perkembangan capaian SPM Bidang Sosial.

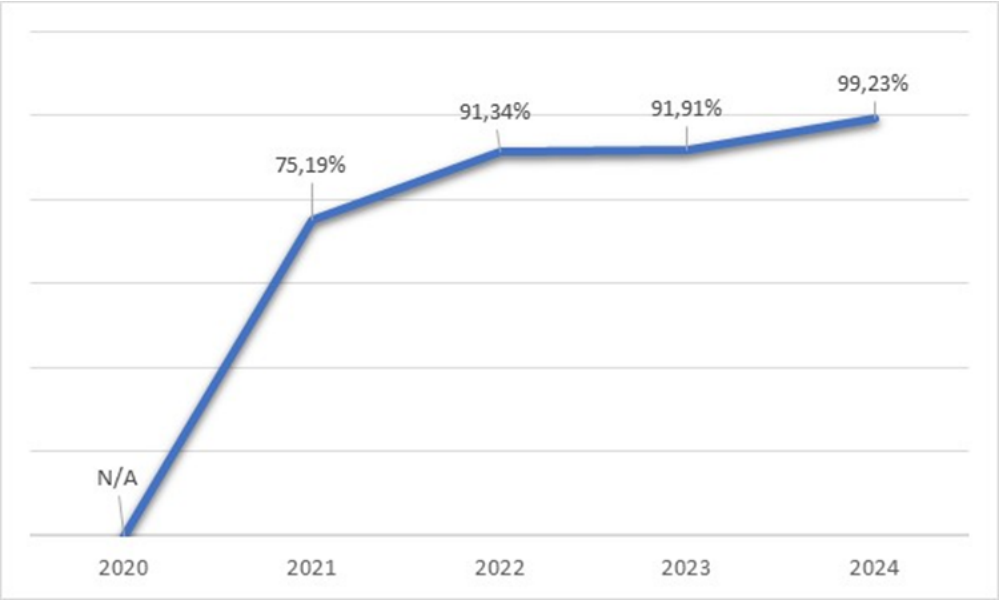


**Grafik 2. 51 Grafik Perkembangan Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024**

*Sumber : Bidang Rehabsos, Dinsos, 2021-2024*

Penerapan SPM baru masif dilaksanakan pada tahun 2021 walaupun peraturan terkait penerapan tersebut terbit pada tahun 2018. Keberhasilan capaian SPM bidang sosial adalah cerminan dari komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat yang paling rentan, sehingga mereka dapat hidup secara layak dan berpartisipasi dalam pembangunan terlihat dari nilai capaian yang semakin meningkat setiap tahunnya. Rincian capaian SPM Bidang Sosial tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 19 Tabel Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2024**

| No. | Jenis Pelayanan | Satuan | | Realisasi Capaian SPM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | **Nilai SPM Bidang Sosial** | **%** | N/A | **75,19** | **91,34** | **91,91** | **99,23** |
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | % | N/A | 89,23 | 94,67 | 100,00 | 99,23 |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | % | N/A | 94,67 | 90,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | % | N/A | 96,00 | 90,67 | 98,46 | 97,77 |
| 4. | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | % | N/A | 0,00 | 89,33 | 73,10 | 100,00 |
| 5. | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | % | N/A | 96,00 | 91,38 | 88,00 | 100,00 |

*Sumber : Bidang Rehabsos, Dinsos, 2020-2024*

### 2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

### A. Indeks Kerukunan Beragama

Kerukunan beragama menjadi salah satu fokus utama pembangunan sosial di Indonesia sebagaimana tertuang pada muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dari 76,02 poin pada 2023 menjadi 78 poin pada 2029 sebagai indikator keberhasilan menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman agama dan budaya yang tinggi di Indonesia.

RPJMN 2025-2029 juga menekankan pentingnya membangun kehidupan beragama yang inklusif, rukun, toleran, dan demokratis untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera. Hal ini termasuk meningkatkan literasi keagamaan,

pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Banten tercatat mencapai angka 69,6 poin pada survei tahun 2023. Angka ini menunjukkan tingkat kerukunan yang masih perlu ditingkatkan mengingat target nasional pada RPJMN 2025-2029 adalah mencapai 78 poin.

Kabupaten Lebak juga dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi dengan masyarakat dari berbagai agama hidup berdampingan secara harmonis. Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lebak berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Lokasi tempat ibadah berbagai agama di Kabupaten Lebak, seperti Masjid Agung dan Gereja Katolik di Rangkasbitung, bahkan berdekatan, mencerminkan nilai toleransi dan kerukunan yang berjalan baik. FKUB dan Kementerian Agama Lebak juga mendirikan kampung moderasi beragama di beberapa kecamatan untuk memperkuat kerukunan dengan semangat saling tolong-menolong dan gotong royong tanpa memandang perbedaan keyakinan.

Berdasarkan data Kesbangpol Kabupaten Lebak, Secara demografis, penduduk Kabupaten Lebak mayoritas beragama Islam (99,25%), dengan minoritas Kristen Katolik (0,7%), Kristen Protestan (0,14%), Budha (0,10%), Hindu (0,4%), dan ajaran kepercayaan Sunda Wiwitan (0,44%).

Pada 2024, pengumpulan data IKUB di Kabupaten Lebak dilakukan oleh Balai Litbang Agama Jakarta sebagai bagian dari survei nasional, namun hasil angka indeks spesifik untuk Lebak belum dipublikasikan secara terbuka.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2025-2029 diarahkan melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai landasan hidup bersama dalam keberagaman dengan menekankan pentingnya

perbaikan tata kelola hidup bersama dalam perbedaan dengan mengedepankan prinsip toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama.

Strategi utama yang direncanakan meliputi:

1) Pengembangan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, seperti kiyai, kasepuhan dan jawara, yang memiliki pengaruh kuat di akar rumput. Keterlibatan mereka diharapkan dapat menjadi teladan dan memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila yang mendukung kerukunan beragama.
2) Perbaikan regulasi dan tata kelola sosial yang inklusif untuk menjamin kesetaraan hak beragama dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi yang menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama.
3) Penguatan forum-forum kerukunan umat beragama di tingkat daerah dan kecamatan untuk mendorong dialog antaragama, pencegahan konflik, serta kerja sama sosial yang produktif.
4) Maksimalisasi peran pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang sangat berperan dalam membentuk karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda dan mengarahkan agar pesantren menjadi pusat penguatan moderasi beragama dan toleransi.

## B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah sebuah alat ukur yang dikembangkan untuk mengevaluasi tingkat kemajuan pembangunan budaya di suatu wilayah atau negara. Konsep ini muncul sebagai pelengkap indikator pembangunan konvensional yang lebih fokus pada aspek ekonomi, seperti GDP atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPK dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dimensi budaya. Kebudayaan dianggap sebagai pilar keempat pembangunan berkelanjutan, selain ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utama IPK adalah memberikan gambaran

objektif tentang sejauh mana suatu masyarakat mampu mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan aset budayanya untuk kesejahteraan.

IPK bertujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. IPK umumnya mengukur beberapa dimensi utama:

- **Ekonomi Budaya** mencakup kontribusi sektor kreatif dan budaya terhadap perekonomian, seperti industri film, musik, kerajinan, dan pariwisata budaya. Dimensi ini juga melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis budaya.
- **Pendidikan dan Pengetahuan Budaya** mengukur akses masyarakat terhadap pendidikan seni dan budaya, tingkat literasi budaya, serta upaya pelestarian pengetahuan tradisional. Ini termasuk ketersediaan lembaga pendidikan seni, museum, dan pusat-pusat pembelajaran budaya.
- **Partisipasi Budaya** menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya, baik sebagai pelaku maupun penikmat seni. Indikator ini mencakup frekuensi kunjungan ke acara budaya, festival, pertunjukan, dan kegiatan komunitas budaya.
- **Infrastruktur Budaya** mengukur ketersediaan dan kualitas fasilitas budaya seperti gedung pertunjukan, galeri seni, perpustakaan, museum, dan ruang-ruang kreatif publik.
- **Keberagaman dan Inklusi Budaya** mengevaluasi sejauh mana berbagai kelompok budaya dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan identitas kulturalnya dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya.

Untuk saat ini IPK dirilis baru sampai tingkat provinsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal

Kebudayaan pada tahun 2023 dimana IPK Provinsi Banten sebesar 52,49, berikut lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 20 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi di Indonesia Tahun 2023**

| No. | Provinsi | IPK |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 55,33 |
| 2 | Sumatera Utara | 54,28 |
| 3 | Sumatera Barat | 59,34 |
| 4 | Riau | 58,99 |
| 5 | Jambi | 58,92 |
| 6 | Sumatera Selatan | 57,51 |
| 7 | Bengkulu | 61,45 |
| 8 | Lampung | 57,82 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 57,99 |
| 10 | Kepulauan Riau | 59,8 |
| 11 | D.K.I. Jakarta | 55,96 |
| 12 | Jawa Barat | 55,5 |
| 13 | Jawa Tengah | 60,89 |
| 14 | D.I. Yogyakarta | 67,9 |
| 15 | Jawa Timur | 59,38 |
| 16 | Banten | 52,49 |
| 17 | Bali | 71,36 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 57,37 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53,04 |
| 20 | Kalimantan Barat | 55,15 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 60,89 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 58,55 |
| 23 | Kalimantan Timur | 57,56 |
| 24 | Kalimantan Utara | 56,7 |
| 25 | Sulawesi Utara | 55,39 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 51,42 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 55,26 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 55,1 |
| 29 | Gorontalo | 52,48 |
| 30 | Sulawesi Barat | 50,47 |
| 31 | Maluku | 59,38 |
| 32 | Maluku Utara | 56,05 |
| 33 | Papua | 48,04 |
| 34 | Papua Barat | 48,52 |

| | | |
|---|---|---|
| | Indonesia | 57,13 |

*Sumber :Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia 2023*

### 2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Lebak tidak dapat dilepaskan dari penguatan fondasi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, serta upaya mewujudkan kesetaraan gender dan inklusivitas bagi seluruh kelompok masyarakat. Ketiga pilar ini saling terkait dan menjadi prasyarat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang tumbuh optimal, memiliki ketahanan sosial, dan menjadi agen perubahan positif. Sementara itu, kesetaraan gender memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Terakhir, masyarakat yang inklusif menjamin bahwa semua kelompok, termasuk yang rentan dan marjinal, mendapatkan akses dan perlindungan yang setara. Untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan di bidang ini, Pemerintah Kabupaten Lebak berfokus pada beberapa indikator kunci yang mencerminkan capaian pembangunan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat.

#### A. Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan isu krusial yang menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam upaya mengukur dan memantau kemajuan pembangunan di bidang ini, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), mengembangkan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Sebagaimana didefinisikan dalam

berbagai sumber resmi, termasuk yang dikutip oleh Paralegal.id, IPA adalah indikator komposit yang dirancang untuk menggambarkan sejauh mana pencapaian pemenuhan hak-hak anak dan penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak di suatu wilayah.

Kehadiran IPA menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai ukuran baku dan tolok ukur standar bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah seperti Kabupaten Lebak, untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Indeks ini tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi perlindungan anak, tetapi juga membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Secara umum, IPA mencakup dua dimensi utama: Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yang mengukur aspek-aspek hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang fokus pada perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap IPA dan tren perubahannya menjadi fundamental dalam merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran demi mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Lebak (2021–2023) tersaji dalam grafik dibawah ini :

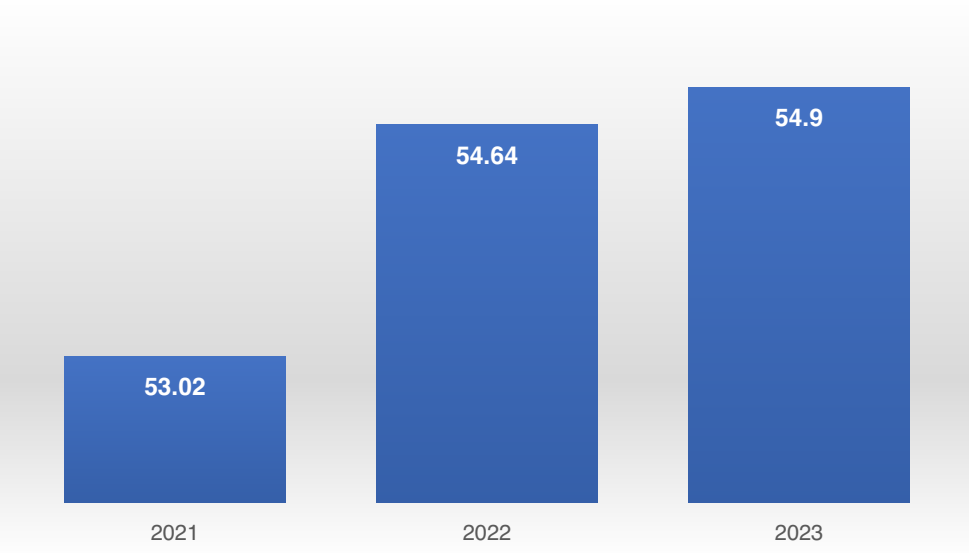


**Grafik 2. 52 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Lebak Tahun 2020-2023**

*Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Lebak, 2024*

Kenaikan IPA di Kabupaten Lebak adalah cerminan dari pendekatan multipihak yang terintegrasi, yang melibatkan komitmen pemerintah, peningkatan layanan dasar, penguatan sistem perlindungan, partisipasi masyarakat, dan pemantauan yang lebih baik, semuanya bersatu untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

## B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan sentral dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kualitas sebuah keluarga tidak hanya mencerminkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan suatu daerah. Untuk mengukur dan memantau perkembangan kualitas keluarga secara komprehensif, pemerintah

menggunakan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) sebagai tolok ukur penting yang di sajikan dalam indikator i-Bangga.

Kabupaten Lebak, sebagai bagian integral dari Provinsi Banten, menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Data terbaru menunjukkan tren positif yang menggembirakan terkait IPKK di wilayah ini. Secara khusus, periode 2023-2024 mencatat adanya peningkatan signifikan pada nilai IPKK Kabupaten Lebak, mengindikasikan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Kenaikan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari upaya kolektif dan kebijakan strategis yang mulai membuahkan hasil.

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa cakupan keluarga yang mengikuti Program Bina Keluarga Balita dan Remaja meningkat sebesar 26% selama lima tahun terakhir.

Namun demikian, disparitas antar wilayah masih tinggi, khususnya di kecamatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dilihat dari aspek kesejahteraan dan pemerataan, masih banyak keluarga di Kabupaten Lebak yang tergolong rentan dan belum memiliki akses memadai terhadap sanitasi layak, layanan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan keluarga. Proporsi keluarga prasejahtera dan sejahtera I masih cukup tinggi, mencapai 42% dari total keluarga berdasarkan Data Keluarga 2023. Tingginya tingkat ketergantungan ekonomi serta rendahnya partisipasi ayah dalam pengasuhan menjadi isu krusial dalam dimensi kualitas keluarga. Ketimpangan antar desa-kota juga memperlebar jurang ketahanan keluarga secara keseluruhan.

Analisis diagnostik menunjukkan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Lebak masih menghadapi persoalan struktural berupa rendahnya literasi keluarga, kesenjangan ekonomi antar wilayah, serta minimnya integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga. Strategi ke depan harus menekankan pada revitalisasi fungsi keluarga sebagai unit terkecil pembangunan, penguatan peran penyuluh keluarga, serta penyusunan kebijakan berbasis data

keluarga. Peningkatan IPKK akan mendukung penguatan ketahanan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan lintas generasi.

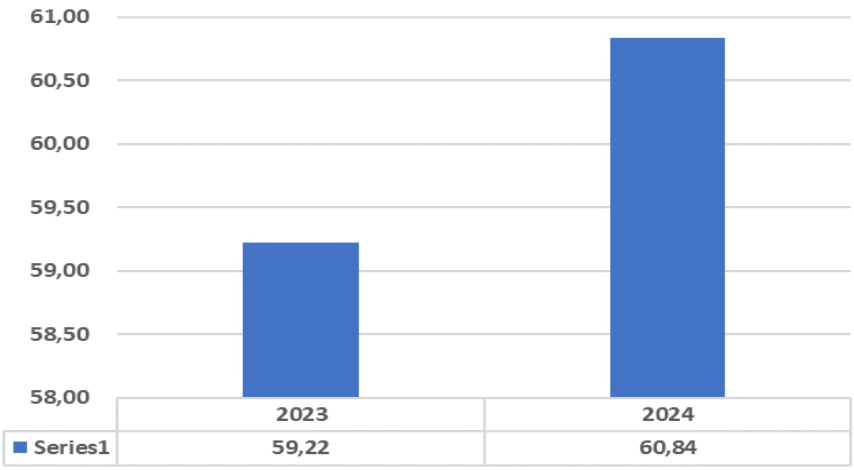


**Grafik 2. 53 Perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Lebak Tahun 2023-2024**

*Sumber : BKKBN Provinsi Banten, 2024*

Kenaikan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Lebak dari sekitar 59,2 pada tahun 2023 menjadi sekitar 60,8 pada tahun 2024 didorong oleh berbagai faktor keberhasilan yang saling terkait.

## C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Lebak menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024, dengan nilai IKG sebesar 0,49 pada tahun 2020 menjadi 0,43 pada tahun 2024. Nilai ini mencerminkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar kerja semakin berkurang. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi serta perluasan lapangan kerja berbasis keterampilan memberikan kontribusi terhadap capaian ini.

Namun demikian, dari sisi keadilan dan pemerataan, representasi perempuan dalam posisi strategis di sektor publik masih rendah. Pada tahun 2024, hanya sekitar 12% jabatan eselon di lingkungan Pemkab Lebak diisi oleh perempuan. Selain itu, akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil masih terbatas, dan kasus kekerasan berbasis gender masih cukup tinggi, yang mencerminkan rendahnya jaminan perlindungan dan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan di beberapa wilayah. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi afirmatif, peningkatan akses pelatihan vokasional berbasis gender, serta kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) yang lebih operasional. Penurunan IKG akan lebih optimal jika dibarengi dengan program pemberdayaan perempuan secara menyeluruh, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kualitas data terpilah gender. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan berbasis gender juga menjadi kunci untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan daerah. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lebak Tahun 2020–2024 tersaji dalam grafik dibawah ini :

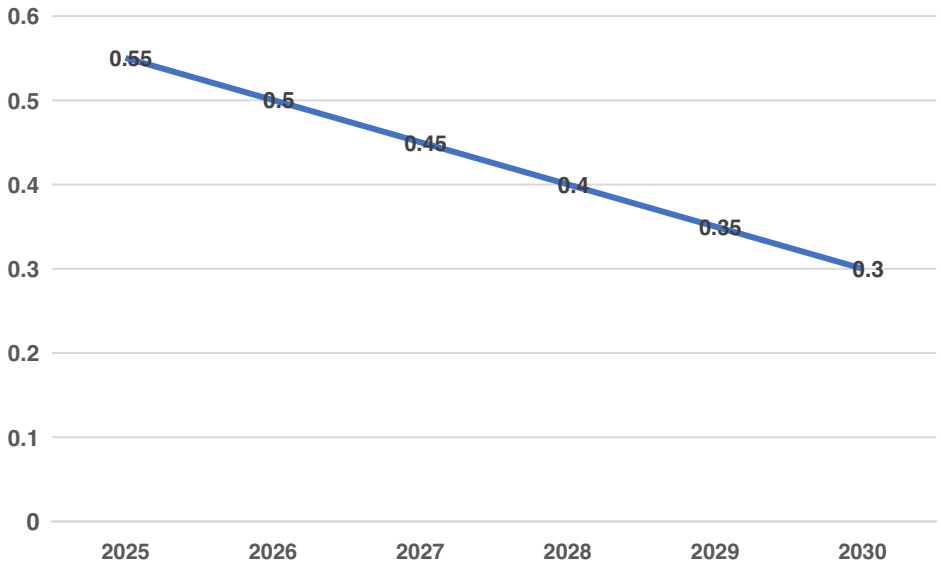


**Grafik 2. 54 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lebak Tahun 2020–2024**

*Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Lebak, 2024*

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lebak menunjukkan tren penurunan dari 47,60 pada tahun 2020 menjadi 38,55 pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan penurunan kesenjangan gender, khususnya dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (politik dan pendidikan), serta partisipasi pasar tenaga kerja.

Pada tahun 2020, ketimpangan gender masih tinggi akibat dominasi laki-laki dalam peran ekonomi dan politik serta terbatasnya akses perempuan terhadap layanan dasar. Seiring berjalannya waktu, sejumlah kebijakan afirmatif gender dan program pengarusutamaan gender mulai diterapkan, termasuk peningkatan keterwakilan perempuan dalam musrenbang, fasilitasi UMKM perempuan, dan layanan kesehatan ibu-anak. Dampak nyata terlihat pada tahun 2022–2024 dengan penurunan signifikan IKG, mencerminkan keberhasilan intervensi di berbagai sektor.

Penurunan IKG ini juga didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender, serta pelibatan aktif organisasi perempuan dan kader PKK

dalam pembangunan desa. Namun demikian, tantangan masih tersisa, terutama dalam mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik dan pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan komitmen lintas sektor dalam implementasi Perda Pengarusutamaan Gender dan integrasi responsif gender dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.

## D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lebak menunjukkan peningkatan dari 87,12 pada tahun 2020 menjadi 91,35 pada tahun 2024. IPG merefleksikan sejauh mana perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kenaikan ini tidak terlepas dari meningkatnya angka harapan hidup perempuan dari 70,1 tahun menjadi 71,4 tahun, serta peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan dari 6,9 tahun menjadi 7,5 tahun.

Namun dari aspek daya saing dan pemerataan, perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses lapangan kerja yang layak dan program pelatihan teknologi. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan masih cukup mencolok. Perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dengan perlindungan sosial yang minim. Perempuan di wilayah perdesaan juga menghadapi akses terbatas terhadap program kewirausahaan dan pembiayaan mikro.

Strategi peningkatan IPG mencakup reformasi kelembagaan, edukasi kesetaraan gender sejak dini, dan sinergi dengan organisasi perempuan serta sektor swasta untuk mendukung kesetaraan pembangunan. Peningkatan IPG akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan gender.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lebak Tahun 2020–2024.

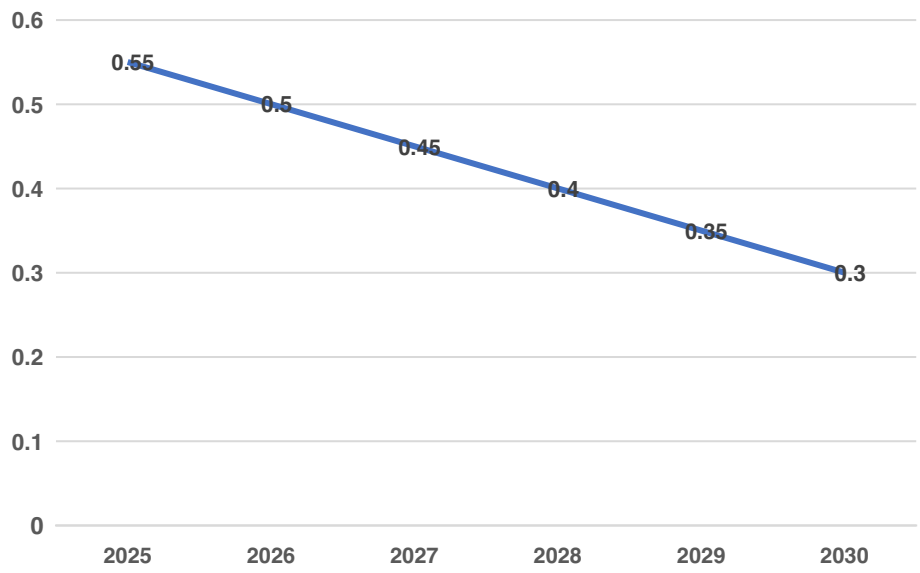


**Grafik 2. 55 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Lebak, 2024*

Fluktuasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Lebak antara tahun 2020 dan 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Kenaikan IKG pada tahun 2021 berkaitan dengan dampak awal pandemi COVID-19, yang secara global diketahui memperburuk ketidaksetaraan gender. Pandemi dapat menyebabkan peningkatan beban kerja domestik bagi perempuan, hilangnya pekerjaan di sektor-sektor yang didominasi perempuan, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi.

Penurunan IKG yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai tren IKG provinsi, penurunan ini kemungkinan besar didorong oleh perbaikan pada dua dimensi utama: kesehatan reproduksi dan pasar tenaga kerja. Perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi bisa mencakup penurunan angka kematian ibu melahirkan atau penurunan angka kelahiran remaja. Sementara itu, perbaikan dalam dimensi pasar tenaga kerja dapat berarti peningkatan partisipasi

angkatan kerja perempuan, berkurangnya kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, atau peningkatan proporsi perempuan dalam posisi manajerial atau pekerjaan formal. Selain itu, faktor pemberdayaan seperti peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen lokal dan peningkatan capaian pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan dibandingkan laki-laki juga dapat berkontribusi terhadap penurunan IKG, meskipun data spesifik untuk Kabupaten Lebak perlu ditelusuri lebih lanjut untuk konfirmasi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lebak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dari 85,32 menjadi 90,87. IPG mengukur kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pendidikan, dan penguasaan sumber daya ekonomi. Peningkatan IPG ini menandakan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin menyempit.

Tren penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Lebak dari tahun 2022 hingga 2024 merupakan indikasi yang sangat positif. Penurunan nilai IKG secara langsung menunjukkan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil pula potensi kerugian pembangunan manusia akibat ketidaksetaraan gender.

Oleh karena itu, tren penurunan ini menandakan adanya kemajuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Lebak. Perbaikan ini berpotensi membawa dampak positif yang lebih luas, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

## E. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP Indonesia ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia. Selain itu website ini diharapakan dapat pula menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Lebak menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2024, IPP Kabupaten Lebak tercatat mengalami peningkatan yang signifikan, dengan fokus utama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Meskipun data spesifik untuk tahun 2025 belum sepenuhnya tersedia, tren peningkatan ini memberikan harapan bahwa kondisi pemuda di Kabupaten Lebak akan semakin baik. Program-program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pemuda, seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan akses pendidikan, telah berkontribusi pada kemajuan ini. Selain itu, partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan politik juga semakin meningkat, mencerminkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam pembangunan daerah. Dengan potensi jumlah pemuda yang besar, yaitu sekitar 3,3 juta jiwa di Provinsi Banten, diharapkan Kabupaten Lebak dapat terus berupaya meningkatkan IPP untuk menciptakan generasi muda yang lebih produktif dan berdaya saing di masa depan.

### 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam pembangunan jangka menengah daerah, mengingat SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan produktivitas, serta adaptasi terhadap dinamika transformasi global, digitalisasi, dan revolusi industri. Untuk mengukur capaian pembangunan manusia secara komprehensif, Pemerintah Kabupaten Lebak menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utama

Indeks Pembangunan Manusia mengukur tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Nilai IPM menjadi representasi dari hasil pembangunan lintas sektor, dan sekaligus mencerminkan keberhasilan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara berkelanjutan.

1. Capaian dan Tren IPM Kabupaten Lebak Tahun 2020–2024

   Selama periode tahun 2020–2024, IPM Kabupaten Lebak mengalami tren peningkatan yang konsisten. Nilai IPM pada tahun 2020 tercatat sebesar 64,06, kemudian meningkat menjadi 64,72 pada tahun 2021, 65,45 pada tahun 2022, 66,17 pada tahun 2023, dan mencapai 66,81 pada tahun 2024. Peningkatan IPM tersebut mencerminkan adanya kemajuan pembangunan pada seluruh dimensi dasar IPM, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Banten dan nasional.

2. Komponen IPM

   a. Umur Panjang dan Hidup Sehat (Usia Harapan Hidup Saat Lahir)

      Usia Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bayi yang baru lahir, dan diukur

berdasarkan rata-rata tahun hidup yang diharapkan. Di Kabupaten Lebak, usia harapan hidup meningkat dari 67,50 tahun pada tahun 2020 menjadi 68,05 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar, upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan gizi masyarakat, serta pemenuhan sanitasi dan air bersih. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan terutama di wilayah perdesaan dan terpencil, serta tingginya beban penyakit tidak menular yang cenderung meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem kesehatan masyarakat yang berbasis pencegahan, peningkatan kualitas tenaga medis, dan perluasan cakupan layanan kesehatan secara merata dan inklusif.

b. Pengetahuan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)

Dimensi pengetahuan diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lebak meningkat dari 6,99 tahun pada tahun 2020 menjadi 7,45 tahun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia dewasa belum menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama, yang menjadi tantangan serius dalam pembangunan kapasitas tenaga kerja yang kompetitif. Harapan Lama Sekolah juga menunjukkan peningkatan dari 12,37 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,62 tahun pada tahun 2024, yang berarti bahwa seorang anak usia 7 tahun di Kabupaten Lebak memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas. Peningkatan dimensi pendidikan ini sejalan dengan berbagai kebijakan daerah dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga pendidikan, serta intervensi afirmatif seperti pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa kualitas pendidikan,

tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, serta penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas masih memerlukan penguatan secara simultan.

c. Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan)

Dimensi terakhir IPM mengukur kemampuan ekonomi masyarakat melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Lebak tercatat sebesar Rp8,69 juta per tahun, dan meningkat menjadi Rp9,86 juta per tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan daya beli masyarakat yang didukung oleh aktivitas ekonomi lokal, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Namun demikian, ketimpangan pendapatan, tingginya proporsi pekerja sektor informal, serta kerentanan ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah masih menjadi isu utama yang menghambat pencapaian standar hidup yang merata dan berkeadilan. Oleh sebab itu, ke depan perlu diperkuat program pemberdayaan ekonomi lokal, perluasan akses permodalan UMKM, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga.

Secara umum, capaian IPM Kabupaten Lebak menunjukkan kemajuan yang positif, namun masih menghadapi tantangan besar dalam akselerasi peningkatan kualitas SDM. Ketimpangan antarwilayah, keterbatasan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta belum optimalnya program peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor utama yang memerlukan intervensi lintas sektor. Oleh karena itu, pada periode perencanaan 2025–2030, Pemerintah Kabupaten Lebak akan mengarahkan strategi pembangunan sumber daya manusia pada penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan berbasis keterampilan dan vokasi, penguatan kesehatan masyarakat usia produktif, serta pengembangan ekonomi keluarga berbasis potensi lokal. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai IPM secara

lebih signifikan dan menjadikan SDM Kabupaten Lebak sebagai pilar utama daya saing daerah menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

### 2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

#### A. Indeks Inovasi Daerah

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penguatan tata kelola inovasi daerah tercermin dari pencapaian Indeks Inovasi Daerah (IID) yang terus menunjukkan tren positif secara kuantitatif. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lebak mengalami peningkatan signifikan dari 36 inovasi pada tahun 2020 menjadi 65 inovasi pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya dorongan kelembagaan dan kesadaran lintas perangkat daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

**Tabel 2. 21 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | Jumlah Inovasi | Indeks | Kategori |
|---|---|---|---|
| 2020 | 36 | 1390 | Sangat Inovatif |
| 2021 | 42 | 46,47 | Inovatif |
| 2022 | 45 | 53,88 | Inovatif |
| 2023 | 50 | 45,22 | Inovatif |
| 2024 | 65 | 45,50 | Inovatif |

*Sumber: Bapperida Kabupaten Lebak, 2025*

Meski jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, nilai indeks sempat mengalami fluktuasi. Tahun 2020 menunjukkan capaian luar biasa dengan skor indeks 1390 dan kategori Sangat Inovatif. Namun, mulai tahun 2021 terjadi perubahan metodologi penilaian indeks inovasi daerah secara nasional, yang mengakibatkan

normalisasi skor dan penyesuaian kategori. Meskipun demikian, Kabupaten Lebak tetap konsisten berada dalam kategori Inovatif dari tahun 2021 hingga 2024.

Fluktuasi nilai indeks dari 46,47 (2021) naik menjadi 53,88 (2022), lalu turun menjadi 45,22 (2023), dan sedikit meningkat menjadi 45,50 (2024), mengindikasikan bahwa meskipun jumlah inovasi meningkat, efektivitas, kualitas dokumentasi, dan keterhubungan antar-inovasi terhadap permasalahan daerah masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan strategi peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem dokumentasi inovasi, serta penguatan ekosistem inovasi berbasis kolaborasi multipihak.

Dengan mempertahankan semangat berinovasi dan meningkatkan kualitas serta dampak nyata inovasi, diharapkan Kabupaten Lebak mampu kembali meraih predikat Sangat Inovatif pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan zaman.

## B. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

PDRB Kabupaten Lebak diuraikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Penyusunan PDRB ADHB Kabupaten Lebak dilakukan berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Di sisi lain, Penyusunan PDRB ADHK Kabupaten Lebak dilakukan berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah, dalam hal ini Kabupaten Lebak.

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Lebak terdapat Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Katagori A) yang memiliki konstribusi terbesar dalam pembentukan nilai PDRB. Share untuk lapangan usaha ini adalah sebesar 27,69% terhadap total PDRB atas dasar Harga Berlaku kabupaten lebak. **Empat sektor terbesar tahun 2024 adalah :**

1. **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** - Rp 10.419,33 miliar (27,7% dari total PDRB)
2. **Perdagangan Besar dan Eceran** - Rp 4.547,87 miliar (12,1%)
3. **Konstruksi** - Rp 3.678,80 miliar (9,8%)
4. **Industri Pengolahan** - Rp 3.589,35 miliar (9,5%)

Untuk sektor yang mengalami tren pertumbuhan positif adalah sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi, dari Rp 7.902 miliar menjadi Rp 10.419 miliar (naik 31,8%), sektor transportasi dan pergudangan tumbuh pesat (naik 46,5%), Jasa kesehatan berkembang signifikan (naik 43,2%) serta sektor informasi dan komunikasi tumbuh 33,6%. Sedangkan ada pula sektor yang mengalami penurunan seperti sector **p**ertambangan dan penggalian mengalami penurunan drastis dari Rp 1.735 miliar menjadi Rp 1.251 miliar (turun 27,9%). Namun dari total PDRB tumbuh dari Rp 29.055 miliar (2020) menjadi Rp 37.631 miliar (2024) dan pertumbuhan kumulatif

sebesar 29,5% atau rata-rata 6,7% per tahun. Lebih jelasnya dapat tersaji pada tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 22 Tabel PDRB atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lebak (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024**

| No. | Lapangan Usaha/*Industry* | 2020 | 2021 | 22 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7902,23 | 8293,96 | 9194,34 | 9732,85 | 10419,3 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1734,94 | 1989,82 | 1992,57 | 1598,52 | 1250,72 |
| 3 | Industri Pengolahan | 2568,15 | 2722,19 | 3034,3 | 3317,46 | 3589,35 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 31,46 | 33,85 | 39,59 | 42,19 | 42,18 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 15,85 | 16,01 | 16,11 | 17,15 | 18,46 |
| 6 | Konstruksi | 2384,95 | 2828,67 | 3242,27 | 3446,08 | 3678,8 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3582,06 | 3719,56 | 4013,63 | 4329,39 | 4547,87 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1754,96 | 1903,16 | 2139,2 | 2438,65 | 2571,36 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1360,19 | 1420,52 | 1538,25 | 1706,02 | 1880,23 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 165,58 | 176,75 | 188,72 | 204,51 | 221,29 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 513,25 | 551,64 | 603 | 617,68 | 623,42 |
| 12 | Real Estate | 2009,02 | 2080,08 | 2198,94 | 2363,18 | 2456,19 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 89,99 | 90,85 | 94,69 | 105,38 | 110,4 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1729,48 | 1759,05 | 1831,68 | 1954,42 | 2278,49 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2068,53 | 2047,76 | 2078,98 | 2255,29 | 2380,41 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 390,14 | 424,82 | 445,14 | 493,09 | 558,76 |
| 17 | Jasa lainnya | 754,24 | 771,53 | 822,59 | 948,5 | 1004,2 |
| | **PDRB Total** | **29055** | **30830,2** | **33474** | **35570,4** | **37631,5** |

*Sumber : Lebak Dalam Angka Tahun 2025*

**Tabel 2. 23 Tabel Distribusi Persentase PDRB atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lebak (Persen) Tahun 2020-2024**

| No. | Lapangan Usaha/*Industry* | 2020 | 2021 | 22 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 27,2 | 26,9 | 27,47 | 27,36 | 27,69 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 5,97 | 6,45 | 5,95 | 4,49 | 3,32 |
| 3 | Industri Pengolahan | 8,84 | 8,83 | 9,06 | 9,33 | 9,54 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Konstruksi | 8,21 | 9,17 | 9,69 | 9,69 | 9,78 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12,33 | 12,06 | 11,99 | 12,17 | 12,09 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 6,04 | 6,17 | 6,39 | 6,86 | 6,83 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,68 | 4,61 | 4,6 | 4,8 | 5 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,59 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,77 | 1,79 | 1,8 | 1,74 | 1,66 |
| 12 | Real Estate | 6,91 | 6,75 | 6,57 | 6,64 | 6,53 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,3 | 0,29 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,95 | 5,71 | 5,47 | 5,49 | 6,05 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 7,12 | 6,64 | 6,21 | 6,34 | 6,33 |

| No. | Lapangan Usaha/*Industry* | 2020 | 2021 | 22 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,34 | 1,38 | 1,33 | 1,39 | 1,48 |
| 17 | Jasa lainnya | 2,6 | 2,5 | 2,46 | 2,67 | 2,67 |
| | **PDRB Total** | **29055** | **30830,2** | **33474** | **35570,4** | **37631,5** |

*Sumber : Lebak Dalam Angka Tahun 2025*

Dari perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha, ekonomi daerah Kabupaten Lebak menunjukkan **performa yang sangat baik** dengan pertumbuhan yang konsisten selama 4 tahun. Dengan struktur ekonomi didominasi oleh **sektor primer** (pertanian) yang menunjukkan karakteristik daerah agraris. Diversifikasi ekonomi terlihat baik dengan kontribusi sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan yang signifikan.

Untuk penurunan sektor pertambangan kemungkinan disebabkan oleh depresi sumber daya alam atau perubahan kebijakan, namun hal ini berhasil dikompensasi oleh pertumbuhan sektor lain, terutama pertanian dan jasa. Ini menunjukkan resiliensi ekonomi yang baik dan transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

## C. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Kabupaten Lebak yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah hasil sumber daya lokal. Pada periode Tahun 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Lebak telah mendorong penguatan sektor ini melalui berbagai program, fasilitasi, serta kemitraan lintas sektor.

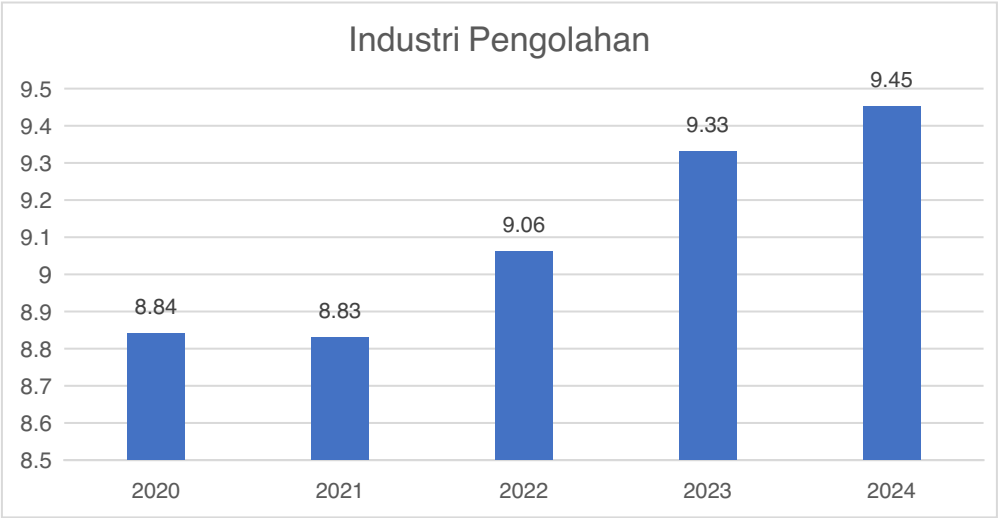


**Grafik 2. 56 Industri Pengolahan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : BPS Kabupaten Lebak (lebak dalam angka 2025)*

Berdasarkan grafik diatas dalam kurun waktu tahun 2020 dan 2021 pada sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 8,84% menjadi 8,83 atau sekitar 0,11% dihadapkan pada tantangan besar akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan perlambatan aktivitas produksi dan distribusi. Meski demikian, pemulihan ekonomi pasca-pandemi menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah unit usaha kecil dan menengah (IKM), terutama di subsektor makanan dan minuman, kerajinan, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Tetapi secara keseluruhan rata-rata laju pertumbuhan industri pengolahan selama periode 2020–2024 diperkirakan mencapai **1–2% per tahun**, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor makanan dan minuman lokal. Pertumbuhan ini didukung oleh semakin berkembangnya sentra industri kecil di beberapa kecamatan serta meningkatnya daya saing produk lokal di pasar regional dan nasional.

## D. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor Akomodasi, Makan dan Minum merupakan bagian dari sektor jasa yang mencakup kegiatan ekonomi yang menyediakan layanan penginapan, penyediaan

makanan, dan minuman kepada masyarakat umum, baik untuk keperluan pribadi, wisata, maupun bisnis. sektor ini termasuk dalam kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Sektor ini menjadi penting karena berkontribusi terhadap pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

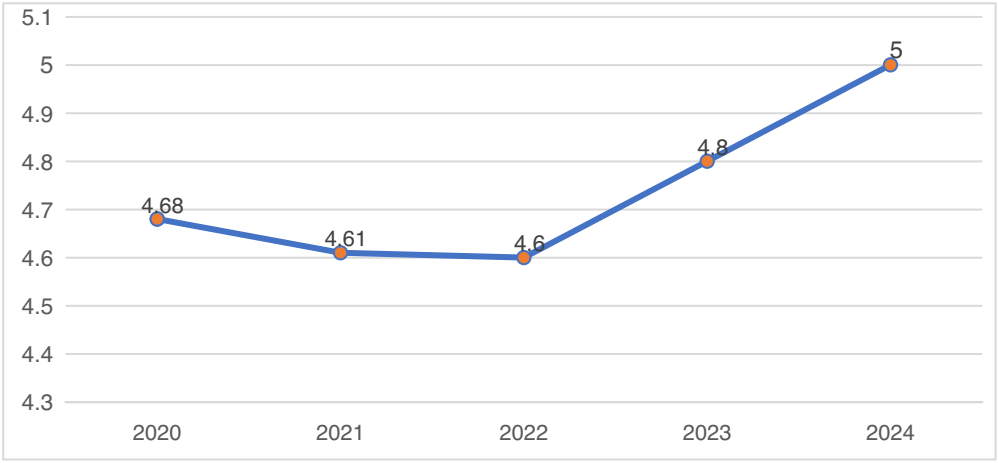


**Grafik 2. 57 Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Lebak Tahun 2020 - 2024**

*Sumber ; BPS Kabupaten Lebak (lebak dalam angka) Tahun 2025*

Melihat grafik Akomodasi serta Makan dan Minum di Kabupaten Lebak mengalami dinamika pertumbuhan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi tajam pada sektor ini, seiring menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan pembatasan aktivitas usaha. Namun, adaptasi pelaku usaha melalui layanan daring, pemanfaatan media sosial, dan penerapan protokol kesehatan menjadi titik awal pemulihan.

Mulai tahun 2022, aktivitas pariwisata dan ekonomi lokal mulai bergerak seiring pelonggaran pembatasan dan dorongan pemerintah daerah terhadap promosi destinasi wisata unggulan seperti Sawarna, Baduy, dan Citorek. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah usaha restoran, rumah makan, kafe, dan homestay. Pada tahun 2022 hingga 2024, terjadi peningkatan jumlah usaha dan tenaga

kerja di sektor ini. Peningkatan minat wisata domestik dan berkembangnya ekonomi kreatif turut mendukung pertumbuhan sektor Akomodasi, Makan dan Minum. Sektor ini juga menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi daerah, meningkatkan kontribusi terhadap PDRB serta membuka peluang kerja baru, terutama bagi pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda.

## E. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan ukuran statistik yang menggambarkan tingkat aktivitas kewirausahaan dalam suatu wilayah, negara, atau populasi tertentu. Rasio ini mengukur proporsi individu yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dibandingkan dengan total populasi atau angkatan kerja. Secara umum rasio kewirausahaan didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah wirausahawan (pengusaha) dengan total populasi usia produktif atau angkatan kerja, yang biasanya dinyatakan dalam persentase.

Dalam mengukur rasio kewirausahaan, terdapat beberapa kategori yang terdiri dari:

**Wirausahaan Tahap Awal (*Early-stage Entrepreneurship*)**: Mencakup individu yang sedang dalam proses memulai usaha atau baru menjalankan usaha kurang dari 3,5 tahun. Kategori ini terbagi menjadi wirausahaan nascent (yang sedang mempersiapkan usaha) dan wirausahaan baru (yang telah menjalankan usaha 0-42 bulan).

**Wirausahaan Mapan (*Established Entrepreneurship*)**: Wirausahawan yang telah menjalankan usaha lebih dari 3,5 tahun dan berhasil mempertahankan operasional bisnisnya.

**Wirausahaan Berdasarkan Kebutuhan vs Peluang**: Pembagian berdasarkan motivasi, yaitu wirausahawan yang memulai usaha karena tidak ada pilihan pekerjaan lain (necessity-driven) versus yang melihat peluang bisnis (*opportunity-driven*).

Kabupaten Lebak Pencapaian rasio kewirausahaan di tahun 2021 menunjukkan angka yang tidak normal dan kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam pengukuran, pelaporan, atau perubahan metodologi perhitungan. Angka 4,18% terlalu tinggi dibandingkan pola tahun-tahun berikutnya. Setelah tahun 2021 rasio kewirausahaan menunjukkan pola yang lebih realistis dan stabil di kisaran 0,04-0,05%. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem pengukuran dan penetapan target yang lebih realistis. Setelah tahun 2021, rasio kewirausahaan menunjukkan pola yang lebih realistis dan stabil di kisaran 0,04-0,05%. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem pengukuran dan penetapan target yang lebih realistis. Meskipun dalam angka yang kecil, terlihat ada tren peningkatan bertahap dari 2022 ke 2024, baik dalam target maupun realisasi. Hal ini terlihat pada grafik berikut

**Grafik 2. 58 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

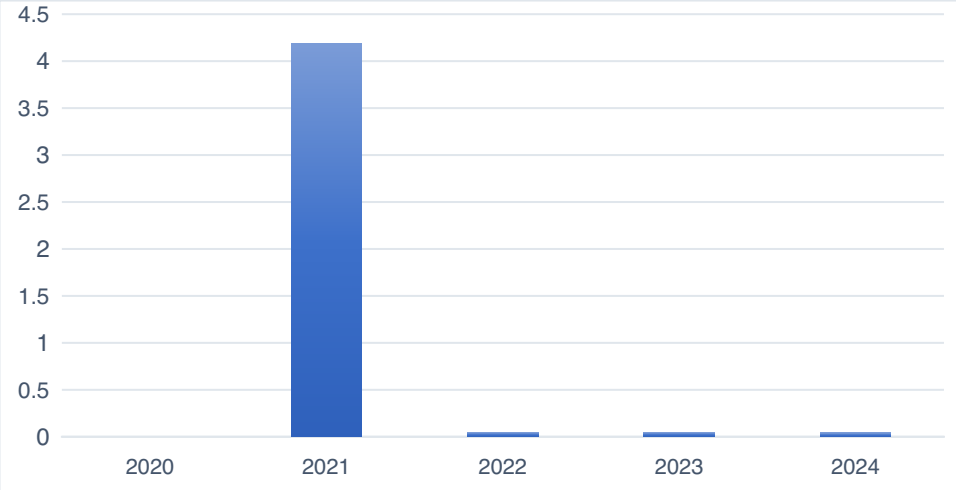


*Sumber: Dinkop dan UKM Kabupaten Lebak, 2024.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah periode penyesuaian dan kemungkinan perbaikan metodologi, program pengembangan kewirausahaan telah memasuki fase yang lebih terukur dan realistis. Namun, angka rasio kewirausahaan yang masih sangat rendah (di bawah 0,1%) mengindikasikan bahwa masih diperlukan

upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan.

Rekomendasi untuk ke depan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan rasio kewirausahaan dan merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tingkat kewirausahaan yang lebih signifikan.

## F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Lebak menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode 2020 hingga 2024. TPAK menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, seperti pada grafik berikut.

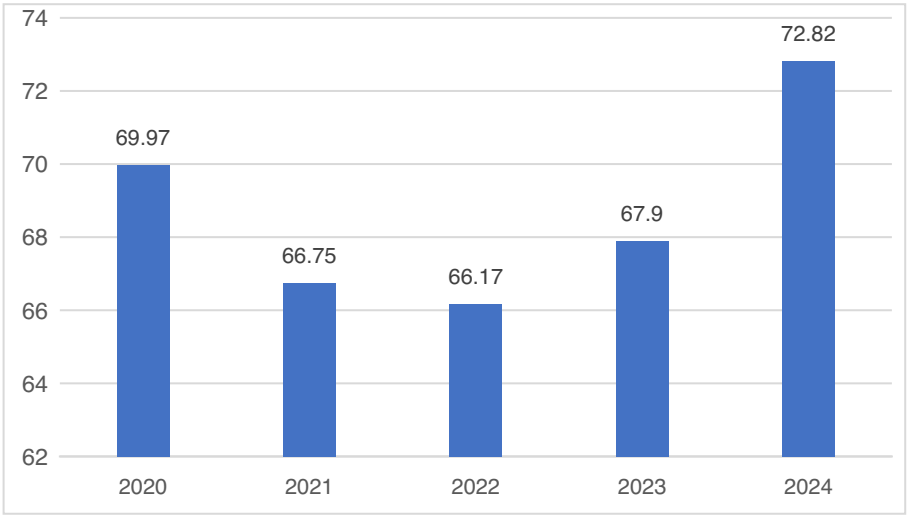


**Grafik 2. 59 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lebak Tahun 2020 - 2024**

*Sumber : BPS Kabupaten Lebak (lebak dalam angka) Tahun 2025*

Pada grafik tersebut, pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap dinamika ketenagakerjaan. Pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan menurunnya

partisipasi sebagian penduduk dalam pasar kerja, meskipun TPAK Kabupaten Lebak saat itu tercatat cukup tinggi sebesar 69,97% dengan dampak pandemi tersebut turun drastis menjadi 66,17%.

Memasuki tahun 2023 hingga 2024, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan regional, TPAK di Kabupaten Lebak mengalami kenaikan bertahap, masing-masing menjadi 67,9% dan 72,29%. Hal ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas usaha dan peningkatan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peluang kerja.

Tahun 2023 dan 2024 ditandai dengan peningkatan jumlah angkatan kerja secara absolut, yang pada 2024 mencapai lebih dari 787.079 orang. Namun demikian, tantangan ketenagakerjaan tetap ada, antara lain dalam bentuk ketimpangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan serta masih adanya tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

Penurunan terjadi pada jumlah penduduk bukan angkatan kerja akan berpengaruh pada peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021 sebesar 66,75% dibanding dari tahun sebelumnya Tahun 2020 sebesar 69,97%, sedangkan untuk Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada Tahun 2020 sebesar 90,37% mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi 92,13%. Pada Tahun 2023. TPAK dan TKK juga bersamaan mengalami kenaikan pada Tahun 2024 TPAK sebesar 72.82% dan TKK sebesar 93,77%, bahwa ini menunjukkan TPAK dan TKK kita cukup besar untuk penyerapan tenaga kerja sebagaimana kita lihat pada grafik di bawah ini:

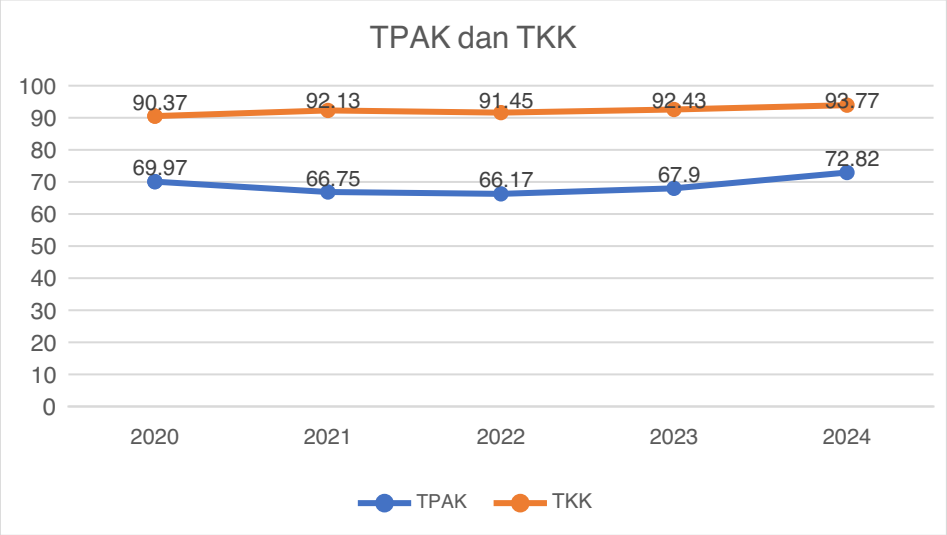


**Grafik 2. 60 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : BPS Kabupaten Lebak (Lebak Dalam Angka Tahun 2025)*

Melihat data di atas dapat kita simpulkan bahwa antara TPAK dan TKK, hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Lebak diambil oleh tenaga kerja dari luar Kabupaten Lebak, sehingga perlu dilakukan kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan sektor dalam bidang ketenagakerjaan.

## G. Iklim Investasi

Pemerintah daerah memberikan kemudahan proses perizinan bagi pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kabupaten Lebak. Kehadiran investor penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kemudahan proses perizinan diberikan dengan aplikasi secara elektronik menggunakan Online Single Submission (OSS) , merupakan satu peluang besar bagi Pemerintah Daerah untuk mendongkrak angka Investasi, dengan aplikasi ini para pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh nomor induk berusaha (NIB).

Pencapaian realisasi nilai investasi Kabupaten Lebak dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 menembus Rp. 1.869.000.000.000,- berasal dari jumlah proyek sebanyak 1.585 proyek dan perusahaan sebanyak 196 perusahaan.

Sepanjang tahun 2020 - 2024 realisasi nilai investasi Kabupaten Lebak mengalami berbagai fluktuasi , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut.

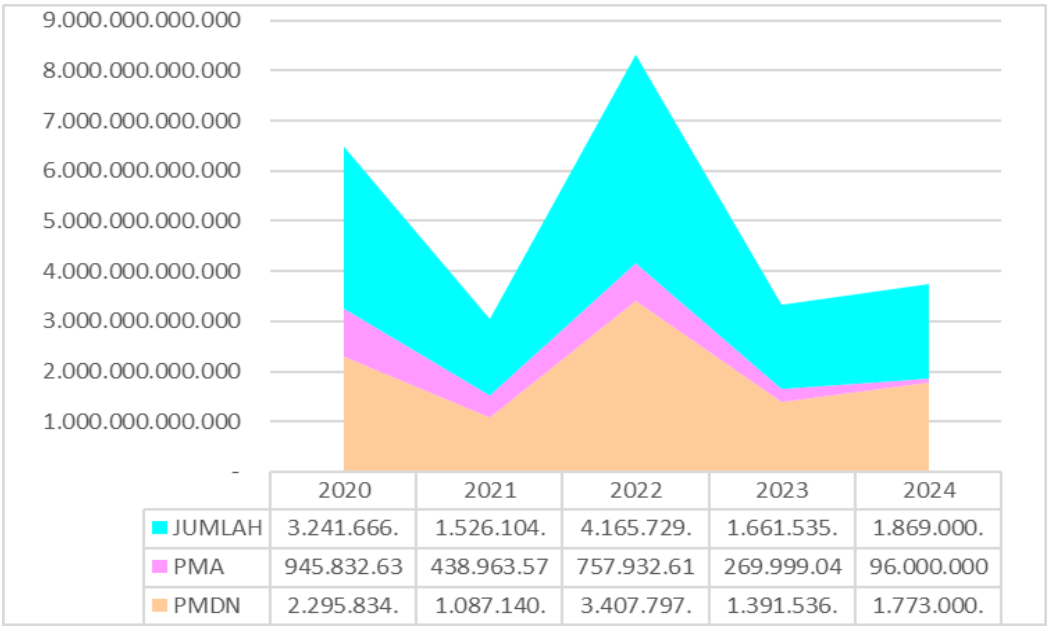


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | 3.241.666. | 1.526.104. | 4.165.729. | 1.661.535. | 1.869.000. |
| PMA | 945.832.63 | 438.963.57 | 757.932.61 | 269.999.04 | 96.000.000 |
| PMDN | 2.295.834. | 1.087.140. | 3.407.797. | 1.391.536. | 1.773.000. |

**Grafik 2. 61 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber: DPMPTSP Kabupaten Lebak, 2024.*

Untuk tahun 2024 Realisasi Investasi terbesar terdapat pada sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebanyak Rp.998.000.000.000,- dan realisasi investasi untuk PMA terdapat pada Negara Korea Selatan sebanyak Rp. 55.000.000.000,-. Lebih jelasnya dapat terlihat pada grafik-grafik berikut.

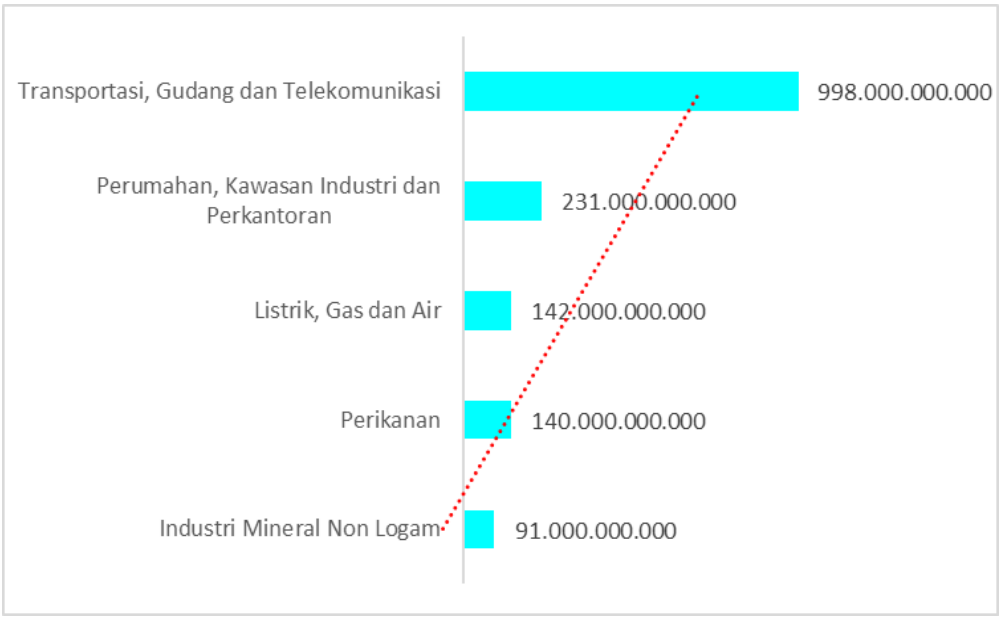


**Grafik 2. 62 Sektor Realisasi Investasi Tertinggi di Kabupaten Lebak Tahun 2024**

*Sumber: DPMPTSP Kabupaten Lebak, 2024.*

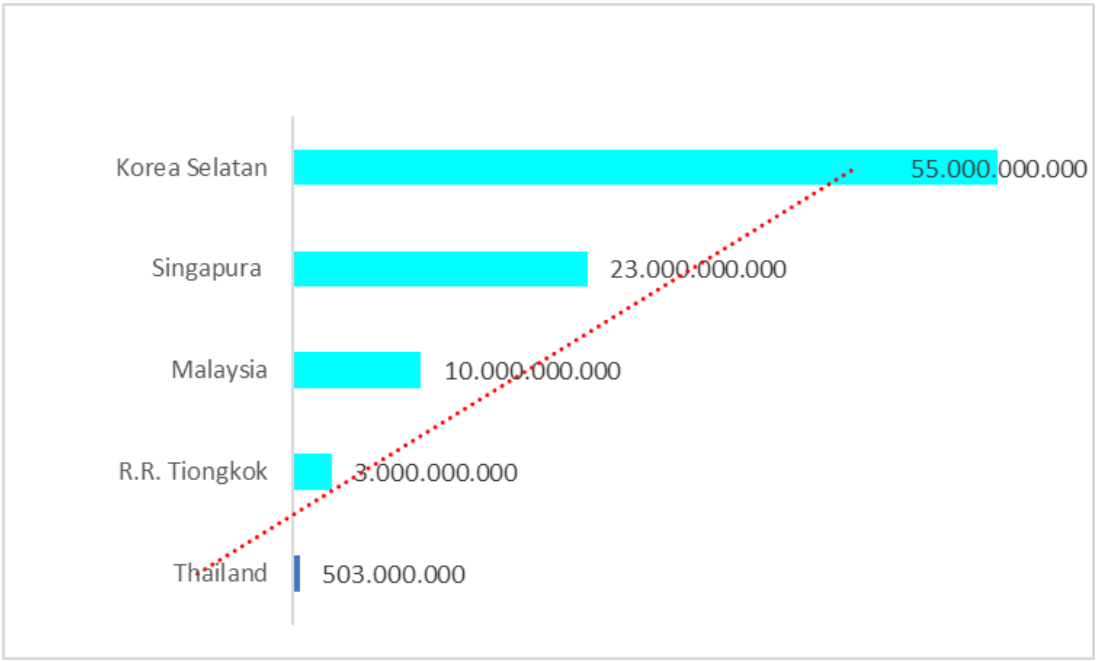


**Grafik 2. 63 Negara Realisasi Investasi PMA di Kabupaten Lebak Tahun 2024**

*Sumber: DPMPTSP Kabupaten Lebak, 2024.*

Dari pencapaian investasi di atas menunjukkan hal-hal berikut :

- PMA mengalami fluktuasi lebih ekstrem dibanding PMDN
- PMDN cenderung lebih stabil dan resilient
- Total investasi sangat dipengaruhi volatilitas PMA
- Tingginya investasi di sektor transportasi & telekomunikasi sejalan dengan tren digitalisasi dan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan
- Volatilitas investasi mempengaruhi pengembangan sektor-sektor strategis
- Stabilitas PMDN mendukung sektor domestik seperti perumahan dan infrastruktur
- Korea Selatan sebagai mitra dagang terbesar kemungkinan juga kontributor PMA yang signifikan
- Pola perdagangan regional mendukung stabilitas investasi jangka panjang

#### 2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

#### A. Ekonomi Hijau

Rencana pembangunan sektor ekonomi hijau di Indonesia merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pemerintah menargetkan transformasi ekonomi menuju sistem yang berkelanjutan dengan menekankan pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan pelestarian sumber daya alam. Rencana ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan nasional, mendukung Visi Indonesia Emas 2045, serta memenuhi target Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi Nasional dari 14% pada 2023 menjadi 23% pada 2025, serta mendorong transformasi industri hijau dan penerapan ekonomi sirkular. Ini akan mendukung daya

saing ekonomi Nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan sosial. Dengan demikian, visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya fokus pada peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan.

Peran Kabupaten Lebak dalam penerapan ekonomi hijau sangat penting dan strategis karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan daerah secara bertahap dan berkelanjutan. Berikut arah kebijakan pembangunan dalam mendukung ekonomi hijau:

a. Rencana pengelolaan sampah berkelanjutan yang secara langsung mendukung target nasional pengurangan emisi karbon dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan;
b. Rencana pengembangan Agrowisata Cikapek diharapkan secara signifikan mendukung ekonomi hijau dengan mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
c. Pengembangan *Geopark* Nasional Bayah *Dome* yang menggabungkan konsep pendidikan, pariwisata, dan kawasan perkebunan yang ramah lingkungan, sehingga menjadi sarana edukasi sekaligus rekreasi yang mendukung prinsip *back to nature* dan ekonomi hijau;
d. Rencana pengembangan kawasan tanaman pangan yang dilakukan dengan pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang mengintegrasikan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan benih unggul, pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, serta mekanisasi pertanian melalui alsintan (alat dan mesin pertanian) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi; dan
e. Rencana pengembangan kawasan industri hijau Cileles yang merupakan salah satu langkah strategis dalam pengembangan Kawasan Industri Hijau Berkelanjutan dengan menggabungkan ekosistem energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya berskala besar, dengan aktivitas industri berteknologi rendah karbon.

Kawasan industri hijau juga mengintegrasikan pemberdayaan komunitas lokal melalui pelatihan pengelolaan limbah, produksi organik, dan partisipasi dalam rantai pasok berkelanjutan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

## B. Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan prinsip keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Di Indonesia, ekonomi biru mencakup sektor-sektor strategis seperti perikanan, akuakultur, pelayaran, energi terbarukan kelautan, pariwisata pesisir, dan bioteknologi kelautan. Konsep ini bertujuan menjadikan sumber daya laut sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi biru diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 15% dan lapangan kerja hingga 12% pada 2045, sekaligus mendukung Indonesia maju yang berkelanjutan dan inklusif sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas utama dalam ekonomi biru Nasional Indonesia, adapun arah kebijakan dalam mendukung program ekonomi biru di Kabupaten Lebak antara lain:

a. Modernisasi peralatan perikanan tangkap melalui bantuan peralatan pada masyarakat nelayan secara inklusif dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan nelayan;
b. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan secara inklusif dengan memperkuat peran nelayan tradisional, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan; dan
c. Peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

**Tabel 2. 24 Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Lebak**

| No. | Nama TPI | Luas ($m^2$) | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | TPI Bayah | 442 | Bayah |
| 2 | TPI Suka Hujan | 535 | Panggarangan |
| 3 | TPI Sawarna | 2000 | Bayah |
| 4 | TPI Panyaungan | 100 | Cihara |
| 5 | TPI Cibareno | 300 | Cilograng |
| 6 | TPI Tanjung Panto | 109 | Wanasalam |
| 7 | TPI Cipunaga | 90 | Wanasalam |
| 8 | TPI Situregen | 786 | Panggarangan |
| 9 | TPI Pulomanuk | 28 | Bayah |
| 10 | TPI Citarate | 300 | Cilograng |

*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, 2025*

### 2.1.3.4. Transformasi Digital

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan. Sebagaimana amanat Undang - undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, maka untuk mencapai Transformasi Indonesia dilaksanakan melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola. Arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP), dengan indikator pencapaian melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sasaran 2045 sebesar 5,00 (skala 5). Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, dimana pelaksanaan TDP berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan

5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup). Sebagaimana target pembangunan nasional pada Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029, target Indeks SPBE di tahun 2025 adalah 3,00 (masih menggunakan indikator lama), yang selanjutnya penerapan dengan indikator baru akan dilakukan di tahun 2026, dengan periode evaluasi nasional per-2 (dua) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi akan dilakukan kembali di tahun 2028, dengan target capaian nasional adalah 2,00 (menggunakan indikator baru). Berdasarkan kondisi tersebut, serta dengan pertimbangan agar instansi pemerintah sudah mulai mempersiapkan kegiatan evaluasi Pemdi di 2026 (Indeks Pemdi), maka telah diidentifikasi target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### 2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

#### A. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing)

barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital).

Secara umum selama periode 2020-2024, nilai PMTB mengalami peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada tabel di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020-2024 di Kabupaten Lebak mengalami fluktuasi dari -0,04 persen (2020) meningkat menjadi sebesar 3,99 persen (2021). Kemudian, dari tahun 2022 sampai 2024 terjadi penurunan berturut-turut sebesar 3,68 persen; 3,15 persen; dan 2,37 persen. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung menurun tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB lainnya.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB mengalami tren yang meningkat selama periode 2020–2024. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2020 sebesar -0,75 persen, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 4,75 persen. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan kembali menjadi 3,23 persen dan 1,15 persen. Kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,45 persen. Sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan bangunan. Pada tahun 2020 sub komponen non bangunan tumbuh sebesar 1,33 persen. Kemudian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berturut-turut

mengalami peningkatan sebesar 2,54 persen, 3,23 persen dan 7,00 persen. Namun, pada tahun 2024 menurun menjadi 4,04 persen. Secara umum, selama kurun waktu tahun 2020-2024 pertumbuhan PMTB terus mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 3,99 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar -0,04 persen.

**Tabel 2. 25 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| No. | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | **Total PMTB** | | | | | |
| | a. ADHB (miliar Rp) | 1.708,65 | 1.837,92 | 2.030,98 | 2.184,89 | 2.290,76 |
| | b. ADHK 2010 (miliar Rp) | 1.057,28 | 1.099,45 | 1.139,86 | 1.175,78 | 1.203,66 |
| 2. | **Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)** | 5,88 | 5,96 | 6,07 | 6,14 | 6,09 |
| 3. | **Struktur PMTB** | | | | | |
| | a. Bangunan (miliar Rp) | 1.127,16 | 1.218,30 | 1.335,76 | 1.409,21 | 1.455,99 |
| | Persen (%) | 65,97 | 66,29 | 65,77 | 64,50 | 63,56 |
| | b. Non Bangunan (miliar Rp) | 581,50 | 619,62 | 695,23 | 775,69 | 834,77 |
| | Persen (%) | 34,03 | 33,71 | 34,23 | 35,50 | 36,44 |
| | Total PMTB (miliar Rp) | 1.708,65 | 1.837,92 | 2.030,98 | 2.184,89 | 2.290,76 |
| | Persen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | **Pertumbuhan (%)** | | | | | |
| | a. Bangunan | -0,75 | 4,75 | 3,23 | 1,15 | 1,45 |
| | b. Non Bangunan | 1,33 | 2,54 | 2,54 | 7,00 | 4,04 |
| | Total PMTB | -0,04 | 3,99 | 3,68 | 3,15 | 2,37 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024*

## B. Ekspor Barang dan Jasa

**Ekspor Barang dan Jasa** adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan penjualan dan pengiriman produk atau layanan dari suatu negara ke negara lain untuk diperdagangkan di pasar internasional.

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai

ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai total ekspor terhadap total impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 2. 26 Tabel Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| No. | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Total Ekspor (ADHB) (miliar Rp) | 9.212,25 | 10.171,40 | 13.509,32 | 17.518,54 | 18.837,06 |
| 2. | Total Impor (ADHB) (miliar Rp) | 5.554,19 | 6.001,26 | 9.341,89 | 13.340,77 | 15.399,50 |
| 3. | Net ekspor (X – M) (miliar Rp) | 3.658,06 | 4.170,14 | 4.167,43 | 4.177,77 | 3.437,56 |
| 4. | Rasio ekspor terhadap Impor | 1,66 | 1,69 | 1,45 | 1,31 | 1,22 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024*

Selama periode 2020 - 2024, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Lebak dengan luar wilayah, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Lebak selalu dalam posisi surplus. Nilai total ekspor yang lebih besar dari total impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk.

Total surplus perdagangan Kabupaten Lebak yang terjadi antara tahun 2020 sampai dengan 2024 tercatat masing-masing sebesar Rp 3.658,06 miliar rupiah (2020); Rp 4.170,14 miliar rupiah (2021); Rp 4.167,96 miliar rupiah (2022); Rp 4.183,40 miliar rupiah (2023); dan Rp 3.437,56 miliiar rupiah tahun 2024. Sementara rasio total ekspor terhadap total impor cenderung menurun dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 rasionya sebesar 1,66 naik sedikit menjadi sebesar 1,69 pada tahun 2021, kemudian dari tahun 2022 hingga 2024 mengalami tren penurunan pada rasionya sebesar 1,45 sampai 1,22.

#### 2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Lebak dengan karakteristik wilayah perdesaan tentu sangat dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan di desa. Seiring perkembangan saat ini, terdapat potensi kawasan perkotaan di Kabupaten Lebak yang juga dapat menopang pembangunan wilayah. Dengan begitu maka perlu adanya keselarasan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Lebak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan yang dimaksud tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur wilayah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat dan meningkatkan konektivitas daerah serta mendorong kemandirian perdesaan berkelanjutan.

### A. Indeks Infrastruktur Wilayah

Indeks infrastruktur wilayah Kabupaten Lebak adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketersediaan infrastruktur layanan dasar dan tingkat konektivitas daerah di Kabupaten Lebak. Saat ini kondisi infrastruktur wilayah Kabupaten Lebak dapat dikatakan belum mencapai kategori tinggi. Tercermin dari capaian tahun 2024 yang hanya berkisar diangka 65,12 poin. Pencapaian tersebut

meninggalkan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk 5 (lima) tahun ke depan utamanya berkaitan dengan upaya meningkatkan konektivitas daerah.

Indeks konektivitas daerah sebagai variabel penghitungan indeks infrastruktur wilayah dihitung berdasarkan kondisi kemantapan jalan kabupaten dan ketersediaan sarana prasarana transportasi. Data per 2024 menunjukkan bahwa indeks konektivitas daerah hanya mencapai 52,25 poin. Capaian tersebut tidak terlepas dari kondisi sarana prasarana transportasi di Kabupaten Lebak yang dihitung dengan membandingkan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal sehingga hanya diperoleh nilai berkisar 29,64%. Belum lagi masih banyaknya kondisi tidak mantap jalan pada ruas-ruas kewenangan kabupaten sehingga capaian saat ini baru mencapai 74,86%. Meskipun demikian, setidaknya pencapaian indeks konektivitas daerah bila melihat tren tiap tahunnya terus mengalami kenaikan namun belum signifikan. Kebijakan terhadap peningkatan konektivitas daerah terus digulirkan ditengah keterbatasan fiskal utamanya memastikan konektivitas menuju pusat-pusat kegiatan dapat terlayani dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sehingga akses utara-tengah-selatan bisa terintegrasi.

Terdapat juga indeks infrastruktur layanan dasar sebagai variabel penghitungan indeks infrastruktur wilayah yang diukur melalui capaian terhadap cakupan akses air minum dan sanitasi layak serta masyarakat yang menghuni rumah layak huni. Indeks infrastruktur layanan dasar di Kabupaten Lebak pada tahun 2024 telah mencapai 77,99 poin. Bila melihat luas wilayah, topografi dan sebaran penduduk Kabupaten Lebak, pencapaian tersebut terbilang sudah cukup baik. Akan tetapi bila melihat target Nasional maupun tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), maka masih ada pekerjaan rumah sekitar 20% guna memastikan masyarakat Kabupaten Lebak terlayani infrastruktur dasar khususnya air minum, sanitasi, dan rumah layak huni secara merata. Utamanya dengan mengacu pada Asta Cita dan program hasil terbaik cepat (PHTC) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 maka ke depan salah satu variabel indeks infrastruktur layanan dasar menjadi fokus utama bagaimana kebutuhan primer yaitu

papan atau hunian yang layak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali Kabupaten Lebak.

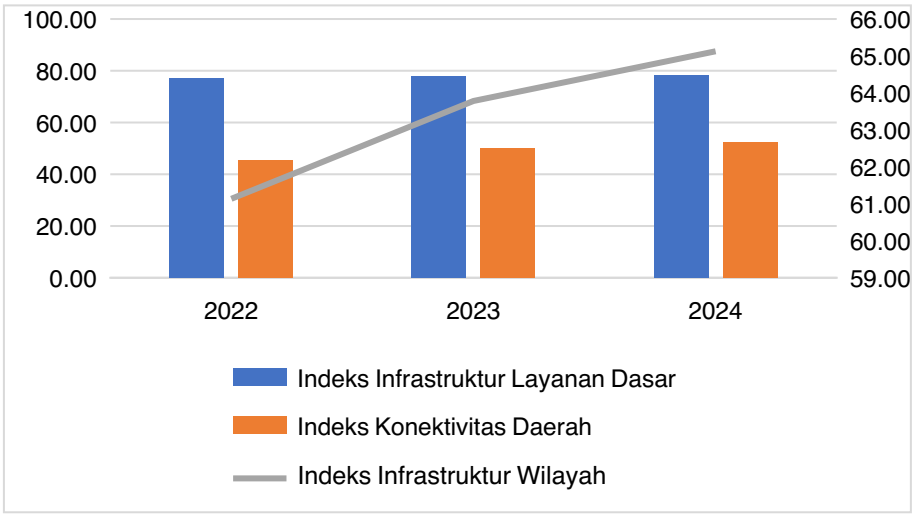


**Grafik 2. 64 Capaian Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lebak Tahun 2022-2024**

*Sumber : Hasil Evaluasi Capaian IKU RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

## B. Indeks Desa Membangun

Penanganan terhadap infrastruktur yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah didukung pula oleh pemerintah desa tak terkecuali di Kabupaten Lebak. Semangat pembangunan dari desa tidak terlepas adanya gelontoran dana desa dari pemerintah pusat sejak 2015 pasca terbit Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan antara desa dan kota serta mewujudkan kemandirian desa. Selama ini tingkat kemajuan dan kemandirian desa diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Status kemajuan dan kemandirian desa dinilai berdasarkan 3 (tiga) dimensi utama yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi (lingkungan). Berdasarkan tren tahunan bahwa desa berstatus maju dan berkembang di Kabupaten Lebak terus bertambah seiring berkurangnya desa tertinggal dan sangat tertinggal. Untuk selanjutnya pekerjaan rumah ke depan bagaimana

meningkatkan status desa ini hingga mampu memperbanyak desa berstatus mandiri, di mana desa mandiri umumnya memiliki dukungan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi yang baik.

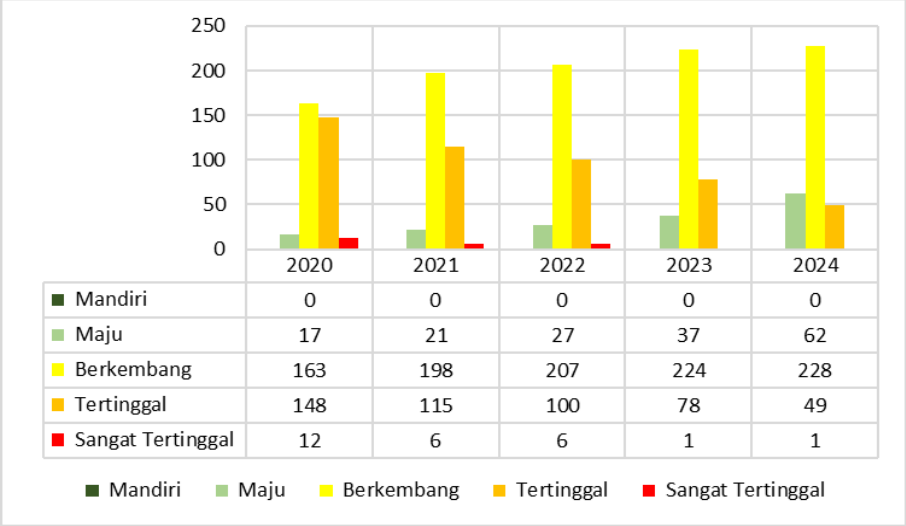


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maju | 17 | 21 | 27 | 37 | 62 |
| Berkembang | 163 | 198 | 207 | 224 | 228 |
| Tertinggal | 148 | 115 | 100 | 78 | 49 |
| Sangat Tertinggal | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 |

**Grafik 2. 65 Status Desa di Kabupaten Lebak Berdasarkan Indeks Desa Membangun**

*Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021-2025*

Berdasarkan data-data yang tersaji di atas, tentu saja diperlukan percepatan terhadap pembangunan infrastruktur baik di desa maupun kawasan perkotaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Percepatan yang dilakukan utamanya berkaitan dengan memastikan konektivitas daerah semakin baik dan penyediaan infrastruktur layanan dasar tercakup secara merata, di mana keduanya merupakan modal awal untuk memicu tumbuhnya perekonomian daerah. Wilayah-wilayah strategis di Kabupaten Lebak seperti kawasan perkotaan Rangkasbitung, Maja, Malingping, Bayah, dan Cipanas perlu memiliki konektivitas dan layanan infrastruktur yang baik sebagai daerah perkotaan serta tentunya desa-desa yang masih memerlukan intervensi khusus untuk pemerataan pembangunan. Bila hal-hal tersebut dilakukan secara tepat, maka bukan tidak mungkin kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Lebak bisa berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui potensi kewilayahannya masing-masing.

### 2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

#### A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Angka ini mencerminkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dalam menopang keseluruhan perekonomian dan pembangunan di wilayah tersebut. Di Kabupaten Lebak, data rasio ini memberikan gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak untuk membiayai belanja publik dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.

Secara umum, rasio pajak daerah yang tinggi mengindikasikan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah cukup kuat untuk menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan, yang kemudian dapat dialokasikan untuk berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Sebaliknya, rasio yang rendah mungkin mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak atau bahwa basis ekonomi daerah masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Untuk rasio pajak daerah terhadap PDRB Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 24,75. Adapun rincian rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2020-2024 bisa dilihat pada grafik dibawah ini :

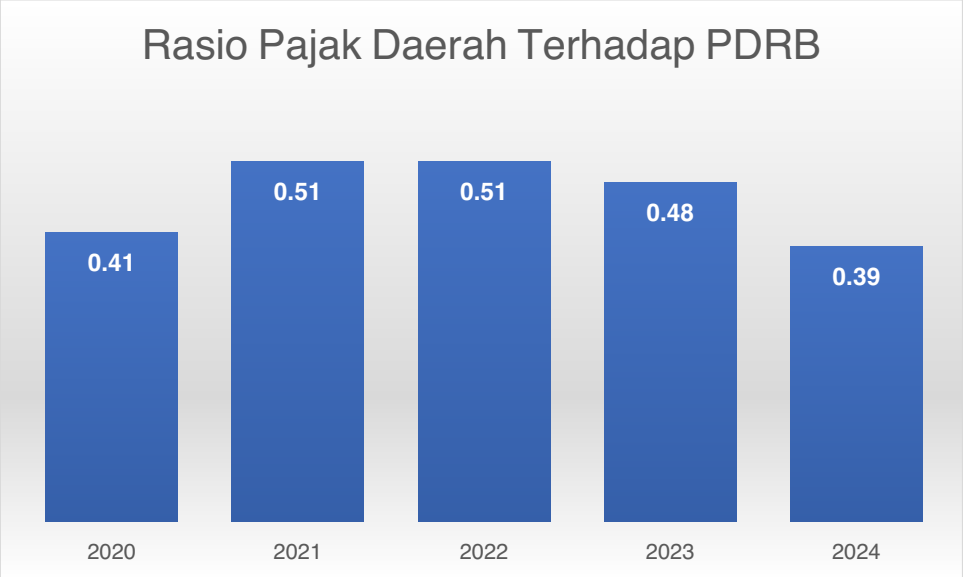


**Grafik 2. 66 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB**

*Sumber : Bapperida Kabupaten Lebak, Tahun 2024*

## B. Tingkat Inflasi

**Inflasi** adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi menyebabkan daya beli uang menurun, artinya dengan jumlah uang yang sama, kita dapat membeli lebih sedikit barang dibandingkan sebelumnya. Ciri-ciri inflasi yaitu sebagai berikut :

- Kenaikan harga bersifat **umum** (tidak hanya satu atau dua barang)
- Kenaikan harga bersifat **terus-menerus** (berkelanjutan)
- Diukur dalam periode waktu tertentu (bulanan, tahunan)

Pada tahun 2024 Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang mulai dihitung tingkat inflasinya, dengan inflasi *year on year* (*y-on-y*) Kabupaten Lebak sebesar 1,20 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,91.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan

tembakau sebesar 1,81 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,91 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -2,8 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,61 persen; kelompok transportasi sebesar -0,45 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -1,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 5,77 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,67 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,68 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,48 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan, berikut terlhat pada table berikut.

**Tabel 2. 27 Perkembangan Harga Berbagai Komoditas Pada Desember 2024**

| Kelompok Pengeluaran | IHK Desember 2023 | IHK Desember 2023 | IHK Desember 2024 | Tingkat Inflasi *m-to-m* Desember 2024 1) (%) | Tingkat Inflasi *y-to-d* Desember 2024 2) (%) | Tingkat Inflasi *y-on-y* Desember 2024 3) (%) | Andil Inflasi *m-to-m* Desember 2024 (%) | Andil Inflasi *y-on-y* Desember 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **Umum (*Headline*)** | **105,64** | **105,64** | **106,91** | **0,88** | **1,20** | **1,20** | **0,88** | **1,2** |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 108,41 | 108,41 | 110,37 | 2,35 | 1,81 | 1,81 | 1,01 | 0,79 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 102,81 | 102,81 | 103,75 | -0,11 | 0,91 | 0,91 | -0,01 | 0,07 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 100,43 | 100,43 | 100,88 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0,05 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 101,97 | 101,97 | 99,11 | -2,74 | -2,8 | -2,8 | -0,15 | -0,16 |
| Kesehatan | 103,22 | 103,22 | 104,88 | 0,79 | 1,61 | 1,61 | 0,02 | 0,03 |
| Transportasi | 110,22 | 110,22 | 109,72 | 0,03 | -0,45 | -0,45 | ~0 | -0,04 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 100,03 | 100,03 | 99,03 | 0 | -1,00 | -1,00 | 0 | -0,04 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 101,93 | 101,93 | 107,81 | 0 | 5,77 | 5,77 | 0 | 0,07 |
| Pendidikan | 100,00 | 100,00 | 102,67 | 0 | 2,67 | 2,67 | 0 | 0,06 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 105,47 | 105,47 | 107,24 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0,14 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 106,54 | 106,54 | 111,31 | 0,20 | 4,48 | 4,48 | 0,01 | 0,23 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024*

Pada Desember 2024, tingkat inflasi *y-on-y* Kabupaten Lebak sebesar 1,20 persen dantingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,20 persen berikut table dan grafiknya.

**Tabel 2. 28 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year**

| Tingkat Inflasi | 2024 |
|---|---|
| (1) | (4) |
| *Month to Month* (*m-to-m*) | 0,88 |
| *Year to Date* (*y-to-d*) | 1,20 |
| *Year on Year* (*y-on-y*) | 1,20 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024*

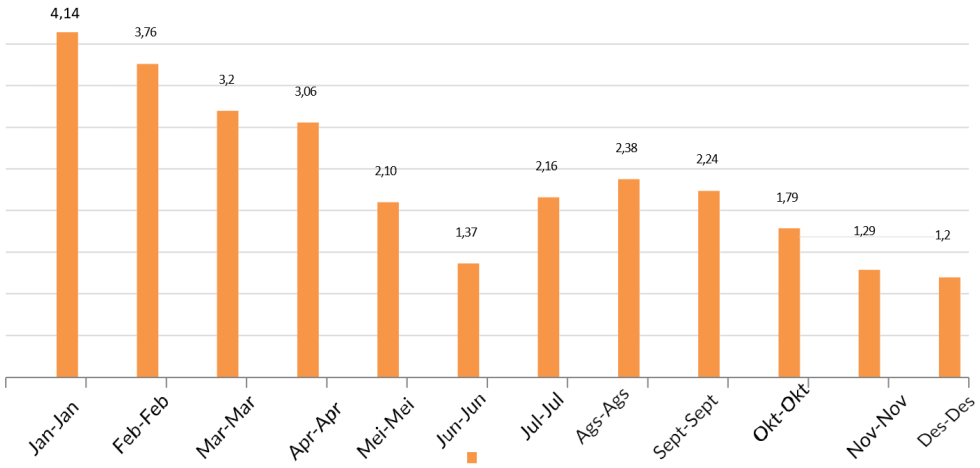


**Grafik 2. 67 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kabupaten Lebak**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024*

### 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Kabupaten Lebak, sebagai bagian integral dari Provinsi Banten, terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga cerminan dari pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Secara umum, Kabupaten Lebak menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Upaya ini dapat dilihat dari berbagai inisiatif dan progres yang dicapai pada beberapa indikator kunci:

## A. Indeks Reformasi Hukum

Kabupaten Lebak menyadari pentingnya reformasi hukum untuk menciptakan kepastian dan keadilan. Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Lebak mengindikasikan sejauh mana peraturan daerah dan kebijakan hukum yang ada mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, pelayanan publik yang prima, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen yang digunakan oleh untuk mengukur sejauh mana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah melaksanakan reformasi hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola hukum yang lebih merata di seluruh Indonesia, mengatasi berbagai masalah hukum, dan pada akhirnya mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia.

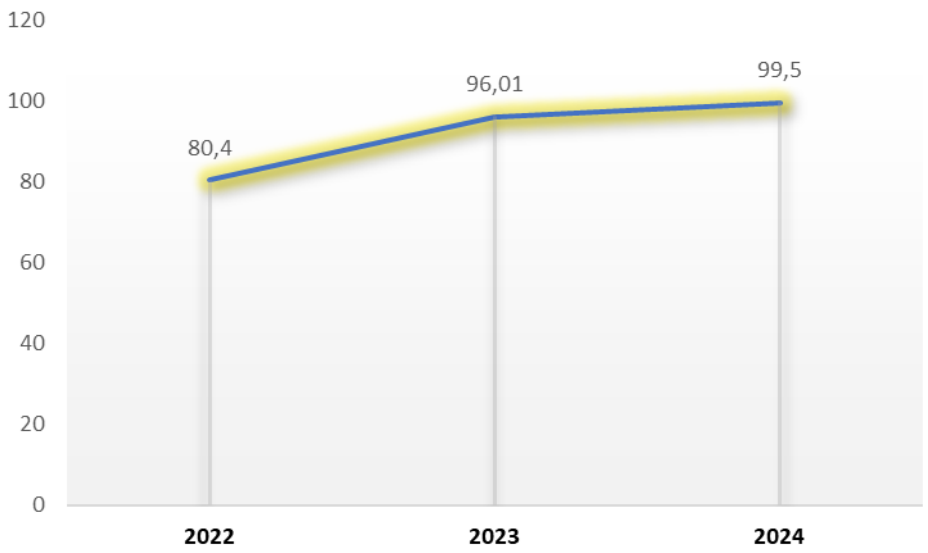


**Grafik 2. 68 Realisasi Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lebak Tahun 2022 – 2024**

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, 2025*

Data Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Lebak menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan komitmen yang sangat kuat dan keberhasilan substansial dalam upaya reformasi sektor hukum di

Kabupaten Lebak, mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam aspek-aspek seperti penegakan hukum, kepastian hukum, akses terhadap keadilan, atau efektivitas regulasi. Meski begitu, tantangan yang masih dihadapi di masa depan adalah percepatan harmonisasi produk hukum daerah dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis serta peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.

## B. Indeks SPBE

Kabupaten Lebak telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai tulang punggung efisiensi dan transparansi pelayanan publik. SPBE di Lebak mencakup pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile untuk perizinan, pengelolaan keuangan daerah, pengaduan masyarakat, serta sistem informasi kepegawaian. Kabupaten Lebak berkomitmen untuk meningkatkan layanannya melalui pengembangan infrastruktur jaringan, pelatihan bagi ASN agar mahir mengoperasikan sistem, dan integrasi data antar organisasi perangkat Daerah (OPD).

Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2022, tren Indeks SPBE menunjukkan peningkatan yang konsisten dan positif dari tahun 2021 ke 2024, terutama pada dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital di sektor pemerintahan. Meskipun demikian, untuk mencapai optimalisasi SPBE, Kabupaten Lebak masih menghadapi dua permasalahan utama yaitu pemerataan akses internet di daerah terpencil dan peningkatan literasi digital masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah untuk mencapai optimalisasi SPBE.

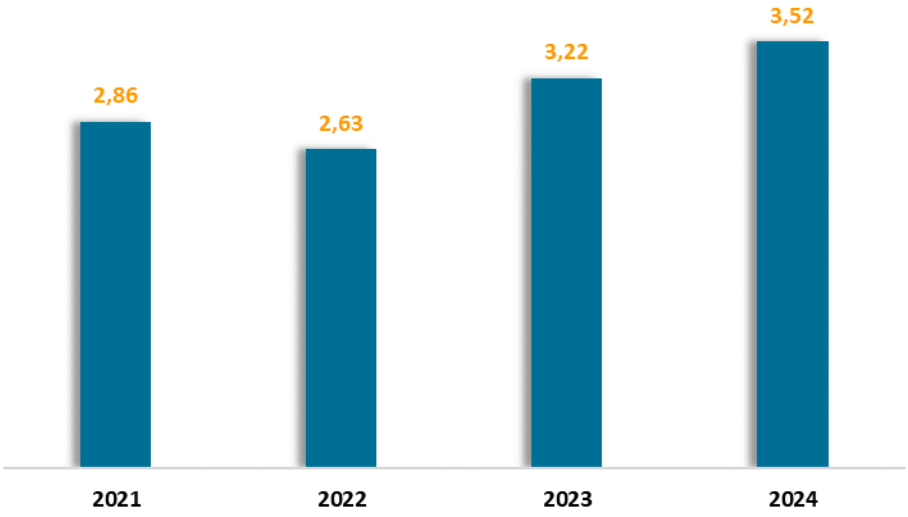


**Grafik 2. 69 Realisasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber: Diskominfo dan Persandian Kabupaten Lebak, 2025*

Kabupaten Lebak telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai tulang punggung efisiensi dan transparansi pelayanan publik. SPBE di Lebak mencakup pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile untuk perizinan, pengelolaan keuangan daerah, pengaduan masyarakat, serta sistem informasi kepegawaian. Kabupaten Lebak berkomitmen untuk meningkatkan layanannya melalui pengembangan infrastruktur jaringan, pelatihan bagi ASN agar mahir mengoperasikan sistem, dan integrasi data antar organisasi perangkat Daerah (OPD).

## C. Indeks Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah prioritas utama Kabupaten Lebak. Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan Rb) Nomor 4 Tahun 2023, indeks pelayanan publik dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Indeks Pelayanan Publik mengukur berbagai aspek, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan, kepuasan pengguna layanan.

Berbagai inovasi telah dilakukan, seperti pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) terpadu, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta digitalisasi beberapa jenis layanan. Respon positif dari masyarakat terhadap peningkatan pelayanan ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan.

**Grafik 2. 70 Realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024**

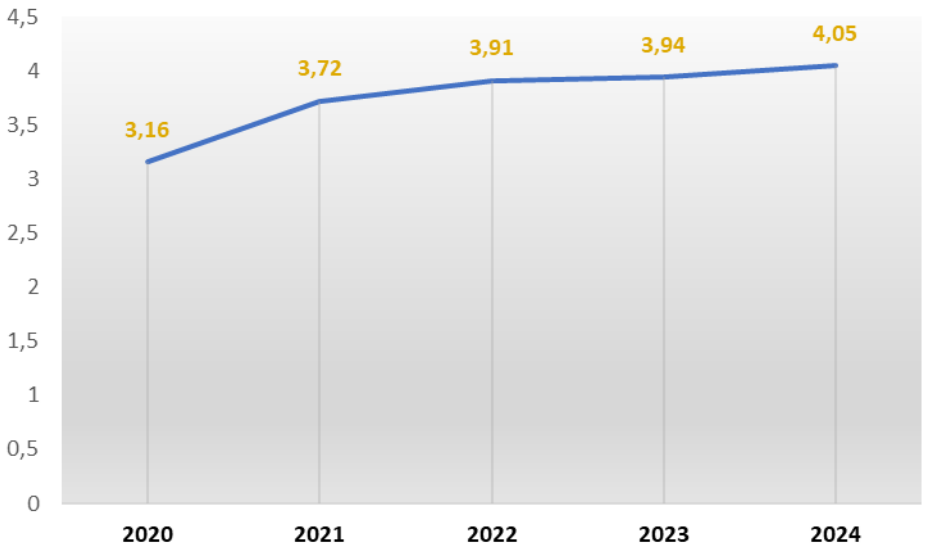


*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, 2025*

### 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan Indonesia menuju tahun 2045 berfokus pada tiga pilar utama: hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan esensial untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Hukum Berkeadilan: Ini berarti memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia ditegakkan secara adil dan transparan, melindungi hak-hak warga negara, dan menjamin kepastian hukum. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera.

Keamanan Nasional yang Tangguh: Fokus pada upaya menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayah dari ancaman baik dari dalam maupun luar, serta menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Ini melibatkan peningkatan kemampuan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum yang efektif.

Demokrasi Substantif: Lebih dari sekadar pemilu, demokrasi substansial menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perlindungan hak-hak sipil dan politik, serta akuntabilitas pemerintah. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang responsif, efektif, dan mewakili kepentingan seluruh rakyat.

Ketiga pilar ini saling mendukung. Hukum yang berkeadilan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi, sementara keamanan nasional yang kuat melindungi demokrasi dan stabilitas yang diperlukan untuk pembangunan. Demokrasi yang substansial, pada gilirannya, memastikan bahwa kebijakan pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Dengan kata lain, pembangunan hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial adalah tiga elemen kunci yang saling terkait dan esensial untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia.

Kabupaten Lebak, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara konsisten mengemban amanah untuk mewujudkan pilar-pilar esensial pembangunan yaitu supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, memberikan manfaat, dan senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sejalan dengan itu, Kabupaten Lebak juga berupaya keras membangun demokrasi substantif yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat. Tak kalah penting, keamanan nasional yang tangguh menjadi landasan mutlak bagi tegaknya hukum dan berjalannya roda demokrasi. Upaya ini merupakan cerminan dari keseriusan pemerintah daerah dalam membangun pondasi yang kokoh bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

## A. Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) memegang peranan penting sebagai pondasi utama bagi kepastian hukum dan ketertiban umum di Kabupaten Lebak. Berdasarkan data realisasi persentase penegakan perda dari tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam penegakan Peraturan Daerah menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi dan melebihi target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki kapasitas dan komitmen yang kuat dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Realisasi yang konsisten di atas atau mencapai target mengindikasikan adanya mekanisme penegakan yang efektif, koordinasi yang baik antar lembaga terkait, serta potensi kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pentingnya penegakan Perda.

**Tabel 2. 29 Capaian Jumlah Penegakan Perda di Kabupaten Lebak**

| NO. | URAIAN | TAHUN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | |
| 1 | TARGET (KASUS) | 71 | 71 | 98 | 78 |
| 2 | TINDAK LANJUT (KASUS) | 65 | 99 | 106 | 78 |
| 3 | CAPAIAN (%) | 91,55 | 139,44 | 108,16 | 100,00 |
| | | | | | |

*Sumber: Satpol PP Kabupaten Lebak, 2025*

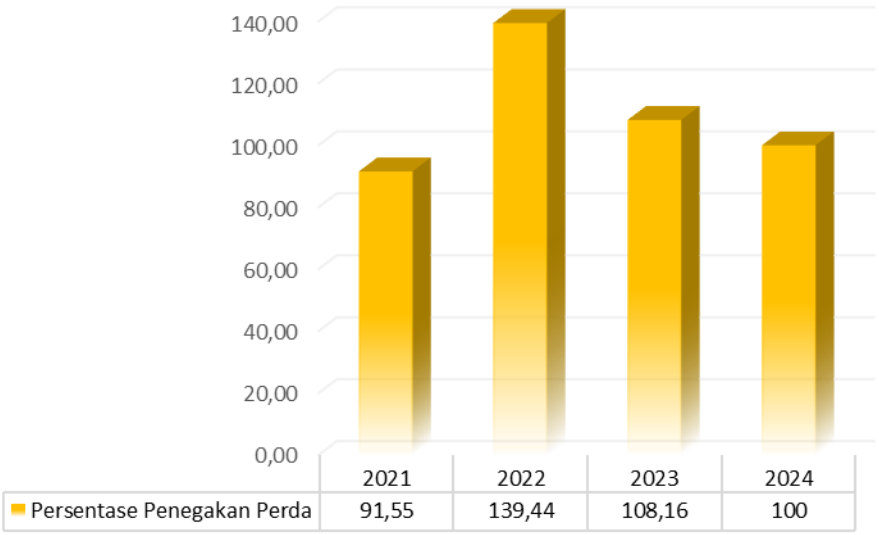


**Grafik 2. 71 Realisasi Persentase Penegakan Perda Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2024**

*Sumber: Satpol PP Kabupaten Lebak, 2025*

## B. Capaian Aksi HAM

Pembangunan hukum yang berkeadilan harus selaras dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999). Kabupaten Lebak, sebagai bagian dari upaya nasional, turut serta dalam penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di tingkat daerah, dimana kelompok sasarannya terdiri dari perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

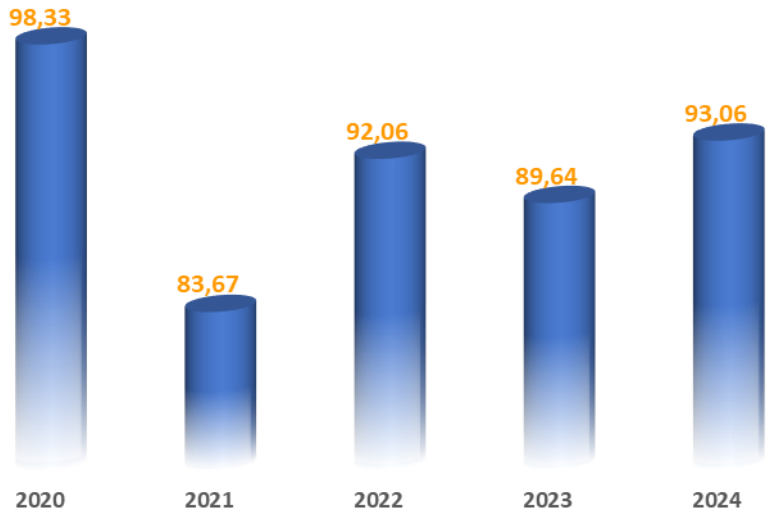


**Grafik 2. 72 Realisasi Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024**

Sumber: Bapperida Kabupaten Lebak, 2025

Pada tahun 2020, capaian Aksi HAM menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 98,33%. Angka ini mengindikasikan kinerja yang hampir sempurna dalam pemenuhan target-target HAM pada tahun tersebut, menandakan komitmen dan efektivitas yang kuat di awal periode pengamatan.

Namun, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya, 2021, di mana persentase capaian menurun menjadi 83,67%. Penurunan sebesar hampir 15% ini menunjukkan adanya kendala atau tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi HAM. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dampak pandemi

global yang mencapai puncaknya, pengalihan sumber daya, atau tantangan internal dalam implementasi program pendukung pelaksanaan aksi HAM.

Memasuki tahun 2022, kinerja mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan peningkatan persentase capaian menjadi 92,06%. Peningkatan ini menandakan adanya upaya serius untuk kembali menstabilkan dan meningkatkan performa setelah kemunduran di tahun sebelumnya, menunjukkan respons positif terhadap tantangan yang ada.

Namun, momentum perbaikan tersebut tidak sepenuhnya stabil. Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan kembali dalam persentase capaian, yaitu menjadi 89,64%. Meskipun tidak sedrastis penurunan tahun 2021, kemunduran ini Hal ini terjadi karena perencanaan dan koordinasi yang kurang optimal serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pada tahun 2022 belum mampu mempertahankan tingkat capaian yang lebih tinggi secara konsisten.

Untuk tahun 2024, data menunjukkan realisasi capaian aksi HAM sebesar 93,06%. Hal ini menunjukkan adanya strategi yang lebih efektif atau program yang mulai membuahkan hasil.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika yang berfluktuasi dalam realisasi capaian Aksi HAM. Dimulai dengan kinerja sangat baik, mengalami penurunan signifikan, kemudian menunjukkan upaya pemulihan yang inkonsisten. Target untuk mencapai capaian mendekati 100% masih menjadi tantangan utama yang memerlukan analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor penyebab fluktuasi dan strategi untuk mencapai keberlanjutan kinerja yang optimal.

## C. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten pada tahun 2023 tercatat sebesar 75,83, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 78,75.

Penurunan ini menunjukkan dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Banten. Secara khusus, indeks demokrasi di Banten terdiri dari tiga aspek utama yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Pada 2023, aspek kebebasan memperoleh skor 83,11, aspek kesetaraan 80,59, sementara kapasitas lembaga demokrasi berada di angka yang lebih rendah yaitu 60,96. Aspek kapasitas lembaga demokrasi ini menjadi perhatian karena menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan tantangan dalam kinerja lembaga legislatif dan putusan pengadilan terkait kebijakan pemerintah.

Kabupaten Lebak, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Banten, kondisi demokrasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Meski data IDI yang spesifik untuk Kabupaten Lebak belum tersedia secara terperinci, tantangan yang dihadapi di tingkat provinsi seperti kapasitas kelembagaan dan partisipasi politik yang masih perlu ditingkatkan juga relevan terjadi di tingkat kabupaten. Edukasi politik dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi, termasuk di Kabupaten Lebak, agar warga lebih aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Mengingat tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 hanya mencapai 66% atau masih di bawah target Nasional minimal 70% berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak. Dengan demikian, indeks demokrasi di Kabupaten Lebak, masih berada dalam kategori sedang dan menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi melalui sinergi berbagai pihak agar demokrasi dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

## D. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman (IRA) sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat rasa aman yang dirasakan masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang

aman, nyaman, dan kondusif bagi kehidupan sehari-hari. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tugas bersama seluruh warga masyarakat yang harus dijalankan secara aktif dan berkelanjutan.

Secara regional Indeks Rasa Aman di Provinsi Banten berdasarkan hasil pengukuran tahun 2014, 2017 dan 2020 menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 61,42, 42,24 dan 55,29 poin. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dinamika dalam aspek kehidupan di masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat kriminalitas, faktor sosial ekonomi, wilayah rawan bencana, tingkat kecepatan pelayanan petugas dan pengaruh lainnya.

Kabupaten Lebak menjadi salah satu wilayah dengan indeks risiko bencana yang tinggi di Provinsi Banten, sehingga upaya mitigasi bencana dan pengelolaan risiko menjadi bagian dari strategi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Selain itu peran aparat kepolisian menjadi salah satu faktor pendukung dengan melakukan pengaturan lalu lintas dan kegiatan yang bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya di area publik seperti sekolah.

Dalam penanganan pengaduan kebakaran, kendala yang dihadapi antara lain adalah faktor geografis Kabupaten Lebak yang cukup luas dan jangkauan petugas dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Hal ini mengakibatkan masih rendahnya waktu tanggap yang diberikan terutama wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten sehingga masih memerlukan perhatian khusus baik terhadap sebaran pos siaga, jumlah petugas dan peralatan pemadam yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi saat ini bahwa Kabupaten Lebak hanya memiliki 5 (lima) wilayah manajemen kebakaran (WMK) meliputi Rangkasbitung, Cipanas, Cileles, Malingping, dan Bayah sehingga masih menyisakan 23 kecamatan bila mengacu pada kondisi ideal layanan 1 WMK 1 kecamatan. Dengan begitu, maka untuk 5 (lima) tahun ke depan Kabupaten Lebak perlu menambah WMK-nya secara bertahap.

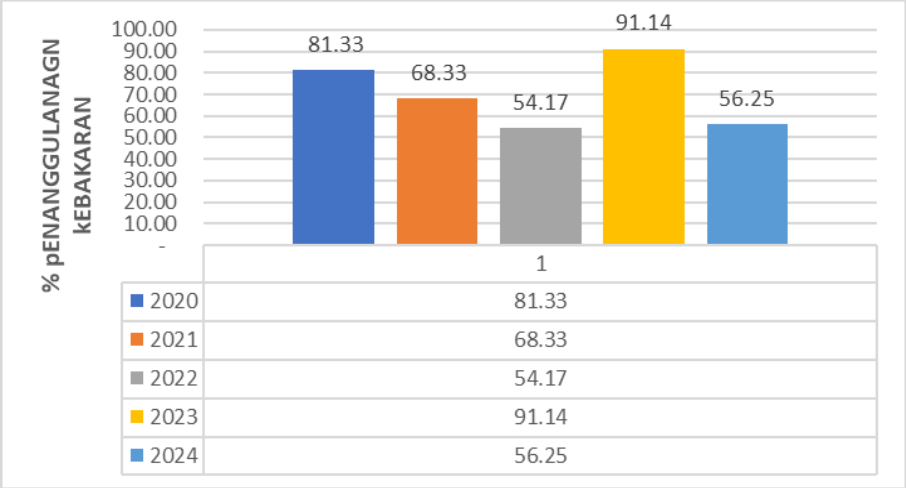


**Grafik 2. 73 Persentase Waktu Tanggap (Respon Time) Pengaduan Kebakaran di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak, 2025*

### 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Meskipun diplomasi dan pertahanan berdaya gentar secara langsung merupakan ranah pemerintah pusat, Kabupaten Lebak memainkan peran penting dalam memperkuat fondasi ketangguhan bangsa di tingkat lokal. Kontribusi Lebak terhadap ketangguhan diplomasi nasional terwujud dengan mengelola potensi dan mengatasi tantangan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepentingan nasional di berbagai bidang, serta ketahanan wilayah yang solid sebagai bagian integral dari pertahanan negara.

Kabupaten Lebak, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, keindahan alam yang menarik, dan keberadaan masyarakat adat yang kuat, secara tidak langsung berkontribusi pada kekuatan diplomasi ekonomi dan ketahanan nasional.

Kontribusi Lebak ini dapat terlihat dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD adalah instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran

IDSD ini adalah untuk memperoleh ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Peningkatan IDSD menunjukkan bahwa Lebak semakin mampu "bersaing" dan menarik investasi atau kerja sama berkat kapasitas ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola yang membaik. Peningkatan ini menjadi fondasi penting bagi diplomasi ekonomi daerah, di mana Lebak dapat menawarkan keunggulan komparatifnya untuk menarik pihak luar, yang pada akhirnya turut memperkuat fondasi ketangguhan diplomasi nasional secara tidak langsung.

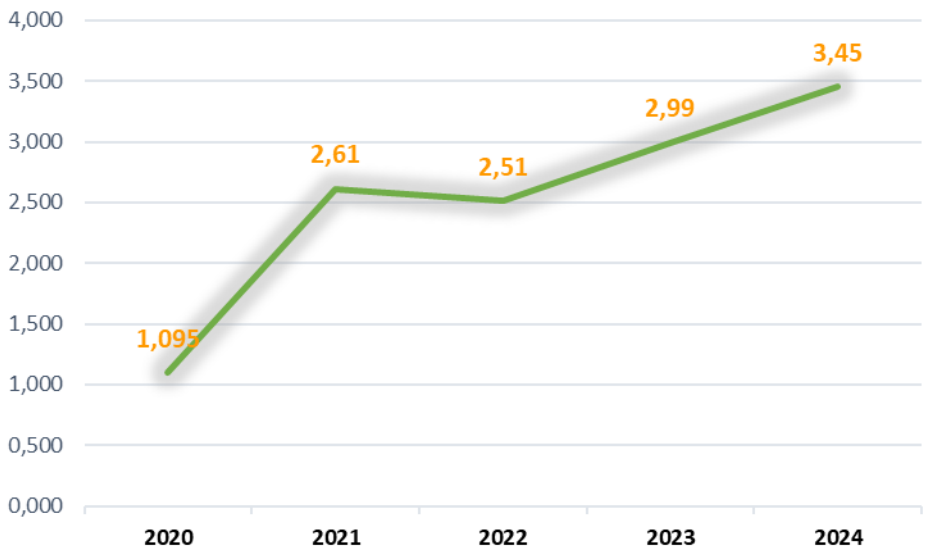


**Grafik 2. 74 Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024**

*Sumber: Bapperida Kabupaten Lebak, 2025*

### 2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lebak sebelumnya dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2019 hingga 2024 adalah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah “Kabupaten Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan

Nasional Berbasis Potensi Lokal". Perwujudan visi pembangunan daerah dilaksanakan melalui 5 (lima) yaitu:

1. Mengoptimalkan pembangunan manusia;
2. Mengoptimalkan pemulihan ekonomi daerah;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Memelihara kualitas lingkungan hidup; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebak dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 telah melampaui target dengan rasio pencapaian 101,35%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari beberapa realisasi yang mampu melebihi target, meskipun masih ada beberapa IKU yang belum mencapai target yang dicanangkan. Bila disimpulkan secara keseluruhan dengan memperhatikan pentahapan pembangunan pada tahun akhir perencanaan di mana pencapaian visi pembangunan diukur dengan ditetapkannya *Geopark* Bayah *Dome* menjadi *Geopark* Nasional, maka RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dapat dikatakan terealisasi atau berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan telah ditetapkannya *Geopark* Bayah *Dome* menjadi *Geopark* Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 173.K/GL.01/MEM.G/2025 per 7 Mei 2025.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lebak dan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan urusan ditampilkan pada tabel berikut:

## A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata. Kebijakan terbaru seperti pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2025 diarahkan untuk memastikan sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, mendapatkan dukungan yang memadai. Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti minimnya fasilitas di beberapa sekolah dan akses yang tidak merata, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai organisasi dan lembaga terus dilakukan, termasuk program-program yang mendukung transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan inklusif.

Urusan pendidikan di Kabupaten Lebak merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa poin penting terkait urusan pendidikan di Kabupaten Lebak:

1) Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak :

   Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan pendidikan di daerah ini. Mereka berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

   Program Pendidikan : Berbagai program telah diluncurkan untuk mendukung pendidikan, termasuk pelatihan bagi guru, peningkatan fasilitas sekolah, dan program beasiswa untuk siswa berprestasi.

2) Kualitas Pendidikan :

   Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lebak mencapai 6,41 tahun, menunjukkan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah.

3) Partisipasi Masyarakat :

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan juga semakin meningkat, dengan banyaknya inisiatif dari komunitas untuk mendukung pendidikan anak-anak di daerah tersebut.

4) Infrastruktur Pendidikan :

   Pemerintah daerah terus berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan dan renovasi sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

5) Kurikulum dan Pengajaran:

   Dinas Pendidikan juga berfokus pada pengembangan kurikulum yang relevan dan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan metode pengajaran.

Untuk Mengetahui perkembangan pendidikan penduduk di suatu daerah dapat dilihat capaian Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf (AMH) mengacu pada persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis dengan baik. Ini biasanya diukur untuk kelompok usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf merupakan indikator penting dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah atau negara. Tingkat melek huruf yang tinggi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Perkembangan AMH di Kabupaten Lebak dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.19 di bawah ini :

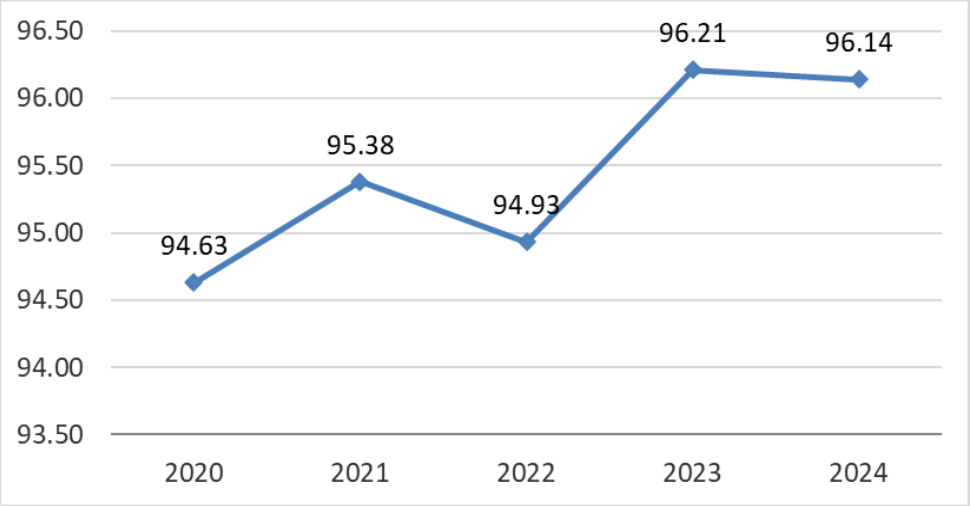


**Grafik 2. 75 Grafik Angka Melek Huruf (AHM) Kabupaten Lebak**

*Sumber : Bapperida Kabupaten Lebak, 2024*

Dari grafik di atas terlihat bahwa AMH di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan sebesar 1.51% dari tahun 2020 ke tahun 2024. Hal ini berarti bahwa hampir semua penduduk dewasa di Kabupaten Lebak sudah mampu membaca dan menulis, masih tersisa sekitar **3,86%** dari total populasi yang masih belum melek huruf. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya komunitas Masyarakat Adat Baduy yang masih belum bersedia mengakses layanan Pendidikan. Disamping itu masih ada sebagian masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal jenjang sekolah dasar.

Capaian dan Tantangan

Meskipun ada banyak capaian, Kabupaten Lebak juga menghadapi beberapa tantangan dalam urusan pendidikan:

- Kualitas Pendidikan:

  Masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan di daerah terpencil.
- Putus Sekolah:

Angka putus sekolah, terutama di kalangan siswa dari keluarga kurang mampu, masih menjadi perhatian.

- Infrastruktur:

  Keterbatasan anggaran dan infrastruktur di beberapa daerah menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah berupaya melakukan:

- Peningkatan Kualitas Guru

  Melalui pelatihan berkelanjutan dan program sertifikasi.

- Pembangunan Infrastruktur

  Membangun dan merenovasi sekolah serta meningkatkan akses terhadap teknologi.

- Program Beasiswa

  Memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

Dengan berbagai inisiatif ini, diharapkan pendidikan di Kabupaten Lebak akan terus berkembang, menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Berikut capaian kinerja pembangunan urusan pendidikan tahun 2020 – 2024.

**Tabel 2. 30 Capaian Urusan Pendidikan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Persen | 38,54 | 39,81 | 42,87 | 50,35 | 50,53 |
| Persentase guru bersertifikat pendidik | Persen | 40,99 | 83,91 | 45,77 | 63,74 | 63.74** |
| Persentase sekolah SD berakreditasi A | Persen | 8,15 | 8,13 | 8,13 | 7,85 | 22,88 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | Persen | 99,59 | 90,19 | 91,75 | 91,19 | 80,58 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | Persen | 87,56 | 76,78 | 76,56 | 77,38 | 75,98 |
| Angka Kelulusan SD | Persen | 97,63 | 98,50 | 98,31 | 99,95 | 100 |
| Angka Kelulusan SMP | Persen | 97,46 | 98,16 | 98,32 | 98,87 | 100,00 |
| Persentase sekolah SMP berakreditasi A | Persen | 10,23 | 10,09 | 9,91 | 12,11 | 10,67 |
| Angka Melek Huruf (AMH) | Persen | 99,86 | 95,38 | 94,93 | 96,21 | 96,14 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD | Persen | 91,25 | 96,92 | 99,57 | 99,43 | 98,86 |
| Angka Putus sekolah SD | Persen | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,05 | 0.05** |
| Angka Melanjutkan SD ke SMP | Persen | 98,37 | 96,78 | 98,90 | 99,56 | 99,56** |
| Angka Putus sekolah SMP | Persen | 0,18 | 1,15 | 1,02 | 0,92 | 0,92** |
| Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 6,40 | 6,41 | 6,59 | 6,60 | 6,61 |
| Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 57,38 | 49,34 | 42,87 | 50,53 | 85,02 |
| Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 98,19 | 98,11 | 108,51 | 99,57 | 97,61 |
| Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 87,75 | 93,07 | 76,56 | 96,92 | 92,76 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

2. Kesehatan

Selain urusan pendidikan, kesehatan merupakan salah satu urusan yang terkait pelayanan dasar, yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan pilar fundamental dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Dinas

Kesehatan Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam mewujudkan misi pembangunan daerah, khususnya pada Misi satu yaitu "Mengoptimalkan Pembangunan Manusia." Capaian urusan Kesehatan ini menyajikan analisis komprehensif terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kesehatan selama periode 2019-2024, sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Lebak.

Secara agregat, kinerja capaian indikator urusan kesehatan di Kabupaten Lebak menunjukkan dinamika yang variatif sepanjang periode 2019-2024, mencerminkan kompleksitas tantangan dan keberhasilan intervensi program. Sebagian besar indikator menunjukkan tren positif dan kemajuan yang signifikan, menandakan komitmen dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, beberapa indikator masih memerlukan perhatian khusus dan strategi intervensi yang lebih adaptif untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam aspek Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Gizi, Kabupaten Lebak telah mencatatkan sejumlah keberhasilan yang membanggakan. Penurunan angka kematian balita secara konsisten mengindikasikan efektivitas program imunisasi dan penanganan kasus penyakit pada usia dini. Terlebih lagi, capaian dalam penanggulangan stunting, baik berdasarkan Prevalensi Stunting (SGGI) maupun EPPGBM, menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dan drastis. Hal ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan intervensi gizi terpadu yang telah dilaksanakan secara masif. Selain itu, upaya dalam memastikan kesehatan ibu dan bayi baru lahir juga menunjukkan performa yang sangat baik, di mana persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, serta persentase ibu bersalin dan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan, berada pada tingkat capaian yang tinggi,

menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlangsungan siklus hidup sehat. Cakupan pelayanan balita sesuai standar juga terus menunjukkan peningkatan yang positif. Meskipun demikian, angka kematian bayi masih memerlukan perhatian serius, mengingat adanya fluktuasi yang perlu diatasi melalui program-program esensial neonatal dan balita.

Pada dimensi Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menunjukkan dedikasi dalam penguatan sistem pelayanan. Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan yang sesuai standar serta ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di setiap puskesmas telah menunjukkan peningkatan yang substansial, meskipun sempat fluktuatif. Ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai Formularium Nasional juga terjaga pada tingkat yang tinggi, menunjukkan efisiensi dalam rantai pasok farmasi. Peningkatan jumlah Puskesmas yang terakreditasi madya secara signifikan menjadi bukti komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan dasar. Di sisi sarana dan prasarana, meskipun masih menunjukkan fluktuasi, upaya pemenuhan standar di Puskesmas dan rumah sakit terus dilakukan.

Dalam konteks Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Perilaku Hidup Sehat, Kabupaten Lebak telah mencapai progres yang luar biasa dalam inisiatif sanitasi dengan peningkatan signifikan pada persentase desa yang telah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free/ODF). Capaian ini diimbangi dengan kinerja yang sangat positif dalam penanganan balita kurang gizi yang mendapatkan perawatan dan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan kesehatan yang konsisten tinggi. Manajemen penyakit menular juga telah dilaksanakan secara menyeluruh di puskesmas. Namun, terdapat tantangan yang perlu dicermati, seperti fluktuasi pada cakupan deteksi dini HIV dan pelayanan terduga TBC, yang mengindikasikan perlunya intensifikasi penjangkauan dan skrining. Selain itu,

meskipun terdapat upaya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penurunan pada Indeks Keluarga Sehat (IKS) Puskesmas menjadi perhatian serius yang memerlukan evaluasi komprehensif terhadap strategi pembinaan keluarga sehat.

Aspek Kesehatan Sekolah dan Lingkungan juga menunjukkan kinerja yang positif. Seluruh anak usia pendidikan dasar telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, menunjukkan perhatian pada kesehatan anak sekolah. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Selain itu, upaya skrining kesehatan bagi warga usia lanjut (60 tahun ke atas) juga telah meningkat signifikan, sejalan dengan perhatian terhadap kesehatan lansia, dan capaian pelayanan penderita Diabetes Melitus juga menunjukkan perbaikan yang baik.

Secara komprehensif, capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak periode 2019-2024 menunjukkan dinamika kinerja yang positif dengan keberhasilan signifikan pada beberapa indikator kunci, seperti penurunan stunting, peningkatan cakupan pelayanan KIA, dan pengembangan sanitasi lingkungan. Hal ini mencerminkan keberhasilan implementasi program dan kolaborasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan. Meskipun demikian, beberapa area masih memerlukan perhatian khusus dan intervensi yang lebih terarah. Tantangan utama terletak pada upaya menekan angka kematian bayi, meningkatkan Indeks Keluarga Sehat, serta menjaga konsistensi dan perluasan cakupan deteksi dini penyakit menular tertentu.

Dengan komitmen berkelanjutan dan upaya kolektif, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Lebak dapat terus meningkat secara signifikan, mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing sesuai visi pembangunan daerah. Untuk mengetahui pencapaian urusan kesehatan di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 31 Capaian Urusan Kesehatan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase keluarga sehat | Persen | 18,70 | 20,40 | 20,06 | 48,90 | 26,50 |
| Persentase Desa ODF | Persen | 22,90 | 21,16 | 24,35 | 33,04 | 38,84 |
| Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan | Persen | - | - | - | - | 90,00 |
| Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas | Persen | - | - | - | - | 70,00 |
| Jumlah pelaksanaan sosialisasi jamsos | Kecamatan | - | - | - | - | - |
| Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD | Persen | 77,11 | 82,23 | 78,32 | 82,46 | 83,04 |
| Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar | Persen | 100,0 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar | Persen | 65,0 | 100,00 | 93,27 | | 73,65 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular | Persen | - | - | - | - | 100,00 |
| Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional | Persen | - | - | - | - | 70,00 |
| Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Persen | - | - | - | - | 42,69 |
| Persentase pelayanan kesehatan keluarga | Persen | - | - | - | - | 86,14 |
| Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar | Persen | 78,80 | 100,00 | 90,99 | 89,51 | 86,14 |
| Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar | Persen | 85,00 | 60,00 | 68,39 | 64,46 | 68,87 |
| Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya | Persen | 24,00 | 57,14 | 66,67 | 41,00 | 97,67 |
| Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan | Persen | 96,20 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | 75,00 | 60,00 | 52,38 | 60,00 | 2,33 |
| Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS )dari Puskesmas ke Rumah Sakit | Persen | 4,72 | 15,86 | 1,96 | 0,95 | 0,81 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional ( Fornas ) | Persen | 93,00 | 90,00 | 94 | 94,00 | 60,00 |
| Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA | Persen | 70,00 | 79,07 | 80 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase legalitas tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | - | - | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Persen | 82 | 84 | 77,54 | - | 75,67 |
| Persentase tingkat capaian SPM | Persen | - | - | 96,32 | 91,23 | 79,37 |
| Indeks Keluarga sehat | Poin | - | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,27 |
| Persentase industri rumah tangga dan farmasi sesuai standar | Persen | - | - | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | - | 67,33 | 67,74 | 68,13 | 68,34 |
| Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk | Persen | 0,88 | 0,38 | 0,38 | 0,91 | 0,53 |
| Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 99,66 | 90,18 | 90,86 | 89,70 | 78,24 |
| Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen | 98,48 | 88,89 | 86,76 | 89,50 | 78,89 |
| Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 92,98 | 99,31 | 90,54 | 95,02 | 83,40 |
| Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 90,48 | 86,70 | 93,3 | 102,10 | 96,31 |
| Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 80,17 | 79,70 | 95,57 | 98,11 | 100,00 |
| Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 64,83 | 49,66 | 91,61 | 68,00 | 52,80 |
| Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 60,14 | 61,26 | 82,92 | 91,35 | 93,88 |
| Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 51,74 | 40,33 | 91,74 | 62,00 | 39,21 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 83,05 | 64,90 | 91,74 | 91,00 | 58,42 |
| Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 42,68 | 62,12 | 86,94 | 80,00 | 93,90 |
| Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | 66,20 | 49,15 | 100 | 93,92 | 84,61 |
| Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen | 85,79 | 61,00 | 97,54 | 94,00 | 92,75 |
| Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | Persen | 0,88 | 0,38 | 0,88 | 0,88 | 0,53 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar di Kabupaten Lebak pada periode 2019-2024 diarahkan terhadap peningkatan ketersediaan infrastruktur publik dan dasar. Sebagai upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur tentunya telah terbagi menjadi beberapa sub urusan meliputi kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, tata ruang, dan bina konstruksi. Untuk mengetahui pencapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

**Tabel 2. 32 Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Ketersediaan Air Irigasi Kabupaten | % | 71,18 | 71,23 | 71,44 | 71,48 | 70,56 |
| Persentase Cakupan Air Minum | % | 68,20 | 72,73 | 73,38 | 74,45 | 75,24 |
| Persentase Akses Sanitasi (Air Limbah) | % | 72,01 | 72,63 | 73,13 | 73,45 | 73,69 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Layanan Informasi Jasa Konstruksi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Sistem Drainase Perkotaan | % | - | 66,35 | 66,53 | 68,66 | 70,79 |
| Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap | % | 68,06 | 68,13 | 70,35 | 75,04 | 74,86 |
| Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik | % | - | 78,36 | 79,10 | 79,85 | 80,29 |
| Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan | % | - | 13,33 | 60,00 | 64,52 | 67,74 |
| Persentase Kesesuaian Tata Ruang | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

Pencapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Lebak mayoritas trennya terus meningkat. Meskipun demikian perlu adanya percepatan pembangunan khususnya pada infrastruktur dasar agar bisa mengejar target dan rata-rata Nasional serta pemerataan layanan seperti cakupan air minum dan sanitasi layak. Sedangkan pada pencapaian yang pada akhir periodisasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 menurun seperti ketersediaan air irigasi dan kondisi mantap jalan kabupaten, disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasarinya berkaitan dengan kondisi klimatologi, kebencanaan hingga porsi penganggaran. Pencapaian tersebut harus segera disikapi dengan strategi yang tepat sasaran untuk tahun 2025-2029 mengingat fokus pembangunan Nasional mengarahkan kepada perwujudan swasembada pangan yang berkaitan pada dukungan sumber daya air, peningkatan konektivitas berkaitan dengan kondisi dan ketersediaan jaringan jalan, hingga akses dasar masyarakat yang layak dan juga aman sebagai bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar di Kabupaten Lebak pada periode 2019-2024 diarahkan terhadap peningkatan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak. Sebagai upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur hunian yang merupakan kebutuhan primer manusia yaitu “papan”, telah terbagi menjadi beberapa sub urusan meliputi perumahan dan kawasan permukiman. Untuk mengetahui pencapaian urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

**Tabel 2. 33 Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase kawasan kumuh di perkotaan | % | 2,05 | 1,25 | 1,19 | 83,19 | 0,49 |
| Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten | % | - | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat | % | 82,93 | 85,37 | 86,59 | 86,59 | 89,02 |
| Persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni | % | 86,55 | 85,68 | 85,89 | 86,08 | 86,23 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

Pencapaian urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Lebak trennya selalu meningkat dan khususnya pada kekumuhan menurun mendekati kota tanpa kumuh. Meskipun demikian perlu adanya percepatan pembangunan khususnya pada akses masyarakat dalam memiliki rumah layak huni. Hal ini tidak terlepas dari arahan kebijakan Nasional dalam program hasil terbaik cepat untuk percepatan penyediaan rumah bersanitasi

baik bagi yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga dapat meningkatkan pencapaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu dengan kebijakan pengentasan kumuh sudah tidak terkotak-kotak hanya perkotaan saja, sehingga perlu ada pola penanganan agar mampu mengurangi luasan kumuh se-Kabupaten Lebak. Dan yang tak kalah penting bagaimana memastikan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana karena tidak terlepas juga karakteristik Kabupaten Lebak sebagai daerah yang memiliki potensi rawan bencana tinggi dan beragam

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Lebak. Urusan ini sangat fundamental karena menyangkut langsung keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga. Tujuannya adalah menciptakan kondisi masyarakat yang damai, tertib, dan terlindungi dari berbagai ancaman dan gangguan. Lingkup tugas dan fungsi Trantibumlinmas mencakup berbagai aspek diantaranya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Ketertiban Umum menjaga agar aktivitas masyarakat berlangsung tertib dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, ketentraman masyarakat menciptakan suasana yang tenang dan bebas dari gangguan, Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengkoordinasikan dan membina unit Linmas di tingkat desa/kelurahan, Penanganan gangguan keamanan skala lokal bertindak cepat dalam menanggapi laporan gangguan keamanan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah, seringkali berkoordinasi dengan Polri dan TNI dan Pembinaan Kesadaran Masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 34 Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Parpol yang terbina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 |
| Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) | Persen | 75,00 | 68,33 | 45,83 | 91,14 | 56,25 |
| Persentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 80,00 |
| Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM | Persen | 46,00 | 15,00 | 50,00 | 28,00 | 55,00 |
| Persentase Penegakan Perda | Persen | - | 91,55 | 139,44 | 108,16 | 100,00 |
| Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran | Persen | - | 84,03 | 75,21 | 89,06 | 90,37 |
| Cakupan Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya berkinerja baik | Persen | - | 20,00 | 100,00 | 27,00 | 29,00 |
| Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB | Persen | - | 100,00 | 90,00 | 61,00 | 75,00 |
| Cakupan penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila | Persen | - | 100,00 | 90,00 | 64,00 | 92,00 |
| Persentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda | Persen | - | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 87,00 |
| Cakupan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Lebak dan mampu mengelola Bantuan Keuangan sesuai Peraturan | Persen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Persen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase penanganan pra bencana | Persen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase penanganan tanggap darurat bencana | Persen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Warga Negara | - | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persen | - | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

6. Sosial

Urusan sosial di Kabupaten Lebak mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi permasalahan sosial yang ditangani diantaranya perlindungan dan penjaminan sosial berupa pemberian bantuan, fasilitas aksesibilitas, serta upaya rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia dan fakir miskin. Pemberdayaan sosial dilakukan Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Rehabiitasi sosial yang fokus pada pemulihan fungsi sosial individu atau kelompok yang mengalami disfungsi sosial akibat penyakit, kecelakaan, atau kondisi sosial tertentu. urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 35 Capaian Urusan Sosial di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terpeliharanya Areal Pemakaman | Lokasi | - | - | - | - | 1,00 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cakupan PPKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 86,00 | 100,00 | 100,00 |
| Cakupan PPKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | Persen | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani | Orang | - | - | - | - | 20,00 |
| Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani | Orang | - | - | 100,00 | - | 32,00 |
| Persentase Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Persen | - | - | - | - | 0,00 |
| Cakupan PPKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | Persen | 100,00 | 72,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT | Klp | - | - | - | - | 0,00 |
| Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal | Orang | - | - | - | - | 7,00 |
| Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT | Orang | - | - | - | - | 0,00 |
| Jumlah Jenazah yang diurus | orang Non PNS | - | - | - | - | 0,00 |
| Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT | Desa | - | - | - | - | - |
| Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) memiliki usaha | Orang | - | - | - | - | - |
| Persentase Pelaku Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Masyarakat | - | - | - | - | - |
| Jumlah Taman Makam terpelihara | unit | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase penanganan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran yang menjadi korban kekerasan | % | - | - | 10,00 | 100,00 | 50,00 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| persentase terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS | % | - | - | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi pengungsi/penyitas korban bencana | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | % | - | - | - | - | - |
| Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota | % | - | - | 100,00 | 100,00 | 900,00 |
| Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | % | - | - | 85,00 | 92,89 | 96,43 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

## B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja di Kabupaten Lebak merupakan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah melalui Disnaker untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk mengetahui pencapaian urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut

**Tabel 2. 36 Capaian Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Program | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Produktivitas Tenaga Kerja | Rp. | 48.688.652,69 | 52.364.103,33 | 57.597.921,11 | 53.509.232,77 | 50.983.909,52 |
| Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | % | 65,00 | 75,00 | | | |
| Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan | % | | 5,68 | 23,22 | 11,79 | 23,20 |
| Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lebak menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan menjamin hak-hak anak. Sepanjang periode 2019-2024, Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan menunjukkan capaian yang fluktuatif namun menunjukkan peningkatan di tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh progres signifikan dalam Sekuen stakeholder yang mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, yang menunjukkan peningkatan partisipasi dan kapasitas pemangku kepentingan.

Komitmen terhadap responsivitas gender semakin diperkuat dengan peningkatan substansial pada Jumlah Staf yang Menguasai Responsif Gender, mencerminkan peningkatan kapasitas internal perangkat daerah. Dalam konteks kesetaraan gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren peningkatan yang positif, mengindikasikan adanya perbaikan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup antara laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga

menunjukkan peningkatan, menegaskan kemajuan dalam partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik.

Aspek Perlindungan Anak menjadi fokus utama dengan peningkatan signifikan pada Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam penyusunan kebijakan, program, dan penanganan kasus perlindungan anak. Capaian Persentase Pemenuhan Hak Anak (IPHA) secara konsisten berada pada level yang tinggi, mendekati atau mencapai 100%, menunjukkan komitmen penuh terhadap pemenuhan hak dasar anak. Dalam penanganan kekerasan, Persentase Lembaga Penanganan Hak Anak yang Melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak menunjukkan konsistensi pada angka 80%, mengindikasikan keberlanjutan upaya pencegahan dan penanganan. Demikian pula, Persentase korban kekerasan gender perempuan yang mendapat layanan komprehensif dan Persentase korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan menunjukkan capaian yang sangat tinggi bahkan melampaui target, mengindikasikan efektivitas layanan penanganan kasus kekerasan

Untuk mengetahui pencapaian urusan ketahanan pangan di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 37 Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 112,00 |
| Presentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate) | Persen | 100,00 | 100,00 | 2,20 | 3,00 | 2,18 |
| Presentase penanganan kasus kekerasan anak | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase lembaga masyarakat yang aktip dalam lembaga perlidungan dan pemenuhan hak anak | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan | Persen | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 54,63 |
| Persentase terbinanya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Persen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 77,60 |
| MCPR (Modern contraceptive prevalancy rate) | Persen | 0,00 | 67,39 | 67,20 | 67,90 | 74,50 |
| Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 0,70 | 32,00 | 32,40 | 46,00 | 47,97 |
| Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Persen | 6,23 | 11,97 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

3. Pangan

Urusan pangan di Kabupaten Lebak menjadi tanggung jawab utama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lebak yang memainkan peran krusial dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh masyarakat Lebak. Fokus utamanya adalah mewujudkan kemandirian pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan terus berupaya mengatasi tantangan-tantangan ini melalui koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun masyarakat, untuk mewujudkan

ketahanan pangan yang kuat di Lebak. Untuk mengetahui pencapaian urusan ketahanan pangan di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

**Tabel 2. 38 Indikator dan Realisasi Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Skor | 70,78 | 72,60 | 71,96 | 72,32 | 72,76 |
| 2 | Persentase Angka Kecukupan Gizi Berdasarkan Ketersediaan Pangan | % | - | 157,1 | 157,1 | 154,9 | 101,0 |
| 3 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 83,3 | 91,3 | 96,6 | 93,3 | 93,2 |
| 4 | Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani | % | - | 3,03 | 7,58 | 53,66 | 8,24 |
| 5 | Persentase Pangan Aman | % | 93,40 | 97,50 | 99,30 | 98,60 | 97,18 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

4. Pertanahan

Urusan pertanahan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar di Kabupaten Lebak pada periode 2019-2024 diarahkan terhadap peningkatan pelayanan pertanahan. Sebagai upaya peningkatan layanan pertanahan sebagai langkah koordinasi dengan Kantor ATR/BPN di daerah, fokusnya berkaitan dengan reforma agraria, mediasi konflik pertanahan, dan penatagunaan tanah. Untuk mengetahui pencapaian urusan pertanahan di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

**Tabel 2. 39 Capaian Urusan Pertanahan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase penyelesaian tanah garapan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase penyelesaian distribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan dan tanah absente | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

Pencapaian urusan pertanahan setiap tahunnya mampu terealisasi dengan baik. Pencapaian ini harus tetap terjaga dan terus ditingkatkan utamanya dalam hal koordinasi dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak. Koordinasi ini menjadi penting sebab urusan pertanahan yang diampu Pemerintah Kabupaten Lebak bersifat koordinatif dan mayoritas sumber datanya berasal dari Kantor ATR/BPN. Adapun pada kebijakan ke depan untuk tahun 2025-2029, urusan pertanahan akan lebih ditekankan dalam implementasi reforma agraria khususnya untuk penataan aset dan akses sebagaimana arahan kebijakan Nasional. Disisi lain tentunya juga tetap melanjutkan layanan pertanahan berkaitan dengan melakukan mediasi terhadap konflik pertanahan dan mengkoordinasikan rencana pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Lebak dalam rangka kepentingan umum.

5. Lingkungan Hidup

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumber daya alam, tata guna lahan dan tata Kelola lingkungan. Kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan kondisi selama tahun 2020-2024 telah

dilakukan melalui program kegiatan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan dapat terpelihara kualitas lingkungan hidup daerah.

**Tabel 2. 40 Capaian Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup | % | - | 50 | 89,14 | 80,59 | 81,75 |
| Persentase terkelolanya Keanekaragaman hayati dalam RTH | % | - | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Persentase Usaha dan/ atau Kegiatan yang memiliki Izin Limbah B3 | % | - | 14,63 | 12 | 10,67 | 10,67 |
| Persentase PPLH pada MHA yang Hutan adatnya diakui | % | - | - | 20 | 40 | 25 |
| Persentase jumlah perusahaan aktif yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan | % | - | 23,61 | 36,5 | 21,74 | 36,8 |
| Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup | % | - | 40 | - | 100 | 100 |
| Persentase Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat | % | - | 100 | - | 100 | 100 |
| Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup ditangani | % | 100 | 166,67 | 225 | 273,33 | 213,33 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

Berdasarkan data di atas, persentase pemenuhan baku mutu lingkungan hidup selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan, begitu juga dengan persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani pada rentang tahun 2020-2023 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Selain itu peningkatan juga terjadi pada persentase penghargaan lingkungan hidup. Sebaliknya, persentase usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki Izin Limbah B3 mengalami penurunan setiap tahunnya. Sementara

persentase PPLH pada MHA yang Hutan adatnya diakui mengalami hasil yang fluktuatif setiap tahunnya.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lebak adalah pelayanan dasar dan wajib yang disediakan pemerintah daerah untuk seluruh warga negara. Urusan ini sangat fundamental karena menyangkut identitas hukum setiap individu, hak-hak sipil, dan pemenuhan data penduduk yang akurat untuk perencanaan pembangunan yang bertanggung jawab atas berbagai layanan yang mencakup seluruh siklus hidup penduduk, mulai dari kelahiran hingga kematian, serta perpindahan domisili. Layanan-layanan utama tersebut meliputi Pendaftaran Penduduk (Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Pencatatan Perpindahan Penduduk dan Pendataan Penduduk Non-Permanen), dan Pencatatan Sipil (Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengesahan dan Pengangkatan Anak, dan Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya). Untuk mengetahui pencapaian urusan pertanahan di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 41 Capaian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lebak 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase kepemilikan akta-akta catatan sipil | Persen | 54,51 | 52,94 | 47.98 | 99,33 | 64.84 |
| Persentase Kesesuaian database dokumen kependudukan | Persen | 98,88 | 93,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan | Persen | 96,00 | 97,16 | 96.27 | 98,77 | 99.11 |
| Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian sesuai SOP | Persen | - | 99,00 | 23.32 | 100,00 | 99,13 |
| Persentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Akte Kelahiran sesuai SOP | Persen | - | - | 97.31 | 100,00 | 99.13 |
| Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persen | - | 99,00 | 96.27 | 98,77 | 84.56 |
| Cakupan Instansi yang memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan | Persen | - | 5,00 | 100 | 112,50 | 100,00 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Lebak menghadapi dinamika yang kompleks namun menunjukkan upaya adaptif. Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan tren yang perlu dicermati, dengan fluktuasi sepanjang periode dan peningkatan pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk memerlukan strategi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Dalam upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana, Angka Total Fertility Rate (TFR) menunjukkan penurunan yang positif, sejalan dengan tujuan pembatasan kelahiran. Demikian pula, Angka Kehamilan Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) menunjukkan tren penurunan yang positif, mencerminkan keberhasilan edukasi kesehatan reproduksi remaja. Terkait metode kontrasepsi, Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR) menunjukkan fluktuasi, namun tetap berada pada angka yang cukup baik. Meskipun terdapat tantangan dalam pemenuhan Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak

Terpenuhi (Unmet Need), pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan cakupan layanan KB.

Partisipasi masyarakat dalam program KB juga menunjukkan konsistensi yang baik. Persentase Peserta KB Aktif berada pada tingkat yang stabil dan tinggi, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KB. Hal ini juga didukung oleh Angka Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif yang menunjukkan tren positif.

Pembinaan keluarga dan kelompok binaan menunjukkan kinerja yang bervariasi namun dengan peningkatan pada tahun-tahun terakhir. Jumlah kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), dan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan penguatan program pembinaan keluarga di berbagai siklus kehidupan. Demikian pula, Kelompok BKD (Bina Keluarga Desa) dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan tren peningkatan jumlah, yang mengindikasikan perluasan jangkauan program KB. Pada tahun 2024, Angka Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Melaksanakan KB Mandiri juga menunjukkan peningkatan yang positif, menandakan semakin tingginya kemandirian dalam keputusan ber-KB.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Lebak menunjukkan progres yang signifikan dalam upaya mewujudkan kesetaraan, perlindungan, dan keluarga yang berkualitas. Keberhasilan yang menonjol terlihat pada peningkatan indeks gender, pemenuhan hak anak, penanganan kasus kekerasan, serta peningkatan partisipasi dalam program keluarga berencana. Untuk mengetahui pencapaian urusan pertanahan di Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 42 Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persen | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif | Persen | - | - | 66,41 | - | 75,00 |
| Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) | Kelompok | - | - | 114 | - | 171,00 |
| Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif | Persen | 62,98 | 76,81 | 66,41 | 78,16 | 75,00 |
| Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Persen | 1,46 | 1,46 | 1,59 | 1,80 | 60,84 |
| Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) | Kelompok | - | - | - | - | 207,00 |
| Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun | Persen | 73,74 | 75,33 | 53,13 | 78,16 | 74,50 |
| Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB | Orang | 40.350,00 | 23.812,00 | 29583 | 12.436 | 9.365 |
| Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) | Kelompok | 688,00 | 841,00 | 444,00 | 506,00 | 676,00 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

8. Perhubungan

Fokus layanan urusan pilihan pada perhubungan terdapat beberapa indikator kinerja seperti penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Kondisi tersebut penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dalam berkendara.

**Tabel 2. 43 Capaian Urusan Perhubungan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas | % | 4,04 | 4,30 | 4,28 | 4,35 | 4,90 |
| Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas | % | 1,19 | 1,44 | 1,20 | 1,50 | 1,83 |
| Persentase Angkutan Umum Layak Jalan | % | 22,77 | 28,13 | 36,21 | 37,20 | 38,15 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi angka kecelakaan telah berhasil dilakukan, terlihat dari peningkatan penurunan dalam setiap tahunnya. Penurunan angka kecelakaan ini didukung oleh upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas terlihat dari meningkatnya persentase pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Selain itu, peningkatan angkutan umum wajib uji yang layak jalan dengan memenuhi berbagai aspek, seperti kelayakan fisik kendaraan, kelengkapan surat-surat kendaraan, serta kepatuhan terhadap uji KIR secara berkala. Namun demikian masih rendahnya persentase kelayakan di mana hanya mencapai 38,15% pada tahun 2024 dapat mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kendaraan bermotor wajib uji (KBWU).

9. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika adalah pilar penting dalam era digital saat ini, yang memungkinkan pertukaran informasi yang efektif dan pemanfaatan teknologi untuk kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Secara umum, Kabupaten Lebak masih menghadapi kendala dalam ketersediaan infrastruktur

komunikasi dan informatika yang belum memadai. Hal ini berdampak pada tingkat penggunaan dan kemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Tantangan utama yang dihadapi dalam urusan ini adalah upaya untuk mengoptimalkan layanan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), baik untuk kepentingan internal pemerintahan daerah maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pencapaian urusan komunikasi dan informatika DI kabupaten lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 untuk realisasi kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 44 Indikator dan Realisasi Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase terlayaninya informasi publik | Persen | 100,00 | - | - | - | 100,00 |
| Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah | Persen | 100,00 | - | - | - | 100,00 |
| Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah | Persen | 100,00 | - | - | - | 100,00 |
| Persentase tersebarluaskannya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah | Persen | - | - | - | - | 100,00 |
| Cakupan informasi tentang kegiatan SKPD dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lebak | Kali | 22,00 | - | - | - | 12,00 |
| Persentase Pengelolaan sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informatika | Persen | - | - | - | - | 100,00 |
| Persentase pemanfaatan Teknologi Informatika untuk layanan publik | Persen | - | - | - | - | 100,00 |
| Persentase pemanf aatan persandian dalam pengamanan informasi pemerintah daerah | Persen | - | - | - | - | - |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 64,81 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2024*

Meskipun penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lebak telah mendapat predikat sangat baik dengan skor 3,52 menurut evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui situs portal pemeringkatan SPBE (spbe.go.id), namun tantangan untuk melakukan transformasi digital masih besar, seperti tercermin dari beberapa kondisi faktual. Hanya sekitar 49,01% penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Lebak yang memiliki telepon seluler, dan hanya 5,27% yang menggunakan komputer, dari sekitar 5,29% rumah tangga yang memiliki fasilitas komputer atau laptop di rumahnya. Selain itu, hanya sekitar 28,72% penduduk yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, dengan sebagian besar rumah tangga tidak terkoneksi dengan jaringan

telepon PSTN (Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, 2019).

Tantangan ini diperparah oleh infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum memadai, di mana hampir seluruh kecamatan masih memiliki desa-desa yang tidak terjangkau sinyal seluler. Dalam konteks lain, optimalisasi peran komunikasi dan informatika dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik juga perlu ditingkatkan untuk membangun citra positif pemerintah melalui penyebarluasan informasi publik secara intensif dan konsisten. Oleh karena itu, perkuatan layanan SPBE yang terkait dengan fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik perlu mendapat perhatian serius, karena hal ini mencerminkan keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Lebak berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Lebak yang berupaya mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing seperti Peningkatan Kelembagaan Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Membantu koperasi dalam mengakses sumber-sumber permodalan, Mendorong koperasi untuk membangun jaringan dengan koperasi lain, BUMN, swasta, dan pemerintah, serta melakukan pendataan dan pembaruan data koperasi secara berkala untuk memonitor perkembangan dan kondisi koperasi di Lebak. Untuk pengembangan UKM menjadi fokus utama karena potensinya dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal dengan melakukan pembinaan seperti Memberikan berbagai pelatihan teknis dan manajerial bagi pelaku UKM, Membantu UKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, Memfasilitasi UKM untuk memperluas jangkauan pasar produk, Membantu dan mempermudah pelaku

UKM dalam mengurus perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), Mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas dan standar produk dan Menyediakan layanan konsultasi bisnis bagi pelaku UKM yang menghadapi permasalahan atau ingin mengembangkan usahanya. Pencapaian urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah di kabupaten lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 untuk realisasi kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 45 Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase UMK yang berdaya saing | % | 185,31 | - | - | - | - |
| Persentase koperasi aktif | % | 10,32 | - | - | - | - |
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas data penunjang perencanaan pembangunan daerah | Dokumen | 2,00 | - | - | - | - |
| Cakupan sinergisitas program pembangunan pusat dan daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah | % | 100 | - | - | - | - |
| Persentase koperasi sehat | % | - | 2,59 | 3,04 | 3,32 | 3,54 |
| Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang kompeten | % | - | 4,49 | 5,32 | 5,89 | 7,30 |
| Persentase koperasi berkinerja baik | % | - | 10,12 | 12,06 | 9,95 | 12,16 |
| Rasio kewirausahaan | % | - | 4,18 | 0,0496 | 0,0496 | 18,82 |
| Persentase usaha mikro ke usaha kecil | % | - | 0,0136 | 0,014 | 0,014 | 0,690 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2024*

11. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal di Kabupaten Lebak sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan pada

akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, aksesibilitas, serta daya saing dengan daerah lain. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola urusan penanaman modal ini. Capaian indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 46 Indikator dan Realisasi Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah investor PMA dan PMDN berskala nasional | Investor | 21 Investor | | | | |
| Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Trilyun | 3,2 Triliyun | | | | |
| Persentasi Pertumbuhan Investasi | % | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jumlah Rencana Investasi PMA/PMDN | Rp. (Triliyun) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Penanaman Modal | poin | | 85 | 85 | 86 | 87 |
| Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN | Rp. (Triliyun) | | 1,144 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
| Persentase Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal | % | | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2024*

12. Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Lebak telah menetapkan target dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga untuk periode 2020-2025. Di bidang infrastruktur, pembangunan dan perbaikan 10 fasilitas olahraga baru menjadi target utama, di mana 7 fasilitas telah berhasil diwujudkan hingga tahun 2024. Kabupaten Lebak

telah berhasil membangun 7 fasilitas olahraga yang mendukung kegiatan fisik dan rekreasi masyarakat. Di antaranya adalah Lapangan Sepak Bola, yang menjadi pusat kegiatan sepak bola lokal, dan Lapangan Basket yang ramai digunakan oleh para penggemar basket untuk berlatih dan bertanding. Selain itu, terdapat Lapangan Voli yang mendukung berbagai pertandingan voli. Masyarakat juga dapat menikmati Kolam Renang Umum yang menyediakan tempat untuk berenang dan bersantai.

Untuk kegiatan outdoor, ada Ruang Terbuka Hijau yang dirancang untuk berbagai aktivitas olahraga dan rekreasi. Fasilitas Fitness yang dilengkapi dengan peralatan modern juga telah tersedia untuk mendukung kebugaran masyarakat.

Terakhir, Gelanggang Olahraga Serbaguna menjadi tempat yang fleksibel untuk berbagai jenis olahraga, termasuk bulu tangkis dan basket. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam olahraga semakin meningkat dan mendukung pengembangan bakat atlet di Kabupaten Lebak. Untuk 3 (tiga) fasilitas olahraga yang belum terbangun akan dilaksanakan pembangunannya dalam rentang waktu dari tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Lapangan Softball - Fasilitas ini direncanakan untuk menjadi pusat kegiatan olahraga softball, namun belum terealisasi.
2. Fasilitas Atletik - Rencana pembangunan fasilitas ini mencakup lintasan lari dan area latihan untuk atletik, yang masih dalam tahap perencanaan.
3. Taman Olahraga - Taman ini direncanakan sebagai area untuk jogging, bersepeda, dan aktivitas fisik lainnya, tetapi belum dibangun.

Target dan capaian indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Lebak Tahun 2020-2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 47 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | 86 | 78 | 74 | 29 | 86 |
| 2 | Jumlah seluruh organisasi pemuda | 86 | 67 | 184 | 96 | 109 |
| 3 | Jumlah wirausaha muda | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Jumlah seluruh wirausaha | 58 | 368 | 368 | 600 | 267 |
| 5 | Jumlah cabang olahraga yang dibina | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 6 | Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | Jumlah pelatih bersertifikat | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Jumlah seluruh pelatih | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| 9 | Jumlah atlet pelajar yang dibina | 95 | 95 | 95 | 95 | 135 |
| 10 | Jumlah seluruh atlet pelajar | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 11 | Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. | 0 | 2 | 15 | 46 | 180 |
| 12 | Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun | 3 | 9 | 33 | 13 | 24 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2024*

Dari tabel di atas menunjukkan dinamika yang menarik sepanjang periode 2020-2024. Pada awal periode, jumlah organisasi pemuda yang aktif mengalami penurunan signifikan dari 86 pada tahun 2020 menjadi 29 pada tahun 2023, sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi 86 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan tantangan dalam menjaga konsistensi kegiatan dan keterlibatan organisasi pemuda. Di sisi lain, jumlah seluruh organisasi pemuda menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 184 organisasi, menunjukkan adanya pertumbuhan organisasi pemuda di Kabupaten Lebak.

Di bidang kewirausahaan, terdapat peningkatan yang konsisten dalam jumlah wirausaha muda, yang mencapai 100 pada tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam mendorong semangat.

kewirausahaan di kalangan pemuda. Jumlah seluruh wirausaha juga mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 600 pada tahun 2023, meskipun kemudian mengalami penurunan menjadi 267 pada tahun 2024.

Dalam bidang olahraga, jumlah cabang olahraga yang dibina tetap stabil pada angka 33 sepanjang periode, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membina berbagai jenis olahraga. Jumlah pelatih bersertifikat juga tetap stabil pada angka 50, sedangkan jumlah seluruh pelatih mengalami peningkatan dari 200 pada tahun 2020 menjadi 300 pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang olahraga. Jumlah atlet pelajar yang dibina juga tetap stabil, sedangkan jumlah seluruh atlet pelajar tetap pada angka 199.

Prestasi olahraga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional meningkat pesat dari 0 pada tahun 2020 menjadi 180 pada tahun 2024. Demikian pula, jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan juga mengalami peningkatan, menunjukkan peningkatan kualitas dan prestasi atlet di Kabupaten Lebak. Peningkatan ini menunjukkan adanya dampak positif dari pembinaan dan dukungan yang diberikan kepada atlet.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak telah berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, terutama di bidang kewirausahaan dan prestasi olahraga. Namun, terdapat pula tantangan dalam menjaga konsistensi keterlibatan organisasi pemuda. Untuk ke depannya, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk menjaga momentum positif dan mengatasi tantangan yang ada, sehingga dapat menciptakan generasi muda

yang lebih aktif, kreatif, dan berprestasi.

**Tabel 2. 48 Indikator dan Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase lembaga pemuda yang aktif | % | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 60,00 | 33,00 |
| Jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional | Orang | 7,00 | 16,00 | 17,00 | 13,00 | 15,00 |
| Persentase Cabor yang berprestasi | % | 5,00 | 30,00 | 80,00 | 23,00 | 51,00 |
| Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun | Unit | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| Persentase Atlet yang berprestasi | % | 21,00 | 47,0 | 78,00 | 78,00 | 68,00 |
| Persentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik | % | 100 | 100,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Persentase pembina dan pelatih yang bersertifikat | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase Prestasi Keolahragaan Kabupaten Lebak | % | - | 79,00 | 20,00 | 10,00 | - |
| Persentase Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda | % | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 16,58 | 10,00 | 17,50 | 17,00 | 0,07 |
| Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 0,23 | 0,22 | 0,27 | - | 0,24 |
| Peningkatan prestasi olahraga | Medali | 10,00 | 79,00 | 11,00 | 18,00 | 123,00 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2024*

13. Statistik

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, selain data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan juga data-data sektoral yang berasal dari masing-masing organisasi perangkat daerah yang dijadikan

sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka mendukung pembangunan daerah perlunya sinergi dan kerja sama antara BPS sebagai penyedia data dasar dan organisasi perangkat daerah sebagai penyedia statistik sektoral terus ditingkatkan sebagaimana amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 2. 49 Indikator dan Realisasi Capaian Urusan Statistik 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| cakupan ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah | Persen | 100,00 | - | - | - | 100,00 |
| Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang lengkap | Persen | 100,00 | - | - | - | 100,00 |
| Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024,*

14. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Lebak adalah salah satu fungsi penting yang berkaitan dengan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di era digital saat ini, persandian menjadi krusial untuk melindungi data dan komunikasi rahasia dari akses tidak sah. Di Kabupaten Lebak, urusan persandian umumnya berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lebak, atau unit kerja lain yang memiliki fungsi terkait keamanan siber dan informasi. Penyelenggaraan pengamanan

persandian merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dinyatakan dalam Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu layanan persandian perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama melindungi informasi dari potensi ancaman sehingga pelayanan publik akan menghasilkan data yang otentik, utuh, terbebas dari kebocoran dan kerusakan informasi. Persandian meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi, terutama yang bersifat sensitif atau rahasia negara/pemerintahan daerah. Pencapaian urusan Persandian di kabupaten lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 untuk realisasi kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 50 Indikator dan Realisasi Capaian Urusan Persandian 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persen | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah | Persen | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2024*

15. Kebudayaan

Urusan kebudayaan di Kabupaten Lebak memiliki fokus utamanya adalah melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal serta warisan budaya Lebak agar tetap lestari dan dikenal luas. Meskipun memiliki kekayaan budaya yang besar, Kabupaten Lebak juga menghadapi beberapa tantangan dalam urusan kebudayaan seperti Arus modernisasi dan globalisasi dapat mengikis minat generasi muda terhadap seni dan budaya

tradisional, Alokasi anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia yang spesialis di bidang kebudayaan seringkali menjadi kendala, Sulitnya mencari penerus untuk beberapa jenis seni atau tradisi yang langka karena kurangnya minat dari generasi muda, dan Ketersediaan fasilitas seperti gedung kesenian atau museum yang representatif masih perlu terus dikembangkan. Kabupaten Lebak terus berupaya mengatasi tantangan ini dengan strategi yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, mulai dari komunitas adat, seniman, budayawan, hingga masyarakat luas, demi menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya Lebak agar terus hidup dan menjadi kebanggaan daerah. Pencapaian urusan kebudayaan di kabupaten lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 untuk realisasi kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 51 Indikator dan Realisasi Capaian Urusan Kebudayaan 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| persentase pelestarian adat budaya daerah | Persen | 17,64 | 17,64 | 26,92 | 76,92 | 4,21 |
| Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase cagar budaya yang dilestarikan | Persen | 22,05 | 1,59 | 6.35 | 41,94 | 45,16 |
| Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang diakui secara nasional | Unit | - | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| Persentase kesenian tradisional yang mendapat pengakuan nasional | Persen | - | 5,00 | 15,00 | 31,58 | 31,58 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Museum | Poin | - | 89,00 | 89,50 | 83,05 | 84,17 |
| Persentase sejarah yang dipublikasikan | Persen | - | - | 15,00 | 40,00 | 40,00 |
| Persentase budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional | Persen | - | 30,00 | 33,33 | 28,95 | 39,47 |
| Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | - | 1,56 | 3,13 | 41,94 | 45,16 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

16. Perpustakaan

Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka (UU No.43/2007). Meningkatkan literasi masyarakat merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan perpustakaan mulai dari tingkat pusat, daerah hingga pojok baca di ruang publik.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui Bidang Perpustakaan /Perpustakaan Kabupaten Saidja – Adinda mulai tahun 2017 menjadi pembina penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Lebak dengan tujuan meningkatkan literasi masyarakat melalui indikator PMBM (Persentase Minat Baca Masyarakat). Sasaran binaan untuk indikator ini adalah Perpustakaan Kabupaten SAIDJAH-ADINDA, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Ponpes, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat, dan perpustakaan khusus yang ada di OPD atau kecamatan. Capaian dan target PMBM periode 2020 s.d 2024 Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 52 Indikator dan realisasi Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024**

| No | URAIAN | TARGET PNBM | | | | | CAPAIAN PMBM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pengunjung | 447 | 504 | 561 | 619 | 619 | 447.018 | 503.636 | 561.003 | 619.128 | 511.553 |
| 2 | Penduduk | 1,064,329 | 1,071,566 | 1,078,853 | 1,086,189 | | 1.064.329 | 1.071.566 | 1.078.853 | 1.086.189 | |
| 3 | PMBM (%) | 42 | 47 | 52 | 57 | 57 | 42 | 47 | 52 | 57 | 55 |
| | **Uraian Data Pengunjung** | | | | | | | | | | |
| 1 | Perpus Saijah Adinda | 68 | 77 | 86 | 95 | 94725 | 68.392 | 77.055 | 85.832 | 94.725 | 33.256 |
| 2 | Desa/Kel/TBM | 35 | 39 | 43 | 48 | 0 | 34.575 | 38.954 | 43.391 | 47.887 | 33.186 |
| 3 | Sekolah/Madrasah | 343 | 386 | 430 | 475 | 443.186 | 342.797 | 386.214 | 430.207 | 474.779 | 443.186 |
| 4 | Perguruan Tinggi | 983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 983 | 1.107 | 1.234 | 1.361 | 1.541 |
| 5 | Perpustakaan Khusus | 271 | 305 | 340 | 376 | 380 | 271 | 305 | 340 | 376 | 384 |
| | **Jumlah** | **1,066,517.78** | **1,072,924.97** | **1,080,366.67** | **1,087,859.88** | **96,225.19** | **2,188.78** | **1,358.97** | **1,513.67** | **1,670.88** | **1,461.72** |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kabupaten Lebak, angka minat baca masyarakat Kabupaten Lebak mencapai angka 42% pada tahun 2020, namun kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2025 menjadi 55 % (lima puluh lima persen) dari jumlah penduduk 1,3 (satu koma tiga) juta jiwa penduduk Kabupaten Lebak. (Perbup No 1 Tahun 2022). Dengan capaian tersebut, Peningkatan persentase minat budaya baca di masyarakat menunjukkan kesadaran literasi yang semakin berkembang. Hal ini mencerminkan dampak positif dari berbagai upaya, termasuk program pemerintah, inisiatif lembaga pendidikan, dan kemudahan akses informasi digital. Perkembangan teknologi, seperti e-book dan platform online, telah memperluas jangkauan bacaan dan memudahkan akses bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pengaruh budaya populer juga berkontribusi pada tren positif ini. Pencapaian urusan kebudayaan di kabupaten

lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 untuk realisasi kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 53 Indikator dan Realisasi Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah pengunjung perpustakaan | Orang | 17.213,00 | 4.928,00 | 35.679,00 | 52.628,00 | 33.256,00 |
| Jumlah Perpustakaan yang dibina | Unit | 8,00 | 312,00 | 269,00 | 0,00 | 113,00 |
| Persentase Minat Baca Masyarakat (PMBM) | Persen | 52,00 | 20,00 | 52,00 | 53,00 | 55,00 |
| Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Persen | 45,73 | 58,77 | 45,73 | 62,85 | 79,43 |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Persen | 3,47 | 8,90 | 3,47 | 50,26 | 5,18 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

17. Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang kearsipan dengan menggunakan instrumen yang terukur untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan kearsipan dimana nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen dalam penilaian reformasi birokrasi. Upaya peningkatan kinerja pengelolaan kearsipan harus sampai pada tingkat tercipta ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan. kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Tabel 2. 54 Indikator dan Realisasi Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai perbup | Buah | 57 | 58 | 58 | 61 | 61 |
| Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara | Dokumen | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan | Persen | 20 | 53 | 65 | 75 | 75 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

Upaya pengelolaan arsip secara tertib dan terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi melalui penerapan e-goverment. Tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP dan reformasi birokrasi. Capaian indikator kinerja kearsipan di Kabupaten Lebak tersaji pada tabel berikut ini :

Arsip yang menjadi sasaran pengelolaan secara baku adalah Arsip Dinamis di Unit Kearsipan Tingkat II (OPD/Kecamatan/Desa/Kel), dan Arsip Statis yang berada di Unit Kearsipan Tingkat I (Depo Arsip Diskerpus).

Pencapaian urusan kearsipan menunjukkan prestasi yang sangat baik dengan lebih dari 85% indikator kinerja mencapai target capaian. Lebih jauh, dalam periode 2019-2024, jumlah OPD yang mampu melakukan pengarsipan sesuai dengan Perbup melebihi target capaian.

## C. Urusan Pilihan

### 1. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan sektor strategis di Kabupaten Lebak, mengingat wilayah ini memiliki garis pantai yang cukup panjang di pesisir selatan Jawa. Sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan pangan. Pengelolaan urusan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga konservasi. Kelautan dan perikanan di kabupaten lebak memiliki beberapa potensi diantaranya potensi dan sumber daya seperti potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, potensi sumber daya non ikan dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat terus berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian urusan kelautan dan perikanan di kabupaten lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 untuk realisasi kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 55 Indikator dan Realisasi Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase peningkatan produksi ikan tangkap | Persen | - | 0,71 | 1,18 | 2,25 | 2,51 |
| Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya | Persen | - | 1,30 | 2,95 | 1,02 | 2,93 |
| Persentase Ketaatan Usaha Perikanan | Persen | - | - | - | 100 | 100 |
| Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan | Persen | - | - | - | - | 0,5 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

2. Pariwisata

Urusan pariwisata di Kabupaten Lebak memegang peranan penting dalam mendorong perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya serta lingkungan, memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar untuk dikembangkan seperti wisata bahari, wisata alam, wisata budaya dan sejarah dan agrowisata. Tantangan yang dihadapi seperti Aksesibilitas menuju beberapa destinasi masih memerlukan perbaikan, Branding pariwisata masih perlu ditingkatkan agar lebih dikenal luas, Peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata, termasuk kemampuan berbahasa asing dan pelayanan, Masalah sampah di beberapa destinasi wisata menjadi perhatian yang perlu diatasi dan Menarik investasi swasta ke sektor pariwisata memerlukan kemudahan perizinan dan insentif yang menarik dengan peluangnya seperti Posisi geografis Lebak yang relatif dekat dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menjadikan pasar potensial untuk wisata akhir pekan, keunikan budaya baduy menjadi daya tarik pariwisata minat khusus yang kuat. Dengan pengembangan yang terencana, dukungan investasi, dan partisipasi aktif masyarakat, urusan pariwisata memiliki prospek cerah untuk menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah. Pencapaian urusan pariwisata di kabupaten lebak berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 untuk realisasi kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2. 56 Indikator dan Realisasi Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024**

| Indikator Program | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan | Hari | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,14 |

| Indikator Program | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Pertumbuhan Jasa Usaha Pariwisata | Persen | 10 | 8 | 118 | 627,65 | 12,22 |
| Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi | Persen | | 10 | 36 | 20 | 32,14 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

3. Pertanian

Urusan pertanian merupakan sektor fundamental dan tulang punggung perekonomian. Sebagai daerah agraris, sebagian besar mata pencarian penduduk Lebak bergantung pada sektor pertanian dalam arti luas, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan. Dengan fokus pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sektor yang mempunyai potensi dan komoditas unggulan yang meliputi tanaman pangan (padi, jagung ubi kayu dan palawija), holtikultura (sayuran dan buah-buahan), perkebunan (sawit, karet, kopi dan cengkeh), dengan dukungan program yang tepat sasaran urusan pertanian diharapkan dapat terus berkembang, memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. berikut ini adalah capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2020 – 2024.

**Tabel 2. 57 Indikator dan Realisasi Urusan Pertanian Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Produksi Pertanian : | Ton | 1.000.679 | 929.330 | 930.662 | 963.424 | 1.168.454 |
| | Padi | Ton | 707.252 | 678.188 | 642.433 | 611.305 | 674.369 |
| | Palawija | Ton | 45.403 | 28.846 | 37.728 | 24.149 | 29.702 |
| | Hortikultura | Ton | 217.312 | 194.807 | 191.813 | 261.852 | 370.105 |
| | Perkebunan | Ton | 30.712 | 27.489 | 58.689 | 66.119 | 94.278 |
| 2 | Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik | Persen | 76 | 82 | 86,71 | 87,3 | 89,78 |
| 3 | Persentase Penurunan Luas Lahan Terdampak | Persen | - | 27,43 | 87,1 | 53,76 | 89,68 |
| 4 | Persentase Usaha Pertanian yang Berizin | Persen | - | 23,21 | 33,26 | 38,67 | 46,45 |
| 5 | Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani : | Kelompok | 39 | 74 | 43 | 68 | 128 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

4. Perdagangan

Urusan perdagangan memegang peran krusial dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, memfasilitasi distribusi barang dan jasa, serta menjaga stabilitas harga. Sektor ini menjadi jembatan antara produsen (terutama dari sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil) dengan konsumen, baik di dalam maupun di luar Lebak dan berupaya menciptakan iklim

perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak kegiatannya mencakup Pengaturan dan Pengawasan Pasar, Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Pokok, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri (Ekspor/Impor), Perlindungan Konsumen dan Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dengan optimalisasi dan sinergi dengan pelaku usaha, dan pemanfaatan teknologi, urusan perdagangan di Kabupaten Lebak dapat terus berkembang, tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah. Berikut ini adalah capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2020 – 2024.

**Tabel 2. 58 Indikator dan Realisasi Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa | Persen | - | 88,5 | 95 | 99 | 100 |
| Persentase pertumbuhan sektor perdagangan | Persen | -5,61 | 2,34 | 3,73 | 4,07 | 5,75 |
| Persentase terjaganya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok | Persen | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Persentase UTTP Bertanda Tera Sah | Persen | 85,29 | 100 | - | - | - |
| Indeks Tertib Ukur | Point | - | 55,63 | 59,52 | 68 | 72 |
| Persentase proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik | Persen | - | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 90 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

5. Perindustrian

Urusan perindustrian di Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam diversifikasi ekonomi daerah, menciptakan nilai tambah bagi produk lokal, dan menyediakan lapangan kerja. Meskipun belum menjadi kawasan industri besar seperti beberapa daerah di Banten utara, Lebak memiliki potensi pengembangan industri, khususnya yang berbasis pada sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Lebak, melalui dinas terkait, berupaya mendorong pertumbuhan sektor ini.

Industri di Kabupaten Lebak umumnya didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sebagian besar berbasis pada pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan. Potensi industri di kabupaten lebak antara lain Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Industri Kerajinan berbasis pada potensi lokal, Industri Pangan dan Minuman, Industri Kayu dan Mebel, dan Industri Kreatif. Dengan fokus pada pengembangan IKM yang berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas produk, dan fasilitasi akses pasar, urusan perindustrian di Kabupaten Lebak diharapkan dapat terus tumbuh, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2020 – 2024.

**Tabel 2. 59 Indikator dan Realisasi Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | Persen | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Persentase Perusahaan Berijin | Persen | - | 90,00 | 95,00 | 99,00 | 100,00 |
| Produktivitas Sektor Industri | Persen | 54,60 | 52,16 | 57,90 | 60,00 | 60,00 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Pertumbuhan Industri | Persen | 3,14 | 3,95 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

## D. Fokus Layanan Fungsi Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaa Pembangunan

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap berdasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian indikator kinerja dan target kinerja menjadi ukuran utama yang sangat penting. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 telah ditetapkan ukuran-ukuran keberhasilan dari pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan. Tabel 2.… berikut ini adalah capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2020 – 2024.

**Tabel 2. 60 Indikator dan Realisasi Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah | Mou | 13 | 21 | - | - | - |
| Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah | Persen | 100 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Indikator Kinerja | Satuan | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

2. Keuangan

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial Masyarakat. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan cara analisis rasio keuangan daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Tabel berikut ini adalah capaian kinerja keuangan Kabupaten Lebak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 2. 61 Indikator dan Realisasi Urusan Keuangan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase pertumbuhan pajak daerah | Persen | 15,38 | 24,01 | 15,14 | 25,66 | -15,78 |
| Indeks Kapasitas Fiskal Daerah | Persen | 1,502 | 1,494 | 1,34 | 1,036 | 0,908 |
| Persentase terpenuhinya kebutuhan Tenaga Ahli Perpajakan | Persen | 33,33 | 33,33 | 20 | - | - |
| Persentase ketaatan wajib pajak daerah | Persen | 83,51 | 92,09 | 93,15 | 68,07 | 68,76 |

| Indikator Kinerja | Satuan | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| OPINI BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perUndang - undangan | Persen | 80 | 82 | 86 | 86 | 86 |
| Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah | Persen | 93,5 | 94 | 93,71 | 98,08 | 98,21 |
| Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perUndang - undangan | Persen | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, terindentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak | Persen | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Jumlah dokumen standar satuan harga yang di susun | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opini BPK terhadap LKPD | Opini | *WTP* | *WTP* | *WTP* | *WTP* | *WTP* |
| Rasio Kemandirian Daerah | Persen | 24,42 | 20,88 | 20,5 | 25,97 | 13,69 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani. Kapasitas aparatur pemerintahan juga menjadi indikator yang sangat penting dengan kompleksitas kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu upaya peningkatan kapasitas bagi aparatur di daerah menjadi faktor penentu pelaksanaan kapabilitas organisasi pemerintah daerah.

Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah

yang profesional, berintegritas tinggi. Tabel 2.60 berikut ini adalah capaian kinerja pada tahun 2020 – 2024.

**Tabel 2. 62 Indikator dan Realisasi Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja | Satuan | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial | Persen | 63,65 | 63,65 | 68.61 | 73,9 | 85,82 |
| persentase jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perUndang - undangan | Persen | 90 | 96,27 | 99 | 89,93 | 88,98 |
| Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis | Persen | 16,28 | 16,28 | - | 1,56 | 17,57 |
| Persentase pelayanan administrasi Kepegawaian yang memenuhi syarat dan diselesaikan tepat waktu | Persen | 78 | 82 | 95 | 100 | 100 |
| Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin berat | Persen | 0,16 | 0,2 | 0,8 | 0,05 | 0,07 |
| Persentase ASN Yang memenuhi standar kompetensi jabatan | Persen | 39,96 | 2,02 | 68,61 | - | - |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | *Point* | 75 | 77,17 | 73,69 | 71,65 | - |
| IKM | *Point* | 73,13 | 73,13 | 80,19 | 83,31 | 83,28 |

*Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*

4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, meliputi perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan, pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi.

Penelitian dan pengembangan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah mencakup bidang-bidang berikut: Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Ekonomi; Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana; serta Inovasi dan Teknologi.

Sejak tahun 2019, urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Lebak telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan. Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencapai 100%. Beberapa dokumen kajian yang telah dihasilkan meliputi kajian kualitas pelayanan publik melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penyusunan Direktori Inovasi Daerah. Praktik ini terus berlanjut setiap tahun, dengan survei IKM dan pembaruan Direktori Inovasi Daerah dilakukan secara rutin untuk memastikan kualitas pelayanan dan inovasi tetap terjaga.

Dokumen hasil kajian tersebut telah dimanfaatkan sepenuhnya dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit-unit penyelenggara pelayanan

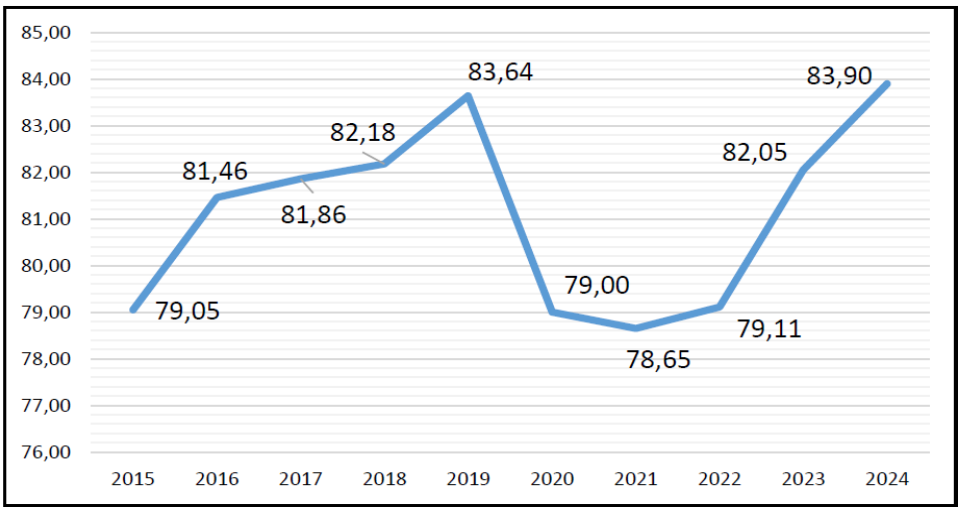


**Grafik 2. 76 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024**

*Sumber: Bapperida, 2025*

Grafik di atas menggambarkan dinamika perkembangan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lebak sejak tahun 2015 hingga 2024. Sebagaimana dijelaskan di atas, penurunan IKM yang cukup signifikan pada tahun 2020-2021 di samping terdampak oleh sejumlah penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus mengutamakan protokol kesehatan, juga disebabkan secara langsung oleh perubahan cakupan survei yang pada tahun 2020-2021 yang mencakup hampir seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Lebak, yang tidak hanya mencakup seluruh organisasi perangkat daerah namun juga mencakup seluruh pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di tingkat kecamatan, serta sejumlah UPTD di lingkungan sejumlah dinas teknis yang jumlahnya meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akibat positifnya adalah bahwa IKM tahun 2021-2024 jauh lebih merepresentasi realitas kepuasan masyarakat, meski secara kuantitatif mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Sebagai contoh, bila pada tahun-tahun sebelumnya (2019 ke belakang) IKM pada tingkat perangkat daerah hanya diwakili oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yaitu: Disdukcapil, DPMPTSP, serta Badan Pendapatan Daerah; pada survei tahun 2021 agregasi IKM pada tingkat perangkat daerah telah direpresentasi seluruhnya oleh sebanyak 32 (tigapuluh dua) satuan organisasi setingkat perangkat daerah, termasuk sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD; belum termasuk 28 (duapuluh delapan) kecamatan yang menjadi pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sedangkan pada level Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), survei IKM Tahun 2020 baru dapat menjangkau 12 (duabelas) Puskesmas dari total 42 (empatpuluh dua) Puskesmas yang ada di Kabupaten Lebak, pada survei tahun 2021-2024 telah mampu menjangkau ke-43 Puskesmas dimaksud (Tahun 2024 terdapat penambahan 1 Puskesmas yaitu PKM Gunung Kendeng). Demikian pula survei tahun 2022 sampai 2024 yang obyeknya bertambah dengan 5 (lima) kelurahan yang ada di kawasan perkotaan Rangkasbitung/ ibukota kabupaten.

Pada tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lebak bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), mencerminkan penekanan yang lebih kuat pada riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan. Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan guna mendukung kebijakan berbasis data.

Kabupaten Lebak juga mencatat peningkatan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan kemajuan dalam produktivitas dan daya saing wilayah. IDSD, yang diukur oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.

**Tabel 2. 63 Realisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| NO | Kab/Kota | NILAI IDSD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Provinsi Banten | 3,4263 | 3.4610 | 3.62 | 3.60 | 3.87 |
| 2. | Kota Cilegon | 0,9847 | 1.3109 | 3.17 | 3.26 | 3.60 |
| 3. | Kota Serang | - | 2.8966 | - | - | 3.85 |
| 4. | Kota Tangerang | 2,5940 | 2.9291 | - | - | 4.16 |
| 5. | Kota Tangerang Selatan | - | 1.6739 | - | 3.81 | 4.31 |
| **6.** | **Kabupaten Lebak** | **1,0946** | **2.6117** | **2.51** | **2.99** | **3.45** |
| 7. | Kabupaten Pandeglang | 0,7553 | 1.9811 | 2.54 | 2.88 | 3.19 |
| 8. | Kabupaten Serang | 0,3233 | 1.5459 | 2.93 | 3.14 | 3.68 |
| 9. | Kabupaten Tangerang | - | 2.6612 | 3.45 | 3.58 | 3.70 |

*Sumber: Bapperida Kabupaten Lebak, 2025*

5. Pengawasan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia memang merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem otonomi daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pengawasan internal yang efektif akan mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya daerah, meminimalisir penyimpangan, dan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai landasan fundamental. SPIP adalah sistem pengendalian yang harus ada di setiap Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah (Instansi Pemerintah) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks penguatan SPIP, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi sangat krusial dan tak terpisahkan. Di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern oleh APIP.

**Tabel 2. 64 Sumber: Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan DPMD Kabupaten Lebak, 2025**

| No | Indikator Kinerja Pengawasan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase audit, revieu dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan standar AAIPI | 93 | 85,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan | 100 | 30,30 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Persentase SDM dan sarana pengawasan yang tersedia | 80 | 85,00 | 61 | 95,00 | 65,00 |
| 5 | Persentase akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan | - | 87,03 | 90 | 95,00 | 95,00 |
| 6 | Persentase Perumusan Kebijakan, Asistensi dan Pendampingan | - | 77,14 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | - | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| 8 | Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

*Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, 2025*

Secara keseluruhan, kinerja pengawasan menunjukkan perbaikan dan stabilitas yang kuat pada banyak area, terutama dalam pemenuhan standar audit, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Stagnasi pencapaian maturitas

SPIP dan Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Lebak yang berada pada Level 3 dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak belum mencapai kemajuan signifikan menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi. Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten di seluruh perangkat daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kurangnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia serta sarana pengawasan yang memadai juga memerlukan perhatian dalam menjaga kualitas pengawasan.

6. Administrasi Pemerintahan

Secara keseluruhan, Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menunjukkan kinerja yang solid dalam banyak aspek, mencerminkan komitmen kuat terhadap efisiensi, transparansi, dan kepatuhan regulasi. Hal ini terlihat jelas dari tingginya persentase penggunaan e-procurement, pemenuhan layanan dasar yang konsisten, serta implementasi kebijakan tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berjalan efektif. Kepatuhan regulasi desa juga menunjukkan kualitas yang baik, dan meskipun terdapat fluktuasi pada jumlah rancangan Peraturan Daerah (Perda), sistem legislasi dan regulasi secara umum tetap berjalan efektif. Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat pun menunjukkan perbaikan signifikan, terutama di tahun-tahun terakhir, yang mengindikasikan komitmen terhadap pemerintahan yang partisipatif.

Namun, di balik capaian tersebut, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian serius dan upaya perbaikan berkelanjutan. Tantangan utama yang perlu menjadi fokus adalah peningkatan indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Lebak dimana indikator ini menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Meskipun masih tergolong baik, penurunan ini memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah dan strategi peningkatan kualitas pelayanan kepada wakil rakyat.

Selain itu, konsistensi dalam kecepatan fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat juga menjadi krusial. Meskipun rata-rata waktu fasilitasi telah mencapai 100% pada tahun 2023-2024, indikator ini menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam di tahun-tahun sebelumnya. Tantangan dalam menghasilkan peraturan perUndang - undangan daerah yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

Dengan memfokuskan perbaikan pada peningkatan kepuasan anggota DPRD dan menjaga konsistensi dalam kecepatan fasilitasi aspirasi masyarakat, serta memperhatikan kualitas peraturan perUndang - undangan daerah yang dihasilkan, Kabupaten Lebak diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya secara menyeluruh, melengkapi keberhasilan yang telah dicapai dalam efisiensi, transparansi, dan kepatuhan regulasi.

**Tabel 2. 65 Realisasi Indikator Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Rencana Kerja dan Rancangan Peraturan PerUndang - undangan (Satuan: Perda) | 5 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| 2 | Jumlah Jenis Administrasi Daerah yang Berjalan dengan Baik (Satuan: Dokumen) | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 3 | Indek Kepuasan Pelayanan kepada Anggota DPRD Kab. Lebak (Satuan: %) | 97,31 | 84 | 83 | 86 | 82,82 |

| No | Indikator | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Persentase Terpenuhinya Layanan Kedinasan KDH/WKDH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Cakupan Penetapan Perda dan Perbup (Satuan: %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase penggunaan *E-Procurenment* terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa | 95,52 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Rata-rata Waktu Fasilitasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi (Satuan: %) | 85,58 | 50 | 70,66 | 100 | 100 |
| 8 | Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Bupati | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berjalan dengan Baik | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu | - | - | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan DPMD Kabupaten Lebak, 2025*

### 2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerapkan 6 (enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang

ditujukan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima. Pemerintah Kabupaten Lebak menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Laporan pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial dilaporkan sebagai berikut.

#### 2.1.5.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan data Rapor Pendidikan Kabupaten Lebak. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dengan nilai 60,82 yang dikategorikan sebagai "TUNTAS MUDA" mengindikasikan pencapaian yang cukup baik dalam hal kualitas pelayanan pendidikan. Nilai ini mencerminkan tingkat pemenuhan standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan, mencakup berbagai aspek penting seperti kualitas pembelajaran, lingkungan sekolah, partisipasi masyarakat, dan kualitas pendidik. Meskipun angka tersebut menunjukkan kemajuan, predikat "TUNTAS MUDA" menggarisbawahi bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan.

Hal ini mengisyaratkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, serta memastikan akses dan kesetaraan bagi seluruh siswa. Dengan demikian, indeks ini menjadi alat penting untuk monitoring, evaluasi, dan perencanaan perbaikan dalam sistem pendidikan.

Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pencapaian SPM Urusan Pendidikan yang berhasil dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 66 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Jumlah Sasaran | Target Pelayanan | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Dasar | 59.052 | 52.627 | 89,12 | |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | 250.607 | 239.162 | 95,43 | |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | 7.012 | 6.532 | 93,15 | |

*Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan Kab. Lebak*

### 2.1.5.2. Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Pelayanan Kesehatan Orang

dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

2. Hasil Capaian

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan yang berhasil dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 67 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Capaian | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 25.465 | 19.924 | 78,24 | |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 25.465 | 20.089 | 78,89 | |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 24.637 | 20.489 | 83,16 | |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 122.097 | 117.587 | 96,31 | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 226.610 | 226.610 | 100,00 | |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 802.021 | 423.434 | 52,80 | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 135.779 | 127.471 | 93,88 | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 179.050 | 70.212 | 39,21 | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 17.991 | 10.510 | 58,42 | |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 1.884 | 1.769 | 93,90 | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 29.344 | 24.827 | 84,61 | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Capaian | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency virus | 27.381 | 25.450 | 92,95 | |

*sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kab. Lebak*

### 2.1.5.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - Hari dan Penyedia Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

2. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum yang berhasil dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 68 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Capaian | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - Hari | 9.129 | 9.129 | 100,00 |
| 2 | Penyedia Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | 2.865 | 2.865 | 100,00 |

*Sumber : Laporan SPM Dinas PUPR Kab. Lebak*

### 2.1.5.4. Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
   59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Hasil Capaian
   Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat yang berhasil dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 69 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Capaian | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten | 0 | 0 | 0,00 | |

*Sumber : Laporan SPM Dinas Perkim Kab. Lebak*

### 2.1.5.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2. Hasil Capaian

   Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang berhasil dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 70 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Capaian | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 113 | 113 | 100,00 | |
| 2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | 56 | 56 | 100,00 | |
| 3 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 56 | 56 | 100,00 | |
| 4 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1 | 1 | 100,00 | |
| 5 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi | 80 | 67 | 83,75 | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Capaian | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| | korban kebakaran | | | | |

*Sumber : Laporan SPM Satpol PP dan BPBD Kab. Lebak*

## A. Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti serta Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.

2. Hasil Capaian

   Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial yang berhasil dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebagai berikut: No Tabel 3.14 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Jenis Pelayanan Dasar 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Target Capaian %.

**Tabel 2. 71 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Capaian | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | 20 | 20 | 100,00 | |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | 25 | 25 | 100,00 | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Target | Capaian | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | 20 | 20 | 100,00 | |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti serta Perlindungan | 8 | 8 | 100,00 | |
| 5 | Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana | 603 | 603 | 100,00 | |

*Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Kab. Lebak*

### 2.1.6. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerjasama daerah terdiri: (1) Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD; dan (2) Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK.

KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Sedangkan KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar

Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Sedangkan Kerja Sama Sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Berikut beberapa contoh Kerjasama dalam pemanfaatan barang milik daerah :

**Tabel 2. 72 Daftar Barang Milik Daerah yang Menghasilkan Pendapatan / Pemanfaatan Tahun 2025**

| NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/ PEMANFAATAN | PIHAK KETIGA | JENIS ASET | PENGELOLA BARANG/ PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG | LUAS | | NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN | JANGKA WAKTU | NILAI PEMANFAATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BMD | YG DISEWA | | | |
| | **SEWA** | | | | | | | | |
| 1 | Sewa Tanah untuk Tower PT. XL Axiata | PT. XL Axiata (Direktur Lestari Prihandayani) | Tanah | Pengelola Barang | | 230 M2 | Nomor : 032/1222 - BPKAD/2020 Nomor : 182/XL-LM/X/2020 Tanggal : 12 Oktober 2022 | 5 Tahun ( 2020 s.d. 2025 ) | 100,000,000.00 |
| 2 | Sewa Tanah untuk Burger Bangor | an. Asra Yulia | Tanah | Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung | 1.753 M2 | 24 M2 | Nomor : 032/1140 - BKAD/2023 Tanggal : 2 Nopember 2023 | 2 Tahun ( 2023 s.d. 2025 ) | 20,000,000.00 |
| 3 | Sewa Tanah untuk Tambak Udang PT. Radja Udang Malingping | PT. Radja Udang Malingping (Direktur an. Anton). | Tanah | Sekretariat Daerah | 35.900 M2 | 35.900 M2 | Nomor: 032/75-BKAD/2024 Nomor: 001/RUM-PMD/II/2024 Tanggal : 23 Pebruari 2024 | 5 Tahun ( 2023 s.d. 2028 ) | 380,446,000.00 |
| 4 | Sewa tanah eks BRI Cikotok untuk kios serba ada | An. Tati Hartati | Tanah | Pengelola Barang | 440 M2 | 440 M2 | Nomor : 032/288 - BKAD/2024 Tanggal : 6 Juni 2024 | 5 Tahun ( 2024 s.d. 2029 ) | 10,990,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sewa Tanah eks. Pasar Maja untuk Perparkiran/Penitipan Kendaraan | PT. Arga Pratama (Direktur an. H. Emus Mustagfirin) | Tanah | Pengelola Barang | 2.650 M2 | 2.650 M2 | Nomor: 032/775-BKAD/2024 dan Nomor: 011/ARG.PRTM/2024, Tanggal: 2 September 2024 | 5 Tahun ( 02 April 2024 s.d. 02 April 2029 ) | 1,000,000,000.00 |
| 6 | Sewa Sebagian Tanah Blok B Terminal Sunan Kalijaga untuk Tempat Tinggal/Usaha | an. 11 Orang Penyewa | Tanah | Dinas Perhubungan | 6.316 M2 | 1.757 M2 | Nomor: ..... Tanggal: ..... | 5 Tahun ( ..... s.d. ..... ) | 152,640,000.00 |

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak secara aktif mengelola dan memanfaatkan Barang Milik Daerah melalui skema sewa untuk berbagai tujuan komersial, seperti pendirian tower telekomunikasi, kios, hingga tempat parkir. Pemanfaatan ini tidak hanya mengoptimalkan fungsi aset, tetapi juga berkontribusi pada pendapatan daerah. Jangka waktu sewa yang rata-rata 5 tahun menunjukkan adanya perjanjian jangka menengah yang memberikan kepastian bagi pihak ketiga dan stabilitas pendapatan bagi pemerintah daerah.

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

### 2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota

1) Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN

Arah kebijakan wilayah Jawa bagian selatan Provinsi Banten, Kabupaten Lebak yaitu Kawasan Percepatan Pemerataan Pembangunan & Pengentasan Kemiskinan Pesisir Selatan Banten. Arah pembangunan nasional di Kabupaten Lebak yaitu sebagai berikut

a) Kawasan swasembada pangan, air dan energi;
b) Kawasan percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah selatan;
c) Kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dan daerah rawan bencana

Pemetaan arah pembangunan nasional disajikan pada Gambar di bawah ini.

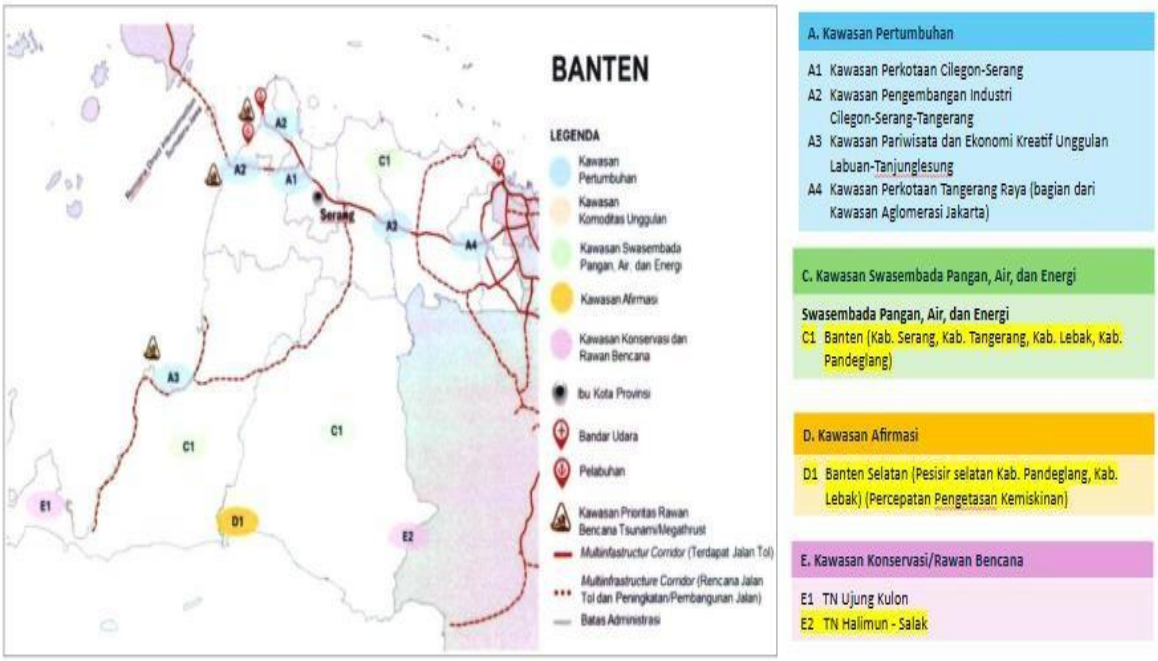


**Gambar 2. 17 Pemetaan Arah Pembangunan Nasional di Kabupaten Lebak**

Sumber : Bapperida 2024

Prioritas pembangunan RPJMN di Kabupaten Lebak sebagai berikut :

a) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cisadane, D. I. Ciujung, D. I. Cidurian Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah

b) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)

c) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)

d) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura

e) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura

f) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS

Cidurian–Cimanceuri, DAS Cibungur–Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh–Cipuntenageung–Cibama

g) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian–Cimanceuri, DAS Cibungur–Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh–Cipuntenageung–Cibama

h) Pembangunan Bendungan Karian

i) Pembangunan SPAM Regional Karian Barat

j) Pembangunan SPAM Regional Karian Timur.

k) Pengembangan PSDKU sesuai keunggulan wilayah (indikasi lokasi: Malingping)

l) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Malingping (PHTC)

m) Peningkatan 6A pariwisata di Sawarna dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy (Baduy Luar).

n) Peningkatan/pembangunan jalan ruas Panimbang–Muarabinuangeun, Muarabinuangeun–Malingping–Bayah–Sawarna–Palabuhanratu, Cikulur–Ciboleger

o) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, terutama di RSUD Malingping (PHTC)

p) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis. Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).

2) Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBD Provinsi Banten di Kabupaten Lebak dapat diuraikan sebagai berikut:

*1. Jalan Poros Desa*

- Pembangunan dan peningkatan jalan poros desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa.
- Peningkatan kualitas jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

*2. Pelabuhan Perikanan Binuangeun*

- Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan Binuangeun untuk meningkatkan kegiatan perikanan dan perekonomian masyarakat.
- Peningkatan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bongkar muat ikan.

*3. Kawasan Penyangga Baduy*

- Pembangunan dan pengembangan kawasan penyangga Baduy untuk meningkatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan.
- Peningkatan fasilitas untuk mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar.

*4. RSUD Malingping*

- Pembangunan dan pengembangan RSUD Malingping untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- Peningkatan fasilitas dan peralatan medis untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan.

*5. RSUD Cilograng*

- Pembangunan dan pengembangan RSUD Cilograng untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- Peningkatan fasilitas dan peralatan medis untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan.

### 2.1.8. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang - undang Pemerintahan Daerah.

#### 2.1.8.1. Perkembangan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebak

Penyertaan modal daerah tidak semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan dari sisi analisis keuangan (finasial) semata, akan tetapi berkaitan dengan hal lain yang lebih luas, yaitu sisi analisis ekonomi. Jika dari sudut pandang finansial, maka penyertaan modal pemerintah daerah ditunjukkan untuk mendapatkan *return to investment* berupa berapa besar tambahan PAD yang bisa dihasilkan dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (penyertaan modal) kepada BUMD. Sedangkan dari sisi analisis ekonomi, penyertaan modal pemerintah daerah ditujukan lebih luas lagi – tidak semata-mata untuk mendapatkan tambahan PAD – seperti bagaimana penyertaan modal tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan juga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Penyertaan modal daerah juga bisa dijadikan sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

seperti adanya peningkatan pada pendapatan masyarakat, stabilitas harga atau juga skala pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak juga memiliki konsep yang sama, bahwa Pemerintah daerah memberikan investasi kepada BUMD yang ada di Kabupaten Lebak dengan tujuan tidak semata-mata untuk meningkatkan PAD yang bisa dihasilkan oleh BUMD, akan tetapi juga diharapkan mampu memberikan sumbangan

terhadap perekonomian di Kabupaten Lebak, seperti menjadi salah satu pendorong untuk peningkatan perekonomian daerah berkontribusi memberikan nilai tambah pada sektor- sektor perekonomian seperti sektor air bersih, peningkatan UMKM dan lain sebagainya. Selain itu pemberian penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD juga diharapkan mampu memberikan perluasan terhadap lapangan pekerjaan melalui peningkatan jumlah unit usaha, dan juga perkembangan skala usaha akibat kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan yang berbentuk BUMD. Penyertaan modal pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang bisa dibeli oleh masyarakat, dan juga peningkatan pendapatan masyarakat yang terkait langsung dengan perusahaan - perusahaan tersebut.

Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan realisasi penyertaan modal daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak kepada BUMD yang ada, berdasarkan data realisasi APBD tahun 2019 – 2023 beserta jumlah deviden yang mampu diberikan oleh BUMD tersebut kepada pemerintah daerah. Terlihat bahwa dari sisi finansial jumlah penyertaan modal daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah deviden yang dibagikan oleh BUMD kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa memang benar bahwa pemberian dana penyertaan

modal daerah kepada BUMD tidak semata- mata ditunjukkan untuk kepentingan keuangan (finansial semata). Karena jika dilihat dari sisi finansial pada tahun 2019, dari sebesar Rp. 5 Milyar dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Kepada 2 BUMD – BJB dan BPR – hanya menghasilkan deviden sebesar Rp. 4,63 Milyar saja, atau terjadi gap sebesar Rp. 0,37 Milyar antara besarnya dana yang dikeluarkan dibandingkan dengan besarnya dana yang didapatkan oleh pemerintah daerah.

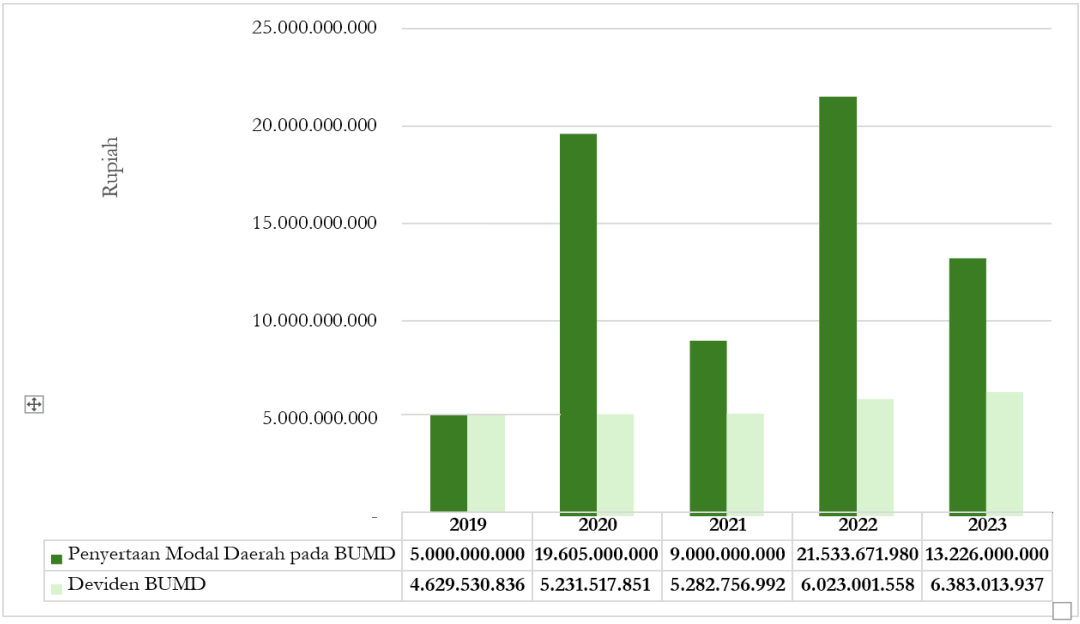


| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 5.000.000.000 | 19.605.000.000 | 9.000.000.000 | 21.533.671.980 | 13.226.000.000 |
| Deviden BUMD | 4.629.530.836 | 5.231.517.851 | 5.282.756.992 | 6.023.001.558 | 6.383.013.937 |

Sumber: Realisasi APBD Kabupaten Lebak, 2019 – 2023.

**Grafik 2. 77 Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah dan Deviden Yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Lebak 2019-2023**

Kabupaten Lebak memberikan dana penyertaan modal daerah untuk BUMD sebesar Rp. 19,6 Milyar (sebagian besar untuk keperluan PDAM sebesar Rp. 15 Milyar, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3,1 untuk BPR dan Rp. 1,5 untuk LKM), akan tetapi di tahun 2020 jumlah deviden yang didapat oleh pemerintah

daerah hanya sebesar Rp. 5,23 Milyar saja (yaitu sebesar Rp. 1,7 Milyar dari BPR dan LKM, sedangkan sisanya dari PT. Bank BJB). PDAM yang mendapatkan dana penyertaan modal daerah yang besar belum bisa memberikan deviden, akan tetapi dengan adanya investasi pemerintah di PDAM pada tahun 2020, maka pertumbuhan ekonomi sektor pengadaan air, sampah dan limbah memiliki pertumbuhan sebesar 3,87% jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak yang pada tahun 2020 terkontraksi sebesar - 0,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa PDAM masih memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Lebak, meskipun secara finansial investasi pemerintah di PDAM belum memberikan deviden. Begitu juga dengan penyertaan modal pemerintah di tahun 2022, besarnya investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah ke BUMN sebesar Rp. 21,53 Milyar hanya memberikan deviden kepada peningkatan PAD sebesar Rp. 6,02 Milyar saja.

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa program penyertaan modal daerah kepada BUMD secara finansial masih belum memberikan keuntungan kepada pemerintah, akan tetapi dari sisi analisis ekonomi paling tidak pemberian tambahan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak minimal mampu menjaga perekonomian Kabupaten Lebak – seperti pertumbuhan sektor air bersih yang meningkat di tahun 2023 sebesar 5,15% setelah beberapa tahun sebelumnya terkontraksi (karena sektor air bersih tidak mendapatkan tambahan modal pemerintah) atau juga pertumbuhan sektor jasa keuangan yang bisa tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lebak di tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 2,82% dan 3,41%. Dua contoh ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan finansial saja akan tetapi jauh lebih besar lagi adalah bahwa program ini mampu memberikan sumbangan yang positif dari sisi perekonomian daerah.

### 2.1.8.2. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak

#### a. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lebak Sejahtera (Perseroda)

PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda) merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Bertempat Di Jl. Holland Sukadiningrat No.

6 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda) Mempunyai 1 Kantor Pusat & 2 Kantor Cabang.

- Kantor Pusat Rangkasbitung
- Kantor Cabang Cipanas
- Kantor Cabang Malingping

**Gambar 2. 18 Komposisi Kepemilikan Saham di PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda) Tahun 2024**

Sumber: Situs Resmi PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda), 2024.

#### b. PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rangkasbitung

Merdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19

/POJK.05/2021 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro menerangkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut mengenai LKM:

**Fungsi Lembaga Keuangan Mikro:**

- Memberikan Pinjaman Modal Usaha: Salah satu fungsi utama LKM adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, LKM membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan usaha mereka.
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat, membantu peningkatan produktivitas ekonomi, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.

**Manfaat Lembaga Keuangan Mikro:**

- Inklusi Keuangan: LKM memperluas aksesibilitas pembiayaan mikro bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Ini membantu meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
- Dukungan UMKM: LKM membantu perputaran roda ekonomi UMKM dengan memberikan akses keuangan yang mudah dan terjangkau.

**c. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak**

Penguatan landasan hukum kepengusahaan PDAM Kabupaten Lebak atas perundangan terdahulu diperkuat dengan dengan diterbitkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 66, Seri-D), guna menyempurnakan Tupoksi PDAM Kab.Lebak untuk masa yang akan datang dengan tugas menyelenggarakan penyediaan

dan pengelolaan air minum yang terjamin kualitas, kuantitas dan kontinyuitasnya sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Manual, serta menerapkan fungsi sebagai pelaku pembangunan dalam sektor air bersih untuk mencapai target pencapaian cakupan air bersih setinggi-tingginya.

Sampai tahun 2023 Perumdam Tirta Kalimaya belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk seluruh desa di Kabupaten Lebak. Masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM yaitu kecamatan Panggarangan, Cihara, Cigemblong, Banjarsari, Cileles, Gunungkencana, Bojongmanik, Cirinten, Sobang, Cipanas, Lebakgedong, Cikulur, Curugbitung.

**Tabel 2. 73 Cakupan Layanan Pelanggan Perumdam Tirta Kalimaya Tahun 2019-2022**

| Uraian | Sat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Sambungan Rumah (SR) | Unit | 30.682 | 30.651 | 33.456 | 31.147 |
| Jumlah Penduduk | | | | | |
| - Administratif | Jiwa | 1.340.820 | 1.386.793 | 1.407.857 | 1.459.108 |
| - Area Pelayanan PDAM | Jiwa | 940.170 | 1.332.370 | 947.787 | 984.842 |
| - Terlayani PDAM | Jiwa | 164.083 | 132.436 | 138.268 | 143.686 |
| Cakupan Pelayanan | | | | | |
| Wilayah Administratif | % | 12,24 | 9,55 | 9,82 | 9,85 |
| Wilayah Teknis PDAM | % | 17,45 | 9,94 | 14,59 | 14,59 |

Sumber: Situs resmi Perumdam Tirta Kalimaya, 2024.

**d. PD. Lebak Niaga**

Tempat dan kedudukan PD. Lebak Niaga adalah Jl. Abdi Negara No. 1 Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan jumlah penyertaan modal diawal pendirian dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak sebesar 14 miliar Rupiah

Berdasarkan keputusan Bupati Lebak Nomor: 500/Kep. 152-Ekon/2024 Tentang Penetapan Jenis-Jenis Bidang Usaha Perusahaan Daerah Lebak Niaga Kabupaten Lebak yang ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 24 April 2024 oleh Pj. Bupati Lebak, dimana jenis-jenis bidang usaha PD. Lebak Niaga, terdiri dari:

1. Bidang Usaha Pertanian dan Pangan memiliki Kegiatan usaha yang meliputi:
   a. Budidaya dan Pengolahan Produksi Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
   b. Perdagangan Komoditas hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan seperti Gabah, Ikan, Bawang, Cabai, Daging, dan Telur;
   c. Perdagangan Komoditas Pangan Utama seperti Beras, Minyak Goreng, dan Gula Pasir.
2. Bidang Usaha Industri memiliki Kegiatan usaha yang meliputi Pengolahan hasil sumber daya alam potensial Kabupaten Lebak skala Industri Kecil dan Menengah

## 2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola keuangan daerah yang baik, politik anggaran yang relevan dengan permasalahan daerah, aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas, serta sistem pengawasan yang efektif. Kelima elemen ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi, karena tanpa salah satu dari elemen tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya akan berjalan biasa saja, tetapi juga berpotensi terdistorsi dari tujuannya. Oleh karena itu, hakikat otonomi daerah adalah memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada daerah untuk mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang dimilikinya, agar dapat dioptimalkan sebagai sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kapasitas, kreativitas, dan inovasi pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah menjadi kata kunci yang menentukan ketercapaian esensi dan filosofi otonomi daerah ini, yang dalam konteks keuangan daerah direpresentasikan oleh tingkat kemandirian daerah. Dengan tata kelola keuangan yang baik, serta didukung oleh aparatur yang profesional dan berintegritas serta pengawasan yang efektif, deviasi dapat dicegah sejak dini sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dioptimalkan. Tercapainya opini wajar. tanpa pengecualian, tingginya hasil, dampak, dan manfaat dari dana yang dianggarkan, serta maksimalnya eliminasi korupsi, merupakan indikator praktis yang berkorelasi dengan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Di sisi lain, politik anggaran yang relevan dengan permasalahan daerah berkontribusi besar terhadap terciptanya iklim kondusif, tidak hanya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemenuhan kebutuhan anggaran yang memadai, serta efektivitas kebijakan anggaran. Politik anggaran bahkan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kualitas dan relevansi kebijakan pendapatan daerah, serta keseluruhan proses tata

kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga efektivitas implementasi dan evaluasinya.

Sub bab ini akan mengelaborasi sejumlah aspek pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, yang mencakup kebijakan pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; pendapatan transfer; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah pada beberapa tahun terakhir akan dilakukan untuk mengukur efektivitas capaian, derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan PAD, kontribusi PAD, dan elastisitas PAD. Bab ini juga akan memuat penjelasan mengenai arah kebijakan belanja daerah, baik yang terkait dengan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, maupun belanja transfer. Pada bagian akhir, akan dipaparkan arah kebijakan pembiayaan daerah, yaitu kebijakan yang akan diambil untuk menutup potensi defisit anggaran atau memanfaatkan peluang surplus anggaran yang mungkin terjadi pada tahun anggaran yang direncanakan.

### 2.2.1. Realisasi APBD Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024

### A. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Lebak Berdasarkan tabel realisasi pendapatan dibawah menunjukkan bahwa selama periode 2020-2024 Pendapatan Daerah secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, total realisasi Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp. 2.547.087.060.222,00 meningkat menjadi Rp 2.907.692.014.875,00 pada tahun 2024. Peningkatan pendapatan daerah ini didorong oleh peningkatan beberapa jenis pendapatan, di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp 377.504.404.119,00 pada tahun 2020 menjadi Rp

417.281.984.162,92 pada tahun 2024 walaupun angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan realisasi pajak daerah yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada sisi pendapatan transfer Kabupaten Lebak masih bergantung pada pendapatan yang bersumber dari transfer ke daerah, Beberapa komponen Transfer Pemerintah Pusat yang signifikan adalah Dana Perimbangan (terdiri dari DBH, DAU, dan Dana Transfer Khusus) serta Dana Desa. Pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 2.052.543.314.743,00 dan meningkat menjadi Rp 2.482.549.777.816,00 pada tahun 2024. Di dalam Pendapatan Transfer, Transfer Pemerintah Pusat memiliki kontribusi yang dominan dan juga menunjukkan tingkat kemandirian daerah dan indeks fiskal daerah yang masih rendah.

Sedangkan dari sisi Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp669.359.626.947,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 24.868.905.855,00 pada tahun 2024 hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam penyajian struktur APBD pada tahun 2020 dan 2024 serta adanya penurunan nilai hibah. Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 74 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020**

| No | Jenis Penerimaan | Realisasi Tahun 2020 |
|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN | 2.547.087.060.222,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 377.504.404.119,00 |
| | a. Pajak Daerah | 119.245.503.318,00 |
| | b. Retribusi Daerah | 15.470.158.630,00 |
| | c. Hasil Peng.Kekayaan Daerah Yg dipisahkan | 5.231.517.851,00 |
| | d. Lain-Lain PAD yang syah. | 237.557.224.320,00 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1.500.223.029.156,00 |
| | a. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak | 56.961.954.242,00 |
| | b. Dana Alokasi Umum | 1.014.388.131.000,00 |
| | c. Dana Alokasi Khusus | 428.872.943.914,00 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 669.359.626.947,00 |
| | a. Pendapatan Hibah | 212.031.149.044,00 |
| | b. Dana Darurat | 0,00 |

| No | Jenis Penerimaan | Realisasi Tahun 2020 |
|---|---|---|
| | c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 76.626.548.903,00 |
| | d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 315.701.929.000,00 |
| | e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya | 65.000.000.000,00 |
| | f. Pendapatan Lainnya | 0,00 |

Sumber :Bapenda Kabupaten Lebak 2020

**Tabel 2. 75 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024**

| KODE REKENING | Uraian | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | **2.643.719.867.031,00** | **2.649.013.037.867,00** | **2.682.005.744.337,00** | **2.907.692.014.875,00** |
| **4.1** | **PENDAPARAN ASLI DAERAH** | **385.144.019.220,00** | **421.548.555.369,00** | **434.292.734.733,00** | **417.281.984.162,92** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 156.917.968.633,00 | 169.689.458.362,00 | 169.434.953.282,00 | 146.344.492.995,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 15.138.012.060,00 | 15.504.908.239,00 | 16.650.117.972,00 | 250.029.934.895,00 |
| 4.1.03 | Hasil Peng.Kekayaan Daerah Yg dipisahkan | 5.282.756.992,00 | 6.023.001.558,00 | 6.383.013.937,00 | 6.012.475.617,00 |
| 4.1.04 | Lain-Lain PAD yang sah. | 207.805.281.535,00 | 230.331.187.210,00 | 241.824.649.542,00 | 14.895.080.655,92 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.052.543.314.743,00** | **2.158.693.587.281,00** | **2.229.554.953.182,00** | **2.482.549.777.816,00** |
| 4.2.01 | **Transfer Pemerintah Pusat** | **1.844.377.914.056,00** | **1.950.928.497.808,00** | **2.026.231.093.778,00** | **2.273.013.906.176,00** |
| 4.2.01.1 | Dana Perimbangan | 1.534.182.905.056,00 | 1.626.084.052.808,00 | 1.671.591.059.778,00 | 1.897.379.485.176,00 |
| 4.2.01.1.1 | Dana Transfer Umum | 1.100.232.526.085,00 | 1.080.995.554.365,00 | 1.153.289.474.872,00 | 1.252.197.551.908,00 |
| 4.2.01.1.1.1 | DBH | 87.218.798.085,00 | 68.342.267.365,00 | 84.452.937.252,00 | 93.883.081.000,00 |
| 4.2.01.1.1.2 | DAU | 1.013.013.728.000,00 | 1.012.653.287.000,00 | 1.068.836.537.620,00 | 1.158.314.470.908,00 |
| 4.2.01.1.2 | Dana Transfer Khusus | 433.950.378.971,00 | 545.088.498.443,00 | 518.301.584.906,00 | 645.181.933.268,00 |
| 4.2.01.1.2.1 | DAK Fisik | 154.561.604.359,00 | 138.553.034.962,00 | 50.208.365.734,00 | 147.338.695.149,00 |
| 4.2.01.1.2.2 | DAK Non Fisik | 279.388.774.612,00 | 406.535.463.481,00 | 468.093.219.172,00 | 497.843.238.119,00 |
| 4.2.01.2 | Dana Insentif Daerah | 18.211.284.000,00 | 8.666.591.000,00 | - | 18.835.238.000,00 |
| 4.2.01.5 | Dana Desa | 291.983.725.000,00 | 316.177.854.000,00 | 354.640.034.000 | 356.799.183.000,00 |
| **4.2.02** | **Transfer Antar Daerah** | **208.165.400.687,00** | **207.765.089.473,00** | **203.323.859.404,00** | **209.535.871.640,00** |

| KODE REKENING | Uraian | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.02.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 183.165.400.687,00 | 189.149.346.473,00 | 173.323.859.404,00 | 191.225.694.268,00 |
| 4.2.02.2 | Bantuan Keuangan | 25.000.000.000,00 | 18.615.743.000,00 | 30.000.000.000,00 | 18.310.177.372,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **206.032.533.068,00** | **68.770.895.217,00** | **18.158.056.422,00** | **24.868.905.855,00** |
| **4.3.01** | **Pendapatan Hibah** | **41.771.463.068,00** | **68.770.895.217,00** | **18.147.038.422,00** | **24.760.061.697,00** |
| **3.b** | **Dana darurat** | | | | |
| 3.c | Lain-lain pendapatan dengan ketentuan | | | | |
| | peraturan perUndang - undangan | | | | |
| **4.3.03** | **Lain-lain pendapatan dengan ketentuan peraturan perUndang - undangan** | **164.261.070.000,00** | | **11.018.000,00** | **108.844.158,00** |
| 4.3.03.01 | Lain-lain Pendapatan | 164.261.070.000,00 | | 11.018.000,00 | 108.844.158,00 |
| 4.3.03.01.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 164.261.070.000,00 | | | |

Sumber :Bapenda Kabupaten Lebak, 2021-2024

## B. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Lebak menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Berdasarkan tabel realisasi belanja, secara umum terlihat adanya tren peningkatan belanja daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Belanja Operasi merupakan jenis belanja terbesar dari total belanja serta menunjukkan peningkatan belanja yang signifikan. Dari realisasi belanja sebesar Rp 1.915.912.290.235,00 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 2.209.255.346.211,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh Belanja Pegawai yang secara konsisten menjadi komponen belanja terbesar dalam Belanja Operasi. Realisasi belanja pegawai meningkat dari Rp 963.316.354.842,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 1.309.315.335.469,00 pada tahun 2024.

Belanja Modal juga menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sampai 2022, namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan pada jenis belanja tanah, belanja peralatan dan mesin serta Belanja Modal jalan, Jaringan dan irigasi. Belanja Tidak Terduga menunjukkan fluktuasi, dengan realisasi belanja tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 35.437.053.462,00 dan menurun menjadi Rp. 18.659.748.315,00 pada tahun 2024. Belanja Transfer juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Realisasinya belanja transfer meningkat dari Rp 421.278.285.118,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 502.697.058.335,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Secara keseluruhan, tren belanja daerah menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, didominasi oleh Belanja Operasi, terutama Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur belanja daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 76 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020**

| No. | Jenis Belanja | Realisasi Tahun 2020 |
|---|---|---|
| **2.** | **BELANJA** | **2.497.002.959.536,30** |
| **2.1** | **Belanja Tidak langsung** | **1.565.685.628.604,50** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 963.316.354.842,00 |
| 2.1.2 | Belanja Hibah | 41.446.073.010,00 |
| 2.1.3 | Belanja Bantuan Sosial | 5.429.922.053,50 |
| 2.1.4 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan | 13.846.174.700,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Keuangan | 395.680.771.200,00 |
| 2.1.6 | Belanja Tidak Terduga | 145.966.332.799,00 |
| | | |
| **2.2** | **Belanja Langsung** | **931.317.330.931,80** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 26.019.766.817,00 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 677.038.051.905,00 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 228.259.512.209,80 |

Sumber :Bapenda Kabupaten Lebak 2020

***Tabel 2. 77 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024***

| Kode Rekening | Jenis Belanja | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **BELANJA** | **2.643.466.844.441,00** | **2.635.141.572.169,00** | **2.827.845.303.048,00** | **2.997.766.957.963,00** |
| **5.1** | **Belanja Operasi** | 1.915.912.290.235,00 | **1.843.761.196.393,00** | **2.009.251.166.015,00** | **2.209.255.346.211,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 992.375.160.333,00 | 983.500.359.419,00 | 1.051.185.379.520,00 | 1.309.315.335.469,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 806.590.537.922,00 | 742.150.882.390,00 | 776.555.222.501,00 | 691.816.671.889,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | | | | |

| Kode Rekening | Jenis Belanja | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 114.176.801.020,00 | 111.416.054.584,00 | 173.631.578.994,00 | 200.056.338.853,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 2.769.790.960,00 | 6.693.900.000,00 | 7.878.985.000,00 | 8.067.000.000,00 |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **281.854.752.747,00** | **315.867.289.170,00** | **292.177.677.283,00** | **267.154.805.102,00** |
| 5.2.01 | Belanja Tanah | 6.027.811.248,00 | 353.232.800,00 | 680.667.000,00 | 223.607.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin | 55.248.493.450,00 | 75.937.521.561,00 | 52.953.751.979,00 | 54.290.255.942,00 |
| 5.2.03 | Belanja Gedung dan Bangunan | 27.007.051.046,00 | 51.445.537.672,00 | 120.796.480.879,00 | 130.234.495.550,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal jalan, Jaringan dan irigasi | 187.474.208.785,00 | 184.041.300.510,00 | 111.582.764.128,00 | 72.723.089.637,00 |
| 5.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 6.097.188.218,00 | 4.089.696.627,00 | 6.164.013.297,00 | 9.683.356.973,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal asset Lainnya | | | | |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **24.421.516.341,00** | **22.726.824.433,00** | **35.437.025.460,00** | **18.659.748.315,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 24.421.516.341,00 | 22.726.824.433,00 | 35.437.025.460,00 | 18.659.748.315,00 |

Sumber :Bapenda Kabupaten Lebak, 2021-2024

## C. Kinerja Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah selama periode 2020-2024 didominasi oleh Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Tahun 2020 Penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp 266.491.203.436,40 yang seluruhnya berasal dari Penggunaan SILPA tahun sebelumnya. Tahun 2023 terjadi perubahan signifikan dengan adanya Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp 28.000.000.000,00. Meskipun demikian, kontribusi terbesar masih berasal dari Penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 240.366.512.733,00, sehingga total penerimaan pembiayaan menjadi Rp 268.366.512.733,00. Tahun 2024 Realisasi Penerimaan pembiayaan menurun menjadi Rp 121.322.091.364,00. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada Penggunaan SILPA tahun sebelumnya yang sebesar Rp 74.322.091.364,00 dan terdapat Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp 47.000.000.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah selama periode 2020-2024 digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan. Tahun 2020: Pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp 5.000.000.000,00 yang seluruhnya dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Tahun 2022Terjadi peningkatan signifikan dalam pengeluaran pembiayaan menjadi Rp 61.533.671.980,00. Alokasi terbesar adalah untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 40.000.000.000,00, sementara Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 21.533.671.980,00. Tahun 2023 Pengeluaran pembiayaan menurun menjadi Rp 48.226.000.000,00, dengan alokasi untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 35.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 13.226.000.000,00. Tahun 2024 realisasi Pengeluaran pembiayaan hanya dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan tidak ada alokasi untuk Pembentukan Dana Cadangan pada tahun ini dikarenakan Pemilihan umun sudah dilaksanakan pada tahun

berjalan. Perkembangan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 78 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024**

| No | Jenis Pembiayaan | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **PEMBIAYAAN** | | | | | |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **266.491.203.436,40** | **296.833.959.123,05** | **288.036.007.803,15** | **268.366.512.733,00** | **121.322.091.364,00** |
| 3.1.1 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 28.000.000.000,00 | 47.000.000.000,00 |
| 3.1.2 | Penggunaan SILPA tahun sebelumnya | 266.491.203.436,40 | 296.833.959.123,05 | 288.036.007.803,15 | 240.366.512.733,00 | 74.322.091.364,00 |
| 3.1.3 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **5.000.000.000,00** | **9.000.000.000,00** | **61.533.671.980,00** | **48.226.000.000,00** | **2.688.500.000,00** |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 40.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 0 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 21.533.671.980,00 | 13.226.000.000,00 | 2.688.500.000,00 |
| | | | | | | |
| | **Jumlah Pembiayaan Netto** | **246.886.203.436,40** | **287.838.844.123,05** | **226.502.335.823,15** | **220.140.512.733,00** | **118.633.591.364,00** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)** | **296.970.304.122,10** | **288.086.891.713,05** | **240.373.801.521,15** | **74.300.954.022,00** | 45.567.301.234,92 |

Sumber :Bapenda Kabupaten Lebak, 2021-2024

## D. Evaluasi Terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan manajerial pemerintah daerah, yang didukung oleh kapasitas sumber daya aparatur, sistem kelembagaan, serta kemampuan keuangan daerah. Dalam konteks negara kita, kemandirian daerah yang diamanatkan oleh otonomi daerah sering kali diidentikkan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan. Mengingat pentingnya peran keuangan daerah dalam era otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan yang mendasarinya menjadi faktor strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan kajian terhadap kinerja keuangan daerah dari masa lalu hingga saat ini, termasuk kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mendasarinya. Evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan mendasari penetapan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

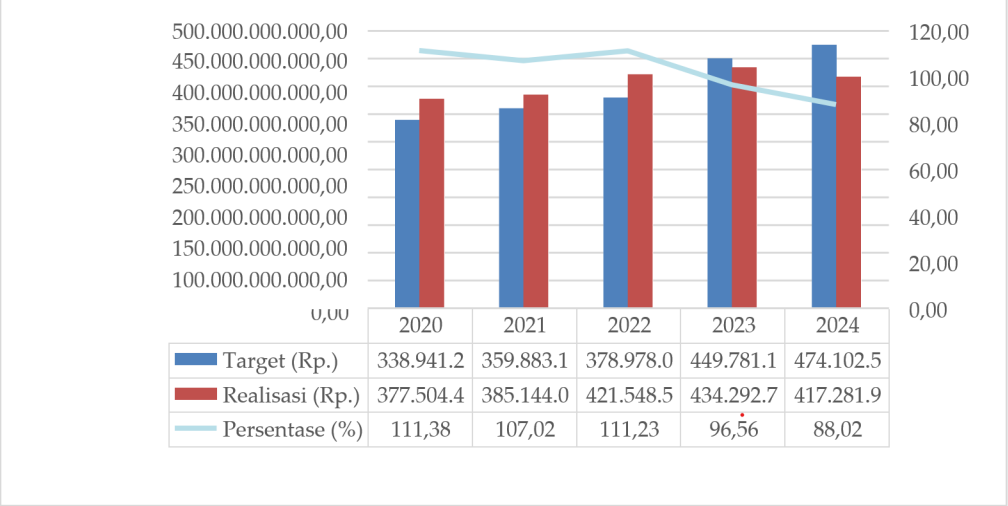


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp.) | 338.941.2 | 359.883.1 | 378.978.0 | 449.781.1 | 474.102.5 |
| Realisasi (Rp.) | 377.504.4 | 385.144.0 | 421.548.5 | 434.292.7 | 417.281.9 |
| Persentase (%) | 111,38 | 107,02 | 111,23 | 96,56 | 88,02 |

**Grafik 2. 78 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber : Pengolahan Data LRA 2020-2024.*

Selain mengevaluasi kinerja pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), penilaian juga dilakukan untuk memahami derajat desentralisasi fiskal, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah. Hal ini diukur dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sebaliknya, semakin rendah kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin rendah pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lebak pada periode 2016-2020 masih terkategori rendah. Kategori ini diproyeksikan akan tetap bertahan hingga tahun 2024, mengingat rasio PAD terhadap total pendapatan daerah masih kurang dari 20%, meskipun trennya diperkirakan terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa meski ada perbaikan, kemampuan fiskal daerah dalam mendukung otonomi masih membutuhkan penguatan lebih lanjut.

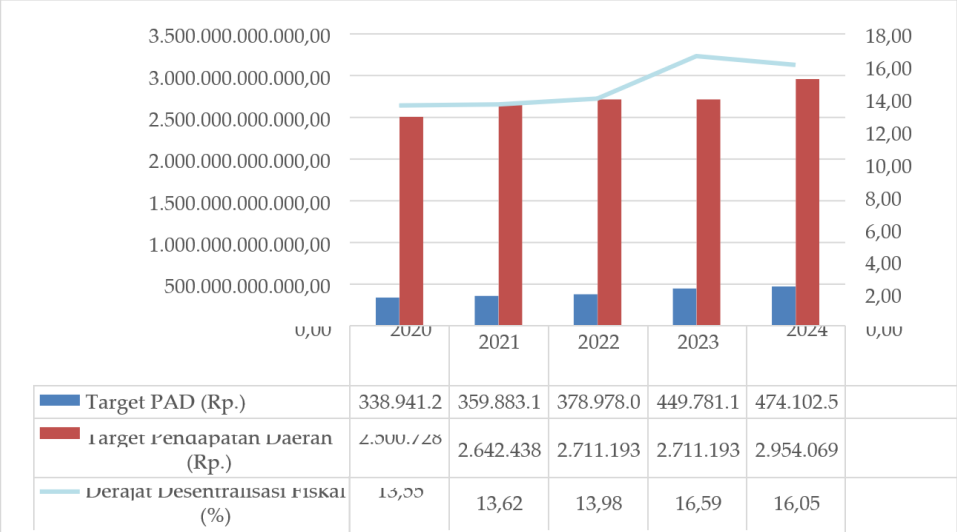


**Grafik 2. 79 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

*Sumber:Pengolahan Data LRA 2020-2024*

## E. Neraca Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca Perangkat Daerah disajikan mengenai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Properti Investasi, Kewajiban, dan Ekuitas. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Properti Investasi. Aset Pemerintah Kabupaten Lebak selama periode tahun 2020-2024 mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,54%. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain, aset lancar rata-rata turun sebesar 14,95%, investasi jangka pendek menurun sebesar 1,67%, Aset tetap terjadi peningkatan sebesar 0,66%, Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar 16,89%.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rata-rata Pertumbuhan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak selama periode tahun 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 14,74%, kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak selama periode 2020-2024 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,67%.

Rasio keuangan yang dapat dianalisis berdasarkan data neraca tahun 2020-2024 menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Cara menghitung Rasio likuiditas dapat menggunakan rumus current rasio dan quick rasio. Dan untuk menghitung Rasio Solvabilitas dapat menggunakan rumus debt to asset rasio dan debt to equity rasio.

Current Rasio atau Rasio Lancar yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Rasio lancar dapat di hitung dari nilai aset lancar di bagi nilai kewajiban pada satu periode pembukuan keuangan. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2020 sebesar 20,72%, tahun 2021 sebesar 26,08%, tahun 2022 sebesar 12,39%, tahun 2023 sebesar 9,74% dan Tahun 2024 sebesar 4,64%.

Quick Rasio yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Quick Rasio dapat di hitung dari nilai jumlah aset di bagi nilai kewajiban pada satu periode pembukuan keuangan. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2020 sebesar 194,77%, tahun 2021 sebesar 261,51%, tahun 2022 sebesar 153,17%, tahun 2023 sebesar 203,10% dan Tahun 2024 sebesar 95,33%.

Debt to asset rasio atau Rasio total hutang terhadap total aset, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Debt to asset rasio Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2020 sebesar 0,01%, tahun

2021 sebesar 0,00%, tahun 2022 sebesar 0,01%, tahun 2023 sebesar 0,00% dan Tahun 2024 sebesar 0,01%.

Debt to equity rasio atau Rasio total hutang terhadap ekuitas, digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Debt to equity rasio Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2020 sebesar 0,01%, tahun 2021 sebesar 0,00%, tahun 2022 sebesar 0,01%, tahun 2023 sebesar 0,00% dan Tahun 2024 sebesar 0,01%.

Adapun neraca daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 79 Neraca Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ASET | | | | | |
| | A. Aset Lancar | 483.343.612.665,29 | 462.947.877.466,17 | 380.502.099.212,93 | 216.787.031.179,64 | 215.101.419.937,53 |
| | B. Investasi Jangka Panjang | 137.052.851.697,52 | 145.017.632.190,31 | 167.551.694.501,84 | 126.501.030.077,59 | 125.986.334.533,31 |
| | C. Aset Tetap | 3.898.888.002.753,23 | 4.011.821.945.086,88 | 4.075.449.643.245,21 | 4.079.391.419.207,60 | 4.029.576.352.632,36 |
| | D. Dana Cadangan | | | 40.529.708.612,00 | 47.000.000.000,00 | - |
| | E. Aset Lainnya | 23.412.930.566,45 | 22.500.122.646,50 | 39.975.555.611,44 | 51.387.632.726,56 | 51.089.934.220,71 |
| | F. Properti Investasi | | | | | 189.935.000,00 |
| | **JUMLAH ASET** | **4.542.697.397.682,49** | **4.642.287.577.389,86** | **4.704.008.701.183,42** | **4.521.067.113.191,38** | **4.421.943.976.323,91** |
| 2 | KEWAJIBAN | | | | | |
| | A. Kewajiban Jangka Pendek | 23.323.757.087,67 | 17.748.517.199,09 | 30.710.704.114,55 | 22.260.721.485,25 | 46.385.312.774,65 |
| | B. Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | - | |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN** | **23.323.757.087,67** | **17.748.517.199,09** | **30.710.704.114,55** | **22.260.721.485,25** | **46.385.312.774,65** |
| 3 | EKUITAS | | | | | |
| | Ekuitas | 4.519.373.640.594,82 | 4.624.539.060.190,77 | 4.673.297.997.068,87 | 4.498.806.391.706,13 | 4.375.558.663.549,26 |
| | **JUMLAH EKUITAS** | **4.519.373.640.594,82** | **4.624.539.060.190,77** | **4.673.297.997.068,87** | **4.498.806.391.706,13** | **4.375.558.663.549,26** |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **4.542.697.397.682,49** | **4.642.287.577.389,86** | **4.704.008.701.183,42** | **4.521.067.113.191,38** | **4.421.943.976.323,91** |
| | | | | | | |
| | Current Rasio (Aset Lancar/Kewajiban) | 20,72 | 26,08 | 12,39 | 9,74 | 4,64 |

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quick Rasio (Aset/Kewajiban) | 194,77 | 261,56 | 153,17 | 203,10 | 95,33 |
| | debt to asset rasio | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | Debt to equity rasio | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | rata-rata Pertumbuhan (aset lancar) | (14,95) | | | | |
| | Rata-rata Pertumbuhan (Investasi Jangka Panjang) | (1,67) | | | | |
| | Rata-rata Pertumbuhan (aset tetap) | 0,66 | | | | |
| | Rata-rata Pertumbuhan (aset lainnya) | 16,89 | | | | |
| | **Rata-rata Pertumbuhan (jumlah aset)** | **(0,54)** | | | | |

*Sumber : Data Diolah Bapperida 2025*

### 2.2.2. Proyeksi APBD Kabupaten Lebak Tahun 2026-2030

Proyeksi APBD Kabupaten Lebak dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian nasional dan daerah berada pada pertumbuhan yang positif dengan laju inflasi pada angka yang dapat dikendalikan
2. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan seiring dengan perbaikan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja pengelolaan BUMD, peningkatan pengelolaan aset daerah dan peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.
3. Pendapatan transfer pemerintah pusat cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak tahun 2026-2030 tercantum pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2. 80 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026-2030**

| Kode Rekening | Uraian | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | **2,873,207,029,490** | **2,969,435,903,716** | **2,977,019,148,954** | **2,983,731,072,000** | **3,022,079,637,891** |
| **4.1** | **PENDAPARAN ASLI DAERAH** | **544,169,326,150** | **568,962,299,292** | **594,891,678,257** | **624,155,308,338** | **652,947,146,766** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 266,813,241,339 | 285,490,168,233 | 305,474,480,010.00 | 326,857,693,610 | 349,737,732,163 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 269,405,573,545 | 275,303,276,910 | 281,030,491,578.00 | 288,603,735,357 | 294,240,076,133 |
| 4.1.03 | Hasil Peng.Kekayaan Daerah Yg dipisahkan | 6,850,511,266 | 7,068,854,149 | 7,286,706,669.00 | 7,593,879,371 | 7,869,338,470 |
| 4.1.04 | Lain-Lain PAD yang sah. | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2,323,552,703,340** | **2,332,673,604,424** | **2,341,927,470,697** | **2,351,325,763,662** | **2,360,882,491,125** |
| 4.2.01 | **Transfer Pemerintah Pusat** | **2,202,830,908,690** | **2,211,720,275,614** | **2,220,698,536,207** | **2,229,766,579,406** | **2,238,925,303,037** |
| 4.2.01.1 | Dana Perimbangan | 1,855,425,265,690 | 1,864,314,632,614 | 1,873,292,893,207 | 1,882,360,936,406 | 1,891,519,660,037 |
| 4.2.01.1.1 | Dana Transfer Umum | 1,266,763,707,690 | 1,275,653,074,614 | 1,284,631,335,207 | 1,293,699,378,406 | 1,302,858,102,037 |
| 4.2.01.1.1.1 | DBH | 95,903,520,300 | 95,903,520,300 | 95,903,520,300.00 | 95,903,520,300 | 95,903,520,300 |
| 4.2.01.1.1.2 | DAU | 1,170,860,187,390 | 1,179,749,554,314 | 1,188,727,814,907.04 | 1,197,795,858,106 | 1,206,954,581,737 |
| 4.2.01.1.2 | Dana Transfer Khusus | 588,661,558,000 | 588,661,558,000 | 588,661,558,000 | 588,661,558,000 | 588,661,558,000 |
| 4.2.01.1.2.1 | DAK Fisik | 32,571,965,000 | 32,571,965,000 | 32,571,965,000.00 | 32,571,965,000 | 32,571,965,000 |

| Kode Rekening | Uraian | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.01.1.2.2 | DAK Non Fisik | 556,089,593,000 | 556,089,593,000 | 556,089,593,000.00 | 556,089,593,000 | 556,089,593,000 |
| 4.2.01.06 | Insentif Fiskal | - | - | - | - | - |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 347,405,643,000 | 347,405,643,000 | 347,405,643,000.00 | 347,405,643,000 | 347,405,643,000 |
| **4.2.02** | **Transfer Antar Daerah** | **120,721,794,650** | **120,953,328,810** | **121,228,934,490** | **121,559,184,256** | **121,957,188,088** |
| 4.2.02.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 120,721,794,650 | 120,953,328,810 | 121,228,934,490.36 | 121,559,184,256 | 121,957,188,088 |
| 4.2.02.2 | Bantuan Keuangan | | | | | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **5,485,000,000** | **67,800,000,000** | **40,200,000,000** | **8,250,000,000** | **8,250,000,000** |
| **4.3.01** | **Pendapatan Hibah** | 5,485,000,000 | 67,800,000,000 | 40,200,000,000.00 | **8,250,000,000** | **8,250,000,000** |
| 3.b | Dana darurat | | - | - | - | - |
| 3.c | Lain-lain pendapatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - | - | - | - | - |
| **4.3.03** | **Lain-lain pendapatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** | - | - | - | - | - |
| 4.3.03.01 | Lain-lain Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 4.3.03.01.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| **5** | **BELANJA** | **2,934,916,390,830** | **3,028,268,311,525** | **3,038,248,917,188** | **3,220,272,331,341** | **3,083,560,247,913** |

| Kode Rekening | Uraian | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **2,222,885,560,701** | **2,293,589,665,671** | **2,301,148,908,001** | **2,439,012,194,428** | **2,335,467,399,362** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | | | | | |
| | | | | | | |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **276,339,937,750** | **247,252,741,843** | **248,735,229,921** | **291,239,909,900** | **257,719,031,798** |
| 5.2.01 | Belanja Tanah | | | | | |
| 5.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin | | | | | |
| 5.2.03 | Belanja Gedung dan Bangunan | | | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal jalan, Jaringan dan irigasi | | | | | |
| 5.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | | | |
| 5.2.06 | Belanja Modal asset Lainnya | | | | | |
| | | | | | | |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **12,071,006,779** | **12,454,953,549** | **12,496,002,745** | **13,244,646,172** | **12,682,363,550** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| | | | | | | |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **423,619,885,600** | **474,970,950,461** | **475,868,776,521** | **476,775,580,841** | **477,691,453,204** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | | | | | |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | | | | | |
| | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **-61,709,361,340** | **-58,832,407,808** | **-61,229,768,234** | **-236,541,259,340** | **-61,480,610,021** |
| | | | | | | |
| 6 | **PEMBIAYAAN** | **61,709,361,340** | **58,832,407,808** | **61,229,768,234** | **236,541,259,340** | **61,480,610,021** |
| 6.1 | **Penerimaan Pembiayaan** | **63,534,361,340** | **85,657,407,808** | **98,054,768,234** | **258,366,259,340** | **63,305,610,021** |
| 6.1.01 | Penggunaan SILPA tahun sebelumnya | 63,534,361,340 | 85,657,407,808 | 98,054,768,234 | 178,366,259,340 | 63,305,610,021 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | | | | 80,000,000,000 | |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | |
| 6.2 | **Pengeluaran Pembiayaan** | **1,825,000,000** | **26,825,000,000** | **36,825,000,000** | **21,825,000,000** | **1,825,000,000** |
| | Pembentukan Dana Cadangan | | 25,000,000,000 | 35,000,000,000 | 20,000,000,000 | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 1,825,000,000 | 1,825,000,000 | 1,825,000,000 | 1,825,000,000 | 1,825,000,000 |
| | **Jumlah Pembiayaan Netto** | **61,709,361,340** | **58,832,407,808** | **61,229,768,234** | **236,541,259,340** | **61,480,610,021** |
| | | | | | | |
| | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)** | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 |

*Sumber :Data Diolah Bapperida 2025*

## 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

### 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lebak merujuk atas berbagai permasalahan pada berbagai aspek pembangunan yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan yang disampaikan merupakan permasalahan utama atau prioritas yang akan menjadi agenda pembangunan lima (5) tahun ke depan.

Secara umum Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, infrastruktur dan lingkungan, kesejahteraan sosial, daya saing daerah, serta beragam permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan daerah diformulasi dalam beberapa hal yang diidentifikasi sebagai permasalahan utama sebagai berikut:

**1. Masih Rendahnya Kualitas Layanan Kebutuhan Dasar Manusia**

Dalam perkembangannya sebagian besar indikator pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun secara faktual pembangunan manusia di Kabupaten Lebak masih terkendala oleh sejumlah permasalahan sebagaimana tercermin dari progresifitas peningkatannya yang kurang sesuai harapan. Secara makro masalah pembangunan manusia pada dimensi pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

1) Belum optimalnya capaian indeks pendidikan: 0,556 poin (tingkat capaian: 98,41%)
2) Belum optimalnya capaian Angka Melek Huruf (AMH): 96,21% (tingkat capaian: 98,32%)
3) Rendahnya angka RLS kabupaten: 6,6 tahun (dibandingkan RLS provinsi dan nasional)
4) Belum optimalnya capaian persentase guru bersertifikat pendidik: 63,74% (tingkat capaian: 81,40%)

Pada dimensi kesehatan, ditemukan masalah terkait dengan pembangunan manusia diidentifikasi disebabkan oleh belum optimalnya cakupan layanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang masih relatif terbatas, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada sebagian kalangan masyarakat yang masih memprihatinkan, belum idealnya rasio tenaga medis dan paramedis terhadap satuan jumlah penduduk tertentu, belum optimalnya implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional; serta belum optimalnya cakupan layanan Keluarga Berencana. Secara makro masalah pembangunan manusia pada dimensi kesehatan ditunjukkan melalui beberapa indikator berikut:

1) Belum optimalnya capaian indeks kesehatan: 0,7405 poin (tingkat capaian: 95,18%)
2) Belum optimalnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD: 82,46% (tingkat capaian: 93,70%)
3) Rendahnya Persentase Desa ODF: 33,04% (tingkat capaian: 46,91%)
4) Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH): 68,13 tahun (dibandingkan provinsi dan nasional)
5) Rendahnya persentase puskesmas terakreditasi minimal madya: 41% (tingkat: 57,41%)
6) Rendahnya persentase puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar: 64,46% (tingkat capaian: 90,79%)

Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan- permasalahan dan tantangan di atas. Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, penyediaan dan pembinaan SDM kesehatan dan peningkatan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat guna menekan angka kesakitan sebagai akibat dari faktor perilaku dan lingkungan, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, pendidikan usia dasar, usia produktif,

usia lanjut, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa berat, TBC serta pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif untuk pencapaian target SPM pelayanan dasar kepada masyarakat.

**2. Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah**

Dalam mengembangkan konektivitas di Kabupaten Lebak, terdapat jalan kewenangan pemerintah provinsi dan nasional, dengan panjang masing-masing mencapai 176,39 km dan 146,59 km. Kondisi ruas-ruas jalan ini sangat bergantung pada perhatian serta dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi
dan sinergi dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan pemeliharaan jaringan jalan provinsi dan nasional di Kabupaten Lebak.

Percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi sangat krusial untuk mendukung transformasi digital yang diperlukan, terutama selama pandemi. Terdapat sekitar 52 area blankspot di Kabupaten Lebak, yang menghambat efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama.

Dalam konteks penyediaan infrastruktur pertanian, pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat harus menjadi prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak. Hal ini penting mengingat indeks kinerja jaringan irigasi pada tahun 2020 hanya mencapai 71,73%, dengan hanya 71 dari 463 Daerah Irigasi (DI) yang berada dalam kondisi baik, atau sekitar 15,33%. Perhatian terhadap jaringan irigasi ini perlu ditingkatkan, terutama mengingat peran Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah penyangga stok pangan padi di Provinsi Banten. Selain itu, pemeliharaan terhadap sekitar 66 situ dan embung yang berfungsi sebagai tandon air dan irigasi juga sangat penting. Urgensi infrastruktur pertanian ini akan semakin strategis, mengingat Kabupaten Lebak diproyeksikan sebagai lumbung pangan regional. Penyediaan

sarana dan prasarana air minum juga harus mendapatkan perhatian, karena cakupan layanan saat ini baru mencapai 68,02%, sementara akses terhadap air limbah hanya mencapai sekitar 71,37%.

Transformasi perekonomian daerah di sektor tersier dan sekunder, yang berfokus pada perdagangan besar dan eceran serta perbengkelan di berbagai kawasan perkotaan dan titik-titik pertumbuhan di sekitar 12 pasar utama Kabupaten Lebak, telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang jauh melebihi kapasitas pengelolaan pemerintah. Pertumbuhan kompleks pertokoan dan kawasan permukiman yang menarik minat investor lokal dan domestik juga berkontribusi pada tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi area perniagaan dan perumahan, terutama di Kecamatan Maja dan sekitarnya. Ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana permukiman, serta volume sampah domestik yang semakin tinggi. Selain itu, kehadiran Tol Serang-Panimbang yang melintasi wilayah Kabupaten Lebak akan mendorong perkembangan kawasan industri dan komersil baru, serta permukiman yang mendukung aktivitas ekonomi. Namun, hal ini juga berpotensi menciptakan timbunan sampah industri dan risiko pencemaran limbah B3 jika tidak dikelola dengan baik.

Keseluruhan permasalahan di atas berimplikasi pada sejumlah hal yang menggambarkan belum optimalnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah, pengendalian lingkungan hidup, serta penataan ruang sebagaimana dimaksud, antara lain:

a. Meningkatnya kebutuhan akan jalan dan jembatan dalam kondisi baik guna menunjang mobilitas orang dan barang, serta perekonomian daerah sebagai upaya peningkatan aksesibilitas;
b. Meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan dan kondisi infrastruktur perhubungan yang memadai, seperti: Penerangan Jalan Umum (PJU),halte di kawasan perkotaan, rambu lalu lintas, pengawasan trayek angkutan umum, pengelolaan perparkiran, serta pengelolaan terminal angkutan orang maupun barang;

c. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman, pengendalian munculnya kawasan kumuh perkotaan dan non-perkotaan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga, penyediaan rumah layak huni, dan lain-lain;
d. Meningkatnya kebutuhan untuk melakukan transformasi digital melalui pemenuhan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan jenis pelayanan publik berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi guna mengoptimalkan implementasi SPBE di Kabupaten Lebak;
e. Meningkatnya kebutuhan akan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengendalian laju alih fungsi lahan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penangkapan ikan berlebihan, deforestasi dan penebangan ilegal, dan lain lain.

Terkait dengan masalah pemanfaatan ruang dan keberlanjutan lingkungan, Kabupaten Lebak akan menghadapi dilema yang semakin rumit di masa depan antara meningkatkan pendapatan daerah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Banyak daerah di Indonesia telah mengalami tantangan serupa, sehingga penting untuk belajar dari pengalaman tersebut guna mengantisipasi masalah yang mungkin muncul.

Pengendalian pemanfaatan ruang terkait isu lingkungan tidak hanya berkaitan dengan konservasi sumber daya alam untuk generasi mendatang, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual dalam melestarikan kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat setempat. Konservasi lingkungan dan sumber daya alam di kawasan adat, seperti masyarakat adat Kanekes dan hukum adat kasepuhan, sangat penting mengingat keterikatan budaya mereka dengan tanah tempat tinggal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kawasan adat harus menjadi kebijakan yang bersifat jangka panjang, bukan hanya untuk jangka menengah. Selain itu, pembangunan wilayah juga perlu mempertimbangkan aspek kebencanaan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034, ada beberapa wilayah yang dianggap rawan bencana alam, termasuk tanah longsor, banjir, gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami.

Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Lebak terkait potensi rawan bencana adalah kebutuhan akan desain kebijakan dan program yang efektif untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain: memperkuat lembaga penanganan bencana daerah, meningkatkan kesiapsiagaan elemen- elemen penanganan bencana, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana, dan lain- lain.

**3. Tata Kelola Pemerintahan**

Upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik tetap menjadi isu utama, meskipun fokusnya akan beralih ke tema yang berbeda seiring dengan kemajuan yang dicapai. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, perhatian difokuskan pada tema deregulasi yang berkaitan dengan penyederhanaan dan sinkronisasi peraturan perUndang - undangan. Ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kompleksitas regulasi yang menyebabkan tumpang tindih aturan dan rendahnya kepastian hukum. Selain itu, terdapat tema debirokratisasi yang terkait dengan pengurangan jabatan struktural eselon III dan IV serta fungsionalisasi aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur birokrasi yang efisien dan sesuai fungsi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan dan efisiensi dalam pelaksanaan. Dengan cara ini, struktur birokrasi diharapkan akan lebih ramping namun berfungsi lebih baik, mengarah ke organisasi yang lebih bersifat holakrasi dibandingkan dengan birokrasi tradisional yang kaku dan hierarkis. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi isu utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks disrupsi dan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, agenda transformasi digital perlu direncanakan dan diimplementasikan secara terukur agar penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat terwujud dengan nyata dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lebak. Selain itu, implementasi SPBE diharapkan dapat mencegah deviasi dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas Sistem Pengawasan Internal di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, permasalahan spesifik terkait penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lebak dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Struktur birokrasi pemerintah daerah belum mencerminkan proporsi yang tepat antara ukuran dan fungsi. Penyederhanaan birokrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk efisiensi penggunaan sumber daya daerah yang terbatas, terutama akibat dampak pandemi, sekaligus mendukung komitmen daerah dalam kebijakan nasional.
b) Implementasi manajemen SDM aparatur belum optimal, terutama dalam fungsionalisasi aparatur sipil negara. Hal ini terlihat dari dominasi tenaga struktural dan administrasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga fungsional, baik umum maupun khusus.
c) Meskipun telah tergolong baik, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perlu dioptimalkan dengan membangun blueprint transformasi digital secara terpadu dan menyeluruh di lingkungan pemerintahan daerah.
d) Diperlukan optimalisasi peran dan fungsi kelitbangan daerah dalam mendukung pengambilan keputusan eksekutif melalui penguatan sistem inovasi daerah, serta pemanfaatan hasil kelitbangan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
e) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah masih belum merata.
f) Diperlukan optimalisasi integrasi sistem perencanaan, penganggaran,

pengendalian, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan aplikasi SIPD dan aplikasi sejenis lainnya.

g) Tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta upaya untuk meningkatkan nilai guna pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat;
h) Tantangan dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengawasan Internal sebagai sistem penjaminan mutu dan konsultasi, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani deviasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
i) Tantangan untuk meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menghadapi gangguan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
j) Tantangan untuk mewujudkan standar pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan layanan publik di Kabupaten Lebak;
k) Tantangan dalam menghasilkan peraturan perundang - undangan daerah yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Kabupaten Lebak juga menghadapi tantangan dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan daerah. Oleh karena itu, upaya yang terstruktur dan sistematis untuk menjaga kohesivitas sosial sangat penting guna mencegah konflik sosial yang dapat mengganggu kondusifitas dan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di wilayah ini. Kemitraan yang sehat antara pemangku kepentingan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga perlu terus dibina untuk menyalurkan berbagai dinamika, kepentingan, dan aspirasi yang ada di masyarakat. Selain itu, perlu usaha pencegahan radikalisme, yang masih menjadi ancaman nasional.

Penegakan hukum yang adil, terutama terkait peraturan daerah, harus menjadi prioritas utama untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi warga, serta untuk melakukan edukasi sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban umum, terutama dalam memastikan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat hadir dengan wibawa di tengah masyarakat, berlandaskan legitimasi yang kuat dari warga. Dengan kewibawaan tersebut, pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

**4. Pemanfaatan SDA Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Wilayah Dalam Mendukung Daya Saing Daerah**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak sejalan dengan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, yang masih tergolong tinggi. Permasalahan pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri ke beberapa akar masalah, antara lain:

a. Belum berkembangnya sektor industri, terutama industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal secara optimal dan memanfaatkan sumber daya serta komoditas lokal, sehingga dampaknya terhadap peningkatan nilai tambah perekonomian daerah masih rendah.
b. Rendahnya mutu dan daya saing tenaga kerja setempat dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal maupun regional.
c. Tingkat efisiensi produksi UMKM yang rendah, akses permodalan yang terbatas ke perbankan, serta pemasaran yang kurang optimal akibat lambatnya transformasi digital di kalangan UMKM.
d. Lembaga keuangan dan koperasi yang berfokus pada pembiayaan UMKM belum berperan secara optimal sebagai alternatif sumber pendanaan bagi usaha UMKM dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
e. Pertumbuhan sektor perdagangan yang belum optimal, pengendalian

stabilitas harga dan distribusi barang yang terhambat oleh infrastruktur transportasi yang kurang memadai, serta pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang yang belum efektif.

f. Kurangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda, yang menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan lowongan kerja di sektor formal.
g. Rendahnya Nilai Tukar Petani dan Nelayan disebabkan oleh jumlah dan daya saing produksi yang belum optimal, pembinaan yang kurang terhadap petani dan nelayan, serta terbatasnya sarana dan prasarana di bidang pertanian dan perikanan.
h. Kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah, khususnya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
i. Daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang rendah, sehingga kapasitas produksi dan omzetnya tidak berkembang dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar setempat.

Pemanfaatan pangan sebagai sumber daya lokal di Kabupaten Lebak juga masih belum optimal dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, beberapa wilayah di Kabupaten Lebak masih menghadapi kasus gizi buruk dan stunting. Selain itu, terdapat permasalahan lain seperti pemanfaatan potensi pariwisata di Kabupaten Lebak masih belum optimal dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Dalam konteks ekonomi, pengembangan pariwisata secara makro sangat berkaitan dengan agenda pemulihan ekonomi. Dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, serta pembangunan infrastruktur seperti tol Serang-Panimbang yang melintasi Kabupaten Lebak dan jalur kereta api ganda, termasuk operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta- Rangkasbitung, Kabupaten Lebak memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi

pariwisata, seperti Geopark Bayah Dome. Faktanya, Kabupaten Lebak juga sudah memiliki acara wisata berskala nasional, yaitu ritual "Seba Baduy," yang sejak 2015 telah masuk dalam Kalender Pariwisata Nasional dan pada 2020 meraih Anugerah Pesona Indonesia (API) sebagai Festival Pariwisata terpopuler kedua di Indonesia. Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lebak diyakini bisa menjadi terobosan untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah, yang diharapkan akan menciptakan efek berganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pengembangan sektor pariwisata dapat mengintegrasikan berbagai sektor—primer, sekunder, hingga tersier—dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Tantangan ke depan adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Lebak dapat merespons dan memanfaatkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam upaya pemulihan ekonomi daerah.

Namun beberapa permasalahan masih ditemukan dalam pengembangan sektor pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut : Pengembangan pariwisata belum secara optimal memperhatikan aspek lingkungan hidup;

a. Daya dukung regulasi sektor pariwisata belum memadai;
b. Kualitas Sumberdaya Manusia sektor Pariwisata belum optimal sehingga sulit beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi;
c. Pemanfaatan Teknologi digital dan media konvensional masih belum optimal dalam melakukan publikasi pariwisata;
d. Kondisi Infrastruktur penunjang dan pendukung atraksi wisata (jalan, jembatan, listrik, dan jaringan telekomunikasi) belum optimal;
e. Investasi sektor pariwisata masih relative rendah.

#### 2.3.1.1. Pemetaan Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan paparan deskriptif permasalahan pembangunan daerah di atas, secara makro dan abstraktif permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lebak dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 2. 81 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah**

| No | Masalah Pokok | Masalah |
|---|---|---|
| 1. | Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | 1. Belum optimalnya capaian indeks pendidikan: 0,556 poin (tingkat capaian: 98,41%)<br>2. Belum optimalnya capaian Angka Melek Huruf (AMH): 96,21% (tingkat capaian: 98,32%)<br>3. Rendahnya angka RLS kabupaten: 6,6 tahun (dibandingkan RLS provinsi dan nasional)<br>4. Belum optimalnya capaian persentase guru bersertifikat pendidik: 63,74% (tingkat capaian: 81,40%)<br>5. Belum optimalnya capaian indeks kesehatan: 0,7405 poin (tingkat capaian: 95,18%)<br>6. Belum optimalnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD: 82,46% (tingkat capaian: 93,70%)<br>7. Rendahnya Persentase Desa ODF: 33,04% (tingkat capaian: 46,91%)<br>8. Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH): 68,13 tahun (dibandingkan provinsi dan nasional)<br>9. Rendahnya persentase puskesmas terakreditasi minimal madya: 41% (tingkat: 57,41%)<br>10. Rendahnya persentase puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar: 64,46% (tingkat capaian: 90,79%) |
| 2. | Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah | 1. Terdapat sekitar 52 area blankspot di Kabupaten Lebak<br>2. Indeks kinerja jaringan irigasi pada tahun 2020 hanya mencapai 71,73%, dengan hanya 71 dari 463 Daerah Irigasi (DI) yang berada dalam kondisi baik, atau sekitar 15,33%.<br>3. Cakupan layanan sarana dan prasarana air minum baru mencapai 68,02% |

| No | Masalah Pokok | Masalah |
|---|---|---|
| | | 4. Akses terhadap air limbah hanya mencapai sekitar 71,37%.<br><br>5. Potensi timbulan sampah industri dan risiko pencemaran limbah B3 yang diakibatkan oleh perkembangan kawasan industi dan komersil baru serta permukiman yang mendukung aktivitas ekonomi.<br><br>6. Terdapat beberapa wilayah yang dianggap rawan bencana alam, termasuk tanah longsor, banjir, gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami. |
| 3. | Tata Kelola Pemerintahan | 1. Struktur birokrasi pemerintah daerah belum mencerminkan proporsi yang tepat antara ukuran dan fungsi.<br><br>2. Implementasi manajemen SDM aparatur belum optimal, terutama dalam fungsionalisasi aparatur sipil negara.<br><br>3. Meskipun telah tergolong baik, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perlu dioptimalkan dengan membangun blueprint transformasi digital secara terpadu dan menyeluruh di lingkungan pemerintahan daerah.<br><br>4. Diperlukan optimalisasi peran dan fungsi kelitbangan daerah dalam mendukung pengambilan keputusan eksekutif melalui penguatan sistem inovasi daerah, serta pemanfaatan hasil kelitbangan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.<br><br>5. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah masih belum merata.<br><br>6. Diperlukan optimalisasi integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan aplikasi SIPD dan aplikasi sejenis lainnya. |

| No | Masalah Pokok | Masalah |
|---|---|---|
| | | 7. Tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta upaya untuk meningkatkan nilai guna pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.<br><br>8. Tantangan dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengawasan Internal sebagai sistem penjaminan mutu dan konsultasi, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani deviasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.<br><br>9. Tantangan untuk meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menghadapi gangguan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.<br><br>10. Tantangan untuk mewujudkan standar pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan layanan publik di Kabupaten Lebak.<br><br>11. Tantangan dalam menghasilkan peraturan perundang- undangan daerah yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. |
| 4. | Pemanfaatan SDA Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Wilayah Dalam Mendukung Daya Saing Daerah | 12. Belum berkembangnya sektor industri, terutama industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal secara optimal dan memanfaatkan sumber daya serta komoditas lokal, sehingga dampaknya terhadap peningkatan nilai tambah perekonomian daerah masih rendah.<br><br>13. Rendahnya mutu dan daya saing tenaga kerja setempat dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal maupun regional. |

| No | Masalah Pokok | Masalah |
|---|---|---|
| | | 14. Tingkat efisiensi produksi UMKM yang rendah, akses permodalan yang terbatas ke perbankan, serta pemasaran yang kurang optimal akibat lambatnya transformasi digital di kalangan UMKM<br>15. Lembaga keuangan dan koperasi yang berfokus pada pembiayaan UMKM belum berperan secara optimal sebagai alternatif sumber pendanaan bagi usaha UMKM dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<br>16. Pertumbuhan sektor perdagangan yang belum optimal, pengendalian stabilitas harga dan distribusi barang yang terhambat oleh infrastruktur transportasi yang kurang memadai, serta pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang yang belum efektif.<br>17. Kurangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda, yang menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan lowongan kerja di sektor formal.<br>18. Rendahnya Nilai Tukar Petani dan Nelayan disebabkan oleh jumlah dan daya saing produksi yang belum optimal, pembinaan yang kurang terhadap petani dan nelayan, serta terbatasnya sarana dan prasarana di bidang pertanian dan perikanan.<br>19. Kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah, khususnya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<br>20. Daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang rendah, sehingga kapasitas produksi dan omzetnya tidak berkembang dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar setempat. |

*Sumber :Data Diolah Bapperida 2024*

Selanjutnya masalah pokok dan masalah sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas, akan dijelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Lebak. Masalah tersebut dibagi berdasarkan 4 klaster yaitu sosial budaya, infrastruktur dan lingkungan, pemerintahan, serta ekonomi.

## A. Klaster – Sosial Budaya

Pada klaster sosial budaya, terdapat masalah pokok pada level impact yang menjadi isu strategis dari klaster ini yaitu:

**"Belum optimalnya pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM"**

Secara mendetail pokok masalah isu strategis tersebut disebabkan dari beberapa pokok masalah:

1. Rendahnya indeks pendidikan
2. Rendahnya indeks kesehatan
3. Belum optimalnya strategi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4. Belum optimalnya peran serta prestasi pemuda di bidang olahraga dan pengembangan ekonomi
5. Belum optimalnya program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan
6. Belum optimalnya penguatan komunitas adat

Masing-masing masalah pokok pada tingkatan outcome tersebut disebabkan oleh rangkaian masalah dan akar masalah. Berikut pembahasan masing-masing masalah pokok tersebut:

- **Rendahnya Indeks Pendidikan**

Masalah pendidikan di Kabupaten Lebak ditengarai oleh dua hal yakni rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) masih rendah jika dibandingkan pada rata-rata tingkat provinsi. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kualitas

pendidikan belum merata. Data pendukung dari akar masalah pada bagian pendidikan dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 82 Akar Masalah terkait Indeks Pendidikan**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Rendahnya motivasi diri untuk mengenyam pendidikan | Kurangnya minat belajar siswa |
| | Tingginya angka pernikahan di bawah umur |
| Sulitnya menjangkau sekolah | Akses ke sekolah (jarak tempuh menuju sekolah) |
| | Aksesibilitas menuju pusat-pusat pendidikan masih rendah |
| Banyaknya siswa putus sekolah | Terdapat beberapa siswa yang putus sekolah karena kondisi perekonomian keluarga |
| Lemahnya kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga | Terdapat beberapa siswa yang putus sekolah karena kondisi perekonomian keluarga |
| | Ketidakberdayaan finansial keluarga |
| | Kemiskinan |
| Kurangnya lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah | Kurangnya lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah |
| Kurangnya dukungan moral dari keluarga untuk mengenyam pendidikan | Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan |
| Rendahnya partisipasi warga berusia 13 - 15 tahun pada jenjang SMP | Capaian angka partisipasi pada jenjang SMP Kab Lebak tahun 2023: APK = 91,95%; APM = 89,77% |
| Rendahnya dukungan sarana dan prasarana | Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan luar sekolah yang belum menyasar wilayah yang jauh dari Sarana Pendidikan SMP dan SMA |
| | Kurangnya fasilitas sekolah |
| Belum meratanya kualitas pendidikan | Kualitas pendidikan belum merata |
| | Capaian persentase sekolah SDberakreditasi A Kabupaten Lebak tahun 2023: 96,44% |
| Kurangnya SDM bidang pendidikan (guru bersertifikat pendidik) | Capaian guru bersertifikat pendidik Kab Lebak 2023: 81,40% |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| | Keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat |
| Rendahnya tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan usia dini | Capaian tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Kab Lebak tahun 2023: 87,73% |
| | Capaian angka melek huruf Kab Lebak 2023: 98,33% |
| Rendahnya budaya literasi | Masih rendahnya budaya literasi |

- **Rendahnya Indeks Kesehatan**

Masalah kesehatan di Kabupaten Lebak ditengarai kualitas pelayanan kesehatan, angka kematian ibu (AKI), desa ODF, pelayanan keluarga sehat serta penanganan penyakit menular dan tidak menular termasuk degeneratif. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, sumber daya manusia yang mempunyai keahlian khusus, dan kualitas pelayanan kesehatan (puskesmas terakreditasi minimal madya rendah) belum merata. Data pendukung dari akar masalah pada bagian kesehatan dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 83 Akar Masalah Terkait Indeks Kesehatan**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan | Keterbatasan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil (tertinggal) |
| | Konsentrasi tenaga kesehatan di wilayah perkotaan |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| | Kekurangan tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil |
| Kurangnya tenaga kesehatan yang berkualitas | Keterbatasan jumlah dokter spesialis dan subspesialis di Kabupaten Lebak |
| | Kompetensi tenaga kesehatan di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan |
| | Kurang tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten |
| | Masih belum terpenuhinya ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar |
| | Capaian persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar Kab Lebak tahun 2023: 75% |
| | Keterbatasan infrastruktur puskesmas dan rumah sakit |
| Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang fasilitas kesehatan | Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan |
| | Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit |
| | Rendahnya cakupan sarana dan prasarana (alat kesehatan) dalam kondisi baik |
| | Kekurangan peralatan kesehatan yang modern dan canggih |
| | Rendahnya cakupan sarana dan prasarana (alat kesehatan) dalam kondisi baik |
| | Sistem rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit masih belum berjalan dengan baik |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Sulitnya menjangkau sarana kesehatan | Keterbatasan aksesibilitas untuk daerah terpencil (tertinggal) |
| | Masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan |
| Terbatasnya ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Formas) | Capaian persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) Kab Lebak tahun 2023: 97,92% |
| Rendahnya persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Capaian persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Kab Lebak tahun 2023: 89,98% |
| Kurangnya edukasi tentang kesehatan ibu hamil | Tingginya jumlah ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan |
| Rendahnya ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Capaian persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Kab Lebak tahun 2023: 90,50% |
| Kurangnya edukasi tentang kesehatan ibu dan anak | Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan |
| Kurangnya tenaga kesehatan dengan keahlian khusus, seperti bidan penolong persalinan | Kurangnya tenaga kesehatan dengan keahlian khusus, seperti bidan penolong persalinan |
| Rendahnya akses fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak-anak | Masih banyak masyarakat di Kabupaten Lebak yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi ibu hamil dan anak- anak |
| | Jarak tempuh yang jauh ke fasilitas kesehatan |
| | Biaya persalinan yang mahal |
| Tingginya angka pernikahan dini | Angka pernikahan dini di Kabupaten Lebak masih tergolong tinggi. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi |
| Banyaknya ibu dan anak yang mengalami kekurangan gizi | Masih banyak ibu dan anak di Kabupaten Lebak yang mengalami kekurangan gizi |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Rendahnya jumlah puskesmas yang terakreditasi minimal madya | Capaian persentase puskesmas terakreditasi minimal madya Kab Lebak tahun 2023: 57,41% |
| Rendahnya akses layak dan aman | Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses layak (1,83%) 27.060 KK |
| | Akses aman baru mencapai 0,77% |
| Belum optimalnya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana limbah domestik | Kondisi IPLT yang belum berfungsi secara optimal |
| | Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur air limbah domestik yang telah ada |
| Sulitnya akses menuju desa | Medan yang sulit dijangkau |
| Terbatasnya anggaran untuk pengembangan sanitasi penanganan air limbah | Rendahnya pendanaan sanitasi terkait penanganan air limbah domestik |
| | Keterbatasan anggaran |
| Rendahnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat | Masih ada Masyarakat lebak yang melakukan BABS sebanyak 0.1% (437 KK) |
| | Rendahnya kesadaran Masyarakat terkait perilaku hidup sehat |
| Belum adanya regulasi yang mengatur sistem air limbah domestik permukiman | Belum adanya PERDA/PERBUB terkait retribusi air limbah permukiman |
| | Belum adanya regulasi yang mengatur terkait air limbah domestik |
| Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar | Cakupan persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar Kab Lebak tahun 2023: 89,51% |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan | Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan |
| Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata | Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata |
| Letak geografis yang sulit | Letak geografis yang sulit |
| Rendahnya capaian penemuan penyakit menular tuberkulosis | Realisasi capaian penemuan penderita penyakit tuberkulosis tahun 2023: 92% |
| Ancaman penyakit berbasis lingkungan bagi kesehatan masyarakat | Wabah penyakit seperti demam berdarah dan malaria mencadi ancaman bagi kesehatan masyarakat |
| Masih adanya ancaman penyakit tidak menular | Peningkatan penyakit gula dan penderita ODGJ |

- **Belum Optimalnya Strategi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Masalah pemberdayaan perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Lebak ditengarai oleh indeks pemberdayaan gender dan strategi pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk pelayanan pemberdayaan perempuan, partisipasi perempuan dalam iklim pembangunan wilayah di berbagai bidang, serta program KB dan potensi pertambahan penduduk di Kota Maja. Data pendukung dari akar masalah pada bagian perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 84 Akar Masalah terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Belum optimalnya sarpras pendukung | Masih rendahnya kesetaraan gender di Lebak dalam hal sarpras (perempuan, anak, lansia) |
| | Belum memiliki Gedung UPTD PPA mandiri, Rumah Perlindungan mandiri, SDM yang masih minim secara kuantitas dan kualitas |
| Kurangnya SDM pelayananan kasus pemberdayaan perempuan | Capaian persentase ARG pada belanja langsung APBD Kab Lebak tahun 2023: 90,67% |
| | Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. |
| | Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan dan anak |
| | Masih rendahnya kesetaraan gender di Lebak baik kebijakan, intervensi, terkait gender (perempuan, anak, lansia) |
| Belum optimalnya implementasi program pengarusutamaan gender | Masih kurangnya koordinasi antara driver PUG dengan OPD lain |
| | Kurangnya pelaksanaan kegiatan Rapat Pokja PUG sehingga belum optimalnya penguatan Pokja PUG Kab. Lebak |
| | Sudah adanya Perda PUG, namun belum terimplementasikan secara menyeluruh |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Rendahnya partisipasi aktif perempuan di bidang politik dan ekonomi | Keterlibatan perempuan di parlemen Kab Lebak tahun 2023: 8%; Provinsi Banten tahun 2023: 18,82% |
| | Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan dan anak |
| | Keterlibatan perempuan yang bekerja pada kelompok angkatan kerja Kab Lebak tahun 2023: 36,25% |
| Rendahnya jumlah pusat pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) | Capaian jumlah pusat pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) Kab Lebak tahun 2023: 57,76% |
| Rendahnya jumlah pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun | Capaian persentase angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun Kab Lebak tahun 2023: 97,58% |
| Rendahnya cakupan anggota bina keluarga berKB | Capaian cakupan anggota bina keluarga berKB Kab Lebak tahun 2023: 24,27% |
| Potensi pertambahan penduduk di Kawasan Perkotaan Maja | Terdapat potensi pertambahan penduduk di Kawasan Perkotaan Maja 2.106.521 jiwa pada tahun 2038 |

- **Belum Optimalnya Peran Serta Prestasi Pemuda Di Bidang Olahraga dan Pengembangan Ekonomi**

Masalah pemberdayaan pemuda dan olahraga di Kabupaten Lebak ditengarai oleh partisipasi pemuda di berbagai bidang seperti ekonomi dan olahraga. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana serta sumber daya manusia yang belum optimal dalam pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga, partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi mandiri. Data pendukung dari akar masalah pada bagian

pemuda dan olahraga dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 85 Akar Masalah Terkait Kepemudaan dan Olahraga**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Kurangnya dukungan dana dan infrastruktur pengembangan prestasi pemuda dan atlet | Capaian persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik Kab Lebak tahun 2023: 85% |
| | Kurangnya akses terhadap sumber daya dan fasilitas yang mendukung pengembangan prestasi pemuda |
| | Minimnya dukungan dana dan infrastruktur pengembangan atlet |
| | Minimnya dukungan dana dan fasilitas untuk cabang olahraga |
| Belum optimalnya ekosistem kompetisi serta program pembinaan atlet dan pengembangan minat dan bakat pemuda di level kabupaten | Kurangnya optimalnya program pelatihan dan pembinaan atlet |
| | Kurangnya program pengembangan bakat dan minat di kalangan pemuda |
| | Rendahnya tingkat kompetisi di tingkat daerah yang menjadi dasar seleksi atlet berprestasi |
| Belum optimalnya kualitas pelatih dan pembina untuk mendampingi atlet | Rendahnya kualitas pelatih dan pembina yang mendampingi atlet |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Belum optimalnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Capaian tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (capaian Kab Lebak tahun 2023: 94,44%) |

- **Belum Optimalnya Program Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Rentan**

Masalah sosial di Kabupaten Lebak ditengarai oleh pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana termasuk aksesibilitas berupa informasasi tindakan atau pelayanan bagi kaum lansia, disabilitas, dan anak terlantar, serta pelayanan jenazah. Data pendukung dari akar masalah pada bagian sosial dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 86 Akar Masalah Terkait Kesejahteraan Sosial**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Rendahnya jumlah anak terlantar yang memperoleh pendidikan formal/non formal | Capaian jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal Kab Lebak tahun 2023: 40% |
| Belum optimalnya sarpras pendukung | Belum memadainya sarana prasarana rumah singgah yang representatif |
| Rendahnya capaian jumlah jenazah yang diurus | Capaian jumlah jenazah yang diurus Kab Lebak tahun 2023: 22,22% |
| Belum optimalnya sarpras pendukung bagi pelayanan penyandang disabilitas | Kurangnya penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan akses pelayanan publik |

| | |
|---|---|
| Belum optimalnya program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas | Belum optimalnya pengembangan potensi dan pemberdayaan orang dengan penyandang disabilitas |
| Belum optimalnya akses bagi lansia terlantar | Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlantar serta sarana prasarana untuk menampung lanjut usia terlantar |
| Distribusi penerima manfaat bantuan sosial belum optimal | Distribusi penerima manfaat bantuan sosial belum optimal |

- **Belum Optimalnya Penguatan Komunitas Adat**

Masalah yang terjadi pada penguatan komunitas adat ditengarai oleh akses pelayanan dasar pendidikan kesehatan, pemberdayaan komunitas, perlindungan hukum dan agraria, dan pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Data pendukung dari akar masalah pada bagian komunitas adat dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 87 Akar Masalah Terkait Komunitas Adat**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Belum optimalnya akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat adat | Belum optimalnya akses pendidikan dan kesehatan yang merata |
| | Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik |
| Belum optimalnya pemberdayaan komunitas adat | Belum optimalnya penguatan partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat |
| | Belum optimalnya pemberdayaan organisasi dan komunitas adat |
| Belum optimalnya perlindungan hukum dan agraria terhadap masyarakat adat | Belum optimalnya pengendalian dan pengurangan kerusakan lingkungan adat |

| | |
|---|---|
| | Belum optimalnya perlindungan terhadap eksploitasi dan diskriminasi masyarakat adat |
| | Belum optimalnya pengakuan resmi wilayah adat dan perlindungan hak-hak tradisional |
| Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan penguatan karakter berbasis kebudayaan lokal | Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis komunitas (desa wisata budaya) |
| | Perlunya pembangunan pusat budaya dan festival Lebak (Badui) |
| | Belum optimalnya pelestarian dan penguatan karakter pendidikan dan budaya lokal |
| Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi | Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi komunitas adat |

## B. Klaster – Infrastruktur dan Lingkungan

Pada klaster infrastruktur, terdapat masalah pokok pada level dampak yang menjadi isu strategis dari klaster ini yaitu :

**"Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar serta kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana dan pengelolaan lingkungan"**

Secara mendetail masalah pokok pada level impact strategis tersebut disebabkan dari beberapa pokok masalah outcome :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta peningkatan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi/ komunikasi
3. Tingginya kerentanan dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi, banjir dan tanah longsor.
4. Belum optimalnya penyediaan sanitasi, terutama di permukiman kumuh.

Masing-masing masalah pokok pada tingkatan *outcome* tersebut disebabkan oleh rangkaian masalah dan akar-akar masalah tertentu. Berikut pembahasan masing-masing masalah pokok tersebut:

- **Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Serta Peningkatan Aksesibilitas Menuju Pusat-Pusat Kegiatan.**

Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu dalam permasalahan dalam transportasi di Kabupaten Lebak. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya penambahan trayek baru, minimnya akses menuju kota Maja, adanya titik kemacetan, tidak optimalnya terminal tipe C dan belum optimalnya penanganan kasus kecelakaan. Data pendukung dari akar masalah pada bagian trayek angkutan umum dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 2. 88 Akar Masalah terkait Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Kurangnya permintaan/potensi pasar | masih belum adanya penambahan trayek kota |
| Proses perizinan yang rumit | |
| Kurang menariknya atau menguntungkannya pembukaan trayek untuk pengusaha angkutan umum | Tidak ada feeder antara Stasiun Maja dan Komplek Perumahan Citra Maja Raya |
| Banyaknya perlintasan sebidang | |
| Penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat yang masih dominan | |
| Belum optimalnya regulasi dalam mengatur retribusi angkutan | Banyak angkutan yang tidak mau ditagih retribusi sehingga tidak masuk terminal |
| Kurangnya investasi dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas terminal | |
| Manajemen yang tidak efektif dalam pengaturan operasional terminal | aparat menagih retribusi di persimpangan, sehingga terkesan terminal ini tidak berfungsi |

| | |
|---|---|
| Kurang tersedianya perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, traffic cone, marka jalan | persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (95,83%) |
| Masih adanya parkir liar di ruas jalan yang menggunakan badan jalan | |
| Masih terdapat jaringan jalan yang memilik kondisi rusak | |
| Masih banyaknya pengendara yang tidak mematuhi standar keselamatan | |
| Keterbatasan koordinasi dengan satlantas polri | |
| Kurangnya personil dalam pengawasan lalu lintas | |

- **Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi/ komunikasi**

  Rendahnya penetrasi internet dan literasi digital masyarakat dapat menjadi tantangan serius dalam era digital saat ini. Di banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan atau perkotaan yang kurang terjangkau oleh infrastruktur teknologi informasi, akses internet yang terbatas membatasi kemampuan penduduk untuk mengakses informasi dan layanan online secara efektif. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital juga menghambat kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi secara produktif dan aman. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara umum, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Upaya untuk meningkatkan akses internet yang lebih luas dan untuk meningkatkan literasi digital perlu menjadi prioritas dalam mengatasi tantangan ini. Data pendukung dari akar masalah pada bagian digitalisasi pada masyarakat dapat dilihat tabel berikut :

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Tingkat kemiskinan tinggi dan pendidikan yang rendah | Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Lebak baru mencapai 51,15% pada tahun 2023; terendah di Provinsi Banten |
| Kabupaten Lebak mungkin memiliki infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai, termasuk jaringan internet dan sinyal telepon selular yang kurang stabil atau tidak mencakup seluruh wilayah | Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki Telepon Selular (HP) dalam 3 Bulan di Kabupaten Lebak baru mencapai 53,35% pada tahun 2023; terendah di Provinsi Banten |
| Kabupaten Lebak terletak di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan dan hutan, yang membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi lebih sulit dan mahal | |

- **Tingginya Kerentanan Dalam Menghadapi Risiko Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor**

  Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Lebak saat ini, sebanyak 27 kecamatan memiliki potensi luasan bahaya yang TINGGI, dimana Kecamatan Wanasalam memiliki luasan paling banyak seluas 1202.94 Ha, dan Kecamatan Warunggunung memiliki luasan bahaya banjir paling rendah, yaitu sebesar 3,42 Ha. Kerentanan Kabupaten Lebak berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Banjir, 15 kecamatan memiliki kelas TINGGI, 7 Kecamatan masuk ke dalam kelas SEDANG, sedangkan kecamatan lainnya memiliki kelas keterpaparan penduduknya Rendah. Total penduduk yang terpapar paling tinggi di Kecamatan Cimarga sebanyak 20.222 ribu jiwa. Rendahnya level kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko banjir merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak komunitas di berbagai wilayah. Ketidaksiapan ini dapat disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mitigasi risiko banjir, seperti sistem

drainase yang efektif dan tanggul yang cukup kuat. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir serta cara menghadapinya juga menjadi faktor utama. Akibatnya, ketika banjir melanda, dampaknya bisa sangat parah dan sulit untuk dikurangi. Pentingnya peningkatan kesiapsiagaan melalui edukasi, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai adalah kunci untuk mengurangi kerentanan terhadap banjir dan melindungi komunitas dari bencana ini.

Berdasarkan hasil kajian untuk luasan wilayah terdampak Kabupaten Lebak juga terdapat risiko longsor, dari 28 Kecamatan, terdapat 5 Kecamatan yang masuk ke dalam kelas **TINGGI**, yaitu Kecamatan Cibeber, Cigemblong, Cilograng, Lebak Gedong dan Sobang, dimana Kecamatan Cibeber merupakan wilayah yang terluas dampak longsornya dengan luasan 15,215.3 Ha. Kerentanan Kabupaten Lebak berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Longsor memiliki kelas **RENDAH**. Total penduduk yang terpapar paling tinggi di Kecamatan Cilograng sebanyak 254 ribu jiwa. Kerentanan Kabupaten Lebak berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Longsor memiliki kelas **RENDAH**. Total penduduk yang terpapar paling tinggi di Kecamatan Cilograng sebanyak 254 ribu jiwa.

Ancaman Bencana Gempa bumi juga terjadi di Kabupaten Lebak, menurut hasil analisis dengan menggunakan metode yang diambil dari Perka BNPB No.02 tahun 2012, memiliki tingkat risiko bencana **SEDANG**, dengan Kecamatan Cimarga memiliki luasan wilayah yang terpapar paling tinggi, yaitu seluas 18280,53 Ha, dan Kecamatan Cibadak dengan luasan paling sedikit, yaitu seluas 3564,99 Ha. Kabupaten Lebak dengan adanya ancaman gempa bumi memiliki Kerentanan berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Gempa bumi, termasuk ke dalam kelas **SEDANG**, dengan total penduduk yang terpapar paling tinggi di Kecamatan Rangkasbitung sebanyak 142.087 ribu jiwa. Sedangkan Kecamatan Bojongmanik memiliki total penduduk yang berpotensi terpapar paling sedikit, yaitu 25.492 Jiwa. Data pendukung dari akar masalah pada bagian resiko bencana pada

masyarakat dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 2. 89 Akar Masalah Terkait Risiko Bencana Gempa Bumi, Banjir dan Tanah Longsor**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Kabupaten Lebak terletak di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan dan hutan, yang membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi lebih sulit dan mahal. | |
| Sebagian topografi wilayah berada di wilayah rendah. | 27 Kecamatan masuk ke dalam kelas TINGGI, dimana Kecamatan Wanasalam merupakan wilayah yang terluas dampak lbanjir dengan luasan 1,202.94 Ha<br>>> Kerentanan Kabupaten Lebak berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Banjir, 15 kecamatan memiliki kelas TINGGI<br>>>Kecamatan yang memiliki kerugian fisik paling tinggi adalah Kecamatan Cimarga, yaitu sebesar Rp. 227,871,000,000<br>>> Kecamatan Banjarsari akan memiliki nilai kerugian ekonomi terbesar apabila terjadi banjir, yaitu sebesar Rp. 2.002.000.000.F13 |
| Kondisi sungai yang sempit dan dangkal akibat abrasi dan limpasan air hujan | |
| Kondisi resapan di bagian hulu mulai kritis akibat terjadinya alih fungsi lahan | |
| Saluran drainase yang kurang memadai | |
| Belum optimalnya normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan | |
| Kurangnya infrastruktur mitigasi hadapi (contoh: tanggul, oxbow, bendung, dll) untuk mencegah kerusakan akibat terjadinya bencana banjir / banjir bandang | |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Kurangnya infrastruktur mitigasi hindari (contoh: Automatic Weather Statsion (AWS), Automatic Water Level Recorder (AWLR) di daerah yang sering terjadinya bencana banjir / banjir bandang | |
| Minimnya pembangunan bangunan umum yang cukup luas (tempat evakuasi) yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara bagi orang terkena dampak bencana banjir / banjir bandang maupun bencana lainnya | |
| Belum tersedianya Perda RDTR Kawasan perkotaan yang memiliki risiko banjir / banjir bandang sebagai pedoman dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang | |
| Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | |
| Belum tersusunnya masterplan yang terintegrasi dalam pengendalian di kawasan rawan bencana banjir | |
| Belum tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan/atau dokumen kontijensi | |
| Kurangnya upaya atau sistem adaptasi baru terhadap mitigasi bencana banjir | |
| Minimnya peraturan daerah terkait tindakan pelanggaran ruang, pelanggaran lingkungan, dan pelanggaran lainnya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di sempadan sungai. | |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Belum terdata dengan baik peta lokasi kejadian rawan bencana banjir berdasarkan data historis yang berbasis system informasi geografis | |
| Masih rendahnya penerapan teknologi baru dalam kegiatan mitigasi bencana | |
| Perilaku masyarakat yang tetap bertahan dan tidak melakukan adaptasi ruang baru agar bisa terhindari dari daerah rawan banjir | |
| Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan membuang sampah dengan skema 3R | |
| Masih tingginya perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan, terutama di daerah sungai. | |
| Minimnya sosialisasi peningkatan kapasitas SDM di daerahdaerah yang rawan bencana banjir | Kabupaten Lebak memiliki Level Kesiapsiagaan RENDAH, dengan nilai 0,24, yaitu 3,77%desa berada di tingkat risiko banjir sedang |
| Terbatasnya SDM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang mitigasi bencana banjir | |
| Minimnya pemahaman masyarakat secara ilmiah (scientific knowledge) | |
| Kontur wilayahnya yang berbukit- bukit dengan beda ketinggian dataran memiliki rentang yang cukup lebar | >> Apabila terjadi bencana tanah longsor, maka yang mengalami kerugian ekonomi paling besar adalah Kecamatan Cibeber dengan jumlah Rp. 369.000.000. Selain Kecamatan Cibeber, kecamatan yang memiliki kelas kerugian tinggi adalah Kecamatan Bayah (Rp. 184.000.000), Kecamatan Cigemblong (Rp. 208.000.000), Kecamatan Cihara |
| Sebagian topografi wilayah kabupaten merupakan daerah tinggi/berbukit | |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab longsor | (Rp. 146.000.000), Kecamatan Cilograng (Rp. 151.000.000), Kecamatan Leuwidamar (Rp. 139.000.000), Kecamatan Panggarangan (Rp. 168.000.000), dan Kecamatan Sobang (Rp. 179.000.000).<br>>> Kecamatan yang memiliki kerentanan lingkungan tertinggi adalah Kecamatan Cibeber dengan luas lingkungan yang terpapar seluas 106.050 Ha. Kecamatan lain yang memiliki kerentanan lingkungan tinggi adalah Kecamatan Cigemblong (2.173Ha), Kecamatan Cilograng (4.123 Ha), Kecamatan Lebak Gedong (36.116 Ha), Kecamatan Cilograng (4.123 Ha), Kecamatan Panggarangan (6.951 Ha), dan Kecamatan Sobang (18.233 Ha)" |
| Kurangnya penerapan infrastruktur mitigasi alami pada daerah yang memiliki kelerengan yang curam | |
| Kurangnya penyediaan infrastruktur mitigasi hadapi dan infrastruktur hindari pada daerah rawan longsor | |
| Sulitnya pemerataan infrastruktur mitigasi bencana gerakan tanah | |
| Kurang terjaganya drainese di lereng-lereng yang memiliki tingkat risiko longsor | |
| Masih banyaknya bangunan yang dibangun di daerah yang rawan gerakan tanah/longsor | |
| Terjadinya penggundulan hutan (alih fungsi lahan) | |
| Keberadaan lahan pertanian di lereng gunung | |
| Belum adanya aturan dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran pelanggaran bangunan di daerah yang memiliki risiko longsor | |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Penebangan pohon liar di daerah tebing, | (Rp. 146.000.000), Kecamatan Cilograng (Rp. 151.000.000), Kecamatan Leuwidamar (Rp. 139.000.000), Kecamatan Panggarangan (Rp. 168.000.000), dan Kecamatan Sobang (Rp. 179.000.000).<br>>> Kecamatan yang memiliki kerentanan lingkungan tertinggi adalah Kecamatan Cibeber dengan luas lingkungan yang terpapar seluas 106.050 Ha. Kecamatan lain yang memiliki kerentanan lingkungan tinggi adalah Kecamatan Cigemblong (2.173Ha), Kecamatan Cilograng (4.123 Ha), Kecamatan Lebak Gedong (36.116 Ha), Kecamatan Cilograng (4.123 Ha), Kecamatan Panggarangan (6.951 Ha), dan Kecamatan Sobang (18.233 Ha)" |
| Adanya pembangunan pemukiman di daerah dibawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor | |
| Pengendalian terhadap pencemaran air yang kurang | |
| Minimnya upaya atau sistem adaptasi baru terhadap mitigasi bencana gerakan tanah / longsor | |
| Belum tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan/atau dokumen kontijensi | |
| Kurangnya penerapan teknologi (Warning system atau teknologi peringatan bencana longsor) dengan menciptkan alatalat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di daerah-dareh longsor | |
| Belum terdata dengan baik peta lokasi rawan bencana gerakan bencana berdasarkan data historis yang berbasis system informasi geografis | |
| Minimnya sosialisasi peningkatan kapasitas SDM di daerah daerah yang rawan bencana gerakan tanah/longsor | |
| Terbatasnya SDM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang mitigasi bencana gerakan tanah/longsor | |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Terpapar oleh ancaman bencana gempa dari lempeng megathrust | Luasan wilayah terdampak gempa bumi masuk dalam kelas sedang. Kecamatan Cibeber akan mengalami kerugian fisik paling besar, yaitu sekitar Rp. 92 Milyar. apabila terjadi bencana gempa bumi yang mengalami kerugian ekonomi paling besar adalah Kecamatan Wanasalam dengan jumlah Rp. 2 Milyar (Rp. 2.493.000.000), diikuti oleh Kecamatan Banjarsari (Rp.1.818.000.000) dan Kecamatan Rangkasbitung (Rp. 1.208.000.000) |
| Kurangnya peduli terhadap penyediaan infrastruktur mitigasi hindari pada bangunan bertingkat | |
| Kondisi bangunan yang rentan terhadap ancaman bencana gempa bumi | |
| Kondisi permukiman padat menyulitkan untuk jalur dan tempat evakuasi | |
| Belum tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan/atau dokumen kontijensi | |
| Minimnya upaya atau sistem adaptasi baru (bangunan tahan gempa) yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi rendah dalam upaya mitigasi hindari bencana gempa bumi | |
| Kondisi permukiman yang cenderung rapat, struktur pembesian yang buruk mengakibatkan bangunan rentan terhadap bencana gempa bumi | |
| Minimnya sosialisasi peningkatan penanggulangan risiko bencana Gempa melalui simulasi penyelamatan diri | Kabupaten Lebak memiliki Level Kesiapsiagaan RENDAH, dengan nilai 0,24<br>- 12% Desa berada di tingkat risiko sedang untuk bencana gempa bumi |
| Kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana gempa bumi yang masih kurang | |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| kesiapsiagaan masyarakat terhadap perubahan iklim yang masih kurang | Sebanyak delapan kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten mengalami krisis air bersih karena perubahan iklim el nino yang menyebabkan kemarau Panjang. |
| tidak adanya kebijakan terkait rencana aksi perubahan iklim | |

- **Belum Optimalnya Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Pemukiman**

Pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak untuk layanan pengurangan sampah masih sangat rendah yaitu 0.7% (20.46% Capaian pengurangan berdasarkan data Neraca Sampah Tahun 2023 DLH) dimana angkat tersebut masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan layanan penanganan sampah mencapai 10,1% (59.45% capaian akses penanganan berdasarkan data Neraca Sampah Tahun 2023 DLH), hal ini mengingat layanan persampahan hanya di beberapa daerah saja terutama wilayah perkotaan. Terdapat 89,2% sampah yang tidak terkelola (20.10% capaian sampah tidak terkelola berdasarkan data Neraca Sampah Tahun 2023 DLH). Kondisi sanitasi di Kabupaten Lebak adalah untuk air limbah domestik masih ada masyarakat di Kabupaten Lebak yang melakukan BABs ditempat terbuka baik diperkotaan maupun perdesaan, untuk akses aman masih sangat kecil yakni 0.77% hal ini dikarenakan walaupun truk tinja yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak sudah beroperasi akan tetapi IPLT yang ada belum beroperasi secara maksimal. Permasalahan tersebut dipengaruhi minimnya penyediaan sarana prasarana sanitasi, pendanaan dan regulasi.

Berdasarkan hasil instrumen SSK, untuk area berisiko drainase di Kabupaten Lebak terdapat 5 Desa di 4 kecamatan yang memiliki indeks risiko drainase tinggi yaitu di desa Cilangkah dan Kadujajar Kecamatan Malingping, Desa Cidikit Kecamatan Bayah, Desa Cijoro Lebak di Kecamattan Rangkasbitung, dan Desa Kaduangu Tengah di Kecamatan Cibadak. Data pendukung dari

akar masalah pada bagian sarana prasarana pemukiman dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 2. 90 Akar Masalah terkait Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Pemukiman**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Rendahnya kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup sehat | Masih banyak Masyarakat melakukan penangan persampahan dengan cara dibakar |
| Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan | berdasarkan survey ERHA, masyarakat yang di survey sebanyak 51% lulusan SD |
| Lemahnya kesejahteraan ekonomi rumah tangga | sebanyak 22,88% masyarakat memiliki surat keterangan tidak mampu |
| • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah, misalnya dalam program 3R.<br>• Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penanganan dan pengurangan sampah. | Tingkat capaian persentase pengurangan sampah masih 63,5% |
| | Masih rendahnya pengurangan sampah di wilayah perkotaan dan perdesaan (0,4% dan 1,7%) |
| | Jumlah sampah yang dikelola masih 97,4% |
| | Tingkat capaian persentase penanganan sampah masih 90,95% |
| | Kurangnya Sarana Pengangkut, khususnya Gerobak dan Gerobak Motor |
| Minimnya sarana prasarana persampahan | Kondisi TPA yang masih open dumping (seharusnya sanitary Lanfill) |
| Rendahnya kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat | Masih ada Masyarakat lebak yang melakukan BABS sebanyak 0,1% (437 KK) |
| | Rendahnya kesadaran Masyarakat terkait perilaku hidup sehat |
| kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan | berdasarkan survey ERHA, masyarakat yang di survey sebanyak 51% lulusan SD |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| minim sarana prasarana sanitasi | Persentase akses sanitasi masih 99,5% |
| | Akses aman baru mencapai 0,77% |
| | Masih banyak Masyarakat yang belum memiliki akses layak (1,83%) 27.060 KK |
| IPLT yang belum berfungsi secara optimal | Kondisi IPLT yang belum berfungsi secara optimal |
| Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penanganan air limbah domestik | Masih ada Masyarakat lebak yang melakukan BABS sebanyak 0,1% (437 KK) |
| | Rendahnya pendanaan sanitasi terkait penanganan air limbah domestik |
| Tidak ada regulasi yang mengatur air limbah | Belum adanya regulasi yang mengatur terkait air limbah domestik |
| | Belum adanya PERDA/PERBUB terkait retribusi air limbah permukiman |
| Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pemeliharaan drainase | Belum terdapat pemisah antara saluran drainase dengan saluran pembanguan air limbah (tercampur) |
| Belum adanya Dokumen Masterplan Drainase | Belum adanya Dokumen Masterplan Drainase |
| Tidak ada regulasi yang mengatur drainse | Regulasi mengatur pengelolaan drainase masih belum ada |
| kurangnya intervensi pemerintah dalam penyediaan saluran drainase | Saluran drainase belum terdapat di seluruh area Kab. Lebak, hanya mencakup area perkotaan saja |

## C. Klaster – Pemerintahan

Pada klaster pemerintahan , terdapat 2 masalah pokok pada *level impact* yang merupakan isu strategis dari klaster ini yaitu :

1. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lebak.

Secara lebih mendetail maka isu strategis tersebut disebabkan dari beberapa pokok masalah yaitu:

1) Belum optimalnya pelayanan penjagaan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2) Belum Optimalnya pelayanan kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pemerintahan , dan pelayanan publik berbasis elektronik;
3) Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan daerah
4) Belum optimalnya kapasitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan
5) Rendahnya kapasitas Fiskal Daerah
6) Rendahnya pengelolaan dan pengembangan pada tingkat Desa

Urusan – urusan dalam klaster pemerintahan ini merupakan aspek yang melakukan tata Kelola pemerintahan saat ini. Dalam beberapa isu pada klaster pemerintahan ini maka terdapat beberapa isu yang beririsan dengan klaster lain seperti:

- Belum optimalnya kapasitas aparatur negeri dalam memberikan pelayanan

  Isu ini berkaitan dengan aspek lain dimana hampir seluruh urusan pada pemerintahan daerah Kabupaten Lebak kurang memiliki SDM yang sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut membuat kinerja pelayanan dari pemerintah daerah menjadi sulit untuk ditingkatkan

- Rendahnya kapasitas fiskal daerah

  Kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu hal yang utama dalam

menjalankan program pada semua urusan di Kab. Lebak. Urusan keuangan menjadi salah satu yang memiliki peran besar dalam isu tersebut. Isu ini berkait dengan semua klaster yang lain terutama untuk menjalankan programnya. Klaster infrastruktur bisa dibilang akan memerlukan dana yang paling besar dibandingkan klaster yang lain karena terkait Pembangunan, sarana dan prasarana wilayah.

Masing-masing masalah pokok pada tingkatan outcome tersebut disebabkan oleh rangkaian masalah dan akar masalah. Berikut pembahasan masing-masing masalah pokok tersebut:

- **Belum Optimalnya Pelayanan Penjagaan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

Pada pokok masalah banyak disebabkan oleh berbagai hal terutama dari urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat berupa dari sisi organisasi masyarakat ataupun LSM, partai politik, maupun adanya isu terkait paham radikalisme. Secara lebih lengkap permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 91 Akar Masalah Terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| **KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | |
| Masih ada ormas yang belum melaporkan keberadaan organisasinya ke Kesbangpol | Masih ada ormas yang belum melaporkan keberadaan organisasinya ke Kesbangpol |
| Alamat sekretariat yang masih belum tetap | Alamat sekretariat yang masih belum tetap |
| Masih kurang dalam pengadministrasian/pengelolaan organisasinya | Masih kurang dalam pengadministrasian/pengelolaan organisasinya |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Partai Belum berbadan hukum | Partai Belum berbadan hukum |
| Potensi akan bahaya radikalisme dan terorisme di masyarakat; | Potensi akan bahaya radikalisme dan terorisme di masyarakat; |
| rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat; | rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat; |
| Rendahnya penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila | Rendahnya penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila |
| Masih rendahnya kerukunan hidup antar umat beragama | Masih rendahnya kerukunan hidup antar umat beragama |
| Munculnya ajaran / aliran yang dianggap menyimpang dari pokok - pokok ajaran agama yang sudah ada. | Munculnya ajaran / aliran yang dianggap menyimpang dari pokok - pokok ajaran agama yang sudah ada. |
| Perlunya ada perubahan struktur organisasi dengan adanya penambahan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. | Perlunya ada perubahan struktur organisasi dengan adanya penambahan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. |
| Rendahnya Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM | Rendahnya Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %) |
| Rendahnya cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB | Rendahnya cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB |
| Rendahnya Persentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda | Persentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda (Satuan: %) |
| Tidak tercapainya target tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) | Tidak tercapainya target tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %) |
| Rendahnya cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran | Rendahnya cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran |
| Rendahnya cakupan penanggulangan bencana | Rendahnya cakupan penanggulangan bencana |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Rendahnya kecamatan yang tanggap bencana | Rendahnya kecamatan yang tanggap bencana |

- **Belum Optimalnya Pelayanan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Administrasi Pemerintahan, dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik**

Pokok masalah ini terjadi karena masih adanya permasalahan dalam hal pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kab. Lebak hingga ke tingkat desa. Sistem berbasis elektronik yang telah digagas pun belum dapat berfungsi optimal untuk membantu hal tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat dengan lebih lengkap pada tabel berikut:

**Tabel 2. 92 Akar Masalah Terkait Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | |
| kondisi perangkat perekaman KTP-el yang ada di 28 kecamatan sudah banyak yang rusak | kondisi perangkat perekaman KTP-el yang ada di 28 kecamatan sudah banyak yang rusak |
| honorarium yang diterima oleh tenaga operator di 28 kecamatan masih rendah dan belum pernah ada peningkatan | honorarium yang diterima oleh tenaga operator di 28 kecamatan masih rendah dan belum pernah ada peningkatan |
| terbatasnya jumlah ribbon untuk pencetakan KTP dan KIA | terbatasnya jumlah ribbon untuk pencetakan KTP dan KIA |
| Pemanfaatan KTP elektronik belum berbasis IT | Pemanfaatan KTP elektronik masih perlu difoto copy untuk mengurus kokumen kependudukan |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Rendahnya penggunaan KTP Digital | untuk memenuhi SPBE, pencapaian IKD daerah minimal harus 4%. sementara untuk mencapai target tersebut rasanya sangat sulit sebab masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa tanpa beralihke KTP Digital pu masih bisa menggunakan fisik KTP-el) |
| KTPdigital yang tersimpan dalam HP android membuat tidak fleksibel saat akan berganti kepemilikan | KTPdigital yang tersimpan dalam HPandroid membuat tidak fleksibel saat akan berganti kepemilikan |
| Masih banyaknya pencatatan perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai SOP | Masih banyaknya pencatatan perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai SOP |
| Kurangnya sosialisasi terkait prosedud pernikahan dan perceraian hingga tingkat desa | Kurangnya sosialisasi terkait prosedur pernikahan dan perceraian hingga tingkat desa |
| Infrastruktur pelayanan publik yang belum memadai | Infrastruktur pelayanan publik yang belum memadai |
| Proses Perijinan dan Birokrasi yang masih panjang | Proses Perijinan dan Birokrasi yang masih panjang |

- **Belum Optimalnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan**

Pokok masalah ini terjadi akibat beberapa hal yaitu dari kurang optimalnya sistem tata Kelola seperti nilai SAKIP yang belum mencapai target, dan juga dari sisi administrasi pemerintahan. Selain itu dengan adanya isu Kemungkinan perubahan bentuk badan dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) menjadi salah satu agenda untuk meningkatkan inovasi daerah di Kabupaten Lebak.

**Tabel 2. 93 Akar Masalah Terkait Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| **PERENCANAAN** | |
| Kemungkinan perubahan bentuk badan dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) | Adanya ranperda terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah yang merubah bappelitbangda menjadi bapperinda. |
| **PENGAWASAN** | |
| Nilai SAKIP yang belum sesuai target | Nilai SAKIP 82.93% kurang dari target |
| **ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** | |
| Rendahnya indeks kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD | Indeks kepuasan kepada Anggota DPRD yang belum mencapai target (< 86%) |
| Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi | Tidak tercapainya target rata-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi kepada Anggota DPRD melalui komisi-komis |
| **FUNGSI PENUNJANG LAINNYA** | |
| Rendahnya cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran | Rendahnya cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran |

- **Belum Optimalnya Pengarsipan Dokumen Pemerintah Dengan Sistem Berbasis Elektronik**

  Saat ini sistem pengarsipan di pemerintahan Kab. Lebak masih dianggap kurang tertata dengan baik. Hal tersebut terlihat dari hasil evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019 – 2024 dimana masih rendahnya ketertiban dalam pengelolaan dokumen ataupun arsip milik pemerintah. Salah satu langkap yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong sistem berbasis elektronik dimana dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat membatu sistem pengarsipan di lingkungan pemerintah Kab. Lebak.

**Tabel 2. 94 Akar Masalah Terkait Pengarsipan Dokumen Pemerintahan**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| **Kearsipan** | |
| Rendahnya Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara | Rendahnya Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen) |
| Rendahnya ketertiban Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah | Rendahnya ketertiban Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah (Satuan: %) |

- **Belum Optimalnya Kapasitas Aparatur Negara Dalam Memberikan Pelayanan**

  Kapasitas aparatur negara menjadi salah satu isu klasik yang perlu ditingkatkan untuk dapat mendukung pelayanan pemerintah daerah di Kab. Lebak. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal seperti permasalahan teknis berupa kurangnya pelatihan/diklat yang dilakukan oleh aparatur negara untuk melakukan tugasnya. Selain dari sisi kapasitas, jumlah dari SDM aparatur negara pun masih dianggap kurang untuk dapat bekerja secara optimal.

**Tabel 2. 95 Akar Masalah Terkait Kapasitas Aparatur Negara**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | |
| Kurangnya kapasitas SDM PMD di kecamatan dan desa menyebabkan kesalahan input data | Kurangnya kapasitas SDM PMD di kecamatan dan desa menyebabkan kesalahan input data |
| verifikasi keluarga miskin ekstrim terkendala di tingkat desa | verifikasi keluarga miskin ekstrim terkendala di tingkat desa |
| **Perencanaan** | |

| | |
|---|---|
| Rendahnya kapasitas Fiskal Pada Bidang Perencanaan | Rendahnya kapassitas Fiskal Pada Bidang Perencanaan |
| Masih kurangnya Tenaga Fungsional Perencana dan Analis Kebijakan | Masih kurangnya Tenaga Fungsional Perencana dan Analis Kebijakan |
| Kurangnya jumlah aparatur pemerintahan di lapangan | Kuranganya SDM teknis yang ada di lapangan |
| **KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | |
| Rendahnya pegawai yang mengikuti diklat teknis | 1.56% pegawai yang mengikuti diklat teknis |

- **Rendahnya kapasitas Fiskal Daerah**

  Dari sisi kapasitas fiskal maka mayoritas perangkat daerah mengalami kekurangan dana untuk menjalankan program-programnya. Hal tersebut membuat pentingnya usaha dalam mencari alternatif pembiayaan dari perangkat daerah maupun pemerintah Kab. Lebak untuk dapat menjalankan programnya secara optimal.

**Tabel 2. 96 Akar Masalah Terkait Kapasitas Fiskal Daerah**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| **Keuangan** | |
| Kurangnya kapasitas SDM dalam melakukan inovasi keuangan daerah | Kurangnya alternatif pembiayaan / keuangan dalam mendukung program pemerintahan |
| Rendahnya peran pemerintah dalam meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, | Kurang dari target <7% |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah | Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah |
| Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah | Ketaatan wajib pajak daerah 66.41% |
| Belum terdokumentasikannya total aset daerah | Dokumentasi aset daerah baru sekitar 48% |
| Rendahnya cakupan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik | Rendahnya cakupan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik |

- **Rendahnya Pengelolaan dan Pengembangan Pada Tingkat Desa**

  Dari sisi pengelolaan dan pengembangan pada tingkat desa menjadi salah satu isu yang cukup penting. Pemerataan sistem pemerintah yang baik pada semua tingkatan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

**Tabel 2. 97 Akar Masalah Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Pada Tingkat Desa**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | |
| Rendahnya Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif | Rendahnya Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif |
| Rendahnya persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masyarakat | Rendahnya persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masyarakat |
| Rendahnya Persentase LKD yang produktif | Rendahnya Persentase LKD yang produktif |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Rendahnya Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang | Rendahnya Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang |
| Rendahnya Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa | Rendahnya Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa |
| Rendahnya Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa | Rendahnya Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa |
| Rendahnya Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkinerja baik | Rendahnya Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkinerja baik |
| Rendahnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif | Rendahnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif |
| Rendahnya Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif | Rendahnya Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif |
| Rendahnya persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masyarakat | Rendahnya persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masyarakat |
| Rendahnya Persentase Pemerintahan Desa yang penataan Desanya terkelola dengan baik | Rendahnya Persentase Pemerintahan Desa yang penataan Desanya terkelola dengan baik |
| Rendahnya Persentase pengentasan desa tertinggal | Rendahnya Persentase pengentasan desa tertinggal |

## D. Klaster – Ekonomi

Pada klaster permasalahan daya saing ekonomi daerah di Kabupaten Lebak, pada level *impact*, yaitu : “Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan nilai tambah produk unggulan wilayah dalam mendukung daya saing daerah”

Secara mendetail pokok masalah isu strategis tersebut disebabkan dari beberapa pokok masalah :

1) Belum Optimalnya daya saing UMKM dan Koperasi

2) Belum terwujudnya ketahanan pangan daerah
3) Belum mendukungnya iklim penanaman modal
4) Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian
5) Belum Optimalnya Produktivitas Peternakan
6) Rendahnya daya saing perikanan
7) Belum optimalnya kontribusi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
8) Tingginya tingkat pengganggguran
9) Belum optimalnya investasi dan pertumbuhan ekonomi

Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan nilai tambah produk unggulan wilayah dalam mendukung daya saing daerah disebabkan oleh masalah pokok level *outcome* dan akar masalah berikut:

- **Belum Optimalnya daya saing UMKM dan Koperasi**

  Berdasarkan Kabupaten Lebak dalam angka di Kabupaten Lebak terdapat 629 unit koperasi, yang terdiri dari 34 unit KUD, 62 unit KPRI, 27 unit KOPKAR, dan 785 unit koperasi lainnya. Namun hanya 9% koperasi yang bekerja dengan baik. Masalah pokok disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan koperasi aktif serta belum optimalnya pengurus dan pengawasan yang kompeten. Data pendukung dari akar masalah pada bagian daya saing UMKM dan koperasi dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 2. 98 Akar Masalah Terkait Daya Saing UMKM dan Koperasi**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| kurangnya edukasi atau kesadaran yang memadai tentang manfaat koperasi | persentase koperasi aktif sebanyak 9,50% atau setara dengan ketercapaian 55,86% dari target |
| | Rendahnya jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki izin, legalitas, dan sertifikasi sehingga sulit menjangkau akses permodalan |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| | UMKM berbasis digitalisasi dengan legalitas yang masih rendah yaitu dibawah 25% |
| kurangnya edukasi atau kesadaran yang memadai tentang manfaat koperasi | |
| Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam melakukan pembinaan koperasi | persentase koperasi berkinerja baik sebanyak 9% atau setara dengan ketercapaian 71,07% dari target |
| manajemen koperasi yang tidak efektif | |
| Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan SDM | persentase pengurus dan pengawas koperasi yang kompeten sebanyak 5% atau setara dengan 74,56 |
| minimnya ketersediaan SDM | |
| belum tersedianya legalitas untuk UMKM | UMKM berbasis digitalisasi dengan legalitas yang masih rendah yaitu dibawah 25% |
| Rendahnya kualitas manajemen para pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga | persentase koperasi berkinerja baik sebanyak 9% atau setara dengan ketercapaian 71,07% dari target |
| rendahnya motivasi dalam berdaya saing | persentase UMK yang berdaya saing sebanyak 5% atau setara dengan ketercapaian 24,46% dari target |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Kurang pengetahuan cara pengolahan yang modern dan masih menggunakan teknologi dan peralatan yang tradisional | |
| Belum dipergunakannya peralatan teknologi yang dapat membantu menunjang proses produksi dalam UMKM kreatif | anggaran yang terbatas dalam menjalankan UMKM |
| Kurangnya akses dalam pemasaran hasil produk UMKM dan Industri Kreatif | |

- **Belum Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah**

  Isu di Kabupaten Lebak terkait dengan rasio pangan aman, yang dipengaruhi karena penyediaan infrastruktur untuk ketersediaan pangan, serta intervensi dari pemerintah. Data pendukung dari akar masalah pada bagian ketahanan pangan daerah dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 99 Akar Masalah Terkait Ketahanan Pangan Daerah**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Penguasaan teknologi penggunaan produk pertanian yang masih sangat terbatas, sehingga mengakibatkan produktivitas pertanian menjadi rendah | penguatan cadangan pangan memiliki tingkat capaian 49,9% dari target |
| | lumbung pangan yang mendapatkan bantuan hanya 1 dari total yang di rencanakan yaitu 2. |
| Masih rendahnya inovasi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi barang jadi | Masih rendahnya inovasi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi barang jadi |
| Penerapan standarisasi internasional berjalan lambat. Pengelolaan HKI belum optimal. | belum adanya sertifikasi pasar yang aman seperti sampel BPOM, kecurangan makanan, pemalsuan makanan |
| Kapasitas SDM yang belum memadai | Kapasitas SDM penyuluh yang perlu lebih banyak berkoordinasi |

| | |
|---|---|
| rendahnya akurasi data neraca bahan makanan | Kesulitan dalam mendapatkan data ekspor impor dalam menyusun neraca bahan makanan |
| Kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat | |
| klaster agroindustri daerah belum dikembangkan dan di bina secara optimal | adanya perbedaan menghitung indeks ketahanan pangan kabupatan dengan pemerintah pusat |

- **Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian**

  Tahun 2023, 3 jenis produksi sayuran terbesar adalah Kacang panjang 13.311 kwintal, terung 12.134 kwintal dan kangkung 9.504 kwintal. Pada tahun tersebut komoditas palawija yang hanya mencapai 63,23% dari target. Permasalahan tersebut dipengaruh karena masih terbatasnya benih, edukasi dalam bertani serta terbatasnya infrastruktur. Data pendukung dari akar masalah pada bagian produktivitas pertanian dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 100 Akar Masalah Terkait Produktivitas Pertanian**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Rendahnya kompetensi dalam berusaha tani | jumlah kelompok petani pemula masih 83,25% dari target |
| | jumlah kelompok petani madya masih 75% dari target |
| pengendalian dan penanggulangan bencana masih terbatas | kendala terhadap faktor eksternal seperti cuaca dan iklim yang memperngaruhi hasil pertanian serta adanya bencana pertanian seperti serangan opt maupun bencana seperti Kekeringan |
| Terbatasnya produksi benih dan bibit yang berkualitas | komoditas palawija yang hanya mencapai 63,23% dari target |
| Rendahnya efektifitas dan efisiensi proses panen, penanganan pasca panen dan pemasaran | peningkatan nilai tambah produksi pertanian masih belum berjalan |
| rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pertanian | SDM minim dalam mengelola hasil pertanian |
| Rendahnya ketertarikan masyarakat kepada sektor pertanian, sehingga | |

| | |
|---|---|
| tidak ada regenerasi | |
| Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian | Rendahnya pertumbuhan nilai produksi yang terjual |
| Rendahnya pengembangan sentra kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian dan perkebunan | Rendahnya ketertarikan masyarakat kepada sektor pertanian, sehingga tidak ada regenerasi |
| Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana | ada beberapa komunitas komunitas yang memang dirasa agak belum ada intervensi dari pemerintah Lebak untuk dapat ditingkatkan. Selain itu memang ada juga kita kendala terhadap faktor eksternal yaitu lingkungan. |
| | Kondisi infrastruktur pertanian masih minim, irigasi belum optimal, sumber air terbatas, irigasi eksisting belum mendukung peningkatan produksi |

- **Belum Mendukungnya Iklim Penanaman Modal**

  Pertumbuhan investasi saat ini targetnya 1,4 T namun realisasi dalam penanaman modal hanya 300jt (Dinas Penanaman Modal, 2024). Untuk membantu meningkatkan perekonomian dalam daerah, dibutuhkan aliran investasi yang cukup. Akan tetapi, Kabupaten Lebak masih memiliki nilai PMA dan PMDN yang cukup rendah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh belum adanya informasi dalam penanaman modal dan belum optimalnya promosi. Data pendukung dari akar masalah pada bagian penanaman modal dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 101 Akar Masalah Terkait Iklim Penanaman Modal**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Kapasitas SDM yang belum memadai | Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan penanaman modal sebanyak 83,75 atau setara dengan 97,38 poin dari target |
| Sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan | Hampir 90% jumlah UMKM belum terdata, yang bisa masuk ke dalam APBD hanya industri menengah besar |
| Belum optimalnya penggunaan media dan konten kreatif UMKM | Promosi terhadap UMKM yang masih rendah |

- **Belum Optimalnya Produktivitas Peternakan**

  Penurunan populasi populasi ternak tertera secara kuantitas maupun kualitas ternak. Kondisi tersebut berdampak pada penyediaan penyediaan daging maupun untuk ketahanan pangan (Dinas Peternakan, 2024). Permasalahan tersebut dipengaruhi karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur hingga benih. Data pendukung dari akar masalah pada bagian produktivitas pertanian dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 102 Akar Masalah Terkait Produktivitas Peternakan**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Keterbatasan pengetahuan SDM dalam pengelolaan dan pengawasan pertanian | keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan pengawasan pertanian, hanya terdapat 4 orang petugas di lapangan yang melayani 28 kecamatan serta 340 desa. |
| | keterbatasan SDM dalam melakukan rekayasa genetik |
| Kontrol Kesehatan hewan ternak belum optimal (terutama PMK) | pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tidak bisa diukur |
| Nutrisi pakan ternak masih mengandalkan sediaan dari alam | |
| Teknologi pembibitan ternak masih rendah | Pembibitan kerbau yang masih rendah |
| Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana. | Anggaran dari APBN sudah tidak dicairkan ke Kabupaten, sehingga mempengaruhi rekayasa genetik |

- **Rendahnya daya saing perikanan**

  Kabupaten Lebak memiliki daerah selatan yang berbatasan dengan lautan.

Hal ini membuat Kabupaten Lebak menjadi kaya tidak hanya dengan sumber daya alam pada sektor pertanian dan perkebunan, namun juga dengan perikanannya. Dalam sektor perikanan, Kabupaten Lebak memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangannya, salah satunya adalah pembudidaya dan nelayan yang mulai berguguran dikarenakan biaya produksi yang tidak sebanding dengan marginnya. Dalam bidang perikanan juga terdapat permasalahan seperti rendahnya permodalan dalam usaha perikanan, masih terbatasnya pada usaha yang belum komersial serta terbatasnya pengelolaan perikanan. Data pendukung dari akar masalah pada bagian produktivitas perikanan dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 103 Akar Masalah Terkait Produktivitas Perikanan**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| rendahnya jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | usaha perikanan budidaya masih terbatas pada usaha yang sifatnya belum komersial atau menggunakan lahan yang tidak terpakai |
| Rendahnya minat dan jumlah SDM di bidang perikanan yang berkualitas dan terampil | |
| Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta pendampingan terhadap masayarakat pembudidaya ikan | |
| Teknologi pemanfaatan lahan periaran untuk usaha perikanan | |
| Sarana dan prasaran budidaya dan sarana alat dan armada ( perikanan laut) masih rendah | |
| Suplai benih yang sebagian besar masih dari luar | rendahnya permodalan dalam usaha perikanan |
| Tingginya harga pakan ikan | |
| belum optimalnya pendapatan nelayan | kesenjangan pendapatan antara pemilik kapal dan nelayan |
| Teknologi budidaya dan teknologi pakan kurang berkembang | pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan yang masih rendah |
| investasi pada bidang usaha pengolahan | |

| | |
|---|---|
| dan pemasaran dengan keunggulan jenis dan kualitas produk | |
| Belum optimalnya inovasi dalam pengolahan hasil perikanan | |

- **Belum optimalnya kontribusi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif**

  Pariwisata merupakan sektor yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Hal ini dibuktikan dengan visi RPJMD Kabupaten Lebak pada Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022, yaitu "Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal". Akan tetapi, sektor pariwisata Kabupaten Lebak dalam pengembangannya masih terdapat hambatan. Antara lain masih rendahnya daya tarik Lebak sebagai salah satu destinasi kunjungan wisata, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempromosikan pariwisata lokal. Permasalahan lainnya yang masih ada dalam pariwisata yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB hatga berlaku masih 83,64%, selain itu juga perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Lebak masih 95,36%. Data pendukung dari akar masalah pada bagian kontribusi pariwisata dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 104 Akar Masalah Terkait Kontribusi Pariwisata**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Atraksi di destinasi buatan masih terbatas | Persentase budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional masih 96,5% |
| Aksesibilitas ke tempat destinasi wisata dan cagar budaya masih belum optimal | |
| Rendahnya Management Pengelolaan Potensi Obyek Daya Tarik Wisata | |
| Amenitas di Cagar Budaya dan Destinasi wisata kurang optimal | |
| terbatasnya perjalanan wisatawan nusantara ke Kabupaten Lebak | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke |

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Banyak jasa usaha pariwisata yang belum berijin; | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Lebak masih 95,36% |
| Pengetahuan dan pemahaman para pengelola asset/nilai-nilai budaya terhadap upaya pengembangan yang masih kurang | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan museum masih 92,28% |
| Belum terakomodirnya kebutuhan regulasi di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadai sehingga menyebabkan kurangnya jaminan kepastian hukum bagi pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif | persentase kelembagaan di 23 ODTW masih 78,26% |
| kurangnya investasi dalam teknologi dan inovasi | produktivitas sektor industri 98,05% |
| kurangnya SDM yang terampil | |
| belum optimalnya pelatihan yang memadai bagi tenaga kerja | |
| kurangnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri | |

- **Tingginya Tingkat Pengganggguran**

  Pada tahun 2023, angkatan kerja di Kabupaten Lebak sebanyak 722.854 orang. Tingkat pengganggguran terbuka di Kabupaten Lebak mencapai 115,59%. Data pendukung dari akar masalah pada bagian tingkat pengganggguran dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2. 105 Akar Masalah Terkait Tingkat Pengangguran**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| Masih kurangnya program pelatihan tenaga kerja di tingkat daerah | Kurangnya sumber daya manusia yang bisa memberikan pelatihan bagi tenaga kerja di tingkat daerah |
| Ketidakcocokan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan kualifikasi tenaga kerja | |

- **Belum optimalnya investasi dan pertumbuhan ekonomi**

  Di Kabupaten Lebak, Banten, belum optimalnya investasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan yang signifikan bagi perkembangan daerah tersebut. Meskipun Lebak memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata, realisasi investasi masih terhambat oleh berbagai faktor. Infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan akses transportasi, serta masalah administratif sering kali menjadi penghalang utama. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal juga berdampak pada rendahnya daya saing.

**Tabel 2. 106 Akar Masalah Terkait Belum Optimalnya Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

| Akar Masalah | Data Pendukung |
|---|---|
| kurangnya inovasi dan teknologi dalam mendukung perdagangan | Masih terbatasnya sarana prasarana pasar/perdagangan |
| Kurang berkembangnya pasar sebagai sarana pedagang untuk bertransaksi | |
| belum optimalnya pelatihan SDM yang memadai pada ekonomi kreatif | |
| kurangnya sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan industri ekonomi | |
| kurangnya pelayanan perizinan perindustrian | Hanya 23.769 pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha, sedangkan 93.500 pelaku usaha belum memiliki |

| | |
|---|---|
| | legalitas. |

### 2.3.2. Isu Strategis Daerah

#### 2.3.2.1. Pemetaan Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah ini merupakan hasil pemetaan atau penstrukturan masalah pada bagian pemetaan permasalahan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada berbagai aspek, telaah terhadap isu global, nasional dan regional, isu strategis jangka menengah Kabupaten Lebak pengelompokan isu sebagai berikut.

**Tabel 2. 107 Penentuan Isu Strategis Daerah**

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| -Sumber Daya Manusia (SDM) yang Adaptif<br>-Dukungan Kesadaran dan Komitmen Pemerintah Daerah | -Kesenjangan Digital (Digital Divide)<br>-Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Digitalisasi (Banyaknya Blankspot) | -Pemerintahan yang Bersih (Good Governance)<br>-Kualitas Pelayanan Publik | -Transformasi Digital Pemerintahan (Digital Government)<br>-Smart City dan E-Service<br>-Keamanan Siber (Cybersecurity), Privasi dan Perlindungan Data | -Implementasi SPBE menjadi Fokus Nasional untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Efektif dan Efisien<br>-Peningkatan Literasi Digital Nasional | -Kesenjangan Digital Antar Daerah<br>-Adaptasi Kebijakan dan Implementasi Digitalisasi Sehingga akan Selaras dengan Kebijakan dan Arahan Tingkat Provinsi dan Nasional | -Akselerasi Efisiensi dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| | -Keterbatasan Anggaran | | -Pemanfaatan Artificial Intellegent (AI) dan Big Data | | | |
| - Lokasi Strategis dan berdekatan dengan wilayah metropolitan Jakarta<br><br>Menjadikan potensi untuk menarik investasi dan aktivitas ekonomi<br><br>-Potensi sumber-sumber PAD yang bersumber dari sumber daya alam, pariwisata, kawasan industri, dan pertumbuhan ekonomi lokal lainnya. | -Ketergantungan pada Dana Transfer<br><br>- Potensi PAD yang Belum Tergali Optimal<br><br>- Tingkat<br><br>Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi<br><br>- stagnansi perekonomian daerah | Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi<br><br>Penguatan Ekonomi lokal dan unggulan | - Ekonomi Digital dan E-commerce<br><br>- Perubahan iklim dan keberlanjutan yang dapat mempengaruhi sektor-sektor penghasil PAD (misalnya, pertanian, pariwisata berbasis alam)<br><br>- Investasi Asing dan Globalisasi | - Harmonisasi Peraturan Perpajakan Daerah<br><br>- Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas PAD<br><br>- Peningkatan Layanan Perpajakan dan Retribusi | -Persaingan Antar Daerah dalam Menarik Investasi<br><br>-Potensi Kerjasama Antar Daerah<br><br>-Pembangunan infrastruktur di tingkat regional (misalnya, jalan tol, kawasa industri) dapat membuka peluang peningkatan PAD | -Penguatan fondasi keuangan daerah melalui Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| -Potensi lahan pertanian yang cukup luas<br>-Sumber Daya Air yang memadai<br>-Keanekaragama n Komoditas Pangan dan<br>-Potensi komoditas unggulan lokal<br>- Potensi Hilirisasi Produk Pertanian | -Produktivitas Pertanian yang Belum Optimal<br>-Akses Petani terhadap Modal dan Pasar<br>-Kerentanan terhadap Perubahan Iklim<br>-Alih Fungsi Lahan Pertanian<br>- Hilirisasi Produk Pertanian yang Minim | -Penguatan ekonomi lokal dan unggulan<br>-Ketahanan Pangan<br>-Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran | -Ketahanan Pangan Global<br>-Harga komoditas pangan global<br>-Perdagangan Bebas dan Pasar Global | -Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional<br>-Pengendalian inflasi nasional<br>-Pengembangan Komoditas Unggulan Nasional<br>-Program Hilirisasi Pertanian Nasional | -Ketergantungan pangan pada daerah lain<br>-Potensi Kerjasama Antar Daerah dalam Rantai Pasok Pangan<br>-Pengaruh Urbanisas dan Industri yang mempengaruhi ketersediaan lahan pertanian | -Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Menuju Swasembada Pangan |
| -Kondisi Geologis Geopark Bayah Dome<br>-Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) | -Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Pariwisata<br>-Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat | - Penguatan ekonomi lokal dan unggulan<br>- Penguatan komunitas adat | -Tren Pariwisata Berkelanjutan<br>- Dampak Perubahan Iklimterhadap Pariwisata | -Pengembangan Geopark Nasional<br>-Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan Nasional | -Potensi Pariwisata<br>-Keterlibatan Komunitas Lokal dalam Pariwisata Regional | -Pengembangan berkelanjutan Geopark Nasional Bayah Dome Melalui Diversifikasi Atraksi Pariwisata berbasis Pelestarian Keanekaragaman Ekosistem |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| -Nilai Budaya dan Sejarah Lokal<br>-Potensi Pengembangan Ekowisata dan Geowisata<br>-Pemberdayaan Masyarakat Lokal | -Promosi dan Pemasaran yang Belum Efektif | -Kolaborasi dan partisipasi masyarakat | | -Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata | | |
| -Potensi Pertanian yang Beragam<br>-Aksesibilitas yang Strategis<br>-Potensi Sinergi dengan Destinasi Lain (Baduy dan destinasi wisata lainnya) | -Keterbatasan Infrastruktur<br>-Kurangnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat | -Penguatan ekonomi lokal dan unggulan<br>- Penguata komunitas adat<br>-Kolaborasi dan partisipasi masyarakat | -Tren Pariwisata Berbasis Alam dan Pengalaman<br>-Peran Pertanian dalam Pariwisata<br>-Dampak Perubahan Iklim pada Pertanian dan Pariwisata | -Pengembangan Pariwisata Pedesaan dan Agrowisata<br>-Sinergi Antara Pertanian dan Pariwisata<br>-Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pariwisata | -Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian dan Pariwisata<br>-Ketersediaan Infrastruktur Regional | -Pembangunan Kawasan Agrowisata Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Dengan Konsep -Kearifan Lokal |
| -Destinasi pariwisata yang beragam dan menawarkan | -Kurang tersedianya pemandu wisata lokal yang kompeten, layanan kesehatan, | | -Sustainable Tourism (Pariwisata Berkelanjutan) | -Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional | -Berdekatan dengan wilayah metropolitan yang merupakan pasar potensial untuk pariwisata di Lebak | -Pengembangan tata kelola pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| pengalaman unik dalam berwisata<br><br>-Potensi Pengembangan Ekowisata dan Pariwisata Budaya<br><br>-Kekayaan tradisi dan pengetahuan lokal yang dapat diintegrasikan Dalam pengalaman wisata | keamanan, dan transportasi lokal di sekitar destinasi wisata<br><br>-Tata kelola dan Kelembagaan destinasi wisata | | -Community-Based Tourism (Pariwisata Berbasis Masyarakat)<br><br>-Quality Tourism (Pariwisata Berkualitas) yang Fokus pada pengalaman wisatawan yang memuaskan,-layanan yang baik, dan nilai tambah yang tinggi, bukan hanya kuantitas wisatawan | -Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional<br><br>-Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur pada destinasi wisata unggulan | -Pengembangan Infrastruktur Regional | penguatan 6A di destinasi wisata prioritas |
| -Ketersediaan lahan yang potensial untuk pengembangan industri<br><br>-Ketersediaan jumlah tenaga kerja lokal | Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja<br><br>Keterbatasan Pengalaman dalam Pengembangan Industri Hijau | -penguatan ekonomi lokal dan unggulan<br><br>-Penanganan kemiskinan dan pe ngangguran | -Tren Industri Hijau dan Berkelanjutan<br><br>-Regulasi dan Standar Lingkungan Internasional | -Kebijakan Industri Nasional yang Berkelanjutan<br><br>-Kebijakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Industri<br><br>-Harmonisasi Kebijakan Industri | -Persaingan dengan Kawasan Industri Lain di Pulau Jawa<br><br>-Ketersediaan Infrastruktur Regional yang mendukung (jalan tol) | -Pengembangan Kawasan Industri hijau dalam rangka memperkuat struktur industri hulu-hilir yang berkelanjutan dan berdaya saing |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| -Kebijakan Pemerintah Daerah yang Mendukung | | -Investasi dan pertumbuhan ekonomi | | antara pemerintah Pusat dan Daerah | | |
| - Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal<br><br>-Potensi pertanian (lahan subur, komoditas unggulan), perikanan, dan pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat<br><br>-Program Pemberdayaan Masyarakat | -Tingkat Kemiskinan yang Relatif Tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi atau nasional.<br><br>-Keterbatasan Akses Ekonomi<br><br>-Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan<br><br>-Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar | -Penguatan Ekonomi Lokal dan Unggulan<br><br>-Penaganan Kemiskinan dan Pengangguran<br><br>-Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) | -Sustainable Development Goals (SDGs)<br><br>-ketidaksetaraan ekonomi dan sosial | - Prioritas Nasional Pengentasan Kemiskinan<br><br>-Berbagai Program Pengentasan Kemiskinan Nasional<br><br>-Penguatan Sistem Perlindungan Sosial | -Kesenjangan Ekonomi Antar wilayah<br><br>-Akses Masyarakat Lebak ke Peluang Kerja Regional<br><br>-Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan | -Percepatan Penurunan tingkat kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan merata |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| - Ketersediaan pangan lokal yang beragam dan bergizi<br><br>-Keberadaan tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter) dan kader posyandu di tingkat masyarakat<br><br>-Potensi Sinergi Lintas Sektor dalam penanganan stunting | -Prevalensi Stunting yang Relatif Tinggi<br><br>Akses Terhadap Layanan Kesehatan dan Gizi<br><br>-Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan yang Kurang Memadai<br><br>-Keterbatasan ketersediaan pangan bergizi di tingkat keluarga<br><br>-Kurangnya jangkauan informasi dan edukasi yang efektif terkait pencegahan stunting kepada masyarakat luas | -Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)<br><br>-Sanitasi Lingkungan<br><br>Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat<br><br>-Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan<br><br>-Ketahanan Pangan | -Target Global Penurunan Stunting<br><br>-Kesadaran global tentang dampak jangka panjang stunting terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas sumber daya manusia<br><br>- Berbagai inisiatif dan program global yang mendukung upaya penurunan stunting | - Prioritas Nasional Penurunan Stunting<br><br>-Penguatan Konvergensi Lintas Sektor | -Prevalensi Stunting di Kabupaten yang relatif tinggi<br><br>-Kebijakan dan Program yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka menurunkan prevalensi stunting | -Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting |
| -Lahan untuk Fasilitas | -Minimnya Pemilahan Sampah di Tingkat Sumb | -Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | -Krisis global terkait sampah | -Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional | -Potensi Kerjasama Antar Daerah dalam | -Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| Pengelolaan Sampah terpadu<br><br>-Peluang pengembangan ekonomi sirkular<br><br>-Potensi Kerjasama dalam pengelolaan sampah terpadu | -Sistem Pengelolaan Sampah yang Belum Terintegras<br><br>-Keterbatasan SDM Pengelola Sampah | -Pengelolaan Sampah dan Limbah | -Ekonomi Sirkular Global<br><br>-Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca | -Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampa | Pengelolaan Sampah Regional<br><br>-Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Regional<br><br>-Dampak Pencemaran Sampah Lintas Daerah | |
| -Penganggaran dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh secara terpadu | - Luas dan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh<br><br>-Kondisi Rumah Tidak Layak Huni | -Infrastruktur Wilayah<br><br>-Pengendalian Pemanfaatan Ruang<br><br>-Sanitasi Lingkungan | -Sustainable Development Goals (SDGs)<br><br>-Permukiman kumuh seringkali lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana | -Kebijakan Nasional Penanganan Permukiman Kumuh<br><br>-Program pengadaan perumahan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah<br><br>-Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi | - Ketersediaan Lahan dan Harga Properti Regional<br><br>-Persentase permukiman kumuh daerah | -Pengentasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh secara terpadu |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| - Lokasi Strategis yang langsung terhubung dengan kawasan metropolitan<br>-Konsentrasi Penduduk dan Tenaga Kerja<br>=Keterkaitan dengan Wilayah Hinterland | - Infrastruktur yang belum memadai seperti jalan, transportasi publik, air bersih, sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan<br>=Urbanisasi yang Tidak Terencana<br>-Tata Ruang yang Belum Optimal<br>-Ketergantungan Pada Sektor Tertentu | -Infrastruktur Wilayah<br>-Pengendalian Pemanfaatan Ruang<br>-Sanitasi Lingkungan<br>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>-Pengelolaan Sampah dan Limbah | -Urbanisasi Global Smart City dan Pembangunan Kota Berkelanjutan<br>-Peran Kota sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi | -Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)<br>-Program Pengembangan Kota Cerdas (Smart City)<br>- Penetapan kawasan-kawasan perkotaan tertentu sebagai fokus pengembangan ekonomi nasional | -Tingkat dan pola urbanisasi<br>-Pengembangan Infrastruktur di wilayah perkotaan | - Pengembangan Kawasan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Penggerak Ekonomi Kawasan Sekitarnya |

*Sumber : Data Diolah Bapperida 2025*

### 2.3.2.2. Identifikasi Isu Global, Nasional, dan Regional

### A. Isu Global

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbaharui yang merupakan bahan bakar untuk energi. Isu internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang bagi Kab. Lebak ialah: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta Revolusi Industri 4.0 (kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi).

#### 1) Sustainable Development Goals (SDG's)

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bahasa Inggris. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti.

Konsep SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh kesepakatan untuk menjadi tujuan bersama yang universal. Tujuan bersama tersebut merupakan arah untuk memelihara keseinbagan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam menjaga tiga dimensi tersebut SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berupa SGDs. Tujuan global dari SDGs sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan Gender
6. Akses air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Infrastruktur, industri dan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Menjaga ekosistem laut
15. Menjaga Ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

**Gambar 2. 20 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Sumber: United Nations, 2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dirumuskan sebuah kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpres ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Rencana-rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta dijadikan acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan , pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

**2) Ancaman Krisis Ekonomi Global**

Saat ini ada berbagai resiko yang membuat perekonomian global salah satunya konflik geopolitik saat ini seperti perang di Timur Tengah serta Rusia dengan Ukraina. Yang akan
mengganggu harga-harga komoditas serta biaya logistik. Selain itu risiko konflik China- Taiwa masih dapat mengganggu perekonomian global ke depan.

Saat ini pemilu Amerika Serikat (AS) dapat mempengaruhi tekanan ekonomi global kedepan. Presiden terpilih AS memiliki peran yang penting dalam menentukan kondisi ekonomi global kedepan.

Perang dagang yang terjadi antara AS dan China dapat mempengaruhi harga komoditas dan gangguan rantai pasok global.

**3) Antisipasi Perubahan Iklim Global (Global Warming/Climate Change)**

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetapterlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang menjadi potensi pariwisata ataupun kegiatan *ekonomi*, sehingga isu kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim global dapat berpengaruh terhadap

pengembangan wilayah pesisir di Kab. Lebak.

**4) Revolusi Industri 4.0**

Sejak tahun 2000 hingga saat ini terjadi era penerapan teknologi modern, antara lain teknologi fiber (*fiber technology*) dan sistem jaringan terintegrasi (*integrated network*), yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi, dari produksi hingga konsumsi. The World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi. Pembauran teknologi dianggap mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional, dalam mencapai tujuan.

Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti advanced *robotics*, artificial *intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Adapun pengertian dari istilah-istilah tersebut adalah:

a. *Advanced Robotics*

   Instrumen ini merupakan peralatan yang digunakan secara mandiri, yang mampu berinteraksi secara langsung dengan manusia, serta menyesuaikan perilaku berdasarkan sensor data yang diberikan. Fungsi utamanya adalah untuk memperpendek waktu tunggu dan waktu layanan, sehingga menghasilkan efisiensi.

b. *Artificial Intelligence* (AI)

   AI adalah sistem mesin berteknologi komputer yang mampu mengadopsi kemampuan manusia. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja manusia.

c. *Internet of Things (IoT)*

IoT merupakan teknologi yang memungkinkan setiap instrumen terkoneksi satu sama lain secara virtual, sehingga mampu mendukung kinerja operasional usaha, pengawasan terhadap performa manajemen, serta peningkatan nilai guna output.

a. *Virtual and Augmented Reality*

*Virtual Reality* merupakan simulasi yang dilakukan oleh komputer dalam membentuk sebuah realitas rekaan. Teknologi ini mampu memanipulasi penglihatan manusia sehingga seolah-olah berada di tempat atau lingkungan yang berbeda dari kenyataan sesungguhnya. Sementara *Augmented Reality* adalah teknologi yang mampu menghasilkan informasi dari kondisi lingkungan sebenarnya, lalu diproses secara digital dan digunakan untuk tujuan tertentu.

b. *Additive Manufacturing*

Teknologi ini merupakan otomatisasi proses produksi melalui teknologi 3D (*three dimensional*). Hal ini memberi pengaruh positif pada kecepatan pengolahan dan transportasi produk.

c. *Distributed Manufacturing*

Merupakan konsep penempatan lokasi produksi dan pengintegrasian proses produksi, sehingga bisa berada sedekat mungkin dengan konsumen untuk menjawab kebutuhan riil mereka. Tujuannya adalah untuk mencapai economies of scale, sekaligus mengurangi beban biaya (*cost efficiency*).

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata-mata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen[1]. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menekankan agar kehadiran industri 4.0 bisa meningkatkan perekonomian negara-negara miskin dan berkembang, sekaligus mendorong terwujudnya agenda-agenda pembangunan seperti yang tertuang dalam the Sustainable Development Goals (SDGs). UNIDO menegaskan beberapa poin penting terkait perkembangan industri 4.0, yakni:

a. Industri 4.0 diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan manusia,

lingkungan, dan kesejahteraan bersama

b. Industri 4.0 diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas manusia , sehingga menjadi semakin terdidik dan terampil
c. akses terhadap teknologi diharapkan terjangkau dengan mudah, sehingga bisa diterapkan di semua negara
d. Kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi
e. Kemajuan teknologi diharapkan bisa menggeser paradigma lama, dari persaingan (*competition*) menjadi koneksi (*connection*) dan kerjasama (*collaboration*)
f. penerapan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan.

Sementara itu, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0, antara lain:

a. mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas output.
b. menganalisa dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup.
c. mempersiapkan infrastruktur, serta program pendidikan dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi

Kementerian Perindustrian Indonesia telah membuat roadmap sebagai tanggapan terjadinya revolusi industri 4.0 dengan menyusun “Making Indonesia 4.0”. Terdapat 10 prioritas nasional yang ditetapkan, yaitu :

1. Perbaikan alur aliran material, dengan memperkuat produksi material sektor hulu
2. Mendesain ulang zona industry, dengan membangun peta jalan zona industri nasional dan mengatasi permasalahan yang dihadapi di beberapa zona industri
3. Akomodasi standar sustainability, melalui pemanfaatan kesempatan daya saing melalui tren *sustainability* global
4. Pemberdayaan UMKM, dengan memberdayakan 3,7 juta UMKM (termasuk

usaha mikro) melalui teknologi

5. Membangun infrastruktur digital nasional, melalui pembangunan jaringan dan platform digital
6. Menarik investasi asing, dengan menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran yang menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi
7. Peningkatan kualitas SDM, dengan perancangan ulang kurikulum pendidikan menyesuaikan era Industri 4.0 dan program *talent mobility* untuk profesional
8. Pembentukan ekosistem inovasi, dengan pengembangan sentra *Research, Development*, *and Design* oleh pemerintah, swasta, publik, maupun universitas
9. Menerapkan insentif investasi teknologi, dengan memperkenalkan *tax exemption*/subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan, dengan melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian

## B. Isu/Kebijakan Nasional

### 1. Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional

Visi pembangunan jangka panjang Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah “terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi (yang didasarkan pada nilai- nilai Pancasila) sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan Indonesia dijabarkan dalam 9 aspek pembangunan :

1) Pembangunan Politik, dengan visi “Terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
2) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, dengan visi “Terwujudnya kemampuan pertahanan dan keamanan yang mampu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman serta menciptakan kondisi aman, damai, tertib dan tenteram masyarakat.”
3) Pembangunan Hukum dan Penyelenggaraan Negara, dengan visi hukum “Tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.” Dan visi Penyelenggaraan Negara, dengan visi “Terwujudnya Aparatur Negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa sesuai Pancasila dan UUD ’45.”
4) Pembangunan sosial budaya, dengan visi “terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoralitas tinggi melalui pembangunan kebudayaan nasional yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas- inovatif, etos kerja tinggi, berbudi luhur, toleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi”
5) Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan visi “Terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia”
6) Pembangunan Ekonomi, dengan visi “Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip- prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif

dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa."

7) Pembangunan Daerah, dengan visi "terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia."
8) Pembangunan Infrastruktur, dengan visi "Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

# Bab 3 Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

## 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi adalah konsep yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, organisasi, dan pemerintahan. Visi adalah gambaran atau konsep tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang jelas dan singkat tentang apa yang ingin dicapai, dan bagaimana cara mencapainya.

### 3.1.1. Visi RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045

Adapun visi Kabupaten Lebak Tahun 2025 – 2045 adalah:

**LEBAK MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL**.

Beberapa kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan **Kabupaten Lebak yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan**. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Maju**. Artinya bahwa Pelaksanaan pembangunan daerah selalu didasarkan pada keinginan bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi, beradab, profesional, serta memiliki pandangan ke depan yang luas. Pembangunan juga diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan memanfaatkan seluruh potensinya, namun tetap menekankan pentingnya kolaborasi antara para pemangku kepentingan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kondisi maju ini adalah daya saing perekonomian yang kompetitif berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan yang merata sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah, termasuk pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset

daerah dan sumber keuangan lainnya untuk kepentingan pembangunan; serta meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung oleh situasi daerah yang kondusif.

2. **Sejahtera**. Konsep kesejahteraan mencerminkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, di mana kebutuhan ekonomi (materiil) dan sosial (spiritual) masyarakat terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental, secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kondisi sejahtera ini antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, yang meningkatkan pendapatan per kapita ke tingkat yang tinggi, penurunan tingkat pengangguran, dan pengurangan jumlah penduduk miskin; terbentuknya struktur ekonomi yang kuat berdasarkan keunggulan kompetitif; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan terpenuhinya hak sosial masyarakat termasuk akses terhadap pelayanan dasar, yang pada gilirannya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; dan meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah.
3. **Berkelanjutan**. Konsep keberlanjutan menggambarkan kondisi kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi ini menegaskan komitmen Kabupaten Lebak untuk menerapkan prinsip pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang selaras dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kondisi keberlanjutan ini mencakup kualitas hidup yang baik, kesejahteraan yang merata, kesehatan dan pendidikan yang unggul, serta lingkungan yang bersih dan lestari, lingkungan pemukiman yang layak dan nyaman, bebas dari polusi udara, air, dan sampah, serta terjaganya kondisi hutan, sungai, dan danau beserta ekosistemnya.

Kalimat “berbasis potensi lokal” mengandung makna bahwa pembangunan di berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, peternakan, kehutanan, perkebunan, industri, dan lainnya yang merupakan kekuatan Kabupaten Lebak adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan sektor pertanian, yang masih menjadi sumber mata pencaharian utama dan basis ekonomi daerah, dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga keduanya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tantangan serupa juga muncul dalam upaya menghubungkan sektor pertanian dengan industri, khususnya industri pengolahan yang dapat mengolah hasil pertanian menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap produktivitas ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Integrasi antara kedua sektor ini diyakini dapat menjadi solusi dalam mewujudkan Lebak yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

### 3.1.2. Visi RPJMD

Visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2030 diformulasi berdasarkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 yaitu “Lebak Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”, yang dikontekstualisasi dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode tahun 2025-2029, serta disinkronisasi dengan visi politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam konteks RPJPD Kabupaten Lebak, RPJMD Tahun 2025-2029 ini merupakan tahapan pertama dalam skenario RPJPD Tahun 2025-2045, yang difokuskan pada tema “ Percepatan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang“. Dengan fokus tersebut, RPJMD pada tahapan pertama RPJPD dimaksud diharapkan dapat mewujudkan beberapa karakteristik kondisi sebagai berikut:

1) pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% per tahun;
2) kualitas SDM semakin meningkat;
3) semakin berkembangnya UMKM;
4) kontribusi sektor jasa pada struktur ekonomi daerah semakin besar;

5) meningkatnya penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang tetap menjaga karakter masyarakat Lebak yang Iman, Aman, Uman dan Amin; serta
6) pemerintahan daerah berbasiskan elektronik atau *e-Government* secara optimal untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Lebak relatif stabil. Pertama dari sisi makro ekonomi pasca pandemi yang merupakan krisis yang sangat besar Kabupaten Lebak bisa pulih dan stabil tumbuh dari tahun 2021 sampai dengan 2024 di angka 3,18 %, 3,80 , 2,80 dan 2,95. Kedua, inflasi di Kabupaten Lebak dapat dijaga di level yang cukup rendah di bawah 2 %. Sebelum pandemi ekonomi Kabupaten Lebak mampu tumbuh di kisaran 5 % pada tahun 2019 berada pada angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Pandemi Covid-19 dan dampaknya yang sangat besar pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan, menciptakan satu kondisi anomali yang menyebabkan belum berjalannya skenario pembangunan daerah sebagaimana direncanakan dalam RPJPD maupun RPJMD periode sebelumnya. Karenanya rasionalisasi dilakukan agar RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dapat tetap kontekstual substansinya dengan permasalahan dan kebutuhan daerah.

Merujuk pada Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, substansi RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (pasal 263 ayat 3). Substansi inilah yang dirasionalisasi sedemikian rupa agar tetap relevan dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi, sehingga dapat disusun konstruksi RPJMD sesuai dengan prioritas kepala daerah serta selaras dengan RPJPD dan RPJMN.

Sebagaimana telah dipahami secara luas, visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2030 adalah "***Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Ruhay (Rukun, Unggul, Hegar, Aman dan Yakin)",*** yang juga merupakan visi politik kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah menjadi kontrak politik dengan rakyat dalam

Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024. Visi ini relevan dengan RPJPD yang pada tahapan awal periode efektifnya berfokus pada tema " Percepatan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang". Berikut penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2030:

**Rukun** mengandung makna rasa kebersamaan, *unity* atau persatuan, kolaborasi, usaha bersama dan nilai-nilai luhur. Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama, saling membantu, dan menghargai perbedaan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

**Unggul** mengandung makna upaya maksimal, *networking* atau jejaring, generasi emas, *growth* atau pertumbuhan, unik, *leadership* atau kepemimpinan. Konsep ini menekankan pentingnya melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan daya saing daerah.

**Hegar** mengandung makna hidup sehat, edukasi Kesehatan, Gerakan kebugaran, aksesibilitas dan rehabilitasi.

**Aman** mengandung makna Amanah, mitigasi bencana, aplikasi keamanan dan *networked community*.

**Yakin** mengandung makna yakin, nilai kebersamaan, arah yang jelas, konsistensi, inovasi.

### 3.1.3. Misi RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045

Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi pembangunan Kabupaten Lebak mengacu pada permasalahan pokok yang dirumuskan pada bab permasalahan sebelumnya dan evaluasi (rekomendasi) dari RPJPD Kabupaten Lebak, serta yang tidak kalah pentingnya mempertimbangkan ketercapaian visi Provinsi Banten dan perwujudan Indonesia Emas 2045. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan. Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif, efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, harus mengacu pada permasalahan pokok. Pada tahap lima tahun

pertama, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lebak difokuskan pada percepatan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang.

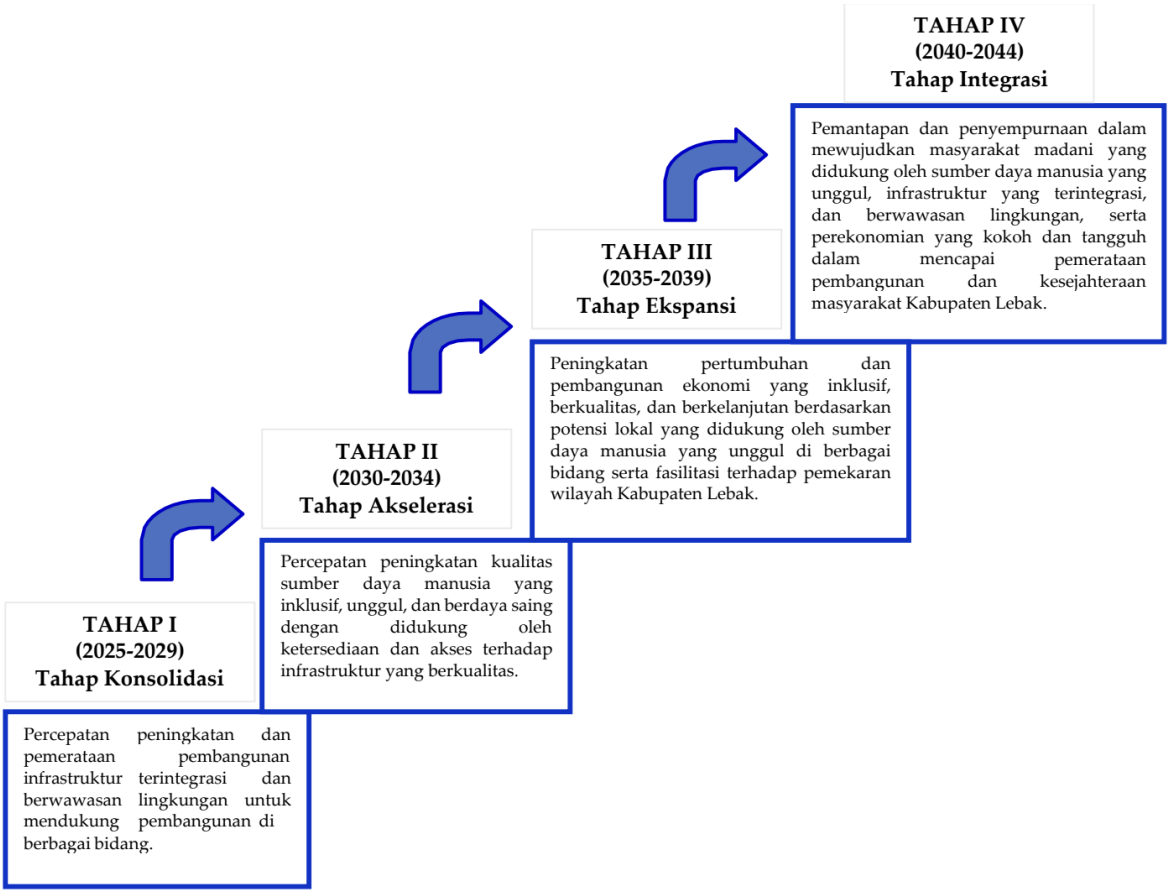


**Gambar 3. 1 Tahapan dan Tema RJPMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045**

*Sumber : Perda No. 8 Tahun 2024 RPJPD Kabupaten Lebak 2025-2045*

### 3.1.4. Misi RPJMD

Misi adalah pernyataan yang jelas dan singkat tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, serta bagaimana cara mencapainya. Misi juga mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pencapaian tujuan tersebut.

Upaya mewujudkan visi di atas akan ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berbasis digitalisasi;
2. Meningkatkan Hilirisasi ekonomi Daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal;

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek tata ruang; dan
5. Memperkuat Harmonisasi Lingkungan dengan Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mengurangi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

*Misi Pertama,* Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berbasis digitalisasi. Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya negara yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya negara, dan memanfaatkan sumber daya negara secara efektif dan efisien. Pemerintahan yang baik dan bersih menjadi prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena prakteknya selalu mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang mengutamakan asas keadilan dan kepentingan publik. Pemerintahan yang baik dan bersih bertujuan untuk mencegah praktek buruk penyelenggara negara melalui intervensi kepentingan individu maupun kelompok dalam program pembangunan yang berpotensi menghambat tertunaikannya hak-hak dasar masyarakat. Layanan publik berbasis digitalisasi merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menghadirkan pelayanan prima dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui digitalisasi layanan publik, diharapkan dapat meningkatkan cakupan layanan ke seluruh wilayah Kabupaten Lebak yang lebih efektif dan efisien baik dari sisi biaya, waktu dan daya jangkau. Selain itu, layanan publik berbasis digital sangat relevan dengan era revolusi industri 5.0, yaitu konsep yang menggambarkan perubahan besar-besaran dalam cara kerja, produksi, dan konsumsi yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital, *artificial intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT). Misi pertama ini menunjukan langkah untuk mewujudkan "Kabupaten Lebak yang Ruhay" dengan membangun integritas pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi pelayanan dan digitaliasi.

*Misi kedua,* "Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal melalui penguatan hilirisasi". Kabupaten Lebak memiliki ragam potensi lokal, diantaranya sumber daya hutan, mineral, hasil kerajinan, komoditas pertanian, hasil perikanan, hasil peternakan, budaya dan tradisi unik dan khas, destinasi wisata, dan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil untuk mengembangkan ekonomi daerah. Guna kepentingan ekonomi yang lebih luas, pengembangan potensi lokal harus berorientasi pada nilai tambah yang lebih tinggi, oleh karenanya sangat penting adanya penguatan hilirisasi. Hilirisasi berasal dari dua kata yaitu "hilir" dan "isasi" yang memiliki arti suatu perkembangan industri penghasil bahan baku (industri hulu) yang kemudian menjadi industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi (industri hilir).

Penguatan hilirisasi atau *downstreaming* di Kabupaten Lebak sangat tepat untuk meningkatkan harga jual dan nilai tambah produk dan komoditas lokal. Berbagai potensi lokal Lebak diantaranya komoditas tanaman padi, holtikultura, tanaman perkebunan, komoditas sayuran, komoditas buah-buahan, daging, ternak, perikanan, usaha industri pengolahan, pertambangan, penggalian dan potensi lainnya.

Melalui penguatan hilirasi, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat, diantaranya: (1) menambah nilai suatu produk; (2) mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia; (3) menghasilkan produk baru untuk merambah pasar internasional; dan (4) membuka lapangan pekerjaan baru bagi banyak orang. Sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi Ketiga, "Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan", misi ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, dalam kerangka visi ini, pembangunan sumber daya manusia menjadi pondasi utama untuk memastikan Indonesia mampu bersaing di tingkat global, sekaligus memenuhi cita-cita bangsa di usia ke-100 tahun kemerdekaan. Sumber daya manusia unggul adalah sumber daya manusia yang profesional, produktif, inovatif, mampu bersaing dan berkepribadian Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Lebak melalu misi ketiga ini akan meningkatkan pembangunan Pendidikan untuk meningkatkan knowledge, skill, dan attitude melaui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, kesehatan, dan sosial. Untuk bidang Pendidikan pemerintah daerah berkomitmen memenuhi mandatory spending

minimal 20%. Saat ini pada tahun 2024 sudah teralokasikan sebesar 40,52% dari total belanja daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Lebak tidak hanya berfokus pada bidang Pendidikan sektor formal. Melainkan juga pada peningkatan sumber daya manusia dalam bidang keagamaan mengingat peran strategis sumber daya manusia keagamaan dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing.

Selain itu, rencana pembangunan sumber daya manusia juga diarahkan agar menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Kesetaraan adalah prinsip dasar yang melibatkan perlakukan yang adil, sama, dan setara terhadap sesama individu. Konsep ini melibatkan menghormati hak asasi manusia, keberagaman, dan keadilan sosial. Kesetaraan dianggap sebagai salah satu nilai yang mendasari kehidupan manusia.

Misi Keempat "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas, dan Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Aspek Tata Ruang". Kabupaten Lebak merupakan daerah terluas se- Provinsi Banten dengan luas wilayah sekitar 331.264 ha, kurang lebih mencakup 35,40 persen dari luas wilayah Provinsi Banten yang memiliki luas sekitar 935.823 ha (RTRW Provinsi Banten, 2022). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur sangat krusial dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur tersebut diantaranya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan poros desa, jalan lingkungan, jembatan, jembatan gantung, sumber daya air dan irigasi, air minum, dan infrastruktur lainnya. Pembangunan infrastruktur harus merata mulai dari wilayah perkotaan sampai dengan pelosok perdesaan, sehingga sejak tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan tidak ada lagi wilayah terisolir dan susah diakses. Makna merata yaitu infrastruktur yang dibangun direncanakan untuk menyasar ke seluruh wilayah sesuai dengan kebutuhan dari kondisi masalah demi memastikan akses 100% bagi masyarakat.

Selain merata, Pemerintah Kabupaten Lebak juga berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, yaitu Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berbicara kuantitas, namun turut memperhatikan kualitasnya berkaitan dengan keamanan, kefungsian, dan keberlanjutan. Pengukuran kualitas infrastruktur salah satunya melalui Indeks Kepuasan Layanan Infrastrukur (IKLI), yaitu indeks untuk mengetahui tingkat

kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yaitu: indikator ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), pemanfaatan (utility), penyerapan tenaga kerja (job creation), dan kontribusi terhadap perekonomian. Infrastruktur yang terbangun juga harus terintegrasi, yaitu Infrastruktur yang dibangun diarahkan agar memiliki keterhubungan yang baik antara infrastruktur satu dengan infrastruktur lainnya maupun dengan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi sehingga tercipta sistem yang efektif dan efisien. Terakhir, yaitu aspek tata ruang, yaitu Infrastruktur yang dibangun wajib mempertimbangkan arahan tata ruang guna memastikan keterpaduan pembangunan dengan lingkungan maupun kebutuhan masyarakat

Misi Kelima, “Memperkuat harmonisasi lingkungan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim”. Pemerintah Kabupaten Lebak sangat menyadari pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam agar keseimbangan dan kelestarian alam berkelanjutan. Harmonisasi mencakup kelestarian alam, pengelolaan sampah dengan bijak, penghematan sumber daya alam, pola hidup ramah lingkungan, kesadaran dan edukasi lingkungan. Harmonisasi lingkungan dapat diwujudkan jika semua pihak bekerja sama, yaitu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan para komunitas. Kabupaten Lebak juga merupakan daerah yang rawan bencana alam seperti bencana banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung, tsunami, serta bencana lainnya. Oleh karena itu, melalui misi ini akan diformulasikan langkah pengurangan risiko bencana baik yang disebabkan oleh faktor alami (pergerakan tektonik, cuaca ekstrem, perubahan iklim, dan aktivitas vulkanik), dan faktor manusia (deforestasi/penggundulan hutan, pemanasan global, eksploitasi sumber daya alam, pembuangan sampah sembarangan). Sedangkan untuk adaptasi perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Lebak siap menghadirkan solusi-solusi seperti gerakan penanaman pohon, pengelolaan sampah plastik, gerakan hemat energi, dan mendukung kebijakan lingkungan.

### 3.1.5. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Lebak 2025-2045, hasil evaluasi RPJMD tahun 2019-2024, dan memperhatikan dokumen RPJMN tahun 2025-2029, Kabupaten Lebak telah menggambarkan pencapaian visi RPJPD dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi akan terlihat jika ada penjelasan tujuan dan sasaran. Penjabaran ke tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. sedangkan, penjabaran sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2025-2029. Penetapan target atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Tujuan Sasaran Indikator Target dalam Pencapaian RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029**

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| *Mewujudkan Kabupaten Lebak yang RUKUN, UNGGUL, HEGAR, AMAN, dan YAKIN (RUHAY)* | | | | | | | | | | |
| 1)Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berbasis Digitalisasi | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | | Indeks Daya Saing Daerah (Angka) | 3,48 | 3,5 | 3,52 | 3,55 | 3,57 | 3,6 | |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | |
| | | Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital | Nilai SAKIP (poin) | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | |
| | | | Opini BPK (Level) | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| | | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 76,81 | 77,15 | 77,37 | 77,69 | 78,22 | 78,65 | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | (IPKD) (Angka) | | | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin) | 84 | 84,25 | 84,5 | 84,75 | 85 | 85,25 | |
| | | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | 4,1 | 4,15 | 4,2 | 4,25 | 4,3 | 4,35 | |
| | | | Indeks Pemerintah Digital (Nilai) | 0 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 3 | |
| | | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah | Rasio Kemandirian Daerah (Persentase) | 22,04 | 22,09 | 22,14 | 22,19 | 22,24 | 22,29 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Mandiri (%) | 7,35 | 7,65 | 7,65 | 7,94 | 7,94 | 8,24 | |
| 2)Meningkatkan Hilirisasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif | | Indeks Gini (Poin) | 0.252-0.256 | 0.249-0.255 | 0.246-0.254 | 0.243-0.253 | 0.240-0.252 | 0.237-0.251 | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | Tingkat Kemiskinan (%) | 8.10-8.31 | 7.71-8.09 | 7.32-7.88 | 6.94-7.66 | 6.55-7.45 | 6.16-7.23 | |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6.23-6.79 | 6.05-6.54 | 5.87-6.29 | 5.68-6.04 | 5.5-5.79 | 5.32-5.54 | |
| | | | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 4.79-5.79 | 4.80-5.80 | 4.82-5.82 | 4.85-5.85 | 6.68-7.68 | 6.69-7.70 | |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 73,94 | 75,06 | 76,18 | 77,3 | 78,42 | 79,54 | |
| | | | Kontibusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) | 9,75 | 9,98 | 10,22 | 10,47 | 10,71 | 10,96 | |
| | | | PDRB Per Kapita (Rp. Juta Per Tahun) | 26,48 | 27,8 | 29,12 | 30,44 | 31,76 | 31,97 | |
| | | | Daya Beli () | 9.430.000 | 9.580.000 | 9.730.000 | 9.880.000 | 10.030.000 | 10.180.000 | |
| | | | Persentase Pertumbuhan Investasi (%) | 5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |
| | | | Tingkat Inflasi ((%)) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) | 73,19 | 73,69 | 74,2 | 74,72 | 75,25 | 75,6 | |
| 3)Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Menjunjung Tinggi Nilai Kesetaraan | Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berintegritas dan Inovatif | | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 68,8 | 69,44 | 70,07 | 70,71 | 71,35 | 71,99 | |
| | | Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Dasar | Indeks Pendidikan (poin) | 0,57 | 0,584 | 0,598 | 0,612 | 0,626 | 0,64 | |
| | | | Indeks Kesehatan (poin) | 0,836 | 0,841 | 0,846 | 0,852 | 0,858 | 0,863 | |
| | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | |
| | | | Prevalensi Stunting (%) | 28,9 | 25,3 | 21,6 | 17,1 | 14,4 | 12,1 | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Terwujudnya keluarga yang berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) | 60.84:61.70 | 61.70:62.50 | 62.50:63.30 | 63.30:64.15 | 64.15:65.00 | 65.00:65.85 | |
| 4)Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas, dan Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Aspek Tata Ruang | Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar yang Berkelanjutan | | Indeks Infrastruktur Wilayah (Angka) | 66,82 | 67,07 | 68,57 | 68,83 | 69,09 | 69,34 | |
| | | Meratanya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar yang Berkualitas | Indeks Infrastruktur Layanan Dasar (poin) | 75,04 | 75,29 | 75,55 | 75,82 | 76,08 | 76,35 | |
| | | Meningkatnya Konektivitas Menuju Pusat-Pusat Kegiatan | Indeks Konektivitas Daerah (poin) | 58,6 | 58,85 | 61,6 | 61,84 | 62,09 | 62,34 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Yang Tertib Tata Ruang | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5)Memperkuat Harmonisasi Lingkungan dengan Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mengurangi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | Terwujudnya pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) | 73,9 | 74,15 | 74,41 | 74,66 | 74,91 | 75,16 | |
| | | Terselenggaranya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. | Indeks Kualitas Air (Indeks) | 75,05 | 75,25 | 75,45 | 75,65 | 75,85 | 76,05 | |
| | | | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | 76,91 | 77,31 | 77,71 | 78,11 | 78,51 | 78,91 | |
| | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin) | 66,37 | 66,44 | 66,51 | 66,58 | 66,65 | 66,72 | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Menurunnya tingkat risiko bencana | Indeks Risiko Bencana (Indeks) | 172,27 | 167,62 | 162,98 | 158,33 | 153,69 | 149,04 | |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

## 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

### 3.2.1. Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Strategi pada dasarnya merupakan "*a plan or method for achieving something, especially over a long period of time", atau "a careful plan or method for achieving a particular goal usually over a long period of time".* Kongruen dengan makna gramatikalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memaknai strategi sebagai langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran (pasal 1 ayat 51). Karenanya, strategi dibutuhkan dalam rangka memastikan tercapainya suatu sasaran, yang substansinya memuat cara atau sejumlah cara yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari misi yang telah ditetapkan.

Formulasi strategi dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap capaian RPJMD Tahun 2019 - 2024; kondisi eksisting yang menjadi permasalahan dan isu strategis daerah; analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah, sekaligus identifikasi terhadap faktor-faktor pendorong (*driving factors*) yang menentukan keberhasilan pencapaian misi; serta analisis terhadap beragam alternatif strategi yang mungkin diadopsi guna menjawab beragam permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi dikembangkan sesuai dengan ruang lingkup dan karakteristik dari misi yang telah ditetapkan. yang akan dilaksanakan guna mencapai visi yang ditetapkan. Formulasi strategi juga didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kompleks dan beragam. Karenanya formulasi strategi secara spesifik berkaitan dengan satu atau sejumlah sasaran yang hendak dicapai pada satu periode tertentu.

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

### 3.2.1.1. Tahapan Pembangunan RPJMD

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penjabaran atas pilihan strategi dimaksud di atas, arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara bertahap dengan fokus dan tema yang berbeda pada setiap tahapannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029**

| TAHUN KE I 2025 | TAHUN KE II 2026 | TAHUN KE III 2027 | TAHUN KE IV 2028 | TAHUN KE V 2029 | TAHUN TRANSISI 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perencanaan dan pengembangan strategi yang dilandasi atas perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian daerah. | Pengembangan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan ekonomi yang diakselerasi oleh infrastruktur dalam mengintervensi daerah prioritas. | Penguatan modal dasar pembangunan manusia demi terciptanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan merata. | Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan ekonomi daerah atas hasil inovasi dan kreativitas. | Pemantapan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Kualitas Terhadap Layanan Dasar dan Perekonomian dalam perwujudan kerangka Lebak RUHAY. | Pematangan dalam upaya percepatan sumber daya manusia yang unggul atas ketersediaan dan akses infrastruktur berkualitas berwawasan lingkungan. |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

### 3.2.1.2. Fokus Kewilayahan

Fokus kewilayahan atau lokus pembangunan Kabupaten Lebak dalam mendukung ketercapaian visi dalam RPJMD 2025-2029 telah merumuskan 15 proyek strategis daerah yang akan menjadi pilar utama dalam mencapai visi " Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Ruhay (Rukun, Unggul, Hegar, Aman dan Yakin." Proyek strategis ini dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai aspek pembangunan yang saling terkait dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Adapun Proyek Strategis Kabupaten Lebak tahun 2025 – 2029 meliputi:

## I. Perwujudan Ketahanan Pangan Daerah Menuju Swasembada Pangan (Pengendalian Inflasi, Komoditas Unggulan dan Hilirisasi);

Berdasarkan Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diterbitkannya Undang - undang tersebut dengan pertimbangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai strategi, di antaranya:

### 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)

Untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan bergizi, diperlukan strategi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Berikut adalah strategi peningkatan ketersediaan pangan yang **Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA):**

- **Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan**
  - Pemberdayaan petani dan nelayan dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian modern.
  - Diversifikasi produksi pangan dengan mengembangkan tanaman pangan lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat selain beras, seperti singkong, jagung, dan sagu.

- Penerapan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi secara berkelanjutan

➢ **Penguatan Infrastruktur dan Sarana Produksi Pangan**

- Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, embung, dan bendungan untuk menjamin ketersediaan air bagi pertanian
- Penyediaan fasilitas penyimpanan dan distribusi pangan, seperti gudang pangan, cold storage, dan silo untuk mengurangi kehilangan hasil panen.
- Peningkatan akses jalan usaha tani dan nelayan untuk memperlancar distribusi hasil pangan ke pasar.
- Pemanfaatan teknologi digital dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi pangan.

➢ **Pengembangan Sistem Distribusi dan Logistik Pangan**

- Penguatan pasar pangan lokal dan jaringan distribusi agar hasil pertanian dan perikanan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
- Mendorong digitalisasi pemasaran pangan, seperti *e-commerce* pertanian untuk memotong rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- Stabilisasi harga pangan dengan operasi pasar dan regulasi harga dasar untuk melindungi produsen serta konsumen.
- Pengembangan lumbung pangan desa sebagai cadangan pangan masyarakat saat musim paceklik atau darurat bencana.

➢ **Penguatan Pola Konsumsi Pangan yang Sehat dan Bergizi**

- Edukasi dan kampanye pola makan sehat B2SA melalui program pemerintah, sekolah, dan media sosial.
- Peningkatan produksi dan akses terhadap pangan bergizi, seperti sayur, buah, ikan, telur, dan susu.
- Mendorong konsumsi pangan lokal yang lebih sehat dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
- Pemberian insentif bagi industri pangan sehat agar lebih banyak tersedia produk pangan dengan kandungan gizi seimbang.

➢ **Pengawasan dan Peningkatan Keamanan Pangan**

- Peningkatan pengawasan mutu pangan mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.
- Sertifikasi keamanan pangan bagi produk pangan lokal untuk memastikan kualitas dan kesehatan konsumen.
- Penguatan regulasi terhadap penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya untuk mencegah pencemaran dan risiko kesehatan.
- Pengembangan teknologi pengolahan dan penyimpanan pangan agar lebih tahan lama dan tetap sehat dikonsumsi.

➢ **Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan**

- Pemberian bantuan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, seperti melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
- Pengembangan dapur sehat dan lumbung pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di daerah rentan pangan.
- Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pertanian berbasis rumah tangga, seperti kebun keluarga dan peternakan skala kecil.

Strategi peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) harus dilakukan secara holistik dari hulu (produksi) hingga hilir (konsumsi dan distribusi). Sinergi antara pemerintah, petani, nelayan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

**2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman**

Keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) adalah faktor utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Keterjangkauan ini mencakup aspek ekonomi (harga terjangkau), aspek fisik (aksesibilitas pangan di seluruh wilayah), dan aspek sosial (ketersediaan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan). Untuk memastikan keterjangkauan pangan, berikut adalah strategi yang dapat diterapkan:

➢ **Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan**

- Penguatan cadangan pangan daerah dan nasional melalui lumbung pangan desa dan gudang penyimpanan agar pasokan tetap stabil saat terjadi krisis atau bencana
- Pengendalian harga pangan melalui kebijakan subsidi dan operasi pasar murah, terutama untuk bahan pangan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula.
- Pengembangan sistem distribusi pangan yang efisien guna menekan biaya logistik dan mengurangi disparitas harga antarwilayah.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga pangan dan memastikan keterjangkauannya bagi seluruh masyarakat.

➢ **Penguatan Akses dan Distribusi Pangan**

- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, pasar, serta fasilitas penyimpanan pangan untuk memperlancar distribusi dari produsen ke konsumen
- Digitalisasi pasar pangan melalui *e-commerce* dan aplikasi pangan online untuk meningkatkan akses langsung masyarakat terhadap produk pangan dengan harga lebih terjangkau.
- Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi pangan untuk memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan keterjangkauan pangan lokal.
- Pengembangan sistem transportasi dan logistik pangan berbasis daerah, terutama di wilayah terpencil dan rawan pangan.

➢ **Peningkatan Daya Beli dan Perlindungan Sosial**

- Pemberian bantuan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan operasi pangan bersubsidi.
- Peningkatan upah dan pendapatan petani, nelayan, dan pekerja sektor pangan agar mereka memiliki daya beli yang lebih baik terhadap pangan bergizi.

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program ketahanan pangan berbasis keluarga, seperti kebun pangan rumah tangga, peternakan kecil, dan perikanan skala mikro.
- Penguatan program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, balita, dan lansia guna mencegah kekurangan gizi.

➢ **Meningkatkan Kesadaran Konsumsi Pangan B2SA Kampanye edukasi pola konsumsi pangan sehat dan bergizi, terutama di sekolah, komunitas, dan rumah tangga**.

- Penguatan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) untuk mendorong konsumsi pangan lokal yang lebih beragam dan bergizi.
- Peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan gizi seimbang melalui penyediaan bahan pangan lokal yang mudah diakses dan terjangkau.
- Pemberdayaan wanita dan kelompok masyarakat dalam pengolahan pangan sehat, seperti melalui UMKM pangan berbasis lokal.

➢ **Pengawasan dan Keamanan Pangan**

- Penguatan regulasi keamanan pangan untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dari bahan berbahaya dan pencemaran.
- Penyediaan label harga dan kandungan gizi pada produk pangan agar masyarakat dapat memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya.
- Peningkatan inspeksi dan pengawasan pangan di pasar tradisional dan modern guna memastikan pangan yang tersedia tetap berkualitas dan sehat.
- Pengembangan teknologi pengolahan dan penyimpanan pangan untuk meningkatkan umur simpan dan mengurangi pemborosan pangan.

Untuk meningkatkan keterjangkauan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), perlu dilakukan strategi yang terpadu, mulai dari stabilisasi harga, distribusi yang efisien, perlindungan sosial, edukasi gizi, hingga pengawasan pangan yang ketat. Dengan pendekatan ini, seluruh masyarakat—terutama kelompok rentan—dapat memiliki akses terhadap pangan sehat dengan harga yang terjangkau, sehingga ketahanan pangan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

### 3. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan

Pemanfaatan pangan yang optimal sangat penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pangan, tetapi juga mampu mengolah dan mengonsumsinya dengan cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan gizi. Selain itu, pelayanan yang baik dalam penyediaan dan distribusi pangan juga berperan dalam meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan:

- **Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Konsumsi Pangan Sehat**
  - Sosialisasi pola makan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada masyarakat melalui sekolah, pusat kesehatan, dan media sosial.
  - Pelatihan pengolahan pangan bergizi dan sehat untuk ibu rumah tangga, pelaku usaha kuliner, dan komunitas masyarakat.
  - Kampanye pengurangan pemborosan pangan melalui gerakan *"zero food waste"* dan pemanfaatan bahan pangan secara maksimal.
  - Penyusunan panduan konsumsi pangan lokal sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat berdasarkan umur dan kondisi kesehatan.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Pangan Lokal**
  - Pemberdayaan pangan berbasis rumah tangga, seperti kebun keluarga, ternak kecil, dan budidaya ikan untuk meningkatkan kemandirian pangan.
  - Penguatan program diversifikasi pangan lokal agar masyarakat tidak bergantung pada satu jenis pangan tertentu, misalnya selain beras juga mengonsumsi jagung, ubi, atau sagu.
  - Pengembangan industri rumah tangga berbasis pangan lokal, seperti pengolahan pangan sehat dari bahan baku lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
  - Meningkatkan konsumsi sumber protein lokal, seperti ikan, telur, dan kacang-kacangan sebagai bagian dari pola makan seimbang.
- **Peningkatan Pelayanan Pangan dan Gizi di Berbagai Sektor**
  - Optimalisasi pelayanan gizi di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit untuk meningkatkan pemenuhan gizi ibu hamil, bayi, dan lansia.

- Peningkatan kualitas layanan makanan di sekolah melalui program kantin sehat dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak-anak.
- Penguatan program pangan bergizi bagi pekerja di sektor industri dan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan tenaga kerja.
- Mendorong restoran, rumah makan, dan warung makan untuk menyediakan menu sehat dengan komposisi gizi yang lebih baik.

➢ **Penguatan Infrastruktur dan Teknologi dalam Pemanfaatan Pangan**

- Peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi pengolahan pangan agar dapat memanfaatkan pangan dengan lebih efisien dan mengurangi limbah pangan.
- Pengembangan dapur umum berbasis komunitas untuk meningkatkan pemanfaatan pangan di wilayah rawan gizi atau daerah dengan akses terbatas terhadap pangan sehat.
- Penerapan teknologi pengolahan dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi dan memperpanjang masa simpan bahan pangan
- Penguatan sistem penyimpanan dan distribusi pangan berbasis teknologi untuk memastikan pangan tetap berkualitas baik saat sampai ke konsumen.

➢ **Perlindungan Sosial dan Intervensi Gizi untuk Kelompok Rentan**

- Penyediaan bantuan pangan bergizi bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, dan masyarakat miskin.
- Peningkatan akses terhadap pangan fortifikasi, seperti beras bervitamin, garam beryodium, dan minyak goreng berfortifikasi untuk mengatasi kekurangan gizi mikro.
- Pengembangan program dapur sehat di posyandu dan sekolah untuk memberikan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu menyusui.
- Pelaksanaan program intervensi gizi spesifik, seperti suplementasi zat besi dan vitamin bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mencegah anemia dan stunting.

Strategi peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi gizi, diversifikasi pangan lokal, perbaikan layanan

gizi, serta penguatan infrastruktur dan teknologi. Dengan strategi ini, diharapkan masyarakat dapat mengonsumsi pangan dengan lebih bijak dan sehat, sehingga ketahanan pangan dan kesejahteraan gizi dapat terwujud secara berkelanjutan.

**4. Strategi Penguatan Kelembagaan**

Penguatan kelembagaan sangat penting untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan efisien. Dengan kelembagaan yang kuat, kebijakan pangan dapat diimplementasikan secara efektif, koordinasi antar-stakeholder dapat berjalan dengan baik, serta dukungan terhadap petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan dapat lebih optimal. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan:

- **Penguatan Kelembagaan Pemerintah dalam Sektor Pangan**
  - Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pangan, termasuk kebijakan ketahanan pangan, ketersediaan pangan, dan stabilisasi harga.
  - Memperkuat peran dinas terkait (pertanian, perikanan, ketahanan pangan, dan perdagangan) dalam mendukung produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).
  - Membangun sistem data dan informasi pangan yang terpadu untuk memantau produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan di berbagai wilayah secara *real-time*.
  - Mengembangkan kebijakan berbasis bukti *(evidence-based policy)* dengan riset dan kajian mendalam terkait sektor pangan dan ketahanan pangan.
- **Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Petani**
  - Penguatan peran kelompok tani, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola produksi dan distribusi pangan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
  - Mendorong kemitraan antara petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan agar rantai pasok pangan lebih efisien dan menguntungkan bagi semua pihak.

- Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan kelompok perikanan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan produktif.
- Pelatihan dan pendampingan kelembagaan bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam manajemen usaha tani dan akses terhadap teknologi serta permodalan.

➢ **Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Koperasi Pangan**

- Revitalisasi koperasi pertanian dan perikanan agar dapat berperan lebih aktif dalam pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- Mendorong akses petani dan nelayan terhadap pembiayaan dan permodalan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana desa, maupun program kemitraan dengan perbankan dan sektor swasta.
- Pengembangan model bisnis berbasis kelembagaan komunitas, seperti bank benih, bank pangan desa, dan lumbung pangan masyarakat.
- Penguatan BUMDes sebagai agen distribusi dan pemasaran pangan lokal agar petani dan nelayan mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

➢ **Penguatan Kelembagaan Logistik dan Distribusi Pangan**

- Meningkatkan peran Badan Pangan Nasional dan Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
- Mengembangkan sistem distribusi pangan berbasis daerah untuk mengurangi ketimpangan akses pangan antarwilayah, terutama di daerah terpencil dan rawan pangan.
- Mendorong kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan logistik pangan untuk efisiensi rantai pasok dan penurunan harga pangan.
- Memanfaatkan teknologi digital dalam sistem distribusi pangan, seperti marketplace pangan berbasis online yang menghubungkan petani dan konsumen secara langsung.

➢ **Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pangan**

- Peningkatan efektivitas regulasi pangan, termasuk pengawasan harga, pengendalian impor, serta perlindungan petani dan nelayan.

- Penyusunan kebijakan pangan berbasis kearifan lokal, termasuk pengembangan pangan lokal dan kebijakan perlindungan sumber daya alam.
- Penguatan sistem sertifikasi dan standardisasi pangan, seperti label halal, keamanan pangan, dan sertifikasi organik untuk meningkatkan daya saing pangan lokal.
- Meningkatkan keterlibatan akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pangan yang lebih inklusif dan berbasis ilmiah.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Lebak. Khususnya subsektor tanaman pangan berupa budidaya padi sawah, memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan.

Pemerintah Kabupaten lebak akan melakukan rehab dan pembelian alat untuk RMU (Rice Milling Unit) beras Premium yang merupakan unit penggilingan padi yang menghasilkan beras dengan kualitas tinggi atau beras premium melalui proses pengolahan yang lebih modern dan higienis. dengan adanya RMU ini di harapkan lebak menjadi daerah berdaulat pangan khususnya di komoditas beras. RMU memainkan peran penting dalam hal ini mengolah gabah petani menjadi beras premium berkualitas, memperpanjang masa simpan, dan meningkatkan daya saing sehingga petani mendapatkan nilai tambah lebih tinggi.

Kabupaten Lebak memiliki bentang wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi (upland area), yang menyimpan potensi besar untuk pengembangan sektor peternakan. Khususnya pada wilayah upland yang tersebar di bagian tengah dan selatan Kabupaten Lebak seperti di Kecamatan Muncang, Leuwidamar, Sobang, cibeber, Cileles, Sajira, Cipanas, Gunung Kencana, Cilograng, Bojong Manik, Curug bItung  dan Banjarsari, memiliki karakteristik geografis dan ekologis yang sangat mendukung untuk budidaya ternak ruminansia dan unggas lokal.

Dataran tinggi ini memiliki suhu yang relatif sejuk, ketersediaan padang penggembalaan alami, serta keberadaan hijauan pakan yang melimpah. Oleh karena itu, pengembangan kawasan upland sebagai kawasan peternakan strategis menjadi salah satu fokus di Kabupaten Lebak, baik dari aspek produksi pangan hewani, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun penguatan ketahanan pangan daerah.

**Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Upland Area Peternakan**

Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Peternakan menetapkan arah kebijakan strategis berikut untuk optimalisasi potensi peternakan di upland area:

1. **Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Berbasis Wilayah**
   - Pembentukan dan penguatan kelompok ternak di upland area menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing.
   - Pemetaan kawasan prioritas untuk pengembangan sapi potong, kambing PE, dan unggas lokal.
2. **Peningkatan Produktivitas dan Mutu Ternak**
   - Distribusi bibit unggul, pelatihan manajemen pemeliharaan, dan peningkatan teknologi reproduksi (IB, seleksi ternak).
   - Pengelolaan pakan berbasis sumber daya lokal melalui budidaya hijauan pakan ternak (HPT).
3. **Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kawasan Ternak**
   - Penyediaan sarana kandang kolektif, jalan akses peternakan, dan sistem air bersih di upland area.
   - Pengembangan kawasan padang penggembalaan dan pakan hijauan bersama berbasis desa.
4. **Pemanfaatan Model Integrasi Pertanian-Peternakan**
   - Integrasi usaha ternak dengan pertanian dan perkebunan (misalnya, penggemukan sapi pada lahan perkebunan atau limbah pertanian untuk pakan).
   - Penerapan model zero waste farming (pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik).
5. **Pengembangan Kemitraan dan Pemasaran**

- Mendorong skema kemitraan usaha antara kelompok ternak dengan pelaku usaha atau koperasi desa.
- Penguatan pasar ternak dan akses logistik dari upland area ke sentra konsumen (pasar rakyat dan regional).

Di tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lebak mendapat bantuan dari upland area di antaranya bibit domba 644 ekor, chopper 13 unit, kandang domba 13 unit, bibit rumput 500,000 stek, jalan usaha tani 5 Km, serta air bersih 13 unit dan di tahun 2026 bibit domba 528 ekor, chopper 12 unit, kandang domba 12 unit, bibit rumput 500,000 stek, jalan usaha tani 5 KM dan air bersih 12 unit. Diharapkan dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan produktivitas peternakan, dan lebak menjadi salah satu daerah penghasil produksi daging terbesar di Provinsi Banten.

Berikut ini tabel rencana aksi ketahanan pangan :

## Tabel 3. 3 Rencana Aksi Ketahanan Pangan

| Strategi/Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif | | | | | | OPD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Dinas Pertanian |
| **1 Strategi : Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman** | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3,702,968,000 | 1,055,000,000 | 9,000,000,000 | 9,450,000,000 | 9,922,500,000 | 10,418,625,000 | Dinas Pertanian |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 512.734.200 | 495.810.000 | 1.367.045.000 | 1.212.545.000 | 1.007.045.000 | 712.545.000 | Dinas Pertanian |
| | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 6.820.527.534 | 6.820.527.534 | 800.000.00 | 800.000.00 | 800.000.00 | 800.000.00 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 54,907,500 | 74,987,500 | 150,000,000 | 170,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 112.632.566.918 | 114.885.218.257 | 117.182.922.622 | 119.526.581.074 | 121.917.112.696 | 124.355.454.950 | DINAS KESEHATAN |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REHABILITASI SOSIAL | 455,223,000 | 651,513,144 | 893,657,656 | 1,020,783,524 | 1,033,515,593 | 1,313,828,133 | DINSOS |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 45,238,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 215.902.000 | 268.956.934 | 921.160.000 | 921.160.000 | 921.160.000 | 921.160.000 | Dinas Perikanan |
| | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | 25,417,108,550 | 14,148,302,000 | 15.316.617.607 | 16.790.989.489 | 18.867.083.807 | 20.679.235.105 | Dinas PUPR |
| **2 Strategi: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman** | | | | | | | | |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 789.451.800 | 820.653.400 | 861.686.070 | 904.770.374 | 904.770.374 | 950.008.892 | DISPERINDAG |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 38,887,700 | 2,479,709,900 | 654,710,000 | 679,710,000 | 709,710,000 | 724,710,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1,899,399,240 | 2,899,399,240 | 2,899,399,240 | 2,899,399,240 | 2,899,399,240 | 2,899,399,240 | BPBD |
| **3. Strategi : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. Strategi : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi** | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 54,907,500 | 74,987,500 | 150,000,000 | 170,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1.010.815.500 | 425.000.000 | 2.000.000.000 | 100.000.000 | 2.205.000.000 | 2.315.250.000 | Dinas Pertanian |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 44.979.337 | 44.979.337 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

**II. Pembangunan Jalan Poros Desa Produktif;**

Penyelenggaraan jalan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tepatnya melalui Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang - undang ini mengatur pengelompokan status jalan termasuk jalan desa, jalan poros desa, jalan antar desa, jalan kabupaten, dan jalan provinsi. Pengelompokkan tersebut bermuara terhadap kewenangan yang akan menangani atau menyelenggarakan urusan jalan sesuai statusnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak tentu saja bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan kabupaten. Sedangkan peran pemerintah desa berkaitan dengan penyelenggaran jalan desa yang meliputi pembangunan dan pengawasan jalan desa. Adapun jalan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan meliputi jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa. Ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Infrastruktur jalan desa hanya meliputi jalan jalan yang menghubungkan kawasan antar pemukiman masyarakat desa. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa atau poros desa merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dapat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten/ kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Jalan poros desa merupakan infrastruktur vital yang menghubungkan kawasan dan permukiman di dalam desa, berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas, mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sesuai dengan ketentuan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, jalan poros desa termasuk dalam jaringan jalan desa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk pengaturan, pembangunan, dan pemeliharaannya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan jalan sepanjang 1.968,02 km sebagai jalan poros desa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 620/Kep.16-PUPR/2023 per 9 Januari 2023. Penetapan jalan poros desa tersebut mempertimbangkan fungsi jalan berupa lokal primer dan linkungan primer serta masing-masing telah memiliki klasifikasi ruas. Secara historis,

Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan penanganan jalan poros desa sejak 2007 hingga 2024 dengan volume total mencapai 2.057,02 km yang menghabiskan biaya Rp 744.807.172.014,12.

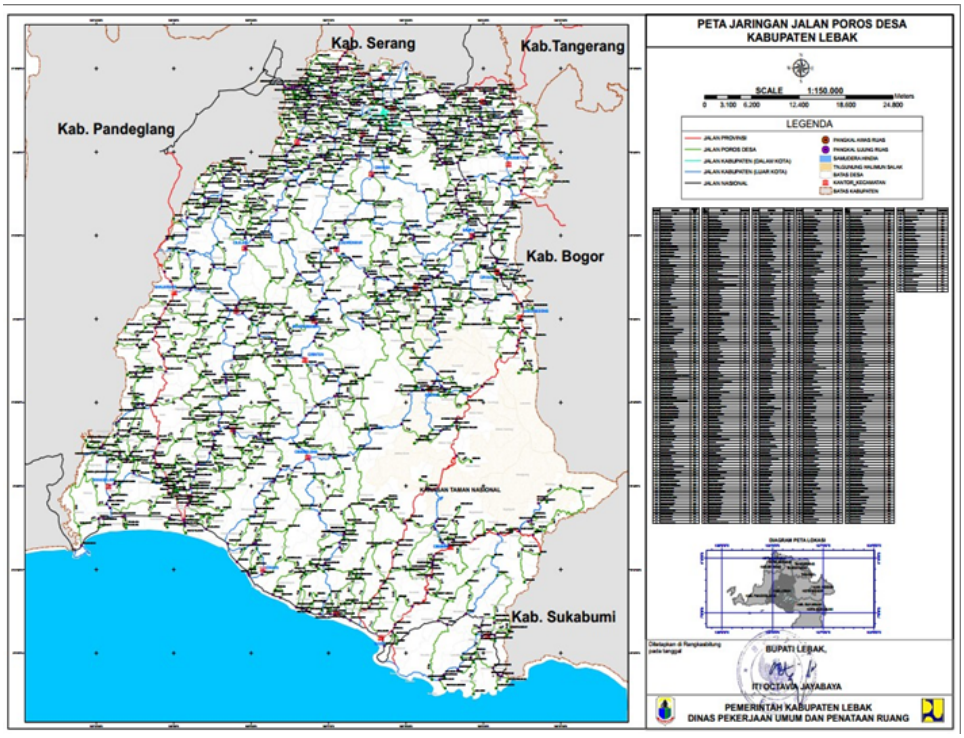


**Gambar 3. 2 Peta Jaringan Jalan Poros Desa di Kabupaten Lebak**

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lebak, 2025*

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan mendukung pemerataan pembangunan, RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 akan turut mengintervensi jalan poros desa yang produktif. Adapun penanganan jalan poros desa produktif di Kabupaten Lebak direncanakan dapat teralokasikan senilai Rp 30 Miliar per tahun atau target 30 - 50 km per tahun yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan salah satu tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 yaitu pengembangan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan ekonomi yang diakselerasi oleh infrastruktur dalam mengintervensi daerah prioritas sehingga bisa mencerminkan Lebak Unggul dalam bingkai visi Lebak Ruhay. Komitmen ini merupakan upaya sinergitas dan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Banten melalui Banten Bagus yang semangatnya

sama-sama menyukseskan pembangunan dari bawah dan dari desa sesuai Asta Cita ke-6 dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun arah penanganan jalan poros desa produktif di Kabupaten Lebak menyasar kepada ruas jalan yang mendukung layanan dasar dan/atau aktivitas ekonomi dengan fokus pada:

1) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas jalan poros desa melalui pembangunan dan rehabilitasi yang sesuai standar teknis, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi demi mendukung konektivitas antar permukiman dan pusat kegiatan di desa.

2) Pengintegrasian rencana pembangunan jalan poros desa dengan rencana tata ruang dan sistem transportasi daerah yang mendukung pada kawasan ketahanan pangan, kawasan pariwisata, kawasan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru serta keberadaan prasarana dan sarana fasilitas umum, sehingga pembangunan jalan dapat mendukung sistem logistik dan mobilitas yang efektif.

Melalui kebijakan ini, diharapkan penanganan jalan poros desa dapat meningkatkan kualitas infrastruktur desa secara menyeluruh, mempercepat akses layanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penanganan jalan poros desa ini pun juga akan turut mempertimbangkan beberapa lokasi seperti kemiskinan ekstrem, stunting, dan kawasan kumuh sebagai pola penanganan terintegrasi. Diharapkan juga penanganan ini turut berkontribusi dalam peningkatan indeks desa. Guna memastikan penanganan ini tepat sasaran, tentu strategi yang rutin dilakukan tiap tahunnya akan diawali dengan identifikasi dan prioritisasi serta adanya pengendalian atas proses pelaksanaan konstruksi.

**Tabel 3. 4 Rencana Aksi Pencapaian Strategi Pembangunan Jalan Desa Produktif**

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **Identifikasi dan Prioritisasi serta Pengendalian** | | | | | | | | |
| Penjaringan dan verifikasi rencana penanganan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 1.750.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | Dinas PUPR |
| | PROGRAM PENATAAN DESA | 27.304.500 | 29.218.000 | 29.218.000 | 29.218.000 | 29.218.000 | 29.218.000 | Dinas PMD |
| Monitoring dan evaluasi | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 19.254.700 | 23.360.000 | 23.360.000 | 23.360.000 | 23.360.000 | 23.360.000 | Bapperida |
| | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 82.492.700 | 107.a276.500 | 107.276.500 | 107.276.500 | 107.276.500 | 107.276.500 | BKAD |
| | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 94.192.000 | 147.342.000 | 147.342.000 | 147.342.000 | 147.342.000 | 147.342.000 | Setda |
| **Pelaksanaan Konstruksi dan Penanganan Jalan** | | | | | | | | |
| Perencanaan<br>Pelaksanaan<br>Pengawasan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 6.356.915.000 | 32.500.000.000 | 32.500.000.000 | 32.500.000.000 | 32.500.000.000 | 32.500.000.000 | Dinas PUPR |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

**III. Pengembangan Geopark Nasional Bayah Dome Melalui Diversifikasi Atraksi Pariwisata dengan Tetap Memperhatikan Pelestarian Keanekaragaman Ekosistem;**

Kawasan *Geopark* Bayah *Dome* Kabupaten Lebak mencakup 15 Kecamatan dengan total luasan sebesar 2.015,37 $km^2$. Delineasi kawasan *geopark* ditentukan berdasarkan keberadaan Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang bernilai tinggi serta mempertimbangkan sarana, prasarana, visibilitas, dan aksesibilitas, serta potensi pariwisata yang telah ada.

Kawasan *Geopark* Bayah *Dome* telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor : 050/Kep.114-BAPELITBANGDA/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor: 050/Kep.104-BAPPEDA/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan *Geopark* Bayah *Dome* Kabupaten Lebak per 15 Maret 2023. Bila mengacu pada dasar hukum penetapan kawasan *Geopark* Bayah *Dome*, delineasi kawasan telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali sejak ditetapkan pertama kali tahun 2020.

Dengan demikian, berdasarkan keberadaan Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) serta visibilitas maupun aksesibilitas, Kawasan *Geopark* Bayah *Dome* terdiri dari 15 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bayah;
2. Kecamatan Cibeber;
3. Kecamatan Cihara;
4. Kecamatan Cijaku;
5. Kecamatan Cilograng;
6. Kecamatan Cipanas;
7. Kecamatan Gunungkencana;
8. Kecamatan Lebakgedong;

9. Kecamatan Leuwidamar;
10. Kecamatan Malingping;
11. Kecamatan Muncang;
12. Kecamatan Panggarangan;
13. Kecamatan Rangkasbitung
14. Kecamatan Sajira;
15. Kecamatan Sobang.

Secara geografis Kawasan *Geopark* Bayah *Dome* terletak antara 6° 18' 00” - 7° 00' LS dan 105°56' 37” - 106° 31'35” BT. Adapun batas-batas administrasi kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang
Timur : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi
Selatan : Samudera Hindia
Barat : Pandeglang

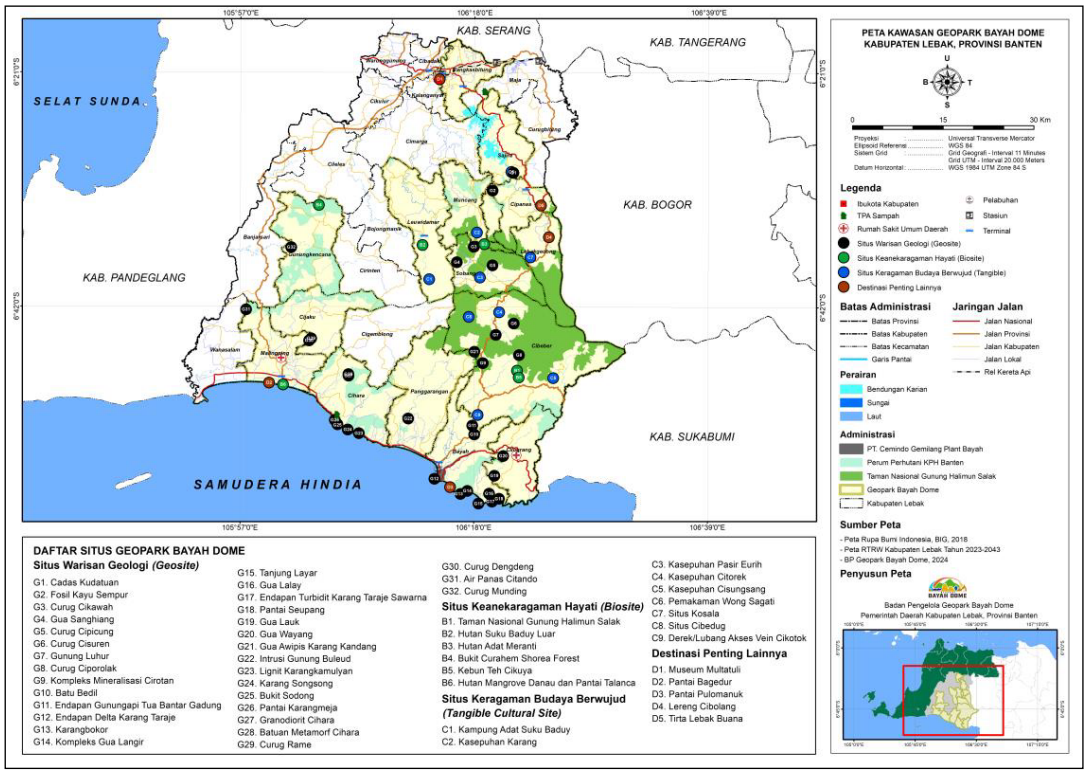


**Gambar 3. 3 Peta Kawasan Geopark Bayah Dome**

*Sumber : Rencana Induk Geopark Bayah Dome 2025-2034*

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 164.K/HK.02/MEM.G/2022 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Lebak Provinsi Banten menetapkan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dituangkan dalam Peta Sebaran Situs Warisan Geologi *(Geosite*) Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebagaimana pada Tabel berikut :

**Tabel 3. 5 Daftar Sebaran Warisan Geologi (Geosite) di Kawasan Geopark Bayah Dome**

| No. | Nama Situs Warisan Geologi (*Geosite*) | Lokasi |
|---|---|---|
| 1. | Cadas Kudatuan | Desa Sajira Mekar, Kecamatan Sajira |
| 2. | Fosil Kayu Sempur | Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira |
| 3. | Curug Cikawah | Desa Sobang, Kecamatan Sobang |
| 4. | Gua Sanghiang | Desa Hariang, Kecamatan Sobang |
| 5. | Curug Cipicung | Desa Sukaresmi, Kecamatan Sobang |
| 6. | Curug Cisuren | Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber |
| 7. | Gunung Luhur | Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber |
| 8. | Curug Ciporolak | Desa Hegarmanah, Kecamatan Cibeber |
| 9. | Kompleks Mineralisasi Cirotan | Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber |
| 10. | Batu Bedil | Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah |
| 11. | Endapan Gunung Api Tua Bantar Gadung | Desa Pasirgombong, Kecamatan Bayah |
| 12. | Endapan Delta Karang Taraje | Desa Darmasari, Kecamatan Bayah |
| 13. | Karangbokor | Desa Sawarna, Kecamatan Bayah |
| 14. | Kompleks Gua Langir | Desa Sawarna, Kecamatan Bayah |
| 15. | Tanjung Layar | Desa Sawarna, Kecamatan Bayah |
| 16. | Gua Lalay | Desa Sawarna, Kecamatan Bayah |
| 17. | Endapan Turbidit Karang Taraje Sawarna | Desa Sawarna, Kecamatan Bayah |
| 18. | Pantai Seupang | Desa Sawarna Timur, Kecamatan Bayah |
| 19. | Gua Lauk | Desa Lebaktipar, Kecamatan Cilograng |
| 20. | Gua Wayang | Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng |
| 21. | Gua Awipis Karang Kandang | Desa Jatake, Kecamatan Panggarangan |
| 22. | Intrusi Gunung Buleud | Desa Sindangratu, Kecamatan Panggarangan |
| 23. | Lignit Karangkamulyan | Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara |
| 24. | Karang Songsong | Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara |
| 25. | Bukit Sodong | Desa Cihara, Kecamatan Cihara |
| 26. | Pantai Karangmeja | Desa Cihara, Kecamatan Cihara |
| 27. | Granodiorit Cihara | Desa Lebakpendeuy, Kecamatan Cihara |
| 28. | Batuan Metamorf Cihara | Desa Lebakpendeuy, Kecamatan Cihara |
| 29. | Curug Rame | Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku |
| 30. | Curug Dengdeng | Desa Kadujajar, Kecamatan Malingping |
| 31. | Air Panas Citando | Desa Senanghati, Kecamatan Malingping |
| 32. | Curug Munding | Desa Cicaringin, Kecamatan Gunungkencana |

*Sumber: Kepmen ESDM RI Nomor: 164.K/HK.02/MEM.G/2022*

Setelah terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 173.K/GL.01/MEM.G/2025 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Bayah *Dome* ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2025, selain menetapkan 32 (tiga puluh dua) situs warisan Geologi (*Geosite*) pada keputusan tersebut juga menetapkan 6 (enam) situs keanekaragaman hayati (*Biosite*) yang tersiri dari:

1. Taman Nasional Gunung Halimun Salah (TNGHS);
2. Hutan Suku Baduy Luar;
3. Hutan Adat Meranti;
4. Bukit Curahem *Shorea Forest*;
5. Kebut The Cikuya; dan
6. Hutan Mangrove Danau dan Pantai Talanca.

dan 9 (sembilan) Situs Keragaman Budaya Berwujud (*Tangible Culture Site*), terdiri atas:

1. Kampung Adat Suku Baduy;
2. Kasepuhan Karang
3. Kasepuhan Pasir Eurih;
4. Kasepuhan Citorek;
5. Kasepuhan Cisungsang;
6. Pemakaman Wong Sagati;
7. Situ Kosala;
8. Situs Cibedug; dan
9. Derek/Lubang Akses *Vein* Cikotok

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 - 2025. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional. Dalam Pasal 7 pada dokumen ini, Arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan DPN (Destinasi Pariwisata Nasional), pemasaran pariwisata nasional, industri pariwisata nasional, dan kelembagaan kepariwisataan nasional. Kabupaten Lebak termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional Bogor-Halimun, dengan dua kawasan pariwisata utama: Kawasan Pengembangan

Pariwisata Nasional (KPPN) Lebak-Baduy dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gunung Halimun.

Dalam Kepariwisataan Kabupaten Lebak memiliki tiga jenis daya tarik wisata: alam, budaya, dan buatan. Daya tarik wisata alam mencakup air terjun (curug), pantai, goa, air panas, dan panorama alam. Wisata religi termasuk dalam kategori budaya. Selama lima tahun terakhir, terdapat penambahan sekitar 27 daya tarik wisata di daerah ini. Inventarisasi daya tarik wisata dapat dilihat dalam tabel. berikut ini.

**Tabel 3. 6 Tabel Daya Tarik Wisata Kabupaten Lebak**

| Klasifikasi Daya Tarik Wisata | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Wisata alam** | **167** | 70 | **161** | **167** | **164** | **164** |
| Wisata Alam Curug | 70 | 38 | 70 | 73 | 70 | 70 |
| Wisata Alam Pantai | 38 | 32 | 38 | 40 | 38 | 38 |
| Wisata Alam Goa | 32 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Wisata Alam Air | 8 | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Wisata Panorama Alam | 16 | **40** | 14 | 15 | 16 | 16 |
| **Wisata budaya** | **82** | **42** | **42** | **42** | **40** | **40** |
| **Wisata buatan** | **15** | **246** | **34** | **37** | **42** | **42** |
| **Total** | **261** | **228** | **237** | **246** | **246** | **246** |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025*

Upaya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Pengembangan *Geopark* Nasional Bayah *Dome* melalui diversifikasi atraksi pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian keanekaragaman ekosistem adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata di kawasan *Geopark* Bayah *Dome* dengan memperkaya jenis dan ragam kegiatan wisata, baik geowisata, ekowisata, maupun wisata budaya. Langkah ini dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan tetap menjaga dan melestarikan ekosistem serta kekayaan geologi, hayati, dan budaya setempat. Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kunjungan wisata secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan aspek konservasi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemeliharaan keanekaragaman ekosistem sebagai aset berharga *Geopark* yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Bayah *Dome* adalah sebagai berikut :

1. Pengoptimalan dan identifikasi atraksi yang dapat menarik kegiatan wisata dan ekonomi lainnya;

2. Pengoptimalan dan identifikasi amenities yang dapat menarik kegiatan wisata dan ekonomi lainnya;
3. Pengembangan tumbuhnya Geopreneurship dan ekonomi kreatif terkait *Geopark*;
4. Peningkatan citra dan pemasaran destinasi kawasan wisata *Geopark*.

Berikut ini Rencana Aksi Pengembangan *Geopark Bayah Dome* Melalui Atraksi Pariwisata tahun 2025-2029 :

**Tabel 3. 7 Rencana Aksi Pengembangan Geopark Bayah Dome Melalui Atraksi Pariwisata**

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | **Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bumi dan Kebudayaan Lokal/** Kerjasama dengan Universitas dan Lembaga Pendidikan | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | 81,206,000 | 81,206,000 | | | | Geopark Bayah Dome | Setda |
| | Fasilitas kegiatan Geopark to School dan School to Geopark | Program Pengelolaan Pendidikan | 795,864,900 | 795,864,900 | 795,864,900 | 795,864,900 | 795,864,900 | 795,864,900 | Geopark Bayah Dome | Disdik |
| 2 | **Peningkatan Konservasi Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya/** Inventarisasi dan Perlindungan Warisan Budaya | Program Pengelolaan Permuseuman | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Museum Multatuli | Disbudpar |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Inventarisasi dan Perlindungan Warisan Budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | | 200,000,000 | | | | | Lebak | Disbudpar |
| | Inventarisasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | | 12,520,000 | | | | | Geopark Bayah Dome | DLH |
| | Peningkatan citra dan pemasaran destinasi kawasan wisata Geopark | Program Pemasaran Pariwisata | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1. Seba Baduy, Kec.Leuwidamar dan Kec..Rangkasbitung<br>2. Festival Seni Multatuli, Kec. Rangkasbitung<br>3. Festival Sawarna, Kec. Bayah<br>4. Seren Taun Citorek, Kec. Cibeber<br>5. Seren Taun Cisungsang, Kec. Cibeber<br>6. Festival Geopark Bayah Dome | Disbudpar |
| | Pengoptimalan dan Identifikasi amenities yang dapat menarik kegiatan wisata dan ekonomi lainnya | Program Pengelolaan Persampahan | 232,475,075 | 232,475,075 | 232,475,075 | 232,475,075 | 232,475,075 | 232,475,075 | Geopark Bayah Dome | DLH |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Peningkatan citra dan pemasaran destinasi kawasan wisata Geopark | Program Pemasaran Pariwisata | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Geopark Bayah Dome | Disbudpar |
| | Mitigasi Bencana Kawasan Geopark | Program Penanggulangan Bencana | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Geopark Bayah Dome | BPBD |
| | Peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat dalam pemanfaatan Geopark | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Geopark Bayah Dome | Disbudpar |
| | Pembangunan jalan strategis | Program Penyelenggaraan Jalan | 1,012,086,300 | 1,012,086,300 | 1,012,086,300 | 1,012,086,300 | 1,012,086,300 | 1,012,086,300 | Kecamatan Sajira, Sobang, Malingping, Cihara, Bayah, Cilograng, Cibeber, Panggarangan, Gunungkencana | PUPR |
| | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat | Program Pengelolaan Persampahan | 4,375,684,825 | 4,375,684,825 | 4,375,684,825 | 4,375,684,825 | 4,375,684,825 | 4,375,684,825 | Tersebar di 13 Kecamatan | DLH |
| | Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana | Program Penyelenggaraan Jalan | | | | 1,422,989,600 | | | Geopark Bayah Dome | PUPR |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana | Program Penanggulangan Bencana | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | Maja, Banjarsari, Wanasalam, Malingping, Cihara, Penggarangan, Cibadak, Rangkasbitung, Cimarga, Muncang, Cigemblong, Bayah, Cirinten, Cibeber, Cilograng | BPBD |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Pengoptimalan dan Identifikasi amenities yang dapat menarik kegiatan wisata dan ekonomi lainnya | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 1. Gunung Luhur, Kec. Cibeber<br>2. Kompleks Mineralisasi Cirotan, Kec. Cibeber<br>3. Lubang/Vein Akses Cikotok, Kec. Cibeber<br>4. Wisata Terpadu Hegarmanah, Kec. Cibeber<br>5. Tanjung Layar, Kec. Bayah<br>6. Endapan Delta Karang Taraje, Kec. Bayah<br>7. Endapan Turbidit Karang Taraje Sawarna, Kec. Bayah<br>8. Granodiorit dan Batuan Metamorf Cihara, Kec. Cihara<br>9. Museum Multatuli, Kec. Rangkasbitung<br>10. Pantai Bagedur, Kec. | Disbudpar |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Malingping<br>11. Saba Budaya Baduy dan sekitarnya, Kec. Leuwidamar | |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Pengembangan fasilitas sosial, ekonomi di kawasan Geopark | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | 1,736,711,000 | 1,736,711,000 | 1,736,711,000 | 1,736,711,000 | 1,736,711,000 | Geopark Bayah Dome | PUPR |
| | Pengembangan fasilitas sosial, ekonomi di kawasan Geopark | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | | 1,113,924,782 | 1,113,924,782 | 1,113,924,782 | 1,113,924,782 | 1,113,924,782 | Geopark Bayah Dome | Dishub |
| | Pengembangan fasilitas sosial, ekonomi di kawasan Geopark | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | | 153,324,750 | 153,324,750 | 153,324,750 | 153,324,750 | 153,324,750 | Geopark Bayah Dome | Dishub |
| 3 | **Pengembangan Perekonomian Masyarakat Secara Berkelanjutan/** Peningkatan kegiatan ekonomi komunitas/masyarakat dalam pengelolaan geopark | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 195,966,100 | 195,966,100 | 195,966,100 | 195,966,100 | 195,966,100 | 195,966,100 | Geopark Bayah Dome | DinkopUKM |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Peningkatan kegiatan ekonomi komunitas/masyarakat dalam pengelolaan geopark | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | 1. Kec. Cihara<br>2. Kec. Malingping<br>3. Kec. Bayah<br>4. Kec. Leuwidamar<br>5. Kec. Cilograng<br>6. Kec. Panggarangan<br>7. Kec. Cijaku<br>8. Kec. Gunungkencana | Distan |
| | Peningkatan kegiatan ekonomi komunitas/masyarakat dalam pengelolaan geopark | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 198,499,950 | 198,499,950 | 198,499,950 | 198,499,950 | 198,499,950 | 198,499,950 | Geopark Bayah Dome | Disperindag |
| | Penciptaan peluang investasi dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi didalam dan disekitar wilayah geopark | Program Promosi Penanaman Modal | | 21,160,000.00 | 21,160,000.00 | 21,160,000.00 | 21,160,000.00 | 21,160,000.00 | Geopark Bayah Dome | DPMPTSP |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Penciptaan peluang investasi dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi didalam dan disekitar wilayah geopark | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | 8,119,500 | 8,119,500 | 8,119,500 | 8,119,500 | 8,119,500 | Dalam dan Luar Negeri | DPMPTSP |
| | Pengoptimalan dan Identifikasi atraksi yang dapat menarik kegiatan wisata dan ekonomi lainnya | Program Pemasaran Pariwisata | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1. Seba Baduy, Kec. Leuwidamar dan Kec. Rangkasbitung<br>2. Festival Seni Multatuli, Kec. Rangkasbitung<br>3. Festival Sawarna, Kec. Bayah4. Seren Taun Citorek, Kec. Cibeber<br>5.Seren Taun Cisungsang,Kec. Cibeber<br>6. Festival Geopark Bayah Dome | Disbudpar |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | Pengembangan tumbuhnya Geopreneurship dan ekonomi kreatif terkait geopark | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 195,966,100 | 195,966,100 | 195,966,100 | 195,966,100 | 195,966,100 | 195,966,100 | Kec. Cibeber, Cilograng, Bayah, Panggarangan, Cihara, Malingping, Cijaku, Gunungkencana, Leuwidamar, Sajira, Cipanas dan Muncang | DINKOPUKM |
| | Peningkatan citra dan pemasaran destinasi kawasan wisata Geopark | Program Pemasaran Pariwisata | | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | Geopark Bayah Dome | Disbudpar |
| | Peningkatan citra dan pemasaran destinasi kawasan wisata Geopark | Program Pemasaran Pariwisata | 117,000,000 | 117,000,000 | 117,000,000 | 117,000,000 | 117,000,000 | 117,000,000 | Geopark Bayah Dome | Disbudpar |
| | Peningkatan citra dan pemasaran destinasi kawasan wisata Geopark | Program Pemasaran Pariwisata | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Geopark Bayah Dome | Disbudpar |
| 4 | **Sarana Pelaksanaan/** Penyiapan Pengembangan dan Penataan Ruang Kawasan Geopark | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 567,162,900 | | Geopark Bayah Dome | Bapperida |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

## IV. Pembangunan Kawasan Agrowisata Cikapek Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Dengan Konsep Kearifan Lokal;

Pembangunan Agrowisata Cikapek sebagai pusat pertumbuhan baru dengan konsep kearifan lokal adalah upaya pengembangan kawasan wisata berbasis pertanian yang memadukan aktivitas agrikultur dengan pariwisata, sekaligus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat. Tujuan pembangunan ini adalah menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman bertani dan menikmati alam, tetapi juga mengangkat potensi budaya dan tradisi lokal sebagai daya tarik utama. Agrowisata Cikapek dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat setempat. Dengan konsep kearifan lokal, Agrowisata Cikapek akan menampilkan berbagai kegiatan tradisional seperti bercocok tanam, kuliner khas, kerajinan tangan, dan seni budaya, sehingga pengunjung dapat merasakan langsung kehidupan pedesaan yang autentik dan harmonis dengan alam. Latar belakang Pengembangan kawasan agrowisata Cikapek karena dilatarbelakangi oleh :

1. Dukungan Kebijakan Pemda Lebak, Visi Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Tujuan Nasional Berbasis Potensi Lokal.
2. Connecting Area Saba Budaya Baduy, Kawasan Agrowisata Cikapek berada pada lokasi strategis lintasan tercepat menuju Saba Budaya Baduy.
3. Keragaman Potensi Wisata, Area seluas 52 Ha, Kawasan memiliki variabilitas potensi untuk pengembangan atraksi wisata.
4. Miniatur Saba Budaya Baduy, Terdapat 100 penggarap masyarakat Baduy yang dapat dilibatkan melalui pemberdayaan masyarakat.
5. Ekowisata, Sub tema ecotourism yang relevan dengan kondisi kewilayahan Lebak, berorientasi kepada aspek konservasi, produksi, rekreasi, dan aspek edukasi.

Manfaat ;

1. Konservasi
2. Edukasi
3. Pariwisata

4. Ekonomi
5. Pemberdayaan

Adapun rencana pengembangan zona agrowisata cikapek sebagaimana gambar dibawah ini.

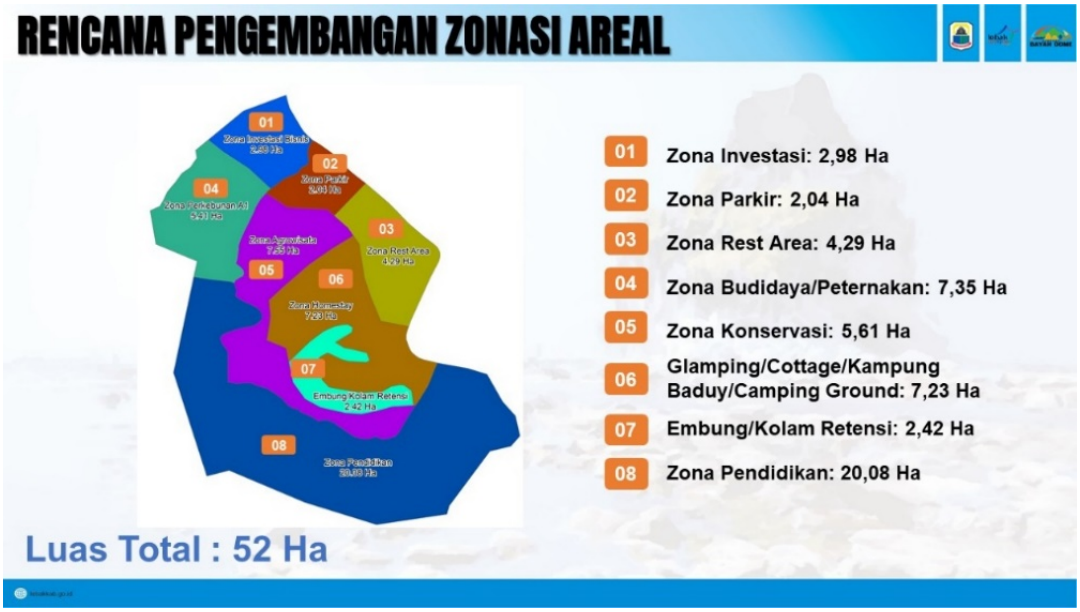


**Gambar 3. 4 Rencana Pengembangan Zonasi Areal Cikapek**

*Sumber : Master Plan Rencana Pengembangan Zonasi Areal Cikapek*

Rencana Pemanfaatan Area Kawasan dengan infrastruktur yang ramah lingkungan, sistem zonasi yang sudah diatur sesuai kebutuhan, peruntukan dan kondisi existing area dengan tidak merubah topografi kawasan yang akan dikembangkan berdasarkan tabel tersebut akan dikembangkan zona areal sebagaimana dibawah ini ;

- **Zona 1** Pemanfaatan untuk Area Bisnis, Area Komersial (Galeri Cinderamata, Kuliner, Galeri UMKM, Galeri Ekraf, Resto & Café) Untuk Zona 8 diperuntukan bagi pengembangan investasi;
- **Zona 2** Area Parkir;
- **Zona 3** Pemanfaatan untuk Rest Area (Toilet, Tempat Ibadah, ATM, Pos Kesehatan, Ruang Laktasi, Attraction Site);
- **Zona 4** Pengembangan tanaman produksi khas Lebak antara lain manggis, durian unggul lokal, alpukat dan aneka tanaman budidaya lainnya. Selain fungsi produksi

zona ini dipersiapkan sebagai sarana edukasi bagi wisatawan. Disekitar lokasi juga akan disiapkan area workshop untuk hasil produksi yang dihasilkan;

- **Zona 5** untuk Konservasi koleksi Tanaman Langka / Endemik serta wahana interpretasi bagi wisatawan minat khusus. Selain itu zona konservasi diperuntukan sebagai kawasan penyangga;
- **Zona 6** Area menjadi salah satu atraksi disamping Agrowisata salah satunya viewing amphitheatre. Dengan konsep glamour camping wisatawan akan disuguhkan pemandangan perbukitan dan hamparan area agrowisata. (Glamping/Cottage/Kampung Baduy/Camping Ground);
- **Zona 7** Kolam retensi (embung) untuk pengelolaan sumber daya air dan cadangan air kawasan. Dan dimanfaatkan sebagai sarana pembudidayaan jenis-jenis ikan yang terkombinasikan dengan jenis-jenis tanaman produksi dan tanaman kehutanan (*Agrosilvofishery*);
- **Zona 8** Dipersiapkan untuk area pendidikan, yang diperuntukan secara tematik sebagai sekolah unggulan di Provinsi Banten.

Kondisi saat ini dalam pengembangan agrowisata Cikapek telah terbangunnya sarana berupa jalan, area parkir, toilet dan tempat ibadah yang berada pada zona 3. Upaya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Pembangunan Agrowisata Cikapek sebagai pusat pertumbuhan baru yang akan dilakukan sebagai termuat dalam tabel berikut ini

**Tabel 3. 8 Pembangunan Kawasan Agrowisata Cikapek Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Dengan Konsep Kearifan Lokal**

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | Atraksi | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | 7,000,000,000 | | | | | Cikapek | Disbudpar |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | 25,000,000 | | | | Cikapek | Distan |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | 6,747,026,900 | | | | Cikapek | Dinakeswan |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | 146,076,000 | | | Cikapek | PUPR |
| 2 | Aksesbilitas | Program Penyelenggaraan Jalan | 11,690,135,000 | 11,690,135,000 | 11,690,135,000 | 11,690,135,000 | | | Cikapek | PUPR |
| 3 | Amenitas | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | | | | Cikapek | Disbudpar |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | 1,113,924,600 | | | Cikapek | Disbudpar |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 4 | Aktifitas | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | 7,000,000,000 | | | | | Cikapek | Disbudpar |
| 5 | Akomodasi | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | | | Cikapek | Disbudpar |
| 6 | Ancillary (Pelayanan Pendukung) | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | | | | Cikapek | Disbudpar |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | | 1,113,924,600 | | | | | Cikapek | Dishub |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | | 9,686,424,350 | | | | | Cikapek | Dishub |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | 216,373,100 | | | | Cikapek | PUPR |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | | | 2,660,936,350 | | | | Cikapek | PUPR |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | 500,000,000 | | | | Cikapek | Dinkes |

*Sumber : Data dioleh Bapperida, 2025*

## V. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir;

Sampah sudah menjadi masalah lingkungan yang sangat serius dan kompleks bahkan di seluruh dunia. Sebagai komitmen jangka panjang, RPJPN Tahun 2025-2045 menargetkan bahwa melalui ketahanan sosial budaya dan ekologi diharapkan dapat menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas melalui reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Pada kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, pengelolaan sampah tidak hanya perlu dilakukan reformasi namun juga diarahkan untuk mewujudkan transformasi ekonomi hijau melalui pengembangan ekosistem ekonomi sirkular.

Reformasi pengelolaan sampah mencakup seluruh rantai layanan (pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang disertai dengan penguatan serta penegakkan hukum dan peraturan, dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai arus utama di berbagai tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian wewenang clean and clear, dijalankan dengan koherensi dan konsisten mulai dari tahap perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan serta penguatan pengelolaan aset. Bahkan RPJMN Tahun 2025-2029 mengarahkan agar pengelolaan sampah harus menjadi standar pelayanan minimal yang didukung dengan penguatan kebijakan, perbaikan dalam tata kelola, kinerja kelembagaan dan keuangan daerah, serta komitmen kepala daerah. Adapun arah kebijakan reformasi yang dimaksud diantaranya melalui perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu.

Sebagai upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir maka strategi yang harus dilakukan berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Pengurangan sampah sebagai kebijakan di hulu; dan
2. Penanganan sampah sebagai kebijakan di hilir.

Pengurangan sampah akan lebih banyak menyasar masyarakat mulai dari pendidikan dan kesadaran hingga penguatan keterlibatannya, kemudian juga melibatkan

dunia usaha untuk berkomitmen dalam mengurangi sampah yang didukung insentif dan disinsentif, serta mendorong daur ulang sampah sehingga timbunan sampah berkurang.

Sedangkan penanganan sampah diawali dengan kehadiran kebijakan dari level kabupaten hingga desa, penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarananya, peningkatan kerja sama dalam mengelola sampah, dan tentunya upaya penegakkan hukum dan peraturan serta utamanya optimalisasi terhadap Tempat Pembuang Akhir Sampah (TPAS) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Berdasarkan data neraca persampahan Kabupaten Lebak bahwa kondisi sampah yang terkelola pada tahun 2024 hanya mencapai 25,58%. Hal ini tidak terlepas dari jangkauan wilayah yang cukup luas mengingat Kabupaten Lebak sebagai wilayah terluas atau 34% dari luas wilayah Provinsi Banten ditambah dengan keterbatasan sarana prasarana persampahan milik Pemerintah Kabupaten Lebak. Dari 28 kecamatan, baru 13 kecamatan yang mampu terlayani oleh 2 (dua) TPAS baik Dengung maupun Cihara. Sehingga dengan kondisi tersebut ditambah beberapa intervensi penanganan berdasarkan tren penganggaran, maka dalam periode RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 diproyeksikan persentase sampah terkelola hanya mampu mencapai 38,73%.

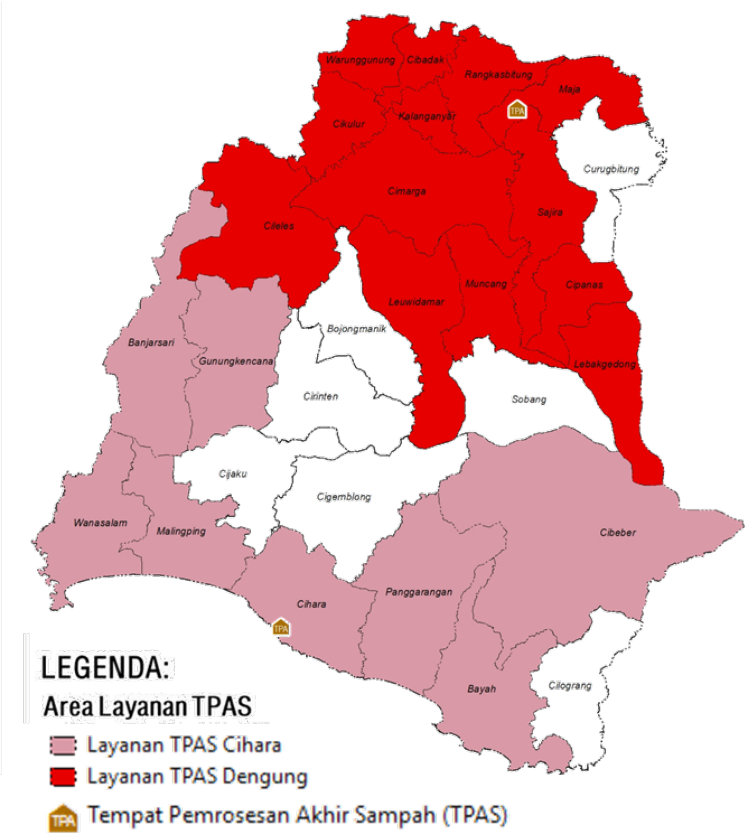


**Gambar 3. 5 Peta Cakupan Layanan Eksisting Persampahan di Kabupaten Lebak**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2025

Upaya meningkatkan tata kelola sampah sebetulnya sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui peluang program *Local Service Delivery Improvement Project* (LSDP) yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak akhir tahun 2023. Dengan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak berencana melakukan pembangunan TPST baik di Dengung maupun Cihara dengan penerapan teknologi yang mendorong pengembangan ekosistem ekonomi sirkular menuju ekonomi hijau. Terlebih lagi calon *off-taker* sudah tersedia mulai dari hasil *refuse derived fuel* (RDF) oleh PT. Cemindo Gemilang dan hasil budidaya magot dengan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang sudah dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Lebak serta beberapa potensi hasil pengolahan lainnya seperti paving block dan pupuk. Dalam menunjang operasional TPST nantinya, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui program LSDP juga mencantumkan rencana penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk meningkatkan area pelayanan pengangkutan sampah

bahkan bila memungkinkan dapat melayani lintas kabupaten atau skala regional. Tak hanya pada sektor hilir, Pemerintah Kabupaten Lebak juga merencanakan reformasi pada sektor hulunya melalui keberadaan bank sampah dan TPS3R serta mendorong pelibatan desa dengan mewajibkan kepemilikan peraturan desa hingga tataran implementasi secara riil termasuk mengarahkan BUMDes sebagai lembaga yang mendukung kemandirian ekonomi di desa dari pengelolaan sampah. Jika program ini dapat berjalan tentunya akan berimplikasi terhadap peningkatan indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) di Kabupaten Lebak.

Ikhtiar yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk periode 5 (lima) tahun ke depan selain untuk mewujudkan Lebak Hegar dalam bingkai visi Lebak Ruhay, tentunya merupakan bentuk harmonisasi atas penyelesaian permasalahan daerah termasuk Provinsi Banten yang turut menghadapi masalah persampahan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada meningkatnya timbunan sampah sehingga dapat memicu masalah lingkungan yang cukup kompleks bila tidak tertangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan segera solusi penyelesaian masalah persampahan melalui penggunaan teknologi terkini dan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal tersebut tentu saja akan menjawab arahan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mereformasi pengelolaan sampah terintegrasi sebagai ekosistem percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan transformasi ekonomi hijau.

**Tabel 3. 9 Rencana Aksi Pencapaian Strategi Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir**

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **Pengurangan Sampah** | | | | | | | | |
| Pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 | Dinas Kesehatan |
| Penguatan keterlibatan masyarakat | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | - | - | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | Dinas LH |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 25.869.000 | 25.869.000 | 25.869.000 | 25.869.000 | 25.869.000 | 25.869.000 | Dinas LH |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 201.824.400 | 201.824.400 | 201.824.400 | 201.824.400 | 201.824.400 | 201.824.400 | Dinas PMD |

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Mendukung daur ulang sampah | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 29.800.000 | 29.800.000 | 29.800.000 | 29.800.000 | 29.800.000 | 29.800.000 | Dinas LH |
| Penguatan komitmen dunia usaha dalam penerapan kewajiban produsen untuk pengurangan sampah | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 25.300.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | Dinas LH |
| Mendorong peningkatan jumlah sekolah adiwiyata | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 27.969.000 | 27.969.000 | 55.513.079 | 56.269.181 | 57.025.283 | 57.781.385 | Dinas LH |
| **Penanganan Sampah** | | | | | | | | |
| Penyusunan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | Dinas LH |
| | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | - | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | Dinas PMD |
| | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 93.064.000 | 94.263.800 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | Bapperida |
| | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | Satpol PP dan Damkar |
| Optimalisasi tempat | PROGRAM PENGEMBANGAN | - | 15.079.306.695 | 18.693.165.305 | 15.050.000.000 | - | - | Dinas PUPR |

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| pengolahan sampah terpadu | SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | | | |
| Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 4.910.385.000 | 4.495.684.700 | 4.810.385.000 | 4.810.385.000 | 4.810.385.000 | 4.810.385.000 | Dinas LH |
| Peningkatan kerja sama dalam mengelola sampah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 81.206.000 | 106,956,100.00 | 106,956,100.00 | 106,956,100.00 | 106,956,100.00 | 106,956,100.00 | Setda |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 93.064.000 | 94.263.800 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | Bapperida |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN DAERAH | 300.000.000 | - | - | - | - | - | |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

**VI. Pengembangan Kawasan Industri hijau dalam rangka perkuatan struktur industri hulu-hilir;**

Pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kecamatan Cileles dalam rangka perkuatan struktur industri hulu-hilir adalah upaya menciptakan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Kawasan ini dirancang untuk mendukung penguatan struktur rantai pasok dari industri hulu (pengolahan bahan baku) hingga industri hilir (pengolahan produk akhir), sehingga tercipta sinergi yang efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan daya saing industri melalui optimalisasi sumber daya lokal, penerapan teknologi bersih, pengelolaan limbah yang terpadu, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup, yang tertuang dalam Arah Kebijakan Kawasan Industri :

1. Mendukung kebijakan hilirisasi ekonomi. khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam yang beragam dan lahan yang sangat luas untuk peningkatan nilai tambah produk. Pemerataan pertumbuhan investasi tidak hanya difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan seperti sisi utara Provinsi Banten, melainkan juga sisi selatan yang memiliki sektor potensial untuk digarap.
2. Kawasan aglomerasi diarahkan untuk memfasilitasi kemitraan antara industri besar dengan UMKM agar mampu mandiri dan berdaya saing;
3. Kawasan industri yang mampu menciptakan tenaga kerja lokal yang produktif dan berdaya saing dengan membangun pusat Balai Latihan Kerja (BLK);
4. Kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau.

**Gambar 3. 6 Road Map Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak 2017 – 2036**

*Sumber : Kementerian Investasi RI 2022*

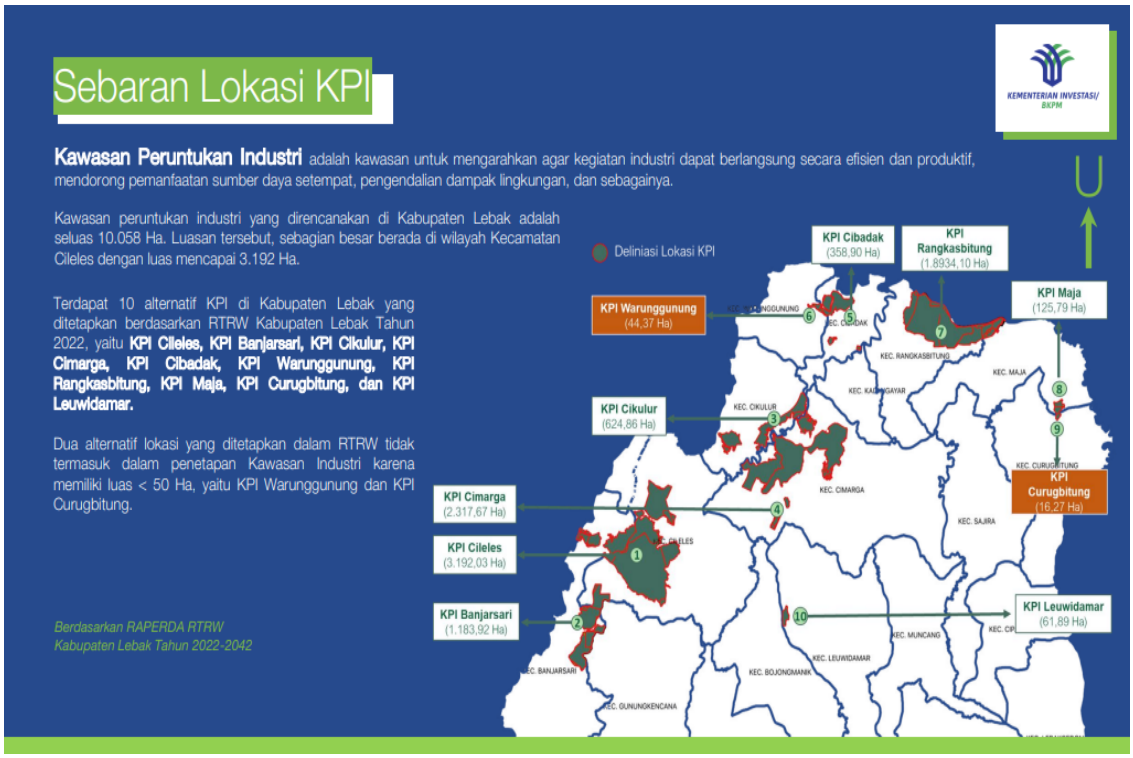


**Gambar 3. 7 Sebaran Lokasi Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Kementerian Investasi RI 2022*

Dalam Pembangunan Kawasan Industri hijau dalam rangka perkuatan struktur industri hulu-hilir akan dilaksanakan di Kecamatan Cileles. Adapun sebaran lokasi yang akan menjadi titik lokasi Kawasan Industri Hijau sebagai berikut :

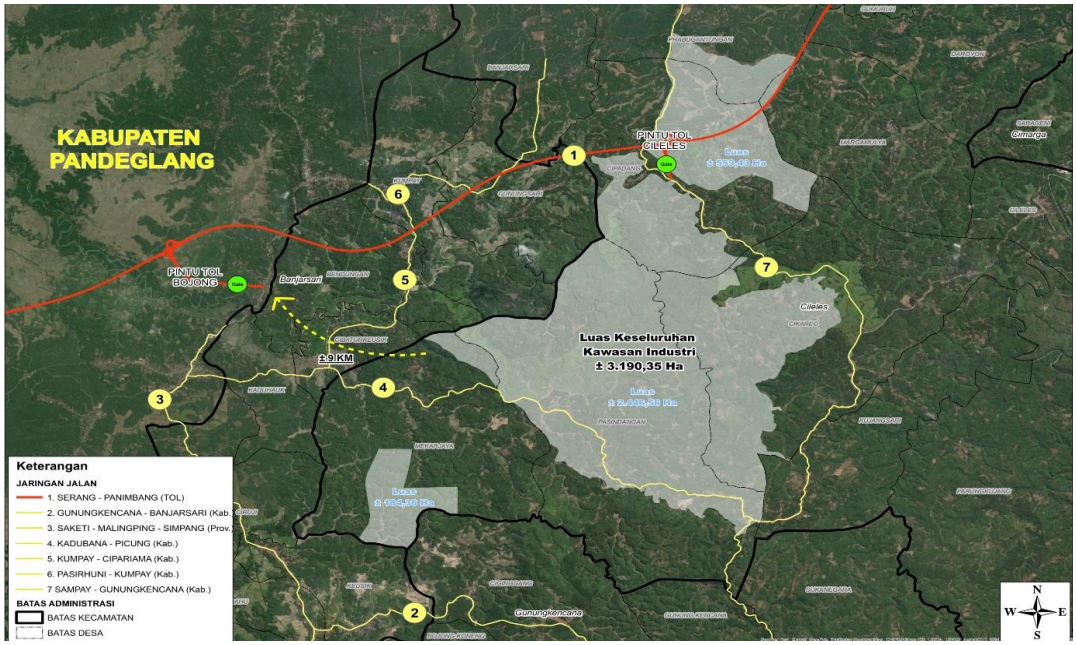


**Gambar 3. 8 Sebaran Lokasi Kawasan Industri Hijau**

*Sumber : Kementerian Investasi RI 2022*

Kabupaten Lebak, yang terletak di Provinsi Banten, memiliki potensi besar untuk pengembangan kawasan industri hijau berkelanjutan. Delineasi lokasi pengembangan kawasan industri hijau ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ketersediaan lahan, aksesibilitas, dampak lingkungan, serta potensi ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Berikut gambaran delineasi lokasi industri hijau di Kabupaten Lebak.

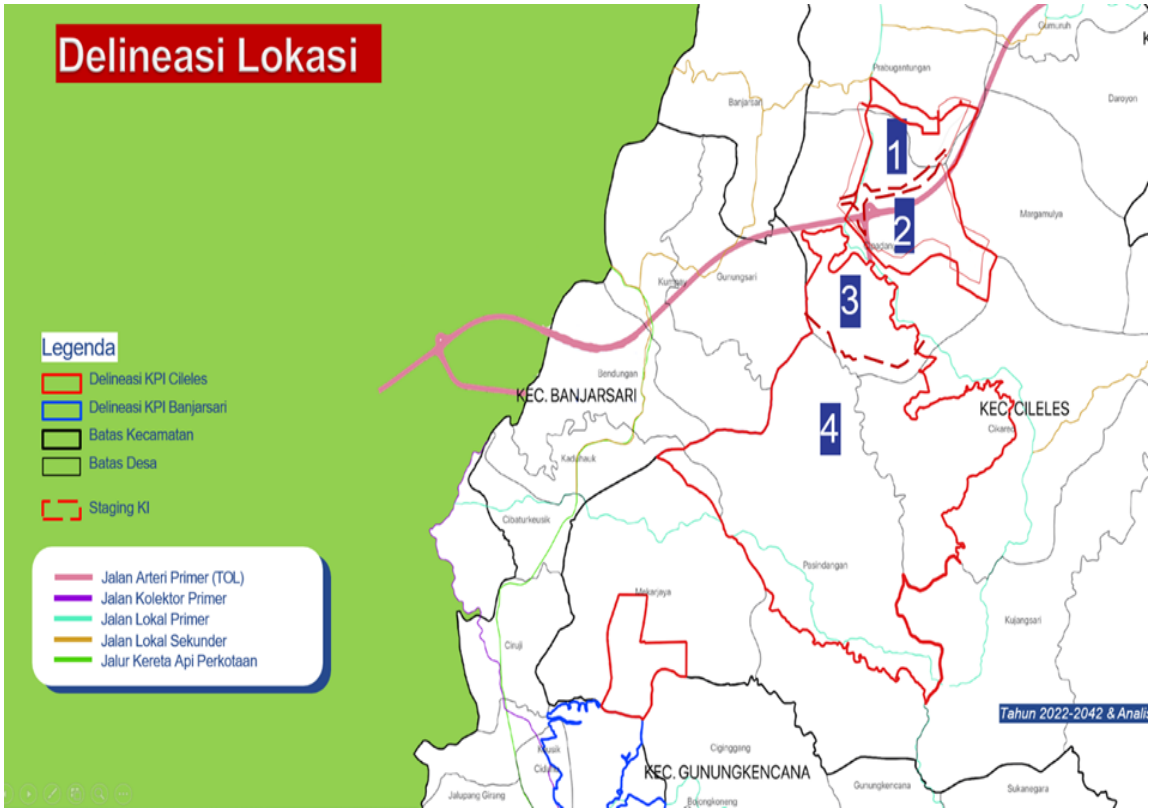


**Gambar 3. 9 Delineasi Lokasi Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Lebak**

*Sumber : Kementerian Investasi RI 2022*

Terdapat 4 (empat) blok deliniasi KI Lebak dengan melakukan pentahapan pengembangan yaitu tahap pertama **Blok 1 memiliki luas sebesar ±240 Ha** meliputi 3 (tiga) desa/kelurahan, Tahap 2 yaitu **Blok 2 memiliki luas sebesar ±239 Ha** meliputi 1 (satu) desa/kelurahan**,** Tahap 3 yaitu **Blok 3 dengan luasan ±338 Ha** meliputi 1 (satu) desa/kelurahan**, dan tahapan pengembangan berikutnya yaitu Blok 4 memiliki luas sebesar ±1.978,65 Ha** meliputi 3 (tiga) desa/kelurahan.

**Tabel 3. 10 Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Hijau Lebak**

| No | Deskripsi | Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahapan Pengembangan | **Tahap I (2023-2033)** | **Tahap II (2034-2044)** | **Tahap III (2045-2055)** | **Tahap IV (2056-2066)** |
| 2 | Luasan masing-masing Blok | ±240 Ha | ±239 Ha | ±338Ha | ±1.978,65 Ha |

| No | Deskripsi | Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Status kepemilikan lahan* | | | | |
| 4 | Harga lahan | Rp 15.010 – Rp 46.810 | Rp 15.010 – Rp 46.810 | Rp 15.010 – Rp 46.810 | Rp15.010 – Rp 46.810 |
| 5 | Kemiringan lahan | 2-15% | 2-15% | 2-15% | 2-15% |
| 6 | Jarak dengan exit tol | < 1 km | < 1 km | < 1 km | < 1 km |
| 7 | Kemudahan akses | - Akses exit tol langsung<br>- Dilalui jalan lokal primer<br>- Pelabuhan Merak: ±2 jam (98 km) | - Exit tol sedikit memutar<br>- Dilalui jalan lokal primer<br>- Pelabuhan Merak: ±2 jam (98 km) | - Akses exit tol langsung<br>- Dilalui jalan lokal primer<br>- Pelabuhan Merak: ±2 jam (98 km) | - Akses exit tol langsung<br>- Dilalui jalan local primer<br>- Pelabuhan Merak: ±2 jam (98 km) |
| 8 | Kelengkapan fasilitas dan infrastruktur | - Gardu Induk Malingping:± 31 km | - Gardu Induk Malingping: ±31 km | - Gardu Induk Malingping: ±31 km | - Gardu Induk Malingping : ±31 km |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

## i. Usulan Delineasi

**a) Blok 1** 3 Desa dengan Total Luas 240 Ha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hambar dibawah ini :

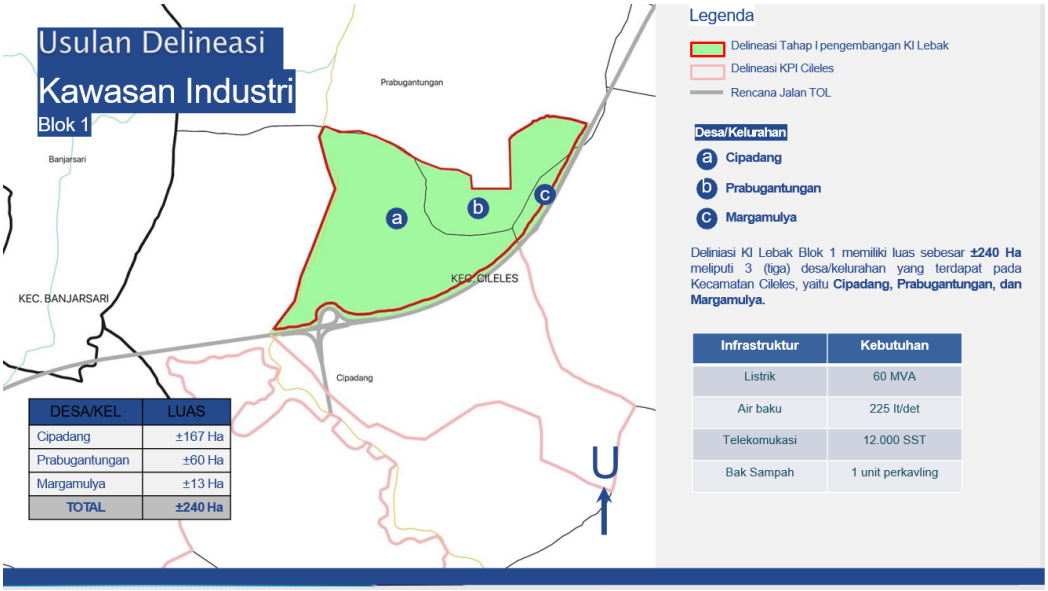


**Gambar 3. 10 Usulan Delineasi Kawasan Industri Blok 1**

*Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2024*

b) **Blok 2** Desa Cipadang dengan Total Luas 239 Ha, untuk lebaih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

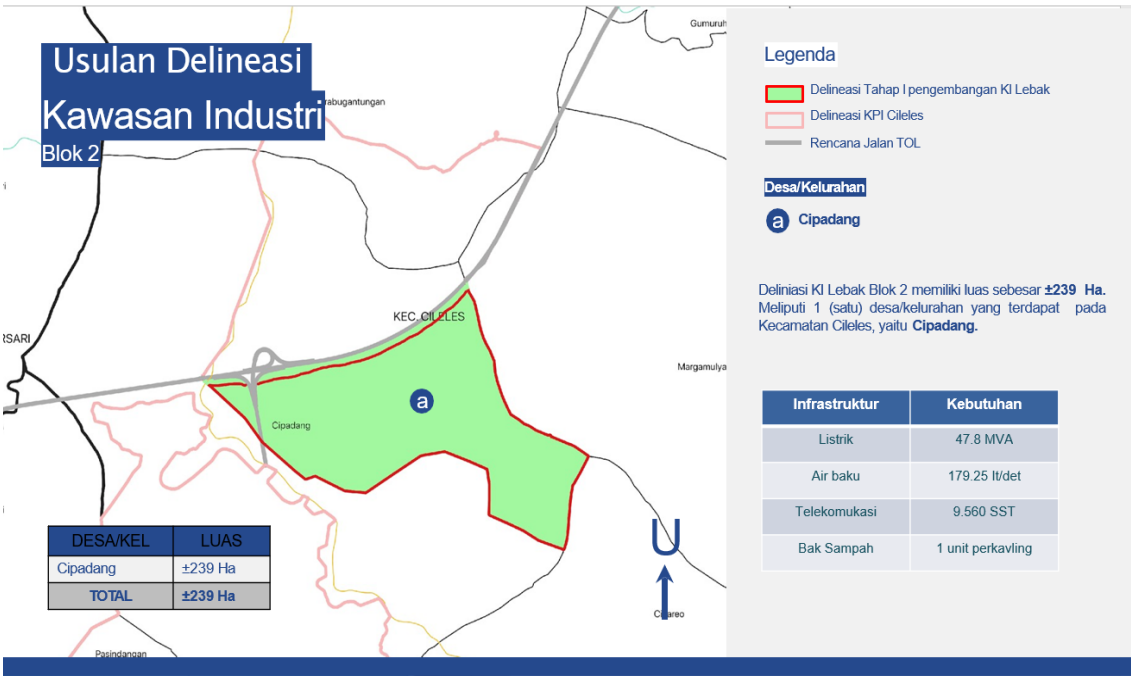


**Gambar 3. 11 Usulan Delineasi Kawasan Industri Blok 2**

*Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2024*

c) **Blok 3 & 4** 4 Desa Cipadang, Cikareo Pasindangan dan Mekarjaya dengan Total Luas 2.316,65 Ha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

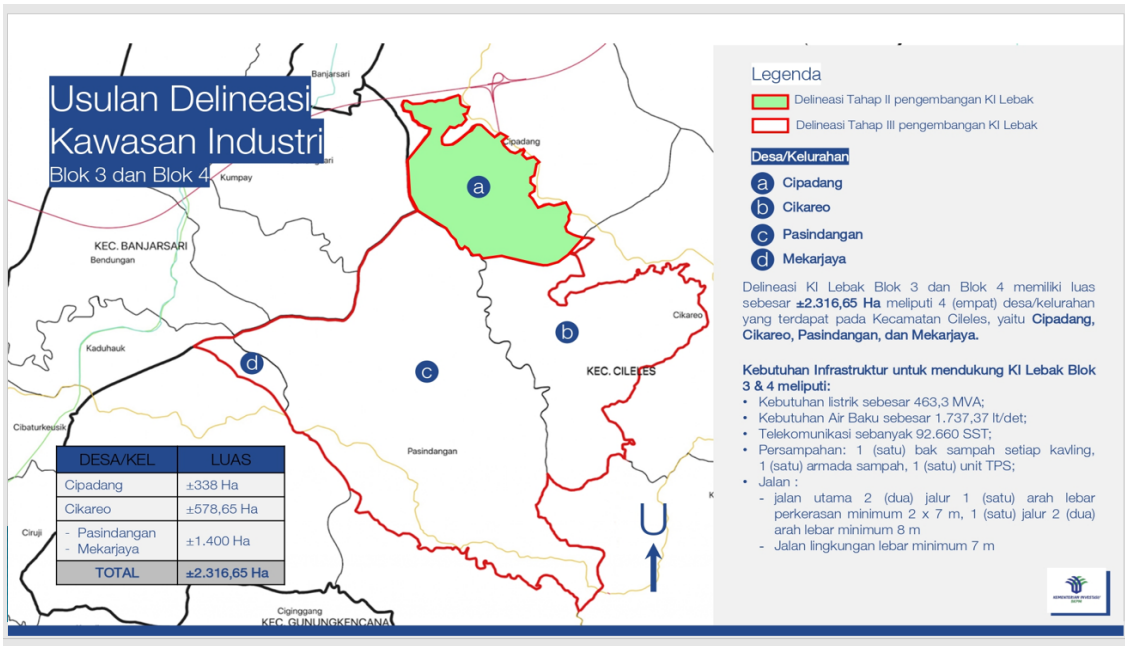


**Gambar 3. 12 Usulan Delineasi Kawasan Industri Blok 3 dan 4**

*Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2024*

### ii. Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM

Industri hijau di Kabupaten Lebak juga melibatkan pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan, seperti kerajinan tangan dari bahan daur ulang, produk olahan hasil pertanian organik, dan ekowisata.

### iii. Dukungan Pemerintah dan Kolaborasi

Pemerintah Kabupaten Lebak tidak bekerja sendiri dalam mengembangkan industri hijau. Mereka menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, akademisi, dan sektor swasta. Beberapa bentuk dukungan yang diberikan meliputi:

- **Insentif Fiskal,** Pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang menerapkan praktik industri hijau.
- **Pendanaan,** Alokasi anggaran khusus untuk program-program industri hijau, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti instalasi pengolahan limbah dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

- **Edukasi dan Sosialisasi,** Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya industri hijau dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Pengembangan industri hijau di Kabupaten Lebak merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif. Dalam kurun waktu ke depan, pembangunan industri hijau akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan terintegrasi. Berikut ini Tabel Rencana Aksi Pengembangan Industri Hijau Cileles :

## Tabel 3. 11 Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri Hijau Cileles

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | **Perencanaan Tata Ruang Terpadu** | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 750.000.000 | | | | | | Kab. Lebak | Disperindag Provinsi Banten |
| 2 | **Kebijakan dan Regulasi Pendukung** | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 236,059,000 | | | | | | Kab. Lebak | Disperindag Kab. Lebak |
| 3 | **Kebijakan dan Regulasi Pendukung** | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 67,162,900 | | | | | | Kab. Lebak | Bapperida Kab. Lebak |
| 4 | **Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas** | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | 143,836,000 | | | | | | Lebak | PUPR Kab. Lebak |
| | | Program Penyelenggaraan Jalan | | 1,012,086,300 | 1,012,086,300 | 1,012,086,300 | | | Cileles | PUPR Kab. Lebak |
| 5 | **Penguatan Sarana dan Prasarana** | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | 1,736,711,000 | 1,736,711,000 | 1,736,711,000 | | Cileles | Swasta, PDAM, PUPR Kab. Lebak |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | | 1,736,711,000 | | Cileles | Swasta, PDAM, PUPR Kab. Lebak |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | 54,994,500 | 54,994,500 | 54,994,500 | 54,994,500 | Cileles | Distan Kab. Lebak |
| | | Program Penatagunaan Tanah | - | - | | | | | Cileles | Setda Lebak , Perkim Kab. Lebak, ATR/BPN Lebak |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

**VII. Pengembangan tata kelola pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan 6A di destinasi wisata prioritas (Sawarna, Saba Budaya Baduy, dan Wewengkon Citorek);**

Pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan 6A di destinasi wisata prioritas (Sawarna, Saba Budaya Baduy, dan Wewengkon Citorek) merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan destinasi wisata dengan mengoptimalkan enam aspek penting (6A) yaitu melalui Atraksi (Attraction), Aksesibilitas (Accessibility), Amenitas (Amenity), Aktivitas (Activity), Akomodasi (Accommodation) dan Ancillary (Pelayanan Pendukung). Melalui peningkatan 6A di destinasi wisata prioritas seperti Sawarna, Saba Budaya Baduy, dan Wewengkon Citorek, diharapkan dapat tercipta destinasi wisata yang berkualitas, menarik, ramah lingkungan, serta mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat.

Jumlah kunjungan pada destinasi prioritas seperti Sawarna, Saba Budaya Baduy dan Wewengkon Citorek adalah sebagai berikut :

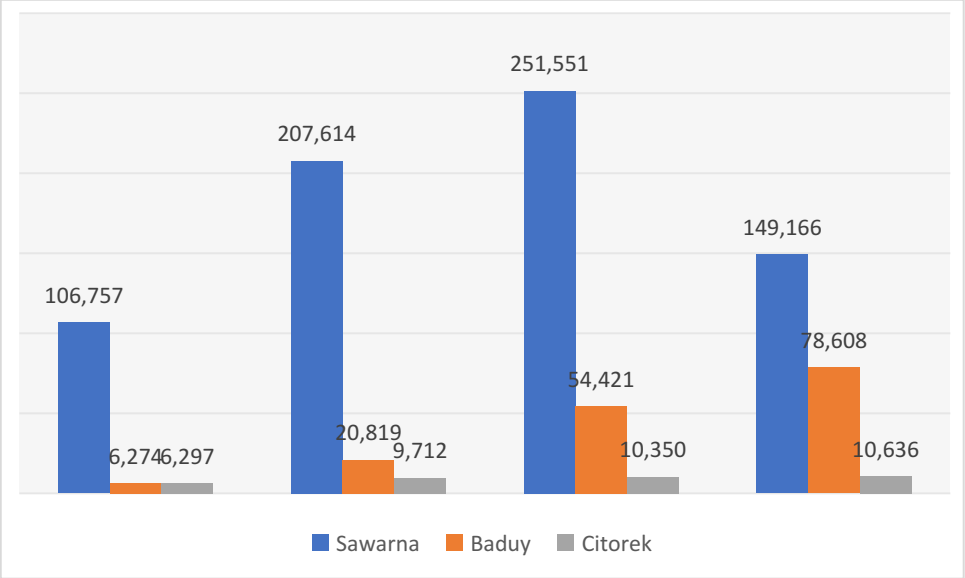


**Grafik 3. 1 Data Kunjungan Wisata di 3 Destinasi (Sawarna, Baduy, Citorek)**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lebak (Aplikasi Datkun)

Dalam Pengembangan Pariwisata Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan 6A di Destinasi Wisata Prioritas (Sawarna, Saba Budaya Baduy, dan Wewengkon Citorek) ada beberapa kegiatan dan pembangunan yang telah dilaksanakan terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 12 Kondisi Exsisting 3 Destinasi Wisata (Baduy, Sawarna, Citorek)**

| DESTINASI WISATA | KONDISI EXISTING | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ATRAKSI | AKSESBILITAS | AMENITAS | AKTIFITAS | AKOMODASI | ANCILLARY (PELAYANAN PENDUKUNG) |
| BADUY | Saba Budaya Baduy | Ruas Jalan Rusak | Rest area, kios ciboleger | Saba Budaya Baduy | Homestay dan penginapan | Pokdarwis dan HPI |
| SAWARNA | Pantai | Ruas Jalan Rusak | belum ada parkir didalam kawasan | Pantai | Homestay dan penginapan | Pokdarwis dan BUMDES |
| WEWENGKON CITOREK | Bentang Alam dan Budaya | Baik | Masih proses pembangunan | Bentang alam dan budaya | Homestay dan penginapan | Pokdarwis |

*Sumber : Data diolah Disbudpar Lebak, 2025*

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terutama dalam meningkatkan elemen *6A* tidak hanya akan dilakukan pada destinasi wisata prioritas seperti Sawarna, Saba Budaya Baduy, dan Wewengkon Citorek namun juga tetap akan memperhatikan pengembangan destinasi wisata lain di setiap kecamatan maupun desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berikut ini adalah tabel rencana aksi penanganan destinasi prioritas Kabupaten Lebak:

## Tabel 3. 13 Rencana Penanganan Destinasi Wisata

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | Amenitas | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | 7,000,000,000 | | | | | Baduy | Disbudpar |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | | 4,375,684,825 | | | | | Baduy | LH |
| 2 | Aksesbilitas | Program Penyelenggaraan Jalan | | 11,690,135,000 | | | | | Baduy | PUPR |
| 3 | Ancillary (Pelayanan Pendukung) | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 300,000,000 | | 300,000,000 | | 300,000,000 | | Baduy | Disbudpar |
| 4 | Amenitas | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | 7,000,000,000 | | | | | Sawarna | Disbudpar |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | | | 4,375,684,825 | | | | Sawarna | LH |
| 5 | Aktifitas | Program Pemasaran Pariwisata | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | 1,213,101,000 | Sawarna | Disbudpar |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 6 | Ancillary (Pelayanan Pendukung) | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | 300,000,000 | | 300,000,000 | | 300,000,000 | Sawarna | Disbudpar |
| 7 | Atraksi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | | 146,076,000 | | | | | Wewengkon Citorek | PUPR |
| 8 | Amenitas | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 7,000,000,000 | | | | | | Wewengkon Citorek | Disbudpar |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | 2,660,936,350 | | | | | | Wewengkon Citorek | PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 216.373.100 | | | | | | Wewengkon Citorek | PUPR |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | 7,000,000,000 | | | | | Wewengkon Citorek | Disbudpar |
| 9 | Aktifitas | Program Peningkatan Daya Tarik | | 7,000,000,000 | | | | | Wewengkon Citorek | Disbudpar |

| No. | Strategi | Program | Pagu Indikatif | | | | | | Lokasi | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | Destinasi Pariwisata | | | | | | | | |
| 10 | Akomodasi | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 7,000,000,000 | | | | | | Wewengkon Citorek | Disbudpar |
| 11 | Ancillary (Pelayanan Pendukung) | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | 300,000,000 | | 300,000,000 | | 300,000,000 | Wewengkon Citorek | Disbudpar |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

## VIII. Pengentasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh secara terpadu

Kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan yang kompleks dan multifaktor dikarenakan mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Sejak RPJPN Tahun 2005-2025, masalah kumuh ini telah menjadi highlight untuk dilakukan penanganan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Tertanganinya masalah kumuh diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pendukungnya guna mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Bahkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, penanganan kawasan kumuh diintegrasikan dengan penanganan kemiskinan ekstrem yang menargetkan 0% kumuh atau kota yang inklusif tanpa permukiman kumuh.

Memasuki era baru dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan juga RPJMN 2025-2029, terdapat transformasi menuju 0% kumuh berkaca dari ketidakmampuan pencapaian dalam kebijakan sebelumnya. Transformasi yang dimaksud ialah dari penanganan (slum upgrading) menjadi pengentasan (slum allevation) yang fokus terhadap penanganan dan pencegahan, mencakup seluruh aspek/sektor seperti fisik, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, penyediaan lahan, pembiayaan, perumahan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan – pengendalian (wasdal). Pengentasan permukiman kumuh menjadi intervensi kebijakan yang diarahkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari skenario penyediaan rumah untuk pemenuhan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Dengan begitu, maka pengentasan permukiman kumuh akan menyasar tidak hanya pada perkotaan namun juga perdesaan dengan strategi yang diusung berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu:

1) Peningkatan kualitas permukiman kumuh pada PSU; dan
2) Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh melalui pendekatan sosial ekonomi.

Kabupaten Lebak telah menetapkan sebaran permukiman kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 648/Kep.284-DPRKPP/2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Adapun luasan kawasan kumuh mencapai 2.539,01 Ha yang tersebar di 2.083 kawasan (RT/RW), 128 desa, 5 kelurahan, 21

kecamatan. Luasan yang sangat besar tersebut tidak akan bisa terentaskan bila mana hanya dilakukan secara parsial sehingga perlu dilakukan secara terpadu. Keterpaduan penanganan ini diarahkan menyasar pada 7 (tujuh) indikator kumuh sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018. Disatu sisi tentunya perlu dilakukan secara paralel dalam memastikan tidak tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru yang banyak berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pembangunan sesuai tata ruang, peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat hingga lembaga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa. Upaya bersama ini merupakan cerminan dari Lebak Rukun dalam bingkai visi Lebak Ruhay yang tentu saja sinergis terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Banten melalui Banten Bagus yang muaranya ialah pencapaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan atas pelaksanaan penanganan permukiman kumuh sebagaimana amanat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Sebagai upaya pengentasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Lebak yang begitu luas dengan mempertimbangkan kemampuan penganggaran, maka akan diimplementasikan secara bertahap dan memperhatikan beberapa hal. Pertama tentunya lokasi prioritas penanganan akan mengacu pada dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 bahwa telah dirumuskan tematik prioritas penanganan sebagai berikut:

1) Prioritas 1 – Penyangga Cagar Budaya
2) Prioritas 2 – Sekitar Hutan Lindung
3) Prioritas 3 – Kawasan Perkotaan
4) Prioritas 4 – Perkebunan
5) Prioritas 5 – Pesisir
6) Prioritas 6 – Hutan Produksi

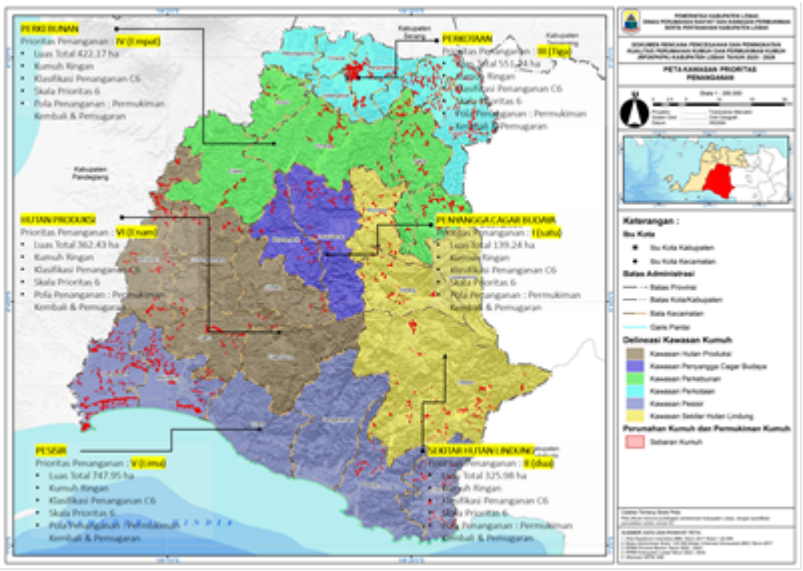

**Gambar 3. 13 Peta Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lebak**

*Sumber: Dokumen RP2KPKP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029*

Adapun rencana implementasi terhadap strategi pengentasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Lebak berdasarkan pembagian kewenangan adalah sebagai berikut:

**1) Penanganan Skala Kawasan melalui Pemerintah Pusat**

Mempertimbangkan arahan RP2KPKPK Kabupaten Lebak Tahun 2025—2029 bahwa prioritas pertama berkaitan dengan penyangga cagar budaya. Tematik ini difokuskan pada wilayah penyangga Saba Budaya Baduy yang terdiri atas beberapa kecamatan sebagai *buffer zone* wilayah inti. Fokus utama pada tematik ini berada di Desa Bojongmenteng yang menjadi pintu utama sebelum memasuki Saba Budaya Baduy dengan kondisi kekumuhan berkarakter perdesaan. Prioritas ini rencananya akan didorong penanganannya ke Pemerintah Pusat. Hal ini mengingat secara luasan kumuh berada di atas 15 Ha dan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 bahwa Saba Budaya Baduy menjadi salah satu *highlight* utama sebagai kawasan afirmasi di Provinsi Banten. Dengan adanya penanganan skala kawasan secara terpadu pada tematik ini diharapkan dapat terentaskan dari kriteria kumuh dan tersentuh hingga ranah sosial ekonomi sebagai sebuah destinasi wisata bertaraf Nasional bahkan Internasional, sehingga tercipta

permukiman yang nyaman dalam mendukung sapta pesona di sekitar Saba Budaya Baduy.

**Gambar 3. 14 Peta Kawasan Kumuh Penyangga Cagar Budaya**

*Sumber : Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029*

**2) Penanganan Skala Kawasan oleh Daerah**

Penanganan oleh daerah tentunya akan dibagi berdasarkan kewenangan provinsi dan kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada RP2KPKPK Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dan disandingkan berdasarkan luasan, maka beberapa lokasi diarahkan untuk dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini telah dikoordinasikan sebagai upaya penyelarasan dalam pencantuman target penanganan di RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Beberapa lokasi dimaksud mayoritas merupakan prioritas dalam RP2KPKPK seperti sekitar hutan lindung sebagai prioritas kedua, kawasan perkotaan sebagai percepatan kota tanpa kumuh, dan pesisir yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Provinsi Banten berupa Pantai Selatan Terpadu (Pansela).

Untuk lokasi yang akan ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, telah dirumuskan rencana penanganan melalui implementasi secara bertahap terhadap 38 desa yang menjadi kewenangan kabupaten. Beberapa target penanganan terhadap indikator kumuh diantaranya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui bantuan stimulan rumah swadaya terhadap 200 - 300 unit per tahun, perbaikan jalan lingkungan sepanjang 2-2,5 km per tahun, pembangunan sistem

penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan 100 SR tiap lokasi per tahun, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) setempat skala individual 50 unit tiap lokasi per tahun, dan penyediaan tempat penampungan sementara (TPS) sampah di kawasan permukiman 1-2 unit per tahun. Realisasi terhadap penargetan tersebut tentu saja akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan. Adapun upaya pengentasan kawasan permukiman kumuh terpadu akan dikawal pelaksanaannya oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Lebak dengan *output* berita acara pengurangan kumuh pada tiap akhir tahun. Berikut ini rencana aksi terhadap pencapaian strategi pengentasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh secara terpadu:

**Tabel 3. 14 Rencana Aksi Pencapaian Strategi Pengentasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Secara Terpadu**

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh pada Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum** | | | | | | | | |
| Penyediaan rumah layak huni | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 2.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | Dinas PRKPP |
| Peningkatan kualitas permukaan jaringan jalan lingkungan | | | | | | | | |
| Penyediaan sistem drainase lingkungan terintegrasi | | | | | | | | |
| Penyediaan akses air minum | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.068.020.000 | 1.736.711.000 | 1.736.711.000 | 1.736.711.000 | 1.736.711.000 | 1.736.711.000 | Dinas PUPR |
| Penyediaan akses air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 980.170.000 | 980.170.000 | 980.170.000 | 980.170.000 | 980.170.000 | 980.170.000 | Dinas PUPR |
| Penyediaan sarana penanganan sampah | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | - | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | Dinas LH |
| Penyediaan proteksi kebakaran | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, | - | 250.000.000 | - | - | - | - | Satpol PP dan Damkar |

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | | |
| **Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Kumuh Melalui Pendekatan Sosial Ekonomi** | | | | | | | | |
| Pemberian layanan tata ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 90.152.500 | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 | - | Dinas PUPR |
| Pengawasan dan pengendalian perizinan bangunan dan lingkungan | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 412.400.500 | 308.380.500 | 308.380.500 | 308.380.500 | 308.380.500 | 308.380.500 | Dinas PUPR |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 42.779.800 | 42.779.800 | 42.779.800 | 42.779.800 | 42.779.800 | 42.779.800 | Dinas LH |
| Penyadaran masyarakat pola hidup bersih dan sehat | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 97.073.250 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 232.474.900 | 232.474.900 | 232.474.900 | 232.474.900 | 232.474.900 | 232.474.900 | Dinas LH |
| Pemberdayaan sosial ekonomi dan | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, | 200.888.500 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | Dinas PMD |

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| kelembagaan masyarakat | LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 195.966.100 | 195.966.100 | 195.966.100 | 195.966.100 | 195.966.100 | 195.966.100 | Dinas Koperasi dan UMKM |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 475.133.600 | 449.133.600 | 449.133.600 | 449.133.600 | 449.133.600 | 449.133.600 | Dinas Tenaga Kerja |

*Sumber : Data Diolah Bapperida Tahun 2025*

## IX. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik telah menjadi fondasi utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kabupaten Lebak, meski telah menunjukkan kemajuan melalui pencapaian opini WTP dan skor keterbukaan informasi yang memadai, masih menghadapi sejumlah tantangan penting terkait adopsi teknologi, integritas birokrasi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan dan langkah strategis yang terukur untuk mempercepat transformasi digital di seluruh lini pemerintahan.

**Analisis situasi dan tantangan**

1. Indeks SPBE dan Reformasi Birokrasi

   Skor SPBE Kabupaten Lebak pada 2023 tercatat 2,8 dari skala 5, sementara Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 65,00. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur TI, pemanfaatan aplikasi *e government*, dan penguatan kapasitas aparatur agar prinsip *good governance* benar - benar terinternalisasi. (strategi masuk disini + programnya);

2. Pengelolaan Keuangan dan APBD Digital

   Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah berhasil dipertahankan selama lima tahun berturut turut, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 92% dan realisasi belanja daerah 89% menunjukkan ruang perbaikan pada sistem perencanaan dan penganggaran elektronik. Dashboard APBD real time dan e procurement akan menjadi kunci efisiensi serta transparansi penggunaan anggaran.

3. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi

   Dengan indeks keterbukaan informasi publik 75,00 dan 150 aduan yang masuk melalui kanal digital (tingkat penyelesaian 85%), terlihat bahwa akses masyarakat terhadap data dan mekanisme pengaduan perlu diperluas melalui portal open data, chatbot, dan aplikasi mobile.

4. Reformasi Birokrasi dan Pencegahan KKN

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi sudah melibatkan 10 OPD, namun untuk menjaga kepercayaan publik dan menekan praktik KKN, perluasan zonasi, e whistleblowing, dan portal e gratifikasi menjadi langkah wajib.

5. Sinkronisasi Kebijakan

Meski 95% program Kabupaten Lebak telah selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Banten, harmonisasi regulasi masih memerlukan penyempurnaan, khususnya pada Perda yang berpotensi tumpang tindih. Pemanfaatan API perundang undangan dan forum koordinasi reguler akan memperkuat keselarasan kebijakan.

Berdasarkan tantangan tersebut, Kabupaten Lebak akan menjalankan strategi terintegrasi berikut:

1. Penguatan SPBE dan Infrastruktur TI
    - Menyusun dan mengimplementasikan arsitektur SPBE bersama pihak ketiga;
    - Modernisasi data center dan jaringan backbone daerah;
    - Standarisasi aplikasi *e-Office*, SIKEPEL, SRIKANDI, SIPALANG, dan modul-modul *e-government* lainnya.
2. Optimalisasi Pengawasan dan Akuntabilitas
    - Transformasi proses audit Inspektorat melalui e-audit dan e-monitoring keuangan;
    - Penerapan sistem *e-whistleblowing* dan portal e-gratifikasi yang terintegrasi
3. Peningkatan Keterbukaan dan Partisipasi Publik
    - Peluncuran portal open data dengan dashboard kinerja OPD;
    - Pengembangan mobile app pengaduan satu pintu dan chatbot layanan public
4. Pengembangan Kapasitas ASN
    - Program pelatihan berkelanjutan literasi digital, manajemen data, dan keamanan siber;
    - Sertifikasi kompetensi e-Government bagi pejabat fungsional dan teknis.
5. Harmonisasi Regulasi dan Kolaborasi
    - Pembentukan tim harmonisasi digitalisasi yang memanfaatkan API perundang - undangan;
    - Forum koordinasi SPBE dengan KemenPAN-RB, Kominfo, BSSN, dan pemerintah provinsi.

Melalui “Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”, Kabupaten Lebak menegaskan komitmen untuk mentransformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi secara menyeluruh. Implementasi strategi dan rencana aksi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat serta menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Lebak. Berikut ini tabel rencana aksi digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 :

**Tabel 3. 16 Rencana Aksi Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **Smart Government (Tata Kelola Pemerintahan Cerdas)** | | | | | | | | | |
| | *Integrasi Sistem Informasi Internal (E-Office dan Kearsipan Digital)* | | | | | | | | |
| | · Implementasi dan perluasan penggunaan aplikasi E-Office di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | | | | | | | | |
| | Penyusunan standar interoperabilitas dan integrasi data antar sistem informasi internal pemerintah daerah | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Diskominfo SP |
| | Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan intensif penggunaan E-Office dan sistem kearsipan digital kepada seluruh OPD | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Diskominfo SP |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk digitalisasi arsip dan dokumen pemerintahan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 83,571,200 | 52,470,000 | 270,000,000 | 290,000,000 | 356,000,000 | 390,000,000 | DISPUSAR |
| | · Bimtek/Peningkatan kapasitas integrasi sistem perencanaan (e-Planning), penganggaran (e-Budgeting), dan keuangan daerah (SIPD) agar data lebih akurat dan *real-time* | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | BAPPERIDA |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 107,276,700 | 107,276,700 | 118,004,400 | 131,250,900 | 142,785,200 | 157,063,700 | BKAD |
| | · Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (simonev) kinerja | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | SETDA |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 40,524,900 | 40,524,900 | 40,524,900 | 40,524,900 | 40,524,900 | 40,524,900 | BAPPERIDA |
| | *Penguatan Infrastruktur Jaringan dan Keamanan Siber* | | | | | | | | |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Perluasan jaringan internet di seluruh OPD hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 1,800,000,000 | 2,040,000,000 | 2,160,000,000 | 2,160,000,000 | 2,160,000,000 | 2,160,000,000 | Diskominfo SP |
| | · Pengembangan Portal Satu Data Indonesia terintegrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 50,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | Diskominfo SP |
| | · Implementasi sistem keamanan siber (firewall, antivirus, SIEM) dan regulasi perlindungan data pribadi sesuai standar nasional | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 58,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | Diskominfo SP |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) | | | | | | | | |
| | · Program pelatihan dan sertifikasi literasi digital dasar dan lanjutan bagi seluruh ASN, termasuk penggunaan aplikasi E-Office, pengelolaan data, dan keamanan siber | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Diskominfo SP |
| | *Implementasi Inovasi PRIMA DESA (ADM Desa)* | | | | | | | | |
| | . Penempatan & Pengelolaan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di 340 Desa | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Disdukcapil |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | . Integrasi Data ADM dengan Sistem SIAK Terpusat | | | | | | | | |
| | . Jaminan Konektivitas & Keamanan Data ADM | | | | | | | | |
| **Smart Publik Services (Pelayanan Publik Cerdas)** | | | | | | | | | |
| | *Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik (OSS / DPMPTSP Digital)* | | | | | | | | |
| | · MPP Online Optimalisasi penggunaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Nasional dan pengembangan modul perizinan daerah yang belum terakomodir dalam OSS | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | DPMPTSP |
| | · Implementasi tanda tangan elektronik (TTE) pada dokumen perizinan untuk mempercepat proses dan validasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Diskominfo SP |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Pengembangan fitur status permohonan perizinan yang dapat dilacak secara *online* oleh masyarakat | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | DPMPTSP |
| | *Layanan Kesehatan Digital* | | | | | | | | |
| | · Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) terintegrasi dari Puskesmas hingga RSUD, mencakup rekam medis elektronik, antrean *online*, dan manajemen obat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 140,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 148,000,000 | 148,000,000 | RSUD |
| | *Epus* | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 572,760,000 | 572,760,000 | 572,760,000 | 572,760,000 | 572,760,000 | 572,760,000 | Puskesmas |
| | *Implementasi Pengembangan ETANOL: Pendaftaran Online Pasien* | | | | | | | | |
| | · Integrasi ETANOL dengan Sistem Rujukan & Rekam Medis | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | RSUD Dr. Adjidarmo |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | RSUD Dr. Adjidarmo |
| | · Pengembangan Dashboard Monitoring & Analitik Layanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | RSUD Dr. Adjidarmo |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | RSUD Dr. Adjidarmo |
| | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) / (PSC 119) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 451,617,908 | 460,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **Smart City/Regency (Kabupaten Cerdas)** | | | | | | | | | |
| | *Pengembangan Portal Data Terbuka (Open Data)* | | | | | | | | |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Buat portal data terbuka yang menyediakan data-data pemerintah Kabupaten Lebak dalam format yang mudah diakses dan dapat digunakan oleh publik (developer, akademisi, masyarakat) untuk inovasi | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 127,000,000 | 127,000,000 | 127,000,000 | 127,000,000 | 127,000,000 | 127,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | BAPPERIDA |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 32 OPD Pengelola data |
| | · Publikasikan data sektoral (ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dll) secara berkala | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 20,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | BAPPERIDA |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Disbudpar |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 32 OPD Pengelola data |
| | *Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Digital* | | | | | | | | |
| | · Implementasi sensor dan sistem informasi geografis (SIG) untuk memantau potensi bencana alam (banjir, longsor) di wilayah rawan Lebak | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | BPBD |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Dinas PUPR |
| | · Kembangkan aplikasi atau sistem SMS *gateway* untuk penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat secara cepat | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | BPBD |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Dinas PUPR |
| | *Smart Tourism (Pariwisata Digital)* | | | | | | | | |
| | · Pengembangan aplikasi *mobile* atau portal web pariwisata Lebak yang komprehensif (informasi destinasi, booking tiket/penginapan, direktori UMKM kuliner/kerajinan, *virtual tour*) | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 70,535,000 | 117,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Disbudpar |
| | · Pemasangan *QR code* informasi di lokasi-lokasi wisata kunci | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Disbudpar |
| | · Pelatihan Kewirausahaan dan Digitalisasi Marketing UMKM | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | Dinkop UKM |
| | Implementasi "REDMA" (Report Of Disaster Management Authority) | | | | | | | | |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | • Pengembangan & integrasi aplikasi REDMA berbasis GIS | PROGRAM PENGGULANGAN BENCANA | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | BPBD |
| | • Konektivitas 112 & layanan kebencanaan lain secara real-time | | | | | | | | |
| | • Kampanye edukasi & simulasi tanggap darurat | | | | | | | | |
| **Smart Citizen (Masyarakat Cerdas)** | | | | | | | | | |
| | *Program Literasi Digital Masyarakat* | | | | | | | | |
| | · Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dasar bagi masyarakat umum, terutama di wilayah perdesaan, dengan fokus pada penggunaan internet secara aman, *e-commerce* dasar, dan akses layanan digital pemerintah | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 100,000,000 | 110,000,000 | 115,000,000 | 120,000,000 | 125,000,000 | 130,000,000 | Diskominfo SP |
| | · Kerjasama dengan komunitas IT lokal, pegiat literasi, dan relawan untuk memperluas jangkauan program | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 100,000,000 | 110,000,000 | 115,000,000 | 120,000,000 | 125,000,000 | 130,000,000 | Diskominfo SP |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 106,956,100 | 81,206,000 | 220,000,000 | 242,000,000 | 266,200,000 | 292,820,000 | SETDA BAGIAN TPKS |
| | *Saluran Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat* | | | | | | | | |
| | · Optimalisasi penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - LAPOR sebagai kanal utama pengaduan masyarakat | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 100,000,000 | 110,000,000 | 115,000,000 | 120,000,000 | 125,000,000 | 130,000,000 | Diskominfo SP |
| | *Implementasi dan Pengembangan inovasi Jumat Serius* | | | | | | | | |
| | • MoU dengan perusahaan lokal/nasional untuk matching fund setiap Jumat Serius | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 106,956,100 | 81,206,000 | 220,000,000 | 242,000,000 | 266,200,000 | 292,820,000 | SETDA BAGIAN TPKS |
| | • Pelibatan UMKM setempat dalam paket bantuan (sembako, suplemen) | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | Dinkop UKM |
| **Smart Economy (Ekonomi Cerdas)** | | | | | | | | | |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *Dukungan Digitalisasi UMKM dan Produk Lokal* | | | | | | | | |
| | · Pelatihan dan pendampingan UMKM Lebak dalam pemanfaatan *platform e-commerce* (lokal/nasional), pemasaran digital, dan pembayaran digital (QRIS) | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | 245,966,100 | Dinkop UKM |
| | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro | PROGRAM PERMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Dinkop UKM |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Dinas Pertanian |
| | · Pengembangan direktori *online* produk unggulan Lebak (pertanian, perikanan, kerajinan, kuliner) yang terhubung dengan *platform e-commerce* | PROGRAM PERMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 29,243,630 | 29,243,630 | 29,243,630 | 29,243,630 | 29,243,630 | 29,243,630 | Dinkop UKM |
| | Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Dinas Pertanian |
| | *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital* | | | | | | | | |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Fasilitasi *coworking space* atau *digital hub* di Rangkasbitung atau pusat ekonomi lainnya untuk mendorong kolaborasi antara *startup* lokal, *freelancer*, dan pelaku ekonomi kreatif | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | Disbudpar |
| | · Program pelatihan keterampilan digital (desain grafis, coding dasar, digital marketing) bagi pemuda Lebak | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | Disbudpar |
| | *Implementasi PASTAN: Pasar Tani Digital* | | | | | | | | |
| | • Pengembangan platform e-commerce khusus produk pertanian lokal (web & mobile) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian |

| STRATEGI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH TERKAIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | • Pengukuran KPI (jumlah petani terlibat, volume transaksi, harga rata-rata) tiap triwulan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian |
| | • Fasilitasi lokasi terpusat (collection point) di tiap kecamatan untuk mengumpulkan hasil panen petani sebelum dikirim | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian |
| | *Produk Hukum Daerah* | | | | | | | | |
| | - Peraturan Daerah (PERDA) tentang SPBE | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 163,679,900 | 159,370,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Bagian Hukum Setda |
| | - Peraturan Daerah (PERDA) tentang Smart City | | | | | | | | |
| | - Peraturan Daerah (PERDA) tentang ETPD (Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah) | | | | | | | | |
| | - Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Transformasi Digital | | | | | | | | |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

## X. Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah;

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung keuangan Kabupaten Lebak, yang menentukan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai program prioritas tanpa tergantung pada transfer pusat. Pada tahun 2024, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Lebak baru mencapai 21,99 %, menandakan masih besarnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Desa. Sementara itu, realisasi PAD 92 % dari target dan efisiensi belanja daerah sebesar 89 % memperlihatkan ruang perbaikan dalam penggalian dan pengelolaan sumber pendapatan lokal.

**Analisis Situasi dan Tantangan**

1. Rendahnya Ketaatan dan Kepatuhan Wajib Pajak

   Mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sebagian besar masih manual menyebabkan kebocoran pendapatan serta margin kesalahan yang tinggi.
2. Keterbatasan Digitalisasi Perpajakan

   Implementasi teknologi untuk pemantauan dan penagihan pajak daerah belum optimal, sehingga potensi pajak sektor riil—seperti reklame, hotel, dan restoran—belum termanfaatkan secara penuh.
3. Peran dan Kinerja BUMD

   Badan Usaha Milik Daerah belum secara maksimal berkontribusi terhadap PAD karena minimnya inovasi usaha, kelemahan tata kelola, dan keterbatasan modal serta sumber daya manusia profesional.
4. Efisiensi dan Akuntabilitas Belanja Daerah

   Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mencapai 76,5 pada 2024, menandakan perlunya peningkatan efektivitas alokasi anggaran—termasuk reinvestasi hasil PAD—agar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

**Strategi dan Rencana Aksi**

1. Digitalisasi dan Modernisasi Perpajakan
   - Menerapkan e-Pajak dan e-Retribusi terintegrasi untuk mempermudah pendaftaran, pelaporan, dan penagihan.
   - Mengembangkan Data Warehouse PAD untuk analitik kepatuhan dan potensi sektoral.

2. Diversifikasi dan Pengembangan Sumber PAD
    - Mengoptimalkan potensi pariwisata, kawasan usaha, serta layanan publik berbayar (parkir, Izin Mendirikan Bangunan) melalui kajian tarif berbasis biaya dan manfaat.
    - Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam pengelolaan retribusi dan penyediaan layanan publik.
3. Penguatan dan Restrukturisasi BUMD
    - Melakukan audit kinerja dan restrukturisasi manajemen BUMD guna meningkatkan efisiensi operasional dan return on investment.
    - Menyuntikkan modal kerja berbasis hasil studi kelayakan untuk ekspansi usaha strategis.
4. Peningkatan Efisiensi Belanja Daerah
    - Memperkuat penggunaan e-Budgeting dan e-Procurement untuk memaksimalkan value for money.
    - Mengalokasikan hasil optimalisasi PAD pada program produktif yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Dengan mengusung tema “Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah”, Kabupaten Lebak berkomitmen memperkuat fondasi fiskal melalui digitalisasi, diversifikasi sumber pendapatan, serta tata kelola BUMD dan belanja daerah yang lebih efisien dan akuntabel. Keberhasilan implementasi strategi ini akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan eksternal. Berikut ini rencana aksi optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 :

**Tabel 3. 17 Rencana Aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **PENUNJANG** | | | | | | | | | |
| **KEBIJAKAN :** | | | | | | | | | |
| ***1. Kebijakan Optimalisasi Pajak Daerah*** | | | | | | | | | |
| | *Penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB* | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Melakukan evaluasi menyeluruh Perda PBB-P2 dan BPHTB yang berlaku. Pastikan tarif, zona nilai tanah (ZNT), dan nilai jual objek pajak (NJOP) sesuai dengan perkembangan ekonomi dan nilai pasar properti di Lebak, terutama di wilayah yang berkembang pesat (misal: Rangkasbitung, Maja, Cibadak, atau area wisata) | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 824,616,000.00 | 832,616,000 | 915,877,600 | 1,007,465,360 | 1,108,211,896 | 1,219,033,086 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 163,679,900 | 159,370,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Bagian Hukum Setda |
| | · Kaji potensi penerapan tarif progresif untuk PBB-P2 pada kepemilikan tanah dan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 824,616,000.00 | 832,616,000 | 915,877,600 | 1,007,465,360 | 1,108,211,896 | 1,219,033,086 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | bangunan yang luas atau lebih dari satu objek, serta BPHTB untuk transaksi jual beli di atas nilai tertentu | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 163,679,900 | 159,370,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Bagian Hukum Setda |
| | · Perjelas ketentuan mengenai sanksi administrasi dan pidana bagi wajib pajak yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 93,288,000.00 | 176,268,000 | 193,894,800 | 213,284,280 | 234,612,708 | 258,073,979 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 163,679,900 | 159,370,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Bagian Hukum Setda |
| ***2. Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah*** | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *Review dan Reformasi Perda Retribusi Daerah* | | | | | | | | |
| | · Melakukan audit dan evaluasi kinerja Perda Retribusi Daerah secara menyeluruh (Retribusi Pelayanan Pasar, IMB/PBG, Pelayanan Kesehatan, Parkir, dll.). Identifikasi retribusi yang sudah tidak relevan, tumpang tindih, atau memiliki potensi kebocoran tinggi. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 10,383,800 | 61,224,000 | 67,346,400 | 74,081,040 | 81,489,144 | 89,638,058 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 163,679,900 | 159,370,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Bagian Hukum Setda |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 2,323,216,700 | 2,323,216,700 | 2,323,216,700 | 2,323,216,700 | 2,323,216,700 | 2,323,216,700 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLLAJ) | 549,537,940 | 549,537,940 | 549,537,940 | 549,537,940 | 549,537,940 | 549,537,940 | Dinas Perhubungan |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 412,400,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | Dinas PUPR |
| ***3. Kebijakan Optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*** | | | | | | | | | |
| | *Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):* | | | | | | | | |
| | · Susun Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola BUMD yang jelas, mencakup aspek | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 52,250,000 | 68,300,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | Bagian Perekonomian Setda |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | transparansi, akuntabilitas, profesionalisme manajemen, dan indikator kinerja kunci (IKU) yang terukur | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 107,276,700 | 107,276,700 | 118,004,400 | 131,250,900 | 142,785,200 | 157,063,700 | BKAD |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 608,264,800 | 432,859,900 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | Inspektorat |
| | · Terapkan kebijakan evaluasi kinerja BUMD secara berkala oleh tim independen atau auditor eksternal, dengan fokus pada profitabilitas dan kontribusi dividen kepada daerah | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 52,250,000 | 68,300,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | Bagian Perekonomian Setda |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 608,264,800 | 432,859,900 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | Inspektorat |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| ***4. Kebijakan Pendukung dan Lintas Sektor*** | | | | | | | | | |
| | *Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Potensi PAD* | | | | | | | | |
| | · Integrasikan potensi PAD ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak. Identifikasi zona-zona pengembangan ekonomi (industri, pariwisata, permukiman) yang memiliki potensi pajak dan retribusi tinggi. | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 412,400,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | Dinas PUPR |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Kebijakan harus mendukung investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memitigasi dampak negatif | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 79,149,000 | 63,801,504 | 63,801,504 | 63,801,504 | 63,801,504 | 63,801,504 | Dinas PUPR |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 412,400,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | 308,380,500 | Dinas PUPR |
| | *Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan PAD* | | | | | | | | |
| | · Perkuat peran Inspektorat dalam melakukan audit kinerja dan keuangan terkait PAD untuk memastikan akuntabilitas | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 553,529,900 | 553,529,900 | 553,529,900 | 553,529,900 | 553,529,900 | 553,529,900 | Inspektorat |
| | *Kebijakan Insentif dan Disinsentif Kepatuhan PAD* | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Terapkan kebijakan disinsentif atau sanksi yang tegas namun proporsional bagi pelanggar atau penunggak PAD, sesuai dengan regulasi yang berlaku | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 93,288,000.00 | 176,268,000 | 193,894,800 | 213,284,280 | 234,612,708 | 258,073,979 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 163,679,900 | 159,370,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Bagian Hukum Setda |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 56,750,000 | 45,780,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | Sat Pol PP Dan Damkar |
| **PELAYANAN :** | | | | | | | | | |
| ***1. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pembayaran PAD*** | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *Pembayaran PAD Terpadu dan Multi-Kanal* | | | | | | | | |
| | · Perluas opsi pembayaran melalui berbagai kanal aplikasi *mobile banking* Bank BJB, Bank Banten, dompet digital (QRIS), *e-commerce*, kantor pos, minimarket, serta loket pembayaran di kecamatan dan desa/kelurahan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 10,383,800 | 61,224,000 | 67,346,400 | 74,081,040 | 81,489,144 | 89,638,058 | BAPENDA |
| | *Layanan Informasi dan Pelaporan PAD yang Mudah Diakses* | | | | | | | | |
| | · Manfaatkan media sosial resmi Pemkab Lebak dan grup komunitas daring untuk menyebarkan informasi terbaru, | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 31,666,000.00 | 31,666,000 | 34,832,600 | 38,315,860 | 42,147,446 | 46,362,191 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *event* sosialisasi, dan menjawab pertanyaan umum secara interaktif | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 54,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 74,000,000 | 79,000,000 | 82,000,000 | Diskominfo SP |
| ***2. Peningkatan Kualitas Layanan Prima*** | | | | | | | | | |
| | *Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Terukur* | | | | | | | | |
| | · Tetapkan dan sosialisasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas untuk setiap jenis layanan PAD (misalnya: waktu layanan, persyaratan, biaya, alur | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 31,666,000 | 31,666,000 | 34,832,600 | 38,315,860 | 42,147,446 | 46,362,191 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | prosedur). Tempelkan SPP di loket pelayanan dan publikasikan di *website* | | | | | | | | |
| | · Latih petugas pelayanan PAD secara berkala tentang etika pelayanan, komunikasi efektif, penyelesaian masalah, dan penanganan keluhan dengan pendekatan yang empatik | | 31,666,000 | 31,666,000 | 34,832,600 | 38,315,860 | 42,147,446 | 46,362,191 | BAPENDA |
| | *Layanan Pengaduan dan Saran yang Responsif* | | | | | | | | |
| | · Sediakan berbagai kanal pengaduan dan saran yang mudah dijangkau, seperti call center khusus PAD, nomor | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 31,666,000 | 31,666,000 | 34,832,600 | 38,315,860 | 42,147,446 | 46,362,191 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | WhatsApp resmi, *e-mail*, dan kotak saran fisik di setiap loket pelayanan. | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Inspektorat |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 54,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 74,000,000 | 79,000,000 | 82,000,000 | Diskominfo SP |
| ***3. Edukasi dan Sosialisasi Berbasis Kebutuhan*** | | | | | | | | | |
| | *Program Edukasi Wajib Pajak/Retribusi yang Targetkan* | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | . Selenggarakan sosialisasi rutin ke berbagai segmen masyarakat: pelaku UMKM, asosiasi pengusaha, komunitas petani/nelayan, kelompok masyarakat adat (misal: Suku Baduy dengan pendekatan kearifan lokal), serta di sekolah-sekolah untuk menanamkan kesadaran sejak dini | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 54,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 74,000,000 | 79,000,000 | 82,000,000 | Diskominfo SP |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 82,715,000 | 256,286,934 | 356,160,000 | 356,160,000 | 356,160,000 | 356,160,000 | Dinas Perikanan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA | 455,983,000 | 466,315,000 | 1,222,045,000 | 1,067,545,000 | 862,045,000 | 567,545,000 | Dinas Perikanan |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *Transparansi Penggunaan PAD Melalui Publikasi Proyek Pembangunan* | | | | | | | | |
| | . Mempublikasikan secara transparan realisasi PAD dan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Lebak yang didanai dari PAD. Gunakan visualisasi peta digital atau infografis yang menunjukkan lokasi dan jenis proyek (misal: pembangunan jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, revitalisasi pasar) | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 31,666,000 | 31,666,000 | 34,832,600 | 38,315,860 | 42,147,446 | 46,362,191 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 54,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 | 74,000,000 | 79,000,000 | 82,000,000 | Diskominfo SP |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| ***4. Optimalisasi Pelayanan Perizinan Terkait PAD*** | | | | | | | | | |
| | *Penyederhanaan Prosedur Perizinan* | | | | | | | | |
| | · Menerapkan layanan *online* (e-Perizinan) untuk pengajuan dan pemrosesan izin guna mengurangi tatap muka dan birokrasi. | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPMPTSP |
| | *Layanan Konsultasi Pajak dan Retribusi* | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Menyediakan layanan konsultasi gratis bagi masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pajak dan retribusi mereka, baik secara tatap muka (di kantor BAPENDA/DPMPTSP) maupun secara daring (melalui *video call* atau *chatbot*). | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 31,666,000 | 31,666,000 | 34,832,600 | 38,315,860 | 42,147,446 | 46,362,191 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPMPTSP |
| **KERJASAMA** | | | | | | | | | |
| ***1. Kerjasama dengan Instansi Vertikal dan*** | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| ***Antar-Daerah*** | | | | | | | | | |
| | *Sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)* | | | | | | | | |
| | · Melakukan koordinasi rutin dengan DJP (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rangkasbitung) untuk pertukaran data wajib pajak orang pribadi dan badan usaha di Lebak. Data ini bisa digunakan untuk memverifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 824,616,000.00 | 824,616,000.00 | 915,877,600 | 1,007,465,360 | 1,108,211,896 | 1,219,033,086 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | |
| | · Kerjasama dengan BPN (Kantor Pertanahan Lebak) untuk memutakhirkan data kepemilikan dan perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang krusial untuk validasi objek PBB-P2 dan BPHTB | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 824,616,000.00 | 824,616,000.00 | 915,877,600 | 1,007,465,360 | 1,108,211,896 | 1,219,033,086 | |
| | · Meningkatkan kerjasama dalam penyelesaian tunggakan PBB-P2 yang melibatkan objek pajak besar | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 824,616,000.00 | 824,616,000.00 | 915,877,600 | 1,007,465,360 | 1,108,211,896 | 1,219,033,086 | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | atau lintas wilayah | | | | | | | | |
| | *Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten* | | | | | | | | |
| | · Menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten terkait pajak yang dipungut provinsi namun memiliki potensi data bagi Lebak (misal: Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB) . Data ini bisa membantu identifikasi potensi | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 93,288,000.00 | 176,268,000 | 193,894,800 | 213,284,280 | 234,612,708 | 258,073,979 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | pergerakan ekonomi. | | | | | | | | |
| | *Kerjasama dengan Daerah Tetangga (Pandeglang, Serang, Bogor, Sukabumi):* | | | | | | | | |
| | · Mengidentifikasi potensi pajak/retribusi yang bersifat lintas batas daerah, seperti pariwisata (contoh: pengembangan *paket wisata* Lebak-Pandeglang), | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 824,616,000.00 | 824,616,000.00 | 915,877,600 | 1,007,465,360 | 1,108,211,896 | 1,219,033,086 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | perdagangan, atau transportasi | | | | | | | | |
| | · Menyusun kesepakatan kerjasama (MoU) untuk pengelolaan bersama objek-objek strategis atau penetapan tarif retribusi yang seragam di area perbatasan untuk menghindari *race to the bottom* | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 10,383,800 | 61,224,000 | 67,346,400 | 74,081,040 | 81,489,144 | 89,638,058 | BAPENDA |
| ***2. Kerjasama dengan Sektor Swasta dan Pelaku Usaha*** | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *Kemitraan Strategis dengan Asosiasi Pengusaha dan Dunia Usaha* | | | | | | | | |
| | · Mengadakan forum dialog rutin (*business dialogue*) antara Pemkab Lebak (BAPENDA, DPMPTSP) dengan asosiasi pengusaha (KADIN, APINDO, PHRI - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Asosiasi Pengusaha Tambang, Asosiasi Pedagang Pasar) di Lebak. Forum ini untuk mendengarkan masukan, mensosialisasikan regulasi baru, dan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | mengidentifikasi potensi PAD dari sektor usaha | | | | | | | | |
| | · Menawarkan program kemitraan untuk pengembangan potensi ekonomi daerah yang berujung pada peningkatan PAD | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| | *Kolaborasi dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank* | | | | | | | | |
| | · Perkuat kerjasama dengan Bank BJB dan Bank Banten sebagai Bank Pembangunan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 10,383,800 | 61,224,000 | 67,346,400 | 74,081,040 | 81,489,144 | 89,638,058 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Daerah, termasuk pengembangan fitur pembayaran PAD digital yang lebih inovatif (QRIS, *virtual account*, *auto debit*). | | | | | | | | |
| | · Jalin kemitraan dengan lembaga keuangan non-bank (misal: penyedia *platform e-wallet*, *fintech*) untuk memperluas kanal pembayaran PAD dan memudahkan transaksi digital | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 10,383,800 | 61,224,000 | 67,346,400 | 74,081,040 | 81,489,144 | 89,638,058 | BAPENDA |
| ***3. Kerjasama dengan Akademisi dan Peneliti*** | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Kajian Potensi PAD Berbasis Riset Akademis | | | | | | | | |
| | · Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi (misal: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas yang relevan di Jakarta/Bandung) untuk melakukan riset mendalam tentang potensi PAD Kabupaten Lebak yang belum tergali, termasuk kajian sektoral (pariwisata, pertambangan, pertanian) dan *benchmarking* dengan daerah lain | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 994,999,600 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | BAPPERIDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *Pengembangan Model Prediksi dan Optimalisasi PAD* | | | | | | | | |
| | · Kolaborasi dengan pakar statistika atau data scientist dari perguruan tinggi untuk mengembangkan model prediksi penerimaan PAD yang lebih akurat, mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi makro dan mikro Lebak | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 150,000,000 | 123,420,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | Diskominfo SP |
| ***4. Kerjasama dengan Masyarakat dan Komunitas*** | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat* | | | | | | | | |
| | · Libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan terutama tokoh adat Suku Baduy dalam sosialisasi pentingnya PAD dan bagaimana kontribusi mereka dapat mendukung pembangunan daerah. Sesuaikan pendekatan komunikasi dengan kearifan lokal | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| | · Jalin komunikasi yang erat dengan perangkat desa/kelurahan sebagai ujung tombak pendataan dan penagihan PBB-P2 dan retribusi | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 93,288,000.00 | 176,268,000 | 193,894,800 | 213,284,280 | 234,612,708 | 258,073,979 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | tingkat desa/kelurahan | | | | | | | | |
| | *Program "Sahabat PAD" atau Relawan Pajak/Retribusi* | | | | | | | | |
| | · Bentuk program sukarela yang melibatkan masyarakat atau mahasiswa untuk membantu sosialisasi, pendataan sederhana, atau pendampingan pengisian SPT PBB-P2 (khususnya untuk warga yang kurang melek teknologi). | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| **INOVASI :** | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| ***1. Inovasi dalam Penggalian Potensi PAD Baru*** | | | | | | | | | |
| | *Pengembangan "Lebak Digital Retribution dan Tax Marketplace"* | | | | | | | | |
| | · Buat platform digital terpadu (mirip *e-commerce* khusus) yang memfasilitasi pembayaran retribusi daerah secara online untuk berbagai layanan, termasuk Retribusi Pasar Digital, Retribusi Tempat Wisata Online Booking dan Retribusi Layanan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 10,383,800 | 61,224,000 | 67,346,400 | 74,081,040 | 81,489,144 | 89,638,058 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Kesehatan Prioritas | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Diskominfo SP |
| | · Integrasikan platform digital terpadu dengan sistem pembayaran digital (QRIS, *e-wallet*, transfer bank) dan kembangkan fitur notifikasi otomatis untuk jatuh tempo pembayaran | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 10,383,800 | 61,224,000 | 67,346,400 | 74,081,040 | 81,489,144 | 89,638,058 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Diskominfo SP |
| | *Pajak/Retribusi Berbasis Lingkungan* | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *(Green Tax/Retribution)* | | | | | | | | |
| | . Pertimbangkan Retribusi Pengelolaan Sampah berbasis volume atau frekuensi pengambilan bagi rumah tangga dan usaha besar, didukung oleh sistem pemilahan sampah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 10,383,800 | 61,224,000 | 67,346,400 | 74,081,040 | 81,489,144 | 89,638,058 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 3,855,218,300 | 3,855,218,300 | 3,855,218,300 | 3,855,218,300 | 3,855,218,300 | 3,855,218,300 | DINAS LH |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 498,374,100 | 544,074,800 | 612,827,500 | 651,941,100 | 664,411,100 | 672,531,100 | DINAS LH (Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Laboratorium Lingkungan)) |
| | *Optimalisasi Aset Daerah melalui Skema* | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | *Crowdfunding/Kemitraan Inovatif* | | | | | | | | |
| | · Identifikasi aset daerah yang berpotensi dikembangkan (misal: lahan kosong strategis, bangunan tidak terpakai, potensi agrowisata) dan tawarkan skema investasi publik (*crowdfunding*) dengan imbal hasil atau skema kemitraan *boot-camp* berbasis aset | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENGELOLAA BARANG MILIK DAERAH | 107,276,700 | 107,276,700 | 118,004,400 | 131,250,900 | 142,785,200 | 157,063,700 | BKAD |
| ***2. Inovasi dalam Layanan dan Keterlib*** | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| ***atan Masyarakat*** | | | | | | | | | |
| | *Pajak/Retribusi dengan Komunitas* | | | | | | | | |
| | · Melibatkan masyarakat dalam program "Smart City" atau "Smart Kampung" yang dapat berujung pada potensi retribusi dari layanan digital berbasis komunitas | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 10,383,800 | 61,224,000 | 67,346,400 | 74,081,040 | 81,489,144 | 89,638,058 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Diskominfo SP |
| | *Lebak PAD Dashboard* | | | | | | | | |
| | · Kembangkan *dashboard* online yang interaktif dan mudah dipahami, menampilkan data realisasi PAD | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 31,666,000 | 31,666,000 | 34,832,600 | 38,315,860 | 42,147,446 | 46,362,191 | BAPENDA |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | secara *real-time*, sumber-sumber PAD, dan alokasi PAD untuk program pembangunan | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Diskominfo SP |
| | · Sertakan fitur simulasi sederhana bagi masyarakat untuk menghitung potensi pajak/retribusi yang harus dibayar | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Diskominfo SP |
| ***3. Inovasi Internal dan Penguatan*** | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| ***Ekosistem*** | | | | | | | | | |
| | *Program Inkubasi Inovasi PAD bagi ASN* | | | | | | | | |
| | · Mengadakan program kompetisi atau inkubasi ide inovasi di kalangan ASN Kabupaten Lebak untuk menghasilkan gagasan baru dalam peningkatan PAD. Berikan penghargaan dan dukungan implementasi bagi ide terpilih | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 994,999,600 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | BAPPERIDA |
| | *Kerja Sama Riset dengan Akademisi* | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | · Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi lokal atau nasional untuk melakukan riset dan kajian mendalam terkait potensi PAD Lebak, model-model pajak/retribusi inovatif, dan analisis dampak kebijakan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 183,024,000.00 | 145,674,000 | 160,241,400 | 176,265,540 | 193,892,094 | 213,281,303 | BAPENDA |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | BAPPERIDA |
| **4. Inovasi Peningkatan PAD pada sektor peternakan** | | | | | | | | | |
| | *Penjualan Ternak hasil usaha daerah* | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI | RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Penjulan Ternak Kerbau barang persediaan hasil budidaya pada UPTD Perbibitan dan Ruminansia dalam rangka peningkatan kwalitas indukan dan kemurnian Sumber Daya Genetik (SDG) kerbau lumpur di masyarakat | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 408,500,634 | 73,500,634 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | DISNAKESWAN |
| | *Pengujuan sampel laboratorium kesehatan hewan* | | | | | | | | |
| | kegiatan pengujuan sampel kotoran dan darah ternak dalam rangka pelaksanaan lalulintas hewan ternak antar daerah | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 20,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | DISNAKESWAN |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

## XI. Pengembangan Kawasan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Penggerak Ekonomi Kawasan Sekitarnya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan menjadi momentum daerah dalam melakukan pengembangan terhadap perkotaan. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang tinggal di perkotaan semakin meningkat, permasalahan di perkotaan juga semakin kompleks yang tentu menjadi tantangan dalam mengelola perkotaan. Oleh karena itu perkotaan mesti dikelola secara tepat guna mewujudkan perkotaan yang memiliki fasilitas layanan yang lengkap dan terstandarisasi. Bahkan regulasi tersebut hadir tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pengelolaan perkotaan antara pusat dan daerah, antar sektor, maupun antar pemangku kepentingan saja, namun juga diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber daya perkotaan. Dengan begitu, maka diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib memiliki Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan (RP2P) yang akan mengonsolidasikan semua rencana layanan Perkotaan pada kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan Badan Hukum. Adapun R2P merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah.

Peluang dan tantangan pembangunan sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029 salah satunya mengarahkan untuk dilakukan pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah, sehingga dibutuhkan sektor-sektor produktif sebagai sumber-sumber pertumbuhan inovatif. Secara konkret bahwa pengembangan perkotaan didorong lebih terstruktur, terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi kawasan sekitarnya, termasuk dengan perdesaan. Perwujudan perkotaan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan sistem perkotaan Nasional dengan didukung oleh tata kelola dan kelembagaan yang transparan dan akuntabel, serta pengarusutamaan pendekatan perkotaan cerdas. Arah kebijakan pengembangan perkotaan tersebut turut menjadi bagian penting dalam upaya transformasi ekonomi dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Adapun strategi dalam pengembangan perkotaan yang berkelanjutan mencakup 4

(empat) hal berkaitan dengan aspek tata kelola, infrastruktur, lingkungan, dan ekonomi yaitu:

1) Pengembangan rencana spasial dan data fungsional perkotaan;
2) Penyediaan serta peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar;
3) Peningkatan kualitas lingkungan; dan
4) Penguatan ekonomi perkotaan.

Pengembangan perkotaan di Kabupaten Lebak diarahkan pada beberapa kawasan perkotaan yang termaktub dalam RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043. Berikut beberapa perkotaan yang potensial dan diarahkan untuk dilakukan pengembangan yaitu:

1. Kawasan Perkotaan Rangkasbitung

Rangkasbitung yang berstatus sebagai Ibukota Kabupaten Lebak telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043. Hadirnya *exit toll* Rangkasbitung semakin memperkuat posisinya sebagai wajah kota Kabupaten Lebak yang cepat tumbuh dan strategis, ditambah keberadaan Stasiun *Ultimate* Rangkasbitung menjadi hub transportasi publik KRL di Provinsi Banten. Dengan begitu pengembangan perkotaan Rangkasbitung perlu dilakukan utamanya memastikan jalan dalam kondisi mantap, sistem drainase perkotaan dalam kondisi baik, dan kelengkapan sarana prasarana umum lainnya yang tersedia dalam mewadahi aktivitas masyarakat termasuk ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di dalamnya.

2. Kawasan Perkotaan Maja

Maja telah menjadi rencana pemerintah pusat sejak 1990-an sebagai kota satelit penyangga Ibukota Jakarta. Hal ini sempat terhenti karena terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang kemudian mulai dilanjutkan kembali pada 2006 dengan konsep Kota Kekerabatan Maja. Rencana pengembangan perkotaan Maja terus berkembang hingga akhirnya masuk dalam 2 (dua) periode RPJMN Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024 untuk menjadi Kota Baru di Pulau Jawa yang berperan untuk merespon suburbanisasi dengan Megapolitan Jabodetabekpunjur. Dan pada RPJMN Tahun 2025-2029 bahwa perkotaan Maja dipersiapkan sebagai salah satu lokasi perwujudan program hasil terbaik

cepat (PHTC) dalam menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z dan MBR. Arah pengembangan perkotaan Maja akan mengusung konsep compact city dengan dukungan akses transportasi terjangkau KRL yang perlu difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana serta menghadirkan engine of growth guna meningkatkan permintaan terhadap hunian dalam mendukung aktivitas pada kota inti dan penyangganya.

3. Kawasan Perkotaan Malingping

Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik pertanian karena tidak terlepas dari keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) cukup besar. Namun pada wilayah inti/pusat kegiatan telah terjadi pergeseran karakteristik wilayah sebagai perkotaan sehingga ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lebak sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pada RPJMN Tahun 2025-2029, perkotaan Malingping dijadikan trigger pada indikasi intervensi kawasan afirmasi percepatan pengentasan kemiskinan wilayah Banten Selatan. Beberapa arahan diantaranya berkaitan dengan pengembangan program studi di luar kampus utama (PSDKU) sesuai keunggulan, pembangunan rumah layak bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen Z, dan milenial, dan peningkatan/pembangunan jalan pada beberapa ruas.

4. Kawasan Perkotaan Bayah

Wilayah yang memiliki rekam jejak sejarah panjang di mana dahulunya merupakan pemberhentian terakhir jalur kereta Saketi-Bayah. Jalur tersebut dibangun karena Bayah terkenal sebagai tempat penambangan batubara, dekat dengan tambang emas pertama Cikotok, dan juga area perkebunan kelapa yang menjadi salah satu penyuplai bahan baku pabrik minyak kelapa terbesar se-Asia di Rangkasbitung kala itu. Saat ini kawasan perkotaan Bayah telah berkembang pesat dan menjadi hub sebelum menuju destinasi wisata prioritas Desa Wisata Sawarna yang telah dikenal sejak 1990-an. Bahkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 turut di-highlight untuk melakukan peningkatan 6A pariwisata di Sawarna yang tentunya juga tidak terlepas dari peran kawasan perkotaan Bayah dalam konstelasi ruangnya.

5. Kawasan Perkotaan Cipanas

Daerah di timur Kabupaten Lebak ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor memiliki komoditas hasil bumi yang cukup melimpah. Hal ini didukung oleh iklim sejuk karena berada di kaki pegunungan Halimun Salak dan keberadaan wisata air panas sehingga acapkali wilayah ini menjadi jalur wisatawan dan area layanan publik masyarakat lokal maupun lintas provinsi dengan statusnya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pada RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043.

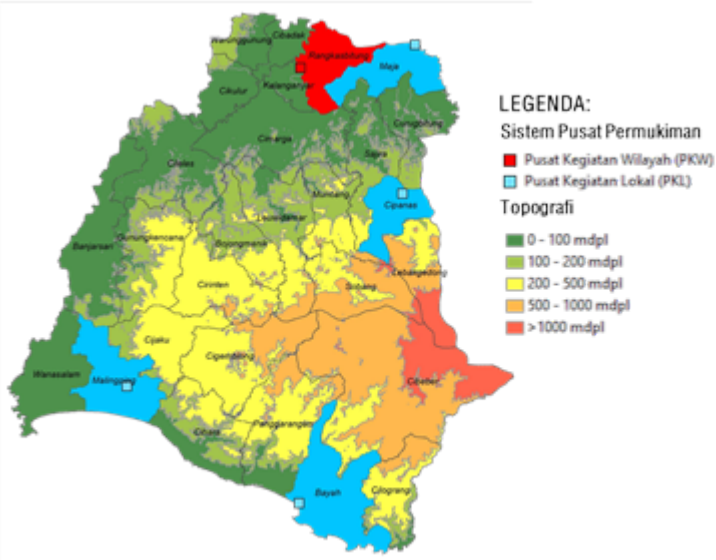


**Gambar 3. 15 Peta Sebaran Kawasan Perkotaan di Kabupaten Lebak**

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043

Pada periode RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, pengembangan kawasan perkotaan akan difokuskan pada 3 (tiga) lokasi yaitu kawasan perkotaan Rangkasbitung, Maja, dan Malingping dengan pendetailan sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan perkotaan Rangkasbitung ditargetkan untuk mengintervensi jalan kabupaten di dalam kota agar mantap jalan, kemudian pemeliharaan terhadap sistem drainase perkotaan untuk mencegah terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi, penataan alun-alun Rangkasbitung maupun *Sport Center* Ona sebagai objek publik untuk beraktivitas utamanya berolahraga dan

bersosialisasi, termasuk beberapa lokasi ekonomi yang strategis seperti Pasar Buah Mandala, Balong Ranca Lentah, penataan Pasar Rangkasbitung, hingga area *Transit Oriented Development* (TOD) Rangkasbitung untuk menjadikannya "*The New Little* Malioboro" yang menawarkan konsep *urban tourism*.

2) Pengembangan kawasan perkotaan Maja sebagai wilayah peri-urban yang menjadi lokus program pembangunan 3 (tiga) juta rumah tentu target utamanya untuk menyediakan hunian skala besar tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Lebak namun juga masyarakat yang bekerja sebagai komuter di Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur, kemudian tentunya penyediaan sarana prasarana dasar diantaranya pembangunan rumah sakit sebagai akses layanan kesehatan utama hingga pembangunan SPAM Regional Karian Timur untuk penyediaan akses air minum layak dan aman, dukungan pembangunan terminal tipe B oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung konsep TOD Maja, peningkatan aksesibilitas jalan menuju tol Serpong-Balaraja, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui ekonomi kreatif maupun agroindustri serta harapannya juga dapat terbentuk badan pengelola khusus Kota Baru Maja dengan fungsi strategisnya untuk memastikan pembangunan kawasan berjalan sesuai rencana, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga tidak menyerahkan begitu saja kepada mekanisme pasar.
3) Pengembangan kawasan perkotaan Malingping yang merupakan amanat RPJMN Tahun 2025-2029 akan didorong sebagai lokasi tersedianya rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi kalangan tertentu, kemudian juga peningkatan ekonomi unggulan wilayah seperti pertanian, perikanan, pariwisata yang ditopang oleh ketersediaan perguruan tinggi kelas jauh, dan peningkatan layanan sarana prasarana seperti terminal Malingping, aksesibilitas jalan, dan sektor publik lainnya. Dengan begitu diharapkan bahwa pengembangan perkotaan yang dilakukan pada RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah yang berkualitas melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan terintegrasi selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan.

**Tabel 3. 18 Rencana Aksi Pencapaian Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Penggerak Ekonomi Kawasan Sekitarnya**

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **Pengembangan Rencana Spasial dan Data Fungsional Perkotaan** | | | | | | | | |
| Penyusunan dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 63.424.700 | 100.000.000 | 300.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | Bapperida |
| Penyediaan RDTR sebagai kebijakan spasial kawasan perkotaan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 90.152.500 | - | 500.000.000 | 600.000.000 | 100.000.000 | - | Dinas PUPR |
| Revisi RTRW Kabupaten | | | | | | | | |
| **Penyediaan serta Peningkatan Layanan Dasar dan Infrastruktur Dasar** | | | | | | | | |
| Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kawasan Padat Penduduk | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 2.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | Dinas PRKPP |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | - | 150.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 150.000.000 | Dinas LH |
| Rehabilitasi fasilitas umum dalam mendukung layanan publik | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 4.008.878.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Dinas PUPR |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 5.823.339.900 | - | 1.500.000.000 | - | - | - | Dinas PUPR |

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 980.170.000 | 980.170.000 | 980.170.000 | 980.170.000 | 980.170.000 | 980.170.000 | Dinas PUPR |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.068.020.000 | 1.736.711.000 | 1.736.711.000 | 1.736.711.000 | 1.736.711.000 | 1.736.711.000 | Dinas PUPR |
| Peningkatan konektivitas antar pusat kegiatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 42.500.000.000 | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | Dinas PUPR |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | Dinas Perhubungan |
| Penyediaan sistem drainase perkotaan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 1.000.000.000 | 350.000.0000 | 350.000.0000 | 350.000.0000 | 350.000.0000 | 350.000.0000 | Dinas PUPR |
| Peningkatan akses dan mutu layanan sarana kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 9.279.139.000 | - | - | - | - | - | Dinas Kesehatan |
| **Peningkatan Kualitas Lingkungan** | | | | | | | | |
| Pembangunan sistem | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 4.910.385.000 | 4.495.684.700 | 4.810.385.000 | 4.810.385.000 | 4.810.385.000 | 4.810.385.000 | Dinas LH |

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Pembangunan sistem pengolahan sampah | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | - | 15.079.306.695 | 18.693.165.305 | 15.050.000.000 | - | - | Dinas PUPR |
| Pengendalian kualitas lingkungan hidup | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 94.210.000 | 94.430.000 | 94.430.000 | 94.430.000 | 94.430.000 | 94.430.000 | Dinas LH |
| | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 23.857.500 | 23.857.500 | 23.857.500 | 23.857.500 | 23.857.500 | 23.857.500 | Dinas LH |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 42.779.800 | 42.779.800 | 42.779.800 | 42.779.800 | 42.779.800 | 42.779.800 | Dinas LH |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 25.045.000 | 25.045.000 | 25.045.000 | 25.045.000 | 25.045.000 | 25.045.000 | Dinas PUPR |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 412.400.500 | 308.380.500 | 308.380.500 | 308.380.500 | 308.380.500 | 308.380.500 | Dinas PUPR |

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Pemanfaatan lubang biopori untuk mengurangi run-off | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 27.969.000 | 27.969.000 | 27.969.000 | 27.969.000 | 27.969.000 | 27.969.000 | Dinas LH |
| Peningkatan ketahanan bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.899.399.240 | 2.899.399.240 | 2.899.399.240 | 2.899.399.240 | 2.899.399.240 | 2.899.399.240 | BPBD |
| **Penguatan Ekonomi Perkotaan** | | | | | | | | |
| Pengembangan jasa dan industri sebagai sektor unggulan | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 602.889.000 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 | Dinas Budpar |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 146.340.900 | 156.341.000 | 156.341.000 | 156.341.000 | 156.341.000 | 156.341.000 | Dinas Koperasi dan UMKM |
| | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 68.980.000 | 18.980.000 | 18.980.000 | 18.980.000 | 18.980.000 | 18.980.000 | Dinas PMPTSP |
| | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 21.160.000 | 21.160.000 | 21.160.000 | 21.160.000 | 21.160.000 | 21.160.000 | Dinas PMPTSP |
| | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 38.830.000 | 41.680.000 | 41.680.000 | 41.680.000 | 41.680.000 | 41.680.000 | Dinas Perindag |
| Penigkatan daya saing sumber daya manusia produktif | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 660.688.600 | 510.553.600 | 510.553.600 | 510.553.600 | 510.553.600 | 510.553.600 | Dinas Tenaga Kerja |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 496.971.000 | 91.080.000 | 91.080.000 | 91.080.000 | 91.080.000 | 91.080.000 | Dinas Perindag |

| Strategi/ Rencana Aksi | Nama Program | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | Nama OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | Dinas Kominfo SP |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

## XII. Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi. Kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Orang miskin lebih rentan terhadap berbagai masalah, seperti:

- Kesehatan

  Orang miskin lebih rentan terhadap penyakit karena mereka memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan.

- Pendidikan

  Orang miskin memiliki akses yang lebih rendah ke pendidikan, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

- Keamanan

  Orang miskin lebih rentan terhadap kekerasan dan kejahatan.

- Kesetaraan

  Kemiskinan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya komprehensif yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap infrastruktur dasar.

Undang - undang Dasar 1945 pasal 27, 28 dan 34 merupakan landasan konstitusional untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Begitu pula dalam RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 dengan target tingkat kemiskinan 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0%(2029) yang sebelumnya tahun 2024 sebesar 8,57% sedangkan untuk kemiskinan ekstremnya targetnya <0,5% (2026) dan tahun 2024 sebesar 0,83%.

Permasalahan-permasalahan kemiskinan juga terdapat di Kabupaten Lebak yang mempunyai tingkat kemiskinan dalam 9 tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dibandingkan dengan kondisi tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Lebak terjadi pada tahun 2021 mencapai 10,29%, jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan provinsi (6,66%) dan nasional (10,14%). Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 8,44% diatas provinsi (5,84%) dan dibawah nasional (8,57%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini.

**Tabel 3. 19 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 – 2024**

| Tingkat Kemiskinan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Lebak | 9,17 | 9,97 | 8,71 | 8,64 | 8,41 | 8,3 | 9,24 | 10,29 | 8,91 | 8,68 | 8,44 |
| Provinsi Banten | 5,4 | 5,9 | 5,42 | 5,45 | 5,24 | 5,09 | 5,92 | 6,66 | 6,16 | 6,17 | 5,84 |
| Nasional | 11,25 | 11,22 | 10,86 | 10,64 | 9,82 | 9,41 | 9,78 | 10,14 | 9,54 | 9,36 | 8,57 |
| Nasional Perkotaan | 8,34 | 8,29 | 7,79 | 7,72 | 7,02 | 6,69 | 7,38 | 7,89 | 7,5 | 7,29 | 7,09 |
| Nasional Pedesaan | 14,17 | 14,21 | 14,11 | 13,93 | 13,2 | 12,85 | 12,82 | 13,1 | 12,29 | 12,22 | 11,79 |

*Sumber : Aplikasi Sepakat dan Badan Pusat Statistik, 2025*

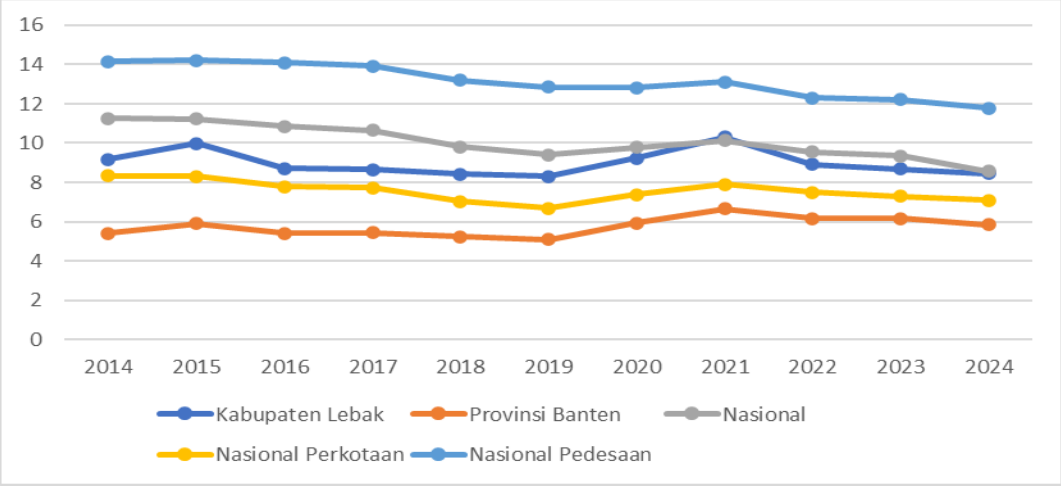


**Grafik 3. 2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014 –2024**

*Sumber : Aplikasi Sepakat dan Badan Pusat Statistik , 2025*

Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengatasi kedalaman kemiskinan, Sejak tahun 2019 tingkat kedalaman kemiskinan tercatat mengalami kenaikan terus menerus sampai pada tahun 2021 yang tertinggi yaitu 1,66. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin cukup tinggi terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Lebak, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 1,02. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

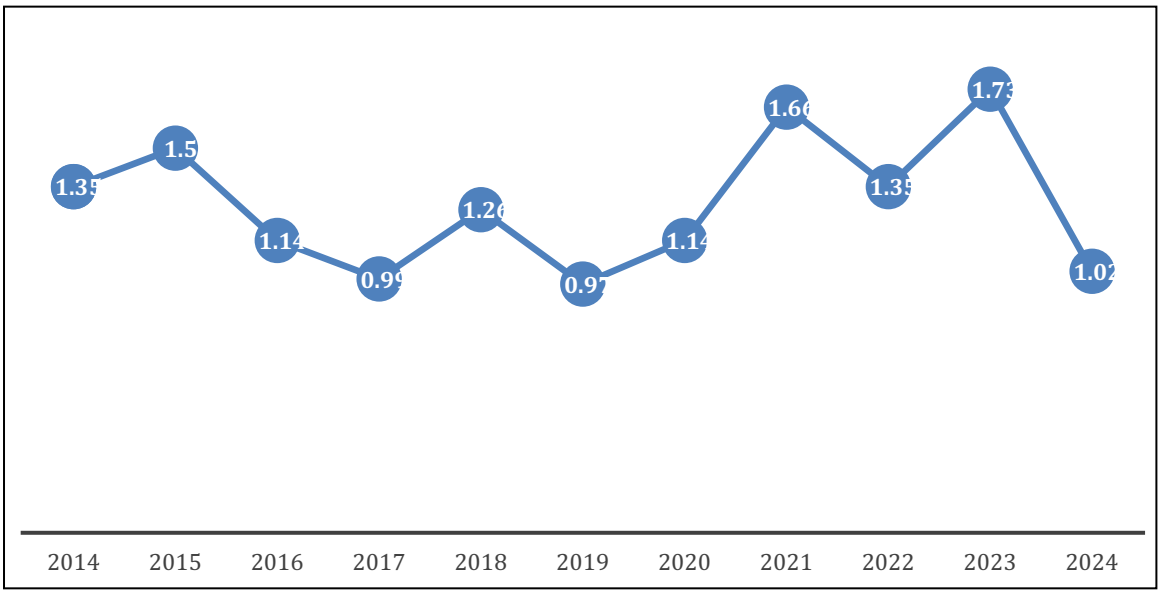


**Grafik 3. 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lebak**

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

Menilik lebih dalam terhadap tingkat kemiskinan, dilihat juga ukuran tingkat keparahan kemiskinan (P2). Tingkat keparahan kemiskinan menggambarkan rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran perkapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan miskinanya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi diterapkan oleh pengkuadrata selisih pengeluaran perkapita. Sama seperti kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami

kenaikan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

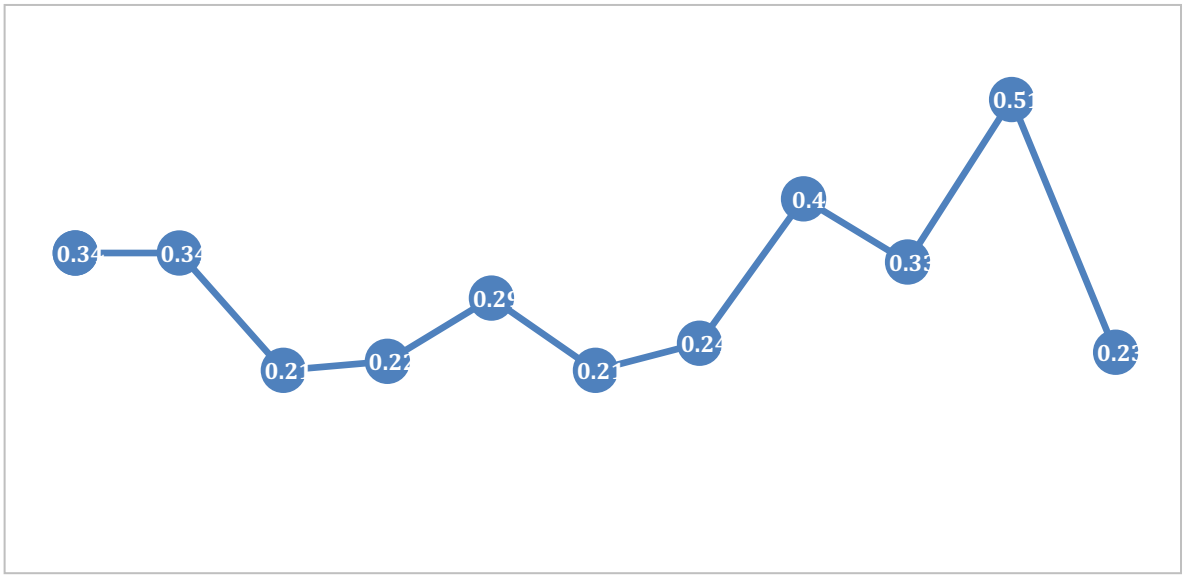


**Grafik 3. 4 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2024**

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak terlepas dari garis kemiskinan terlebih dahulu. Untuk itu garis kemiskinan adalah indikator yang mengukur batas minimum pendapatan atau pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak, termasuk kebutuhan makanan (pangan) dan kebutuhan non-makanan (sandang, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi).

Di Kabupaten Lebak garis kemiskinan meningkat setiap tahun tanpa penurunan. Peningkatan tertinggi terjadi pada periode 2021-2023 dan pada tahun 2024 laju pertumbuhan mulai melambat namun tetap positif. Sehingga meningkat 31,7% dalam 4 tahun (dari 334.509 ke 440.705). Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

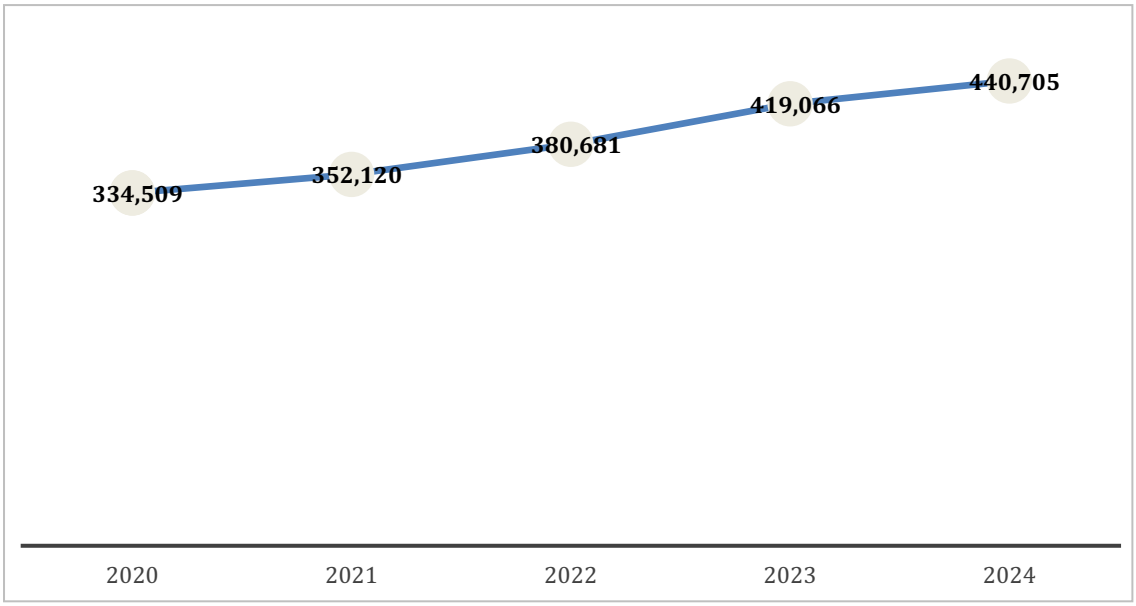


**Grafik 3. 5 Garis Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022–2024

Beberapa penyebab implikasi dari peningkatan garis kemiskinan adalah inflasi, peningkatan standar hidup, biaya hidup diperkotaan yang semakin meningkat dan perubahan pola konsumsi. Hal ini berdampak positif kepada masyarakat yaitu menunjukkan peningkatan standar minimum kehidupan yang layak, mencerminkan kemajuan ekonomi dan sosial serta adaptasi terhadap kondisi ekonomi aktual. Namun dapat mengakibatkan lebih banyak orang yang mungkin dikategorikan miskin, sehingga meningkatnya beban anggaran pada program bantuan sosial pemerintah dan memerlukan penyesuaian program penurunan kemiskinan.

Upaya penurunan tingkat kemiskinan di daerah sangat bergantung pada komitmen, program, kegiatan dan pendanaan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, TKPK provinsi/kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan dibentuknya Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengendalian, sinkronisasi, harmonisasi dan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak diharapkan semakin menurun.

Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Lebak dituangkan dalam 3 (tiga) strategi yaitu :

1. Pengurangan Beban Pengeluaran

Pendekatan dalam program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga atau rumah tangga miskin dengan cara mengurangi jumlah pengeluaran yang harus mereka tanggung. Penanganan pada strategi ini tertuang dalam sasaran strategi yaitu berupa subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, bantuan sosial, bantuan untuk yang terkena bencana, bantuan stunting, cadangan pangan, bantuan dokumen kependudukan dan subsidi bahan makanan kebutuhan pokok. Beberapa perangkat daerah yang terkaitnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan berikut di dalamnya puskesmas, Dinas Sosial, Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan total alokasi anggaran keseluruhan selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar Rp. 1.828.498.831.583,-

2. Peningkatan Pendapatan

Upaya yang bertujuan untuk menambah jumlah penghasilan yang diterima oleh individu atau rumah tangga miskin. Untuk sasaran strategi kedua ini penanganan penanggulangan kemiskinan dapat berupa peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan, peningkatan kapasitas usaha mikro, peningkatan sumberdaya manusia kesenian, peningkatan kapasitas nelayan dan budidaya ikan serta peningkatan kapasitas petani dan peternak. Strategi ini merupakan crosscutting dari perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan

UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan total alokasi anggaran selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar Rp. 144.826.130.374,-

3. Menurunkan Kantong - Kantong Kemiskinan

Strategi ini berfokus pada wilayah-wilayah tertentu dengan konsentrasi kemiskinan yang tinggi. Sedangkan sasaran strategi ini penanganannya dalam bentuk akses pendidikan, akses irigasi, akses air bersih, akses sistem air limbah dan akses rumah layak huni, sarana prasarana kemandirian pangan, sarana prasarana desa, sarana prasarana pertanian serta akses pengelolaan sampah, yang diampu oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup. Dengan total alokasi anggaran selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar Rp. 415.620.568.209,-

Untuk sasaran dan lokus penanggulangan kemiskinan disesuaikan dengan Data P3KE Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu berupa data Kepala Keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan satuan (persentil) dan puluhan (desil). Berikut adalah grafik data kepala keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan desil 1-4 yang biasa disebut sebagai kemiskinan reguler dan tingkat kesejahteraan desil 1 persentil 1 dan 2 di Kabupaten Lebak dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrem

.

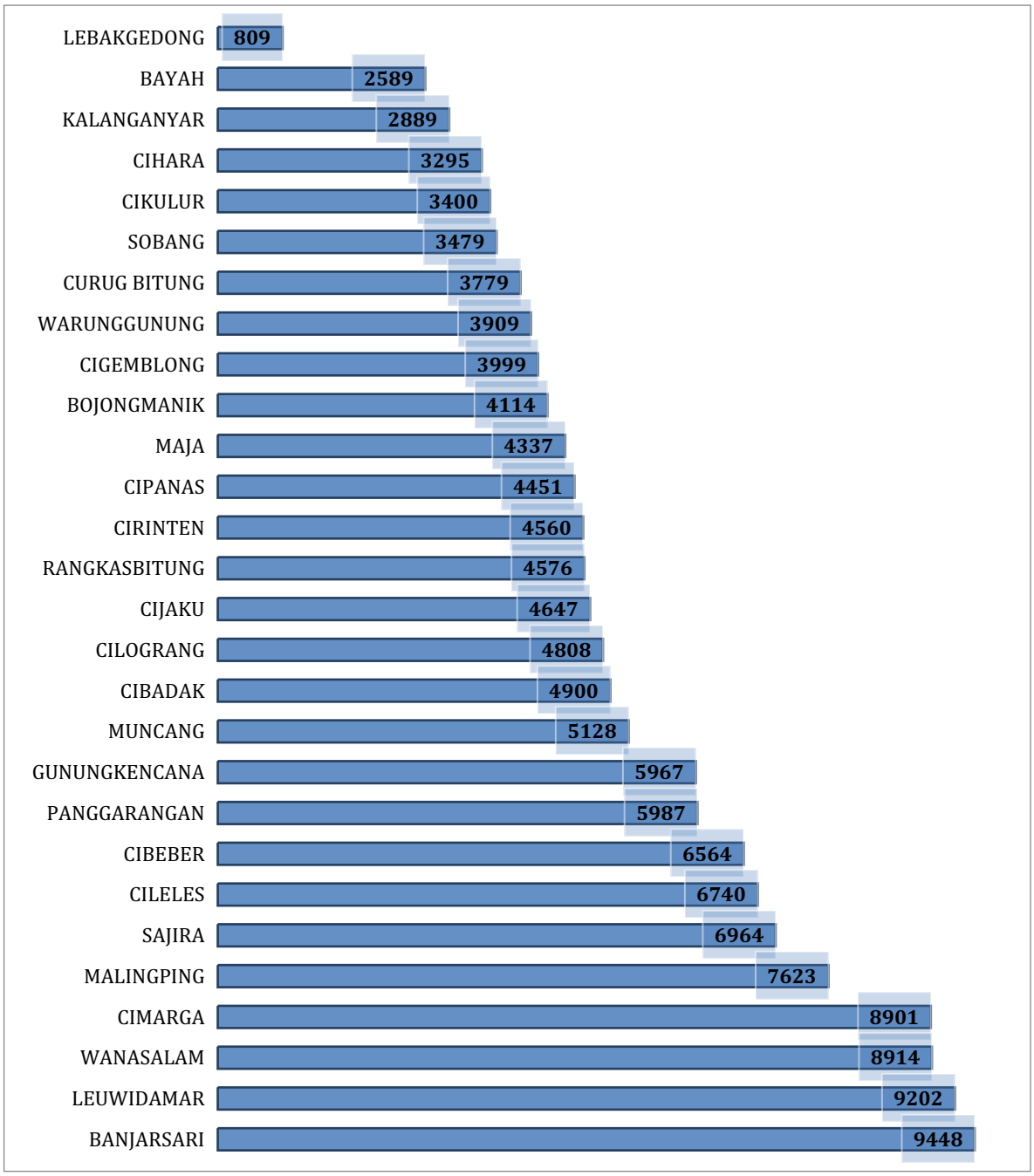


**Grafik 3. 6 Jumlah KK berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Desil 1-4 Kabupaten Lebak Tahun 2024**

*Sumber : Data P3KE Tahun 2024-Kemenko PMK*

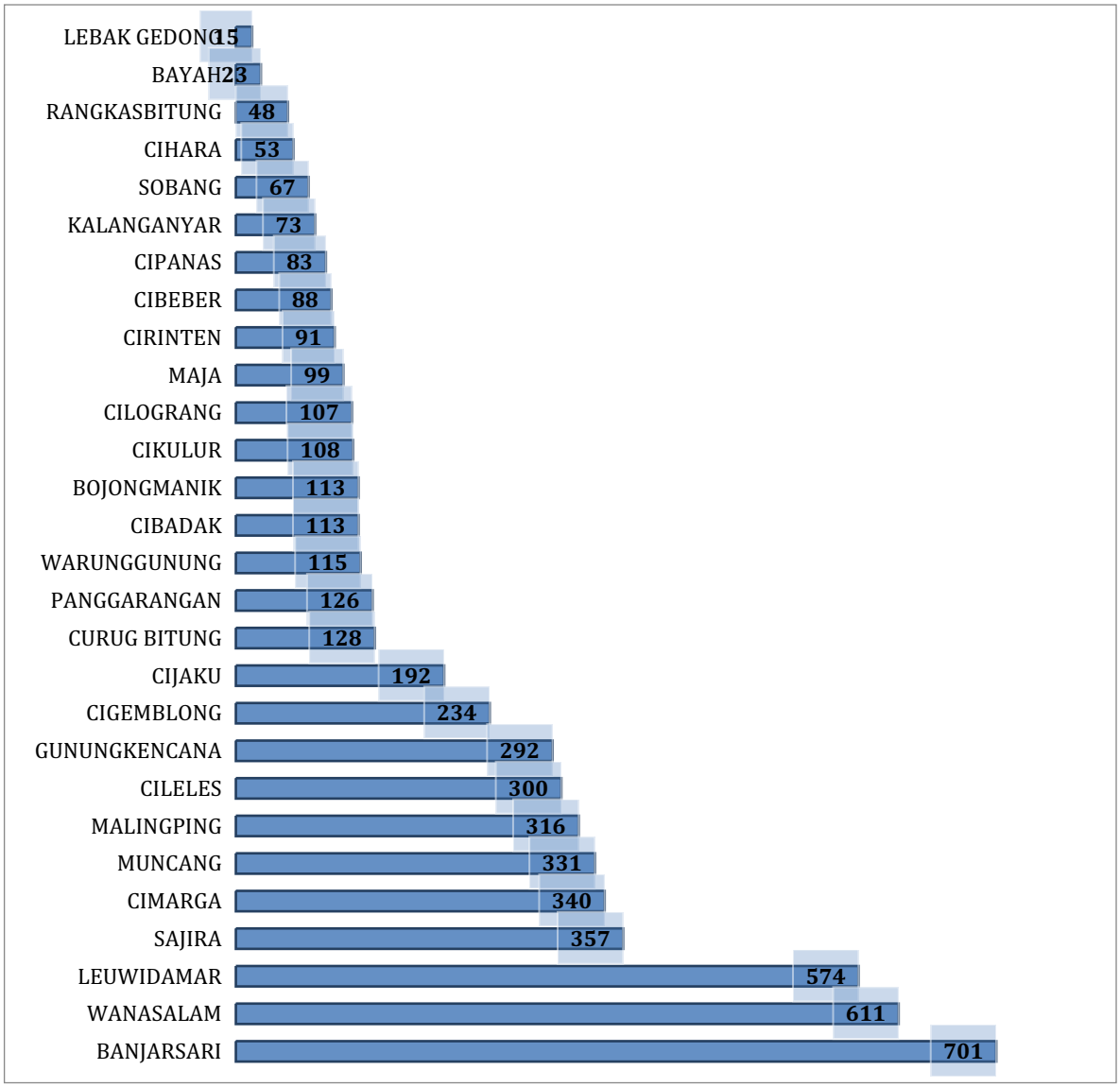


**Grafik 3. 7 Jumlah KK berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Desil 1 (Persentil 1-2)**

*Sumber : Data P3KE Tahun 2024-Kemenko PMK*

Grafik 3.6 menunjukkan distribusi keluarga kurang mampu (desil 1-4) di berbagai kecamatan dengan menunjukkan bahwa:

- Banjarsari memiliki jumlah KK desil 1-4 tertinggi dengan 9.448 keluarga
- Leuwidamar menempati posisi kedua dengan 9.202 keluarga
- Wanasalam di posisi ketiga dengan 8.914 keluarga

Sementara itu, wilayah dengan jumlah KK desil 1-4 terendah adalah:

- Lebakgedong dengan hanya 809 keluarga
- Bayah dengan 2.589 keluarga
- Kalanganyar dengan 2.889 keluarga

Grafik 3.7 fokus pada kategori desil 1, yaitu keluarga termiskin (persentil 1 dan 2). Pola distribusinya menunjukkan:

- Banjarsari kembali memimpin dengan 701 keluarga termiskin
- Wanasalam di posisi kedua dengan 611 keluarga
- Leuwidamar di posisi ketiga dengan 574 keluarga

Wilayah dengan jumlah keluarga termiskin paling sedikit:

- Lebakgedong hanya memiliki 15 keluarga termiskin
- Bayah dengan 23 keluarga
- Rangkasbitung dengan 48 keluarga

Terdapat konsistensi pola antara kedua grafik, di mana wilayah-wilayah yang memiliki jumlah KK desil 1-4 tinggi juga cenderung memiliki jumlah keluarga termiskin (desil 1) yang tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya konsentrasi kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu, khususnya Banjarsari, Wanasalam, dan Leuwidamar yang konsisten menempati posisi teratas dalam kedua kategori kemiskinan.

Berdasarkan data tersebut di atas, dalam kajian Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lebak maka dilakukan program-program:

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis individu dan keluarga
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan kecil; dan

4. Program lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dan miskin.

Dalam analisa RPKD penentuan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan data capaian tujuan (*goal*) pada *Theory of Change* (ToC) masing-masing bidang dengan data capaian salah satu *intermediate outcome* atau prakondisi yang di rasa memiliki pengaruh terhadap tujuan dimaksud kedalam sebuah kuadran. Dari kuadran prioritas wilayah tersebut, dapat dilihat wilayah kecamatan-kecamatan mana yang capaian kedua indikatornya relatif buruk dibandingkan dengan capaian antar kecamatan lainnya sehingga harus menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pelaksanaan intervensi program dan kegiatan. Hal ini tertuang dalam lokus matrik berikut ini.

## Tabel 3. 20 Proyek Strategi Daerah Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2029

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | **KABUPATEN LEBAK** | | **395,148,964,174** | **534,960,709,131** | **384,729,967,498** | **407,808,022,804** | **400,502,715,041** | **403,888,981,619** | | |
| I | **Mengurangi Beban Pengeluaran** | | **303,699,500,070** | **464,943,120,197** | **304,411,484,367** | **304,826,067,271** | **305,185,683,619** | **305,398,772,059** | | |
| 1 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 213,869,442,000 | 213,869,442,000 | 213,869,442,000 | 213,869,442,000 | 213,869,442,000 | 213,869,442,000 | Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Malingping, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Cileles dan Kecamatan Sajira | Dinas Penddikan |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 2 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 71,578,240,570 | 71,446,410,297 | 72,111,010,297 | 72,770,910,297 | 73,436,010,297 | 73,968,577,297 | Kecamatan Cileles, Kecamatan Sajira, Kecamatan Wanasalam dan Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Muncang | Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas) |
| 3 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 130,370,000 | 160,125,921,000 | 164,921,000 | 169,700,000 | 174,791,000 | 180,000,000 | Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Malingping, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cileles, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Sajira, dan | Dinas Sosial |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Kecamatan Muncang | |
| 4 | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 127,680,000 | 136,510,000 | 327,880,000 | 390,980,000 | 369,580,000 | 432,680,000 | Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Malingping, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cileles, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Sajira, dan Kecamatan Muncang | Dinas Sosial |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 5 | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 299,214,000 | 319,685,000 | 416,700,000 | 420,700,000 | 420,700,000 | 420,700,000 | Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Malingping, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cileles, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Sajira, dan Kecamatan Muncang | Dinas Sosial |
| 6 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 11,136,683,000 | 10,519,143,000 | 9,942,553,000 | 9,101,553,000 | 8,240,823,000 | 7,360,353,000 | Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Malingping, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cileles, Kecamatan | Dinas Sosial |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Gunung Kencana, Kecamatan Sajira, dan Kecamatan Muncang | |
| 7 | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 165,630,000 | 188,315,500 | 453,400,000 | 522,175,000 | 550,950,000 | 579,725,000 | Lokasi Bencana | Dinas Sosial |
| 8 | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1,589,243,800 | 1,360,000,000 | 1,725,000,000 | 1,900,000,000 | 2,150,000,000 | 2,300,000,000 | Lokasi Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 9 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 3,844,800,000 | 4,037,040,000 | 4,238,892,000 | 4,450,836,600 | 4,673,378,430 | 4,907,047,352 | Kecamatan Cileles, Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Leuwidamar | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| 10 | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI | 151,744,900 | 2,000,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | Kabupaten Lebak | Dinas Ketahanan Pangan |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 11 | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 35,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | Kabupaten Lebak | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 12 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 105,000,000 | 120,000,000 | 135,000,000 | Kabupaten Lebak | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13 | | STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 711,451,800 | 820,653,400 | 861,686,070 | 904,770,374 | 950,008,892 | 995,247,410 | Kabupaten Lebak | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | **Meningkatkan Pendapatan** | | **14,791,147,137** | **10,927,858,237** | **22,653,545,000** | **34,557,045,000** | **24,902,645,000** | **26,134,390,000** | | |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 14 | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 100,315,000 | 84,024,000 | 87,200,000 | 90,400,000 | 93,600,000 | 96,800,000 | Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Malingping, Kecamatan Muncang, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cileles, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Sajira dan Kecamatan Cimarga | **Dinas Tenaga Kerja** |
| 14 | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 480,083,600 | 449,133,600 | 451,800,000 | 454,600,000 | 457,000,000 | 460,170,000 | Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Malingping, Kecamatan Muncang, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cileles, Kecamatan Gunung Kencana, | **Dinas Tenaga Kerja** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Sajira dan Kecamatan Cimarga | |
| 15 | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 155,346,100 | 164,999,900 | 175,000,000 | 185,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | **Dinas Ketahanan Pangan** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 15 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 252,873,600 | 352,873,600 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | **Dinas Koperasi dan UKM** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 16 | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 146,340,900 | 146,340,900 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | **Dinas Koperasi dan UKM** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 16 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 62,500,000 | 75,000,000 | 87,500,000 | 100,000,000 | 112,500,000 | 125,000,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** |
| 17 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 126,180,000 | 12,670,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Malingping, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cileles, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan | **Dinas Perikanan** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Wanasalam dan Kecamatan Cigemblong | |
| 17 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 565,334,200 | 495,810,000 | 1,022,045,000 | 11,917,045,000 | 1,202,045,000 | 1,237,545,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | **Dinas Perikanan** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 18 | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 20,000,000 | 0 | 90,000,000 | 120,000,000 | 150,000,000 | 180,000,000 | Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Malingping, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cileles, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Wanasalam dan Kecamatan Cigemblong | **Dinas Perikanan** |
| 18 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3,702,968,000 | 1,055,000,000 | 9,000,000,000 | 9,450,000,000 | 9,922,500,000 | 10,418,625,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan | **Dinas Pertanian** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | |
| 19 | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 58,909,000 | 125,000,000 | 1,000,000,000 | 1,050,000,000 | 1,102,500,000 | 1,157,625,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan | **Dinas Pertanian** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Kecamatan Kalanganyar | |
| 19 | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1,010,815,500 | 425,000,000 | 2,000,000,000 | 2,100,000,000 | 2,205,000,000 | 2,315,250,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan | **Dinas Pertanian** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Kecamatan Kalanganyar | |
| 20 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 1,317,475,000 | 750,000,000 | 7,000,000,000 | 7,350,000,000 | 7,717,500,000 | 8,103,375,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | **Dinas Pertanian** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 20 | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 44,979,337 | 44,979,337 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 21 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 6,747,026,900 | 6,747,026,900 | 450,000,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** |
| | **Menurunkan Kantong-Kantong Kemiskinan** | | **76,658,316,967** | **59,089,730,697** | **57,664,938,131** | **68,424,910,533** | **70,414,386,422** | **72,355,819,560** | | |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 22 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 34,120,258,743 | 34,120,258,743 | 34,120,258,743 | 34,120,258,743 | 34,120,258,743 | 34,120,258,743 | Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Malingping, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Cileles dan Kecamatan Sajira | Dinas Pendidikan |
| 23 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 24,617,130,200 | 11,341,289,650 | 11,587,267 | 10,401,779,714 | 11,949,302,845 | 13,428,762,951 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | |
| 24 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 11,592,542,000 | 4,884,043,000 | 4,884,043,000 | 4,884,043,000 | 4,884,043,000 | 4,884,043,000 | Kecamatan Sajira dan Kecamatan Malingping | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 25 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1,043,970,424 | 63,801,504 | 63,801,504 | 63,801,504 | 63,801,504 | 63,801,504 | Kecamatan Muncang, Kecamatan Cigemlong, Kecamatan Cileles, Kecamatan Sajira, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan, Kecamatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Banjarsari dan Kecamatan Wanasalam | |
| 26 | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | - | - | - | - | - | - | Lokasi Bencana | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| 27 | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3,048,785,500 | 2,300,000,000 | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | 5,650,000,000 | 5,700,000,000 | Kecamatan Muncang dan Kecamatan Cigemblong | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 28 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | 0 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | Dinas Ketahanan Pangan |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 29 | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 26,868,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | Dinas Ketahanan Pangan |
| 30 | | PROGRAM PENATAAN DESA | 27,304,500 | 29,218,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | Seluruh Kecamatan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 31 | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 28,882,700 | 29,239,800 | 34,948,067 | 34,948,067 | 38,442,874 | 42,287,161 | Seluruh Kecamatan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 32 | | PROGRAM ADMINISTRASI | 97,355,000 | 97,835,000 | 117,799,550 | 129,579,505 | 142,537,456 | 156,791,201 | Seluruh Kecamatan | Dinas Pemberdayaan |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | Masyarakat dan Desa |
| 33 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 399,999,800 | 84,500,000 | 92,500,000 | 100,500,000 | 108,500,000 | 116,500,000 | Seluruh Kecamatan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 34 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 1,317,475,000 | 750,000,000 | 7,000,000,000 | 7,350,000,000 | 7,717,500,000 | 8,103,375,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan | Dinas Pertanian |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | Kecamatan Kalanganyar | |
| 35 | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 24,545,000 | 24,545,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Seluruh Kecamatan | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO. | STRATEGI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 36 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 313,200,100 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Sobang, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Kalanganyar | Dinas Lingkungan Hidup |

*Sumber : Data Diolah Bapperida 2025*

## XIII. Penguatan Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting;

Masalah stunting di Indonesia masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak dan potensi anak di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi sebesar 14,4% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak berupaya untuk target Pemerintah Pusat dengan mentargetkan prevalensi stunting pada akhir periode RPJMD 2025-2029 sebesar 14,4%.

Penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektoral dan terintegrasi, yang dikenal sebagai konvergensi. Konvergensi percepatan penurunan stunting meliputi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mengatasi penyebab stunting, seperti pemberian ASI eksklusif, suplementasi gizi, dan tata laksana gizi buruk. Sementara itu, intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang tidak secara langsung mengatasi stunting, tetapi memiliki dampak tidak langsung terhadap perbaikan gizi masyarakat, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi, ketahanan pangan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Kerangka konseptual pencegahan stunting yang efektif berfokus pada siklus hidup, dimulai dari masa pra-kehamilan, kehamilan, hingga periode 1.000 HPK anak. Intervensi harus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, serta didukung oleh lingkungan yang kondusif. Ini mencakup akses terhadap pangan bergizi, pelayanan kesehatan yang berkualitas, air bersih dan sanitasi yang layak, serta praktik pengasuhan yang baik.

Regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting masih merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang

Percepatan Penurunan Stunting, dimana terdapat sebanyak 64 (enam puluh empat) indikator kinerja daerah dalam pelaksaan intervensi percepatan penurunan stunting yang terdiri dari : 29 (dua puluh sembilan) indikator cakupan layanan esensial dan 35 (tiga puluh lima) indikator layanan supply yang melibatkan lintas sektor. Dalam pelaksanaan diperkuat dengan 8 (delapan) Aksi konvergensi yang harus disesuaikan dengan jadwal reguler perencanaan dan penganggaran di masing-masing daerah. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan intervensi penurunan stunting dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pada awal tahun 2025 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat, maka diterbitkan regulasi baru yang merubah indikator kinerja daerah dalam pelaksaan intervensi percepatan penurunan stunting menjadi 31 (tiga puluh satu) indikator, dan Aksi Konvergensi menjadi 4 (empat) Aksi Utama dan 2 (dua) Aksi Pendukung.

Untuk mencapai tujuan besar penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Lebak, strategi yang diusung dalam RPJMD 2025-2029 tetap mengedepankan dua jenis pendekatan, yaitu yakni Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik. Kedua jenis intervensi tersebut dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan. Kedua jenis intervensi ini merupakan pilar utama yang saling melengkapi untuk mengatasi akar masalah stunting dari berbagai aspek, sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.16 berikut ini:

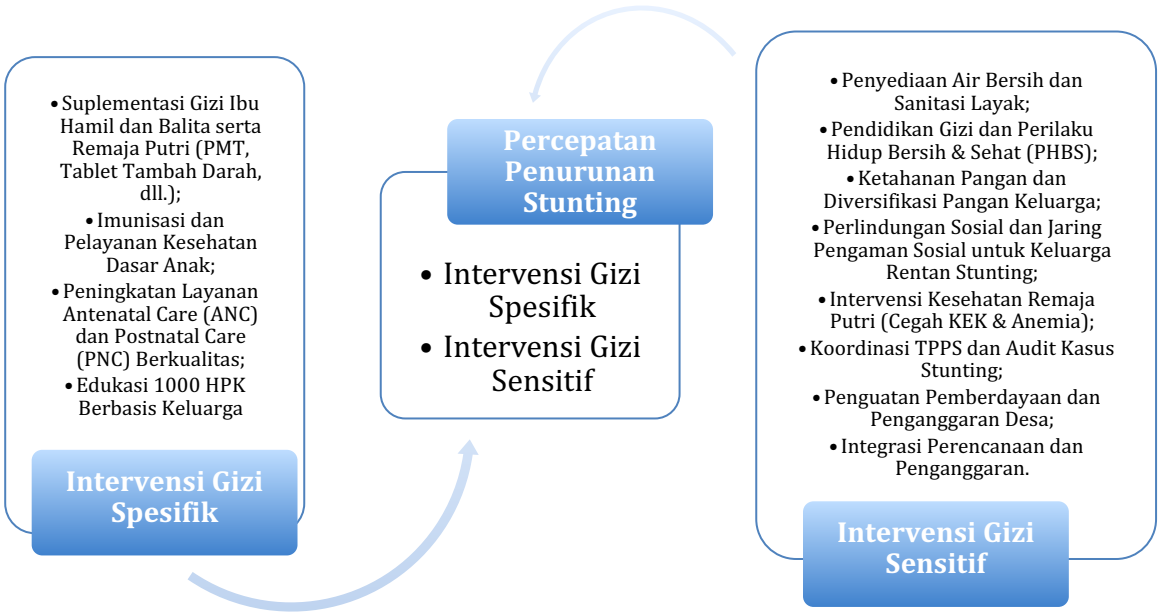


**Gambar 3. 16 Strategi Percepatan Penurunan Stunting**

Terdapat empat area fokus utama dalam intervensi gizi spesifik meliputi :

1. Suplementasi Gizi Ibu Hamil dan Balita serta Remaja Putri (PMT, Tablet Tambah Darah, dll.): Memastikan kebutuhan gizi esensial terpenuhi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mengatasi kekurangan energi dan protein, serta suplementasi tablet tambah darah untuk mencegah anemia pada ibu hamil dan balita.
2. Imunisasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar Anak: Menyediakan layanan imunisasi lengkap untuk melindungi anak dari penyakit infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan, serta memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif.
3. Peningkatan Layanan Antenatal Care (ANC) dan Postnatal Care (PNC) Berkualitas: Memperkuat kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan setelah melahirkan, termasuk pemeriksaan rutin, edukasi gizi, dan deteksi dini risiko komplikasi.
4. Edukasi 1000 HPK Berbasis Keluarga: Meningkatkan pemahaman dan praktik baik keluarga mengenai pentingnya nutrisi dan perawatan selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan, dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Beberapa capaian indikator dari intervensi gizi spesifik pada tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.21 berikut ini:

**Tabel 3. 21 Capaian Indikator Intervensi Gizi Spesifik Tahun 2024**

| INDIKATOR | TARGET | CAPAIAN |
|---|---|---|
| Intervensi Spesifik 1<br>★<br>Presentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi | 90% | 84.92 |
| Intervensi Spesifik 2<br>Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan | 80% | 80.09 |
| Intervensi Spesifik 3<br>Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | 58% | 72.54 |
| Intervensi Spesifik 4<br>Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif | 80% | 81,71 |
| Intervensi Spesifik 5<br>Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) | 80% | 92,08 |
| Intervensi Spesifik 6<br>Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk | 90% | 92.19 |
| Intervensi Spesifik 7<br>★<br>Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya | 90% | 89.63 |

| | | |
|---|---|---|
| Intervensi Spesifik 8<br>Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi | | |
| Intervensi Spesifik 9<br><br>Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap | 90% | 67.38 |

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa masih terdapat 3 indikator dengan capaian di bawah target, yaitu: Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi, dari target sebesar 90% baru tercapai sebesar 84,92%; Persentase Anak Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, ari target sebesar 90% baru tercapai sebesar 89,6%; Persentase Anak Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap, dari target 90% tercapai hanya 67,38%. Ketiga indikator tersebut sangat berkaitan dengan kehadiran Ibu dan Balita ke Posyandu. Hal inilah yang mesti mendapatkan perhatian dan upaya yang lebih pada periode kedepan. Diharapkan pada akhir periode RPJMD 2025-2029 target-target indikator pada intervensi gizi spesifik dapat dicapai seluruhnya atau dapat melebihi target.

Sedangkan intervensi sensitif meliputi delapan area fokus utama meliputi:

1. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak, Memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang higienis untuk mencegah penyakit infeksi dan diare.
2. Pendidikan Gizi dan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS), Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, kebersihan diri, dan lingkungan melalui edukasi yang berkelanjutan.
3. Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan Keluarga, Mendorong keluarga untuk memiliki akses dan kemampuan mengolah beragam sumber pangan bergizi, termasuk pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan bahan pangan sendiri.
4. Perlindungan Sosial dan Jaring Pengaman Sosial untuk Keluarga Rentan Stunting, Menyediakan bantuan dan program sosial bagi keluarga miskin dan rentan untuk mengurangi beban ekonomi dan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar.
5. Intervensi Kesehatan Remaja Putri (Cegah KEK & Anemia), Memberikan perhatian khusus pada kesehatan remaja putri, termasuk edukasi gizi dan suplementasi zat besi untuk mencegah Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia sebelum mereka memasuki masa reproduksi.
6. Koordinasi TPPS dan Audit Kasus dengan Mengoptimalkan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan dan melakukan audit kasus stunting untuk identifikasi masalah serta perumusan solusi yang tepat sasaran.
7. Penguatan Pemberdayaan dan Penganggaran Desa, Mendorong partisipasi aktif desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program penurunan stunting, serta memastikan alokasi anggaran desa yang memadai untuk intervensi stunting.
8. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran, Memastikan bahwa program dan kegiatan penurunan stunting terintegrasi secara harmonis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta didukung oleh alokasi anggaran yang memadai di seluruh sektor terkait.

Beberapa capaian indikator dari intervensi gizi sensitif pada tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.22 berikut ini:

**Tabel 3. 22 Capaian Indikator Intervensi Gizi Sensitif Tahun 2024**

| INDIKATOR | TARGET | CAPAIAN |
|---|---|---|
| Intervensi Sensitif 1<br>Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan | 70% | 74,05 |
| Intervensi Sensitif 2<br>Persentase kehamilan yang tidak diinginkan | 15% | 1,64 |
| Intervensi Sensitif 3<br>Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah | 90% | 100 |
| Intervensi Sensitif 4<br>★<br>Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas | 100% | 71,16 |
| Intervensi Sensitif 5<br>★<br>Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas | 90% | 71,78 |
| Intervensi Sensitif 6<br>★ | 90% | 38,94 |

| | | |
|---|---|---|
| Cakupan PUS penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional<br><br>Intervensi Sensitif 7<br><br>Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan | 90% | 94,52 |
| Intervensi Sensitif 8<br><br>★<br><br>Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat | 90% | 14,55 |
| Intervensi Sensitif 9<br><br>Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas | 70% | 88,8 |
| Intervensi Sensitif 10<br><br>★<br><br>Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan | 90% | 23,04 |
| Intervensi Sensitif 11<br><br>★ | 90% | 64,73 |

| | | |
|---|---|---|
| Persentase Desa/Kelurahan stop buang air besar sembarangan (BABS) | | |

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa masih terdapat 6 indikator dengan capaian di bawah target, dan dari 6 indikator yang tidak mencapai target tersebut, terdapat 3 indikator dengan capaian sangat rendah, yaitu: Capaian PUS penerima bantuan iuran (PBI) JKN, dari target sebesar 90%, capaiannya hanya sebesar 38,94%; Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat, dari target sebesar 90%, capaiannya hanya sebesar 14,55%; Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan, dari target sebesar 90%, hanya tercapai 23,04%. Ketiga indikator tersebut sangat berkaitan dengan upaya dan peran Pemerintah Desa setempat serta TPPS tingkat desa setempat. Diharapkan pada akhir periode RPJMD 2025-2029 target-target indikator pada intervensi gizi sensitif dapat dicapai seluruhnya atau dapat melebihi target.

Dalam rangka menjaga keselarasan dan penanganan yang lebih terarah serta terintegrasi, maka pelaksanaan Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat yaitu penerapan aksi konvergensi yang terdiri dari empat aksi utama dan dua aksi pendukung. Empat aksi utama tersebut adalah analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan dua aksi pendukung yaitu penyusunan regulasi dan publikasi.

Aksi konvergensi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengoptimalkan pelaksanaan intervensi gizi baik spesifik maupun sensitif secara terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, dalam rangka penguatan pelaksanaan program dan intervensi lintas sektor agar dapat diakses serta dimanfaatkan secara optimal oleh keluarga sasaran, khususnya rumah tangga dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai dari 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari setelah lahir, sebagai masa yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam pencegahan stunting. Aksi konvergensi berdasarkan regulasi terbaru terdiri dari 4 Aksi Utama dan 2 Aksi Pendukung. Empat Aksi Utama tersebut adalah: Anlisis Situasi, Penguatan Perencanaan, Penguatan Pelaksanaan, dan Penilaian Hasil Monev. Sedangkan 2 Aksi Pendukung meliputi:

Dukungan Regulasi dan Publikasi. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

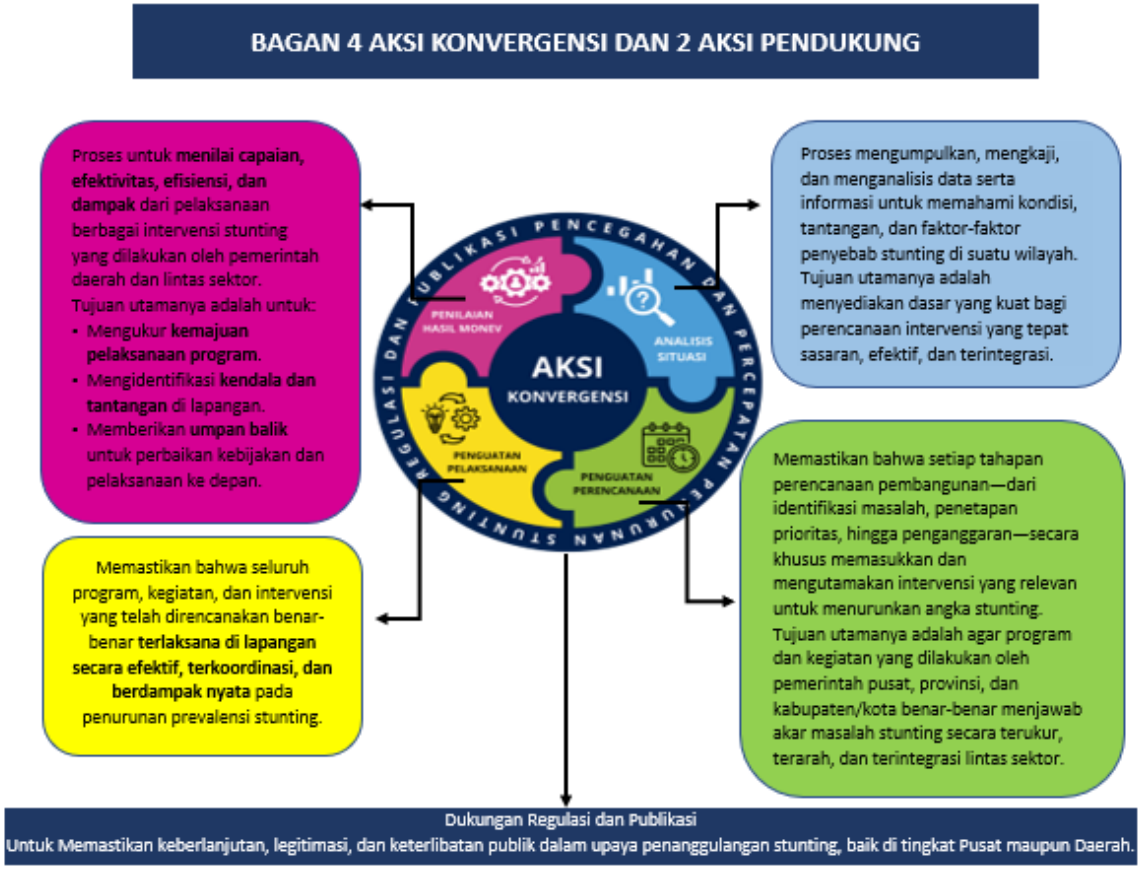


**Gambar 3. 17 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting**

**Tabel 3. 23 Rencana Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025-2029**

| NO | STRATEGI/RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | SPESIFIK | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 41.190.000 | 43.249.500 | 45.411.975 | 47.682.574 | 50.066.702 | 52.570.038 | | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 73.912.820.511 | 77.608.461.537 | 81.488.884.613 | 85.563.328.844 | 89.841.495.286 | 94.333.570.051 | | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 9.691.973.099 | 10.176.571.754 | 10.685.400.342 | 11.219.670.359 | 11.780.653.877 | 12.369.686.570 | | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 160.572.266.028 | 168.600.879.329 | 177.030.923.296 | 185.882.469.461 | 195.176.592.934 | 204.935.422.580 | | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 377.039.000 | 395.890.950 | 415.685.498 | 436.469.772 | 458.293.261 | 481.207.924 | | Dinas Kesehatan |
| 2 | SENSITIF | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.842.145.852 | 4.919.974.031 | 5.120.000.000 | 5.240.000.000 | 5.430.000.000 | 5.530.000.000 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.147.591.677 | 3.277.568.883 | 3.858.570.963 | 3.958.570.963 | 4.125.678.750 | 3.750.870.823 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 43.114.601.667 | 33.721.615.828 | 35.941.969.552 | 39.536.166.507 | 40.550.170.500 | 41.655.230.200 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.662.544.153 | 3.739.295.216 | 4.723.000.000 | 4.739.295.216 | 4.739.295.216 | 4.739.295.216 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.475.846.059 | 17.746.432.531 | 19.521.075.784 | 21.473.183.362 | 23.620.501.698 | 25.982.551.868 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.408.742.200 | 1.410.582.200 | 1.410.582.200 | 1.410.582.200 | 1.410.582.200 | 1.410.582.200 | | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.487.348.001 | 7.417.235.463 | 7.417.235.463 | 7.417.235.463 | 7.417.235.463 | 7.417.235.463 | | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 1.303.638.350 | 1.421.986.697 | 1.303.638.500 | 1.421.986.697 | 1.303.638.500 | 1.303.638.500 | | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.711.373.230 | 8.715.000.000 | 9.150.750.000 | 9.200.000.000 | 9.300.000.000 | 9.350.000.000 | | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.836.878.331 | 3.836.878.331 | 3.836.878.331 | 3.836.878.331 | 3.836.878.361 | 3.836.878.361 | | Dinas Kepemudaan Olahraga |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 74.987.500 | 63.747.500 | 95.000.000 | 104.500.000 | 114.950.000 | 126.445.000 | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 3.849.999.000 | 363.583.600 | 429.999.900 | 472.999.900 | 520.299.900 | 572.329.000 | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.800.653.517 | 3.189.287.103 | 3.508.215.813 | 3.859.037.394 | 4.244.941.134 | 4.669.435.247 | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 841.883.800 | 1.010.260.000 | 1.212.312.000 | 1.333.543.200 | 1.466.897.500 | 1.613.587.250 | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.878.510.515 | 5.854.212.000 | 7.025.054.400 | 7.727.559.000 | 8.500.314.900 | 9.350.346.400 | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 252.843.600 | 252.843.600 | 1.006.599.900 | 1.006.599.900 | 1.009.599.900 | 1.006.599.900 | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 146.340.900 | 156.341.100 | 682.703.400 | 682.703.400 | 682.703.400 | 682.703.400 | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.863.968.796 | 4.729.357.921 | 5.229.357.921 | 5.479.357.921 | 5.729.357.921 | 5.979.357.921 | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 6.080.809.939 | 6.445.930.056 | 6.534.937.531 | 6.623.945.005 | 6.712.952.480 | 6.712.952.480 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.775.915.459 | 11.775.915.459 | 11.775.915.459 | 11.775.915.459 | 11.775.915.459 | 11.775.915.459 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.161.978.424 | 9.834.500.000 | 9.834.500.000 | 9.834.500.000 | 9.834.500.000 | 9.834.500.000 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 11.532.136.600 | 5.340.100.000 | 5.340.100.000 | 5.340.100.000 | 5.340.100.000 | 5.340.100.000 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 20.661.022.538 | 21.177.548.101 | 21.706.986.804 | 22.249.661.474 | 22.805.903.011 | 23.376.050.586 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 2.158.021.740 | 2.046.423.914 | 2.169.466.305 | 2.303.112.936 | 2.448.424.230 | 2.500.000.000 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 1.300.000.000 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.600.000.000 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.900.000.000 | 5.200.000.000 | 5.400.000.000 | 5.600.000.000 | 5.800.000.000 | 6.000.000.000 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **7.288.772.500** | **7.653.211.125** | **8.035.871.681** | **8.437.665.265** | **8.859.548.529** | **9.302.525.955** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana** |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **9.300.608.765** | **9.765.639.203** | **10.253.921.163** | **10.766.617.222** | **11.304.948.083** | **11.870.195.487** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana** |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **709.805.000** | **745.295.250** | **782.560.013** | **821.688.013** | **862.772.414** | **905.911.034** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana** |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.772.738.485** | **2.772.738.485** | **2.911.375.409** | **3.056.944.180** | **3.209.791.389** | **3.370.280.958** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana** |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **201.598.800** | **201.598.800** | **201.598.800** | **201.598.800** | **201.598.800** | **201.598.800** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.135.617.139** | **7.067.337.057** | **7.067.337.057** | **7.067.337.057** | **7.067.337.057** | **7.067.337.057** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | **53.475.457.912** | **104.774.064.726** | **115.251.471.199** | **126.776.618.318** | **139.454.280.150** | **153.399.708.165** | | | **Dinas Pendidikan** |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **617.955.300.780** | **679.750.830.858** | **747.725.913.944** | **822.498.505.338** | **904.748.355.872** | **995.223.191.459** | | **Dinas Pendidikan** |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **12.874.200.915** | **12.874.200.915** | **14.161.621.006** | **15.577.783.107** | **17.135.561.417** | **18.849.117.559** | | **Dinas Perhubungan** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 20.000.000 | 20.980.000 | 176.500.000 | 208.000.000 | 239.500.000 | 271.000.000 | | Dinas Perikanan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.340.259.625 | 10.182.253.625 | 10.691.366.306 | 11.200.478.987 | 11.760.502.936 | 12.348.528.082 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.066.251.936 | 3.935.126.841 | 4.131.883.183 | 4.338.477.342 | 4.555.401.209 | 4.783.171.270 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.501.103.222 | 18.864.818.967 | 19.808.059.915 | 20.798.462.911 | 21.838.386.057 | 22.930.305.360 | | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3.048.785.500 | 2.300.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.132.775.019 | 4.109.958.090 | 4.335.000.000 | 4.335.000.000 | 4.335.000.000 | 4.335.000.000 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.061.910.220 | 6.042.651.524 | 6.500.000.000 | 6.600.000.000 | 6.700.000.000 | 6.900.000.000 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 5.571.522.200 | 5.169.571.500 | 4.871.276.500 | 4.450.776.500 | 4.020.411.500 | 3.580.176.500 | | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 426.894.000 | 456.195.000 | 896.605.000 | 963.680.000 | 942.280.000 | 1.005.380.000 | | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.639.778.337 | 4.900.206.731 | 5.034.847.996 | 5.183.856.488 | 5.314.586.085 | 5.294.112.988 | | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.481.805.470 | 3.486.298.357 | 3.944.755.600 | 5.480.305.200 | 4.315.050.000 | 4.930.850.000 | | Dinas Tenaga Kerja |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.015.730.166 | 13.947.803.424 | 13.947.803.424 | 13.947.803.424 | 13.947.803.424 | 12.494.737.150 | | Inspektorat Daerah |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.699.789.828 | 9.614.027.362 | 10.094.728.730 | 10.599.465.167 | 11.129.438.425 | 11.685.910.346 | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 22.913.772.800 | 23.154.673.000 | 25.815.005.900 | 29.961.998.900 | 30.123.690.900 | 30.301.552.900 | | Sekretariat Daerah |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.431.419.257 | 37.811.296.175 | 45.202.773.335 | 50.222.773.585 | 56.081.087.447 | 62.628.090.052 | | Sekretariat Daerah |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.631.315.075 | 41.049.009.405 | 42.594.309.820 | 42.594.309.820 | 42.594.309.820 | 42.594.309.820 | | Sekretariat DPRD |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 53.048.400 | 53.048.400 | 53.048.400 | 53.048.400 | 53.048.400 | 53.048.400 | | Kecamatan Banjarsari |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 74.785.000 | 74.785.000 | 74.785.000 | 74.785.000 | 74.785.000 | 74.785.000 | | Kecamatan Banjarsari |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 17.390.000 | 17.390.000 | 17.390.000 | 17.390.000 | 17.390.000 | 17.390.000 | | Kecamatan Banjarsari |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.551.553.269 | 2.551.553.269 | 2.551.553.269 | 2.551.553.269 | 2.551.553.269 | 2.551.553.269 | | Kecamatan Banjarsari |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 51.245.000 | 98.530.756 | 103.457.294 | 108.630.159 | 114.061.667 | | | Kecamatan Bayah |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 58.578.000 | 73.854.821 | 77.547.562 | 81.424.940 | 85.496.187 | 89.770.996 | | Kecamatan Bayah |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 23.920.000 | 27.356.333 | 28.724.150 | 30.160.358 | 31.668.376 | 33.251.795 | | Kecamatan Bayah |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.387.948.001 | 2.551.083.664 | 2.678.637.847 | 2.812.569.739 | 2.953.198.226 | 3.100.858.137 | | Kecamatan Bayah |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 37.990.000 | 57.320.000 | 57.320.000 | 57.320.000 | 57.320.000 | 57.320.000 | | Kecamatan Bojongmanik |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 44.530.000 | 29.200.000 | 44.530.000 | 44.530.000 | 44.530.000 | 44.530.000 | | Kecamatan Bojongmanik |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 10.220.000 | 10.220.000 | 10.220.000 | 10.220.000 | 10.220.000 | 10.220.000 | | Kecamatan Bojongmanik |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.275.118.000 | 2.175.555.199 | 2.511.140.230 | 2.511.140.230 | 2.511.140.230 | 2.511.140.230 | | Kecamatan Bojongmanik |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 72.572.000 | 72.572.000 | 72.572.000 | 72.572.000 | 72.572.000 | 72.572.000 | | Kecamatan Cibadak |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 51.100.000 | 51.100.000 | 51.100.000 | 51.100.000 | 51.100.000 | 51.100.000 | | Kecamatan Cibadak |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 8.760.000 | 8.760.000 | 8.760.000 | 8.760.000 | 8.760.000 | 8.760.000 | | Kecamatan Cibadak |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.470.752.694 | 2.470.752.694 | 2.470.752.694 | 2.470.752.694 | 2.470.752.694 | 2.470.752.694 | | Kecamatan Cibadak |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 61.870.200 | 61.870.200 | 61.870.200 | 61.870.200 | 61.870.200 | 61.870.200 | | Kecamatan Cibeber |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 41.034.000 | 41.034.000 | 41.034.000 | 41.034.000 | 41.034.000 | 41.034.000 | | Kecamatan Cibeber |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 12.478.500 | 12.478.500 | 12.478.500 | 12.478.500 | 12.478.500 | 12.478.500 | | Kecamatan Cibeber |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.484.454.659 | 2.540.979.009 | 2.540.979.009 | 2.540.979.009 | 2.540.979.009 | 2.540.979.009 | | Kecamatan Cibeber |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 84.979.000 | 84.979.000 | 87.249.000 | 89.594.000 | 9.209.400.000 | 94.439.000 | | Kecamatan Cigemblong |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 52.560.000 | 52.560.000 | 56.010.000 | 58.440.000 | 6.519.400.000 | 68.070.000 | | Kecamatan Cigemblong |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 10.950.000 | 10.950.000 | 13.607.000 | 16.830.000 | 1.917.500.000 | 23.065.000 | | Kecamatan Cigemblong |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.945.512.743 | 1.945.512.743 | 1.995.512.743 | 2.037.512.743 | 207.251.274.300 | 2.118.388.743 | | Kecamatan Cigemblong |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.610.000 | 50.610.000 | 51.622.200 | 54.203.300 | 56.913.000 | 59.758.600 | | Kecamatan Cihara |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 22.341.300 | 22.341.300 | 22.788.126 | 23.927.500 | 25.123.800 | 26.379.900 | | Kecamatan Cihara |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 11.680.000 | 11.680.000 | 11.913.600 | 12.509.200 | 13.134.700 | 13.791.400 | | Kecamatan Cihara |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.402.765.150 | 2.402.765.150 | 2.450.820.453 | 2.573.361.475 | 2.702.029.548 | 2.837.131.025 | | Kecamatan Cihara |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 48.124.000 | 48.124.000 | 53.124.000 | 56.580.000 | 59.818.000 | 63.058.000 | | Kecamatan Cijaku |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 23.670.000 | 23.670.000 | 30.546.000 | 33.046.000 | 35.613.000 | 43.267.000 | | Kecamatan Cijaku |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 14.730.000 | 14.730.000 | 18.185.000 | 22.419.000 | 25.406.000 | 26.906.000 | | Kecamatan Cijaku |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.389.280.784 | 2.389.280.784 | 2.439.280.784 | 2.479.280.784 | 2.514.280.784 | 2.559.280.784 | | Kecamatan Cijaku |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 114.759.600 | 118.759.500 | 118.759.500 | 118.759.500 | 118.759.500 | 118.759.500 | | Kecamatan Cikulur |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 70.716.000 | 81.940.000 | 81.940.000 | 81.940.000 | 81.940.000 | 81.940.000 | | Kecamatan Cikulur |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 17.860.000 | 15.636.900 | 15.636.900 | 15.636.900 | 15.636.900 | 15.636.900 | | Kecamatan Cikulur |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.524.534.070 | 2.455.790.585 | 2.455.790.585 | 2.455.790.585 | 2.455.790.585 | 2.455.790.585 | | Kecamatan Cikulur |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 64.068.000 | 64.068.000 | 61.163.000 | 61.163.000 | 61.163.000 | 61.163.000 | | Kecamatan Cileles |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 54.100.000 | 54.100.000 | 54.100.000 | 54.100.000 | 54.100.000 | 54.100.000 | | Kecamatan Cileles |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 14.540.000 | 14.540.000 | 10.585.000 | 10.585.000 | 10.585.000 | 10.585.000 | | Kecamatan Cileles |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.527.530.287 | 2.527.530.287 | 2.595.116.389 | 2.595.116.389 | 2.595.116.389 | 2.595.116.389 | | Kecamatan Cileles |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 45.234.000 | 191.358.800 | 198.358.800 | 199.358.800 | 199.358.800 | 199.358.800 | | Kecamatan Cilograng |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 43.310.000 | 80.214.000 | 82.214.000 | 83.214.000 | 83.214.000 | 83.214.000 | | Kecamatan Cilograng |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 3.504.000 | 28.406.000 | 30.406.000 | 31.406.000 | 31.406.000 | 31.406.000 | | Kecamatan Cilograng |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.996.989.272 | 2.110.018.850 | 2.110.018.850 | 2.110.018.850 | 2.110.018.850 | 2.110.018.850 | | Kecamatan Cilograng |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 113.150.700 | 164.685.000 | 173.432.000 | 175.673.000 | 178.254.000 | 180.367.000 | | Kecamatan Cimarga |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 24.885.000 | 28.000.000 | 31.000.000 | 33.000.000 | 36.000.000 | 38.000.000 | | Kecamatan Cimarga |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 29.639.000 | 26.000.000 | 29.000.000 | 31.950.000 | 33.378.000 | 37.890.000 | | Kecamatan Cimarga |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.294.758.535 | 2.644.512.400 | 2.850.612.320 | 3.134.042.000 | 3.332.078.200 | 3.587.158.000 | | Kecamatan Cimarga |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 53.120.000 | 53.120.000 | 70.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 53.120.000 | | Kecamatan Cipanas |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 52.260.000 | 52.260.000 | 52.260.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 52.260.000 | | Kecamatan Cipanas |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 4.434.800 | 4.434.800 | 14.434.800 | 20.000.000 | 25.000.000 | 4.434.800 | | Kecamatan Cipanas |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.264.423.818 | 2.264.423.818 | 2.264.423.818 | 2.264.423.818 | 2.264.423.818 | 2.264.423.818 | | Kecamatan Cipanas |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 58.675.000 | 58.675.000 | 62.995.000 | 65.382.600 | 68.648.600 | 71.194.600 | | Kecamatan Cirinten |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 23.360.000 | 22.150.000 | 26.260.000 | 29.760.000 | 32.260.000 | 36.560.000 | | Kecamatan Cirinten |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 6.570.000 | 6.570.000 | 9.110.000 | 12.310.000 | 14.741.000 | 17.341.000 | | Kecamatan Cirinten |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.772.272.785 | 2.772.272.785 | 2.822.272.785 | 2.864.272.785 | 2.899.272.785 | 2.935.272.785 | | Kecamatan Cirinten |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.729.000 | 23.729.000 | 25.654.000 | 27.432.000 | 29.543.000 | 30.786.000 | | Kecamatan Curugbitung |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 8.167.000 | 11.167.000 | 13.789.000 | 15.900.000 | 17.235.000 | 19.357.000 | | Kecamatan Curugbitung |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 3.612.300 | 7.268.300 | 8.523.000 | 10.435.000 | 12.324.567 | 14.254.000 | | Kecamatan Curugbitung |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.541.639.881 | 2.520.622.646 | 2.551.276.646 | 2.553.621.646 | 2.569.497.646 | 2.611.877.516 | | Kecamatan Curugbitung |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 64.812.000 | 73.012.000 | 78.012.000 | 81.242.000 | 84.482.000 | 85.234.000 | | Kecamatan Gunungkencana |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 53.765.800 | 53.765.800 | 63.765.800 | 68.977.800 | 73.297.800 | 75.729.800 | | Kecamatan Gunungkencana |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 24.000.000 | 24.000.000 | 29.400.000 | 33.721.000 | 34.245.700 | 39.479.700 | | Kecamatan Gunungkencana |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.300.609.441 | 2.350.765.552 | 2.391.000.095 | 2.426.087.095 | 2.447.407.095 | 2.497.407.095 | | Kecamatan Gunungkencana |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 26.960.000 | 26.960.000 | 28.500.000 | 30.648.000 | 31.324.300 | 32.678.543 | | Kecamatan Kalanganyar |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 39.420.000 | 39.420.000 | 40.325.987 | 41.256.908 | 43.875.257 | 45.231.589 | | Kecamatan Kalanganyar |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 5.840.000 | 5.840.000 | 6.328.000 | 6.427.000 | 6.542.300 | 6.790.423 | | Kecamatan Kalanganyar |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.102.554.977 | 2.102.554.977 | 2.303.453.873 | 2.425.889.546 | 2.589.675.996 | 2.645.367.986 | | Kecamatan Kalanganyar |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 69.267.000 | 69.267.000 | 71.000.000 | 78.100.000 | 85.910.000 | 94.501.000 | | Kecamatan Lebakgedong |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 31.620.000 | 31.620.000 | 33.000.000 | 36.300.000 | 39.930.000 | 43.923.000 | | Kecamatan Lebakgedong |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 7.320.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 | 19.965.000 | | Kecamatan Lebakgedong |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.911.468.054 | 1.904.788.054 | 1.984.000.000 | 2.182.400.000 | 2.400.640.000 | 2.640.704.000 | | Kecamatan Lebakgedong |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 59.441.800 | 74.782.800 | 75.805.289 | 75.921.000 | 78.125.663 | 80.665.478 | | Kecamatan Leuwidamar |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 29.352.000 | 25.980.000 | 26.760.000 | 27.000.000 | 28.660.133 | 30.118.222 | | Kecamatan Leuwidamar |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 13.310.000 | 14.776.000 | 15.650.000 | 16.800.000 | 18.114.000 | 20.001.856 | | Kecamatan Leuwidamar |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.040.520.747 | 2.187.222.407 | 2.110.325.906 | 2.115.208.350 | 2.130.458.610 | 2.206.178.110 | | Kecamatan Leuwidamar |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 74.288.700 | 94.693.141 | 104.895.361 | 115.097.582 | 125.299.802 | 135.502.023 | | Kecamatan Maja |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 52.957.000 | 61.379.817 | 65.591.226 | 69.802.634 | 74.014.043 | 78.225.452 | | Kecamatan Maja |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 32.740.000 | 56.565.045 | 68.477.567 | 80.390.090 | 92.302.612 | 104.215.135 | | Kecamatan Maja |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.406.965.607 | 2.503.677.902 | 2.552.034.050 | 2.600.390.197 | 2.648.746.345 | 2.697.102.493 | | Kecamatan Maja |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 58.501.400 | 58.501.400 | 61.426.470 | 64.497.794 | 67.722.684 | 71.108.818 | | Kecamatan Malingping |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 8.765.800 | 8.765.800 | 9.204.090 | 9.664.295 | 10.147.510 | 10.654.886 | | Kecamatan Malingping |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 6.327.700 | 6.327.700 | 6.644.085 | 6.976.289 | 6.976.289 | 7.325.103 | | Kecamatan Malingping |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.249.795.979 | 2.249.795.979 | 2.362.285.778 | 2.480.400.067 | 2.604.420.070 | 2.734.641.074 | | Kecamatan Malingping |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 95.245.400 | 95.245.400 | 96.167.000 | 97.675.000 | 98.432.000 | 99.569.000 | | Kecamatan Muncang |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 76.530.000 | 76.530.000 | 77.348.000 | 78.978.000 | 79.346.000 | 81.678.000 | | Kecamatan Muncang |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 34.520.000 | 34.520.000 | 35.520.000 | 37.576.800 | 39.243.000 | 42.854.000 | | Kecamatan Muncang |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.949.154.102 | 1.949.154.102 | 2.256.432.000 | 2.490.222.000 | 2.630.678.000 | 2.770.325.000 | | Kecamatan Muncang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 55.150.000 | 67.512.000 | 71.012.000 | 73.812.000 | 78.112.000 | 80.712.000 | | Kecamatan Panggarangan |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 47.560.000 | 48.006.000 | 50.306.000 | 54.306.000 | 57.506.000 | 59.855.000 | | Kecamatan Panggarangan |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 19.400.000 | 14.989.000 | 17.489.000 | 18.989.000 | 20.989.000 | 24.189.000 | | Kecamatan Panggarangan |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.071.854.918 | 2.127.696.918 | 2.177.696.918 | 2.217.696.918 | 2.247.696.918 | 2.301.996.918 | | Kecamatan Panggarangan |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 81.559.500 | 88.589.500 | 88.589.500 | 88.589.500 | 88.589.500 | 88.589.500 | | Kecamatan Rangkasbitung |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.664.840.000 | 1.664.780.000 | 1.664.780.000 | 1.664.780.000 | 1.664.780.000 | 1.664.780.000 | | Kecamatan Rangkasbitung |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 24.040.000 | 23.888.000 | 23.888.000 | 23.888.000 | 23.888.000 | 23.888.000 | | Kecamatan Rangkasbitung |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.178.876.183 | 6.211.876.183 | 6.211.876.183 | 6.211.876.183 | 6.211.876.183 | 6.211.876.183 | | Kecamatan Rangkasbitung |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 45.340.600 | 48.368.000 | 50.678.543 | 53.675.428 | 65.875.432 | 70.542.315 | | Kecamatan Sajira |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 33.734.000 | 34.654.000 | 39.543.000 | 42.785.000 | 44.892.000 | 48.237.000 | | Kecamatan Sajira |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 11.143.700 | 13.143.700 | 16.143.700 | 18.690.500 | 24.122.734 | 26.256.734 | | Kecamatan Sajira |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.492.390.993 | 2.522.390.993 | 2.542.390.993 | 2.582.644.993 | 2.618.410.993 | 2.668.644.993 | | Kecamatan Sajira |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 127.603.500 | 133.218.125 | 138.832.750 | 144.447.375 | 150.062.000 | 155.676.625 | | Kecamatan Sobang |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 72.040.000 | 75.630.000 | 79.220.000 | 82.810.000 | 86.400.000 | 89.990.000 | | Kecamatan Sobang |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 30.250.000 | 32.157.500 | 34.065.000 | 35.972.500 | 37.880.000 | 39.787.500 | | Kecamatan Sobang |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.871.366.167 | 1.915.712.416 | 1.960.058.665 | 2.004.404.914 | 2.048.751.163 | 2.093.097.412 | | Kecamatan Sobang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 63.303.300 | 63.303.300 | 67.303.300 | 71.533.300 | 74.773.300 | 81.773.300 | | Kecamatan Wanasalam |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 41.130.000 | 41.130.000 | 43.470.000 | 45.470.000 | 50.670.000 | 54.127.000 | | Kecamatan Wanasalam |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 10.927.900 | 10.927.900 | 13.366.900 | 15.666.900 | 19.166.900 | 25.058.900 | | Kecamatan Wanasalam |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.200.087.664 | 2.200.087.664 | 2.252.087.664 | 2.294.387.664 | 2.336.387.664 | 2.371.387.664 | | Kecamatan Wanasalam |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 41.150.000 | 41.150.000 | 42.000.000 | 45.000.000 | 56.000.000 | 56.410.000 | | Kecamatan Warunggunung |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 37.630.000 | 37.630.000 | 38.100.000 | 40.000.000 | 42.560.000 | 42.600.000 | | Kecamatan Warunggunung |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **11.680.000** | **16.450.000** | **16.700.000** | **17.000.000** | **17.800.000** | **18.000.000** | | **Kecamatan Warunggunung** |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.090.141.890** | **2.075.171.890** | **2.082.900.000** | **2.094.000.000** | **3.010.000.000** | **3.018.230.000** | | **Kecamatan Warunggunung** |

## XIV. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sektor kesehatan memiliki peran fundamental dalam pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial di suatu wilayah. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tidak sekadar menjadi bagian, melainkan merupakan komponen krusial dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.1 Sebagai proyek strategis daerah, peningkatan mutu pelayanan kesehatan akan menjadi salah satu fokus utama dalam alokasi sumber daya dan implementasi program pembangunan di Kabupaten Lebak selama lima tahun ke depan. Komitmen ini mencerminkan pemahaman bahwa kesehatan masyarakat adalah investasi jangka panjang yang akan menopang seluruh aspek pembangunan daerah.

Strategi dan rencana aksi peningkatan mutu pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2025-2029, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, akan difokuskan pada pemerataan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit, dan penguatan ketahanan perbekalan kesehatan. Rencana ini juga akan mengintegrasikan transformasi kesehatan yang mencakup 6 pilar, yaitu layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Kebijakan nasional juga sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Visi ini diwujudkan melalui enam pilar transformasi sistem kesehatan: (1) Layanan Primer, (2) Layanan Rujukan, (3) Ketahanan Kesehatan, (4) Sistem Pembiayaan Kesehatan, (5) SDM Kesehatan, dan (6) Teknologi Kesehatan. Setiap pilar memiliki program utama dan indikator kinerja spesifik, seperti akreditasi fasilitas kesehatan sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan.

Mutu pelayanan kesehatan bersifat multidimensi, yang berarti dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Tiga sudut pandang utama yang perlu diperhatikan adalah pihak pemakai jasa pelayanan (pasien), pihak penyelenggara pelayanan (fasilitas kesehatan dan

tenaga medis), dan pihak penyandang dana mutu (pemerintah, BPJS Kesehatan, atau asuransi).

Strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang terdiri dari 6 pilar tersebut mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Strategi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem manajemen, keterlibatan masyarakat, kemitraan, dan penerapan teknologi informasi. Selain itu, Kemenkes juga menekankan pentingnya akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, penerapan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP), serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Strategi-strategi ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, efisien, mudah diakses, berpusat pada pasien, tidak berpihak, dan aman

Berikut ini adalah beberapa strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan utama beserta program-program pendukungnya yang diterapkan di Kabupaten Lebak selama periode tahun 2019-2030:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM):
   - Pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan.
   - Peningkatan kualitas rekrutmen dan penempatan SDM.
   - Pengembangan sistem remunerasi yang adil dan transparan.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana:
   - Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan berkualitas.
   - Pengadaan peralatan medis yang modern dan canggih.
   - Peningkatan sanitasi dan kebersihan lingkungan fasilitas kesehatan.

3. Peningkatan Sistem Manajemen:
   - Penerapan sistem manajemen mutu yang efektif.
   - Pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.
   - Penguatan sistem rujukan yang berjenjang dan terpadu.

4. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat:

- Penyuluhan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat,
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan,
- Pemberdayaan kelompok masyarakat rentan.

5. Peningkatan Kemitraan:

- Pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
- Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta.
- Penguatan jejaring kerja antar fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Penerapan Teknologi Informasi:

- Pengembangan sistem informasi kesehatan elektronik (e-health).
- Pemanfaatan teknologi telemedicine untuk akses pelayanan kesehatan.
- Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam diagnosis dan pengobatan.

7. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

- Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi.
- Penerapan standar akreditasi yang jelas dan terukur.
- Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap fasilitas yang terakreditasi.

8. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP):

- Pengukuran dan analisis indikator mutu pelayanan kesehatan.
- Penerapan program perbaikan mutu yang berkelanjutan.
- Pengembangan budaya mutu dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan.

9. Pemantauan dan Evaluasi:

- Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan;
- Pengumpulan dan analisis data mutu pelayanan kesehatan;
- Evaluasi berkala terhadap implementasi program peningkatan mutu.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara langsung, tetapi juga untuk menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan dimana mutu pelayanan kesehatan bersifat multidimensi, mencakup aspek keselamatan pasien, efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, pelayanan yang berpusat pada pasien, dan kesetaraan. Semua dimensi ini saling terkait dan harus diperhatikan secara komprehensif. Salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan Kesehatan adalah peningkatan produktivitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Adjidarmo. Produktivitas BLUD dapat diartikan sebagai kemampuan BLUD untuk menghasilkan output atau layanan maksimal dengan input sumber daya yang efisien. Ini mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, kecepatan respons, dan inovasi.

Kabupaten Lebak menghadapi tantangan signifikan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, terutama terkait keterbatasan sumber daya (baik finansial maupun sumber daya manusia), infrastruktur yang belum memadai, serta faktor budaya dan rendahnya kesadaran masyarakat yang dapat menghambat adopsi layanan kesehatan formal. Meskipun demikian, kerangka kebijakan nasional yang kuat terkait akreditasi fasilitas kesehatan dan Indikator Nasional Mutu (INM) memberikan mandat dan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah untuk bergerak.

.

**Tabel 3. 24 Rencana Aksi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan**

| NO | STRATEGI / RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Peningkatan SDM Kesehatan** | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 9.691.973.099 | 10.176.571.754 | 10.685.400.342 | 11.219.670.359 | 11.780.653.877 | 12.369.686.570 | | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 9.300.608.765 | 9.765.639.203 | 10.253.921.163 | 10.766.617.222 | 11.304.948.083 | 11.870.195.487 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| | **Peningkatan Sarpras Kesehatan** | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 73.912.820.511 | 77.608.461.537 | 81.488.884.613 | 85.563.328.844 | 89.841.495.286 | 94.333.570.051 | | Dinas Kesehatan |

| NO | STRATEGI / RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 377.039.000 | 395.890.950 | 415.685.498 | 436.469.772 | 458.293.261 | 481.207.924 | | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.161.978.424,00 | 9.834.500.000,00 | 9.834.500.000,00 | 9.834.500.000,00 | 9.834.500.000,00 | 9.834.500.000 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 326.500.000,00 | 550.000.000,00 | 616.000.000,00 | 689.920.000,00 | 772.710.400,00 | 865.435.648 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 11.532.136.600,00 | 5.340.100.000,00 | 5.340.100.000,00 | 5.340.100.000,00 | 5.340.100.000,00 | 5.340.100.000 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | **Sistem Manajemen** | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 160.572.266.028 | 168.600.879.329 | 177.030.923.296 | 185.882.469.461 | 195.176.592.934 | 204.935.422.580 | | Dinas Kesehatan |

| NO | STRATEGI / RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.431.419.257,00 | 37.811.296.175,00 | 45.202.773.335,00 | 50.222.773.585,00 | 56.081.087.447,00 | 62.628.090.052,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 80.690.000,00 | 81.845.370,00 | 82.975.517,00 | 84.105.664,00 | 85.235.812,00 | 86.365.960 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 709.805.000 | 745.295.250 | 782.560.013 | 821.688.013 | 862.772.414 | 905.911.034 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian |

| NO | STRATEGI / RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | | Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| | **Keterlibatan Masyarakat** | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 41.190.000 | 43.249.500 | 45.411.975 | 47.682.574 | 50.066.702 | 52.570.038 | | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 53.984.000,00 | 54.756.977,00 | 55.513.079,00 | 56.269.181,00 | 57.025.283,00 | 57.781.385 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 37.550.000,00 | 38.087.664,00 | 38.613.591,00 | 39.139.518,00 | 39.665.445,00 | 40.191.372 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | 44.840.000,00 | 45.482.047,00 | 46.110.078,00 | 46.738.109,00 | 47.366.139,00 | 47.994.169 | | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | STRATEGI / RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 6.080.809.939,00 | 6.445.930.056,00 | 6.534.937.531,00 | 6.623.945.005,00 | 6.712.952.480,00 | 6.712.952.480,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 20.000.000,00 | 387.469.715,00 | 392.820.022,00 | 398.170.328,00 | 403.520,00 | 408.870.940 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.814.596.180,00 | 1.552.286.000,00 | 2.552.286.000,00 | 2.552.286.000,00 | 2.552.286.000,00 | 2.552.286.000 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | **Kemitraan** | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 156.043.000 | 156.043.000 | 163.845.150 | 172.037.408 | 180.639.278 | 189.671.242 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 408.542.250 | 428.969.363 | 450.417.831 | 472.938.722 | 496.585.658 | 521.414.941 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, |

| NO | STRATEGI / RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | | | | | | dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 267.892.500 | 281.287.125 | 295.351.481 | 310.119.055 | 325.625.008 | 341.906.258 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| | **Teknologi Informasi (potensial)** | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 73.912.820.511 | 77.608.461.537 | 81.488.884.613 | 85.563.328.844 | 89.841.495.286 | 94.333.570.051 | | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 396.935.000 | 624.580.000 | 763.286.000 | 789.324.000 | 812.926.000 | 839.942.000 | | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 165.630.000 | 188.315.500 | 488.400.000 | 557.175.000 | 600.950.000 | 629.725.000 | | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN | 11.715.000 | 44.715.000 | 288.000.000 | 45.000.000 | 45.360.000 | 45.700.000 | | Dinas Sosial |

| NO | STRATEGI / RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 5.571.522.200 | 5.169.571.500 | 4.871.276.500 | 4.450.776.500 | 4.020.411.500 | 3.580.176.500 | | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 426.894.000 | 456.195.000 | 896.605.000 | 963.680.000 | 942.280.000 | 1.005.380.000 | | Dinas Sosial |
| | **Akreditasi Fasyankes** | PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | Dinas Kesehatan |
| | **Mutu & Keselamatan Pasien (PMKP)** | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 73.912.820.511 | 77.608.461.537 | 81.488.884.613 | 85.563.328.844 | 89.841.495.286 | 94.333.570.051 | | Dinas Kesehatan |
| | **Pemantauan dan Evaluasi** | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 22.913.772.800,00 | 23.154.673.000,00 | 25.815.005.900,00 | 29.961.998.900,00 | 30.123.690.900,00 | 30.301.552.900,00 | | Sekretariat Daerah |

| NO | STRATEGI / RENCANA AKSI | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | LOKASI | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3 DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 30.599.800,00 | 31.038.049,00 | 31.466.632,00 | 31.895.215,00 | 32.323.799,00 | 32.752.383 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.204.392.100,00 | 2.235.955.967,00 | 2.266.830.766,00 | 2.297.705.565,00 | 2.328.580.363,00 | 2.359.455.161 | | Dinas Lingkungan Hidup |

*Sumber : Data diolah Bapperida, 2025*

## XV. Penguatan Tata Kelola Wilayah dan Antisipasi Pemekaran Wilayah (Cilangkahan)

Dalam rangka menjawab tantangan pelayanan publik yang merata, percepatan pembangunan wilayah, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan, Kabupaten Lebak menghadapi isu strategis mengenai potensi pemekaran wilayah, khususnya di bagian selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan kebutuhan pembangunan yang spesifik. Aspirasi pemekaran wilayah, sebagaimana telah berkembang di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, termasuk rencana pembentukan Kabupaten Cilangkahan, merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang perlu direspons secara sistematis, bertahap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak memandang perlu untuk menyusun arah kebijakan dan strategi dalam **mengantisipasi** kemungkinan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), dengan fokus pada penguatan kapasitas wilayah, kesiapan kelembagaan, dan pembenahan infrastruktur dasar di kawasan calon DOB.

Arah Kebijakan Pemekaran Wilayah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan terkait kajian pemekaran wilayah.
2. Menyusun dan memutakhirkan data dukung kelayakan daerah otonomi baru.
3. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pelayanan publik di wilayah selatan Kabupaten Lebak.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di wilayah yang berpotensi menjadi DOB.
5. Membangun forum konsultasi publik dan partisipasi masyarakat untuk menghimpun aspirasi dan komitmen pembangunan wilayah secara inklusif.

Strategi Pembangunan dalam rangka antisipasi pemekaran wilayah adalah sebagai berikut:

- Penguatan basis data spasial dan sosial ekonomi wilayah selatan sebagai dasar penyusunan dokumen akademik pemekaran.
- Pelaksanaan kajian teknokratik kelayakan DOB sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri.

- Penataan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan publik pada wilayah yang memiliki peluang menjadi ibukota daerah baru.
- Penyusunan roadmap pemekaran wilayah yang sinkron dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten Lebak.

Indikator Kinerja:

- Tersusunnya dokumen kajian kelayakan DOB (naskah akademik & RUU usulan DOB).
- Meningkatnya cakupan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah selatan.
- Terbentuknya forum koordinasi dan konsultasi DOB bersama pemprov dan pemerintah pusat.

**Tabel 3. 25 Matriks Program Pendukung Antisipasi Pemekaran Kabupaten Cilangkahan**

| Program Strategis | Kegiatan Prioritas | Output | Indikator Kinerja | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| Penguatan Perencanaan Wilayah DOB | - Kajian kelayakan DOB (geografi, ekonomi, sosial)<br>- Penyusunan naskah akademik DOB | Dokumen kajian lengkap | Dokumen kajian & naskah DOB selesai | Bapperida, Bagian Pemerintahan |
| Konsolidasi Aspirasi & Dukungan Masyarakat | - Sosialisasi & diskusi publik pemekaran<br>- Pembentukan forum koordinasi daerah DOB | Forum & notulen aspirasi masyarakat | Jumlah forum & persentase dukungan masyarakat | Setda, Camat, DPRD |
| Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah Selatan | - Pembangunan jalan akses, kantor pelayanan, dan jaringan air bersih | Infrastruktur minimal siap | Progres pembangunan fisik di wilayah DOB (%) | Dinas PU, Dinkes, Diskominfo |
| Penguatan Pelayanan Publik & SDM Calon DOB | - Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi<br>- Pelatihan SDM birokrasi | Layanan dasar meningkat | Jumlah layanan publik terbentuk & jumlah SDM dilatih | Dikbud, Dinkes, BKPSDM |
| Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pusat | - Audiensi dan koordinasi ke Pemprov & Kemendagri | Komunikasi lintas-pemerintah terbangun | Jumlah pertemuan dan dokumen hasil konsultasi | Setda, Gubernur, Bagian Otda |

### 3.2.1.3. Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program pada dasarnya merupakan "*a set of related measures or activities with a particular long-term aim",* atau *"a planned series of future events or performances" (OED,* 2018) dalam terjemahannya yaitu "Seperangkat tindakan atau kegiatan terkait dengan tujuan jangka panjang tertentu", atau "serangkaian acara atau pertunjukan yang akan datang" (OED, 2018). Karenanya eksistensi program berada pada level operasional, yang memuat rencana kegiatan, beserta ukuran-ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilannya. Dalam perspektif Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, program merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan serta sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah dimaknai sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Berdasarkan definisi dan ruang lingkup di atas, program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 ini diformulasikan sebagai program prioritas guna mengoperasionalisasikan strategi agar mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada matriks berikut ini:

**Tabel 3. 26 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029**

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| *20252029 - Mewujudkan Kabupaten Lebak yang RUKUN, UNGGUL, HEGAR, AMAN, dan YAKIN (RUHAY)* | | | | | | |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berbasis Digitalisasi | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | | | Indeks Daya Saing Daerah(Angka) | | |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks) | | |
| | | Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin) | | |
| | | | | Nilai SAKIP (poin) | | |
| | | | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | | |
| | | | | Indeks Pemerintah Digital (Nilai) | | |
| | | | | Opini BPK (Level) | | |
| | | | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Angka) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (%) | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | |
| | | | Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum di daerah | Persentase Penegakan Perda (%) | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berjalan dengan Baik (%) | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu (%) | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian | Persentase Jabatan yang terisi berdasarkan perundang-undangan (%) | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | |
| | | | | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah (%) | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi ASN (%) | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | | Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, serta Sertifikasi Kompetensi | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%) | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%) | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pemerintahan Daerah (Nilai) | | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran | Persentase Penurunan SILPA (%) | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| | | | | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%) | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| | | | | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%) | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| | | | | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%) | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| | | | | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%) | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai) | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Persentase pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat waktu (%) | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kewenangan Pemerintah Daerah (%) | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola | Persentase Peningkatan | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengembangan Karir ASN | Kualifikasi Pendidikan ASN (%) | | |
| | | | Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%) | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | |
| | | | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | |
| | | | Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah | | Rasio Kemandirian Daerah (Persentase) | | |
| | | | Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah (%) | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan Peraturan Perundangan-perundangan | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Persentase Pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel (%) | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan | | Persentase Desa Mandiri (%) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemerintahan Desa | | | | |
| | | | Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) | 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Penataan Desa | Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) | 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| Meningkatkan Hilirisasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif | | | Indeks Gini(Poin) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | | Kontibusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) | | |
| | | | | Tingkat Kemiskinan (%) | | |
| | | | | PDRB Per Kapita (Rp. Juta Per Tahun) | | |
| | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | |
| | | | | Daya Beli (Rupiah) | | |
| | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | | |
| | | | | Persentase Pertumbuhan Investasi (%) | | |
| | | | | Tingkat Inflasi ((%)) | | |
| | | | | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | | |
| | | | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | |
| | | | Meningkatnya Bibit ternak dan hijauan Pakan yang berkesinambungan | Persentase penerapan GBP,GHP,atau GFP (%) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya Daya Saing UMKM | Persentase Peningkatan Aset/Omset Usaha Mikro yang sudah di Fasilitasi (%) | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | |
| | | | Meningkatnya Dokumen Non Perizinan usaha yang diterbitkan | Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan (%) | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang diawasi | Jumlah pelaku usaha yang diawasi (Angka) | 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri | Rasio Kewirausahaan (Persentase) | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | |
| | | | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | |
| | | | | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Kemudahan BerInvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten (%) | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri Yang Dikeluarkan (%) | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian | Persentasi Pengurus dan Pengawas Koperasi yang | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bersertifikat Kompetensi (%) | | |
| | | | Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Industri | Persentase Terlaksananya Pembangunan Sumber Daya Industri Berdasarkan RPIK (%) | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| | | | Meningkatnya Penagananan Bencana Pertanian dan Perubahan Iklim | Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim (%) | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%) | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | |
| | | | | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Persentase Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS (%) | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | | | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | | | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase) | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | | | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%) | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | | Meningkatnya Prasanara Pertanian Dalam Kondisi Baik | Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik (%) | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya produksi pengolahan ikan | Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (%) | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya (%) | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Ikan Tangkap (%) | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | |
| | | | Meningkatnya Produksi Pertanian | Presentase Capaian produksi komoditas tanaman pangan Holtikultura dan Perkebunan (%) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yg Berkualitas (%) | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | |
| | | | Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja) | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya SDM Pertanian yang ditingkatkan | Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan (%) | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Kerja Yang Baik | Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (%) | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | | Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik | Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik (%) | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah | | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%) | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | |
| | | | Meningkatnya Bibit ternak dan hijauan Pakan yang berkesinambungan | Persentase penerapan GBP,GHP,atau GFP (%) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor) | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (%) | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | |
| | | | Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan | Persentase Desa Rentan Rawan Pangan (%) | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | |
| | | | Meningkatnya pengawasan pangan segar | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya (%) | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | |
| | | | Meningkatnya Produksi Pertanian | Presentase Capaian produksi komoditas tanaman pangan Holtikultura dan Perkebunan (%) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik | Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik (%) | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | |
| | | | Tercapainya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase) | 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | |
| Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Menjunjung Tinggi Nilai Kesetaraan | Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berintegritas dan Inovatif | | | Indeks Pembangunan Manusia(Indeks) | | |
| | | Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Dasar | | Indeks Pendidikan (poin) | | |
| | | | | Indeks Kesehatan (poin) | | |
| | | | | Indeks Pembangunan | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gender (IPG) (Indeks) | | |
| | | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) | | |
| | | | | Prevalensi Stunting (%) | | |
| | | | Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan | Prosentase Kelembagaan Pemuda yang Aktif (%) | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan | "Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui" (%) | 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%) | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Proporsi Perempuan dalam Bidang Pembangunan (%) | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kepramukaan | Prosentase pembina dan pelatih yang bersertifikat (%) | 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun)) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan | Presentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok) (%) | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |
| | | | | Indeks Nasional Mutu (RSUD) (poin) | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |
| | | | | Indeks Nasional Mutu (Puskesmas) (poin) | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase) | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | | 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%) | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks) | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | | | |
| | | | | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%) | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
| | | | | Persentase Guru Yang Besertifikat Pendidik (%) | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
| | | | | Persentase GuruYang Memenuhi Kualifikasi S.1/D-IV (%) | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
| | | | | Indeks Pemerataan Guru (poin) | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah | APK PAUD (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | APM SD (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | APM SMP (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | APK SMP (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | |
| | | | Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga | Prosentase Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik (%) | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | |
| | | | | Prosentase Atlet yang Berprestasi (%) | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | |
| | | | | Jumlah Perolehan Medali (Angka) | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prosentase Cabor yang Berprestasi (%) | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | |
| | | | Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | | | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. (%) | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | | | Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (%) | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | | Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun (%) | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | |
| | | Terwujudnya keluarga yang berkualitas | | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. (%) | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | |
| | | | | Angka Prevalensi kontrasepsi modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (%) | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | |
| | | | | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%) | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | |
| | | | | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern. (Persentase) | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | |
| | | | Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Rata-Rata Jumlah Anak) | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | |
| | | | | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase) | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | |
| Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas, dan Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Aspek Tata Ruang | Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar yang Berkelanjutan | | | Indeks Infrastruktur Wilayah(Angka) | | |
| | | Meratanya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar yang Berkualitas | | Indeks Infrastruktur Layanan Dasar (poin) | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman (%) | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | |
| | | | | Rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (%) | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Rumah tangga dengan akses air minum layak (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten (%) | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya Konektivitas Menuju Pusat-Pusat Kegiatan | | Indeks Konektivitas Daerah (poin) | | |
| | | | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat kemantapan jalan kabupaten (%) | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Jaringan Jalan Kabupaten yang Dilengkapi Perlengkapan Jalan Dasar (%) | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |
| | | | | Persentase Kendaraan Umum Wajib Uji (%) | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |
| | | | | Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan (%) | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang Beroperasi (%) | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik (%) | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Yang Tertib Tata Ruang | | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (%) | | |
| | | | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) | Persentase penyelesaian penataan aset dan akses reforma agraria (%) | 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | |
| | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (%) | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Dokumen RDTR yang Tersusun (%) | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memperkuat Harmonisasi Lingkungan dengan Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mengurangi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | Terwujudnya pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)(poin) | | |
| | | Terselenggaranya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. | | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin) | | |
| | | | Meningkatnya layanan persampahan regional | Persentase TPA/TPST dalam Kondisi Baik (%) | 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | |
| | | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. | | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | | |
| | | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin) | | |
| | | | | Indeks Kualitas Air (Indeks) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya ketersediaan dan fungsi ruang terbuka hijau untuk mendukung kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat | Persentase RTH (Persentase) | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | |
| | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu | Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup (%) | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya respons dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup secara cepat, tepat, dan transparan | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani (%) | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | Menurunnya tingkat risiko bencana | | Indeks Risiko Bencana (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya Penanggulangan Bencana | Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kewenangan Pemerintah Daerah (%) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | | | | Persentase Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana (%) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | | | | Persentase Warga Negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana (%) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Pengungsi/Penyintas Korban Bencana (%) | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | |
| | | | | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Setelah Tanggap Darurat Bencana (%) | | |
| | | | | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%) | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | |

*Sumber : Data diolah Bapperida*

### 3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pada dasarnya merupakan rumusan kerangka pikir dan kerangka kerja untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan, sekaligus menyelesaikan beragam permasalahan daerah serta mengantisipasi sejumlah isu strategis sebagaimana telah diidentifikasi pada bab IV. Arah kebijakan memuat pilihan orientasi pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang diformulasi sebagai tema-tema utama kebijakan pembangunan daerah pada setiap tahapan pembangunan dalam periode lima tahun berlakunya RPJMD Tahun 2025-2029. Secara keseluruhan, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2025-2029 akan bergerak menuju pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Sinergi antar sektor akan diperkuat untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lebak secara adil dan merata, serta mewujudkan daerah yang berdaya saing, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Adapun arah kebijakan berdasarkan misi pada RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 3. 27 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029**

| No | Misi | Arah Kebijakan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berbasis Digitalisasi | Meningkatkan pengguna teknologi Informasi, komunikasi dan informasi pemerintah daerah serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan publik | |
| | | Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Data Statistik dalam mendukung pembangunan serta kebijakan daerah | |
| | | Penguatan keamanan informasi dan persandian Pemerintah Daerah | |
| | | Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan aset daerah yang akuntabel | |
| | | Peningkatan Rasio Kemandirian Daerah | |
| | | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | |
| | | Peningkatan Kualitas Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai | |

| No | Misi | Arah Kebijakan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Peningkatan pengembangan karier dengan manajemen talenta | |
| | | Peningkatan manajemen kinerja yang objektif dan tepat arah | |
| | | Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima dan berbasis digital | |
| | | Mewujudkan Sistem Pengawasan Internal yang handal | |
| | | Mewujudkan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah | |
| | | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | Meningkatnya Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Desa | |
| | | Mewujudkan tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah | |
| | | Meningkatkan Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | |
| | | Mewujudkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui penyusunan dokumen jangka Panjang, menengah dan tahunan. | |
| | | Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Kebijakan dan Pembangunan Daerah | |
| | | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah | |
| | | Meningkatkan Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan Pemerintah Daerah | |
| | | Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | |
| | | Meningkatkan Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | |
| | | Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital | |
| | | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM | |
| | | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan | |
| | | Meningkatkan Keberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa | |
| | | Mewujudkan pemerintahan desa yang berkinerja baik | |

| No | Misi | Arah Kebijakan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Mewujudkan kerukunan dan keamanan bermasyarakat | |
| 2 | Meningkatkan Hilirisasi ekonomi Daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Investasi, peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional | |
| | | Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan Daerah berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif, peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung serta meningkatkan daya tarik wisata | |
| | | Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan, peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit dalam Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | |
| | | Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Industri | |
| | | Terjaminnya Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan | |
| | | Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan serta Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengelolaan Hasil Produksi | |
| | | Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Peternakan | |
| | | Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah sub sektor perikanan,produksi usaha Perikanan yang mandiri dan berdaya saing | |
| | | Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan dan peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan | |
| | | Penguatan Jaringan Pemasaran Produk | |
| | | Meningkatkan Produktivitas Sektor Perindustrian dan peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perindustrian | |
| | | Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Berbasis Potensi Lokal | |
| | | Mendorong hilirisasi produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber daya lainnya melalui fasilitasi teknologi pengolahan, akses permodalan, dan standardisasi produk. | |

| No | Misi | Arah Kebijakan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Meningkatkan Produktivitas sektor UMKM, Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil | |
| | | Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta Peningkatan skala dan kualitas usaha koperasi | |
| | | Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan Hilirisasi Produk UMKM | |
| | | Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat, pemeliharaan desa adat | |
| | | Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan | |
| | | optimalisasi Penanganan PPKS, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat serta Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | |
| 3 | Misi 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Menjunjung Tinggi Nilai Kesetaraan | Peningkatan akses dan kualitas Layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal | Selaras dengan RPJMN 2025-2029 (Asta Cita 4) dan UU No. 8/2016 tentang Disabilitas. |
| | | Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan Berbasis Kompetensi | |
| | | Penguatan Pendidikan Karakter dan Nilai Kesetaraan | |
| | | Penguatan pelatihan vokasi berbasis gender untuk mengurangi kesenjangan keterampilan pekerja perempuan dan laki-laki | Mendukung SDGs 5 (Kesetaraan Gender) dan program prioritas daerah. |
| | | Revitalisasi kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai kesetaraan, kearifan lokal, dan kompetensi global untuk Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas daerah | Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD |
| | | Peningkatan akses kesehatan masyarakat untuk Memastikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tersedia bagi seluruh masyarakat | Selaras dengan RPJMN 2025-2029, Asta cita dan mendukung kepada SDGs 3 kehidupan sehat dan sejahtera |
| | | Mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan status gizi masyarakat | |

| No | Misi | Arah Kebijakan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Stunting | |
| | | Peningkatan Kesadaran Hidup Sehat dan Pencegahan Penyakit | |
| | | Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik | |
| | | Mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak | |
| | | Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak | |
| | | Penguatan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk Pembangunan SDM | |
| | | Pengendalian Kelahiran, Menurunkan TFR dan pelayanan Kesehatan Reproduksi | |
| | | Meningkatkan ketahanan keluarga dan peningkatan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat | |
| | | Meningkatkan minat dan Budaya Baca Masyarakat | |
| | | Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah | |
| | | Meningkatkan Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda, peran serta Kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dengan peningkatan keterampilan dan kompetensi pemuda agar siap menghadapi tantangan dunia kerja dan menjadi agen perubahan pembangunan | |
| | | Meningkatkan prestasi keolahragaan, jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik kabupaten Lebak | |
| | | Pengembangan pusat unggulan talenta digital untuk mempersiapkan SDM menghadapi ekonomi digital | |
| | | | |
| 4 | Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas, dan Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Aspek Tata Ruang | Peningkatan Pembangunan, pemeliharaan dan kualitas Jalan serta Jembatan yang Merata | |
| | | Pembangunan Sistem Drainase dan Sanitasi Perkotaan dan Pedesaan | |

| No | Misi | Arah Kebijakan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Peningkatan ketahanan air, pengendalian daya rusak air, serta peningkatan kualitas lingkungan air | |
| | | Peningkatan Akses, Kualitas dan penyediaan air minum | |
| | | Pengelolaan Air Limbah Terpadu dan Berkelanjutan | |
| | | Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penyediaan akses sanitasi yang layak, dan pemerataan akses perumahan | |
| | | Peningkatan konektivitas antar wilayah serta pembangunan jalan poros desa | |
| | | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh serta penanganan fungsi PSU lingkungan perumahan | |
| | | Meningkatkan ketaatan pengguna jalan, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan | |
| | | meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas | |
| | | Penguatan Penataan Ruang Berkelanjutan dan Penggunaan lahan berdasarkan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya | |
| | | | |
| 5 | Misi 5: Memperkuat Harmonisasi Lingkungan dengan Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mengurangi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup | |
| | | Mendorong pengurangan sampah dari sumbernya, meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, dan membangun fasilitas pengolahan limbah yang ramah lingkungan | |
| | | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran | |
| | | Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana | |
| | | Peningkatan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan | |
| | | Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Mitigasi dan Kesiapsiagaan | |

| No | Misi | Arah Kebijakan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Kapasitas adaptasi Perubahan Iklim pada Berbagai Sektor | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesadaran Lingkungan | |

*Sumber : Data diolah Bapperida*

# Bab 4

# Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hakikat perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan proses formulasi dalam siklus kebijakan publik yang luarannya berupa rencana tindakan yang bertujuan untuk menangani masalah yang menjadi perhatian. Sedangkan pembangunan nasional pada dasarnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (pasal 1 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Itu sebabnya sebuah dokumen rencana memuat secara gamblang rencana tindakan yang akan dijalankan dalam bentuk "Program Perangkat Daerah", yang disertai dengan kerangka pendanaan untuk mengimplementasikan program-program perangkat daerah tersebut. Selain itu disajikan pula "Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029" yang dijabarkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

## 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

Berdasarkan identifikasi atas permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dikontekstualisasi dengan visi dan misi kepala daerah, operasionalisasi dalam 5 (lima) tujuan, serta 15 (lima belas) sasaran pembangunan daerah dengan 32 (tiga puluh dua) indikator sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dijabarkan dalam program perangkat daerah yang berjumlah 127 program yang terbagi kedalam 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilihan, dan 5 unsur pelengkap pemerintahan (Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur, Pengawas, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum). Secara lebih lengkap program pembangunan daerah dimaksud diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | 1.163.993.973.685 | | 1.164.781.884.447 | | 1.165.377.942.075 | | 1.177.913.039.220 | | 1.182.515.648.262 | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 892.811.344.872 | | 893.311.344.872 | | 893.811.344.872 | | 906.240.478.626 | | 910.754.527.938 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 78,65 | 78,7 | 78,75 | 892.811.344.872 | 78,8 | 893.311.344.872 | 78,85 | 893.811.344.872 | 78,9 | 906.240.478.626 | 78,95 | 910.754.527.938 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78,48 | 78,68 | 78,88 | | 79,08 | | 79,28 | | 79,48 | | 79,68 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | 270.407.963.293 | | 270.407.963.293 | | 270.407.963.293 | | 270.407.963.293 | | 270.407.963.293 | |
| Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah | APK PAUD (%) | 50,2 | 50,25 | 50,27 | 270.407.963.293 | 50,29 | 270.407.963.293 | 50,31 | 270.407.963.293 | 50,33 | 270.407.963.293 | 50,35 | 270.407.963.293 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | APM SD (%) | 99,35 | 99,4 | 99,45 | | 99,47 | | 99,49 | | 99,51 | | 99,53 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | APK SMP (%) | 90,1 | 90,15 | 90,2 | | 90,22 | | 99,24 | | 99,26 | | 99,28 | | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Bidang Pendidikan |
| | APM SMP (%) | 77,8 | 77,9 | 78 | | 78,02 | | 78,04 | | 78,06 | | 78,08 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | 589.296.620 | | 648.226.282 | | 713.048.910 | | 784.353.801 | | 862.789.181 | |
| Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan | Presentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok) (%) | 97 | 97,1 | 97,2 | 589.296.620 | 97,22 | 648.226.282 | 97,24 | 713.048.910 | 97,26 | 784.353.801 | 97,28 | 862.789.181 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | 38.500.000 | | 42.350.000 | | 46.585.000 | | 51.243.500 | | 56.367.850 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan | Indeks Pemerataan Guru (poin) | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 38.500.000 | 0,77 | 42.350.000 | 0,79 | 46.585.000 | 0,81 | 51.243.500 | 0,83 | 56.367.850 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Persentase Guru Yang Besertifikat Pendidik (%) | 60 | 60,15 | 60,2 | | 60,22 | | 60,24 | | 60,26 | | 60,28 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Persentase GuruYang Memenuhi Kualifikasi S.1/D-IV (%) | 97 | 97,1 | 97,2 | | 97,22 | | 97,24 | | 97,26 | | 97,28 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%) | 60 | 60,15 | 60,2 | | 60,22 | | 60,24 | | 60,26 | | 60,28 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | 0 | | 220.000.000 | | 242.000.000 | | 267.000.000 | | 267.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan | "Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui" (%) | 20 | 35 | 45 | 0 | 50 | 220.000.000 | 55 | 242.000.000 | 60 | 267.000.000 | 65 | 267.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | | 146.868.900 | | 152.000.000 | | 157.000.000 | | 162.000.000 | | 167.000.000 | |
| Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah | Persentase Siswa yang dibina di bidang Bahasa dan Sastra (%) | 10 | 12 | 14 | 146.868.900 | 16 | 152.000.000 | 18 | 157.000.000 | 20 | 162.000.000 | 22 | 167.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Persentase Pengemba | 10 | 12 | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | ngan Bahasa dan Sastra (%) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | 538.348.128.698 | | 542.780.971.704 | | 548.553.028.018 | | 554.473.036.408 | | 560.581.059.480 | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 415.254.852.916 | | 419.164.969.021 | | 424.414.298.433 | | 429.811.579.922 | | 435.396.876.093 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,41 | 83,42 | 83,47 | 165.298.641.733 | 83,52 | 165.298.641.733 | 83,57 | 165.298.641.733 | 83,62 | 165.298.641.733 | 83,67 | 165.298.641.733 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat | 81,91 | 79 | 79,4 | | 79,8 | | 80,2 | | 80,6 | | 81 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 162.000.000.000 | 100 | 165.500.000.000 | 100 | 169.000.000.000 | 100 | 172.500.000.000 | 100 | 176.000.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,04 | 83,14 | 83,24 | | 83,34 | | 83,44 | | 83,54 | | 83,64 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.214.361.427 | 100 | 1.226.615.699 | 100 | 1.251.724.642 | 100 | 1.277.234.417 | 100 | 1.306.180.477 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 84,44 | 84,54 | 84,64 | | 84,74 | | 84,84 | | 84,94 | | 85,04 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.947.714.140 | 100 | 1.967.368.766 | 100 | 2.007.640.996 | 100 | 2.048.556.121 | 100 | 2.094.982.703 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,1 | 84,2 | 84,3 | | 84,4 | | 84,5 | | 84,6 | | 84,7 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.767.023.678 | 100 | 1.784.854.934 | 100 | 1.821.391.089 | 100 | 1.858.510.496 | 100 | 1.900.630.060 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 84,94 | 85,04 | 85,14 | | 85,24 | | 85,34 | | 85,44 | | 85,54 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.742.815.742 | 100 | 1.760.402.713 | 100 | 1.796.438.328 | 100 | 1.833.049.205 | 100 | 1.874.591.738 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,4 | 84,5 | 84,6 | | 84,7 | | 84,8 | | 84,9 | | 85 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.953.496.357 | 100 | 1.973.209.332 | 100 | 2.013.601.119 | 100 | 2.054.637.709 | 100 | 2.101.202.119 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,23 | 83,33 | 83,43 | | 83,53 | | 83,63 | | 83,73 | | 83,83 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.473.213.969 | 100 | 2.498.171.480 | 100 | 2.549.309.294 | 100 | 2.601.263.457 | 100 | 2.660.216.087 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,56 | 84,66 | 84,76 | | 84,86 | | 84,96 | | 85,06 | | 85,16 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.494.991.732 | 100 | 2.520.169.005 | 100 | 2.571.757.110 | 100 | 2.624.168.753 | 100 | 2.683.640.487 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 85,22 | 85,32 | 85,42 | | 85,55 | | 85,65 | | 85,75 | | 85,85 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.713.763.325 | 100 | 2.741.148.249 | 100 | 2.797.259.821 | 100 | 2.854.267.142 | 100 | 2.918.953.614 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,47 | 84,57 | 84,67 | | 84,77 | | 84,87 | | 84,97 | | 85,07 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.652.720.185 | 100 | 1.669.397.990 | 100 | 1.703.570.730 | 100 | 1.738.288.993 | 100 | 1.777.683.968 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,79 | 83,89 | 83,99 | | 84,09 | | 84,19 | | 84,29 | | 84,39 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.821.175.852 | 100 | 1.839.553.564 | 100 | 1.877.209.405 | 100 | 1.915.466.373 | 100 | 1.958.876.732 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,06 | 84,16 | 84,26 | | 84,36 | | 84,46 | | 84,56 | | 84,66 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.636.946.646 | 100 | 2.663.556.403 | 100 | 2.718.079.662 | 100 | 2.773.473.315 | 100 | 2.836.328.750 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,07 | 83,17 | 83,27 | | 83,37 | | 83,47 | | 83,57 | | 83,67 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.349.058.363 | 100 | 1.362.671.879 | 100 | 1.390.565.905 | 100 | 1.418.905.224 | 100 | 1.451.061.980 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,86 | 83,96 | 84,06 | | 84,16 | | 84,26 | | 84,36 | | 84,46 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 3.514.418.475 | 100 | 3.549.882.910 | 100 | 3.622.549.359 | 100 | 3.696.375.835 | 100 | 3.780.147.079 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 85,39 | 85,49 | 85,59 | | 85,69 | | 85,79 | | 85,89 | | 85,99 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.525.628.560 | 100 | 2.551.114.626 | 100 | 2.603.336.191 | 100 | 2.656.391.406 | 100 | 2.716.593.405 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,69 | 84,79 | 84,89 | | 84,99 | | 85,09 | | 85,19 | | 85,29 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.257.134.471 | 100 | 2.279.911.496 | 100 | 2.326.581.507 | 100 | 2.373.996.544 | 100 | 2.427.798.607 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 81,16 | 81,26 | 81,36 | | 81,46 | | 81,56 | | 81,66 | | 81,76 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 4.333.831.278 | 100 | 4.377.564.510 | 100 | 4.467.173.682 | 100 | 4.558.213.349 | 100 | 4.661.516.483 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,07 | 83,17 | 83,27 | | 83,37 | | 83,47 | | 83,57 | | 83,67 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.719.951.670 | 100 | 1.737.307.916 | 100 | 1.772.870.779 | 100 | 1.809.001.356 | 100 | 1.849.998.891 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,22 | 83,32 | 83,42 | | 83,52 | | 83,62 | | 83,72 | | 83,82 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.318.520.368 | 100 | 2.341.916.847 | 100 | 2.389.856.113 | 100 | 2.438.560.667 | 100 | 2.493.825.952 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 82,76 | 82,86 | 82,96 | | 83,06 | | 83,16 | | 83,26 | | 83,36 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.306.879.673 | 100 | 1.320.067.559 | 100 | 1.347.089.470 | 100 | 1.374.542.752 | 100 | 1.405.694.118 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,72 | 83,82 | 83,92 | | 84,02 | | 84,12 | | 84,22 | | 84,32 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.186.318.420 | 100 | 1.198.289.707 | 100 | 1.222.818.814 | 100 | 1.247.739.497 | 100 | 1.276.017.111 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,55 | 83,65 | 83,75 | | 83,85 | | 83,95 | | 84,05 | | 84,15 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.303.494.255 | 100 | 1.316.647.978 | 100 | 1.343.599.890 | 100 | 1.370.982.055 | 100 | 1.402.052.725 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 82,29 | 82,39 | 82,49 | | 82,59 | | 82,69 | | 82,79 | | 82,99 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.729.285.456 | 100 | 2.756.827.016 | 100 | 2.813.259.533 | 100 | 2.870.592.924 | 100 | 2.935.649.388 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 82,11 | 82,21 | 82,31 | | 82,41 | | 82,51 | | 82,61 | | 82,71 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.011.517.333 | 100 | 2.031.815.806 | 100 | 2.073.407.273 | 100 | 2.115.662.695 | 100 | 2.163.610.119 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,07 | 83,17 | 83,27 | | 83,37 | | 83,47 | | 83,57 | | 83,67 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.752.657.291 | 100 | 1.770.343.574 | 100 | 1.806.582.680 | 100 | 1.843.400.296 | 100 | 1.885.177.416 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 81,67 | 81,77 | 81,87 | | 81,97 | | 82,07 | | 82,17 | | 82,27 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 846.373.983 | 100 | 854.914.849 | 100 | 872.415.039 | 100 | 890.194.597 | 100 | 910.369.145 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 85,28 | 85,38 | 85,48 | | 85,58 | | 85,68 | | 85,78 | | 85,88 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.215.425.899 | 100 | 1.227.690.913 | 100 | 1.252.821.866 | 100 | 1.278.354.002 | 100 | 1.307.325.435 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,67 | 83,77 | 83,87 | | 83,97 | | 84,07 | | 84,17 | | 84,27 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.565.193.361 | 100 | 1.580.987.923 | 100 | 1.613.350.899 | 100 | 1.646.230.510 | 100 | 1.683.539.156 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 82,87 | 82,97 | 83,07 | | 83,17 | | 83,27 | | 83,37 | | 83,47 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 4.461.858.757 | 100 | 4.506.883.930 | 100 | 4.599.140.283 | 100 | 4.692.869.390 | 100 | 4.799.224.244 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,72 | 84,82 | 84,92 | | 85,02 | | 85,12 | | 85,22 | | 85,32 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 3.606.452.415 | 100 | 3.642.845.576 | 100 | 3.717.414.980 | 100 | 3.793.174.788 | 100 | 3.879.139.795 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 82,66 | 82,76 | 82,86 | | 82,96 | | 83,06 | | 83,16 | | 83,26 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.543.423.796 | 100 | 1.558.998.678 | 100 | 1.590.911.533 | 100 | 1.623.333.835 | 100 | 1.660.123.573 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 80,84 | 80,94 | 81,04 | | 81,14 | | 81,24 | | 81,34 | | 81,44 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.311.451.467 | 100 | 1.324.685.487 | 100 | 1.351.801.928 | 100 | 1.379.351.248 | 100 | 1.410.611.590 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,14 | 83,24 | 83,34 | | 83,44 | | 83,54 | | 83,64 | | 83,74 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.821.280.376 | 100 | 1.839.659.143 | 100 | 1.877.317.145 | 100 | 1.915.576.309 | 100 | 1.958.989.159 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,08 | 84,18 | 84,28 | | 84,38 | | 84,48 | | 84,58 | | 84,68 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.481.700.955 | 100 | 1.496.652.984 | 100 | 1.467.751.700 | 100 | 1.558.415.324 | 100 | 1.593.733.808 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 84,12 | 84,22 | 84,32 | | 84,42 | | 84,52 | | 84,62 | | 84,72 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.766.828.547 | 100 | 1.784.657.834 | 100 | 1.821.189.954 | 100 | 1.858.305.262 | 100 | 1.900.420.175 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,88 | 83,98 | 84,08 | | 84,18 | | 84,28 | | 84,38 | | 84,48 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 2.481.493.164 | 100 | 2.506.534.221 | 100 | 2.557.843.220 | 100 | 2.609.971.302 | 100 | 2.669.121.279 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 84,24 | 84,34 | 84,44 | | 84,54 | | 84,64 | | 84,74 | | 84,84 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.814.610.415 | 100 | 1.832.921.875 | 100 | 1.870.441.965 | 100 | 1.908.561.014 | 100 | 1.951.814.877 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,09 | 84,19 | 84,29 | | 84,39 | | 84,49 | | 84,59 | | 84,69 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.669.038.087 | 100 | 1.685.880.559 | 100 | 1.720.390.698 | 100 | 1.755.451.747 | 100 | 1.795.235.683 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,77 | 83,87 | 83,97 | | 84,07 | | 84,17 | | 84,27 | | 84,37 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 3.092.261.058 | 100 | 3.123.465.450 | 100 | 3.187.403.092 | 100 | 3.252.361.417 | 100 | 3.326.069.929 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,77 | 83,87 | 83,97 | | 84,07 | | 84,17 | | 84,27 | | 84,37 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.782.343.243 | 100 | 1.800.329.091 | 100 | 1.837.182.003 | 100 | 1.874.623.224 | 100 | 1.917.107.952 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,11 | 83,21 | 83,31 | | 83,41 | | 83,51 | | 83,61 | | 83,71 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 940.641.415 | 100 | 950.133.545 | 100 | 969.582.871 | 100 | 989.342.681 | 100 | 1.011.764.229 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,83 | 83,93 | 84,03 | | 84,13 | | 84,23 | | 84,33 | | 84,43 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.431.110.378 | 100 | 1.445.551.891 | 100 | 1.475.142.479 | 100 | 1.505.205.443 | 100 | 1.539.318.028 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 84,11 | 84,21 | 84,31 | | 84,41 | | 84,51 | | 84,61 | | 84,71 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 3.072.027.028 | 100 | 3.103.027.236 | 100 | 3.166.546.505 | 100 | 3.231.079.779 | 100 | 3.304.305.984 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,91 | 84,01 | 84,11 | | 84,21 | | 84,31 | | 84,41 | | 84,51 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Persentase jumlah BUMD dan BLUD berkinerja baik (%) | 100 | 100 | 100 | 1.325.778.173 | 100 | 861.696.144 | 100 | 879.335.148 | 100 | 897.255.736 | 100 | 917.590.310 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Indeks Kepuasan | 84,13 | 84,23 | 84,33 | | 84,43 | | 84,53 | | 84,63 | | 84,73 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 113.264.827.194 | | 113.787.554.095 | | 114.310.280.997 | | 114.833.007.898 | | 115.355.734.799 | |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | 159 | 157 | 155 | 87.121.871.194 | 153 | 87.644.598.095 | 151 | 88.167.324.997 | 149 | 88.690.051.898 | 147 | 89.212.778.799 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) | 32,4 | 28,9 | 25,3 | | 21,6 | | 17,1 | | 14,4 | | 12,1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun)) | 73,99 | 74,26 | 74,53 | | 74,8 | | 75,07 | | 75,34 | | 75,61 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatkan kuliatas kesehatan masyarakat dan perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 100 | 100 | 100 | 563.288.000 | 100 | 563.288.000 | 100 | 563.288.000 | 100 | 563.288.000 | 100 | 563.288.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Individu dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 595.649.000 | 100 | 595.649.000 | 100 | 595.649.000 | 100 | 595.649.000 | 100 | 595.649.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Individu dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 619.389.000 | 100 | 619.389.000 | 100 | 619.389.000 | 100 | 619.389.000 | 100 | 619.389.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 621.326.000 | 100 | 621.326.000 | 100 | 621.326.000 | 100 | 621.326.000 | 100 | 621.326.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 568.213.000 | 100 | 568.213.000 | 100 | 568.213.000 | 100 | 568.213.000 | 100 | 568.213.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 727.862.000 | 100 | 727.862.000 | 100 | 727.862.000 | 100 | 727.862.000 | 100 | 727.862.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 489.955.000 | 100 | 489.955.000 | 100 | 489.955.000 | 100 | 489.955.000 | 100 | 489.955.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 553.726.000 | 100 | 553.726.000 | 100 | 553.726.000 | 100 | 553.726.000 | 100 | 553.726.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 528.410.000 | 100 | 528.410.000 | 100 | 528.410.000 | 100 | 528.410.000 | 100 | 528.410.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 581.519.000 | 100 | 581.519.000 | 100 | 581.519.000 | 100 | 581.519.000 | 100 | 581.519.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 648.003.000 | 100 | 648.003.000 | 100 | 648.003.000 | 100 | 648.003.000 | 100 | 648.003.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 745.090.000 | 100 | 745.090.000 | 100 | 745.090.000 | 100 | 745.090.000 | 100 | 745.090.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 569.487.000 | 100 | 569.487.000 | 100 | 569.487.000 | 100 | 569.487.000 | 100 | 569.487.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat | 83,79 | 83,89 | 83,99 | 589.005.000 | 84,09 | 589.005.000 | 84,19 | 589.005.000 | 84,29 | 589.005.000 | 84,39 | 589.005.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Masyarakat | Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 770.055.000 | 100 | 770.055.000 | 100 | 770.055.000 | 100 | 770.055.000 | 100 | 770.055.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 613.580.000 | 100 | 613.580.000 | 100 | 613.580.000 | 100 | 613.580.000 | 100 | 613.580.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 100 | 100 | 100 | 696.227.000 | 100 | 696.227.000 | 100 | 696.227.000 | 100 | 696.227.000 | 100 | 696.227.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 602.204.000 | 100 | 602.204.000 | 100 | 602.204.000 | 100 | 602.204.000 | 100 | 602.204.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 571.008.000 | 100 | 571.008.000 | 100 | 571.008.000 | 100 | 571.008.000 | 100 | 571.008.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 625.486.000 | 100 | 625.486.000 | 100 | 625.486.000 | 100 | 625.486.000 | 100 | 625.486.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 685.265.000 | 100 | 685.265.000 | 100 | 685.265.000 | 100 | 685.265.000 | 100 | 685.265.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 578.783.000 | 100 | 578.783.000 | 100 | 578.783.000 | 100 | 578.783.000 | 100 | 578.783.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 613.262.000 | 100 | 613.262.000 | 100 | 613.262.000 | 100 | 613.262.000 | 100 | 613.262.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,31 | 100 | 100 | 637.155.000 | 100 | 637.155.000 | 100 | 637.155.000 | 100 | 637.155.000 | 100 | 637.155.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 587.504.000 | 100 | 587.504.000 | 100 | 587.504.000 | 100 | 587.504.000 | 100 | 587.504.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 471.135.000 | 100 | 471.135.000 | 100 | 471.135.000 | 100 | 471.135.000 | 100 | 471.135.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 549.456.000 | 100 | 549.456.000 | 100 | 549.456.000 | 100 | 549.456.000 | 100 | 549.456.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 634.432.000 | 100 | 634.432.000 | 100 | 634.432.000 | 100 | 634.432.000 | 100 | 634.432.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 603.992.000 | 100 | 603.992.000 | 100 | 603.992.000 | 100 | 603.992.000 | 100 | 603.992.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 688.531.000 | 100 | 688.531.000 | 100 | 688.531.000 | 100 | 688.531.000 | 100 | 688.531.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 574.422.000 | 100 | 574.422.000 | 100 | 574.422.000 | 100 | 574.422.000 | 100 | 574.422.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 630.816.000 | 100 | 630.816.000 | 100 | 630.816.000 | 100 | 630.816.000 | 100 | 630.816.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 700.574.000 | 100 | 700.574.000 | 100 | 700.574.000 | 100 | 700.574.000 | 100 | 700.574.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 627.601.000 | 100 | 627.601.000 | 100 | 627.601.000 | 100 | 627.601.000 | 100 | 627.601.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 494.368.000 | 100 | 494.368.000 | 100 | 494.368.000 | 100 | 494.368.000 | 100 | 494.368.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 580.635.000 | 100 | 580.635.000 | 100 | 580.635.000 | 100 | 580.635.000 | 100 | 580.635.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 599.406.000 | 100 | 599.406.000 | 100 | 599.406.000 | 100 | 599.406.000 | 100 | 599.406.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 98,89 | 100 | 100 | 670.424.000 | 100 | 670.424.000 | 100 | 670.424.000 | 100 | 670.424.000 | 100 | 670.424.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 94,12 | 100 | 100 | 674.451.000 | 100 | 674.451.000 | 100 | 674.451.000 | 100 | 674.451.000 | 100 | 674.451.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 100 | 100 | 100 | 580.789.000 | 100 | 580.789.000 | 100 | 580.789.000 | 100 | 580.789.000 | 100 | 580.789.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 94,12 | 100 | 100 | 539.670.000 | 100 | 539.670.000 | 100 | 539.670.000 | 100 | 539.670.000 | 100 | 539.670.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya KualitasKesehatan Perorangan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 100 | 100 | 100 | 512.114.000 | 100 | 512.114.000 | 100 | 512.114.000 | 100 | 512.114.000 | 100 | 512.114.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 100 | 100 | 100 | 628.689.000 | 100 | 628.689.000 | 100 | 628.689.000 | 100 | 628.689.000 | 100 | 628.689.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 9.042.625.588 | | 9.042.625.588 | | 9.042.625.588 | | 9.042.625.588 | | 9.042.625.588 | |
| Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 9.042.625.588 | 100 | 9.042.625.588 | 100 | 9.042.625.588 | 100 | 9.042.625.588 | 100 | 9.042.625.588 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.02.04 - PROGRAM | | | | | 377.039.000 | | 377.039.000 | | 377.039.000 | | 377.039.000 | | 377.039.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%) | 100 | 100 | 100 | 377.039.000 | 100 | 377.039.000 | 100 | 377.039.000 | 100 | 377.039.000 | 100 | 377.039.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 408.784.000 | | 408.784.000 | | 408.784.000 | | 408.784.000 | | 408.784.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Indeks Nasional Mutu (Puskesmas) (poin) | 0 | 0 | 10 | 46.000.000 | 11 | 46.000.000 | 12 | 46.000.000 | 13 | 46.000.000 | 14 | 46.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kesehatan |
| | Indeks Nasional Mutu (RSUD) (poin) | 0 | 0 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 46,3 | 46,3 | 50 | | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 14.794.000 | 100 | 14.794.000 | 100 | 14.794.000 | 100 | 14.794.000 | 100 | 14.794.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 81,12 | 100 | 100 | 2.159.000 | 100 | 2.159.000 | 100 | 2.159.000 | 100 | 2.159.000 | 100 | 2.159.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 5.299.000 | 100 | 5.299.000 | 100 | 5.299.000 | 100 | 5.299.000 | 100 | 5.299.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 7.680.000 | 100 | 7.680.000 | 100 | 7.680.000 | 100 | 7.680.000 | 100 | 7.680.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 15.636.000 | 100 | 15.636.000 | 100 | 15.636.000 | 100 | 15.636.000 | 100 | 15.636.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 81,12 | 100 | 100 | 2.180.000 | 100 | 2.180.000 | 100 | 2.180.000 | 100 | 2.180.000 | 100 | 2.180.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 22.115.000 | 100 | 22.115.000 | 100 | 22.115.000 | 100 | 22.115.000 | 100 | 22.115.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 12.554.000 | 100 | 12.554.000 | 100 | 12.554.000 | 100 | 12.554.000 | 100 | 12.554.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 1.240.000 | 100 | 1.240.000 | 100 | 1.240.000 | 100 | 1.240.000 | 100 | 1.240.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 81,12 | 100 | 100 | 10.800.000 | 100 | 10.800.000 | 100 | 10.800.000 | 100 | 10.800.000 | 100 | 10.800.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 29.564.000 | 100 | 29.564.000 | 100 | 29.564.000 | 100 | 29.564.000 | 100 | 29.564.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 94,31 | 100 | 100 | 3.584.000 | 100 | 3.584.000 | 100 | 3.584.000 | 100 | 3.584.000 | 100 | 3.584.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 81,12 | 100 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 16.622.000 | 100 | 16.622.000 | 100 | 16.622.000 | 100 | 16.622.000 | 100 | 16.622.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 1.915.000 | 100 | 1.915.000 | 100 | 1.915.000 | 100 | 1.915.000 | 100 | 1.915.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 81,12 | 100 | 100 | 4.968.000 | 100 | 4.968.000 | 100 | 4.968.000 | 100 | 4.968.000 | 100 | 4.968.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 5.548.000 | 100 | 5.548.000 | 100 | 5.548.000 | 100 | 5.548.000 | 100 | 5.548.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 13.200.000 | 100 | 13.200.000 | 100 | 13.200.000 | 100 | 13.200.000 | 100 | 13.200.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 84,12 | 100 | 100 | 2.660.000 | 100 | 2.660.000 | 100 | 2.660.000 | 100 | 2.660.000 | 100 | 2.660.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 84,12 | 100 | 100 | 13.148.000 | 100 | 13.148.000 | 100 | 13.148.000 | 100 | 13.148.000 | 100 | 13.148.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 84,12 | 100 | 100 | 7.500.000 | 100 | 7.500.000 | 100 | 7.500.000 | 100 | 7.500.000 | 100 | 7.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 3.480.000 | 100 | 3.480.000 | 100 | 3.480.000 | 100 | 3.480.000 | 100 | 3.480.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 720.000 | 100 | 720.000 | 100 | 720.000 | 100 | 720.000 | 100 | 720.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 81,12 | 100 | 100 | 16.379.000 | 100 | 16.379.000 | 100 | 16.379.000 | 100 | 16.379.000 | 100 | 16.379.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 10.918.000 | 100 | 10.918.000 | 100 | 10.918.000 | 100 | 10.918.000 | 100 | 10.918.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.200.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 2.989.000 | 100 | 2.989.000 | 100 | 2.989.000 | 100 | 2.989.000 | 100 | 2.989.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 81,12 | 100 | 100 | 11.402.000 | 100 | 11.402.000 | 100 | 11.402.000 | 100 | 11.402.000 | 100 | 11.402.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 700.000 | 100 | 700.000 | 100 | 700.000 | 100 | 700.000 | 100 | 700.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 5.820.000 | 100 | 5.820.000 | 100 | 5.820.000 | 100 | 5.820.000 | 100 | 5.820.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 81,12 | 100 | 100 | 2.836.000 | 100 | 2.836.000 | 100 | 2.836.000 | 100 | 2.836.000 | 100 | 2.836.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 | 100 | 1.200.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 19.532.000 | 100 | 19.532.000 | 100 | 19.532.000 | 100 | 19.532.000 | 100 | 19.532.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 11.406.000 | 100 | 11.406.000 | 100 | 11.406.000 | 100 | 11.406.000 | 100 | 11.406.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang | 81,12 | 100 | 100 | 29.529.000 | 100 | 29.529.000 | 100 | 29.529.000 | 100 | 29.529.000 | 100 | 29.529.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Bidang Kesehatan | Diberdayakan (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%) | 81,12 | 100 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.200.000 | 100 | 7.200.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Tingkat Capaian SPM (%) | 100 | 100 | 100 | 15.707.000 | 100 | 15.707.000 | 100 | 15.707.000 | 100 | 15.707.000 | 100 | 15.707.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | | | | | 107.748.448.905 | | 147.654.603.000 | | 133.868.772.000 | | 118.951.148.000 | | 121.330.170.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 19.990.247.119 | | 20.347.805.000 | | 20.754.760.000 | | 21.169.856.000 | | 21.593.252.000 | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 84,3 | 84,35 | 84,4 | 19.990.247.119 | 84,45 | 20.347.805.000 | 84,5 | 20.754.760.000 | 84,55 | 21.169.856.000 | 84,6 | 21.593.252.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,47 | 84 | 84,1 | | 84,2 | | 84,3 | | 84,4 | | 84,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dan Penataan Ruang |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | 7.316.004.850 | | 7.462.326.000 | | 7.611.572.000 | | 7.763.804.000 | | 7.919.080.000 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%) | 71,93 | 72,05 | 72,66 | 7.316.004.850 | 72,72 | 7.462.326.000 | 72,79 | 7.611.572.000 | 72,88 | 7.763.804.000 | 72,95 | 7.919.080.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | 11.489.659.000 | | 11.719.452.000 | | 11.953.840.000 | | 12.192.917.000 | | 12.436.776.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Rumah tangga dengan akses air minum layak (%) | 75,24 | 75,54 | 76,02 | 11.489.659.000 | 76,50 | 11.719.452.000 | 77,00 | 11.953.840.000 | 77,50 | 12.192.917.000 | 78,00 | 12.436.776.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%) | 29,9 | 30,4 | 30,9 | | 31,4 | | 31,9 | | 32,4 | | 32,9 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPA | | | | | 815.299.800 | | 33.322.472.000 | | 17.250.000.000 | | 0 | | 0 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| HAN REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya layanan persampahan regional | Persentase TPA/TPST dalam Kondisi Baik (%) | 0 | 0 | 0 | 815.299.800 | 50 | 33.322.472.000 | 100 | 17.250.000.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | 1.136.164.924 | | 1.372.325.000 | | 1.399.772.000 | | 1.427.767.000 | | 1.456.322.000 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (%) | 73,69 | 73,75 | 73,94 | 1.136.164.924 | 74,13 | 1.372.325.000 | 74,32 | 1.399.772.000 | 74,51 | 1.427.767.000 | 74,7 | 1.456.322.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman (%) | 18,3 | 18,49 | 18,68 | | 18,87 | | 19,06 | | 19,25 | | 19,44 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | 322.553.100 | | 329.005.000 | | 335.585.000 | | 342.296.000 | | 349.142.000 | |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik (%) | 12,76 | 22,06 | 24,45 | 322.553.100 | 26,85 | 329.005.000 | 29,24 | 335.585.000 | 31,64 | 342.296.000 | 34,03 | 349.142.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.08 - PROGRAM | | | | | 2.078.210.900 | | 2.119.775.000 | | 2.162.171.000 | | 2.205.415.000 | | 2.249.523.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (%) | 80,29 | 82,48 | 84,67 | 2.078.210.900 | 86,91 | 2.119.775.000 | 89,15 | 2.162.171.000 | 91,39 | 2.205.415.000 | 93,63 | 2.249.523.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | 4.724.755.500 | | 5.032.688.000 | | 5.133.342.000 | | 5.236.009.000 | | 5.340.729.000 | |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 67,74 | 71,62 | 78,07 | 4.724.755.500 | 81,3 | 5.032.688.000 | 84,53 | 5.133.342.000 | 87,76 | 5.236.009.000 | 90,99 | 5.340.729.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | 59.572.938.312 | | 65.388.398.000 | | 66.696.166.000 | | 68.030.089.000 | | 69.390.692.000 | |
| Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat kemantapan jalan kabupaten (%) | 74,86 | 74,87 | 74,90 | 59.572.938.312 | 74,93 | 65.388.398.000 | 74,95 | 66.696.166.000 | 74,98 | 68.030.089.000 | 75,01 | 69.390.692.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | 158.440.800 | | 305.051.000 | | 311.152.000 | | 317.375.000 | | 323.722.000 | |
| Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi | Persentase layanan informasi jasa kontruksi (%) | 100 | 80 | 82 | 158.440.800 | 90 | 305.051.000 | 90 | 311.152.000 | 90 | 317.375.000 | 90 | 323.722.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | 144.174.600 | | 255.306.000 | | 260.412.000 | | 265.620.000 | | 270.932.000 | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Dokumen RDTR yang Tersusun (%) | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 144.174.600 | 10,71 | 255.306.000 | 14,29 | 260.412.000 | 17,86 | 265.620.000 | 21,43 | 270.932.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 12.867.719.739 | | 14.413.361.400 | | 14.433.361.400 | | 14.901.605.400 | | 14.491.605.400 | |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJAN | | | | | 4.181.086.016 | | 4.263.361.400 | | 4.283.361.400 | | 4.251.605.400 | | 4.341.605.400 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 82,90 | 83,00 | 83,50 | 4.181.086.016 | 83,75 | 4.263.361.400 | 84,00 | 4.283.361.400 | 84,25 | 4.251.605.400 | 84,50 | 4.341.605.400 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,70 | 84 | 84,25 | | 84,5 | | 84,75 | | 85 | | 85,25 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.02 - PROGRAM | | | | | 241.633.723 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana dan/ atau Relokasi akibat Program Pemerintah | Persentase Fasilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Akibat Program Pemerintah (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 241.633.723 | 100,00 | 250.000.000 | 100,00 | 250.000.000 | 100,00 | 250.000.000 | 100,00 | 250.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 7.670.000.000 | | 8.900.000.000 | | 8.900.000.000 | | 9.400.000.000 | | 8.900.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten (%) | 100,00 | 98,96 | 97,91 | 7.670.000.000 | 96,87 | 8.900.000.000 | 95,82 | 8.900.000.000 | 94,78 | 9.400.000.000 | 93,73 | 8.900.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Permukiman |
| 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Masyarakat yang Memiliki Rumah Layak Huni | Peningkatan Cakupan Akses Rumah Layak Huni (%) | 0 | 0,01 | 0,05 | | 0,11 | | 0,17 | | 0,23 | | 0,29 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | 775.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Perumahan yang Memiliki PSU memenuhi Syarat | Persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat (%) | 89,02 | 89,02 | 37,8 | 775.000.000 | 39,37 | 1.000.000.000 | 40,94 | 1.000.000.000 | 42,52 | 1.000.000.000 | 44,09 | 1.000.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 17.227.975.561 | | 22.429.817.337 | | 24.123.582.553 | | 22.985.612.553 | | 23.148.112.553 | |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 14.655.570.661 | | 16.698.416.337 | | 17.009.711.553 | | 16.664.711.553 | | 16.944.711.553 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 78,95 | 79 | 79,5 | 9.691.250.396 | 79,75 | 10.975.416.337 | 80 | 11.270.416.337 | 80,5 | 10.925.416.337 | 80,75 | 11.205.416.337 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,29 | 83,4 | 83,55 | | 83,65 | | 83,75 | | 83,85 | | 84 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat waktu (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kewenangan Pemerintah Daerah (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Serta Perlindungan Masyarakat |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan kebencanaan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 72,45 | 75,25 | 75,5 | 4.964.320.265 | 76,75 | 5.723.000.000 | 77,25 | 5.739.295.216 | 78 | 5.739.295.216 | 78,25 | 5.739.295.216 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,38 | 84,75 | 85 | | 85,25 | | 85,5 | | 85,75 | | 86 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 415.330.000 | | 1.230.115.000 | | 1.262.585.000 | | 1.819.615.000 | | 1.802.115.000 | |
| Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum di daerah | Persentase Penegakan Perda (%) | 98,13 | 100 | 100 | 415.330.000 | 100 | 1.230.115.000 | 100 | 1.262.585.000 | 100 | 1.819.615.000 | 100 | 1.802.115.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGU | | | | | 1.877.394.900 | | 1.552.286.000 | | 1.552.286.000 | | 1.552.286.000 | | 1.552.286.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| LANGAN BENCANA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Penanggulangan Bencana | Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kewenangan Pemerintah Daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 1.877.394.900 | 100 | 1.552.286.000 | 100 | 1.552.286.000 | 100 | 1.552.286.000 | 100 | 1.552.286.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman | 0,04 | 0,07 | 0,11 | | 0,15 | | 0,19 | | 0,22 | | 0,26 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Bencana (%) | | | | | | | | | | | | | Masyarakat |
| | Persentase Warga Negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON | | | | | 279.680.000 | | 2.949.000.000 | | 4.299.000.000 | | 2.949.000.000 | | 2.849.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| KEBAKARAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) | 90,37 | 100 | 100 | 279.680.000 | 100 | 2.949.000.000 | 100 | 4.299.000.000 | 100 | 2.949.000.000 | 100 | 2.849.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | 11.332.992.044 | | 12.479.715.496 | | 12.127.210.988 | | 11.874.013.585 | | 11.532.641.488 | |
| 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 4.890.444.844 | | 5.034.847.996 | | 5.183.856.488 | | 5.314.586.085 | | 5.294.112.988 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 81,95 | 81,98 | 82 | 4.890.444.844 | 82,5 | 5.034.847.996 | 83 | 5.183.856.488 | 83,5 | 5.314.586.085 | 84 | 5.294.112.988 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,15 | 85 | 85,5 | | 86 | | 86,5 | | 87 | | 87,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | 708.580.000 | | 763.286.000 | | 789.324.000 | | 812.926.000 | | 839.942.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kesejahter | 100 | 100 | 0 | 708.580.000 | 0 | 763.286.000 | 0 | 789.324.000 | 0 | 812.926.000 | 0 | 839.942.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | aan Sosial (%) | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase) | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase) | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA | | | | | 9.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | Persentase Tingkat Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan (%) | 50 | 100 | 0 | 9.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%) | 5 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Warga Negara | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Sosial |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | 437.063.000 | | 896.605.000 | | 963.680.000 | | 942.280.000 | | 1.005.380.000 | |
| Meningkatnya rehabilitasi sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (%) | 97,47 | 100 | 0 | 437.063.000 | 0 | 896.605.000 | 0 | 963.680.000 | 0 | 942.280.000 | 0 | 1.005.380.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan | 97,73 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Dasarnya (%) | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase anak terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 91 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase lanjut usia terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 90 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase gelandang dan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 100 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 93,63 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Sosial |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | 5.087.873.700 | | 4.974.576.500 | | 4.554.175.500 | | 4.123.911.500 | | 3.683.781.500 | |
| Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Persentase Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS (%) | 99,9 | 100 | 0 | 5.087.873.700 | 0 | 4.974.576.500 | 0 | 4.554.175.500 | 0 | 4.123.911.500 | 0 | 3.683.781.500 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | (Persentase) | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase) | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%) | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | 188.315.500 | | 488.400.000 | | 557.175.000 | | 600.950.000 | | 629.725.000 | |
| Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Pengungsi/ | 100 | 100 | 0 | 188.315.500 | 0 | 488.400.000 | 0 | 557.175.000 | 0 | 600.950.000 | 0 | 629.725.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Penyintas Korban Bencana (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Sosial |
| | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%) | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%) | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN | | | | | 11.715.000 | | 288.000.000 | | 45.000.000 | | 45.360.000 | | 45.700.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota (%) | 100 | 100 | 0 | 11.715.000 | 0 | 288.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.360.000 | 0 | 45.700.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%) | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | 5.754.674.414 | | 5.521.205.600 | | 6.852.905.200 | | 5.825.450.000 | | 6.523.320.000 | |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 3.484.220.714 | | 3.944.755.600 | | 5.480.305.200 | | 4.315.050.000 | | 4.930.850.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,01 | 84 | 84,5 | 3.484.220.714 | 85 | 3.944.755.600 | 85,5 | 5.480.305.200 | 86 | 4.315.050.000 | 86,5 | 4.930.850.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 76,1 | 77 | 77,5 | | 78 | | 78,5 | | 79 | | 79,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | 105.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 85.000.000 | |
| Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun (%) | - | - | 100 | 105.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 100 | 85.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Tenaga Kerja |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | 581.031.100 | | 824.600.000 | | 607.200.000 | | 666.000.000 | | 790.270.000 | |
| Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja) | 50.983.909,51 | 51.250.000 | 52.550.000 | 581.031.100 | 53.750.000 | 824.600.000 | 54.850.000 | 607.200.000 | 55.500.000 | 666.000.000 | 56.250.000 | 790.270.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | 1.243.440.000 | | 458.350.000 | | 449.500.000 | | 505.900.000 | | 355.200.000 | |
| Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%) | 23 | 25 | 27,5 | 1.243.440.000 | 30 | 458.350.000 | 32,5 | 449.500.000 | 35 | 505.900.000 | 37,5 | 355.200.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | 340.982.600 | | 293.500.000 | | 315.900.000 | | 338.500.000 | | 362.000.000 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Kerja Yang Baik | Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (%) | 8,6 | 9 | 9,5 | 340.982.600 | 11,3 | 293.500.000 | 12,5 | 315.900.000 | 14 | 338.500.000 | 15,5 | 362.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 1.810.754.750 | | 1.892.766.488 | | 1.978.878.812 | | 2.069.296.753 | | 2.164.235.589,5 | |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN | | | | | 320.000.000 | | 336.000.000 | | 352.800.000 | | 370.440.000 | | 388.962.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PEREMPUAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 40,97 | 46 | 46 | 320.000.000 | 48 | 336.000.000 | 50 | 352.800.000 | 50 | 370.440.000 | 50 | 388.962.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 57,53 | 60 | 62 | | 64 | | 66 | | 68 | | 70 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Proporsi Perempuan dalam Bidang | 16 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Pembangunan (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | 447.892.500 | | 466.024.125 | | 485.062.331 | | 505.052.448 | | 526.042.070 | |
| Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 100 | 100 | 100 | 447.892.500 | 100 | 466.024.125 | 100 | 485.062.331 | 100 | 505.052.448 | 100 | 526.042.070 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Presentase Penanganan Kasus Kekerasan | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | terhadap Perempuan (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. (%) | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | | 0,0005 | | 0,0004 | | 0,0004 | | 0,0004 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 100.000.000 | | 105.000.000 | | 110.250.000 | | 115.762.500 | | 121.550.625 | |
| Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam | Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA | 60 | 63 | 66 | 100.000.000 | 69 | 105.000.000 | 72 | 110.250.000 | 75 | 115.762.500 | 78 | 121.550.625 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak | ) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | 100.000.000 | | 105.000.000 | | 110.250.000 | | 115.762.500 | | 121.550.625 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak | Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan atau Penyusunan Kebijakan (%) | 60 | 65 | 65 | 100.000.000 | 70 | 105.000.000 | 70 | 110.250.000 | 75 | 115.762.500 | 80 | 121.550.625 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06 - PROGRAM | | | | | 250.000.000 | | 262.500.000 | | 275.625.000 | | 289.406.250 | | 303.876.562,5 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terjaminnya Pemenuhan Hak semua Anak secara Komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | 51,96 | 55 | 60 | 250.000.000 | 62 | 262.500.000 | 64 | 275.625.000 | 66 | 289.406.250 | 68 | 303.876.562,5 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Presentase Lembaga Masyarakat yang Aktif dalam Lembaga Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (%) | 80 | 85 | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUN | | | | | 592.862.250 | | 618.242.363 | | 644.891.481 | | 672.873.055 | | 702.253.707 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| GAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah lainnya terhadap Anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%) | 85 | 85 | 85 | 592.862.250 | 85 | 618.242.363 | 85 | 644.891.481 | 85 | 672.873.055 | 85 | 702.253.707 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | 66,43 | 70 | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%) | 0.0089: 0.0089 | 0.0089: 0.0089 | 0.0089: 0.0089 | | 0.0079: 0.0079 | | 0.0079: 0.0079 | | 0.0079: 0.0079 | | 0.0069: 0.0069 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | 3.838.828.763 | | 5.670.164.236 | | 5.935.210.447 | | 5.800.708.969 | | 5.965.872.417 | |
| 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.313.439.663 | | 3.715.454.236 | | 3.885.500.447 | | 4.050.998.969 | | 4.201.162.417 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 82,7 | 83 | 83,3 | 3.313.439.663 | 83,6 | 3.715.454.236 | 83,9 | 3.885.500.447 | 84,2 | 4.050.998.969 | 84,5 | 4.201.162.417 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Pangan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 81,2 | 83 | 83 | | 83 | | 83 | | 83 | | 83 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | 0 | | 875.000.000 | | 875.000.000 | | 875.000.000 | | 875.000.000 | |
| Tercapainya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase) | 49,33 | 52 | 54,51 | 0 | 57,1 | 875.000.000 | 59,69 | 875.000.000 | 62,28 | 875.000.000 | 64,87 | 875.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.03 - PROGRAM | | | | | 413.583.600 | | 824.710.000 | | 899.710.000 | | 579.710.000 | | 594.710.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (%) | 84,97 | 85 | 85,5 | 413.583.600 | 86 | 824.710.000 | 86,5 | 899.710.000 | 87 | 579.710.000 | 87,5 | 594.710.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor) | 93,2 | 93,4 | 93,6 | | 93,8 | | 94 | | 94,2 | | 94,4 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | 48.058.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | |
| Meningkatnya | Persentase Desa | 39,71 | 39,46 | 39,21 | 48.058.000 | 38,96 | 105.000.000 | 38,71 | 105.000.000 | 38,46 | 105.000.000 | 38,21 | 105.000.000 | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Penanganan Daerah Rawan Pangan | Rentan Rawan Pangan (%) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | 63.747.500 | | 150.000.000 | | 170.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | |
| Meningkatnya pengawasan pangan segar | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | 97,18 | 97,19 | 97,2 | 63.747.500 | 97,25 | 150.000.000 | 97,3 | 170.000.000 | 97,35 | 190.000.000 | 97,4 | 190.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | 697.500.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |
| 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | 49.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 49.000.000 | 100,00 | 100.000.000 | 100,00 | 100.000.000 | 100,00 | 100.000.000 | 100,00 | 100.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, | | | | | 648.500.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) | Persentase penyelesaian penataan aset dan akses reforma agraria (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 648.500.000 | 100,00 | 350.000.000 | 100,00 | 350.000.000 | 100,00 | 350.000.000 | 100,00 | 350.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 21.031.556.667 | | 57.419.848.173 | | 46.205.836.939 | | 31.489.263.202 | | 31.636.244.492 | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 12.942.555.267 | | 12.986.202.471 | | 13.098.209.902 | | 13.210.217.333 | | 13.322.224.763 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 81,9 | 82 | 82,25 | 12.942.555.267 | 82,5 | 12.986.202.471 | 82,75 | 13.098.209.902 | 83 | 13.210.217.333 | 83,25 | 13.322.224.763 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,51 | 84,75 | 85 | | 85,25 | | 85,5 | | 85,75 | | 86 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 22.519.000 | | 350.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| Meningkatnya integrasi dokumen perencanaan lingkungan hidup dalam perencanaan | Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan | 100 | 100 | 100 | 22.519.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkun |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| pembangunan daerah | perencanaan Daerah (%) | | | | | | | | | | | | | gan Hidup |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1.284.643.700 | | 2.266.830.766 | | 2.297.705.565 | | 2.328.580.363 | | 2.359.455.161 | |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu | Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup (%) | 81,75 | 81,77 | 81,8 | 1.284.643.700 | 81,85 | 2.266.830.766 | 81,9 | 2.297.705.565 | 81,95 | 2.328.580.363 | 82 | 2.359.455.161 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | 143.424.000 | | 283.424.000 | | 283.424.000 | | 283.424.000 | | 283.424.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya ketersediaan dan fungsi ruang terbuka hijau untuk mendukung kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat | Persentase RTH (Persentase) | 9,5 | 9,5 | 9,55 | 143.424.000 | 9,56 | 283.424.000 | 9,58 | 283.424.000 | 9,59 | 283.424.000 | 9,6 | 283.424.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | 15.529.600 | | 31.466.632 | | 31.895.215 | | 32.323.799 | | 32.752.383 | |
| Meningkatnya pengelolaan B3 dan limbah B3 | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang | 31,37 | 32 | 34 | 15.529.600 | 35,24 | 31.466.632 | 36,45 | 31.895.215 | 37,04 | 32.323.799 | 38,53 | 32.752.383 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | melakukan pengelolaan Limbah B3 (%) (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | 42.779.800 | | 82.975.517 | | 84.105.664 | | 85.235.812 | | 86.365.960 | |
| Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan | 60,78 | 62 | 64 | 42.779.800 | 66,67 | 82.975.517 | 68,22 | 84.105.664 | 70,37 | 85.235.812 | 72,48 | 86.365.960 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkun |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan persetujuan PPLH | persetujuan lingkungan (%) (%) | | | | | | | | | | | | | gan Hidup |
| 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | | | 11.760.000 | | 46.110.078 | | 46.738.109 | | 47.366.139 | | 47.994.169 | |
| Terfasilitasinya perlindungan hak MHA dan pelestarian kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan | Persentase MHA yang mendapatkan pemberdayaan/ Kemitraan/ pendampingan/ penguatan (%) | 25 | 37,5 | 37,5 | 11.760.000 | 44,44 | 46.110.078 | 55,56 | 46.738.109 | 66,67 | 47.366.139 | 77,78 | 47.994.169 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 25.869.000 | | 46.274.610 | | 46.904.882 | | 47.535.153 | | 48.165.424 | |
| Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, dan peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan | Persentase Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat (%) | 22,73 | 53,33 | 53,33 | 25.869.000 | 60 | 46.274.610 | 66,67 | 46.904.882 | 73,33 | 47.535.153 | 80 | 48.165.424 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 27.969.000 | | 55.513.079 | | 56.269.181 | | 57.025.283 | | 57.781.385 | |
| Meningkatnya motivasi dan partisipasi aktif masyarakat, komunitas, usaha dan/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian apresiasi atas inisiatif dan inovasi lingkungan | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup (%) | 56,67 | 60 | 63,64 | 27.969.000 | 64,29 | 55.513.079 | 66,67 | 56.269.181 | 68,75 | 57.025.283 | 72,22 | 57.781.385 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGAN | | | | | 23.857.500 | | 38.613.591 | | 39.139.518 | | 39.665.445 | | 40.191.372 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| AN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya respons dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup secara cepat, tepat, dan transparan | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani (%) | 100 | 100 | 100 | 23.857.500 | 100 | 38.613.591 | 100 | 39.139.518 | 100 | 39.665.445 | 100 | 40.191.372 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | 6.490.649.800 | | 41.232.437.429 | | 29.721.444.903 | | 14.857.889.875 | | 14.857.889.875 | |
| Meningkatnya tata kelola persampahan | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) | 21,97 | 23,95 | 25,84 | 6.490.649.800 | 28,2 | 41.232.437.429 | 30,6 | 29.721.444.903 | 32,92 | 14.857.889.875 | 35,05 | 14.857.889.875 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 8.913.939.098 | | 10.352.773.344 | | 10.397.773.344 | | 11.324.948.069 | | 11.540.125.863 | |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 8.743.939.098 | | 10.012.773.344 | | 10.012.773.344 | | 10.874.948.069 | | 11.015.125.863 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 82,65 | 82,75 | 82,85 | 8.743.939.098 | 82,95 | 10.012.773.344 | 83,05 | 10.012.773.344 | 83,15 | 10.874.948.069 | 83,25 | 11.015.125.863 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 78,65 | 79,1 | 79,5 | | 80,1 | | 80,15 | | 80,35 | | 80,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | 50.000.000 | | 115.000.000 | | 130.000.000 | | 145.000.000 | | 160.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 50.000.000 | 0,12 | 115.000.000 | 0,13 | 130.000.000 | 0,14 | 145.000.000 | 0,15 | 160.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%) | 57 | 60 | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | 50.000.000 | | 110.000.000 | | 125.000.000 | | 140.000.000 | | 165.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 98 | 96 | 98,01 | 50.000.000 | 98,03 | 110.000.000 | 98,04 | 125.000.000 | 98,05 | 140.000.000 | 98,06 | 165.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Melaporkan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | 30.000.000 | | 75.000.000 | | 85.000.000 | | 105.000.000 | | 125.000.000 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) | 88 | 88,24 | 92 | 30.000.000 | 96 | 75.000.000 | 97 | 85.000.000 | 98 | 105.000.000 | 99 | 125.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOL | | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 60.000.000 | | 75.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| AAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%) | 100 | 100 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 75.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 7.418.629.464 | | 8.281.075.362 | | 7.481.075.362 | | 15.621.075.362 | | 9.101.075.362 | |
| 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 5.889.260.064 | | 6.489.264.862 | | 6.189.264.862 | | 5.889.264.862 | | 5.889.264.862 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 83,7 | 83,75 | 83,8 | 5.889.260.064 | 83,85 | 6.489.264.862 | 83,9 | 6.189.264.862 | 83,95 | 5.889.264.862 | 84 | 5.889.264.862 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,2 | 83,3 | 83,4 | | 83,5 | | 83,6 | | 83,7 | | 83,8 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | 122.622.900 | | 122.622.800 | | 122.622.800 | | 122.622.800 | | 122.622.800 | |
| Meningkatnya Kualitas | Persentase Fasilitasi Penataan | 100 | 100 | 100 | 122.622.900 | 100 | 122.622.800 | 100 | 122.622.800 | 100 | 122.622.800 | 100 | 122.622.800 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Penataan Desa | Desa (Persentase) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | | | 29.239.700 | | 29.239.800 | | 29.239.800 | | 29.239.800 | | 29.239.800 | |
| Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) | 42,9 | 50,9 | 56,5 | 29.239.700 | 62,6 | 29.239.800 | 68,5 | 29.239.800 | 77,6 | 29.239.800 | 85,3 | 29.239.800 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | 817.601.900 | | 1.080.042.800 | | 580.042.800 | | 9.020.042.800 | | 2.500.042.800 | |
| Meningkatnya Kualitas | Persentase Fasilitasi | 100 | 100 | 100 | 817.601.900 | 100 | 1.080.042.800 | 100 | 580.042.800 | 100 | 9.020.042.800 | 100 | 2.500.042.800 | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Tata Kelola Desa (Persentase) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | 559.904.900 | | 559.905.100 | | 559.905.100 | | 559.905.100 | | 559.905.100 | |
| Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | 11,8 | 17,6 | 23,5 | 559.904.900 | 29,4 | 559.905.100 | 35,3 | 559.905.100 | 41,2 | 559.905.100 | 47,1 | 559.905.100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 23.827.191.742 | | 23.856.352.442 | | 23.895.563.095,5 | | 24.040.517.667,1 | | 24.192.719.969,2 | |
| 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.517.828.602 | | 6.543.290.427 | | 6.578.617.262 | | 6.719.493.824 | | 6.867.414.215,5 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 82,85 | 84 | 84,5 | 6.517.828.602 | 85 | 6.543.290.427 | 85,5 | 6.578.617.262 | 86 | 6.719.493.824 | 86,5 | 6.867.414.215,5 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Pendudu |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | k Dan Keluarga Berencana |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,63 | 85 | 85,5 | | 86 | | 86,6 | | 87 | | 87,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | 709.805.000 | | 710.345.250 | | 710.912.512,5 | | 711.508.138,1 | | 712.133.545,2 | |
| Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Rata-Rata Jumlah Anak) | 2,1 | 2,15 | 2,14 | 709.805.000 | 2,13 | 710.345.250 | 2,12 | 710.912.512,5 | 2,11 | 711.508.138,1 | 2,10 | 712.133.545,2 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Keluarga Berencana |
| | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 25-27.7 | 22-24.9 | 19-21.9 | | 17-19.9 | | 14-16.9 | | 10-13.9 | | 6-9.9 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase) | 13,33 | 20 | 20 | | 35 | | 35 | | 50 | | 50 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN | | | | | 9.303.785.640 | | 9.304.935.640 | | 9.306.143.140 | | 9.307.411.015 | | 9.308.742.284 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka Prevalensi kontrasepsi modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (%) | 74,5 | 76 | 77 | 9.303.785.640 | 78 | 9.304.935.640 | 79 | 9.306.143.140 | 80 | 9.307.411.015 | 81 | 9.308.742.284 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%) | 3,7 | 3,3 | 2,9 | | 2,5 | | 2,1 | | 1,7 | | 1,3 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Proporsi perempuan umur 20 - | 20,7 | 21 | 22 | | 22 | | 23 | | 23 | | 24 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern. (Persentase) | 66,86 | 72 | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | 7.295.772.500 | | 7.297.781.125 | | 7.299.890.181 | | 7.302.104.690 | | 7.304.429.924,5 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Presentase Terbinanya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (%) | 85 | 85 | 85 | 7.295.772.500 | 85 | 7.297.781.125 | 85 | 7.299.890.181 | 85 | 7.302.104.690 | 85 | 7.304.429.924,5 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) | 80 | 85 | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Keluarga Berencana |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 21.525.082.772 | | 25.994.592.046 | | 25.787.022.813 | | 25.315.164.914 | | 25.668.011.520 | |
| 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 9.011.721.722 | | 9.626.719.241 | | 9.771.074.338 | | 9.687.632.489 | | 9.781.764.345 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 82,7 | 83 | 83,15 | 9.011.721.722 | 83,3 | 9.626.719.241 | 83,5 | 9.771.074.338 | 84,1 | 9.687.632.489 | 84,25 | 9.781.764.345 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat | 83,05 | 83,3 | 83,5 | | 83,75 | | 84 | | 84,15 | | 84,3 | | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | Bidang Perhubungan |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 12.513.361.050 | | 16.367.872.805 | | 16.015.948.475 | | 15.627.532.425 | | 15.886.247.175 | |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Jaringan Jalan Kabupaten yang Dilengkapi Perlengkapan Jalan Dasar (%) | 24,09 | 24,75 | 25,42 | 12.513.361.050 | 26,09 | 16.367.872.805 | 26,76 | 16.015.948.475 | 27,42 | 15.627.532.425 | 28,09 | 15.886.247.175 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Persentase Kendaraan Umum | 23,61 | 24,11 | 24,17 | | 24,24 | | 24,32 | | 24,4 | | 24,51 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Wajib Uji (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Perhubungan |
| | Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang Beroperasi (%) | 83,33 | 83,33 | 83,33 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 10.119.708.631 | | 10.220.905.718 | | 10.323.114.774 | | 10.426.345.923 | | 10.530.609.381 | |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.505.642.351 | | 5.560.698.775 | | 5.616.305.762 | | 5.672.468.820 | | 5.729.193.508 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,27 | 84 | 85 | 5.505.642.351 | 86 | 5.560.698.775 | 87 | 5.616.305.762 | 88 | 5.672.468.820 | 89 | 5.729.193.508 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 83,1 | 84 | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | 1.014.420.870 | | 1.024.565.079 | | 1.034.810.729 | | 1.045.158.837 | | 1.055.610.425 | |
| Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat | 100 | 100 | 100 | 1.014.420.870 | 100 | 1.024.565.079 | 100 | 1.034.810.729 | 100 | 1.045.158.837 | 100 | 1.055.610.425 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Publik Pemerintah Daerah | Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | 3.599.645.410 | | 3.635.641.864 | | 3.671.998.283 | | 3.708.718.266 | | 3.745.805.448 | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 3.599.645.410 | 100 | 3.635.641.864 | 100 | 3.671.998.283 | 100 | 3.708.718.266 | 100 | 3.745.805.448 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, | | | | | 6.659.579.776 | | 7.633.381.727 | | 9.213.381.727 | | 9.313.381.727 | | 9.413.381.727 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.862.993.896 | | 5.263.381.727 | | 5.263.381.727 | | 5.263.381.727 | | 5.263.381.727 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 79,05 | 81 | 82 | 4.862.993.896 | 82,5 | 5.263.381.727 | 83 | 5.263.381.727 | 83,5 | 5.263.381.727 | 84 | 5.263.381.727 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 77,35 | 80 | 77,85 | | 78,85 | | 79,35 | | 79,85 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Meningkatkan Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Rasio Volume Usaha Koperasi (%) | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 0 | 5,7 | 100.000.000 | 5,8 | 100.000.000 | 5,9 | 100.000.000 | 6 | 100.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | 52.681.500 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| Meningkatkan Pembinaan | Persentase Koperasi | 8,04 | 8,4 | 9 | 52.681.500 | 10 | 350.000.000 | 10,5 | 350.000.000 | 11 | 350.000.000 | 29 | 350.000.000 | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan Pengawasan Koperasi | Aktif (Persentase) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | 0 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi | Persentase Koperasi Sehat (%) | 3,46 | 2,58 | 3,46 | 0 | 3,71 | 150.000.000 | 4,76 | 150.000.000 | 5,81 | 150.000.000 | 6,85 | 150.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN | | | | | 209.720.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian | Persentasi Pengurus dan Pengawas Koperasi yang Bersertifikat Kompetensi (%) | 1,2 | 4,2 | 6,2 | 209.720.000 | 8,2 | 300.000.000 | 10,2 | 300.000.000 | 12,2 | 300.000.000 | 13,2 | 300.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | 75.000.000 | | 320.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | |
| Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yg Berkualitas (%) | 18,61 | 18,98 | 19,07 | 75.000.000 | 19,1 | 320.000.000 | 19,25 | 400.000.000 | 19,24 | 500.000.000 | 19,43 | 600.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Menengah |
| 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | 1.302.843.380 | | 700.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | |
| Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri | Rasio Kewirausahaan (Persentase) | 0,134 | 0,137 | 0,14 | 1.302.843.380 | 0,145 | 700.000.000 | 0,15 | 2.200.000.000 | 0,156 | 2.200.000.000 | 0,16 | 2.200.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | 156.341.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Daya Saing UMKM | Persentase Peningkatan Aset/Omset Usaha Mikro yang sudah di Fasilitasi (%) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 156.341.000 | 0,4 | 450.000.000 | 0,5 | 450.000.000 | 0,6 | 450.000.000 | 0,7 | 450.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | 6.591.441.821 | | 8.727.398.889 | | 8.842.651.889 | | 8.904.428.889 | | 8.984.185.889 | |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.338.223.521 | | 7.679.510.889 | | 7.679.510.889 | | 7.679.510.889 | | 7.679.510.889 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83,92 | 87 | 84,5 | 6.338.223.521 | 85 | 7.679.510.889 | 85,5 | 7.679.510.889 | 86 | 7.679.510.889 | 86,5 | 7.679.510.889 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Penanaman Modal |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 78,8 | 83 | 79,5 | | 80 | | 80,5 | | 81 | | 81,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | 8.119.500 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| Meningkatnya Kemudahan BerInvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) | 133,37 | 100 | 100 | 8.119.500 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI | | | | | 21.160.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) | -38 | 5 | 5 | 21.160.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | 18.980.000 | | 93.000.000 | | 113.000.000 | | 125.000.000 | | 150.000.000 | |
| Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 18.980.000 | 100 | 93.000.000 | 100 | 113.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 150.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANA | | | | | 201.598.800 | | 490.538.000 | | 534.356.000 | | 582.555.000 | | 635.575.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| AN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Usaha (LKPM) (%) | 20 | 20 | 22 | 201.598.800 | 24 | 490.538.000 | 26 | 534.356.000 | 28 | 582.555.000 | 30 | 635.575.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | 3.360.000 | | 14.350.000 | | 15.785.000 | | 17.363.000 | | 19.100.000 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 3.360.000 | 100 | 14.350.000 | 100 | 15.785.000 | 100 | 17.363.000 | 100 | 19.100.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.19 - URUSAN | | | | | 12.514.995.031 | | 9.990.076.205 | | 12.587.187.805 | | 10.490.076.205 | | 13.646.519.955 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.614.676.131 | | 3.809.639.555 | | 3.809.639.555 | | 3.809.639.555 | | 3.809.639.555 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 85,3 | 85,1 | 85,15 | 3.614.676.131 | 85,2 | 3.809.639.555 | 85,25 | 3.809.639.555 | 85,3 | 3.809.639.555 | 85,3 | 3.809.639.555 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 80,05 | 80,1 | 80,1 | | 80,1 | | 80,1 | | 80,1 | | 80,1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | 507.827.500 | | 1.244.389.000 | | 1.244.389.000 | | 1.244.389.000 | | 1.244.389.000 | |
| Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan | Prosentase Kelembagaan Pemuda yang Aktif (%) | 60 | 60 | 60 | 507.827.500 | 60 | 1.244.389.000 | 60 | 1.244.389.000 | 60 | 1.244.389.000 | 60 | 1.244.389.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING | | | | | 8.292.491.400 | | 4.636.047.650 | | 7.233.159.250 | | 5.136.047.650 | | 8.292.491.400 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| KEOLAHRAGAAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga | Jumlah Perolehan Medali (Angka) | 123 | 50 | 100 | 8.292.491.400 | 50 | 4.636.047.650 | 150 | 7.233.159.250 | 50 | 5.136.047.650 | 200 | 8.292.491.400 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Prosentase Atlet yang Berprestasi (%) | 60 | 45 | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Prosentase Cabor yang Berprestasi (%) | 30 | 40 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dan Olahraga |
| | Prosentase Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik (%) | 6 | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Kepramukaan | Prosentase pembina dan pelatih yang bersertifikat (%) | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | 622.857.000 | | 629.085.570 | | 635.376.425 | | 641.730.189 | | 648.147.491 | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | 622.857.000 | | 629.085.570 | | 635.376.425 | | 641.730.189 | | 648.147.491 | |
| Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) | 2,38 | 2,38 | 2,4 | 622.857.000 | 2,5 | 629.085.570 | 2,6 | 635.376.425 | 2,7 | 641.730.189 | 2,8 | 648.147.491 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | 224.840.100 | | 227.088.501 | | 229.359.386 | | 231.652.979 | | 233.969.509 | |
| 2.21.02 - PROGRAM | | | | | 224.840.100 | | 227.088.501 | | 229.359.386 | | 231.652.979 | | 233.969.509 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 224.840.100 | 100 | 227.088.501 | 100 | 229.359.386 | 100 | 231.652.979 | 100 | 233.969.509 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | 1.997.787.000 | | 3.741.107.000 | | 2.864.057.000 | | 3.062.007.000 | | 3.199.957.000 | |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | 600.000.000 | | 620.000.000 | | 640.000.000 | | 660.000.000 | | 680.000.000 | |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap | 11,11 | 11,52 | 11,66 | 600.000.000 | 11,85 | 620.000.000 | 11,97 | 640.000.000 | 12,18 | 660.000.000 | 12,41 | 680.000.000 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| pengembangan kebudayaan | Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kebudayaan |
| 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | 242.030.000 | | 508.750.000 | | 569.500.000 | | 630.250.000 | | 691.000.000 | |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%) | 25,37 | 25,37 | 29,85 | 242.030.000 | 31,34 | 508.750.000 | 32,83 | 569.500.000 | 34,32 | 630.250.000 | 35,82 | 691.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 120.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | 0 | 0 | 11,25 | 100.000.000 | 12,86 | 110.000.000 | 14,46 | 120.000.000 | 16,07 | 130.000.000 | 16,07 | 130.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Kebudayaan |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | 350.000.000 | | 671.600.000 | | 678.800.000 | | 736.000.000 | | 743.200.000 | |
| Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | 5,19 | 7,79 | 14,29 | 350.000.000 | 14,29 | 671.600.000 | 14,29 | 678.800.000 | 14,29 | 736.000.000 | 14,29 | 743.200.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | 705.757.000 | | 1.830.757.000 | | 855.757.000 | | 905.757.000 | | 955.757.000 | |
| Meningkatnya tata kelola museum | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase) | 2,62 | 2,81 | 2,9 | 705.757.000 | 2,95 | 1.830.757.000 | 3 | 855.757.000 | 3,05 | 905.757.000 | 3,1 | 955.757.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kebudayaan |
| 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | 4.305.985.874 | | 5.385.944.586 | | 5.740.725.885 | | 6.117.655.606 | | 6.518.432.107 | |
| 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.908.663.174 | | 4.131.883.183 | | 4.338.477.342 | | 4.555.401.209 | | 4.783.171.270 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 87 | 87 | 85 | 3.908.663.174 | 85 | 4.131.883.183 | 86 | 4.338.477.342 | 86 | 4.555.401.209 | 87 | 4.783.171.270 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 77,5 | 78,5 | 79 | | 79,5 | | 80 | | 80,5 | | 81 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Perpustakaan |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | 379.322.800 | | 1.244.161.403 | | 1.391.358.543 | | 1.550.275.397 | | 1.722.083.937 | |
| Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks) | 51,79 | 53,32 | 54,85 | 379.322.800 | 57,91 | 1.244.161.403 | 59,44 | 1.391.358.543 | 59,44 | 1.550.275.397 | 67,9 | 1.722.083.937 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) | 0 | 61,96 | 66,29 | | 67,62 | | 68,97 | | 70,35 | | 73,16 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | 17.999.900 | | 9.900.000 | | 10.890.000 | | 11.979.000 | | 13.176.900 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) | 0 | 7,69 | 15,38 | 17.999.900 | 23,07 | 9.900.000 | 30,77 | 10.890.000 | 46,15 | 11.979.000 | 47 | 13.176.900 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | 223.886.500 | | 580.000.000 | | 620.000.000 | | 706.000.000 | | 743.000.000 | |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | 119.438.500 | | 270.000.000 | | 290.000.000 | | 356.000.000 | | 390.000.000 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai) | 70 | 70 | 71 | 119.438.500 | 72 | 270.000.000 | 73 | 290.000.000 | 74 | 356.000.000 | 75 | 390.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN | | | | | 104.448.000 | | 310.000.000 | | 330.000.000 | | 350.000.000 | | 353.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PENYELAMATAN ARSIP | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai) | 70 | 70 | 71 | 104.448.000 | 72 | 310.000.000 | 73 | 330.000.000 | 74 | 350.000.000 | 75 | 353.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 6.337.523.862 | | 8.666.576.229 | | 9.051.449.793 | | 9.482.684.814 | | 9.031.544.814 | |
| 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.142.636.775 | | 6.520.916.229 | | 6.660.244.793 | | 7.263.979.814 | | 7.074.339.814 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,33 | 80 | 84,5 | 5.142.636.775 | 84,6 | 6.520.916.229 | 84,7 | 6.660.244.793 | 84,8 | 7.263.979.814 | 84,9 | 7.074.339.814 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Perangkat Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 81,45 | 80 | 81,5 | | 82 | | 82,5 | | 83 | | 83,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | 564.456.787 | | 921.160.000 | | 921.160.000 | | 921.160.000 | | 921.160.000 | |
| Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Ikan Tangkap (%) | 2,18 | 0,5 | 2,2 | 564.456.787 | 2,22 | 921.160.000 | 2,25 | 921.160.000 | 2,29 | 921.160.000 | 2,34 | 921.160.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | 595.810.000 | | 1.000.000.000 | | 1.212.545.000 | | 1.007.045.000 | | 712.545.000 | |
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya (%) | 2,93 | 1,86 | 2,93 | 595.810.000 | 2,94 | 1.000.000.000 | 2,95 | 1.212.545.000 | 2,96 | 1.007.045.000 | 2,97 | 712.545.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 13.647.300 | | 48.000.000 | | 49.500.000 | | 51.000.000 | | 52.500.000 | |
| Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang diawasi | Jumlah pelaku usaha yang diawasi (Angka) | 5 | 3 | 35 | 13.647.300 | 36 | 48.000.000 | 37 | 49.500.000 | 38 | 51.000.000 | 39 | 52.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Perikanan |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | 20.973.000 | | 176.500.000 | | 208.000.000 | | 239.500.000 | | 271.000.000 | |
| Meningkatnya produksi pengolahan ikan | Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (%) | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 20.973.000 | 0,6 | 176.500.000 | 0,65 | 208.000.000 | 0,7 | 239.500.000 | 0,75 | 271.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | 17.231.258.667 | | 17.806.538.667 | | 17.443.232.667 | | 18.554.732.667 | | 18.432.232.667 | |
| 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 6.756.157.667 | | 6.046.538.667 | | 6.052.232.667 | | 6.047.232.667 | | 6.052.232.667 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,53 | 83,53 | 83,63 | 6.756.157.667 | 83,73 | 6.046.538.667 | 83,83 | 6.052.232.667 | 83,93 | 6.047.232.667 | 84,03 | 6.052.232.667 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 82,85 | 82,85 | 82,95 | | 83,05 | | 83,15 | | 83,25 | | 83,35 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | 7.300.000.000 | | 7.750.000.000 | | 7.750.000.000 | | 7.750.000.000 | | 7.750.000.000 | |
| Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan | 2 | 2,25 | 2,5 | 7.300.000.000 | 2,75 | 7.750.000.000 | 3 | 7.750.000.000 | 3,5 | 7.750.000.000 | 4 | 7.750.000.000 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Wisatawan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Pariwisata |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | 1.430.101.000 | | 1.750.000.000 | | 1.775.000.000 | | 2.100.000.000 | | 2.125.000.000 | |
| Meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 3 | 3,95 | 5,06 | 1.430.101.000 | 8,43 | 1.750.000.000 | 8,89 | 1.775.000.000 | 9,18 | 2.100.000.000 | 9,35 | 2.125.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | 205.000.000 | | 705.000.000 | | 216.000.000 | | 732.500.000 | | 260.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) | 0 | 0 | 5,44 | 205.000.000 | 5,18 | 705.000.000 | 5,92 | 216.000.000 | 7,05 | 732.500.000 | 8,95 | 260.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | 1.540.000.000 | | 1.555.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.925.000.000 | | 2.245.000.000 | |
| Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 52,64 | 52,64 | 61,74 | 1.540.000.000 | 62,92 | 1.555.000.000 | 63,63 | 1.650.000.000 | 64,32 | 1.925.000.000 | 64,43 | 2.245.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | 35.185.478.089 | | 31.741.944.401 | | 35.493.259.051 | | 40.274.822.251 | | 45.890.063.200 | |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 25.050.718.234 | | 26.934.383.101 | | 26.819.386.051 | | 27.094.387.251 | | 27.600.383.200 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 88,05 | 86 | 87 | 18.887.383.101 | 88 | 18.987.383.101 | 89 | 19.187.386.051 | 90 | 19.287.387.251 | 91 | 19.387.383.200 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,31 | 84 | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 80 | 82 | 83 | 6.163.335.133 | 83,5 | 7.947.000.000 | 84 | 7.632.000.000 | 85 | 7.807.000.000 | 85,5 | 8.213.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | 7.865.651.400 | | 1.854.124.500 | | 3.590.744.000 | | 5.618.697.000 | | 7.827.856.000 | |
| Meningkatnya Bibit ternak dan hijauan Pakan yang berkesinambungan | Persentase penerapan GBP,GHP, atau GFP (%) | 100 | 100 | 100 | 6.811.526.900 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Produksi Pertanian | Presentase Capaian produksi komoditas tanaman pangan Holtikultura dan Perkebunan (%) | 100 | 100 | 100 | 1.054.124.500 | 100 | 1.054.124.500 | 100 | 2.790.744.000 | 100 | 4.818.697.000 | 100 | 7.027.856.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | 749.182.000 | | 1.099.182.000 | | 2.598.356.000 | | 4.175.653.000 | | 5.893.888.000 | |
| Meningkatnya Prasanara Pertanian Dalam Kondisi Baik | Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik (%) | 89,78 | 90 | 90,25 | 749.182.000 | 90,5 | 749.182.000 | 90,75 | 2.248.356.000 | 91 | 3.825.653.000 | 91,25 | 5.543.888.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik | Persentase Prasarana Peternakan dalam | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Kondisi Baik (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | 120.703.655 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan menurunnya kasus | Cakupan pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner (%) | 100 | 100 | 100 | 120.703.655 | 100 | 900.000.000 | 100 | 900.000.000 | 100 | 900.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| penyakit hewan menular | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | 124.999.800 | | 124.999.800 | | 321.193.000 | | 546.521.000 | | 791.984.000 | |
| Meningkatnya Penaganan Bencana Pertanian dan Perubahan Iklim | Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim (%) | 89,86 | 90 | 90,25 | 124.999.800 | 90,5 | 124.999.800 | 90,75 | 321.193.000 | 91 | 546.521.000 | 91,25 | 791.984.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | 104.908.000 | | 104.908.000 | | 321.193.000 | | 546.521.000 | | 791.984.000 | |
| Meningkatnya Dokumen Non Perizinan usaha yang diterbitkan | Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang | 46,65 | 50 | 52,5 | 104.908.000 | 55 | 104.908.000 | 57,5 | 321.193.000 | 60 | 546.521.000 | 62,5 | 791.984.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | diterbitkan (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | 1.169.315.000 | | 724.347.000 | | 942.387.000 | | 1.393.043.000 | | 1.983.968.000 | |
| Meningkatnya SDM Pertanian yang ditingkatkan | Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan (%) | 5,45 | 5,75 | 6 | 824.347.000 | 6,25 | 424.347.000 | 6,5 | 642.387.000 | 6,75 | 1.093.043.000 | 7 | 1.583.968.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya SDM dan Kelembagaan Pertanian | Persentase Kelompok ternak yang dibina (%) | 100 | 100 | 100 | 344.968.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 400.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 12.202.038.900 | | 15.596.816.329 | | 16.974.813.929 | | 17.023.752.699 | | 17.066.708.409 | |
| 3.30.01 - PROGRAM | | | | | 9.195.957.900 | | 9.674.231.759 | | 9.674.231.759 | | 9.674.231.759 | | 9.674.231.759 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 82,25 | 82,5 | 82,75 | 9.195.957.900 | 83 | 9.674.231.759 | 83,25 | 9.674.231.759 | 83,5 | 9.674.231.759 | 83,75 | 9.674.231.759 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,92 | 84 | 84,25 | | 84,5 | | 84,75 | | 85 | | 85,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | 15.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Pedagangan | Persentase Rekomendasi Usaha Perdagangan yang difasilitasi (%) | 100 | 100 | 100 | 15.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 168.000.000 | 100 | 168.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | 2.019.716.400 | | 4.423.216.700 | | 5.762.225.000 | | 5.762.225.000 | | 5.762.225.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 2.019.716.400 | 100 | 4.423.216.700 | 100 | 5.762.225.000 | 100 | 5.762.225.000 | 100 | 5.762.225.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK | | | | | 820.653.300 | | 857.786.070 | | 896.775.370 | | 937.714.140 | | 980.669.850 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| DAN BARANG PENTING | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 93 | 94 | 94 | 820.653.300 | 94 | 857.786.070 | 94 | 896.775.370 | 94 | 937.714.140 | 94 | 980.669.850 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | 121.321.700 | | 166.550.800 | | 166.550.800 | | 166.550.800 | | 166.550.800 | |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | 100 | 100 | 100 | 121.321.700 | 100 | 166.550.800 | 100 | 166.550.800 | 100 | 166.550.800 | 100 | 166.550.800 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN | | | | | 29.389.600 | | 315.031.000 | | 315.031.000 | | 315.031.000 | | 315.031.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) | 90 | 100 | 100 | 29.389.600 | 100 | 315.031.000 | 100 | 315.031.000 | 100 | 315.031.000 | 100 | 315.031.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 592.051.800 | | 592.051.800 | | 592.051.800 | | 592.051.800 | | 592.051.800 | |
| 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | 457.302.000 | | 457.302.000 | | 457.302.000 | | 457.302.000 | | 457.302.000 | |
| Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Industri | Persentase Terlaksananya Pembangunan | 18,18 | 18,18 | 27,27 | 457.302.000 | 27,27 | 457.302.000 | 27,27 | 457.302.000 | 27,27 | 457.302.000 | 27,27 | 457.302.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Sumber Daya Industri Berdasarkan RPIK (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Perindustrian |
| 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | 65.705.800 | | 65.705.800 | | 65.705.800 | | 65.705.800 | | 65.705.800 | |
| Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri Yang Dikeluarkan (%) | 50 | 100 | 100 | 65.705.800 | 100 | 65.705.800 | 100 | 65.705.800 | 100 | 65.705.800 | 100 | 65.705.800 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |
| 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | 69.044.000 | | 69.044.000 | | 69.044.000 | | 69.044.000 | | 69.044.000 | |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Tersedianya informasi industri secara lengkap | 10 | 10,05 | 10,1 | 69.044.000 | 10,15 | 69.044.000 | 10,2 | 69.044.000 | 10,25 | 69.044.000 | 10,3 | 69.044.000 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | dan terkini (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Perindustrian |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 66.120.233.817 | | 63.765.684.358 | | 66.735.042.443 | | 66.735.042.443 | | 66.735.042.443 | |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 38.814.216.317 | | 38.415.196.240 | | 41.384.554.325 | | 41.384.554.325 | | 41.384.554.325 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,98 | 84 | 84,1 | 38.814.216.317 | 84,2 | 38.415.196.240 | 84,3 | 41.384.554.325 | 84,4 | 41.384.554.325 | 84,5 | 41.384.554.325 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 82,3 | 82,5 | 82,6 | | 82,7 | | 82,8 | | 82,9 | | 83 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretari |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | at Daerah |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | 26.204.671.900 | | 24.249.142.518 | | 24.249.142.518 | | 24.249.142.518 | | 24.249.142.518 | |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berjalan dengan Baik (%) | 96,45 | 100 | 100 | 26.204.671.900 | 100 | 24.249.142.518 | 100 | 24.249.142.518 | 100 | 24.249.142.518 | 100 | 24.249.142.518 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | 1.101.345.600 | | 1.101.345.600 | | 1.101.345.600 | | 1.101.345.600 | | 1.101.345.600 | |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan | Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan | 89,13 | 100 | 100 | 1.101.345.600 | 100 | 1.101.345.600 | 100 | 1.101.345.600 | 100 | 1.101.345.600 | 100 | 1.101.345.600 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Perekonomian dan Pembangunan | Perekonomian dan Pembangunan yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | 74.513.145.391 | | 75.425.714.300 | | 81.267.053.400 | | 81.267.053.400 | | 81.267.053.400 | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 41.037.773.171 | | 47.950.342.080 | | 47.950.342.080 | | 47.950.342.080 | | 47.950.342.080 | |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel pada Urusan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 78,41 | 78,5 | 78,75 | 41.037.773.171 | 79 | 47.950.342.080 | 79,25 | 47.950.342.080 | 79,5 | 47.950.342.080 | 79,75 | 47.950.342.080 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Sekretariat DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 82,82 | 82,9 | 83 | | 83,1 | | 83,2 | | 83,3 | | 83,4 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 33.475.372.220 | | 27.475.372.220 | | 33.316.711.320 | | 33.316.711.320 | | 33.316.711.320 | |
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 6.433.051.220 | 100 | 6.433.051.220 | 100 | 8.180.889.220 | 100 | 8.180.889.220 | 100 | 8.180.889.220 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N | 100 | 100 | 100 | 27.042.321.000 | 100 | 21.042.321.000 | 100 | 25.135.822.100 | 100 | 25.135.822.100 | 100 | 25.135.822.100 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Perundang-undangan | (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Bidang Sekretariat DPRD |
| | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| 5.01 - PERENCANAAN | | | | | 10.068.014.951 | | 10.249.799.060 | | 10.249.799.060 | | 10.249.799.060 | | 10.249.799.060 | |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 7.938.576.851 | | 7.417.230.313 | | 7.417.230.313 | | 7.417.230.313 | | 7.417.230.313 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 85,95 | 86 | 86,1 | 7.938.576.851 | 86,2 | 7.417.230.313 | 86,3 | 7.417.230.313 | 86,4 | 7.417.230.313 | 86,5 | 7.417.230.313 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 86,55 | 86,75 | 86,85 | | 87 | | 87,15 | | 87,3 | | 87,45 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 1.018.858.350 | | 1.421.986.697 | | 1.421.986.697 | | 1.421.986.697 | | 1.421.986.697 | |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 1.018.858.350 | 100 | 1.421.986.697 | 100 | 1.421.986.697 | 100 | 1.421.986.697 | 100 | 1.421.986.697 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Perencanaan |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 1.110.579.750 | | 1.410.582.050 | | 1.410.582.050 | | 1.410.582.050 | | 1.410.582.050 | |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 305.399.000 | 100 | 305.400.975 | 100 | 305.400.975 | 100 | 305.400.975 | 100 | 305.400.975 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD | 100 | 100 | 100 | 377.553.300 | 100 | 177.553.775 | 100 | 177.553.775 | 100 | 177.553.775 | 100 | 177.553.775 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Infrastruktur dan Kewilayahan | pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Bidang Perencanaan |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 427.627.450 | 100 | 927.627.300 | 100 | 927.627.300 | 100 | 927.627.300 | 100 | 927.627.300 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | | 568.503.402.790 | | 557.293.200.107 | | 558.318.573.030 | | 570.180.149.784 | | 573.564.123.509 | |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 31.185.135.515 | | 30.828.709.859 | | 31.830.766.032 | | 32.896.392.918 | | 34.029.790.147 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 86,55 | 86,7 | 87 | 11.374.431.918 | 87,3 | 11.374.431.918 | 87,5 | 11.374.431.918 | 88 | 11.374.431.918 | 88,5 | 11.374.431.918 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,46 | 85 | 85,5 | | 86 | | 86,5 | | 87 | | 87,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 84,3 | 84,4 | 84,5 | 19.810.703.597 | 84,6 | 19.454.277.941 | 84,7 | 20.456.334.114 | 84,8 | 21.521.961.000 | 84,9 | 22.655.358.229 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 84,23 | 84,33 | 84,43 | | 84,53 | | 84,63 | | 84,73 | | 84,83 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Keuangan |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 533.909.944.825 | | 523.137.778.042 | | 523.137.778.042 | | 533.909.944.825 | | 536.136.262.575 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Anggaran | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%) | 35,71 | 39,49 | 37,71 | 533.909.944.825 | 30 | 523.137.778.042 | 33,71 | 523.137.778.042 | 33 | 533.909.944.825 | 34,71 | 536.136.262.575 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%) | 20,25 | 24,32 | 28,39 | | 40 | | 31,61 | | 31,22 | | 30,83 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib | 96,74 | 96,76 | 96,8 | | 96,82 | | 96,84 | | 96,86 | | 96,9 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Pelayanan Dasar (%) | | | | | | | | | | | | | Keuangan |
| | Persentase Penurunan SILPA (%) | 38,67 | 0,05 | 2,95 | | 5,25 | | 7,45 | | 9,35 | | 11,44 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | 2.160.874.850 | | 2.160.874.850 | | 2.160.874.850 | | 2.160.874.850 | | 2.160.874.850 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) | 1,46 | 1,63 | 1,82 | 2.160.874.850 | 2 | 2.160.874.850 | 2,31 | 2.160.874.850 | 2,57 | 2.160.874.850 | 2,8 | 2.160.874.850 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Keuangan |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | 1.247.447.600 | | 1.165.837.356 | | 1.189.154.106 | | 1.212.937.191 | | 1.237.195.937 | |
| Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah (%) | -15,78 | 3,5 | 3,7 | 1.247.447.600 | 3,9 | 1.165.837.356 | 4,1 | 1.189.154.106 | 4,3 | 1.212.937.191 | 4,5 | 1.237.195.937 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | 6.746.973.206 | | 7.046.805.677 | | 7.207.805.677 | | 7.418.805.677 | | 7.544.305.677 | |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.975.346.506 | | 5.164.178.977 | | 5.264.178.977 | | 5.364.178.977 | | 5.464.178.977 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 76,55 | 76,65 | 76,85 | 4.975.346.506 | 76,95 | 5.164.178.977 | 77 | 5.264.178.977 | 77,25 | 5.364.178.977 | 77,3 | 5.464.178.977 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kepegawaian |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,28 | 83,3 | 83,4 | | 83,5 | | 83,6 | | 83,7 | | 83,8 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | 1.771.626.700 | | 1.882.626.700 | | 1.943.626.700 | | 2.054.626.700 | | 2.080.126.700 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian | Persentase Jabatan yang terisi berdasarkan perundang-undangan (%) | 92 | 100 | 100 | 1.039.192.900 | 100 | 1.109.192.900 | 100 | 1.154.192.900 | 100 | 1.167.192.900 | 100 | 1.187.692.900 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN | Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN (%) | 100 | 100 | 100 | 640.488.800 | 100 | 680.488.800 | 100 | 695.488.800 | 100 | 792.488.800 | 100 | 792.488.800 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kepegawaian |
| Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase) | 3 | 5 | 5 | 91.945.000 | 5 | 92.945.000 | 5 | 93.945.000 | 5 | 94.945.000 | 5 | 99.945.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | 904.635.400 | | 1.004.635.400 | | 1.004.635.400 | | 1.014.835.400 | | 1.054.835.400 | |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 904.635.400 | | 1.004.635.400 | | 1.004.635.400 | | 1.014.835.400 | | 1.054.835.400 | |
| Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi ASN (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan dan Pengembangan dan Evaluasi | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan |
| Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, serta Sertifikasi Kompetensi | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%) | 100 | 100 | 100 | 904.635.400 | 100 | 1.004.635.400 | 100 | 1.004.635.400 | 100 | 1.014.835.400 | 100 | 1.054.835.400 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 727.590.800 | | 1.177.590.800 | | 1.177.590.800 | | 1.177.590.800 | | 1.177.590.800 | |
| 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | 527.590.800 | | 927.590.800 | | 927.590.800 | | 927.590.800 | | 927.590.800 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%) | 100 | 100 | 100 | 527.590.800 | 100 | 927.590.800 | 100 | 927.590.800 | 100 | 927.590.800 | 100 | 927.590.800 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 200.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | 17.213.200.864 | | 17.230.238.424 | | 17.317.153.666 | | 17.317.153.666 | | 17.317.153.666 | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 13.938.475.964 | | 13.947.803.524 | | 14.034.718.766 | | 14.034.718.766 | | 14.034.718.766 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,15 | 83,5 | 83,75 | 13.938.475.964 | 84 | 13.947.803.524 | 84,25 | 14.034.718.766 | 84,5 | 14.034.718.766 | 84,75 | 14.034.718.766 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 84,55 | 84,75 | 85 | | 85,25 | | 85,5 | | 85,75 | | 86 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| 6.01.02 - PROGRAM | | | | | 2.470.080.000 | | 2.479.660.000 | | 2.479.660.000 | | 2.479.660.000 | | 2.479.660.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%) | 100 | 100 | 100 | 2.470.080.000 | 100 | 2.479.660.000 | 100 | 2.479.660.000 | 100 | 2.479.660.000 | 100 | 2.479.660.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | 804.644.900 | | 802.774.900 | | 802.774.900 | | 802.774.900 | | 802.774.900 | |
| Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | 3 | 3 | 3 | 804.644.900 | 3 | 802.774.900 | 3 | 802.774.900 | 3 | 802.774.900 | 3 | 802.774.900 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 75.948.608.501 | | 77.537.560.144,25 | | 79.036.441.550,33 | | 80.343.263.996,78 | | 81.697.456.798,65 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 69.339.737.690 | | 70.594.163.365,25 | | 71.930.354.951,33 | | 73.040.646.146,78 | | 74.253.673.623,65 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 67,15 | 68 | 70 | 46.713.576.635 | 71 | 47.586.344.283 | 72 | 48.565.927.945 | 73 | 49.318.091.259 | 78,5 | 50.137.102.655 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat | 74,85 | 74,95 | 75,44 | | 76,84 | | 78,24 | | 79,64 | | 80,1 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 62,45 | 70 | 75 | | 75 | | 78 | | 78 | | 78 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 79,7 | 79,71 | 80 | | 80,5 | | 81 | | 81,5 | | 82 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 67,2 | 67,5 | 68 | | 68,5 | | 69 | | 69,5 | | 70,25 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat | 83,4 | 85 | 87 | | 90 | | 92 | | 90 | | 92 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Daerah (Nilai) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 79,1 | 80,6 | 81 | | 81,5 | | 82 | | 82,5 | | 83 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 66,44 | 70 | 75 | | 77 | | 79 | | 80 | | 82 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 63,55 | 80 | 80,1 | | 80,2 | | 80,3 | | 80,4 | | 80,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat | 76 | 76,5 | 76,75 | | 76,8 | | 77 | | 77,5 | | 78 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 76 | 76 | 76 | | 77 | | 77 | | 79 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 77,9 | 78,4 | 79 | | 80 | | 80,5 | | 81 | | 82 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 72,4 | 76 | 76,5 | | 77 | | 77,5 | | 78 | | 78,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat | 78,46 | 81 | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 75,4 | 77 | 78 | | 78 | | 78 | | 79 | | 79 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 74,9 | 81 | 81,2 | | 81,3 | | 81,4 | | 81,5 | | 81,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 63,15 | 78,85 | 79 | | 79,2 | | 79,4 | | 79,5 | | 79,7 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat | 73,5 | 74 | 74,5 | | 75 | | 75,5 | | 76 | | 76,5 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Daerah (Nilai) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 76,1 | 76,5 | 77,05 | | 77,55 | | 78,15 | | 78,95 | | 79,1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 76 | 76,5 | 76,6 | | 76,62 | | 76,65 | | 76 | | 76,63 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 76 | 76 | 77 | 6.211.876.183 | 78 | 6.211.876.183 | 79 | 6.211.876.183 | 80 | 6.211.876.183 | 81 | 6.211.876.183 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelengga | Nilai SAKIP Perangkat | 72,1 | 73 | 74,04 | 2.367.409.355 | 74,78 | 2.397.573.744 | 75,22 | 2.432.202.292 | 76,01 | 2.467.709.766 | 76,8 | 2.504.131.587 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| raan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 64,85 | 65,5 | 66,15 | 1.956.143.436 | 67,25 | 1.956.143.436 | 68,35 | 1.956.143.436 | 69,45 | 1.956.143.436 | 70,55 | 1.956.143.436 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 78,65 | 78,9 | 79 | 2.531.897.517 | 79,2 | 2.567.128.763,25 | 79,4 | 2.605.038.281,33 | 79,5 | 2.742.879.433,78 | 79,7 | 2.883.552.100,65 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 72,1 | 72,5 | 73 | 2.249.795.979 | 73,1 | 2.249.795.979 | 73,2 | 2.284.515.979 | 73,5 | 2.249.795.979 | 74 | 2.263.795.979 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelengga | Nilai SAKIP Perangkat | 70,45 | 71,4 | 71,42 | 2.248.455.221 | 71,5 | 2.397.653.561 | 71,7 | 2.448.907.976 | 71,75 | 2.502.838.637 | 72 | 2.526.529.409 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| raan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Daerah (Poin) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 75,5 | 75,7 | 76 | 2.476.937.123 | 76,5 | 2.526.475.865 | 76,7 | 2.577.005.383 | 77 | 2.628.545.490 | 77,5 | 2.681.116.400 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 75,35 | 75,4 | 75,45 | 2.583.646.241 | 75,5 | 2.701.171.551 | 75,55 | 2.848.737.476 | 75,6 | 2.962.765.963 | 75,65 | 3.089.425.874 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 1.880.904.866 | | 2.064.827.039 | | 2.132.950.595 | | 2.195.261.730 | | 2.264.866.470 | |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,06 | 84,5 | 84,8 | 1.365.704.166 | 85 | 1.517.535.833 | 86 | 1.573.220.033 | 87 | 1.601.560.462 | 88 | 1.648.757.742 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Tingkat Kecamatan (poin) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 83,07 | 84,14 | 84,55 | | 85 | | 85,3 | | 85,5 | | 86 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 83,5 | 85 | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 83,03 | 84 | 84,2 | | 84,25 | | 84,26 | | 84,28 | | 85 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan | 82,91 | 82,93 | 83,05 | | 83,22 | | 83,38 | | 83,66 | | 83,84 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 71,4 | 73 | 75 | | 83 | | 85 | | 87 | | 88 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 81,48 | 84,7 | 85 | | 85,5 | | 86 | | 86,5 | | 87 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 84,21 | 84,23 | 84,25 | | 84,3 | | 84,38 | | 84,45 | | 85,05 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan | 80 | 85 | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 84 | 84,1 | 84,2 | | 84,3 | | 84,4 | | 84,5 | | 84,6 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 81 | 81,25 | 81,5 | | 81,8 | | 82 | | 82,5 | | 83 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 81 | 81,5 | 81,1 | | 82 | | 82,5 | | 82,1 | | 83 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan | 83,47 | 83,6 | 84 | | 84,2 | | 84,5 | | 84,5 | | 85 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 84,01 | 84,5 | 85 | | 85,5 | | 86 | | 86,5 | | 87 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 76,74 | 78 | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 87 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 82,78 | 83 | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan | 82 | 82,5 | 83 | | 83,5 | | 84 | | 84,5 | | 85 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 83,03 | 83,2 | 83,4 | | 83,6 | | 83,8 | | 84 | | 84,2 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 83,61 | 84 | 84,72 | | 85 | | 85,5 | | 86 | | 86,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 82,44 | 82,5 | 82,65 | | 82,7 | | 82,75 | | 82,9 | | 83 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Indeks Kepuasan | 75 | 79 | 80 | | 81 | | 82 | | 84 | | 85 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 82 | 82 | 83 | 88.589.500 | 84 | 88.589.500 | 85 | 88.589.500 | 86 | 88.589.500 | 87 | 88.589.500 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 83,82 | 84 | 84,25 | 130.987.500 | 84,5 | 130.987.500 | 84,75 | 130.987.500 | 85 | 130.987.500 | 85,25 | 130.987.500 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 83 | 83,2 | 83,4 | 42.320.000 | 83,6 | 55.000.000 | 83,8 | 65.000.000 | 84 | 75.000.000 | 84,2 | 85.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 84 | 85 | 85,1 | 57.501.400 | 85,2 | 57.501.400 | 85,3 | 57.501.400 | 85,4 | 57.501.400 | 85,5 | 57.501.400 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 84,21 | 84,5 | 85 | 63.992.000 | 85,5 | 70.391.200 | 86 | 71.799.024 | 86,5 | 86.717.568 | 87 | 93.051.821 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (poin) | 83,29 | 83,3 | 83,3 | 50.565.300 | 83,4 | 51.576.606 | 83,5 | 52.608.138 | 83,7 | 53.660.300 | 84 | 54.733.507 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,45 | 83,45 | 83,5 | 81.245.000 | 83,75 | 93.245.000 | 83,85 | 93.245.000 | 83,9 | 101.245.000 | 84 | 106.245.000 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Tingkat Kecamatan (poin) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 2.829.936.800 | | 2.862.424.700 | | 2.899.998.221 | | 2.940.046.679 | | 2.966.868.286 | |
| Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 931.183.000 | 100 | 932.135.100 | 100 | 963.046.105 | 100 | 978.250.885 | 100 | 987.866.729 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyara | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | katan Aktif (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyara | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | katan Aktif (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyara | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | katan Aktif (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 80 | 80 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyara | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | katan Aktif (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyara | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | katan Aktif (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdaya | Persentase Lembaga Kemasyara | 100 | 100 | 100 | 1.664.780.000 | 100 | 1.664.780.000 | 100 | 1.664.780.000 | 100 | 1.664.780.000 | 100 | 1.664.780.000 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| an Masyarakat dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan | katan Aktif (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 72.040.000 | 100 | 72.040.000 | 100 | 72.040.000 | 100 | 72.040.000 | 100 | 72.040.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penyelengga | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 27.820.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 50.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| raan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 9.765.800 | 100 | 9.765.800 | 100 | 9.765.800 | 100 | 9.765.800 | 100 | 9.765.800 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 41.130.000 | 100 | 45.243.000 | 100 | 46.147.860 | 100 | 55.218.729 | 100 | 59.636.227 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Partisipasi dan | Persentase Lembaga Kemasyara | 100 | 100 | 100 | 24.640.000 | 100 | 37.882.800 | 100 | 38.640.456 | 100 | 39.413.265 | 100 | 40.201.530 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan | katan Aktif (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 58.578.000 | 100 | 65.578.000 | 100 | 65.578.000 | 100 | 75.578.000 | 100 | 82.578.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 1.481.015.950 | | 1.519.290.550 | | 1.546.402.412 | | 1.596.878.527 | | 1.630.169.711 | |
| Terwujudnya Stabilitas | Tingkat Kondusifita | 100 | 100 | 100 | 1.099.897.000 | 100 | 1.124.222.000 | 100 | 1.149.112.950 | 100 | 1.184.534.898 | 100 | 1.206.135.592 | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | s Kecamatan dalam kondisi baik (%) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Kecamatan dalam kondisi baik (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Kecamatan dalam kondisi baik (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Kecamatan dalam kondisi baik (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Kecamatan dalam kondisi baik (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Kecamatan dalam kondisi baik (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | 62.039.000 | 100 | 62.039.000 | 100 | 62.039.000 | 100 | 62.039.000 | 100 | 62.039.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan | Tingkat Kondusifitas Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 51.650.000 | 100 | 51.650.000 | 100 | 51.650.000 | 100 | 51.650.000 | 100 | 51.650.000 | Dinas/Badan yang menang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | dalam kondisi baik (%) | | | | | | | | | | | | | ani Bidang Kecamatan |
| Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | 50.336.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam | 100 | 100 | 100 | 52.380.000 | 100 | 52.380.000 | 100 | 52.380.000 | 100 | 52.380.000 | 100 | 52.380.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | kondisi baik (%) | | | | | | | | | | | | | Kecamatan |
| Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | 52.380.000 | 100 | 57.618.000 | 100 | 58.770.360 | 100 | 69.734.604 | 100 | 75.313.372 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | 52.380.000 | 100 | 53.427.600 | 100 | 54.496.152 | 100 | 55.586.075 | 100 | 56.697.797 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 100 | 59.953.950 | 100 | 62.953.950 | 100 | 62.953.950 | 100 | 65.953.950 | 100 | 70.953.950 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 417.013.195 | | 496.854.490 | | 526.735.371 | | 570.430.914 | | 581.878.708 | |
| Meningkatnya | Persentase Perdes | 100 | 100 | 100 | 288.529.795 | 100 | 329.263.500 | 100 | 348.253.275 | 100 | 368.803.223 | 100 | 363.691.712 | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan Peraturan Perundanga n-perundangan | APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Perundangan-perundangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes | 70 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Perundangan- | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | perundangan (%) | | | | | | | | | | | | | Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Pengelolaan keuangan | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | dan aset desa yang akuntabel (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Perundangan-perundangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Perundang an-perundang an (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai Peraturan Bupati (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Perundang-Undangan (%) | | | | | | | | | | | | | Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | PERSENTASE PERDES APBDES SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | UNDANGAN (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Transfaransi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai Dengan Peraturan Perudang-undangan | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | 14.730.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 65.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| MENINGKATNYA TRANSFARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDAN | Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Perundangan-perundangan (%) | 100 | 100 | 100 | 23.088.000 | 100 | 23.088.000 | 100 | 23.088.000 | 100 | 23.088.000 | 100 | 23.088.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| G-UNDANGAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Transfaransi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | 11.680.000 | 100 | 26.913.600 | 100 | 27.451.872 | 100 | 28.000.909 | 100 | 28.560.928 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan Peraturan Perundangan-perundangan | Persentase Perdes APBDes sesuai Peraturan Bupati (%) | 100 | 100 | 100 | 16.037.700 | 100 | 17.641.690 | 100 | 17.994.524 | 100 | 24.991.082 | 100 | 26.990.368 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya | Persentase Perdes | 100 | 100 | 100 | 26.370.000 | 100 | 28.370.000 | 100 | 28.370.000 | 100 | 33.970.000 | 100 | 37.970.000 | Dinas/Badan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan Peraturan Perundangan-perundangan | APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | | | | | | | | | | | | | yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) | 100 | 100 | 100 | 30.250.000 | 100 | 30.250.000 | 100 | 30.250.000 | 100 | 30.250.000 | 100 | 30.250.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang- | 100 | 100 | 100 | 6.327.700 | 100 | 6.327.700 | 100 | 6.327.700 | 100 | 6.327.700 | 100 | 6.327.700 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Dan Aset Desa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan | Undangan (%) | | | | | | | | | | | | | Kecamatan |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 9.895.590.783 | | 10.493.800.363 | | 12.316.060.513 | | 92.760.571.950 | | 11.890.337.223 | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.277.568.883 | | 3.858.570.963 | | 3.958.570.963 | | 4.125.678.750 | | 3.750.870.823 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83 | 85 | 85,5 | | 85,85 | | 86 | | 86,15 | | 86,25 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 74 | 83 | 83,13 | | 83,25 | | 83,5 | | 83,65 | | 84 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 83,1 | 83,15 | 83,25 | 3.277.568.883 | 83,5 | 3.858.570.963 | 83,65 | 3.958.570.963 | 83,75 | 4.125.678.750 | 84 | 3.750.870.823 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin) | 83,69 | 85 | 85,5 | | 85,85 | | 86 | | 86,15 | | 86,25 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dan Politik |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | 1.825.804.700 | | 1.825.804.700 | | 2.798.047.900 | | 2.850.589.500 | | 2.650.987.000 | |
| Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pembinaan Terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%) | 100 | 100 | 100 | 1.825.804.700 | 100 | 1.825.804.700 | 100 | 2.798.047.900 | 100 | 2.850.589.500 | 100 | 2.650.987.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dan Politik |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | 2.807.792.500 | | 2.825.000.000 | | 2.825.000.000 | | 82.825.000.000 | | 2.935.750.000 | |
| Meningkatnya Etika dan Budaya Politik | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Etika dan Budaya Politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%) | 70 | 70,5 | 71 | 2.807.792.500 | 71,5 | 2.825.000.000 | 72 | 2.825.000.000 | 72,5 | 82.825.000.000 | 73 | 2.935.750.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | 884.710.000 | | 884.710.000 | | 987.867.000 | | 997.568.700 | | 950.875.000 | |
| Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%) | 50 | 52 | 54 | 884.710.000 | 56 | 884.710.000 | 58 | 987.867.000 | 60 | 997.568.700 | 62 | 950.875.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 538.512.700 | | 538.512.700 | | 895.785.750 | | 985.857.500 | | 850.978.500 | |
| Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dan Politik |
| Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat | Persentase Pembinaan Terkait Ketahanan Ekososbud, Agama, dan P4GN (%) | 100 | 100 | 100 | 538.512.700 | 100 | 538.512.700 | 100 | 895.785.750 | 100 | 985.857.500 | 100 | 850.978.500 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | 561.202.000 | | 561.202.000 | | 850.788.900 | | 975.877.500 | | 750.875.900 | |
| Meningkatnya Penanganan | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Konflik Sosial yang Diselesaikan | | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%) | 100 | 100 | 100 | 561.202.000 | 100 | 561.202.000 | 100 | 850.788.900 | 100 | 975.877.500 | 100 | 750.875.900 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 2891788225856.00 | | 2986743075330.25 | | 2992708980716.83 | | 3087320469027.88 | | 3028269344321.35 | |

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah hasil kerja yang dapat diukur dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Kinerja ini menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Proyek Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dijelaskan, pencapaian atas kinerja penyelenggaaraan daerah dikur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

### 4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah serangkaian indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja utama pemerintah daerah dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU mencakup berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan dampak dari program-program yang dilaksanakan.

Tujuan dalam penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Melalui IKU, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat menilai sejauhmana pencapaian target pembangunan dengan realisasi sampai akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Berikut adalah target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029:

**Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029.**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 1. | Indeks Gini | Poin | 0.249-0.255 | 0.246-0.254 | 0.243-0.253 | 0.240-0.252 | 0.237-0.251 | |
| 2. | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,5 | 3,52 | 3,55 | 3,57 | 3,6 | |
| 3. | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | |
| 4. | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 69,44 | 70,07 | 70,71 | 71,35 | 71,99 | |
| 5. | Indeks Infrastruktur Wilayah | Angka | 67,07 | 68,57 | 68,83 | 69,09 | 69,34 | |
| 6. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | poin | 74,15 | 74,41 | 74,66 | 74,91 | 75,16 | |
| 7. | Tingkat Kemiskinan | % | 7.71-8.09 | 7.32-7.88 | 6.94-7.66 | 6.55-7.45 | 6.16-7.23 | |
| 8. | Persentase Desa Mandiri | % | 7,65 | 7,65 | 7,94 | 7,94 | 8,24 | |
| 9. | Nilai SAKIP | poin | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | |
| 10. | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 61.70:62.50 | 62.50:63.30 | 63.30:64.15 | 64.15:65.00 | 65.00:65.85 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 11. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6.05-6.54 | 5.87-6.29 | 5.68-6.04 | 5.5-5.79 | 5.32-5.54 | |
| 12. | Opini BPK | Level | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 13. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | 4.80-5.80 | 4.82-5.82 | 4.85-5.85 | 6.68-7.68 | 6.69-7.70 | |
| 14. | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Angka | 77,15 | 77,37 | 77,69 | 78,22 | 78,65 | |
| 15. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | poin | 84,25 | 84,5 | 84,75 | 85 | 85,25 | |
| 16. | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 4,15 | 4,2 | 4,25 | 4,3 | 4,35 | |
| 17. | Indeks Pemerintah Digital | Nilai | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 3 | |
| 18. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 75,06 | 76,18 | 77,3 | 78,42 | 79,54 | |
| 19. | Kontibusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB | % | 9,98 | 10,22 | 10,47 | 10,71 | 10,96 | |
| 20. | PDRB Per Kapita | Rp. Juta Per Tahun | 27,8 | 29,12 | 30,44 | 31,76 | 31,97 | |
| 21. | Daya Beli | Rupiah | 9.580.000 | 9.730.000 | 9.880.000 | 10.030.000 | 10.180.000 | |
| 22. | Tingkat Inflasi | (%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 23. | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 73,69 | 74,2 | 74,72 | 75,25 | 75,6 | |
| 24. | Indeks Pendidikan | poin | 0,584 | 0,598 | 0,612 | 0,626 | 0,64 | |
| 25. | Indeks Kesehatan | poin | 0,841 | 0,846 | 0,852 | 0,858 | 0,863 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 26. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | |
| 27. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | |
| 28. | Prevalensi Stunting | % | 25,3 | 21,6 | 17,1 | 14,4 | 12,1 | |
| 29. | Indeks Infrastruktur Layanan Dasar | poin | 75,29 | 75,55 | 75,82 | 76,08 | 76,35 | |
| 30. | Indeks Konektivitas Daerah | poin | 58,85 | 61,6 | 61,84 | 62,09 | 62,34 | |
| 31. | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 32. | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | poin | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 33. | Indeks Kualitas Air | Indeks | 75,25 | 75,45 | 75,65 | 75,85 | 76,05 | |
| 34. | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 77,31 | 77,71 | 78,11 | 78,51 | 78,91 | |
| 35. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | poin | 66,44 | 66,51 | 66,58 | 66,65 | 66,72 | |
| 36. | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 167,62 | 162,98 | 158,33 | 153,69 | 149,04 | |
| 37. | Rasio Kemandirian Daerah | Persentase | 20,87 | 20,92 | 20,97 | 21,02 | 21,07 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 38. | Persentase Pertumbuhan Investasi | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |

**Tabel 4. 3 Definisi Operasional Indeks Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2025-2029**

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) | IDSD merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan | Metode yang digunakan dalam penyusunan model pengukuran indeks daya saing di daerah adalah studi literatur, public hearing, Foccussed Group Discussion, expert judgment, statistical analysis dan benchmarking terhadap model-model pengukuran indeks beserta komponen dan indikatornya. Disamping itu, agar model yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, | **1. Penentuan Konsep dan Kerangka Kerja:**<br>IDSD menggunakan kerangka kerja yang mengacu pada Global Competitiveness Index (GCI) yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia.<br>**2. Identifikasi Pilar dan Indikator:**<br>IDSD terdiri dari empat komponen utama (lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi) yang dijabarkan ke dalam 12 pilar daya saing, setiap pilar diukur dengan beberapa indikator.<br>**3. Pengumpulan Data:**<br>Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait.<br>**4. Pengolahan Data:** |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | 90 indikator. IDSD diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. | maka dilakukan validasi dan uji terap di beberapa daerah terpilih. | Data yang terkumpul kemudian diolah dan distandarisasi menggunakan metode min-max untuk menghasilkan skor 0-5 pada setiap indikator.<br>**5. Penghitungan Skor:**<br>**Skor Pilar:** Skor setiap pilar dihitung dengan menggabungkan skor indikator-indikator pembentuknya dengan bobot yang sama.<br>**Skor Akhir IDSD:** Skor akhir IDSD dihitung dengan menggabungkan skor semua pilar dengan metode yang sama (biasanya rata-rata).<br>**6. Analisis dan Interpretasi:**<br>Hasil perhitungan IDSD kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat daya saing daerah, serta faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat daya saing. |
| Indeks Reformasi Birokrasi | Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, IRB adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:<br>a. Manajemen Perubahan,<br>b.Penguatan pengawasan, | a. Manajemen Perubahan,<br>b. Penguatan pengawasan,<br>c. Penguatan akuntabilitas,<br>d. Penataan Organisasi,<br>e. Penataan tatalaksana,<br>f. Penataan manajemen SDM,<br>g. Deregulasi Kebijakan, Peningkatan kualitas pelayanan publik | **1. Komponen Hasil (40%):**<br>Mengukur dampak dari reformasi birokrasi pada berbagai aspek, terdiri dari:<br>Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%)<br>Kualitas Pelayanan Publik (10%)<br>Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (10%)<br>Kinerja Organisasi (10%)<br>**2. Komponen Pengungkit (60%):** |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | c. Penguatan akuntabilitas,<br><br>d. Penataan Organisasi,<br><br>e. Penataan tatalaksana,<br><br>f. Penataan manajemen SDM,<br><br>g. Deregulasi Kebijakan,<br><br>h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.<br><br>Penilaian IRB dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. | | Mengukur upaya yang dilakukan dalam melaksanakan reformasi birokrasi, terdiri dari:<br>Manajemen Perubahan (10%)<br>Penataan Organisasi (10%)<br>Penataan Tata Laksana (10%)<br>Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)<br>Penguatan Pengawasan (10%)<br>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)<br>Perhitungan Nilai:<br>Setiap komponen dan sub-komponen dinilai berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan.<br>Nilai dari masing-masing komponen dan sub-komponen kemudian dijumlahkan dengan bobot masing-masing untuk mendapatkan nilai akhir IRB.<br>Predikat IRB:<br>Berdasarkan nilai akhir IRB yang diperoleh, instansi akan mendapatkan predikat tertentu, misalnya:<br>**AA:** Sangat Memuaskan (nilai > 90-100)<br>**A:** Memuaskan (nilai > 80-90)<br>**BB:** Sangat Baik (nilai > 70-80)<br>**B:** Baik (nilai > 60-70)<br>**CC:** Cukup (nilai > 50-60)<br>**C:** Kurang (nilai > 30-50)<br>**D:** Sangat Kurang (nilai > 0-30)<br>Evaluasi dan Pengukuran: |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | | Evaluasi IRB dilakukan secara berkala, biasanya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).<br>Penilaian dilakukan melalui survei eksternal kepada penerima layanan dan instansi terkait.<br>Hasil evaluasi IRB digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di masa mendatang. |
| Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) | Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021<br><br>tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%),<br><br>Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%). Kategori Penilaian: Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai >90-100, Predikat A (Memuaskan) - Nilai >80-90, Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai >70-80, Predikat B (Baik) – Nilai >60-70, Predikat CC (Cukup) - Nilai >50-60. Hasil penilaian predikat AKIP | a. Perencanaan Kinerja (30%),<br>b. Pengukuran Kinerja (30%),<br>c. Pelaporan Kinerja (15%), dan<br><br>d. Evaluasi Internal (25%). | Predikat :<br><br>a. Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai >90-100,<br>b. Predikat A (Memuaskan) - Nilai >80-90,<br>c. Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai >70-80,<br>d. Predikat B (Baik) – Nilai >60-70,<br><br>Predikat CC (Cukup) - Nilai >50-60. |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | diterbitkan oleh Kementrian PAN-RB. | | |
| Predikat Opini Badan Pemeriksa Keuangan | Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan. | Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1.<br><br>Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 2 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 2/3 (0,667).<br><br>Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 1 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1/3 (0,334).<br><br>Apabila pemerintah daerah memperoleh opini *disclaimer* diberikan skor 0. | Hasil pengukuran indeks dimensi Opini BPK adalah skor x bobot |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan suatu daerah. IPKD mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah dalam periode waktu tertentu. IPKD juga menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah.<br><br>Secara lebih rinci, IPKD mencakup beberapa dimensi utama:<br><br>1. **Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran:** Memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<br>2. **Kualitas anggaran belanja dalam APBD:** Menilai bagaimana anggaran belanja daerah disusun dan dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan.<br>3. **Transparansi pengelolaan keuangan daerah:** Mengukur | Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D.1)<br><br>Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2)<br><br>Transparansi pengelolaan keuangan (D.3)<br><br>Penyerapan anggaran (D.4)<br><br>Kondisi keuangan daerah (D.5)<br><br>Opini BPK (D.6) | = D.1+D2+D.3+D.4+D5+D6 |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | sejauh mana informasi keuangan daerah diakses dan dipublikasikan kepada masyarakat.<br>4. **Penyerapan anggaran:** Menilai tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja daerah.<br>5. **Kondisi keuangan daerah:** Mengukur kesehatan keuangan daerah secara keseluruhan.<br>6. **Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD):** Mempertimbangkan pendapat BPK terkait laporan keuangan daerah. | | |
| Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor<br><br>14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan | | Rumus :<br><br>IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM. |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. | | |
| Indeks Pelayanan Publik | cara mengukur dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. IPP digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana pelayanan publik telah memenuhi standar yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. | a. Aspek Kebijakan Pelayanan<br>b. Aspek Profesionalisme SDM<br>c. Aspek Sarana Prasarana Pelayanan Publik<br>d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik<br>e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan<br>f. Inovasi | $\sum(nilai\ aspekn \times bobot\ aspekn)$ |
| Indeks SPBE | Indeks SPBE merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis<br><br>Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 3 domain, 7 | | $\boldsymbol{Indeks\ SPBE} = \sum ND\ j \times BD\ j$<br><br>• *NDj* adalah nilai indeks domain ke-*j*;<br>• *BDj* adalah nilai bobot domain ke-*j*. |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | aspek, dan 35 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018. | | |
| Rasio kemandirian daerah | Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total<br><br>pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. | a. PAD<br>b. Total pendapatan<br><br>Transfer ke daerah | Rumus :<br><br>a. Rasio PAD terhadap total pendapatan<br><br>Rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan |
| Persentase Desa Mandiri | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi desa-desa di suatu wilayah yang telah mencapai status mandiri | **Desa Mandiri:** Dalam konteks ini, desa mandiri merujuk pada desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan yang baik, aksesibilitas yang memadai, serta administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Paralegal.id mendefinisikan desa mandiri sebagai desa yang memiliki semua aspek tersebut secara memadai. | (Jumlah Desa Mandiri / Total Desa) * 100% |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | **Total Desa:** Total desa adalah jumlah seluruh desa yang ada di wilayah yang menjadi objek perhitungan, misalnya satu kecamatan, satu kabupaten, atau seluruh provinsi.<br><br>**Perhitungan:** Persentase desa mandiri dihitung menggunakan rumus | |
| Indeks Gini | Rasio Gini atau indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1.<br><br>Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan bernilai 1 saat 1 individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa | Kriteria ketimpangan :<br><br>a. Lebih kecil dari 0.4: tingkat ketimpangan rendah<br>b. Antara 0.4-0.5: tingkat ketimpangan moderat<br>c. Lebih tinggi dari 0.5: tingkat ketimpangan tinggi | Rumus :<br><br>$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} [fp_i(fc_i + fc_{i-1})]$<br><br>Keterangan :<br><br>GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)<br><br>$fp_i$ : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | penduduk tidak memiliki apa-apa. Rasio Gini didasarkan pada pengukuran luas kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari variabel pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. | | $fc_i$ : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i<br><br>$fc_{i-1}$ : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1) |
| Tingkat kemiskinan | Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. | | |
| Tingkat pengangguran terbuka | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja - 15 tahun ke atas). | | Rumus :<br><br>TPT = (Jumlah Pengangguran/Jumlah Angkatan Kerja)*100% |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persentase dari penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. | • **Angkatan Kerja:** Merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan. Ini mencakup mereka yang bekerja penuh waktu, paruh waktu, atau | TPAK = (Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) * 100% |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | sedang mencari pekerjaan.<br>• **Penduduk Usia Kerja:** Umumnya didefinisikan sebagai penduduk berusia 15 tahun ke atas, namun bisa berbeda tergantung pada peraturan atau kebijakan di suatu negara atau wilayah.<br>• **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK):** Rumusnya adalah: | |
| Laju pertumbuhan ekonomi | LPE memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. | | Rumus :<br>$r = \frac{Y_{it\,x\,100}}{Y_{i\,(t-1)}} - 100$ |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | | Keterangan :<br><br>r = Laju pertumbuhan ekonomi (%)<br><br>Yit = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)<br><br>Yi(t-1) = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal) |
| Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB | Mengacu pada seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam total nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah. Secara operasional, ini diukur dengan membandingkan nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total PDRB, biasanya dinyatakan dalam persentase. | 1. **PDRB (Produk Domestik Regional Bruto):**<br><br>Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah (daerah) selama periode tertentu (biasanya satu tahun).<br><br>2. **2. Sektor Industri Pengolahan:**<br><br>Kegiatan ekonomi yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, baik melalui proses mekanis, kimia, atau manual, dengan tujuan | Kontribusi (%) = (Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan / Total PDRB) * 100%<br>• **Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan:** Total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua kegiatan industri pengolahan dalam wilayah tersebut.<br>• **Total PDRB:** Total nilai tambah dari semua sektor ekonomi dalam wilayah tersebut. |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | meningkatkan nilai tambah produk.<br>3. **3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan:** Perbandingan antara nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total PDRB, yang dihitung sebagai berikut: | |
| PDRB Per Kapita | Pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. PDRB Perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. | | |
| Daya beli | Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan | | Rumus Paritas Daya Beli : |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Besaran nilai tingkat daya beli (purchasing power parity/PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik. | | $PPP_j = \prod_{i=1}^{m} \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m},$<br><br>Keterangan :<br><br>$p_{ik}$ : harga komoditas *i*<br><br>$p_{ij}$ : harga komoditas *i* di kab/kota *j*<br><br>*M* : jumlah komoditas |
| Persentase Pertumbuhan Investasi | Persentase perubahan nilai investasi suatu periode terhadap periode sebelumnya, yang dihitung untuk mengukur tingkat pertumbuhan investasi dari waktu ke waktu. Ini sering digunakan untuk melihat seberapa besar peningkatan atau penurunan investasi dalam periode tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam persentase. | **1. Investasi:**<br><br>Merupakan penanaman modal dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.<br><br>**2. Periode:**<br><br>Merujuk pada jangka waktu tertentu, misalnya tahunan, kuartalan, atau bulanan, yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan investasi. | ((Nilai Investasi Periode Sekarang - Nilai Investasi Periode Sebelumnya) / Nilai Investasi Periode Sebelumnya) * 100% |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | **3. Nilai Investasi:**<br><br>Merupakan total nilai investasi pada periode tertentu, bisa dalam bentuk nilai uang (misalnya Rupiah) atau nilai aset lainnya.<br><br>**4. Persentase Pertumbuhan:**<br><br>Dihitung dengan membandingkan selisih nilai investasi antara dua periode (periode sekarang dikurangi periode sebelumnya) dengan nilai investasi pada periode sebelumnya, lalu dikalikan 100%. | |
| Tingkat Inflasi (%) | persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) suatu periode terhadap periode sebelumnya, yang mengukur tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. | **Variabel**: Inflasi, diukur dalam bentuk persentase.<br><br>**Indikator**: Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). | **((IHK periode ini - IHK periode sebelumnya) / IHK periode sebelumnya) * 100%**<br><br>• IHK periode ini:<br>**Nilai IHK pada periode waktu yang ingin dihitung inflasinya (misalnya, bulan ini, tahun ini).**<br>• IHK periode sebelumnya: |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | **Pengukuran**: Perubahan persentase IHK dari satu periode ke periode lain (misalnya, bulanan, kuartalan, atau tahunan).<br><br>**Skala**: Rasio.<br><br>**Sumber Data**: Biasanya bersumber dari data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. | **Nilai IHK pada periode waktu sebelumnya (misalnya, bulan lalu, tahun lalu).**<br>• ((IHK periode ini - IHK periode sebelumnya) / IHK periode sebelumnya):<br>**Menghitung selisih IHK antara dua periode dan membaginya dengan IHK periode sebelumnya.** |
| Indeks Ketahanan Pangan | Indeks Ketahanan Pangan adalah Ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan. | Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada:<br>a) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global;<br>b) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi;<br>c) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; | Rumus :<br>$Y_j = \sum_{n=1}^{n} a_i X_{ij}$<br>Keterangan :<br>$Y_j$ = indeks ketahanan pangan kabupaten/kota ke- $j$ |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota. | $a_i$ = bobot masing-masing indikator<br><br>$X_{ij}$ = nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten ke-*j* |
| Indeks pembangunan manusia | IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup<br><br>sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita). | a. Indikator angka harapan hidup<br>b. Indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah<br>c. Indikator pengeluaran per kapita | Rumus :<br><br>$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$<br><br>Catatan :<br><br>Capaian IPM dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah (IPM < 60), Sedang (60 ≤ IPM < 70), Tinggi (70 ≤ IPM < 80), dan Sangat tinggi (IPM ≥ 80) |
| Indeks Pendidikan | Indeks Dimensi Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun; Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua | a. Harapan lama sekolah<br>b. Rata-rata lama sekolah | Rumus : |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah<br><br>(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah<br><br>diselesaikan dalam pendidikan formal. | | $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$<br>$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$<br>$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$<br><br>Keterangan :<br>HLS : Harapan Lama Sekolah<br>RLS : Rata-rata Lama Sekolah |
| Indeks Kesehatan | Indeks kesehatan adalah cerminan dari tingkat kesehatan di suatu<br><br>wilayah. Indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung berdasarkan ALH dan AMH | a. Anak Lahir Hidup<br>b. Anak Masih Hidup | Rumus :<br>$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | dengan metode Trussel dengan model West. | | Keterangan :<br><br>AHH : Angka Harapan Hidup<br><br>Kategori :<br><br>a. kategori rendah jika nilai indeks diantara 0,00 – 59,99,<br>b. kategori sedang jika nilai indeks diantara 60,00 – 69,99,<br>c. kategori tinggi jika nilai indeks di antara 70,00 – 79,99,<br>d. kategori sangat tinggi jika nilai indeks 80,00-100,00. |
| Indeks pembangunan gender | IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar<br><br>gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG merupakan<br><br>perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.<br><br>Hasil indeks ini diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. | a. Angka Harapan Hidup pada saat lahir, Laki-laki & Perempuan<br>b. Harapan Lama Sekolah; Laki-laki & Perempuan<br>c. Rata-rata Lama Sekolah; Laki-laki & Perempuan<br>d. Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan | Rumus :<br><br>$IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{laki-laki}}$<br><br>Interpretasi :<br><br>Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki<br><br>IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | | IPG = 100, capaian perempuan sama dengan laki-laki<br><br>IPG > 100, capaian perempuan > capaian laki-laki |
| Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, khususnya kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja | IKG diukur dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk data sensus, survei, dan administrasi. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan nilai IKG. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender yang terjadi. | IKG = [1 - (1/3) * (1 - Hk + 1 - Pk + 1 - Tk)]<br><br>• **Hk:**<br>Indeks kesehatan reproduksi (diperoleh dari rata-rata harmonis angka kematian ibu dan tingkat kelahiran remaja).<br>• **Pk:**<br>Indeks pemberdayaan (diperoleh dari rata-rata harmonis proporsi perempuan dalam parlemen dan tingkat pendidikan perempuan).<br>• **Tk:**<br>Indeks pasar tenaga kerja (diperoleh dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan). |
| Prevalensi Stunting | Persentase anak usia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting di suatu wilayah pada waktu tertentu | Anak dikatakan stunting jika tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan, yaitu z-score kurang dari -2 SD. Z-score adalah nilai yang menunjukkan | (Jumlah anak pendek dan sangat pendek / Jumlah seluruh anak yang diukur) x 100% |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | seberapa jauh tinggi badan seorang anak menyimpang dari rata-rata tinggi badan anak seusianya. Z-score -2 SD berarti tinggi badan anak berada dua standar deviasi di bawah rata-rata tinggi badan anak seusianya | |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. | | Rumus :<br><br>$r = \frac{1}{t} In \left(\frac{Pt}{Po}\right) x100$<br><br>Keterangan :<br><br>r = Laju pertumbuhan penduduk<br><br>t = Jangka waktu perhitungan<br><br>In = Eksponen dengan nilai 2,718281828<br><br>Pt = Jumlah penduduk pada tahun t |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | | Po = Jumlah penduduk pada tahun perhitungan |
| Indeks Infrastruktur Wilayah | mengukur komponen-komponen infrastruktur kewilayahan meliputi, 1) Infrastruktur layanan dasar yang mencakup akses air minum dan air limbah layak serta rumah layak huni; dan 2) Konektivitas wilayah yang mencakup kondisi jaringan jalan kabupaten dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang memadai dalam konteks layanan transportasi darat. Indeks ini mengacu pada beberapa referensi salah satunya terhadap penilaian indeks daya saing daerah oleh BRIN pada pilar 2: infrastruktur. | | (0,5 x Indeks Infrastruktur Layanan Dasar) + (0,5 x Indeks Konektivitas Wilayah) |
| Indeks Infrastruktur Layanan dasar | merupakan pengukuran terhadap capaian 3 sub indikator layanan dasar yaitu, 1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Kabupaten; 2) Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten yang Memiliki Akses Sumber | | (0,35 x Persentase Cakupan Air Minum Layak) + (0,35 x Persentase Cakupan Sanitasi Layak) + (0,3 x Persentase Masyarakat yang Menghuni Rumah Layak Huni) |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | Air Minum Layak; dan 3) Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak. Adapun rumus penghitungan indikator berdasarkan rata-rata realisasi ketiga sub-indikator dimaksud, yang bersumber dari perhitungan OPD terkait dalam hal ini Dinas PUPR dan Dinas PRKPP di mana hasil tersebut setidaknya mencerminkan terhadap pencapaian persentase rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. | | |
| Indeks Konektivitas Daerah (Poin) | Suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat interaksi antara daerah-daerah dalam suatu wilayah. Langkah-langkah menghitung indeks ini meliputi: a. menentukan variabel yang akan digunakan; b. mengumpulkan data; dan c. menghitung nilai indeks. Adapun variabel yang akan digunakan diantaranya jaringan jalan, terminal, dan PJU. | a. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten<br>b. Persentase kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal | (0,5 x Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten) + (0,5 x Persentase Persentase Kelengkapan Jalan yang Terpasang terhadap Kondisi Ideal) |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| Ketaatan terhadap Rencana tata Ruang | Hasil perhitungan dari jumlah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dibandingkan terhadap rencana peruntukan ruang dikali 100, di mana datanya diperoleh dari Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) yang melibatkan berbagai OPD yang ditetapkan melalui SK Bupati Lebak. | | $\frac{Jumlah\ Persetujuan\ KKPR\ x\ 100}{Rencana\ Peruntukan\ Ruang}$ |
| Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) | IKLH merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara,<br><br>Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan<br><br>menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. | a. Indeks Kualitas Air,<br>b. Indeks Kualitas Udara,<br>c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan,<br>Indeks Kualitas Air Laut | Rumus :<br><br>IKLH = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)<br><br>Keterangan:<br><br>IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br><br>IKA = Indeks Kualitas Air<br><br>IKU = Indeks Kualitas Udara<br><br>IKL = Indeks Kualitas Lahan<br><br>IKAL = Indeks Kualitas Air Laut |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin) | Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah dan juga sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sampah, di mana pengukurannya mencakup lingkup pengelolaan (penanganan dan pengurangan sampah) maupun yang berkenaan dengan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya | | Indeks Pengelolaan/Pemerintahan + Indeks Efektivitas & Efisiensi<br><br>(15% x Kebijakan) + (5% x Sumber Daya Manusia) + (5% x Sarana dan Prasarana) + (5% x Anggaran) + (5% x Sosialisasi dan Pemahaman) + (5% x Acceptability dan Implementasi) + (20% x Capaian terhadap Target dan Kapasitas) + (20% x Efisiensi Anggaran) + (10% x Kota Bersih) + (10% x Indeks Kualitas Air, Komponen dari IKLH) |
| Indeks Kualitas Air | dihitung menggunakan indeks pencemar atau pollution index (IP) dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah, dan hilir daerah aliran sungai (DAS) | diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coliform, pH, dan NO3-N | ISQA = I TEMP * (I BOD + I TSS + I DO + I COND)<br><br>ISQA = Indeks Kualitas Air Sederhana<br>I TEMP, I BOD, I TSS, I DO, I COND = Indeks untuk masing-masing parameter (suhu, BOD, TSS, DO, dan konduktivitas). |
| Indeks Kualitas Udara | | perhitungannya hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO2 dan SO2, karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia yang dimana parameter NO2 mewakili emisi dari transportasi yang menggunakan bahan bakar bensin dan | diukur berdasarkan parameter-parameter: SO2 dan NO2 |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | | parameter SO2 mewakili emisi dari industri dan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya; | |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin) | Mengkombinasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi dan aspek rehabilitas yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami sehingga tidak hanya memperhitungkan tutupan lahan namun juga mewakili isu hijau. | diukur berdasarkan luas tutupan lahan hutan dan non hutan. | IKTL = 100 - ((84.3 - (TL x 100)) x 50 / 54.3<br><br>TL = LTL / LW<br><br>• **IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan):** Nilai yang dihasilkan dari perhitungan, menunjukkan tingkat kualitas tutupan lahan.<br>• **TL (Tutupan Lahan):** Persentase tutupan lahan yang mencakup hutan dan vegetasi non-hutan.<br>• **LTL (Luas Tutupan Lahan):** Luas total area yang ditutupi oleh vegetasi, baik hutan maupun non-hutan.<br>• **LW (Luas Wilayah):** Luas total area yang diukur, mencakup seluruh wilayah yang diteliti. |
| Indeks risiko bencana | Pengkajian risiko bencana merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin | Penentuan indeks risiko bencana (R) dilakukan dengan menggabungkan | Rumus : |

| Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi | Definisi Operasional | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|
| | timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung dengan<br><br>mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana diterbitkan oleh BNPB. Setiap tahun dilakukan oleh kabupaten/kota | nilai indeks bahaya (H), kerentanan (V), dan kapasitas (C) | $Risk = (Hazard^{*} Vulnerability^{*} (1 - Capacity))^{1/3}$<br><br>Keterangan :<br><br>R = indeks risiko bencana<br><br>H = nilai indeks bahaya<br><br>V = kerentanan<br><br>C = kapasitas |

### 4.2.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator ini dapat berupa kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Berikut Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029:

**Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029.**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| **I** | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | poin | 60,27 | 73,9 | 74,15 | 74,41 | 74,66 | 74,91 | 75,16 | |
| 2 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 72,76 | 73,19 | 73,69 | 74,2 | 74,72 | 75,25 | 75,6 | |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 74,47 | 76,91 | 77,31 | 77,71 | 78,11 | 78,51 | 78,91 | |
| 4 | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | % | 75,24 | 75,54 | 76,02 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | |
| 5 | Rasio Penduduk | % | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| 6 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | 18,3 | 18,49 | 18,68 | 18,87 | 19,06 | 19,25 | 19,44 | |
| 7 | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0,29 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,85 | 0,9 | 1 | |
| 8 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | (%) | 2,52 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | |
| 9 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh | % | 21,97 | 23,95 | 25,84 | 28,2 | 30,6 | 32,92 | 35,05 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Pengumpulan Sampah | | | | | | | | | |
| 10 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,74 | 23,61 | 30,15 | |
| 11 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,11 | 1,7 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | |
| 12 | Konsumsi Listrik per Kapita | Kwh/Kapita | 900 | 900 | 900 | 920 | 940 | 975 | 1.000 | |
| 13 | Kepadatan Penduduk | Orang/km2 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | |
| 14 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 185,64 | 172,27 | 167,62 | 162,98 | 158,33 | 153,69 | 149,04 | |
| 15 | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | - | 16,84 | 17,33 | 17,82 | 18,32 | 18,81 | 19,3 | |
| 16 | Indeks Ketahanan Pangan | poin | 72,76 | 73,19 | 73,69 | 74,2 | 74,72 | 75,25 | 75,6 | |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Gini | Poin | 0,257 | 0.252-0.256 | 0.249-0.255 | 0.246-0.254 | 0.243-0.253 | 0.240-0.252 | 0.237-0.251 | |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 68,33 | 68,8 | 69,44 | 70,07 | 70,71 | 71,35 | 71,99 | |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | % | 8,44 | 8.10-8.31 | 7.71-8.09 | 7.32-7.88 | 6.94-7.66 | 6.55-7.45 | 6.16-7.23 | |
| 4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | 2,95 | 4.79-5.79 | 4.80-5.80 | 4.82-5.82 | 4.85-5.85 | 6.68-7.68 | 6.69-7.70 | |
| 5 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 81,22 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 6 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,567 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | |
| 7 | Prevalensi Stunting | % | 32,4 | 28,9 | 25,3 | 21,6 | 17,1 | 14,4 | 12,1 | |
| 8 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 6,61 | 6,86 | 7,14 | 7,42 | 7,69 | 7,97 | 8,25 | |
| 9 | Indeks Akses Keuangan Daerah | Indeks | 3,06 | 3,17 | 3,23 | 3,28 | 3,33 | 3,39 | 3,41 | |
| 10 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 51,79 | 53,32 | 54,85 | 57,91 | 59,44 | 59,44 | 67,9 | |
| 11 | Literasi Membaca | poin | 67,45 | 67,66 | 67,87 | 68,08 | 68,29 | 68,5 | 68,71 | |
| 12 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) | (%) | 59,24 | 59,3 | 59,5 | 59,65 | 59,83 | 60 | 60 | |
| 13 | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | 73,99 | 74,26 | 74,53 | 74,8 | 75,07 | 75,34 | 75,61 | |
| 14 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | (%) | 70,73 | 70,73 | 71 | 71,15 | 71,25 | 71,5 | 71,75 | |
| 15 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | % | 77,75 | 80 | 83 | 86,5 | 89 | 92,5 | 95 | |
| 16 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,1 | 12,17 | 12,24 | 12,31 | 12,39 | 12,46 | 12,53 | |
| 17 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 54,9 | 55,1 | 55,6 | 56,1 | 56,6 | 57,1 | 57,6 | |
| 18 | PDRB Per Kapita | Rp. Juta Per Tahun | 25,97 | 26,48 | 27,8 | 29,12 | 30,44 | 31,76 | 31,97 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 19 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6,22 | 6.23-6.79 | 6.05-6.54 | 5.87-6.29 | 5.68-6.04 | 5.50-5.79 | 5.32-5.54 | |
| 20 | Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang diakui | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 21 | Numerasi | poin | 49,68 | 50,37 | 51,06 | 51,75 | 52,44 | 53,13 | 53,82 | |
| 22 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 60.84:60.84 | 60.84:61.7 | 61.7:62.5 | 62.5:63.3 | 63.3:64.15 | 64.15:65 | 65:65.85 | |
| 23 | Daya Beli | Rupiah | 9.280.000 | 9.430.000 | 9.580.000 | 9.730.000 | 9.880.000 | 10.030.000 | 10.180.000 | |
| 24 | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | 55,72 | 55,82 | 55,92 | 56,02 | 56,12 | 56,22 | 56,32 | |
| **III** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Infrastruktur Wilayah | Angka | 66,63 | 66,82 | 67,07 | 68,57 | 68,83 | 69,09 | 69,34 | |
| 2 | Persentase Desa Mandiri | % | 6,18 | 7,35 | 7,65 | 7,65 | 7,94 | 7,94 | 8,24 | |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 72,82 | 73,94 | 75,06 | 76,18 | 77,3 | 78,42 | 79,54 | |
| 4 | Kontribusi PDRB Kabupaten | % | 4,28 | 4,3 | 4,41 | 4,53 | 4,64 | 4,75 | 4,82 | |
| 5 | Persentase Sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi | % | 25 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 6 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | (%) | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | |
| 7 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 9,54 | 9,75 | 9,98 | 10,22 | 10,47 | 10,71 | 10,96 | |
| 8 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | Persentase | 75,94 | 75,96 | 76,01 | 76,09 | 76,18 | 76,26 | 76,34 | |
| 9 | Rasio Kewirausahaan | Persentase | 0,045 | 0,046 | 0,047 | 0,048 | 0,049 | 0,05 | 0,052 | |
| 10 | Ekspor Barang dan Jasa | % PDRB | 9,13 | 9,74 | 10,29 | 10,91 | 11,66 | 12,55 | 13,59 | |
| 11 | jumlah Kegiatan/Industri yang melibatkan EBT | Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | Tingkat Inflasi | (%) | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 13 | Angka Ketergantungan | % | 45,53 | 45,42 | 45,29 | 45,12 | 44,95 | 44,74 | 44,49 | |
| 14 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 48,52 | 49,09 | 49,66 | 50,24 | 50,81 | 51,39 | 51,4 | |
| 15 | Persentase Pertumbuhan Investasi | % | 7,69 | 5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |
| 16 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 4,8 | 5 | 5,01 | 5,22 | 5,43 | 5,64 | 5,65 | |
| 17 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | % PDRB | 6,09 | 6,1 | 6,15 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,35 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 18 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | (%) | 9,54 | 9,75 | 9,98 | 10,22 | 10,47 | 10,71 | 10,96 | |
| 19 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | 75,94 | 75,96 | 76,01 | 76,09 | 76,18 | 76,26 | 76,34 | |
| 20 | Indeks Pendidikan | poin | 0,556 | 0,556 | 0,57 | 0,584 | 0,598 | 0,612 | 0,626 | |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai SAKIP | poin | 78,98 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 3,98 | 4,1 | 4,15 | 4,2 | 4,25 | 4,3 | 4,35 | |
| 3 | Indeks Integritas Nasional | Persentase | 73,6 | 74,5 | 74,6 | 74,7 | 74,8 | 74,9 | 75 | |
| 4 | Indeks Pemerintah Digital | Nilai | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 3 | |
| 5 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,45 | 3,48 | 3,5 | 3,52 | 3,55 | 3,57 | 3,6 | |
| 6 | Persentase Penegakan Perda | % | 98,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase Capaian Aksi HAM | % | 93,06 | 94 | 94,05 | 95 | 95,05 | 96 | 96,05 | |
| 8 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 80,05 | 80,1 | 80,14 | 80,21 | 80,27 | 80,35 | 80,5 | |
| 9 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten | Nilai | 62,45 | 70 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | |
| 10 | Survei Penilaian Integritas | Poin | 73 | 74,5 | 74,6 | 74,7 | 74,8 | 74,9 | 75 | |
| **V** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **AA** | **1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase GuruYang Memenuhi Kualifikasi S.1/D-IV | % | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,22 | 97,24 | 97,26 | 97,28 | |
| 2 | Persentase Guru Yang Besertifikat Pendidik | % | 60 | 60,15 | 60,2 | 60,22 | 60,24 | 60,26 | 60,28 | |
| 3 | APM SD | % | 99,35 | 99,4 | 99,45 | 99,47 | 99,49 | 99,51 | 99,53 | |
| 4 | Persentase Siswa yang dibina di bidang Bahasa dan Sastra | % | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 5 | Presentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok) | % | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,22 | 97,24 | 97,26 | 97,28 | |
| 6 | APK PAUD | % | 50,2 | 50,25 | 50,27 | 50,29 | 50,31 | 50,33 | 50,35 | |
| 7 | APM SMP | % | 77,8 | 77,9 | 78 | 78,02 | 78,04 | 78,06 | 78,08 | |
| 8 | APK SMP | % | 90,1 | 99,15 | 99,2 | 99,22 | 99,24 | 99,26 | 99,28 | |
| **AB** | **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | Orang | 11,77 | 12,62 | 11,63 | 10,97 | 10,46 | 9,96 | 9,5 | |
| 2 | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | 126,6 | 122 | 109 | 97 | 86 | 77 | 75 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 52,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | % | 93,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 39,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 58,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan | % | 93,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | | | | | |
| 9 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 78,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 84,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) | % | 60 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | |
| 12 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 78,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 13 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 92,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan | % | 83,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | kesehatan bayi baru lahir | | | | | | | | | |
| 15 | Angka Kematian Balita | Per 100.000 Kelahiran Hidup | 2,81 | 15 | 13,8 | 13,1 | 12,51 | 11,9 | 11,5 | |
| 16 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 96,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 17 | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | Persentase Legalitas Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 21 | Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar | % | 86,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 22 | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | % | 42,69 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | |
| 23 | Indeks Nasional Mutu (RSUD) | poin | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 24 | Persentase Desa ODF | % | 38,84 | 38,84 | 43,19 | 47,54 | 51,88 | 56,23 | 60,58 | |
| 25 | Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 26 | Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar | % | 73,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 27 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 28 | Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan | % | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
| 29 | Persentase pangan industri rumah tangga dan farmasi yang aman | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Persentase keluarga sehat | % | 26,5 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 31 | Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 32 | Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya | % | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 100 | 100 | |
| 34 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | % | 4,86 | 4,84 | 4,82 | 4,8 | 4,78 | 4,76 | 4,74 | |
| 35 | Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar | % | 68,87 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | |
| 36 | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. | % | 2,33 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 37 | Prevalensi Kekurangan Gizi | % | 2,56 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | |
| 38 | Indeks Keluarga Sehat | poin | 0,27 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 39 | Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS) dari Puskesmas ke Rumah Sakit 150 Orang / 10000 | % | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 40 | Indeks Nasional Mutu (Puskesmas) | poin | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 41 | Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
| 42 | Persentase Tingkat Capaian SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 43 | Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA | % | 100 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | |
| 44 | Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas | % | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| **AC** | **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase layanan informasi jasa kontruksi | % | 100 | 80 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 2 | Persentase Penataan | Persentase | 67,74 | 71,62 | 78,07 | 81,3 | 84,53 | 87,76 | 90,99 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Bangunan dan Lingkungan | | | | | | | | | |
| 3 | Indeks Kinerja Sistem Irigasi | poin | 71,93 | 72,05 | 72,66 | 72,72 | 72,79 | 72,88 | 72,95 | |
| 4 | Rumah tangga dengan akses air minum layak | % | 75,24 | 75,54 | 76,02 | 76,50 | 77,00 | 77,50 | 78,00 | |
| 5 | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | % | 74,86 | 74,87 | 74,90 | 74,93 | 74,95 | 74,98 | 75,01 | |
| 6 | Persentase Dokumen RDTR yang Tersusun | % | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 10,71 | 14,29 | 17,86 | 21,43 | |
| 7 | Rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak | % | 73,69 | 73,75 | 73,94 | 74,13 | 74,32 | 74,51 | 74,7 | |
| 8 | Persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik | % | 12,76 | 22,06 | 24,45 | 26,85 | 29,24 | 31,64 | 34,03 | |
| 9 | Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik | % | 80,29 | 82,48 | 84,67 | 86,91 | 89,15 | 91,39 | 93,63 | |
| 10 | Persentase TPA/TPST dalam Kondisi Baik | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman | % | 18,3 | 18,49 | 18,68 | 18,87 | 19,06 | 19,25 | 19,44 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 12 | Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman | % | 29,9 | 30,4 | 30,9 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | |
| **AD** | **1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat | % | 89,02 | 89,02 | 37,8 | 39,37 | 40,94 | 42,52 | 44,09 | |
| 2 | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten | % | 100,00 | 98,96 | 97,91 | 96,87 | 95,82 | 94,78 | 93,73 | |
| 3 | Peningkatan Cakupan Akses Rumah Layak Huni | % | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | |
| 4 | Persentase Fasilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Akibat Program Pemerintah | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| **AE** | **1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | % | 90,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Poin | 78,95 | 79 | 79,5 | 79,75 | 80 | 80,5 | 80,75 | |
| 3 | Persentase Penduduk di Kawasan Rawan | % | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Bencana yang memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana | | | | | | | | | |
| 4 | Persentase Warga Negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Poin | 83,29 | 83,4 | 83,55 | 83,65 | 83,75 | 83,85 | 84 | |
| 6 | Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kewenangan Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **AF** | **1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | Persentase | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Kekerasan yang tertangani | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | Persentase | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kesejahteraan Sosial | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | Persentase | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | | | | | | | | | |
| 9 | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Persentase | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi | Persentase | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | Persentase anak terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | % | 91 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 13 | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan | % | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Pelayanan Pemulangan | | | | | | | | | |
| 14 | Persentase lanjut usia terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | % | 90 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | % | 97,73 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 17 | Persentase Tingkat Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan | % | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Persentase Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS | % | 99,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Pengungsi/Penyintas Korban Bencana | | | | | | | | | |
| 20 | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | % | 97,47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | % | 93,63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **AG** | **2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun | % | - | - | 100 | - | - | - | 100 | |
| 2 | Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak | % | 8,6 | 9 | 9,5 | 11,3 | 12,5 | 14 | 15,5 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3 | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | % | 23 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | |
| 4 | Produktivitas Tenaga Kerja | Juta Rupiah/Tenaga Kerja | 50.983.909,51 | 51.250.000 | 52.550.000 | 53.750.000 | 54.850.000 | 55.500.000 | 56.250.000 | |
| **AH** | **2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persentase | 40,97 | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 | Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | % | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | |
| 3 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Indeks Perlindungan Anak (IPA) | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 4 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Layanan Komprehensif | | | | | | | | | |
| 5 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Indeks | 51,96 | 55 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| 6 | Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan atau Penyusunan Kebijakan | % | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |
| 7 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Indeks | 66,43 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| 8 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | % | 57,53 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| 9 | Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Proporsi Perempuan dalam Bidang Pembangunan | % | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 11 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | % | 0.0089:0.0089 | 0.0089:0.0089 | 0.0089:0.0089 | 0.0079:0.0079 | 0.0079:0.0079 | 0.0079:0.0079 | 0.0069:0.0069 | |
| **AI** | **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Persentase Jumlah Cadangan Pangan | Persentase | 49,33 | 51,92 | 54,51 | 57,1 | 59,69 | 62,28 | 64,87 | |
| 2 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | % | 39,71 | 39,46 | 39,21 | 38,96 | 38,71 | 38,46 | 38,21 | |
| 3 | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | % | 93,2 | 93,4 | 93,6 | 93,8 | 94 | 94,2 | 94,4 | |
| 4 | Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan | Skor | 84,97 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | |
| 5 | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | Persentase | 97,18 | 97,19 | 97,2 | 97,25 | 97,3 | 97,35 | 97,4 | |
| **AJ** | **2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Persentase penyelesaian penataan aset dan akses reforma agraria | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| **AK** | **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 (%) | % | 31,37 | 32 | 34 | 35,24 | 36,45 | 37,04 | 38,53 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2 | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup | % | 56,67 | 60 | 63,64 | 64,29 | 66,67 | 68,75 | 72,22 | |
| 4 | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan persetujuan lingkungan (%) | % | 60,78 | 62 | 64 | 66,67 | 68,22 | 70,37 | 72,48 | |
| 5 | Persentase MHA yang mendapatkan pemberdayaan/ Kemitraan/ pendampingan/ penguatan | % | 25 | 37,5 | 37,5 | 44,44 | 55,56 | 66,67 | 77,78 | |
| 6 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % | 21,97 | 23,95 | 25,84 | 28,2 | 30,6 | 32,92 | 35,05 | |
| 7 | Persentase Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat | % | 22,73 | 53,33 | 53,33 | 60 | 66,67 | 73,33 | 80 | |
| 8 | Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup | % | 81,75 | 81,77 | 81,8 | 81,85 | 81,9 | 81,95 | 82 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 9 | Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan perencanaan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Persentase RTH | Persentase | 9,5 | 9,5 | 9,55 | 9,56 | 9,58 | 9,59 | 9,6 | |
| **AL** | **2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 98 | 96 | 98,01 | 98,03 | 98,04 | 98,05 | 98,06 | |
| 2 | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan | Persentase | 88 | 88,24 | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 3 | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | % | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | |
| 4 | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 6 | Persentase Akta Perkawinan yang | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Diterbitkan bagi yang Melaporkan | | | | | | | | | |
| 7 | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **AM** | **2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | Persentase | 42,9 | 50,9 | 56,5 | 62,6 | 68,5 | 77,6 | 85,3 | |
| 3 | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | Persentase | 11,8 | 17,6 | 23,5 | 29,4 | 35,3 | 41,2 | 47,1 | |
| **AN** | **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | Rata-Rata Jumlah Anak | 2,1 | 2,15 | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 2,11 | 2,10 | |
| 2 | Presentase Terbinanya | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | |
| 3 | Angka Prevalensi kontrasepsi modern/ Modern Contraceptive (mCPR) | % | 74,5 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
| 4 | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) | % | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | |
| 5 | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 25-27.7 | 22-24.9 | 19-21.9 | 17-19.9 | 14-16.9 | 10-13.9 | 6-9.9 | |
| 6 | Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | % | 20,7 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
| **AO** | **2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Lintas untuk Jaringan Jalan | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase Jaringan Jalan Kabupaten yang Dilengkapi Perlengkapan Jalan Dasar | % | 24,09 | 24,75 | 25,42 | 26,09 | 26,76 | 27,42 | 28,09 | |
| 3 | Persentase Kendaraan Umum Wajib Uji | % | 23,61 | 24,11 | 24,17 | 24,24 | 24,32 | 24,4 | 24,51 | |
| 4 | Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang Beroperasi | % | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **AP** | **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **AQ** | **2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Aset/Omset Usaha Mikro yang sudah di Fasilitasi | % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2 | Persentase Koperasi Sehat | % | 3,46 | 2,58 | 3,46 | 3,71 | 4,76 | 5,81 | 6,85 | |
| 3 | Persentase Koperasi Aktif | Persentase | 8,04 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 29 | |
| 4 | Rasio Volume Usaha Koperasi | % | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | |
| 5 | Persentase Meningkatnya Koperasi yg Berkualitas | % | 18,61 | 18,98 | 19,07 | 19,1 | 19,25 | 19,34 | 19,43 | |
| 6 | Persentasi Pengurus dan Pengawas Koperasi yang Bersertifikat Kompetensi | % | 1,2 | 4,2 | 6,2 | 8,2 | 10,2 | 12,2 | 13,2 | |
| **AR** | **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | |
| 1 | Realisasi Total terhadap Target Investasi | Persentase | 133,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | Persentase | -38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Yang Melaporkan | % | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Kegiatan Usaha (LKPM) | | | | | | | | | |
| 5 | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **AS** | **2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Statistik | Nilai | 2,38 | 2,39 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |
| **AT** | **2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **AU** | **2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | Persentase | 2,62 | 2,81 | 2,9 | 2,95 | 3 | 3,05 | 3,1 | |
| 2 | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan | % | 25,37 | 25,37 | 29,85 | 31,34 | 32,83 | 34,32 | 35,82 | |
| 3 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Persentase | 11,11 | 11,52 | 11,66 | 11,85 | 11,97 | 12,18 | 12,41 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 4 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Persentase | 7,79 | 7,79 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | |
| 5 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | Persentase | 0 | 0 | 11,25 | 12,86 | 14,46 | 16,07 | 16,07 | |
| **AV** | **2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 0 | 61,96 | 66,29 | 67,62 | 68,9 | 70,35 | 73,16 | |
| 2 | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | Persentase | 0 | 7,69 | 15,38 | 23,07 | 30,77 | 46,15 | 47 | |
| **AW** | **2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah | Nilai | 50 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| **AX** | **3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan | % | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2 | Persentase Peningkatan Produksi Ikan Tangkap | % | 2,18 | 0,5 | 2,2 | 2,22 | 2,25 | 2,29 | 2,34 | |
| 3 | Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya | % | 2,93 | 1,86 | 2,93 | 2,94 | 2,95 | 2,96 | 2,97 | |
| 4 | Jumlah pelaku usaha yang diawasi | Angka | 5 | 3 | 12 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| **AY** | **3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | Persentase | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 | |
| 2 | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual | Persentase | - | - | 5,44 | 5,18 | 5,92 | 7,05 | 8,95 | |
| 3 | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi | Persentase | 52,64 | 52,64 | 61,74 | 62,92 | 63,63 | 64,32 | 64,43 | |
| 4 | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | Persentase | 3,94 | 3,95 | 5,06 | 8,43 | 8,89 | 9,18 | 9,35 | |
| **AZ** | **3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Prasarana | % | 89,78 | 90 | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,25 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan | % | 46,45 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | |
| 3 | Persentase penerapan GBP,GHP,atau GFP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase Kelompok ternak yang dibina | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | % | 125,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim | % | 89,78 | 90 | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,25 | |
| 8 | Cakupan pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | |
| 9 | Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan | % | 5,45 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,75 | 7 | |
| **BA** | **3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase penanganan pengaduan konsumen | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| 4 | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan | Persentase | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase Rekomendasi Usaha Perdagangan yang difasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **BB** | **3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya informasi industri | % | 10 | 10,05 | 10,1 | 10,15 | 10,2 | 10,25 | 10,3 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | secara lengkap dan terkini | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase Terlaksananya Pembangunan Sumber Daya Industri Berdasarkan RPIK | % | 18,18 | 18,18 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | |
| 3 | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri Yang Dikeluarkan | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **BC** | **4.01 - SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berjalan dengan Baik | % | 96,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu | % | 89,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **BD** | **4.02 - SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **BE** | **5.02 - KEUANGAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Kemandirian Daerah | Persentase | 21,99 | 22,04 | 22,09 | 22,14 | 22,19 | 22,24 | 22,29 | |
| 2 | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | Persentase | 1,44 | 1,63 | 1,82 | 2 | 2,31 | 2,57 | 2,8 | |
| 3 | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD | Persentase | 35,52 | 39,49 | 37,71 | 30 | 33,71 | 33 | 34,71 | |
| 4 | Persentase laporan keuangan tepat waktu | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | Persentase | 96,74 | 96,76 | 96,8 | 96,82 | 96,84 | 89,86 | 90,9 | |
| 6 | Persentase Penurunan SILPA | Persentase | 38,67 | 0,05 | 2,95 | 5,25 | 7,45 | 9,35 | 11,44 | |
| 7 | Persentase Alokasi Belanja | Persentase | 21,5 | 24,32 | 28,39 | 40 | 31,61 | 31,22 | 30,83 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Infrastruktur Pelayanan Publik | | | | | | | | | |
| **BF** | **5.03 - KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | % | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | Persentase Jabatan yang terisi berdasarkan perundang-undangan | % | 88,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **BG** | **5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi ASN | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | % | 51,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **BH** | **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **BI** | **7.01 - KECAMATAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Perundangan-perundangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan | poin | 81,48 | 84,7 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | |
| 4 | Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase Perdes APBDes sesuai dengan Peraturan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Perundang-Undangan | | | | | | | | | |
| **BJ** | **8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pembinaan Terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Pembinaan Terkait Ketahanan Ekososbud, Agama, dan P4GN | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | % | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | |
| 4 | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | % | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| 5 | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

# Bab 5 Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Lebak masa jabatan Tahun 2025-2030 yang disertai pendanaan selama 5 (lima) tahun serta memberikan arah pembangunan daerah melalui kerangka kerja arah kebijakan yang dianalisis secara terukur dalam berbagai aspek pengembangan wilayah dan pengembangan sektoral lainnya yang telah disusun secara teknokratik, menjaring aspirasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan, memperhatikan aspirasi politis, dan aspirasi top-down dan bottom-up melalui pendekatan secara tematik-holistik, integratif dan spasial.

RPJMD disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Lebak 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW Kabupaten Lebak dan juga memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Banten. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.

RPJMD menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lebak, yang disusun sebagai upaya membangun sinergi dan keterpaduan dengan rencana pembangunan nasional maupun provinsi. RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak. Monitoring dan evaluasi akan menjadi kunci untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan sepanjang periode RPJMD.